RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**

Kata Pengantar ..... **ii**

Daftar Isi ..... **iii**

BAB I. PENDAHULUAN ..... **Bab I - 1**

1.1. Latar Belakang ..... Bab I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... Bab I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan ..... Bab I - 5
1.4. Sistematika Penulisan Renja ..... Bab I - 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU ..... **Bab II -1**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPDD ..... Bab II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..... Bab II - 9
2.2.1. Sekretaris DPRD ..... Bab II - 9
2.2.2. Kepala Bagian Umum ..... Bab II - 10
2.2.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ..... Bab II - 11
2.2.2.2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol ..... Bab II - 11
2.2.3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan ..... Bab II - 13
2.2.3.1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah ..... Bab II - 13
2.2.3.2. Sub Bagian Perundang-Undangan ..... Bab II - 14
2.2.4. Bagian Keuangan ..... Bab II - 14
2.2.4.1. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi ..... Bab II - 15
2.2.4.2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukaan ..... Bab II - 16
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ..... Bab II - 17
2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Berdasarkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..... Bab II - 17
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..... Bab II - 21
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... Bab II - 22

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..... **Bab III - 1**

3.1. Tujuan dan Sasaran OPD ..... Bab III - 1
3.2. Program dan Kegiatan OPD ..... Bab III - 2

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..... **Bab IV - 1**

4.1. Memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ..... Bab IV - 1

BAB V.PENUTUP ..... **Bab V - 1**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, aparatur Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2025 menguraikan program, rencana kegiatan dan sasaran tahunan berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa *(clean and good governance)* serta berorientasi kepada hasil *(result oriented)* sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi OPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pangkalpinang, Juli 2025

Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG SEKRETARIAT DPRD

Drs. AKHMAD ELVIAN

NIP 196510141989031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinangmempunyai kegiatan yang prioritas dalam mendukung program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1) Renja OPD merupakan dokumen program dan kegiatan yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi walikota terpilih yang telah tertuang dalan RENSTRA 2024 - 2026 Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dan telah tertuang juga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2) Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
3) Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025, yang mana ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024 – 2026 Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.

Penyusunan dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 - 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja ini juga merupakan bangian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

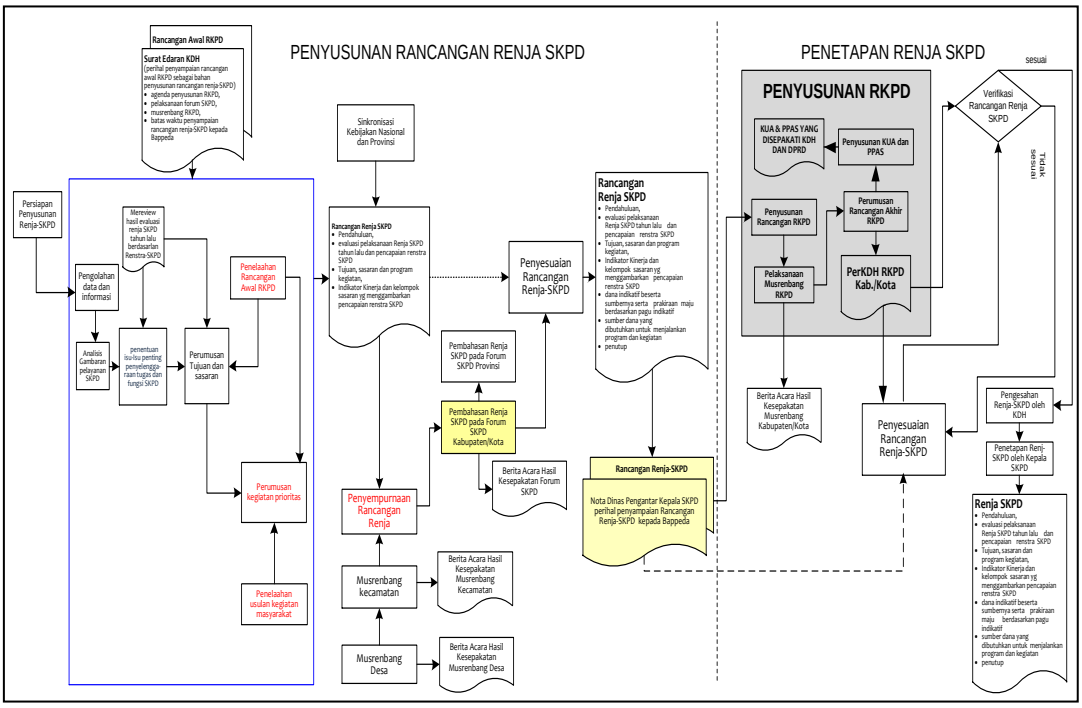

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, trakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Ecaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang;
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor Tahun Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2024. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu

Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rancana Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah

Menjelasakan Program dan Kegiatan beserta besaran dana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hingga tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam satu bidang urusan wajib yaitu urusan wajib pemerintah fungsi penunjang administrasi.

Hasil Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Di tahun 2024 dilaksanakan 2 (Dua) program dengan 56 (Lima Puluh Enam) kegiatan prioritas. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2023, diantaranya adalah sebagai berikut :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
4	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
4	**2**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
4	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	2	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	**2**	**1**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4	**2**	**1**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**
4	**2**	**2**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Perda
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
4	**2**	**2**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4	**2**	**2**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses
4	**2**	**2**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
4	**2**	**2**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2024 dituangkan dalam bentuk matrik sebagaimana tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPD tahun 2024 (tahun n - 1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD Penanggung jawab
										Target RKPD Tahun 2023 (tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2024(tahun n - 2)	Tingkat realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n -1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**4**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD

	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD

	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD

	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Laporan Layanan Administrasi DPRD Persentase Laporan Layanan Administrasi DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
2	**4**	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD. Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD..	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD

	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pangkalpinang, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang merupakan OPD yang menangani urusan pemerintah fungsi penunjang administrasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok yaitu. Secara spesifik, mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi penetapan Peraturan Derah, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah, tugas Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang diarahkan untuk membantu DPRD Pangkalpinang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mempunyai fungsi yaitu:

a. Penyelenggaraan Sekretariat DPRD,
b. penyediaan administrasi keuangan DPRD,
c. penyediaan rapat-rapat DPRD,
d. penyediaan dan penggordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) serta Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

2.2.1. Sekretaris DPRD

(1). Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan administratif dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

(3). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris DPRD membawahi:

a. Bagian Umum;

b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan

c. Bagian Keuangan;

2.2.2 Kepala Bagian Umum

(1). Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program di lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;

b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;

c. pelaksanaan lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;

d. monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;

e. pengoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan dan pengelolaan bahan informasi daerah lingkup Sekretariat DPRD dan;

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

2.2.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Umum di lingkup Umum dan Kepegawaian.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyiapan data lingkup Umum dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
b. pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Umum dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
c. pelaksanaan di lingkup Umum, meliputi Penatausahaan naskah dinas dan kearsipan; penyiapan bahan penyusunan rencana, program serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD; pengaturan dan pengelolaan perlengkapan Sekretariat DPRD; pelayanan pimpinan dan anggota DPRD serta pengaturan pemeliharaan lingkungan rumah dinas pimpinan dan sekretariat DPRD; pengaturan akomodasi pimpinan dan anggota DPRD; pemberian pelayanan, pengaturan, pengelolaan,pengadaan perlengkapan dan sarana prasarana pimpinan dan anggota DPRD.
d. penyelenggaraan dan pelaksanaan dilingkup kepegawaian meliputi perencanaan dan pengelolaan data kepegawaian (mutasi dan pembinaan, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, diklat dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD; pengadministrasian keanggotaan DPRD; pembinaan dan bimbingan teknis penatausahaan kepegawaian pada bagian di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Umum dan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD

2.2.2.2 Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

(1). Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

(2). Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bagian Umum dilingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

a. Penyiapan data lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di Lingkungan Sekretariat DPRD;
b. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di Lingkungan Sekretariat DPRD;
c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol meliputi fasilitas hubungan kerjasama DPRD dengan instansi pemerintah dan lembaga sosial lainnya; pemberian pelayanan dan fasilitas aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD; pemberian pelayanan dan fasilitas informasi pers yang ditujukan kepada masyarakat; penyelenggaraan keprotokolan, memfasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan serta anggota DPRD; pelayanan administrasi perjalanan dinas pimpinan, anggota DPRD dan sekretariat DPRD; pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat DPRD; pendokumentasian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dan sekretariat DPRD; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan
d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di Lingkungan Sekretariat DPRD.

2.2.3 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

(1). Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2). Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan.

(3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program dilingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan;
b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan;
c. pelaksanaan lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan.
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan; dan
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD

(4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
b. Sub Bagian Perundang-undangan;

2.2.3.1 Sub Bagian Persidangan dan Risalah

(1). Sub Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

(2). Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dilingkup Persidangan dan Risalah.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :

a. penyiapan data lingkup Persidangan dan Risalah;
b. pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Persidangan dan Risalah;
c. penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Persidangan dan Risalah meliputi pelayanan teknis pengaturan dan persiapan persidangan atau rapat; penyusunan konsep risalah hasil persidangan atau rapat; fasilitasi penyusunan dan perumusan produk hukum daerah.
d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Persidangan dan Risalah.

2.2.3.2 Sub Bagian Perundang-undangan

(1). Sub Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

(2). Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dilingkup Perundang-undangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan data lingkup Perundang-undangan
b. pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perundang-undangan;
c. penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Perundang-undangan, dokumentasi dan pengarsipan hasil persidangan atau rapat; dan
d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perundang-undangan.

2.2.4 Bagian Keuangan

(1). Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD

(2). Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD lingkup keuangan

(3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program dilingkup keuangan;
b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup keuangan;
c. pelaksanaan keuangan lingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan; dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan; dan
e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bagian Keuangan membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

a. , Anggaran dan Verifikasi;
b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;

2.2.4.1 Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi

(1). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Anggaran dan Verifikasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

(2). Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan dilingkup Anggaran dan Verifikasi.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan data lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi;
b. pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi;
c. pelaksanaan lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, anggaran dan verifikasi meliputi penyiapan bahan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian

Kinerja, rencanan umum penganggaran, rencana kerja anggaran / dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat DPRD), Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (laporan Evaluasi Renja dan Renstran Sekretariat DPRD), Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Sekretariat DPRD);

d. Pelaksanaan lingkup anggaran dan verifikasi meliputi melaksanakan verifikasi (pemeriksaan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku); dan

d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan verifikasi.

2.2.4.2 Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan

(1). Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud salam Pasal 51 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

(2). Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan dilingkup Perbendaharaan dan Pembukuan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

a. penyiapan data lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;

b. melaksanakan petunjuk teknis lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;

c. pelaksanaan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan meliputi pembayaran gaji; tunjangan pimpinan dan anggota DPRD; pengaturan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan Sekretaris DPRD; serta penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD; dan

d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang akan dibahas antara lain:

1. kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan capaian realisasi anggaran.

2.3.1 Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan

Sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, maka tugas utama Sekretariat DPRD sebagaimana ketentuan yang berlaku, melaksanakan urusan wajib melalui program dan kegiatan pada tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 2.3.1
KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

Kode Rekening					Uraian	Realisasi
					A. LRA	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**	**66.372.669.241**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**27.398.452.341**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	-

4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	-
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.550.892.496**
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.550.892.496
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-
4	02	01	2.02	0006	Pengelola dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	-
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**105.830.916**
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.830.916
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**621.716.261**
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.198.000
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	396.515.500
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.073.250
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.528.000
4	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.950.000
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.451.511

4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**157.150.000**
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	157.150.000
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**876.095.537**
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
4	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	181.366.681
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.285.000
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	619.443.856
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**720.876.249**
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.683.773
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	503.536.340
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.656.136
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Belanja Barang dan Jasa	-
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**15.077.439.046**
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.490.939.046
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	586.500.000

4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**1.288.451.836**
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	991.906.836
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	296.545.000
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**38.974.216.900**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**10.745.124.031**
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10.699.489.031
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	10.010.000
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	30.500.000
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**4.832.847.139**
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	642.324.498
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.580.522.641
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.230.000.000
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	380.000.000
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat**	**104.757.500**
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	-
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	104.757.500
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**1.815.850.092**
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.815.850.092
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitas Tugas DPRD**	**21.475.638.138**

4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20.586.153.310
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	889.484.828

Merujuk pada Tabel 2.3.1 di atas dapat dianalisa bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang telah melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggaraan penunjang administrasi pemerintahan, namun ada beberapa kegiatan di dalam program yang tidak terlaksana

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang secara umum, terdapat beberapa isu penting sebagai berikut:

TABEL: 2.4.1
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

PERUMUSAN ISU –ISU PENTING SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG	ASPEK KAJIAN
• Etos kerja dan disiplin Pegawai belum baik	**SUMBER DAYA MANUSIA**
• Pengelolaan aset masih belum tertib	**PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNG**
• Sistem pengendalian internal belum sepenuhnya dilakukan dengan baik	**TATA KELOLA ORGANISASI**
• Penerapan penggunaan teknologi informasi belum maksimal dilakukan	**SISTEM DATA DAN INFORMASI**

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2017

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang secara umum, terdapat beberapa isu penting sebagai berikut:

TABEL: 2.4.2
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD KOTA PANGKALPINANG

PERUMUSAN ISU –ISU PENTING DPRD KOTA PANGKALPINANG	ASPEK KAJIAN
• Rekomendasi temuan aparat pengawas internal maupun eksternal, hasil audit dan survei belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD	**FUNGSI PENGAWASAN**
• Kebijakan penganggaran belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan penyediaan atas belanja yang diarahkan; yang bersifat mengikat/wajib; yang ditentukan persentasenya sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan	**FUNGSI PENGANGGARAN**
• Ketentuan dalam Perda belum sepenuhnya ditegakkan • Masih banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah	**FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2017

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2023. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Sekretariat DPRD yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan tugas pokoknya sebagai OPD yang melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka disusun visi dan misi Sekretariat DPRD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Visi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah :

"MEWUJUDKAN SEKRETARIAT DPRD SEBAGAI LEMBAGA YANG ANDAL, KREDIBEL, DAN PROAKTIF DALAM MENDUKUNG KINERJA DPRD".

Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan dalam bentuk misi sesuai dengan peran dan tupoksi Sekretariat DPRD, sehingga misi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia
2. Memfasilitasi kerjasama (yang baik) antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Dari misi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mempunyai tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan (masyarakat/pemangkukepentingan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien
2. Meningkatkan/memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD

Dengan sasaran strategis yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan yang transparan, aspiratif, partisipatif dan menjadi solusi pemecahan permasalahan-permasalahan masyarakat

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

Visi : "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur)			
Misi : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatknya implementasi reformasi, birokrasi pemerintahan daerah	Tepenuhinya jumlah produk hukum yang dihasilkan.	Meningkatnya kualitas penetapan perda dan pembentukan perda melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD yang efektif sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Peningkatan kualitas perda yang dihasilkan dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi

3.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2006-2026 dalam Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 terlampir dalam Tabel 3.2.2 di bawah ini.

Tabel 3.1.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				72.787.934.514,00	59.469.458.453,00	55.744.536.594,60	-17.043.397.919,40							1.000.000,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.787.934.514,00	59.469.458.453,00	55.744.536.594,60	-17.043.397.919,40							1.000.000,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD				72.787.934.514,00	59.469.458.453,00	55.744.536.594,60	-17.043.397.919,40							1.000.000,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 85 % Nilai	100 85 % Nilai	29.388.150.271,00	28.895.325.005,00	29.313.532.373,60	-29.387.150.271,00							1.000.000,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*perangkat daerah tepat waktu*	100 %	100 %	3.500.000,00	420.000,00	420.000,00	-3.080.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.000.000,00
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			500.000,00
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000,00
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*	100 %	100 %	9.531.336.401,00	9.363.955.353,00	9.410.902.546,60	-120.433.854,40			-	- -	-		0,00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	9.529.336.401,00	9.363.715.353,00	9.410.662.546,60	-118.673.854,40	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			0,00
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	60.000,00	60.000,00	-440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*	100 %	100 %	105.000.000,00	125.710.898,00	125.710.898,00	20.710.898,00			-	- -	-		0,00
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.710.898,00	15.710.898,00	-14.289.102,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00

4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang	75.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	35.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	845.962.400,00	1.039.312.900,00	1.010.573.075,00	164.610.675,00			-	- -	-		0,00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.972.400,00	25.374.900,00	12.687.450,00	-17.284.950,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.000.000,00	28.938.000,00	14.469.000,00	-21.531.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	74.990.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	-68.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	450.000.000,00	613.760.000,00	496.518.375,00	46.518.375,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00

4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	170.000.000,00	285.658.250,00	185.658.250,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*	100 %	100 %	525.530.000,00	495.180.000,00	495.180.000,00	-30.350.000,00			-	- -	-		0,00
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	195.600.000,00	195.600.000,00	-4.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	250.530.000,00	224.580.000,00	224.580.000,00	-25.950.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	1.580.000.000,00	948.335.792,00	948.335.792,00	-631.664.208,00			-	- -	-		0,00
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.260.000.000,00	628.335.792,00	628.335.792,00	-631.664.208,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik*	100 %	100 %	979.080.000,00	398.625.176,00	398.625.176,00	-580.454.824,00			-	- -	-		0,00
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	101.680.000,00	69.501.696,00	69.501.696,00	-32.178.304,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	677.400.000,00	229.148.480,00	229.148.480,00	-448.251.520,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	49.975.000,00	49.975.000,00	-25.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	100 %	100 %	15.450.000.000,00	15.222.645.350,00	15.622.645.350,00	172.645.350,00			-	- -	-		0,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	15.000.000.000,00	14.877.645.350,00	14.877.645.350,00	-122.354.650,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	-105.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00	400.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Laporan Layanan Administrasi DPRD*	100 %	100 %	367.741.470,00	1.301.139.536,00	1.301.139.536,00	933.398.066,00			-	- -	-		0,00
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														

		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2 Laporan	2 Laporan	67.741.470,00	1.001.139.536,00	1.001.139.536,00	933.398.066,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda**	**100 %**	**100 %**	**43.399.784.243,00**	**30.574.133.448,00**	**26.431.004.221,00**	**-43.399.784.243,00**							**0,00**
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	20 Perda/Peraturan DPRD	20 Perda/Peraturan DPRD	14.757.342.695,00	7.659.720.148,00	6.659.720.148,00	-8.097.622.547,00			-	- -	-		0,00
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	14.757.342.695,00	7.659.720.148,00	6.659.720.148,00	-8.097.622.547,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														

		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD. Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD..*	100 %	100 %	6.709.105.696,00	6.021.769.376,00	3.878.640.149,00	-2.830.465.547,00			-	- -	-		0,00
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	5.150.000.000,00	4.150.000.000,00	2.006.870.773,00	-3.143.129.227,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	19 Orang	19 Orang	1.135.692.624,00	1.434.559.104,00	1.434.559.104,00	298.866.480,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00

4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	418.413.072,00	418.413.072,00	418.413.072,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	18.797.200,00	18.797.200,00	13.797.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.*	100 %	100 %	135.000.000,00	127.435.000,00	127.435.000,00	-7.565.000,00			-	- -	-		0,00
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	130.000.000,00	126.235.000,00	126.235.000,00	-3.765.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Persentase Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah*	100 %	100 %	865.556.000,00	1.994.648.016,00	1.994.648.016,00	1.129.092.016,00			-	- -	-		0,00

4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	865.556.000,00	1.994.648.016,00	1.994.648.016,00	1.129.092.016,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD.*	100 %	100 %	20.932.779.852,00	14.770.560.908,00	13.770.560.908,00	-7.162.218.944,00			-	- -	-		0,00
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	92 Dokumen	92 Dokumen	20.932.779.852,00	13.932.779.852,00	12.932.779.852,00	-8.000.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	0,00	837.781.056,00	837.781.056,00	837.781.056,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00
JUMLAH					**72.787.934.514,00**	**59.469.458.453,00**	**55.744.536.594,60**	**196.716.203.431,82**							**1.000.000,00**

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perubahan perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan, siapa yang melakukan, metoda pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.
2. Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.
3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaan.
4. Menjabarkan rencana kerja penyusunan RKPD.

Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadaidan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan,capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD dan menuangkannya dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan pemantauan.
2. Melakukan pengumpulan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel 3 memperlihatkan contoh check list untuk inventarisasi sumber dan jenis data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan RKPD.

Penyiapan Daftar Isi Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan

RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hinggapenyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi

a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
b. Rancangan kerangka ekonomi daerah
c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD.

Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD. Pagu indikatif SKPD dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan.

Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Dari langkah-langkah diatas maka Sekretariat DPRD telah menyiapkan rancangan awal kegiatan ditahun 2025 seperti tabel berikut :

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2025	
				TARGET PERUBAHAN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
1	2	3	4	5	6
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			**55.744.536.595**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**55.744.536.595**
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**55.744.536.595**
1,	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**100 85 % Nilai**	**29.313.532.374**
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*perangkat daerah tepat waktu*	100 %	420.000
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	60.000
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	60.000
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	60.000
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	60.000
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	60.000
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	60.000
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	60.000
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*	100 %	9.410.902.547
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	9.410.662.547
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	60.000
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	60.000
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	60.000
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	60.000
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*	100 %	125.710.898
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.710.898
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	110.000.000
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah*	100 %	1.010.573.075
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.687.450
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.469.000
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.240.000
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	496.518.375

	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	285.658.250
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	35.000.000
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	30.000.000
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.000.000
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*	100 %	495.180.000
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	195.600.000
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	224.580.000
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	75.000.000
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*	100 %	948.335.792
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.000.000
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	628.335.792
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik*	100 %	398.625.176
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	69.501.696
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	229.148.480
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	49.975.000
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	100 %	15.622.645.350
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			

			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	14.877.645.350
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	295.000.000
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	450.000.000
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Laporan Layanan Administrasi DPRD*	100 %	1.301.139.536
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2 Laporan	1.001.139.536
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3 Laporan	300.000.000
2,	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda**	**100 %**	**26.431.004.221**
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	20 Perda/Peraturan DPRD	6.659.720.148
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	-
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	6.659.720.148
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			

			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD* *Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD.* *Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD..*	100 %	3.878.640.149
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	-
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.006.870.773
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	19 Orang	1.434.559.104
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	418.413.072
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen	18.797.200
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat* *Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.*	100 %	127.435.000
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			

			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1.200.000
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	126.235.000
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Persentase Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah*	100 %	1.994.648.016
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 Dokumen	1.994.648.016
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD.*	100 %	13.770.560.908
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	92 Dokumen	12.932.779.852
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	837.781.056
	J U M L A H				**55.744.536.595**

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. DPRD Kota Pangkalpinang yang terkait sebagai unsur penunjang langsung jalannya pemerintahan dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2016. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci kedalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2025 diarahkan untuk mencapai beberapa misi Pemerintah Kota sebagaimana penjelasan sebelumnya dengan mengacu pada sasaran strategis serta program prioritas.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD lebih pada aspek administrasi dan teknis. Secara administrasi, permasalahan yang muncul adalah lemahnya sistem administrasi dengan belum sempurnanya penerapan standar operasional prosedur. Sedangkan secara teknis, minimnya SDM yang berkualifikasi di bidang perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa menjadi kendala yang cukup serius. Namun dapat diatasi dengan adanya LPSE dan ULP. Kedepan, diharapkan kelemahan - kelemahan tadi dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi agar dapat terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu, koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri.

RENJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, perubahan kebijakan pemerintah, serta kebutuhan aktual masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat. Perubahan rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi landasan operasional yang lebih adaptif, responsif, dan akuntabel bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari saran, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari perangkat daerah terkait maupun elemen masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan bermanfaat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pangkal Pinang, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pangkal Pinang, 2 Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkal Pinang

EFRAN, S.STP., M.TrIP
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 198207072001121005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud Dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penyusunan Renja Perubahan	5
BAB II	Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2025 sampai dengan Triwulan I	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
BAB III	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	17
BAB IV	Penutup	22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Walikota dalam menegakkan Perda, SK Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004 untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Rapublik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;.

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);

16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);

18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);

19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 157);

20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);

21 Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 252).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan

Sistematika Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, meliputi:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan I Tahun 2025 yang memuat target capaian /realisasi indikator program /kegiatan/sub kegiatan serta permasalahan pelaksanaan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan

rencana kerja program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

BAB V Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Adapun capaian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana berikut:

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi keuangan 24%
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian realisasi keuangan 57%
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian realisasi keuangan 29%
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian realisasi keuangan 10%
   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian realisasi keuangan 30%
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian realisasi keuangan 11%
   b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian realisasi keuangan 6%
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian realisasi keuangan 41%
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian realisasi keuangan 12%
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian realisasi keuangan 9%

II PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi keuangan 0%
   b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian realisasi keuangan 0%
   c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan capaian realisasi keuangan 0%
   d. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian realisasi keuangan 0%
   e. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan dengan capaian realisasi keuangan 33%
   f. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan capaian realisasi keuangan 32%
   g. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah dengan capaian realisasi keuangan 0%
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota terdiri dari sub kegiatan:

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan capaian realisasi keuangan 0%
b. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah dengan capaian realisasi keuangan 16%
c. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan capaian realisasi keuangan 36%

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
   a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan capaian realisasi keuangan 0%

III PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
   a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi keuangan 0%
   b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi keuangan 26%
   c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan capaian realisasi keuangan 0%
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan capaian realisasi keuangan 0%
3. Investigasi Kejadian Kebakaran terdiri dari sub kegiatan:
   a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran dengan capaian realisasi keuangan 0%
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran terdiri dari sub kegiatan:
   a. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dengan capaian realisasi keuangan 0%

TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	010501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Sakip Perangkat D e r a h (Dengan Satuan: Nilai)	68	6.632.484.690		1.688.895.788		0		0	0	0	0	1.688.895.788	-	25	BIDANG SEKRETARIAT
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	90		22								22		24		BIDANG SEKRETARIAT
2		010501201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	0													Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan
3		105012010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	2	0													Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan
		105012010002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0													Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan
4		105012010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaia Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	0													Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan
5		010501202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan: %)	100	6.019.801.550	25	1.554.202.654		0		0	0	0	25	1.554.202.654	25	25	Sub Koordinator Keuangan
6		105012020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	53	6.019.801.550	53	1.554.202.654							53	53	100	25	Sub Koordinator Keuangan
7		105012020005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	0									0	0	0	0	Sub Koordinator Keuangan
8		010501206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan: %)	100	319.866.900	25	93.218.161		0		0	0	0	25	93.218.161	25	25	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
9		105012060001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	11.566.600		6.564.800							0	6.564.800	0	0	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
10		105012060004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2	83.254.000		24.457.000							0	24.457.000	0	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
11		105012060005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	25.046.300		25.495.000							0	25.495.000	0	102	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
12		105012060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	4	200.000.000	1	596.645.861							1	596.645.861	25	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
13		010501208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan: %)	100	215.043.160	25	35.242.049		0		0		0	25	35.242.049	25	25	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
14		105012080002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	4	109.800.000	1	121.007.201							1	121.007.201	25	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
15		105012080003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	4	56.000.000	1	3.150.000							1	3.150.000	25	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
16		105012080004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	4	49.243.160	1	19.984.848							1	19.984.848	25	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
17		010501209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan: %)	100	77.773.080	25	8.982.924		0		0		0	25	8.982.924	25	25	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
18		105012090001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	1	53.773.080		6.232.924							0	6.232.924	0	12	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
19		105012090002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	26	24.000.000	6	2.750.000							6	2.750.000	23	6	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					12,222	25,464	
												PREDIKAT KINERJA							
20	-	010502	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	7.400.551.660	25	2.265.542.656		0		0		0	25	25	25	25	BIDANG SUMBERDAYA DAN LINMAS
21		010502201	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Gangguan Trantibum yang ditangani (Dengan Satuan: %)	100	6.949.621.660	25	2.151.092.656		0		0		0	25	25	25	25	Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN
				Persentase tersusunnya Laporan Penyelesaian dampak Penegakan Perda dan Perkada (Dengan Satuan: %)	100										0		0		Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN
				Persentase Tersusunya Laporan Koordinasi pelaksanaanTrantibum tingkat kota (Dengan Satuan: %)	100										0		0		Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN
22		105022010003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Dokumen)	4	31.300.000									0	0	0	0	Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25		105022010004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan: Dokumen)	4	376.200.000									0	0	0	0	Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN
26		105022010005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berhuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan: Orang)	50	54.831.600									0	0	0	0	Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN
27		105022010006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dengan Satuan: Dokumen)	4	4.366.200									0	0	0	0	Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN
		105022010015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Dengan Satuan: laporan)	225	6.339.808.360	65	2.110.892.656							65	2.110.892.656	29	33	Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN
		105022010016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Dengan Satuan: laporan)	100	124.115.500	25	40.200.000							25	40.200.000	25	32	Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN
28		105022010017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tertayani (Dengan Satuan: Laporan)	1	19.000.000									0	0	0	0	Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN
29		010502202	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada sesuai SOP (Dengan Satuan: %)	100	400.930.000	25	114.456.000		0		0		0	25	114.456.000	25	25	Sub Koordinator PENYULUHAN
30		105022020010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan: laporan)	4	17.600.000									0	0	0	0	Sub Koordinator KERJASAMA
31		105022020011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Dengan Satuan: Laporan)	4	122.050.000	1	20.000.000							1	20.000.000	25	1	Sub Koordinator PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
32		105022020012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan: laporan)	4	261.280.000	1	94.450.000							1	94.450.000	25	1	Sub Koordinator UMUM DAN KETENTRAMAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
29		010502203	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif (Dengan Satuan: %)	100	50.000.000	-	0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator PENYULUHAN
30		105022030006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Dengan Satuan: Laporan	3	50.000.000	-								0	0	0	0	Sub Koordinator KERJASAMA
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					25,000	25,000	
												PREDIKAT KINERJA							
33	-	010504	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Dengan Satuan: %)	100	4.462.065.520	25	1.151.122.204		0		0		0	25	25	25	25	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
34		010504201	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan: %)	100	4.386.745.520	25	1.151.122.204		0		0		0	25	25	25	25	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
35		105042010001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dengan Satuan: Dokumen)	1	2.400.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
36		105042010002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Laporan)	1	4.371.745.520									0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
37		105042010003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan: Dokumen)	1	12.600.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
38		010504202	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Terlaksanenya Infeksi Peralatan Proteksi Kebakaran (Dengan Satuan: %)	100	10.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
39		105042020002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dengan Satuan: Dokumen)	1	10.000.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
40		010504203	Investigasi Kejadian Kebakaran			30.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
41		105042030001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian (Dengan Satuan: Dokumen)	1	30.000.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
42		010504204	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			35.320.000		0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
43		10504204O002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Dengan Satuan: Desa/Kelurahan)	42	35.320.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	25,000	25,000	
PREDIKAT KINERJA																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	20,741	25,155	
PREDIKAT KINERJA																			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan I Satpol PP Kota Pangkal Pinang pada Perubahan Renja 2025 mengalami perubahan.

Tabel berikut ini menggambarkan secara umum perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan dan jumlah pagu total OPD dalam Renja Perubahan 2025 dibandingkan dengan Renja Awal 2025. Terlihat dari table dimaksud jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Kota Pangkal Pinang mengalami perubahan.

Adapun Pagu Induk Tahun 2025 Satpol PP Kota Pangkal Pinang sebesar Rp 9.911.803.734 berubah menjadi Rp 21.208.169.323,10. Terdapat penambahan sebesar Rp 11.296.365.589,10 (Sebelas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen).

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Sub Kegiatan / Jumlah Pagu Total Opd	Renja Awal	Perubahan Renja	Bertambah/ Berkurang
1	Jumlah Program	3	3	
2	Jumlah Kegiatan	12	12	
3	Jumlah Sub Kegiatan	31	32	1
4	Jumlah Total Pagu	Rp 9.911.803.734	Rp 21.208.169.323,10	Rp 11.296.365.589,10

Untuk mengetahui lebih lanjut perubahan program dan kegiatan pada Satpol PP Kota Pangkal Pinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**9.911.803.734,00**	**18.495.161.870,00**	**21.269.169.323,10**	**11.296.365.589,10**							**19.154.953.050,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.911.803.734,00**	**18.495.161.870,00**	**21.269.169.323,10**	**11.296.365.589,10**							**19.154.953.050,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETENTRAMAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.911.803.734,00**	**18.495.161.870,00**	**21.269.169.323,10**	**11.296.365.589,10**							**19.154.953.050,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				**68** **90 Nilai** **Nilai**	**68** **90 Nilai** **Nilai**	**7.363.861.634,00**	**6.632.484.690,00**	**7.173.949.583,10**	**295.548.355,00**							**7.670.409.880,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	2.610.000,00	0,00	0,00	-2.610.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-			9.740.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	1.170.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				5.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselesaikannya laporan keuangan perangkat sesuai SAP*				100 %	100 %	6.696.107.234,00	6.019.901.550,00	6.461.158.395,10	765.051.161,10			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-			5.585.212.989,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	57 Orang/bulan	5.695.507.234,00	6.019.901.550,00	6.461.158.395,10	765.651.161,10	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				5.585.212.989,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	354.310.400,00	318.856.800,00	415.307.100,00	50.996.700,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-			619.045.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.9001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.014.600,00	11.566.500,00	8.564.800,00	-3.449.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				12.014.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.9002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	115 Paket	0,00	0,00	169.510.000,00	169.510.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.9004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	140.743.500,00	83.254.800,00	56.409.200,00	-84.334.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				144.028.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.9005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.552.300,00	25.049.300,00	13.523.100,00	-15.029.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				35.002.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.9006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	175,000,000.00	200,000,000.00	139,996,000.00	-36,000,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			175,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya *Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	974,464,000.00	215,043,160.00	216,192,392.00	-758,271,608.00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1,089,351,500.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	91,300,000.00	109,800,000.00	109,800,000.00	28,500,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			79,200,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	41,370,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	14,630,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			159,510,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	852,964,000.00	48,243,160.00	59,392,392.00	-801,701,608.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			554,641,500.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya *Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	366,379,000.00	77,770,050.00	91,251,696.00	-275,108,304.00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		363,050,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44,910,000.00	53,773,350.00	57,251,696.00	13,251,696.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			49,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	8 Unit	312,360,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	-288,360,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			322,910,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**1,017,983,600.00**	**7,400,551,663.00**	**8,967,652,612.00**	**-43,467,260.00**							**1,874,579,460.00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kasus Gangguan Trantibum yang ditangani Persentase terpusunnya Laporan Penyelesaian dampak Penegakan Perda dan Perkada Persentase Tersusunya Laporan Koordinasi pelaksanaan Trantibum tingkat kota*				100 %	100 %	1,669,536,600.00	6,949,521,652.00	8,241,732,612.00	6,574,974,012.00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1,609,721,709.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	22,750,000.00	31,300,000.00	31,300,000.00	8,550,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			22,750,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000.00	376,200,000.00	447,715,364.00	347,715,364.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			125,450,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkaitan Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	246,761,600.00	54,831,600.00	77,331,600.00	-169,430,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			269,884,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	4 Dokumen	4,367,000.00	4,369,200.00	4,368,200.00	-809.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			4,370,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				225 laporan	5 laporan	1,170,000,000.00	6,339,908,350.00	7,569,118,648.00	6,439,118,648.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1,066,260,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Untuk Rasa dan Kenyamanan Massa yang Dilakukan Penindakan				105 Laporan	100 Laporan	110,980,000,00	124,115,500,00	152,000,900,00	41,020,900,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			111,007,700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanikelah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000,00	19,000,000,00	19,000,000,00	7,000,000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			19,000,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada sesuai SOP*				100 %	100 %	201,125,000,00	400,930,000,00	475,920,000,00	274,795,000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		214,854,700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0018	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20,100,000,00	17,650,000,00	17,600,000,00	-2,500,000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			19,435,700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	34,775,000,00	122,050,000,00	197,040,000,00	162,265,000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			35,400,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	146,280,000,00	261,280,000,00	261,280,000,00	115,000,000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			160,015,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase PPNS yang aktif*				100 %	100 %	50,000,000,00	50,000,000,00	50,000,000,00	0,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		50,000,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0008	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				3 Laporan	3 Laporan	50,000,000,00	50,000,000,00	50,000,000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			50,000,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**606,858,500,00**	**4,462,065,520,00**	**5,106,567,126,00**	**9,161,00**							**509,906,661,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran*				100 %	100 %	695,707,500,00	4,366,745,520,00	5,091,247,126,00	4,495,539,626,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		595,715,661,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	2,400,000,00	2,400,000,00	2,400,000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2,400,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	693,907,500,00	4,371,745,520,00	5,076,247,126,00	4,495,339,626,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			593,915,661,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2,400,000,00	12,650,000,00	12,500,000,00	10,250,000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2,400,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Persentase Terlaksannya Infeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*				100 %	100 %	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	0,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		10,000,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Sarpras/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			10,000,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	2.151.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	27.849.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.151.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.151.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	27.849.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.151.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	2.100.000,00	35.320.000,00	35.320.000,00	33.220.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				42 Desa/Kelurahan	42 Desa/Kelurahan	2.100.000,00	35.320.000,00	35.320.000,00	33.220.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	JUMLAH								**8.911.883.734,00**	**15.495.101.870,00**	**21.266.186.323,10**	**11.256.365.589,10**							**18.154.953.850,00**	

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Renja Perubahan Tahun 2025 diharapkan akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan, Visi dan Misi Daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 serta memacu tercapainya kualitas kinerja.

Pangkal Pinang, 2 Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkal Pinang

EFRAN, S.STP., M.Tr.IP
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 198207072001121005

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Rasakunda Kelurahan Sriwijaya Kota Pangkal Pinang (33134)

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800/19.1/KEP/SATPOL.PP/I/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran untuk penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Tim Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);

13. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);

14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);

15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Derah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 157);

16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk saudara-saudara yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tim Kerja Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Penanggungjawab;
b. Ketua;
c. Sekretaris;
d. Anggota.

KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:

a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
b. membagi peran anggota Tim Kerja Penyusunan Renja sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
d. memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja Penyusunan Renja;
e. melakukan pemantauan bahwa semua proses telah sesuai prosedur dan dilakukan pemantauan oleh Tim Kerja Penyusunan Renja; dan
f. melakukan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota Tim Kerja Penyusunan Renja.

KEEMPAT : Tim Kerja Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, c, d dan e mempunyai tugas:

a. Menghimpun semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025;
b. Mempersiapkan data-data yang diperlukan; dan
c. Menyusun RENJA (RKT, RKA dan DPA) tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG

PEMERINTAH KOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PANGKALPINANG

EFRAN, S.STP., M.Tr.IP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 198207072001121005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800/19.1/KEP/SATPOL.PP/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025
LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKAL PINANG

NO	POSISI DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang
2.	Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 3. Kepala Bidang Sumber Daya dan Linmas; 4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran; 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 6. Kasubbag Keuangan; 7. Staf Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

EFRAN, S.STP., M.Tr.IP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 198207072001121005

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga RENCANA KERJA (Renja) Kecamatan Taman Sari Tahun 2025 dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. RENJA ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Atas tersusunnya RENJA ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Plt.CAMAT TAMAN SARI,

DEKA SRI WAHIDAH,S.E.,M.Si
NIP. 198112282012122002

RENJA PERUBAHAN

KECAMATAN TAMAN SARI

KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2025 - 2026

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
KECAMATAN TAMAN SARI
TAHUN 2025

Alamat :Jalan Usman Ambon Kelurahan Kejaksaan
KecamatanTaman Sari Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp. (0717) 435494 KodePos : 33122

PEMERINTAHKOTA PANGKALPINANG

RENJA PERUBAHAN

KECAMATAN TAMAN SARI TAHUN

2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar isi.....ii
Keputusan Camat iii
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1-2
1.2 Landasan Hukum 3-4
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 7-11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....12-14
3.2 Program dan Kegiatan 15
BAB IV PENUTUP 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat menjadi Renja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penjabaran Renstra Kecamatan Taman Sari Periode 2024-2026. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Renja wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Taman Sari untuk tahun anggaran 2025. Renja merupakan penterjemahan dari program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Taman Sari Tahun 2024-2026 yang memuat program, kegiatan,lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan secara otomatis menyesuaikan dengan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Renja dimaksud, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang yang menjadi koordinator perencanaan di Kota Pangkalpinang dan juga dengan para pemangku kepentingan. Merujuk pada pasal 16 (enam belas) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut :

Persiapan penyusunan;

a.Rencana Kerja Kecamatan Taman Sari Tahun 2025

b. Penyusunan rancangan awal;

c. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. Perumusan rancangan akhir;

f. Penetapan.

Renja Kecamatan Taman Sari Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Taman Sari 2024-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang tahun 2025 yang serta mendasarkan pada RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025.Rencana Kerja Kecamatan Taman Sari berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Taman Sari tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Taman Sari mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja kecamatan Taman Sari merupakan acuan bagi kecamatan untuk memasukkan program dan

kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.

2. Renja Kecamatan Taman Sari merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja kecamatan Taman Sari.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja *Kecamatan Taman Sari* Tahun 2025, adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penepatan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-unndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 233 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kebupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Pangkalpinang;

13. Peraturan Walikota pangkalpinang Nomor 09.Tahun 2023 Tentang Rencana pembangunan Daerah Kota pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah kota pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144)

14. Peraturan Walikota pangkalpinang Nomor 18.Tahun 2024 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224) Tanggal 2 Juli 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Taman Sari, Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Taman Sari Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Taman Sari

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah *Kecamatan Taman Sari* sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Taman Sari
Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	5.162.083.520	100	4.953.482.836	100	95,959	SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		0		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
2		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	4.163.345.116	100	4.091.773.139	100	98,281	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
3		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	45	4.163.345.116	45	4.091.773.139	100	98,281	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
4		070101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	58.309.000	100	56.504.000	100	96,904	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
5		070101205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	3	58.309.000	3	56.504.000	100	96,904	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
6		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:laporan)	5	188.820.500	5	170.706.002	100	90,406	KASUBBAG KEPEGAWAIAN

7		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	15.459.000	1	9.609.000	100	62,158	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
8		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	59.229.500	1	55.169.500	100	93,145	KASI PELAYANAN UMUM
9		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	16.964.000	1	16.264.000	100	95,874	KASI PELAYANAN UMUM
10		070101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	10.459.000	2	4.359.000	100	41,677	KASI PELAYANAN UMUM
11		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	86.709.000	1	85.304.502	100	98,380	KASI PELAYANAN UMUM
12		070101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	202.725.000	1	179.393.000	100	88,491	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
13		070101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	202.725.000	4	179.393.000	100	88,491	KASI PEMBANGUNAN
14		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:laporan)	3	488.015.904	3	405.575.788	100	83,107	KASI PELAYANAN UMUM
15		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	86.959.000	4	25.471.500	100	29,291	KASI PELAYANAN UMUM
16		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	3	37.459.000	3	20.934.000	100	55,885	KASI PELAYANAN UMUM
17		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	363.597.904	4	359.170.288	100	98,782	KASI PELAYANAN UMUM

18		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:laporan)	2	60.868.000	2	49.530.907	100	81,374	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
19		070101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	30.459.000	1	22.590.500	100	74,167	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
20		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	30.409.000	2	26.940.407	100	88,594	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**75,000**	**95,959**	
				PREDIKAT KINERJA					**S**	**ST**	
21	**-**	**070102**	**P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (Dengan Satuan:%)**	**100**	**899.509.806**	**100**	**855.822.055**	**100**	**95,143**	**SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)**
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Opas Indah) (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)**
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)**
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Batin Tikal) (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)**
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)**
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kejaksaan) (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)**
27		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Dengan Satuan:laporan)	2	3.124.356.980	2	2.873.717.794	100	91,978	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Opas Indah) (Dengan Satuan:laporan)	2		2		100		LURAH OPAS INDAH
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:laporan)	2		2		100		LURAH GEDUNG NASIONAL
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Batin Tikal) (Dengan Satuan:laporan)	2		2		100		LURAH BATIN TIKAL
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:laporan)	2		2		100		LURAH RAWA BANGUN
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Kejaksaan) (Dengan Satuan:laporan)	2		2		100		LURAH KEJAKSAAN
28		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	5	7.959.000	5	7.809.000	100	98,115	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
29		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	5	3.116.397.980	5	2.865.908.794	100	91,962	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		LURAH OPAS INDAH
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		LURAH GEDUNG NASIONAL
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		LURAH BATIN TIKAL
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		LURAH RAWA BANGUN
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		LURAH KEJAKSAAN

30		070103205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Opas Indah) (Dengan Satuan:laporan)	1	50.000.000	0	0	0	0	LURAH OPAS INDAH
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:laporan)	1		0		0		LURAH GEDUNG NASIONAL
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Batin Tikal) (Dengan Satuan:laporan)	1		0		0		LURAH BATIN TIKAL
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Kejaksaan) (Dengan Satuan:laporan)	1		0		0		LURAH KEJAKSAAN
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:laporan)	1		0		0		LURAH RAWA BANGUN
31		070103205002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000	0	0	0	0	LURAH RAWA BANGUN
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		0		0		LURAH OPAS INDAH
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		0		0		LURAH GEDUNG NASIONAL
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		0		0		LURAH BATIN TIKAL
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		0		0		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									**100,000**	**90,529**	
PREDIKAT KINERJA									**ST**	**ST**	
32	**-**	**070105**	**P R O G R A M PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**150.459.000**	**100**	**148.669.000**	**100**	**98,810**	**SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)**

33		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	150.459.000	1	148.669.000	100	98,810	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
34		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	150.459.000	1	148.669.000	100	98,810	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**98,810**	
				PREDIKAT KINERJA					ST	ST	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)					**94,118**	**95,110**	
				PREDIKAT KINERJA					ST	ST	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	**- Tersedianya dana pada sub kegiatan sehingga kebutuhan kegiatan tahunan kecamatan bisa dicover**
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	**- 1. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tidak mencapai 100% kerena sesuai dengan tagihan koran** **- 2. penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik realisasi keuangan 29,29% tidak mencapai target karena sesuai dengan pembelian prabayar kebutuhan lampu untuk kantor yang masih beropasi dengan baik** **- 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor realisai keuangan 55,88 tidak mencapai target kerena perangkat yang ada di kecamatan masih berfungsi dengan baik sehingga tidak ada pergantian suku cadang menyeluruh** **- 4. sub penanganan covid yang tidak ada petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	**- Kegiatan Penangan Covid-19 Tingkat desa dan kelurahan tidak Terealisasi karena sudah tidak ada lagi kasus covid-19**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	**- Diharapkan tersedianya anggaran yang cukup pada sub**

EVALUASI,

Kota pangkalpinang, Tanggal 29-07-2024

CAMAT TAMANSARI KOTA PANGKALPINANG

DEKA SRI JAHIDAH,S.E.,M.Si

NIP. 19811228201212200 2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan *Kecamatan Taman Sari* adalah sesuai tabel berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Taman Sari
Kota Pangkalpinang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	indek kepuasan masyarakat (IKM)	100%		85%	90%	95%	95%	90	90%	90%	95%	95%	90	85%	90%	90%	90%	90
2	Presentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100%		85%	85%	90%	90%	90%	90%	95%	85%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	95%
3	presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%		85%	90%	90%	90%	90%	85%	90%	90%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	90%
4	presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		80%	85%	90%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	90%	85%	90%	90%	90%	90%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja Kecamatan Taman Sari akan berbenah diri untuk terus dapat meningkatkan kinerja kegiatan, karena itu pengelolaan pemerintahan diperlukan.

Penerapan manajemen pemerintahan seluruh pelaksanaan kegiatannya diarahkan pada sebuah proses bagaimana menciptakan efektivitas usaha secara efisien dan produktif dalam penerapan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Taman Sari dalam proses kegiatan program kerja kecamatan juga termaksimalkan fungsi manajemen pemerintahan yang tercakup dalam berbagai aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber daya pemerintahan dan kontrol pemerintahan yang kesemuanya dijalankan dalam koordinasi yang baik. Sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup pemerintah Kota Pangkalpinang, Kecamatan Taman Sari memiliki fungsi pelayanan umum dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku kecamatan memiliki urusan wajib yaitu:

1. Urusan Pemerintahan umum yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kepala daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Taman Sari telah menetapkan beberapa langkah pencapaian melalui penetapan program kerja, tujuan maupun sasaran yang semuanya diarahkan pada pencapaian visi dan misi kecamatan secara maksimal. Dalam proses pelaksanaan dilapangan meskipun telah direncanakan dengan baik, berbagai permasalahan timbul yang berpengaruh dalam kegiatan kerja terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman Sari.

   Permasalahan-permasalahan ini pada akhirnya berdampak pada kurang maksimalnya mekanisme program kerja yang telah direncanakan, dari beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan maupun program kerja kecamatan dan kelurahan yang paling dominan adalah masalah:

   a. Sumber daya aparatur pemerintah (SDM)

      Permasalahan sumber daya aparatur pemerintahan merupakan hal yang paling mendasar yang dihadapi oleh kecamatan dan kelurahan hampir

diseluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Pangkalpinang, mengingat saat ini pegawai pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan hampir sebagian besar tidak menguasai teknologi seperti komputer yang berdampak pada lambatnya informasi maupun laporan kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu kurangnya aparatur pemerintahan terutama di kelurahan-kelurahan, karena saat ini dikelurahan jumlah pegawai yang ada kurang memadai dan dalam sebagian pengurusan masa pensiun bahkan ada kelurahan yang terdiri dari 5 orang pegawai termasuk lurah, sehingga keadaan ini sangat tidak memungkinkan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

b. Disiplin Pegawai

Hal ini merupakan permasalahan klasik aparatur pemerintahan. Masalah disiplin pegawai terutama menyangkut kehadiran pegawai pada jam kantor sehingga akan sangat berpengaruh pada kemampuan pelayanan masyarakat ditingkat kelurahan. Tidak disiplinnya pegawai sering kali menyebabkan proses pelayanan publik memakan waktu lama karena pegawai yang bertugas dalam suatu urusan tidak berada ditempat.

c. Kurangnya sarana dan prasarana kerja

Sarana maupun prasarana kerja baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan telah menjadi bagian permasalahan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik maupun program kerja. Sarana yang ada saat ini sering menimbulkan hambatan tersendiri bagi pelaksanaan pelayanan publik terutama dikelurahan karena tak bisa dihindari realita dilapangan banyak kantor kelurahan yang tidak memenuhi syarat sehingga menimbulkan kesan kotor dan pengap akibat ruang kerja yang tidak representatif, dan kondisi bangunan kantor yang diperparah dengan adanya atap yang bocor pada saat hujan dan kurangnya sumber daya listrik yang tersedia di masing-masing kantor menyebabkan tidak maksimalnya fasilitas kerja yang ada, tentu semuanya berpengaruh terhadap kinerja kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.

Sejalan dengan paradigma yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menekankan pada otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Pemerintah Kecamatan Taman Sari sebagai bagian dari satuan kerja Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mempunyai paradigma yang sama dimana mengutamakan pelayanan publik yang prima dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu semuanya perlu didukung oleh perencanaan yang matang menyangkut segala hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kerja kecamatan kedepan, sehingga diperlukan analisi mendalam segala kemungkinan baik peluang maupun tantangan kedepan yang akan menjadi permasalahan bagi program kerja kecamatan kedepan yaitu:

a. Proses rekrutmen dan mutasi pegawai

   Proses rekrutmen pegawai yang selama ini diadakan seringkali kurang berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan dan kelurahan, hal ini berdasarkan realita dilapangan bahwa penempatan pegawai baru sering tidak menjangkau level kecamatan dan kelurahan dan untuk jangka panjang jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun dengan jumlah pegawai yang baru tidak seimbang, hal ini sangat berpengaruh bagi kecamatan dan kelurahan yang terus mengalami kekurangan pegawai serta tidak bertambahnya pegawai yang berkualitas ditingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu proses mutasi pegawai yang dilakukan sering kali tidak membawa perubahan yang berarti mengingat pegawai yang dimutasi merupakan pegawai yang **"bermasalah"**atau kurang secara etos kerja. Dari semua proses ini tentunya kedepan kecamatan dan kelurahan akan mengalami kesulitan untuk dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal, karena akan selalu mengalami permasalahan yang sama yakni kuantitas dan kualitas pegawai.

b. Koordinasi antar instansi

Permasalahan strategi kedepan yang akan menjadi kendala bagi pelaksanaan kegiatan dan program kerja kecamatan adalah masalah koordinasi antar intansi terkait, mengingat kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan umum saja tapi juga menjalankan fungsi pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan. Jadi cakupan kegiatan kecamatan sangatlah luas sehingga kedepan koordinasi dengan instansi terkait akan menjadi permasalahan tersendiri seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kualitas kegiatan masing-masing instansi, hal ini sering menimbulkan tumpang tindih informasi maupun kewenangan karena setiap instansi ingin mencapai target kerjanya masing-masing.

c. Tingkat partisipasi masyarakat

Dalam proses kegiatan pemerintahan maupun program kerja kecamatan terutama yang sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat atau kurang pedulinya masyarakat terhadap program kerja daerah maupun kecamatan. Realita dilapangan kurangnya respon masyarakat ini sebagian besar karena mobilitas masyarakat itu sendiri, tak bisa dipungkiri bahwa alasan ekonomi sering menjadi kendala karena masing-masing sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sementara itu kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Hal ini mendorong masyarakat untuk benar-benar efisien memanfaatkan waktu sehingga kurang peduli terhadap lingkungan sekitar.

d. Penguasaan teknologi dan informasi

Keberhasilan kecamatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu dukungan oleh beberapa faktor seperti perencanaan yang matang, pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal, kemampuan finansial maupun penguasaan teknologi dan informasi. Salah satu kunci keberhasilan adalah penguasaan teknologi dan informasi, seperti kita ketahui teknologi dan informasi memegang peranan penting, dimana untuk membuat suatu perencanaan yang baik kita membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat menganalisa data maupun permasalahan yang akan dihadapi dikemudian hari.

Dalam proses kegiatan yang dilaksanakan keberhasilan akan sangat ditentukan oleh bagaimana suatu perencanaan telah dipersiapkan dengan maksimal. Sudah menjadi suatu ketentuan bahwa teknologi dan informasi akan selalu berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Untuk aparatur daerah yang tertinggal dalam penguasaan teknologi dan informasi akan mengalami kesulitan dalam menjawab semua tantangan dan dalam memenuhi pelayanan masyarakat dimasa mendatang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RENJA RKPD tahun 2025 Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Tabel 2.4

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	pagu indikatif	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	4.529.198.824	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	4.529.198.824	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	2.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	2.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	4.526.698.824	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	4.526.698.824	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kecamatan taman sari	-	45 orang	4.525.698.824	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kecamatan taman sari	-	45 orang	4.525.698.824	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	kecamatan taman sari	-	2 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	kecamatan taman sari	-	2 Dokumen	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	26.059.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	26.059.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	26.059.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	26.059.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kecamatan taman sari	-	4 jenis	6.059.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kecamatan taman sari	-	4 jenis	6.059.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kecamatan taman sari	-	8 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kecamatan taman sari	-	8 Orang	20.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	187.195.775	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	187.195.775	
02.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	187.195.775	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	187.195.775	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kecamatan taman sari	-	1 paket	12.259.075	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kecamatan taman sari	-	1 paket	12.259.075	
	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kecamatan taman sari	-	-	459.000	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kecamatan taman sari	-	-	459.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kecamatan taman sari	-	1 paket	73.631.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kecamatan taman sari	-	1 paket	73.631.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kecamatan taman sari	-	1 paket	22.245.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kecamatan taman sari	-	1 paket	22.245.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kecamatan taman sari	-	2 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kecamatan taman sari	-	2 Dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kecamatan taman sari	-	1 laporan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kecamatan taman sari	-	1 laporan	75.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	501.334.440	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	501.334.440	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	501.334.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	501.334.440	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kecamatan taman sari	-	10 surat	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kecamatan taman sari	-	10 surat	-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kecamatan taman sari	-	3 laporan	38.959.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kecamatan taman sari	-	3 laporan	38.959.000	
03.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kecamatan taman sari	-	4 laporan	92.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kecamatan taman sari	-	4 laporan	92.300.000	
		kecamatan taman sari	-	1 Tahun	-		kecamatan taman sari	-	1 Tahun	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kecamatan taman sari	-	4 laporan	370.075.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kecamatan taman sari	-	4 laporan	370.075.440	
05.		kecamatan taman sari	-				kecamatan taman sari	-			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	142.627.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	142.627.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	918.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	918.000	
	Pengadaan Mebel	kecamatan taman sari	-	3 Unit	459.000	Pengadaan Mebel	kecamatan taman sari	-	3 Unit	459.000	
06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kecamatan taman sari	-	1 laporan	459.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kecamatan taman sari	-	1 laporan	459.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kecamatan taman sari	-	3 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kecamatan taman sari	-	3 Unit	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	141.709.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	141.709.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kecamatan taman sari	-	1 unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kecamatan taman sari	-	1 unit	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kecamatan taman sari	-	2 unit	71.709.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kecamatan taman sari	-	2 unit	71.709.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kecamatan taman sari	-	1 kali	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kecamatan taman sari	-	1 kali	70.000.000	
		kecamatan taman sari	-				kecamatan taman sari	-			
86	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kecamatan taman sari	-	100%	704.269.418	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kecamatan taman sari	-	100%	704.269.418	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan taman sari	-	100%	9.710.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan taman sari	-	100%	9.710.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kecamatan taman sari	-	48 kali	-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kecamatan taman sari	-	48 kali	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan taman sari	-	2 jenis	9.710.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan taman sari	-	2 jenis	9.710.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	kecamatan taman sari	-	100%	694.559.418	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	kecamatan taman sari	-	100%	694.559.418	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	10 Rekomendasi	9.772.800	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	10 Rekomendasi	9.772.800	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	200 Orang	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	200 Orang	-	

		kecamatan taman sari	-	1 laporan	120.583.992		kecamatan taman sari	-	1 laporan	120.583.992	
		kecamatan taman sari	-	1 laporan	97.767.092		kecamatan taman sari	-	1 laporan	97.767.092	
		kecamatan taman sari	-	1 laporan	143.809.784		kecamatan taman sari	-	1 laporan	143.809.784	
		kecamatan taman sari	-	1 laporan	102.031.662		kecamatan taman sari	-	1 laporan	102.031.662	
		kecamatan taman sari	-	1 laporan	137.885.088		kecamatan taman sari	-	1 laporan	137.885.088	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kecamatan taman sari	-	1 laporan	82.709.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kecamatan taman sari	-	1 laporan	82.709.000	
		kecamatan taman sari	-	100 Orang			kecamatan taman sari	-	100 Orang		
		kecamatan taman sari	-				kecamatan taman sari	-			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kecamatan taman sari	-	100%	3.276.131.460	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kecamatan taman sari	-	100%	3.276.131.460	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	kecamatan taman sari	-	100%	3.276.131.460	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	kecamatan taman sari	-	100%	3.276.131.460	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 lembaga masyarakat	15.900.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 lembaga masyarakat	15.900.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	kecamatan taman sari	-	1 unit	10.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	kecamatan taman sari	-	1 unit	10.000.000	
		kecamatan taman sari	-	1 unit	36.200.000		kecamatan taman sari	-	1 unit	36.200.000	
		kecamatan taman sari	-	1 unit	20.000.000		kecamatan taman sari	-	1 unit	20.000.000	
		kecamatan taman sari	-	1 unit	20.000.000		kecamatan taman sari	-	1 unit	20.000.000	
		kecamatan taman sari	-	1 unit	10.000.000		kecamatan taman sari	-	1 unit	10.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 pokmas/ormas	167.659.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 pokmas/ormas	167.659.000	
		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/ormas	546.534.016		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/ormas	546.534.016	
		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/ormas	583.152.556		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/ormas	583.152.556	
		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/ormas	562.365.784		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/ormas	562.365.784	
		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/ormas	582.565.784		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/ormas	582.565.784	
		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/ormas	720.254.320		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/ormas	720.254.320	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	
	penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	
		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	

		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	
		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	
	Evaluasi Kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 kelurahan	1.500.000	Evaluasi Kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 kelurahan	1.500.000	
		kecamatan taman sari	-				kecamatan taman sari	-			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kecamatan taman sari	-	100%	17.900.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kecamatan taman sari	-	100%	17.900.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kecamatan taman sari	-	100%	17.900.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kecamatan taman sari	-	100%	17.900.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	12 Kali	17.900.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	12 Kali	17.900.000	
		kecamatan taman sari	-				kecamatan taman sari	-			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kecamatan taman sari	-	100%	218.850.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kecamatan taman sari	-	100%	218.850.200	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	218.850.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	218.850.200	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	208.184.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	208.184.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	kecamatan taman sari		1 laporan	10.666.200	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	kecamatan taman sari		1 laporan	10.666.200	
Jumlah			-		**9.603.566.117**					**9.603.566.117**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Taman Sari

Tujuan dalam Renja Kecamatan Taman Sari merupakan penjabaran dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Taman Sari yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Taman Sari, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Kecamatan Taman Sari menetapkan sejumlah tujuan, yaitu :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Taman Sari

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan (Persen)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
	1.Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan		1.Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	3,1	3,3	87	88	89
		1. Terselenggaranya pelayanan public di kecamatan taman sari	2.Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Taman sari	%	75	80	100	100	100
		2. Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan taman sari	3.Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di kecamatan taman sari	%	100	100	100	100	100

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

   Dengan sasaran :

   Meningkatnya kemampuan pelayanan kelurahan

   Kebijakan

   Meningkatkan partisipasi aparatur kelurahan

   Program

   Pembinaan Organisasi Kelurahan

   Kegiatan

   a. Lomba Kelurahan

2. Meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat

   Dengan sasaran :

   Meningkatnya peran serta tokoh agama dan masyarakat dalam kegiatan keagamaan

   Kebijakan

   Meningkatkan partisipasimasyarakat dalam kegiatan keagamaan

   Program

   Pembinaan Keagamaan Masyarakat

   Kegiatan

   a. Pelaksanaan MTQ/ STQ

1. Menciptakan kondisi masyarakat yang Nyaman dan kondusif.

   Dengan sasaran :

   Mewujudkan stabilitas lingkungan masyarakat yang nyaman dan aman

   Kebijakan

   Melaksanakan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kegiatan gotong royong

   Program

   Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota

   Kegiatan

   a. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

   b. Pelaksanaan Gotong Royong

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang.

   Dengan sasaran :

   Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kebijakan

Melibatkan seluruh elemen masyarakat (LPM, Karang Taruna, RT/RW dan Tokoh Masyarakat) dalam kegiatan Musrenbang

Program

Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan

a. Musyawarah Rencana Pembangunan

3. Meningkatkan kinerja pengurus RT dan RW dalam menunjang pelayanan administrasi kelurahan.

Dengan sasaran :

Meningkatkan fungsi RT dan RW dalam memberi jasa administrasi kepada masyarakat.

Kebijakan

Memberdayakan lembaga kemsyarakatan RT dan RW

Program

Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan

Kegiatan

a. Pelayanan administrasi kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.

8. Meningkatkan peran serta wanita dan lembaga kesehatan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan sasaran :

Meningkatkan peran serta PKK, Posyandu, KSI dan UKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan

Melibatkan puskesmas, posyandu, PKK, KSI dan UKS dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Program

Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat

Kegiatan

a. Pembinaan PKK
b. Kecamatan Sayang Ibu (KSI)
c. Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang

8. Meningkatkan pelayanan hubungan kemasyarakatan

Dengan sasaran :

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti perlombaan dalam rangka HUT RI.

Kebijakan

Melaksanakan lomba-lomba dari tingkat Kelurahan sampai Kecamatan

Program

Peningkatan pelayanan kemasyarakatan

Kegiatan

a. Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan

3.2 Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 terlampir dalam Tabel di bawah ini:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAMAN SARI TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA PANGKAL PINANG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)		(4)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan									
0	0													
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Laporan kinerja dan Keuangan yang di sampaikan tepat waktu**		**100%**	**6.331.747.641**			**100%**	**6.755.385.505**
7	**1**	**01**	**2.01**		**Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daearah**		**Persentase penyampaian dokumen perencanaan,penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**%**	**100%**	**2.700.000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**2.790.000**
7	1	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	900.000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	990.000
7	1	01	2.01	02	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	450.000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	450.000
7	1	01	2.01		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	450.000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	450.000
7	1	01	2.01		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	900.000	Pendapatan Daerah	Laporan	4	900.000
7	1	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	-	Pendapatan Daerah	Laporan	3	-

7	**1**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**%**	**100%**	**4.568.799.841**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**5.025.544.825**
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	45	4.592.988.288	Pendapatan Daerah	orang/bulan	45	5.024.194.825
7	1	01	2.02	07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	450.000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	450.000
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	2	900.000	Pendapatan Daerah	Laporan	2	900.000
7	**1**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah**		**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**	**%**	**-1%**	**26.000.000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**-1%**	**28.600.000**
7	1	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas Beserta atribut kelengkapan		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	2	26.000.000	Pendapatan Daerah	paket	2	28.600.000
7	1	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	orang	5	-	Pendapatan Daerah	orang	5	-
7	**1**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100%**	**186.738.800**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**205.232.680**
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.348.500	Pendapatan Daerah	Paket	1	9.183.350
7	1	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	-	Pendapatan Daerah	paket	1	-

7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	68.515.300	Pendapatan Daerah	Paket	1	75.366.830
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	28.075.000	Pendapatan Daerah	paket	1	30.882.500
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1	1.800.000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	1.800.000
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	80.000.000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	88.000.000
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	1.348.841.000	**Pendapatan Daerah**	%	100%	1.350.300.000
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	28.541.000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	30.000.000
7	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	60.300.000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	60.300.000
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	340.803744	Pendapatan Daerah	Laporan	1	1.260.000.000
7	**1**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100%**	**918.000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**918.000**
7	1	01	2.07	05	Pengadaan mebel		Jumlah unit mebel yang disedikan	unit	1	459.000	Pendapatan Daerah	unit	1	459.000
7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	459.000	Pendapatan Daerah	unit	1	459.000
7	**1**	**01**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100%**	**197.750.000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**142.000.000**

7	1	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannnya	unit	3	57.750.000	Pendapatan Daerah	unit	3	65.000.000
7	1	01	2.09	02	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	70.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	77.000.000
7	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	70.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	77.000.000
7	**1**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**PERSENTASE WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI TEPAT WAKTU**		**100%**	**433.513.700**			**100%**	**476.965.070**
7	1	02	2.01		**koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**PERSENTASE WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI TEPAT WAKTU**	**%**	**100%**	**12.900.000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**14.190.000**
7	1	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (HUT RI)		Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	1	-	Pendapatan Daerah	laporan	1	-
7	1	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gotong royong)		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	1	12.900.000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	14.190.000
7	1	02	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**%**	**100%**	**9.000.000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**365.150.070**

7	1	02	2.02	03	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan (PATEN)		Jumlah Laporan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	laporan	1	9.000.000	Pendapatan Daerah	laporan	1	10.000.000
7	**1**	**02**	**2.02**		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan taman sari, Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan	**%**	**100%**	**322.863.700**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**5.982.293.626**
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (Opas indah)	laporan	1	60.389.000	Pendapatan Daerah	laporan	1	66.427.900
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (gedung nasional)	laporan	1	60.568.500	Pendapatan Daerah	laporan	1	66.625.350
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (batin tikal)	laporan	1	57.939.000	Pendapatan Daerah	laporan	1	63.732.900
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (rawa bangun)	laporan	1	68.332.500	Pendapatan Daerah	laporan	1	75.165.750
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (kejaksaan)	laporan	1	75.634.700	Pendapatan Daerah	laporan	1	83.198.170

7	1	02	2.04		**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**		**Jumlah Laporan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**%**	**100%**	**88.750.000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**97.625.000**
7	1	02	2.02	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (HUT KOTA)		Junlah laporan pelaksanaan urusan kewenangan lain yang dilimpahkan	laporan	1	88.750.000	Pendapatan Daerah	laporan	1	97.625.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100%**	**2.563.232.980**	**Pendapatan Daerah**		**100%**	**2.820.056.278**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan**	**%**	**100%**	**2.563.232.980**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**2.820.056.278**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	lembaga	5	15.500.000	Pendapatan Daerah	lembaga	5	17.050.000
7	01	03	2.02		Evaluasi kelurahan		Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	laporan	1	-	Pendapatan Daerah	laporan	1	-
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5	184.750.000	Pendapatan Daerah	5 lembaga kemasyarakatan	5	203.225.000
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (opas indah)	pokmas/ormas	3	421.859.080	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	464.044.988
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (gedung nasional)	pokmas/ormas	3	431.180.580	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	474.298.638

7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (batin tikal)	pokmas/ormas	3	434.960.896	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	478.456.986
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (rawa bangun)	pokmas/ormas	3	444.990.896	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	489.489.986
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kejaksaan)	pokmas/ormas	3	584.991.528	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	643.490.681
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan opas indah yang terbangun	unit	1	9.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	10.000.000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan gedung nasional yang terbangun	unit	1	9.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	10.000.000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan batin tikal yang terbangun	unit	1	9.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	10.000.000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan rawa bangun yang terbangun	unit	1	9.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	10.000.000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan kejaksaan yang terbangun	unit	1	9.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	10.000.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan**		**100%**	**222.100.000**	**Pendapatan Daerah**		**100%**	**244.520.000**

7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100%**	**222.100.000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**244.520.000**
					Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	dokumen	1	213.200.000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	234.520.000
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan		JumlahTugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	dokumen	1	8.900.000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	10.000.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti di kecamatan**		**100%**	**17.750.000**			**100%**	**19.525.000**
7	**01**	**05**			**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		**Jumlah Laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**%**	**100%**	**17.750.000**		**%**	**100%**	**19.525.000**
					Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Jumlah laporan hasil sinergitas kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan	1	17.750.000		laporan	1	19.525.000
					TOTAL					**9.568.344.321**				**10.296.926.853**

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung indikator setingkat outcome masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai targetnya untuk pelaksanaan Renstra Kecamatan Taman Sari ini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengembangan sumber daya pegawai dan sumber daya masyarakat. Dimana kualitas dan kuantitas pegawai masih belum memadai. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai saat ini adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan belum jelas status dan legitimasinya sehingganya dalam pelaksanaan tugas sering terjadi tumpang tindih dan keterbatasan sarana penunjang kegiatan kantor dan pemerintahan yang belum memadai sehingga berpengaruh kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu penataan sistem informasi kependudukan di kecamatan yang lebih maju dan tersistematis dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga sistem pelayanan yang diberikan pun lebih cepat dan efektif serta tersedianya data yang lebih akurat dan sistematis.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi, sebagian pelimpahan yang diwenangkan serta tugas-tugas lain dari pemerintah kota merupakan embrio kecamatan akan menjadi pusat pelayanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana termasuk penambahan dana yang terpisah dari anggaran rutin kecamatan dikarenakan saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah melainkan tempat wilayah kerja bagi fungsi-fungsi lain yang melekat di satuan kerja, dengan demikian pelimpahan kewenangan sepenuhnya kepada kecamatan sangat

diperlukan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung indikator setingkat outcome masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai targetnya dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Taman Sari tahun 2024 - 2026. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengembangan sumber daya pegawai dan sumber daya masyarakat. dimana kualitas dan kuantitas pegawai masih belum memadai. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai saat ini adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan belum jelas status dan legitimasinya sehingga dalam pelaksanaan tugas sering terjadi tumpang tindih dan keterbatasan sarana penunjang kegiatan kantor dan pemerintahan yang belum memadai sehingga berpengaruh kepada pemberian pelayanan Kepada masyarakat, perlu penantaan sistem informasi kependudukan di kecamatan yang lebih maju dan tersistematis dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga sistem pelayanan yang diberikan pun lebih cepat dan efektif serta tersedianya data yang lebih akurat dan sistematis.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi, sebagian pelimpahan yang diwenangkan serta tugas-tugas lain dari pemerintah kota merupakan embrio kecamatan akan menjadi pusat pelayanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana termasuk penambahan dana yang terpisah dari Anggaran Rutin Kecamatan dikarenakan saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah melainkan tempat wilayah kerja bagi fungsi-fungsi

lain yang melekat di satuan kerja, dengan demikian pelimpahan kewenangan sepenuhnya kepada kecamatan sangat diperlukan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas ke depan untuk dapat mencapai sasaran tujuan, misi dan visi Kecamatan Taman Sari, diharapkan juga kepada semua unit organisasi dilingkungan Kecamatan Taman Sari dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya agar dapat terumuskan dengan baik di dalam Renstra Kecamatan Taman Sari tahun 2025. Sehingga tahun berikutnya target dari rencana kerja dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan-catatan Penting

Renja kecamatan Taman sari kota pangkalpinang Tahun 2025 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan taman sari kota pangkalpinang untuk tahun 2025 sebagai gambaran pelaksanaan RKPD kota pangkalpinang untuk pelayanan terhadap pelayanan masyarakat sekaligus pencapaian visi misi kepala daerah.

Program/kegaiatan/sub kegiatan yang telah di tetapkan di dalam dokumen perencanaan ini upayakan mengakomodir pencapaian indicator yang menjadi kinerja utama kecamatan taman sari.tidak maksimalnya pencapaian kinerja kecamatan taman sari sangat berpengaruh pada kinerja peayanan kecamatan taman sari.Adapun indicator kinerja utama yang berupaya dicapai oleh kecamatan taman sari kota pangkalpinang dijabarkan melalui table 5.1 berikut ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET TAHUN 2025
1	2	3		4
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Taman Sari	1.1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Taman Sari	100
2	Terselesainya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Taman Sari	2.1	Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditanagani di Kecamatan Taman Sari	100

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan acuan bagi Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pelayanan masyarakat. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1) Renja Kecamatan Taman Sari tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Kecamatan Taman sari, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Kota Pangkalpinang 2025.
2) Renja Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
3) Pelaksanaan Renja Kecamatan Taman Sari mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Kecamatan Taman Sari Tahun 2025, maka Kecamatan Taman Sari akan mengusulkan Perubahan Renja Kecamatan Taman Sari Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

5.1. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Pelaksanaan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan harus selaras dengan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Renja ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dalam mensukseskan program – program strategis Rencana Pembangunan Daerah. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Kecamatan Taman sari Tahun 2025, maka Kecamatan Taman Sari akan mengusulkan Perubahan Renja Kecamatan

Taman sari Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pangkalpinang, 2025
Plt.CAMAT TAMAN SARI

DEKA SRI WAHIDAH,S.E.,M.Si
NIP. 198112282012122002

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAMAN SARI TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA PANGKAL PINANG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perubahan pagu 2025	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)		(4)			(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan										
0	0														
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Laporan kinerja dan Keuangan yang di sampaikan tepat waktu**		**100%**	**6,331,747,641**	**5,547,798,501**			**100%**	**6,755,385,505**
7	**1**	**01**	**2.01**		**Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daearah**		**Persentase penyampaian dokumen perencanaan,penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**%**	**100%**	**2,700,000**	**2,349,000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**2,790,000**
7	1	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	900,000	500,000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	990,000
7	1	01	2.01	02	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	450,000	500,000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	450,000
7	1	01	2.01		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	450,000	500,000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	450,000
7	1	01	2.01		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	900,000	849,000	Pendapatan Daerah	Laporan	4	900,000
7	1	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	-		Pendapatan Daerah	Laporan	3	-
7	**1**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**%**	**100%**	**4,568,799,841**	**4,832,993,057**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**5,025,544,825**
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	45	4,567,449,841	4,831,993,057	Pendapatan Daerah	orang/bulan	45	5,024,194,825

7	1	01	2.02	07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	450,000	500,000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	450,000
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	2	900,000	500,000	Pendapatan Daerah	Laporan	2	900,000
7	**1**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah**		**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**	**%**	**-1%**	**26,000,000**	**23,300,000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**-1%**	**28,600,000**
7	1	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas Beserta atribut kelengkapan		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	2	26,000,000	23,300,000	Pendapatan Daerah	paket	2	28,600,000
7	1	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	orang	5	-	-	Pendapatan Daerah	orang	5	-
7	**1**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100%**	**186,738,800**	**127,902,700**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**205,232,680**
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8,348,500	8,348,500	Pendapatan Daerah	Paket	1	9,183,350
7	1	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	-	-	Pendapatan Daerah	paket	1	-
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	68,515,300	64,264,200	Pendapatan Daerah	Paket	1	75,366,830
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	28,075,000	25,890,000	Pendapatan Daerah	paket	1	30,882,500
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1	1,800,000	1,800,000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	1,800,000
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	80,000,000	27,600,000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	88,000,000
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	1,348,841,000	409,544,744	**Pendapatan Daerah**	%	100%	1,350,300,000

7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	28,541,000	28,541,000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	30,000,000
7	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	60,300,000	40,200,000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	60,300,000
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1,260,000,000	340,803,744	Pendapatan Daerah	Laporan	1	1,260,000,000
7	**1**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100%**	**918,000**	**25,459,000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**918,000**
7	1	01	2.07	05	Pengadaan mebel		Jumlah unit mebel yang disedikan	unit	1	459,000	459,000	Pendapatan Daerah	unit	1	459,000
7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	459,000	25,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	459,000
7	**1**	**01**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100%**	**197,750,000**	**126,250,000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**142,000,000**
7	1	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannnya	unit	3	57,750,000	56,250,000	Pendapatan Daerah	unit	3	65,000,000
7	1	01	2.09	02	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	70,000,000	-	Pendapatan Daerah	unit	1	77,000,000
7	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	70,000,000	70,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	77,000,000
7	1	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**PERSENTASE WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI TEPAT WAKTU**		**100%**	**433,513,700**	**732,380,450**			**100%**	**476,965,070**
7	1	02	2.01		**koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**PERSENTASE WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI TEPAT WAKTU**	**%**	**100%**	**12,900,000**	**4,850,000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**14,190,000**

7	1	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (HUT RI)		Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	1	-		Pendapatan Daerah	laporan	1	-
7	1	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gotong royong)		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	1	12,900,000	4,850,000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	14,190,000
7	**1**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**%**	**100%**	**9,000,000**	**5,100,000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**365,150,070**
7	1	02	2.02	03	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan (PATEN)		Jumlah Laporan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	laporan	1	9,000,000	5,100,000	Pendapatan Daerah	laporan	1	10,000,000
7	**1**	**02**	**2.02**		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan taman sari, Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan	**%**	**100%**	**322,863,700**	**722,430,450**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**5,982,293,626**
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (Opas indah)	laporan	1	60,389,000	155,675,784	Pendapatan Daerah	laporan	1	66,427,900
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (gedung nasional)	laporan	1	60,568,500	119,878,392	Pendapatan Daerah	laporan	1	66,625,350
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (batin tikal)	laporan	1	57,939,000	135,822,012	Pendapatan Daerah	laporan	1	63,732,900
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (rawa bangun)	laporan	1	68,332,500	120,317,474	Pendapatan Daerah	laporan	1	75,165,750

7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (kejaksaan)	laporan	1	75,634,700	190,736,788	Pendapatan Daerah	laporan	1	83,198,170
7	1	02	2.04		**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**		**Jumlah Laporan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**%**	**100%**	**88,750,000**	**43,150,000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**97,625,000**
7	1	02	2.02	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (HUT KOTA)		Junlah laporan pelaksanaan urusan kewenangan lain yang dilimpahkan	laporan	1	88,750,000	43,150,000	Pendapatan Daerah	laporan	1	97,625,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100%**	**2,563,232,980**	**3,340,773,664**	**Pendapatan Daerah**		**100%**	**2,820,056,278**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan**	**%**	**100%**	**2,563,232,980**	**3,340,773,664**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**2,820,056,278**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	lembaga	5	15,500,000	6,600,000	Pendapatan Daerah	lembaga	5	17,050,000
7	01	03	2.02		Evaluasi kelurahan		Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	laporan	1	-		Pendapatan Daerah	laporan	1	-
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5	184,750,000	125,490,000	Pendapatan Daerah	5 lembaga kemasyarakatan	5	203,225,000
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (opas indah)	pokmas/ormas	3	421,859,080	571,699,256	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	464,044,988
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (gedung nasional)	pokmas/ormas	3	431,180,580	594,777,560	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	474,298,638
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (batin tikal)	pokmas/ormas	3	434,960,896	607,341,072	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	478,456,986

7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (rawa bangun)	pokmas/ormas	3	444,990,896	624,011,072	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	489,489,986
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kejaksaan)	pokmas/ormas	3	584,991,528	765,854,704	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	643,490,681
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan opas indah yang terbangun	unit	1	9,000,000	9,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	10,000,000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan gedung nasional yang terbangun	unit	1	9,000,000	9,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	10,000,000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan batin tikal yang terbangun	unit	1	9,000,000	9,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	10,000,000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan rawa bangun yang terbangun	unit	1	9,000,000	9,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	10,000,000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan kejaksaan yang terbangun	unit	1	9,000,000	9,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	10,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan**		**100%**	**222,100,000**	**198,000,000**	**Pendapatan Daerah**		**100%**	**244,520,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100%**	**222,100,000**	**198,000,000**	**Pendapatan Daerah**	**%**	**100%**	**244,520,000**
					Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	dokumen	1	213,200,000	193,700,000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	234,520,000
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan		JumlahTugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	dokumen	1	8,900,000	4,300,000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	10,000,000

7	**01**	**05**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti di kecamatan**		**100%**	**17,750,000**	**5,050,000**			**100%**	**19,525,000**
7	**01**	**05**			**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		**Jumlah Laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**%**	**100%**	**17,750,000**	**5,050,000**		**%**	**100%**	**19,525,000**
					Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Jumlah laporan hasil sinergitas kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan	1	17,750,000	5,050,000		laporan	1	19,525,000
					TOTAL					**9,568,344,321**	**9,758,352,615**				**10,296,926,853**

LAPORAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA)

KECAMATAN RANGKUI

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Rangkui Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen Renja Perubahan ini merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan sebagai tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian terhadap kondisi dan dinamika pembangunan terkini. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, akuntabel, dan transparan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.

Melalui dokumen ini, diharapkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Rangkui untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik berupa data, masukan, maupun saran konstruktif. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025 yang lebih baik.

Pangkalpinang, 23 Mei 2025

Camat Rangkui,

H. Muhammad Subhan, SE.,M.Si

NIP. 196901052006041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 8

(Lampiran Tabel T-C.29)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9

(Lampiran Tabel T-C.30)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 11

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 13

(Lampiran Tabel T-C.31) .....

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 14

(Lampiran Tabel Renja SIPD_RI)

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan-catatan Penting..... 17

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 18

4.3 Rencana Tindak Lanjut 18

4.4 Kesimpulan..... 19

4.5 Saran 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Renja Perubahan disusun sebagai penyesuaian terhadap Renja awal yang telah ditetapkan, seiring dengan adanya dinamika kebijakan, perubahan asumsi perencanaan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya, serta perkembangan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tahun 2025 dilakukan sebagai respons terhadap beberapa faktor penting, antara lain adanya penyesuaian kebijakan nasional dan daerah, perubahan prioritas pembangunan, perubahan alokasi anggaran, serta masukan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi publik.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan wilayah, dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tersebut agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Renja Perubahan Tahun 2025 disusun guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kecamatan Rangkui dapat berjalan lebih optimal serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Renja Perubahan disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan secara otomatis menyesuaikan dengan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Renja Perubahan dimaksud, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang yang menjadi koordinator perencanaan di Kota Pangkalpinang dan juga dengan para pemangku kepentingan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Rangkui Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpianang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144;

18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah tahun 2023 Nomor 148);
19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224);
21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, Tanggal 02 Juli 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Rangkui.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Kecamatan Rangkui Tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Rangkui sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, diketahui bahwa capaian kinerja program dan kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Beberapa kegiatan telah mulai direalisasikan, khususnya yang bersifat non-fisik dan persiapan administrasi, sementara kegiatan fisik sebagian besar masih dalam proses perencanaan atau pengadaan. Kendala utama yang dihadapi antara lain terkait dengan keterlambatan penyesuaian anggaran, proses administrasi, serta koordinasi lintas sektor. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Renja Perubahan agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat lebih realistis, adaptif terhadap kondisi aktual, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Rangkui sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel T-C.29 berikut.

Tabel T-C.29

TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		**070101**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)**	**3.5**	**7,373,066,622**	**3.5**	**2,189,666,560**		**0**		**0**		**0**	**3.5**	**2,189,666,560**	**100**	**30**	**SEKRETARIS KECAMATAN**
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	**70**		**70**								**70**		**100**		**SEKRETARIS KECAMATAN**
2		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	6,812,497,498	28.02	2,055,459,270		0		0		0	28	2,055,459,270	28.02	30	KASUBAG KEUANGAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM
3		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	60	6,812,497,498	58	2,055,459,270							58	2,055,459,270	97	30	KASUBAG KEUANGAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM
4		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	110,605,000	55.53	19,890,035		0		0		0	55.53	19,890,035	55.53	18	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
5		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	3,061,500									0	-	0	0	KASI PELAYANAN UMUM
6		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	4	66,668,500	4	1,000,000							4	1,000,000	100	1	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
7		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2	15,875,000	2	4,000,000							2	4,000,000	100	25	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
8		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	25,000,000	1	14,890,035							1	14,890,035	100	60	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
9		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan: %)	100	387,964,124	33.33	99,317,255		0		0		0	33.33	99,317,255	33.33	26	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
10		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	1	75,000,000	1	11,830,783							1	11,830,783	100	16	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

11		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	1	17,250,000	1	8,550,000							1	8,550,000	100	50	KASUBAG KEUANGAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM
12		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	1	295,714,124	1	78,936,472							1	78,936,472	100	27	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
13		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan: %)	100	62,000,000	25.00	15,000,000		0		0		0	25.00	15,000,000	25.00	24	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
14		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	4	62,000,000	4	15,000,000							4	15,000,000	100	24	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				**100.000**	**29.698**	
													PREDIKAT KINERJA				**ST**	**S**	
15		**070102**	**P R O G R A M PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan: %)**	**100**	**821,856,806**	**25**	**514,943,787**		**0**		**0**		**0**	**25**	**514,943,787**	**25**	**63**	**SEKRETARIS KECAMATAN**
16		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan: %)	100	776,856,806	65.16	280,577,410.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	280,577,410	#DIV/0!	36	KASI PELAYANAN UMUM
				Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan (Kelurahan Pintu Air) (Dengan Satuan: %)	100		73.48	46,211,033		0		0		0	73.48	46,211,033	73.48	#DIV/0!	LURAH PINTU AIR
				Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan (Kelurahan Bintang) (Dengan Satuan: %)	100		72.50	32,213,367		0		0		0	72.50	32,213,367	72.50	#DIV/0!	LURAH BINTANG
				Persentase Terpenuhinya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan (Kelurahan Gajah Mada) (Dengan Satuan: %)	100		75.75	44,379,983		0		0		0	75.75	44,379,983	75.75	#DIV/0!	LURAH GAJAH MADA
				Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan (Kelurahan Masjid Jamik) (Dengan Satuan: %)	100		73.95	34,835,383		0		0		0	73.95	34,835,383	73.95	#DIV/0!	LURAH MASJID JAMIK
				Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan (Kelurahan Asam) (Dengan Satuan: %)	100		36.15	34,566,683		0		0		0	36.15	34,566,683	36.15	#DIV/0!	LURAH ASAM
				Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan (Kelurahan Melintang) (Dengan Satuan: %)	100		75.92	36,265,505		0		0		0	75.92	36,265,505	75.92	#DIV/0!	LURAH MELINTANG

				Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan (Kelurahan Parit Lalang) (Dengan Satuan: %)	100		80.21	32,524,573		0		0		0	80.21	32,524,573	80.21	#DIV/0!	LURAH PARIT LALANG
				Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan (Kelurahan Keramat) (Dengan Satuan: %)	100		33.32	19,580,883		0		0		0	33.32	19,580,883	33.32	#DIV/0!	LURAH KERAMAT
17		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1	776,856,806	1	46,211,033							1	46,211,033	100	6	LURAH PINTU AIR
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1	32,213,367							1	32,213,367	100	0	LURAH BINTANG
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1	44,379,983							1	44,379,983	100	0	LURAH GAJAH MADA
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1	34,835,383							1	34,835,383	100	0	LURAH MASJID JAMIK
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1	34,566,683							1	34,566,683	100	0	LURAH ASAM
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1	36,265,505							1	36,265,505	100	0	LURAH MELINTANG
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1	32,524,573							1	32,524,573	100	0	LURAH PARIT LALANG
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1	19,580,883							1	19,580,883	100	0	LURAH KERAMAT
18		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Rangkui (Dengan Satuan: %)	100	45,000,000		0		0		0		0	0	-	0	0	KASI PEMERINTAHAN
19		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan: Laporan)	2	45,000,000									0	-	0	0	KASI PEMERINTAHAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**25.000**	**62.656**	
PREDIKAT KINERJA																	**S**	**S**	

20		**070103**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kec. Rangkui) (Dengan Satuan: %)**	**100**	**4,149,534,260**	**36.70**	**846,725,344**		**0**		**0**		**0**	**36.70**	**846,725,344**	**36.70**	**20**	**SEKRETARIS KECAMATAN**
21		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan: %)	100	19,550,000	100	18,650,000							100	18,650,000	100	95	KASI PEMBANGUNAN
22		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan: Lembaga Kemasyarakatan)	6	19,550,000	6	18,650,000							6	18,650,000	100	95	KASI PEMBANGUNAN
23		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100	4,129,984,260	24.99	110,415,487							24.99	110,415,487	24.99	3	LURAH PINTU AIR
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100		36.45	117,943,293							36.45	117,943,293	36.45	0	LURAH BINTANG
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100		34.25	118,382,493							34.25	118,382,493	34.25	0	LURAH GAJAH MADA
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100		23.95	80,968,493							23.95	80,968,493	23.95	0	LURAH MASJID JAMIK
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100		27.77	98,431,696							27.77	98,431,696	27.77	0	LURAH ASAM
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100		20.83	99,841,293							20.83	99,841,293	20.83	0	LURAH MELINTANG
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100		23.14	102,360,893							23.14	102,360,893	23.14	0	LURAH PARIT LALANG
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100		19.44	89,041,696							19.44	89,041,696	19.44	0	LURAH KERAMAT
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui (Dengan Satuan: %)	100	127,500,000	19.44	10,690,000		0		0		0	19.44	10,690,000	19.44	8	KASI KEMASYARAKATAN
24		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	6	4,129,984,260	6	110,415,487							6	110,415,487	100	3	LURAH PINTU AIR
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	6		6	117,943,293							6	117,943,293	100	0	LURAH BINTANG
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	6		6	118,382,493							6	118,382,493	100	0	LURAH GAJAH MADA
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	0		6	80,968,493							6	80,968,493	100	0	LURAH MASJID JAMIK
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	6		6	98,431,696							6	98,431,696	100	0	LURAH ASAM

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	6		6	99,841,293								6	99,841,293	100	0	LURAH MELINTANG
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	6		6	102,360,893								6	102,360,893	100	0	LURAH PARIT LALANG
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	6		6	89,041,696								6	89,041,696	100	0	LURAH KERAMAT
25		070103203002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan: Lembaga Kemasyarakatan)	1	127,500,000	1	10,690,000								1	10,690,000	100	8	KASI KEMASYARAKATAN
																		36.700	20.405	
																		S	S	
26		**070105**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan (Kec. Rangkui) (Dengan Satuan: %)**	**100**	**274,305,000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	-	**0**	**0**	**SEKRETARIS KECAMATAN**
27		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (Dengan Satuan: %)	100	274,305,000		0		0		0		0	0	-	0	0	KASI PEMERINTAHAN
28		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan: Dokumen)	1	274,305,000									0	-	0	0	KASI PEMERINTAHAN
																		0.000	0.000	
																		R	R	
																		40.425	28.190	
																		S	S	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 17 - 04 - 2025

CAMAT RANGKUI KOTA PANGKALPINANG

H. MUHAMMAD SUBHAN, SE.,M.Si
NIP. 196901052006041001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah Kecamatan Rangkui hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa capaian positif, namun juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera direspon melalui penyusunan Renja Perubahan. Secara umum, pelayanan administrasi kependudukan, perizinan dasar, fasilitasi pembangunan kelurahan, serta layanan sosial kemasyarakatan telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Evaluasi internal menunjukkan bahwa beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang terkait langsung dengan pelayanan Masyarakat sudah berada pada kategori “Sangat Baik” atau sudah mencapai target triwulan.

Dalam konteks penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, hasil analisis ini menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan. Renja Perubahan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik melalui program pelatihan aparatur, pengembangan sistem informasi pelayanan terpadu, serta peningkatan koordinasi lintas kelurahan dan lembaga kemasyarakatan. Selain itu, pembiayaan juga perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan masyarakat, seperti digitalisasi proses layanan dan percepatan penyelesaian aduan warga.

Dengan melakukan penyesuaian berbasis evaluasi kinerja ini, diharapkan Kecamatan Rangkui dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara lebih terukur dan partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kota Pangkalpinang Susunan Organisasi Kecamatan Rangkui terdiri dari :

a. Camat (Esselon III/a)
b. Sekretaris Kecamatan (Esselon III/b)
    a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian (Esselon IV/b)
    b. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan keuangan (Esselon IV/b)
c. Kasi Tata Pemerintahan (Esselon IV/a)
d. Kasi Pembangunan (Esselon IV/a)
e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Esselon IV/a)
f. Kasi Pelayanan Umum (Esselon IV/a)
g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Esselon IV/a)
h. Lurah (Esselon IV/a)
i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Rangkui terdapat dalam tabel T-C.30 berikut.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rangkui
Kota Pangkalpinang

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Indek	3.10	3.20	3.30	3.40	3.88	3.87	3.95	3.90	100%	100%	
	Presentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti		%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	96.98%	96.80%	98.64%	97.65%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			IKK	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Rangkui		100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	-	
2	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Rangkui		100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025, Kecamatan Rangkui mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu-isu ini muncul sebagai hasil evaluasi kinerja, perubahan kebijakan, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Beberapa isu penting yang menjadi perhatian antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Masih terdapat kesenjangan kompetensi di antara aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan pelayanan berbasis digital. Hal ini berdampak pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik.
2. Keterbatasan Anggaran dan Reprioritisasi Kegiatan

   Adanya dinamika dalam alokasi anggaran, termasuk refocusing belanja dan penyesuaian kebijakan fiskal, mengharuskan perangkat daerah untuk melakukan reprioritisasi program. Hal ini menuntut perencanaan yang adaptif dan berbasis hasil.
3. Penanganan Permasalahan Sosial dan Lingkungan

   Kecamatan Rangkui menghadapi berbagai isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan drainase. Isu-isu ini memerlukan penanganan lintas sektor dan partisipatif.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Digitalisasi pelayanan masih belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital di kalangan aparatur maupun masyarakat.

Isu-isu di atas menjadi dasar utama dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas pelayanan, serta mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan kecamatan agar lebih responsif, efektif, dan efisien.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja Kecamatan Rangkui akan berbenah diri untuk terus dapat meningkatkan kinerja kegiatan, karena itu pengelolaan pemerintahan diperlukan. Penerapan manajemen pemerintahan seluruh pelaksanaan kegiatannya diarahkan pada sebuah proses bagaimana menciptakan efektivitas usaha secara efisien dan produktif dalam penerapan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Rangkui dalam proses kegiatan program kerja kecamatan juga termaksimalkan fungsi manajemen pemerintahan yang tercakup dalam berbagai aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber daya pemerintahan dan kontrol pemerintahan yang kesemuanya dijalankan dalam koordinasi yang baik. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup pemerintah Kota Pangkalpinang, Kecamatan Rangkui memiliki fungsi pelayanan umum dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku Kecamatan memiliki urusan wajib yaitu: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Rangkui telah menetapkan beberapa langkah pencapaian melalui penetapan program kerja, tujuan maupun sasaran yang semuanya diarahkan pada pencapaian visi dan misi kecamatan secara maksimal.

Dalam proses pelaksanaan dilapangan meskipun telah direncanakan dengan baik, berbagai permasalahan timbul yang berpengaruh dalam kegiatan kerja terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rangkui.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Rangkui selama 1 (satu) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rangkui, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Rangkui 2 (dua) tahun ke depan antara lain:

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang berkualitas menuju digitalisasi pelayanan publik.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait informasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel T-C.31 berikut.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kota Pangkalpinang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Rangkui

No	KODE	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
		KECAMATAN RANGKUI					13,674,955,290.30	KECAMATAN RANGKUI					13,674,955,290.30	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					13,674,955,290.30	UNSUR KEWILAYAHAN					13,674,955,290.30	
	7.01	KECAMATAN					8,250,694,856.30	KECAMATAN					8,250,694,856.30	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rangkui	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.00		7,963,899,856.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rangkui	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.00		7,963,899,856.30	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	3.5					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	3.5			
	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rangkui	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rangkui	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	-	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Rangkui	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Rangkui	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	-	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	-	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	-	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	-	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	-	

	7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP**	**100**	**%**	**7,345,158,724.30**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP**	**100**	**%**	**7,345,158,724.30**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Rangkui	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	7,345,158,724.30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Rangkui	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	7,345,158,724.30	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	-	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	-	
	7.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN**	**0**	**%**	**-**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN**	**0**	**%**	**-**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Rangkui	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Rangkui	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	
	7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**118,105,000.00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**118,105,000.00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Rangkui	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3,061,500.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Rangkui	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3,061,500.00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rangkui	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rangkui	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	-	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Rangkui	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	66,668,500.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Rangkui	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	66,668,500.00	

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	15,875,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	15,875,000.00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	32,500,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	32,500,000.00	
	7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**438,636,132.00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**438,636,132.00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	75,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	75,000,000.00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	17,250,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	17,250,000.00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	346,386,132.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	346,386,132.00	
	7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100**	**%**	**62,000,000.00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100**	**%**	**62,000,000.00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	62,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	62,000,000.00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Rangkui	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Rangkui	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**45,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**45,000,000.00**	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**-**	

	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	-	
2	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**-**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**-**	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	-	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Rangkui**	**100**	**%**	**45,000,000.00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Rangkui**	**100**	**%**	**45,000,000.00**	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	2	Laporan	45,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	2	Laporan	45,000,000.00	
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**142,050,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**142,050,000.00**	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**19,550,000.00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**19,550,000.00**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Rangkui	6	Lembaga Kemasyarakatan	19,550,000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Rangkui	6	Lembaga Kemasyarakatan	19,550,000.00	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Laporan	-	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Laporan	-	

	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**122,500,000.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**122,500,000.00**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	122,500,000.00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	122,500,000.00	
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**-**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**-**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**-**	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rangkui	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	-	
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**99,745,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rangkui**	**100**	**%**	**99,745,000.00**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**99,745,000.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**99,745,000.00**	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Rangkui	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	99,745,000.00	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Rangkui	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	99,745,000.00	
		KELURAHAN PINTU AIR					**722,268,710.00**	**KELURAHAN PINTU AIR**					**722,268,710.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**722,268,710.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**722,268,710.00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**722,268,710.00**	**KECAMATAN**					**722,268,710.00**	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**112,697,138.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**112,697,138.00**	

	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pintu Air**	**100**	**%**	**112,697,138.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pintu Air**	**100**	**%**	**112,697,138.00**	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pintu Air	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pintu Air)	1	Laporan	112,697,138.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pintu Air	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pintu Air)	1	Laporan	112,697,138.00	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**609,571,572.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**609,571,572.00**	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Pintu Air**	**100**	**%**	**609,571,572.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Pintu Air**	**100**	**%**	**609,571,572.00**	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pintu Air	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Pintu Air	6	Lembaga Kemasyarakatan	609,571,572.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pintu Air	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Pintu Air	6	Lembaga Kemasyarakatan	609,571,572.00	
		KELURAHAN BINTANG					**626,852,300.00**	**KELURAHAN BINTANG**					**626,852,300.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**626,852,300.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**626,852,300.00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**626,852,300.00**	**KECAMATAN**					**626,852,300.00**	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**63,300,728.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**63,300,728.00**	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bintang**	**100**	**%**	**63,300,728.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bintang**	**100**	**%**	**63,300,728.00**	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bintang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bintang)	1	Laporan	63,300,728.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bintang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bintang)	1	Laporan	63,300,728.00	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**563,551,572.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**563,551,572.00**	

	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Bintang**	**100**	**%**	**563,551,572.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Bintang**	**100**	**%**	**563,551,572.00**	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bintang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bintang	6	Lembaga Kemasyarakatan	563,551,572.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bintang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bintang	6	Lembaga Kemasyarakatan	563,551,572.00	
		KELURAHAN GAJAH MADA					**651,605,052.00**	**KELURAHAN GAJAH MADA**					**651,605,052.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**651,605,052.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**651,605,052.00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**651,605,052.00**	**KECAMATAN**					**651,605,052.00**	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**111,486,888.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**111,486,888.00**	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gajah Mada**	**100**	**%**	**111,486,888.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gajah Mada**	**100**	**%**	**111,486,888.00**	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gajah Mada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gajah Mada)	1	Laporan	111,486,888.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gajah Mada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gajah Mada)	1	Laporan	111,486,888.00	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**540,118,164.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**540,118,164.00**	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Gajah Mada**	**100**	**%**	**540,118,164.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Gajah Mada**	**100**	**%**	**540,118,164.00**	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gajah Mada	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Gajah Mada	6	Lembaga Kemasyarakatan	540,118,164.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gajah Mada	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Gajah Mada	6	Lembaga Kemasyarakatan	540,118,164.00	
		KELURAHAN MASJID JAMIK					**591,072,164.00**	**KELURAHAN MASJID JAMIK**					**591,072,164.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**591,072,164.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**591,072,164.00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**591,072,164.00**	**KECAMATAN**					**591,072,164.00**	

	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**108,959,588.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**108,959,588.00**	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Masjid Jamik**	**100**	**%**	**108,959,588.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Masjid Jamik**	**100**	**%**	**108,959,588.00**	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Masjid Jamik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Masjid Jamik)	1	Laporan	108,959,588.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Masjid Jamik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Masjid Jamik)	1	Laporan	108,959,588.00	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**482,112,576.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**482,112,576.00**	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Masjid Jamik**	**100**	**%**	**482,112,576.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Masjid Jamik**	**100**	**%**	**482,112,576.00**	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Masjid Jamik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Masjid Jamik	6	Lembaga Kemasyarakatan	482,112,576.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Masjid Jamik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Masjid Jamik	6	Lembaga Kemasyarakatan	482,112,576.00	
		KELURAHAN ASAM					**625,539,428.00**	**KELURAHAN ASAM**					**625,539,428.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**625,539,428.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**625,539,428.00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**625,539,428.00**	**KECAMATAN**					**625,539,428.00**	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**106,581,488.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**106,581,488.00**	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Asam**	**100**	**%**	**106,581,488.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Asam**	**100**	**%**	**106,581,488.00**	

	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Asam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Asam)	1	Laporan	106,581,488.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Asam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Asam)	1	Laporan	106,581,488.00	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**518,957,940.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**518,957,940.00**	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Asam**	**100**	**%**	**518,957,940.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Asam**	**100**	**%**	**518,957,940.00**	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Asam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Asam	6	Lembaga Kemasyarakatan	518,957,940.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Asam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Asam	6	Lembaga Kemasyarakatan	518,957,940.00	
		KELURAHAN MELINTANG					**720,558,960.00**	**KELURAHAN MELINTANG**					**720,558,960.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**720,558,960.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**720,558,960.00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**720,558,960.00**	**KECAMATAN**					**720,558,960.00**	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**131,988,088.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**131,988,088.00**	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Melintang**	**100**	**%**	**131,988,088.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Melintang**	**100**	**%**	**131,988,088.00**	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Melintang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Melintang)	1	Laporan	131,988,088.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Melintang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Melintang)	1	Laporan	131,988,088.00	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**588,570,872.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**588,570,872.00**	

	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Melintang**	**100**	%	**588,570,872.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Melintang**	**100**	%	**588,570,872.00**	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Melintang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Melintang	6	Lembaga Kemasyarakatan	588,570,872.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Melintang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Melintang	6	Lembaga Kemasyarakatan	588,570,872.00	
		KELURAHAN PARIT LALANG					**756,037,160.00**	**KELURAHAN PARIT LALANG**					**756,037,160.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**756,037,160.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**756,037,160.00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**756,037,160.00**	**KECAMATAN**					**756,037,160.00**	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	%	**108,665,588.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	%	**108,665,588.00**	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Parit Lalang**	**100**	%	**108,665,588.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Parit Lalang**	**100**	%	**108,665,588.00**	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Parit Lalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Parit Lalang)	1	Laporan	108,665,588.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Parit Lalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Parit Lalang)	1	Laporan	108,665,588.00	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	%	**647,371,572.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	%	**647,371,572.00**	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Parit Lalang**	**100**	%	**647,371,572.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Parit Lalang**	**100**	%	**647,371,572.00**	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Parit Lalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Parit Lalang	6	Lembaga Kemasyarakatan	647,371,572.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Parit Lalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Parit Lalang	6	Lembaga Kemasyarakatan	647,371,572.00	
		KELURAHAN KERAMAT					**730,326,660.00**	**KELURAHAN PARIT LALANG**					**730,326,660.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**730,326,660.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**730,326,660.00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**730,326,660.00**	**KECAMATAN**					**730,326,660.00**	

	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**107,975,088.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu**	**100**	**%**	**107,975,088.00**	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Keramat**	**100**	**%**	**107,975,088.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Parit Lalang**	**100**	**%**	**107,975,088.00**	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Keramat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Keramat)	1	Laporan	107,975,088.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Parit Lalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Parit Lalang)	1	Laporan	107,975,088.00	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**622,351,572.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**%**	**622,351,572.00**	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Keramat**	**100**	**%**	**622,351,572.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Rangkui**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kelurahan Parit Lalang**	**100**	**%**	**622,351,572.00**	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Keramat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Keramat	6	Lembaga Kemasyarakatan	622,351,572.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Parit Lalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Parit Lalang	6	Lembaga Kemasyarakatan	622,351,572.00	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Kecamatan Rangkui merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rangkui. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Kecamatan Rangkui sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2025 terdiri dari 4 Program, 10 kegiatan dan 34 Sub kegiatan, sebagaimana rincian meliputi berikut :

1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
	1		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD
	2		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

		9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
	5		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
		13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	6		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
		14	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pintu Air)
		15	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bintang)
		16	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gajah Mada)
		17	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Masjid Jamik)
		18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Asam)
		19	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan Melintang)
		20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Parit Lalang)
		21	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kelurahan Keramat)
		22	
	7		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**
		23	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
	8		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

		24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	9		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
		25	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		26	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pintu Air)
		27	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bintang)
		28	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gajah Mada)
		29	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Masjid Jamik)
		30	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Asam)
		31	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Melintang)
		32	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Parit Lalang)
		33	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Keramat)
4			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
	10		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
		34	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Untuk lebih jelasnya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rangkui pada tahun 2025 terdapat dalam tabel berikut.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANGKUI KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN RANGKUI							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**3,5 70.00 Nilai Nilai**	**3,5 70.00 Nilai Nilai**	**10.414.964.319,00**	**7.373.066.622,00**	**7.963.899.856,30**	**4.037.812,00**							**10.419.002.131,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.950.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			300.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			300.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			300.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			600.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			450.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*				100 %	100 %	8.113.573.569,00	6.812.497.498,00	7.345.158.724,30	-768.414.844,70			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		8.117.611.381,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	8.113.123.569,00	6.812.497.498,00	7.345.158.724,30	-767.964.844,70	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			8.117.161.381,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			150.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			300.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*				0 %	0 %	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		24.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			24.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	273.220.750,00	110.605.000,00	118.105.000,00	-155.115.750,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		273.220.750,00	KECAMATAN RANGKUI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.061.500,00	3.061.500,00	-1.938.500,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			5.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.290.000,00	0,00	0,00	-82.290.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			82.290.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	66.668.500,00	66.668.500,00	-8.331.500,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			75.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.930.750,00	15.875.000,00	15.875.000,00	-15.055.750,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.930.750,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	25.000.000,00	32.500.000,00	-47.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			80.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	1.903.000.000,00	387.964.124,00	438.636.132,00	-1.464.363.868,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.903.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			75.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	-10.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			28.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000.000,00	295.714.124,00	346.386.132,00	-1.453.613.868,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.800.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	99.220.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-37.220.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		99.220.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	69.220.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-7.220.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			69.220.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**575.030.000,00**	**821.856.806,00**	**896.654.594,00**	**9.000.000,00**							**584.030.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rangkui*				100 %	100 %	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		18.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			18.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rangkui* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan*				100 %	100 %	502.280.000,00	776.856.806,00	851.654.594,00	349.374.594,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		502.280.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				9.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Rangkui*				100 %	100 %	63.750.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-18.750.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		63.750.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	63.750.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-18.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				63.750.000,00	KECAMATAN RANGKUI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**3.443.155.604,00**	**4.277.034.260,00**	**4.714.655.840,00**	**155.962.188,00**							**3.599.117.792,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan* *Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui*				100 %	100 %	31.700.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	-12.150.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		191.700.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	-450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				20.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	11.700.000,00	0,00	0,00	-11.700.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				11.700.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.411.455.604,00	4.257.484.260,00	4.695.105.840,00	1.283.650.236,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.407.417.792,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	127.500.000,00	122.500.000,00	-27.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				150.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Rangkui**				**100 %**	**100 %**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		15.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				15.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rangkui**				**100 %**	**100 %**	**274.305.000,00**	**274.305.000,00**	**99.745.000,00**	**0,00**							**274.305.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				100 %	100 %	274.305.000,00	274.305.000,00	99.745.000,00	-174.560.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		274.305.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	274.305.000,00	274.305.000,00	99.745.000,00	-174.560.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				274.305.000,00	KECAMATAN RANGKUI
		KELURAHAN PINTU AIR							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**575.030.000,00**	**821.856.806,00**	**896.654.594,00**	**9.000.000,00**							**584.030.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rangkui* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan*				100 %	100 %	502.280.000,00	776.856.806,00	851.654.594,00	349.374.594,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		502.280.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	61.660.000,00	100.993.366,00	112.697.138,00	51.037.138,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			61.660.000,00	KECAMATAN RANGKUI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**3.443.155.604,00**	**4.277.034.260,00**	**4.714.655.840,00**	**155.962.188,00**							**3.599.117.792,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan* *Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui*				100 %	100 %	31.700.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	-12.150.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		191.700.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.411.455.604,00	4.257.484.260,00	4.695.105.840,00	1.283.650.236,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.407.417.792,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	442.690.596,00	549.064.028,00	609.571.572,00	166.880.976,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			442.690.608,00	KECAMATAN RANGKUI
		KELURAHAN BINTANG							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**575.030.000,00**	**821.856.806,00**	**896.654.594,00**	**9.000.000,00**							**584.030.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rangkui* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan*				100 %	100 %	502.280.000,00	776.856.806,00	851.654.594,00	349.374.594,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		502.280.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	61.660.000,00	74.179.344,00	63.300.728,00	1.640.728,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			61.660.000,00	KECAMATAN RANGKUI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**3.443.155.604,00**	**4.277.034.260,00**	**4.714.655.840,00**	**155.962.188,00**							**3.599.117.792,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan* *Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui*				100 %	100 %	31.700.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	-12.150.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		191.700.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.411.455.604,00	4.257.484.260,00	4.695.105.840,00	1.283.650.236,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.407.417.792,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	403.690.896,00	513.964.028,00	563.551.572,00	159.860.676,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			404.584.608,00	KECAMATAN RANGKUI
		KELURAHAN GAJAH MADA							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**575.030.000,00**	**821.856.806,00**	**896.654.594,00**	**9.000.000,00**							**584.030.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rangkui Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan*				100 %	100 %	502.280.000,00	776.856.806,00	851.654.594,00	349.374.594,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		502.280.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	61.660.000,00	99.783.116,00	111.486.888,00	49.826.888,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			61.660.000,00	KECAMATAN RANGKUI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**3.443.155.604,00**	**4.277.034.260,00**	**4.714.655.840,00**	**155.962.188,00**							**3.599.117.792,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui*				100 %	100 %	31.700.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	-12.150.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		191.700.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.411.455.604,00	4.257.484.260,00	4.695.105.840,00	1.283.650.236,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.407.417.792,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	390.927.488,00	491.310.620,00	540.118.164,00	149.190.676,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			390.931.224,00	KECAMATAN RANGKUI
		KELURAHAN MASJID JAMIK							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**575.030.000,00**	**821.856.806,00**	**896.654.594,00**	**9.000.000,00**							**584.030.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rangkui Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan*				100 %	100 %	502.280.000,00	776.856.806,00	851.654.594,00	349.374.594,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		502.280.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	61.660.000,00	97.255.816,00	108.959.588,00	47.299.588,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			61.660.000,00	KECAMATAN RANGKUI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**3.443.155.604,00**	**4.277.034.260,00**	**4.714.655.840,00**	**155.962.188,00**							**3.599.117.792,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui*				100 %	100 %	31.700.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	-12.150.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		191.700.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.411.455.604,00	4.257.484.260,00	4.695.105.840,00	1.283.650.236,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.407.417.792,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	342.015.672,00	448.403.804,00	482.112.576,00	140.096.904,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			342.024.456,00	KECAMATAN RANGKUI
		KELURAHAN ASAM							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**575.030.000,00**	**821.856.806,00**	**896.654.594,00**	**9.000.000,00**							**584.030.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rangkui* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan*				100 %	100 %	502.280.000,00	776.856.806,00	851.654.594,00	349.374.594,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		502.280.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	61.660.000,00	95.627.716,00	106.581.488,00	44.921.488,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			61.660.000,00	KECAMATAN RANGKUI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**3.443.155.604,00**	**4.277.034.260,00**	**4.714.655.840,00**	**155.962.188,00**							**3.599.117.792,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan* *Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui*				100 %	100 %	31.700.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	-12.150.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		191.700.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.411.455.604,00	4.257.484.260,00	4.695.105.840,00	1.283.650.236,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.407.417.792,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	339.713.264,00	458.450.396,00	518.957.940,00	179.244.676,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			339.721.072,00	KECAMATAN RANGKUI
		KELURAHAN MELINTANG							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**575.030.000,00**	**821.856.806,00**	**896.654.594,00**	**9.000.000,00**							**584.030.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rangkui* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan*				100 %	100 %	502.280.000,00	776.856.806,00	851.654.594,00	349.374.594,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		502.280.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	61.660.000,00	118.784.316,00	131.988.088,00	70.328.088,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Melintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			61.660.000,00	KECAMATAN RANGKUI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**3.443.155.604,00**	**4.277.034.260,00**	**4.714.655.840,00**	**155.962.188,00**							**3.599.117.792,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan* *Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui*				100 %	100 %	31.700.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	-12.150.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		191.700.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Melintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.411.455.604,00	4.257.484.260,00	4.695.105.840,00	1.283.650.236,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.407.417.792,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	429.850.896,00	533.313.328,00	588.570.872,00	158.719.976,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Melintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			429.940.608,00	KECAMATAN RANGKUI
		KELURAHAN PARIT LALANG							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**575.030.000,00**	**821.856.806,00**	**896.654.594,00**	**9.000.000,00**							**584.030.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rangkui* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan*				100 %	100 %	502.280.000,00	776.856.806,00	851.654.594,00	349.374.594,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		502.280.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	61.660.000,00	95.461.816,00	108.665.588,00	47.005.588,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			61.660.000,00	KECAMATAN RANGKUI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**3.443.155.604,00**	**4.277.034.260,00**	**4.714.655.840,00**	**155.962.188,00**							**3.599.117.792,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan* *Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui*				100 %	100 %	31.700.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	-12.150.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		191.700.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.411.455.604,00	4.257.484.260,00	4.695.105.840,00	1.283.650.236,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.407.417.792,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	469.880.896,00	577.414.028,00	647.371.572,00	177.490.676,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			464.834.608,00	KECAMATAN RANGKUI
		KELURAHAN KERAMAT							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**575.030.000,00**	**821.856.806,00**	**896.654.594,00**	**9.000.000,00**							**584.030.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rangkui* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan*				100 %	100 %	502.280.000,00	776.856.806,00	851.654.594,00	349.374.594,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		502.280.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	61.660.000,00	94.771.316,00	107.975.088,00	46.315.088,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			61.660.000,00	KECAMATAN RANGKUI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**3.443.155.604,00**	**4.277.034.260,00**	**4.714.655.840,00**	**155.962.188,00**							**3.599.117.792,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Rangkui*				100 %	100 %	31.700.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	-12.150.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		191.700.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.411.455.604,00	4.257.484.260,00	4.695.105.840,00	1.283.650.236,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.407.417.792,00	KECAMATAN RANGKUI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	442.685.896,00	558.064.028,00	622.351.572,00	179.665.676,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			442.690.608,00	KECAMATAN RANGKUI
	J U M L A H								**14.722.454.923,00**	**12.746.262.688,00**	**13.674.955.290,30**	**-1.047.499.632,70**							**14.891.454.923,00**	

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan-catatan Penting

Renja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Rangkui merupakan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat yang berkembang selama tahun berjalan. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan di Kecamatan Rangkui dapat berjalan secara optimal dan adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk merealisasikan rencana yang telah disesuaikan ini secara tepat sasaran, waktu, dan anggaran. Adapun indikator kinerja utama yang berupaya dicapai oleh Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dijabarkan melalui tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Rangkui	1.1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Rangkui	100%
2	Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Rangkui	2.1	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Rangkui	100%

4.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 di tingkat Kecamatan wajib mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Seluruh kegiatan yang telah direncanakan harus tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD, RKPD Tahun 2025, serta regulasi yang berlaku dan kebijakan teknis lainnya. Renja Perubahan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan kondisi sosial ekonomi yang terjadi selama tahun berjalan.

Dalam pelaksanaannya, kecamatan berkewajiban menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, mencegah terjadinya tumpang tindih program, serta memperkuat sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah dan desa/kelurahan. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat yang teridentifikasi melalui hasil Musrenbang dan sumber data resmi lainnya. Di samping itu, proses pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya monitoring terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran. Bila tersedia, pemanfaatan sistem informasi perencanaan daerah (e-planning) juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin integrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan akurat.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, Kecamatan Rangkui akan menindaklanjuti dokumen ini dengan langkah-langkah konkret guna memastikan implementasi program dan kegiatan berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebijakan perencanaan daerah.

Rencana tindak lanjut ini meliputi beberapa hal strategis yang mencakup koordinasi, konsolidasi internal, penguatan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi berkala yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan perangkat daerah terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang mengalami perubahan, baik dari sisi target, lokasi, maupun alokasi anggaran. Koordinasi ini juga mencakup penyampaian dokumen Renja Perubahan kepada OPD teknis, Badan Perencanaan Daerah, serta pihak terkait lainnya sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
2. Kecamatan akan memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi (monev) dengan menetapkan jadwal monitoring, pelaporan perkembangan pelaksanaan program, serta pengukuran terhadap capaian indikator kinerja. Jika diperlukan, revisi lanjutan akan diajukan berdasarkan dinamika yang terjadi di lapangan, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Dengan rencana tindak lanjut ini, diharapkan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan dapat berjalan sesuai tujuan, berorientasi pada hasil, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Secara garis besar Renja Perubahan Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang tahun 2025 memuat 5 Program, 12 kegiatan dan 50 Sub kegiatan dengan besaran pagu Renja Perubahan sebesar Rp. 13.674.955.290,30,00,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Puluh rupiah).

4.4 Kesimpulan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 Kecamatan disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang selama tahun berjalan.

Renja Perubahan ini mencerminkan komitmen Kecamatan dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan secara responsif, adaptif, dan terukur, dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RKPD dan RPJMD Kabupaten/Kota. Perubahan dalam Renja ini meliputi penyempurnaan pada program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, serta alokasi anggaran berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya dan masukan dari berbagai pihak. Penyusunan dokumen ini juga diharapkan menjadi acuan operasional yang jelas dan terarah bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan pada sisa tahun anggaran 2025.

4.5 Saran

1. Penguatan koordinasi lintas sektor perlu terus dilakukan, terutama antara kecamatan, perangkat daerah, dan pemerintah desa, agar pelaksanaan kegiatan lebih sinergis dan efisien.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam memahami dinamika perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
3. Partisipasi masyarakat perlu lebih dioptimalkan dalam setiap tahapan pelaksanaan program agar hasil pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan riil.
4. Kecamatan perlu memaksimalkan sistem monitoring dan evaluasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk memastikan capaian Renja Perubahan dapat diukur secara objektif dan tepat waktu.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN GIRIMAYA
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Girimaya Tahun 2025 merupakan rangkaian pelaksanaan Renstra tahun kedua Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang untuk periode Tahun 2024-2026. Penyusunan dokumen ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sudah tidak berlaku lagi. Sebagai perangkat daerah yang taat asas perencanaan pembangunan, keberadaan Dokumen Renja Perubahan merupakan perpanjangan implementasi dari Dokumen Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan aspek strategis seperti program prioritas Kepala Daerah, maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan Kecamatan yang sesuai dengan peraturan terkait. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum di dalam Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 sudah menterjemahkan program prioritas Kecamatan Girimaya yang telah tersusun di dalam Renstra, khusus untuk tahun 2025.

Dokumen Renja Perubahan ini memuat beberapa hal penting terkait program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan RKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025. Dokumen ini merupakan langkah awal yang nantinya menjadi dasar penentuan pengukuran kinerja Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang dan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang

sebagai Program dan Kegiatan Unggulan dalam pelayanan masyarakat di Kota Pangkal Pinang umumnya dan masyarakat Kecamatan Girimaya khususnya. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini juga menjadi cerminan atas pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama masa transisi kepemimpinan Kota Pangkal Pinang.

Diakhir penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025, kami mengucapkan Alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami selama penyusunan Renja ini. Tak lupa juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Renja ini dapat direalisasikan dengan baik, benar, penuh tanggungjawab dan menjadi alat penunjuk arah yang tepat bagi Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang dalam mengamban tugas memajukan Kota Pangkal Pinang.

CAMAT GIRIMAYA,

LUTHFI DARMA SAPUTRA, S.IP
PEMBINA/ IVa
NIP 19891204 201010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD..... 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir SKPD 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Rencana Kerja SKPD..... 35

3.1 Sasaran Rencana Kerja SKPD 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 38

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan-Catatan Penting 51

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 52

5.3 Rencana Tindak Lanjut..... 52

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat menjadi Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penjabaran Renstra Kecamatan Girimaya Periode 2024-2026. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Renja wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Girimaya untuk tahun anggaran 2025. Renja merupakan penterjemahan dari Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kecamatan Girimaya Tahun 2024-2026 yang memuat Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang.

Renja Perubahan disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan secara otomatis menyesuaikan dengan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Renja dimaksud, Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang Kota Pangkal Pinang yang menjadi koordinator perencanaan di Kota Pangkal Pinang dan juga dengan para pemangku kepentingan. Merujuk pada pasal 16 (enam belas) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir;
f. Penetapan.

Renja Perubahan Kecamatan Girimaya Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Girimaya 2024-2026. Kedua dokumen tersebut

mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Girimaya berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Girimaya tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Girimaya mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1) Renja Kecamatan Girimaya merupakan acuan untuk memasukkan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
2) Renja Kecamatan Girimaya merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Girimaya.

1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Girimaya Tahun 2025 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Kota pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
13) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor144)
14) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Girimaya Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Girimaya untuk tahun kedua Renstra Transisi 2024-2026. Dengan adanya dokumen Renja Perubahan, pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga pencapaian Rencana Pembangunan Daerah di bidang pelayanan masyarakat dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 juga bertujuan untuk melengkapi rangkaian penyusunan Rencana kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, dimana Renja organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bagian penting yang terkandung di dalamnya. Renja Perubahan Tahun 2025 memuat uraian detail Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang direncanakan akan direalisasikan di tahun 2025 sesuai dengan proyeksi kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pangkal Pinang, sebagai upaya mendukung pelaksanaan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah di Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perubahan Kecamatan Girimaya Tahun 2025 meliputi bagian – bagian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencantumkan pembahasan atas Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Girimaya Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Girimaya hingga tahun 2024. Untuk itu pada bagian ini dijabarkan hasil kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024. Adapun pokok-pokok materi yang akan dirangkum dalam tabel yang akan dijabarkan setelah ini memuat poin – poin diantaranya :

1. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Girimaya ;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Keenam uraian di atas dijabarkan dalam tabel T.C 29 berikut ini :

Tabel T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Girimaya dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Pangkalpinang

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	3,400	5.487.896.918	3,400	5.463.898.250	100	99,563	SEKRETARIS CAMAT
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72,750		72,750		100		SEKRETARIS CAMAT
2		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	2.500.000	100	2.497.300	100	99,892	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
3		070101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	500.000	2	500.000	100	100	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
4		070101201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	500.000	2	499.100	100	99,820	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
5		070101201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	500.000	2	499.100	100	99,820	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
6		070101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	500.000	4	500.000	100	100	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
7		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	500.000	3	499.100	100	99,820	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
8		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4.657.801.790	100	4.647.541.734	100	99,780	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
9		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	41	4.656.801.790	42	4.646.543.534	100	99,780	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
10		070101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	500.000	1	499.100	100	99,820	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
11		070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	500.000	2	499.100	100	99,820	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12		070101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	55.380.000	100	55.380.000	100	100	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
13		070101205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	55.380.000	1	55.380.000	100	100	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
14		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	152.916.400	100	148.071.804	100	96,832	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
15		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5.453.200	1	5.453.190	100	100,000	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
16		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	48.094.400	4	43.696.900	100	90,857	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
17		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	24.368.800	2	23.998.800	100	98,482	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
18		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	75.000.000	1	74.922.914	100	99,897	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
19		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	547.798.728	100	540.068.312	100	98,589	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
20		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	48.000.000	1	47.951.000	100	99,898	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
21		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	43.500.000	1	43.450.000	100	99,885	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
22		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	456.298.728	1	448.667.312	100	98,328	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
23		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Perangkat Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	71.500.000	100	70.339.100	100	98,376	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
24		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	71.500.000	3	70.339.100	100	98,376	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									**100,000**	**99,563**	
PREDIKAT KINERJA									**ST**	**ST**	
25	**-**	**070102**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu. (Dengan Satuan:%)**	**100**	**579.304.956**	**100**	**570.186.901**	**100**	**98,426**	**SEKRETARIS CAMAT**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**
				Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**
				Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**
				Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**
				Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**
26		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100	8.264.700	100	8.264.700	100	100	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
27		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	8.264.700	1	8.264.700	100	100	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
28		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100	536.095.256	100	527.777.201	100	98,448	KASI PELAYANAN UMUM
				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kelurahan Batu Intan (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH BATU INTAN
				Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Bukit Besar (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH BUKIT BESAR
				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kelurahan Semabung Baru (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH SEMABUNG BARU
				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kelurahan Sriwijaya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH SRIWIJAYA
				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kelurahan Pasar Padi (Dengan Satuan:%)	100		100		100		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
29		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.175.600	1	9.138.300	100	99,593	KASI PELAYANAN UMUM
30		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	526.919.656	1	518.638.901	100	98,428	LURAH BATU INTAN
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH BUKIT BESAR
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH SEMABUNG BARU
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH SRIWIJAYA
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH PASAR PADI
31		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Girimaya (Dengan Satuan:%)	100	34.945.000	100	34.145.000	100	97,711	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
32		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	2	34.945.000	2	34.145.000	100	97,711	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**98,426**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
33	**-**	**070103**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (Kec.Gririmaya) (Dengan Satuan:%)**	**100**	**2.988.178.682**	**100**	**2.957.929.514**	**100**	**98,988**	**SEKRETARIS CAMAT**
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kec.Girimaya) (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
34		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu intan (Dengan Satuan:%)	100	143.958.000	100	143.320.516	100	99,557	LURAH BATU INTAN
				Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Besar (Dengan Satuan:%)	100		150		100		LURAH BUKIT BESAR
				Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semabung Baru (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH SEMABUNG BARU
				Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sriwijaya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH SRIWIJAYA
				Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasar Padi (Dengan Satuan:%)	100		150		100		LURAH PASAR PADI
				Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
35		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	11.575.000	6	11.575.000	100	100	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
36		070103202002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	125.000.000	1	124.362.516	100	99,490	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1		1		100		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1		1		100		LURAH SEMABUNG BARU
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1		1		100		LURAH SRIWIJAYA
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1		1		100		LURAH PASAR PADI
37		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	7.383.000	1	7.383.000	100	100	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
38		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100	2.844.220.682	75	2.814.608.998	75	98,959	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Batu Intar (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH BATU INTAN
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanan di Kelurahan Bukit Besar (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH BUKIT BESAR
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan di Kelurahan Semabung Baru (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH SEMABUNG BARU
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan di Kelurahan Sriwijaya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH SRIWIJAYA
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan di Kelurahan Pasar Padi (Dengan Satuan:%)	100		100		100		LURAH PASAR PADI
39		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	2.771.446.082	6	2.742.126.098	100	98,942	LURAH PASAR PADI
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6		6		100		LURAH BATU INTAN
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6		6		100		LURAH BUKIT BESAR
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6		6		100		LURAH SEMABUNG BARU
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6		6		100		LURAH SRIWIJAYA

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
40		070103203002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	1	72.774.600	1	72.482.900	100	99,599	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**98,988**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
41	-	**070104**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)**	**100**	**3.850.000**	**100**	**3.850.000**	**100**	**100**	**SEKRETARIS CAMAT**
42		070104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Dengan Satuan:%)	100	3.850.000	100	3.850.000	100	100	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
43		070104201001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	3.850.000	1	3.850.000	100	100	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**100,000**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
44	-	**070105**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan.. (Dengan Satuan:%)**	**100**	**244.215.000**	**100**	**244.215.000**	**100**	**100**	**SEKRETARIS CAMAT**
45		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:%)	100	244.215.000	100	244.215.000	100	100	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
46		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	244.215.000	1	244.215.000	100	100	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**100,000**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)					**100,000**	**99,395**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkanya. Pengukuran atas kinerja pelayanan Kecamatan Girimaya dilakukan melalui analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Girimaya. Pengukuran dilakukan atas ketercapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Renstra, untuk kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pada akhirnya, akan diperoleh rasio capaian indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian indikator dimaksud. Berikut dijabarkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang yang tergambar melalui tabel TC.30 berikut ini :

Tabel TC. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Girimaya

Kota Pangkalpinang (Tahun 2020- Tahun 2023)

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke - (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	-	86%	3,2	3,3	-	-	86%	3,0	3	-	-	100,00 %	93,75%	93,94%	-	-
2	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	100%	-	84%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	97,62%	-	-	-	-
3	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%	-	80%	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	93,75%	-	-	-	-
4	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	72%	80%	85%	90%	-	72%	100%	100%	100%	-	100,00 %	125,00 %	117,65 %	111,11 %	-
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Girimaya	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
7	Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja Kecamatan Girimaya akan berbenah diri untuk terus dapat meningkatkan kinerja kegiatan, karena itu pengelolaan pemerintahan diperlukan. Penerapan manajemen pemerintahan seluruh pelaksanaan kegiatannya diarahkan pada sebuah proses bagaimana menciptakan efektivitas usaha secara efisien dan produktif dalam penerapan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Girimaya dalam proses kegiatan program kerja kecamatan juga termaksimalkan fungsi manajemen pemerintahan yang tercakup dalam berbagai aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber daya pemerintahan dan kontrol pemerintahan yang kesemuanya dijalankan dalam koordinasi yang baik. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kecamatan Girimaya memiliki fungsi pelayanan umum dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku Kecamatan memiliki urusan wajib yaitu : Urusan Pemerintahan umum yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Girimaya telah menetapkan beberapa langkah pencapaian melalui penetapan program kerja, tujuan maupun sasaran yang semuanya diarahkan pada pencapaian visi dan misi kecamatan secara maksimal. Dalam proses pelaksanaan di lapangan meskipun telah direncanakan dengan baik, berbagai permasalahan timbul yang berpengaruh dalam kegiatan kerja terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Girimaya. Permasalahan-permasalahan ini pada akhirnya berdampak pada kurang maksimalnya mekanisme program kerja yang telah direncanakan, dari beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan maupun program kerja kecamatan dan kelurahan yang paling dominan adalah masalah :

a. Disiplin Pegawai

Hal ini merupakan permasalahan klasik aparatur pemerintahan. Masalah disiplin pegawai terutama menyangkut kehadiran pegawai pada jam kantor sehingga akan sangat berpengaruh pada kemampuan

pelayanan masyarakat ditingkat kelurahan. Kurang disiplinnya pegawai sering kali menyebabkan proses pelayanan publik memakan waktu lama karena pegawai yang bertugas dalam suatu urusan tidak berada ditempat.

b. Kurangnya sarana dan prasarana kerja

Dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kecamatan Girimaya setiap tahunnya telah melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di kecamatan maupun di kelurahan, baik berupa pengadaan alat-alat pendukung kinerja pelayanan seperti alat-alat elektronik maupun lainnya, dan melakukan pemeliharaan peralatan kantor, gedung kantor. Permasalahan yang masih dihadapi yaitu masih terdapatnya kelurahan di Kecamatan Girimaya yang belum memiliki gedung kantor yang representatif sebagaimana gedung pelayanan. Solusi yang dilakukan kecamatan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang guna segera melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan gedung kantor baru untuk kelurahan dengan prioritas 3 kelurahan yaitu kelurahan Semabung Baru, Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Bukit Besar.

Sejalan dengan paradigma yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menekankan pada otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Kecamatan Girimaya sebagai bagian dari satuan kerja Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mempunyai paradigma yang sama dimana mengutamakan pelayanan publik yang prima dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu semuanya perlu didukung oleh perencanaan yang matang menyangkut segala hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kerja kecamatan kedepan, sehingga diperlukan analisis

mendalam segala kemungkinan baik peluang maupun tantangan kedepan yang akan menjadi permasalahan bagi program kerja kecamatan kedepan yaitu:

1) Proses rekrutmen dan mutasi pegawai

   Proses rekrutmen pegawai yang selama ini diadakan seringkali kurang berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan dan kelurahan, hal ini berdasarkan realita dilapangan bahwa penempatan pegawai baru sering tidak menjangkau level kecamatan dan kelurahan dan untuk jangka panjang jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun dengan jumlah pegawai yang baru tidak seimbang, hal ini sangat berpengaruh bagi kecamatan dan kelurahan yang terus mengalami kekurangan pegawai serta tidak bertambahnya pegawai yang berkualitas ditingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu proses mutasi pegawai yang dilakukan sering kali tidak membawa perubahan yang berarti mengingat pegawai yang dimutasi merupakan pegawai yang "bermasalah" atau kurang secara etos kerja. Dari semua proses ini tentunya kedepan kecamatan dan kelurahan akan mengalami kesulitan untuk dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal, karena akan selalu mengalami permasalahan yang sama yakni kuantitas dan kualitas pegawai.

2) Koordinasi antar instansi

   Permasalahan strategi kedepan yang akan menjadi kendala bagi pelaksanaan kegiatan dan program kerja kecamatan adalah masalah koordinasi antar intansi terkait, mengingat kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan umum saja tapi juga menjalankan fungsi pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan. Jadi cakupan kegiatan kecamatan sangatlah luas sehingga kedepan koordinasi dengan instansi terkait akan menjadi permasalahan tersendiri seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kualitas kegiatan masing-masing instansi, hal ini sering menimbulkan tumpang tindih informasi maupun kewenangan

karena setiap instansi ingin mencapai target kerjanya masing-masing.

3) Tingkat partisipasi masyarakat

Dalam proses kegiatan pemerintahan maupun program kerja kecamatan terutama yang sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat atau kurang pedulinya masyarakat terhadap program kerja daerah maupun kecamatan. Realita dilapangan kurangnya respon masyarakat ini sebagian besar karena mobilitas masyarakat itu sendiri, tak bisa dipungkiri bahwa alasan ekonomi sering menjadi kendala karena masing-masing sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sementara itu kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Hal ini mendorong masyarakat untuk benar-benar efisien memanfaatkan waktu sehingga kurang peduli terhadap lingkungan sekitar.

4) Penguasaan teknologi dan informasi

Keberhasilan kecamatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu dukungan oleh beberapa faktor seperti perencanaan yang matang, pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal, kemampuan finansial maupun penguasaan teknologi dan informasi. Salah satu kunci keberhasilan adalah penguasaan teknologi dan informasi, seperti kita ketahui teknologi dan informasi memegang peranan penting, dimana untuk membuat suatu perencanaan yang baik kita membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat menganalisa data maupun permasalahan yang akan dihadapi dikemudian hari. Dalam proses kegiatan yang dilaksanakan keberhasilan akan sangat ditentukan oleh bagaimana suatu perencanaan telah dipersiapkan dengan maksimal. Sudah menjadi suatu ketentuan bahwa teknologi dan informasi akan selalu berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Untuk aparatur daerah yang tertinggal dalam penguasaan teknologi dan informasi akan mengalami kesulitan dalam menjawab semua tantangan dan dalam memenuhi pelayanan masyarakat dimasa mendatang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir SKPD

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Girimaya Tahun 2025 juga memperhatikan kesesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025. Hal ini dikarenakan Renja Perubahan perangkat daerah merupakan penterjemahan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sehingga harus terjalin kesesuaian/ kesinkronan satu sama lain. Berikut dijabarkan hasil review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Renja Perubahan Kecamatan Girimaya Tahun 2025 yang ditampilkan pada tabel T.C 31 berikut ini

Tabel TC 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	PAGU RKPD PERUBAHAN 2025	
	KECAMATAN GIRIMAYA			**9.873.609.500,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**3.50 72,75 Nilai Nilai**	**5.593.487.988,20**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	3.600.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	510.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.020.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				

		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.020.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	600.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	450.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP	100 %	4.969.136.604,20	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/b ulan	4.968.836.604,20	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	150.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	1 Laporan	150.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA

		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	100 %	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	130.615.300,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.117.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.935.800,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.195.500,00	KECAMATAN GIRIMAYA

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	32.367.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	421.226.084,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	339.226.084,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerak Dalam Kondisi Baik	100 %	68.910.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	68.910.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**628.184.076,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Girimaya	100 %	11.625.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	11.625.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	100 %	562.804.076,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.750.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Girimaya	100 %	53.755.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	53.755.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**3.547.117.436,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	14.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	9.500.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan				
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	100 %	3.533.117.436,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyara katan	72.500.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Girimaya**	**100 %**	**11.300.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya	100 %	11.300.000,00	KECAMATAN

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Girimaya			GIRIMAYA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.300.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya**	**100 %**	**93.520.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Girimaya	100 %	93.520.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	93.520.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	KELURAHAN BATU INTAN			**9.873.609.500,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**628.184.076,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan	Persentase Terselenggaranya Urusan	100 %	562.804.076,00	KECAMATAN

	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya			GIRIMAYA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	113.278.588,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**3.547.117.436,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	14.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	100 %	3.533.117.436,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyara katan	609.450.572,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	KELURAHAN BUKIT BESAR			**9.873.609.500,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.873.609.500,20**	

7.01	**KECAMATAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**628.184.076,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	100 %	562.804.076,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	101.037.124,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**3.547.117.436,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	14.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	100 %	3.533.117.436,00	KECAMATAN GIRIMAYA

7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyara katan	754.693.872,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	KELURAHAN SEMABUNG BARU			**9.873.609.500,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**628.184.076,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	100 %	562.804.076,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	109.967.488,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**3.547.117.436,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	14.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				

		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	100 %	3.533.117.436,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyara katan	747.410.072,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	KELURAHAN SRIWIJAYA			**9.873.609.500,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**628.184.076,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	100 %	562.804.076,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	117.065.388,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**3.547.117.436,00**	

	KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	14.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	100 %	3.533.117.436,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyara katan	742.330.072,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	KELURAHAN PASAR PADI			**9.873.609.500,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.873.609.500,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**628.184.076,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	100 %	562.804.076,00	KECAMATAN GIRIMAYA

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	109.705.488,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**3.547.117.436,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	14.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	100 %	3.533.117.436,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyara katan	606.732.848,00	KECAMATAN GIRIMAYA
J U M L A H				**9.873.609.500,20**	

Hasil review menunjukkan seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Perubahan telah mengakomodir Renja Perubahan Kecamatan Girimaya. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunannya, Renja Perubahan Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 telah berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Perubahan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GIRIMAYA

3.1 Tujuan Kecamatan Girimaya

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya"

Indikator dari tujuan ini adalah **"Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya"**

3.2 Sasaran Kecamatan Girimaya

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Girimaya yang diperoleh dari pencapaian outcome program Kecamatan Girimaya. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya yang akan dicapai adalah :

1) "**Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Girimaya"** Dengan indikator dari sasaran ini adalah **"Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Girimaya".**
2) **"Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Girimaya".** Dengan indikator sasaran yaitu **"Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditangani"**

Tabel 3.1
Keselarasan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Pembangunan Kecamatan Girimaya

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	
1	**2**	**3**		**4**	**5**	
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Girimaya	1. Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Girimaya	1.1	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Girimaya
				2. Terselesainya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Girimaya	2.1	Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani di Kecamatan Girimaya

Target indikator tujuan dan Sasaran di atas telah ditentukan di dalam dokumen Renstra Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026. Angka target tersebut menjadi pemacu kinerja Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang selama 3 tahun ke depan. Secara lengkap, target Kinerja Sasaran dan Tujuan pada Rencana Strategis Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Girimaya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	TARGET KINERJA		
						2022	2024	2025	2026
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Girimaya		1.1	Indek Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Girimaya	Nilai	98,64	86,00	87,00	88,00
		1. Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Girimaya	1.1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Girimaya	%	100	100	100	100
		2. Terselesainya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Girimaya	2.1	Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani di Kecamatan Girimaya	%	100	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GIRIMAYA

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Kecamatan Girimaya merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Girimaya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Kecamatan Girimaya sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD Perubahan, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.

Untuk lebih jelasnya Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Girimaya pada tahun 2025 terdapat dalam tabel TC.33 sebagai berikut :

Tabel TC. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang
Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
	KECAMATAN GIRIMAYA			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**3.50 72,75 Nilai Nilai**	**6.455.456.101,00**	**4.788.811.880,00**	**5.593.487.988,20**	**276.543.899,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA

		Dokumen DPA-SKPD						
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP	100 %	4.694.423.301,00	4.233.696.044,00	4.969.136.604,20	274.713.303,20	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.694.123.301,00	4.233.396.044,00	4.968.836.604,20	274.713.303,20	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	100 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	257.448.300,00	123.248.300,00	130.615.300,00	-126.833.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.117.000,00	6.117.000,00	6.117.000,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.260.000,00	0,00	0,00	-70.260.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.350.800,00	55.935.800,00	55.935.800,00	-8.415.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.720.500,00	36.195.500,00	36.195.500,00	-525.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80.000.000,00	25.000.000,00	32.367.000,00	-47.633.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.353.864.500,00	359.357.536,00	421.226.084,00	-932.638.416,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-2.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA

7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	37.541.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-3.541.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.266.323.500,00	277.357.536,00	339.226.084,00	-927.097.416,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerak Dalam Kondisi Baik	100 %	86.120.000,00	68.910.000,00	68.910.000,00	-17.210.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	56.120.000,00	68.910.000,00	68.910.000,00	12.790.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Girimaya	100 %	21.750.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	-10.125.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	21.750.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	-10.125.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00	KECAMATAN GIRIMAYA

	yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya						
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.500.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	7.250.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Girimaya	100 %	93.406.000,00	53.755.000,00	53.755.000,00	-39.651.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	93.406.000,00	53.755.000,00	53.755.000,00	-39.651.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15.200.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-5.700.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan							
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	17.575.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-13.075.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00	KECAMATAN GIRIMAYA

	Tingkat Kecamatan	kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya						
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	97.800.000,00	77.500.000,00	72.500.000,00	-25.300.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Girimaya**	**100 %**	**12.900.000,00**	**11.300.000,00**	**11.300.000,00**	**7.100.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Girimaya	100 %	12.900.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	-1.600.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.900.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	-1.600.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya**	**100 %**	**243.400.000,00**	**255.150.000,00**	**93.520.000,00**	**16.600.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Girimaya	100 %	243.400.000,00	255.150.000,00	93.520.000,00	-149.880.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal							
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	243.400.000,00	255.150.000,00	93.520.000,00	-149.880.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA

	KELURAHAN BATU INTAN			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	80.960.000,00	101.574.816,00	113.278.588,00	32.318.588,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	352.680.672,00	538.702.904,00	609.450.572,00	256.769.900,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	KELURAHAN BUKIT BESAR			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	83.898.000,00	104.097.816,00	101.037.124,00	17.139.124,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00	KECAMATAN GIRIMAYA

7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	462.285.896,00	686.656.328,00	754.693.872,00	292.407.976,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	KELURAHAN SEMABUNG BARU			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	82.069.900,00	99.013.716,00	109.967.488,00	27.897.588,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00	KECAMATAN GIRIMAYA

		dilaksanakan di Kecamatan Girimaya						
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	473.415.896,00	679.396.328,00	747.410.072,00	273.994.176,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	KELURAHAN SRIWIJAYA			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	89.068.000,00	105.361.616,00	117.065.388,00	27.997.388,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	450.240.896,00	671.596.328,00	742.330.072,00	292.089.176,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	KELURAHAN PASAR PADI			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01	**KECAMATAN**			**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	80.301.400,00	97.001.716,00	109.705.488,00	29.404.088,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							

		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	352.080.672,00	544.102.904,00	606.732.848,00	254.652.176,00	KECAMATAN GIRIMAYA
J U M L A H				**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan-Catatan Penting

Renja Perubahan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang untuk tahun 2025 sebagai gambaran pelaksanaan RKPD Perubahan Kota Pangkal Pinang untuk pelayanan terhadap masyarakat sekaligus pencapaian visi misi kepala Daerah.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan ini diupayakan mengakomodir pencapaian indikator yang menjadi kinerja utama Kecamatan Girimaya. Tidak maksimalnya pencapaian kinerja Kecamatan Girimaya sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan Kecamatan Girimaya, serta tentunya berpengaruh pula pada kebijakan – kebijakan Pemerintah yang akan diambil di Kota Pangkal Pinang. Adapun indikator kinerja utama yang berupaya dicapai oleh Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang dijabarkan melalui tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Tahun 2025
1	**2**	**3**		**4**
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Girimaya	1.1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Girimaya	100
2	Terselesainya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Girimaya	2.1	Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani di Kecamatan Girimaya	100

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 merupakan acuan bagi Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pelayanan masyarakat. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1) Renja Perubahan Kecamatan Girimaya tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Kecamatan Girimaya, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Kota Pangkal Pinang 2025.
2) Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
3) Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Girimaya mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Perubahan Kecamatan Girimaya Tahun 2025, maka Kecamatan Girimaya akan mengusulkan Perubahan Renja Kecamatan Girimaya Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Pelaksanaan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan harus selaras dengan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Renja ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang dalam mensukseskan program – program strategis Rencana Pembangunan Daerah. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Perubahan Kecamatan Girimaya Tahun 2025, maka Kecamatan Girimaya akan mengusulkan Perubahan Renja Kecamatan Girimaya Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GIRIMAYA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN GIRIMAYA							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**3.50 72,75 Nilai Nilai**	**3.50 72,75 Nilai Nilai**	**6.455.456.101,00**	**4.788.811.880,00**	**5.593.487.988,20**	**276.543.899,00**							**6.732.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 %	100 %	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		5.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP*				100 %	100 %	4.694.423.301,00	4.233.696.044,00	4.969.136.604,20	274.713.303,20			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		4.802.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.694.123.301,00	4.233.396.044,00	4.968.836.604,20	274.713.303,20	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			4.800.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN*				100 %	100 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		60.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	257.448.300,00	123.248.300,00	130.615.300,00	-126.833.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		315.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.117.000,00	6.117.000,00	6.117.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			10.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.260.000,00	0,00	0,00	-70.260.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			70.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	64.350.800,00	55.935.800,00	55.935.800,00	-8.415.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.720.500,00	36.195.500,00	36.195.500,00	-525.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			25.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	25.000.000,00	32.367.000,00	-47.633.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			150.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.353.864.500,00	359.357.536,00	421.226.084,00	-932.638.416,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.390.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			50.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	37.541.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-3.541.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			40.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.266.323.500,00	277.357.536,00	339.226.084,00	-927.097.416,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.300.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Perangkat Daerak Dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	86.120.000,00	68.910.000,00	68.910.000,00	-17.210.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		160.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	56.120.000,00	68.910.000,00	68.910.000,00	12.790.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			100.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**							**1.120.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	21.750.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	-10.125.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		15.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.750.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	-10.125.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			15.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.015.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	7.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			15.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Girimaya*				100 %	100 %	93.406.000,00	53.755.000,00	53.755.000,00	-39.651.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		90.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	93.406.000,00	53.755.000,00	53.755.000,00	-39.651.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			90.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**							**3.435.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		1.035.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15.200.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-5.700.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			20.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	17.575.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-13.075.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			15.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat	-		2.400.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	97.800.000,00	77.500.000,00	72.500.000,00	-25.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat			100.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Girimaya**				**100 %**	**100 %**	**12.900.000,00**	**11.300.000,00**	**11.300.000,00**	**7.100.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	12.900.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	-1.600.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		20.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	12.900.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	-1.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			20.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Girimaya**				**100 %**	**100 %**	**243.400.000,00**	**255.150.000,00**	**93.520.000,00**	**16.600.000,00**							**260.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	243.400.000,00	255.150.000,00	93.520.000,00	-149.880.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat	-		260.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	243.400.000,00	255.150.000,00	93.520.000,00	-149.880.000,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat			260.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
		KELURAHAN BATU INTAN							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**							**1.120.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.015.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	80.960.000,00	101.574.816,00	113.278.588,00	32.318.588,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			200.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**							**3.435.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		1.035.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			200.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat	-		2.400.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	352.680.672,00	538.702.904,00	609.450.572,00	256.769.900,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat			400.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
		KELURAHAN BUKIT BESAR							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**							**1.120.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.015.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	83.898.000,00	104.097.816,00	101.037.124,00	17.139.124,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			200.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**							**3.435.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		1.035.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			200.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat	-		2.400.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	462.285.896,00	686.656.328,00	754.693.872,00	292.407.976,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat			500.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
		KELURAHAN SEMABUNG BARU							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**							**1.120.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.015.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	82.069.900,00	99.013.716,00	109.967.488,00	27.897.588,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			200.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**							**3.435.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		1.035.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			200.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		2.400.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	473.415.896,00	679.396.328,00	747.410.072,00	273.994.176,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			500.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
		KELURAHAN SRIWIJAYA							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**							**1.120.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.015.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	89.068.000,00	105.361.616,00	117.065.388,00	27.997.388,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			200.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**							**3.435.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		1.035.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			200.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat	-		2.400.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	450.240.896,00	671.596.328,00	742.330.072,00	292.089.176,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat			500.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
		KELURAHAN PASAR PADI							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**535.953.300,00**	**584.179.680,00**	**628.184.076,00**	**584.046.700,00**							**1.120.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	420.797.300,00	518.799.680,00	562.804.076,00	142.006.776,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.015.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	80.301.400,00	97.001.716,00	109.705.488,00	29.404.088,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			200.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**2.221.279.032,00**	**3.211.954.792,00**	**3.547.117.436,00**	**1.213.720.968,00**							**3.435.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	32.775.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-18.775.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		1.035.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			200.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Girimaya*				100 %	100 %	2.188.504.032,00	3.197.954.792,00	3.533.117.436,00	1.344.613.404,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat	-		2.400.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	352.080.672,00	544.102.904,00	606.732.848,00	254.652.176,00	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat			400.000.000,00	KECAMATAN GIRIMAYA
	J U M L A H								**9.468.988.433,00**	**8.851.396.352,00**	**9.873.609.500,20**	**404.621.067,20**							**11.567.000.000,00**	

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KECAMATAN GERUNGGANG

Alamat :JalanDahlia V RT.02/01 Kel. Bukit Merapin
KecamatanGerunggang Kota Pangkalpinang
ProvinsiKepulauan Bangka Belitung

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang Tahun 2025 dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang. Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Atas tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, Juni 2025

CAMAT GERUNGGANG

Richard Syam, S.STP., M.AP
NIP. 198604292006021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **ii**

Daftar Isi ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-8

1.4 Sistematika Penulisan I-9

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU **II-1**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD.. II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD II-3

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD II-5

BAB III TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH **III-1**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah III-2

3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan III-4

BAB IV PENUTUP **IV-1**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Gerunggang mempunyai kegiatan yang prioritas dalam mendukung program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen program dan kegiatan yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Walikota terpilih yang telah tertuang dalan TRANSISI RENSTRA 2024 - 2026 Kecamatan Gerunggang dan telah tertuang juga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025, yang mana ini merupakan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Transisi Rencana Strategis 2024 – 2026 Kecamatan Gerunggang.

Penyusunan dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ,antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja yang berpedoman pada Transisi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

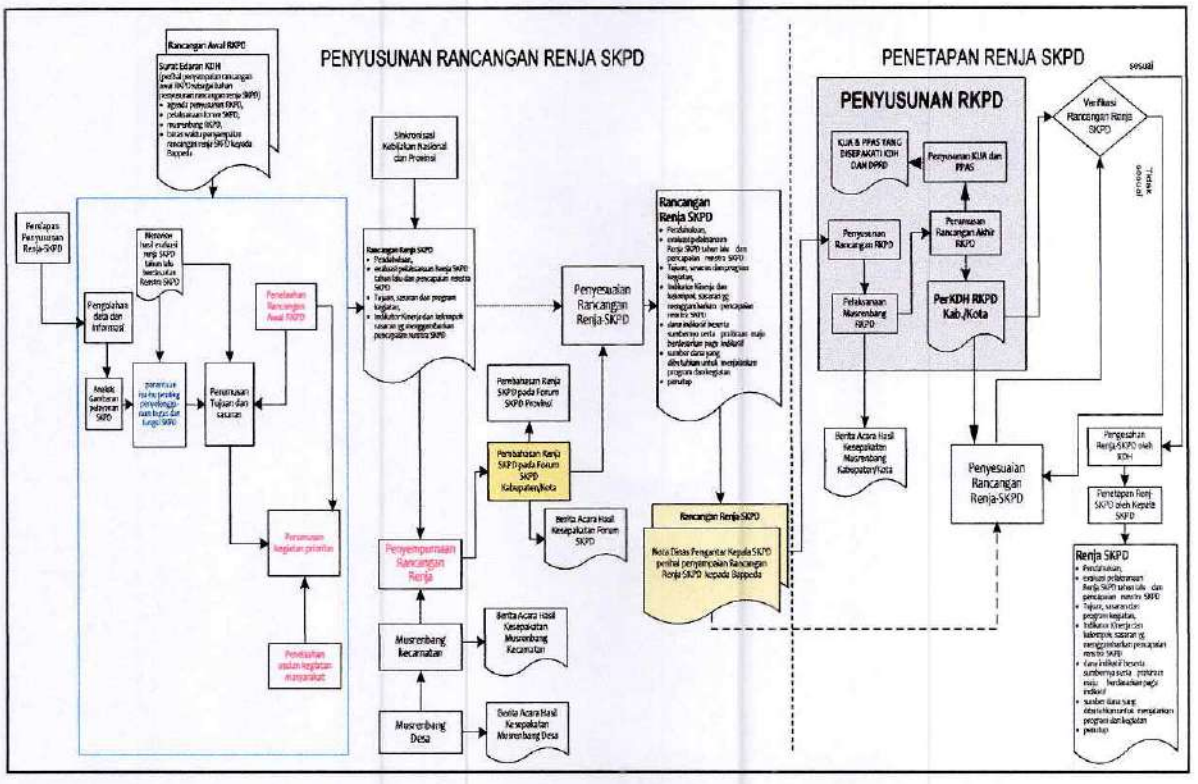

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Gerunggang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, trakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Ecaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).

25. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
26. Perwako no 9 th 2023 ttg RPD Kota Pangkalpinang Th 2024-2026 (Berita Daerah tahun 2023 no 144)
27. Perwako no 13 th 2023 ttg Renstra PD Kota Pangkalpinang Th 2024-2026 (Berita Daerah tahun 2023 no 148)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gerunggang Tahun 2025. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Gerunggang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan.

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu.

Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah.

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rancana Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah.

Menjelasakan Program dan Kegiatan beserta besaran dana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V Penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang sampai dengan Tahun 2025 (Tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang

Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	69	6.160.665.266	69	1.617.059.311		0		0		0	69	1.617.059.311	100	26	SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Gerunggang)
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	3,5	6.160.665.266	3,5	1.617.059.311							4	1.617.059.311	100		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Gerunggang)
2		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	8.189.000		0		0		0		0	0	-	0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
3		070101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	1.290.000		0							0	-	0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
4		070101201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2.155.000		0							0	-	0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
5		070101201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2.155.000		0							0	-	0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
6		070101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.294.000		0							0	-	0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
7		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.295.000		0							0	-	0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

8		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	5.483.803.548		1.606.306.311		0		0		0	0	1.606.306.311	0	29	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
9		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	51	5.476.323.548	51	1.606.306.311							51	1.606.306.311	100	29	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
		070101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.780.000		0							0	-	0	0	
		070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	4.700.000		0							0	-	0	0	
12		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	132.789.050		0		0		0		0	0	-	0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
13		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	24.815.750		0							0	-	0	0	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		070101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	0		0							0	-	0	0	PELAYANAN UMUM
15		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	63.704.000		0							0	-	0	0	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	19.269.300		0							0	-	0	0	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.000.000	1	17.615.008							1	17.615.008	100	70	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	465.473.668		5.003.000		0		0		0	0	5.003.000	0	1	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	63.300.000	1	5.003.000							1	5.003.000	100	8	PELAYANAN UMUM
21		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	38.291.000		0							0	-	0	0	UMUM DAN KEPEGAWAIAN

22		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	363.882.668	1	93.693.704							1	93.693.704	100	26	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	70.410.000		5.750.000		0		0	0	0	0	5.750.000	0	8	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	5	70.410.000		5.750.000							0	5.750.000	0	8	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				100,000	26,248	
												PREDIKAT KINERJA						
26	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.114.991.295	100	272.240.463		0		0	0	100	272.240.463	100	24	-
27		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gerunggang) (Dengan Satuan:Persen)	100	103.626.500		0		0		0	0	0	-	0	0	Sekretaris camat
28		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	103.626.500		0						0	-	0	0	Sekretaris camat
29		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kecamatan Gerunggang) (Dengan Satuan:Persen)	100	953.269.796	100	272.240.463		0		0	0	100	272.240.463	100	29	PELAYANAN UMUM
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Merapin (Dengan Satuan:Persen)	100									0		0		Lurah Bukit Merapin
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Air Kepala Tujuh (Dengan Satuan:Persen)	100									0		0		Lurah Air Kepala Tujuh
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Sari (Dengan Satuan:Persen)	100									0		0		Lurah Bukit Sari

			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Tuatunu Indah (Dengan Satuan:Persen)	100											0		0		Lurah Tuatunu Indah
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Kacang Pedang (Dengan Satuan:Persen)	100											0		0		Lurah Kacang Pedang
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100											0		0		Lurah Taman Bunga
30		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	7.433.500		0							0	-	0	0	PELAYANAN UMUM
31		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	945.836.296	1	272.240.463							1	272.240.463	100	29	Lurah Taman Bunga
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	152.438.216	1	45.379.293							1	45.379.293	100	30	Lurah Bukit Merapin
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.930.816	1	41.119.756							1	41.119.756	100	27	Lurah Air Kepala Tujuh
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	149.565.816	1	38.867.762							1	38.867.762	100	26	Lurah Bukit Sari
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	146.898.216	1	22.700.848							1	22.700.848	100	15	Lurah Tuatunu Indah
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	160.876.416	1	56.280.956							1	56.280.956	100	35	Lurah Kacang Pedang

32		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangdilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	100	58.095.000		0		0		0		0	0	-	0	0	KASI PEMERINTAHAN
33		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	2	58.095.000		0							0	-	0	0	KASI PEMERINTAHAN
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	24,416	
												PREDIKAT KINERJA							
34	-	070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun (Kec. Gerunggang) (Dengan Satuan:%)	100	4.256.798.252	100	619.877.870		0		0		0	100	619.877.870	100	15	SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Gerunggang)
35		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan (Kecamatan Gerunggang) (Dengan Satuan:Persen)	100	17.551.580		0		0		0		0	0	-	0	0	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)
				Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										0		0		Lurah Taman Bunga
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										0		0		Lurah Bukit Merapin
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										0		0		Lurah Air Kepala Tujuh
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										0		0		Lurah Bukit Sari
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										0		0		Lurah Tuatunu Indah
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										0		0		Lurah Kacang Pedang
36		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	14.251.580	6	7.730.000							6	7.730.000	100	54	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)
37		070103202002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0		0								-	0	0	Lurah Taman Bunga

				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0		0								-	0	0	Lurah Bukit Merapin
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0		0								-	0	0	Lurah Air Kepala Tujuh
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0		0								-	0	0	Lurah Bukit Sari
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0		0								-	0	0	Lurah Tuntunu Indah
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0		0								-	0	0	Lurah Kacang Pedang
38		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (D e n g a n Satuan:Laporan)	1	3.300.000		0							0	-	0	0	K E S E J A H T E R A A N MASYARAKAT (KESRA)
39		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan p e m b e r d a y a a n lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di K e c a m a t a n Gerunggang (Dengan Satuan:%)	100	4.239.246.672	100	619.877.870		0		0		0	100	619.877.870	100	15	K E S E J A H T E R A A N MASYARAKAT (KESRA)
				Persentase kegiatan p e m b e r d a y a a n lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										100		100		Lurah Taman Bunga
				Persentase kegiatan p e m b e r d a y a a n lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										100		100		Lurah Bukit Merapin
				Persentase kegiatan p e m b e r d a y a a n lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										100		100		Lurah Air Kepala Tujuh
				Persentase kegiatan p e m b e r d a y a a n lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										100		100		Lurah Bukit Sari
				Persentase kegiatan p e m b e r d a y a a n lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100										100		100		Lurah Tuntunu Indah
40		070103203001	Penyelenggaraan L e m b a g a Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (D e n g a n Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	4.157.253.172	6	619.877.870							6	619.877.870	100	15	Lurah Taman Bunga

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (D e n g a n Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	786.323.960	6	96.766.894							6	96.766.894	100	12	Lurah Bukit Meraplin
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (D e n g a n Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	626.506.528	6	95.371.898							6	95.371.898	100	15	Lurah Air Kepala Tujuh
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (D e n g a n Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	676.934.028	6	97.706.293							6	97.706.293	100	14	Lurah Bukit Sari
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (D e n g a n Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	687.350.784	6	95.231.696							6	95.231.696	100	14	Lurah Tuatunu Indah
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (D e n g a n Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	701.990.936	6	98.203.093							6	98.203.093	100	14	Lurah Kacang Pedang
41		070103203002	Peningkatan Kapasitas L e m b a g a Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang D i t i n g k a t k a n Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	1	81.993.500		0							0	-	0	0	K E S E J A H T E R A A N MASYARAKAT (KESRA)
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	14,562	
												PREDIKAT KINERJA							
42	-	070104	P R O G R A M KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kec. G e r u n g g a n g) (Dengan Satuan:%)**	100	6.757.000		0		0		0		0	0	-	0	0	S E K R E T A R I S K E C A M A T A N (K e c a m a t a n Gerunggang)
43		070104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	P e r s e n t a s e T e r l a k s a n a n y a Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100	6.757.000		0		0		0		0	0	-	0	0	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
44		070104201001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	6.757.000									0	-	0	0	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					0,000	0,000	
												PREDIKAT KINERJA							
45	-	070105	P R O G R A M PENYELENGGARAAN U R U S A N PEMERINTAHAN UMUM	P e r s e n t a s e Terselenggaranya U r u s a n **Pemerintahan Umum di Kecamatan (Kec. G e r u n g g a n g) (Dengan Satuan:%)**	100	293.170.000		0		0		0		0	0	-	0	0	S E K R E T A R I S K E C A M A T A N (K e c a m a t a n Gerunggang)

46		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Gerunggang) (Dengan Satuan:Persen)	100	293.170.000		0		0		0		0	0	-	0	0	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)
47		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	293.170.000		0						0	-	0	0	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0,000	0,000		
PREDIKAT KINERJA																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																100,000	21,742		
PREDIKAT KINERJA																			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	

Dievaluasi

Kota Pangkalpinang, tanggal 30-03-2025

CAMAT GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG

RICHARD SYAM, S.STP, M.AP NIP.198604292006021001

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gerunggang pada Rencana Kerja yang lalu dapat kita lihat pada pencapaian kinerja Transisi Rencana Strategis 2024 – 2026 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang
Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indek Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Angka		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2.	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen (%)		80	85	85	85	90	90	80	85	85	85	90	90	80	85	85	85	90	90

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja OPD Kecamatan Gerunggang apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra sudah cukup baik dilihat dari persentase capaian kegiatan karena sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik. Pada Penyusunan Renja OPD kecamatan Gerunggang Tahun 2025 ini telah mensinkronisasikan dengan visi misi walikota terpilih tahun 2018-2023. Kecamatan mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD penyebabnya terdiri dari banyak faktor baik berupa hal-hal yang bersifat internal dari OPD kecamatan itu sendiri maupun hal-hal lain yang tidak dapat dikontrol sebagai faktor eksternal.

Permasalahan yang terjadi pada tugas pokok dan fungsi Pelayanan pada Kecamatan Gerunggang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait Sekretariat

1) Masih kurangnya SDM aparatur administrasi di kecamatan dan Kelurahan.
2) Proporsi dan distribusi SDM yang kurang berimbang.
3) Masih kurangnya Sarana operasional serta ruang/gedung yang terkait pelayanan publik.
4) Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi infromasi;

b. Permasalahan terkait Bidang Tata Pemerintahan

1) Kurangnya SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan dibidang pegelolaan Pemerintahan, pengelolaan data Kelurahan, pengelola data kependudukan dan pertanahan.
2) masih kurang aktifnya partisipasi lembaga kemasyarakat dalam bidang pemerintahan, sehingga banyak dari masyarakat yang masih enggan berurusan ke Kecamatan dalam hal pelayanan pemerintahan.
3) Peran serta para pemuda dalam organisasi dilingkungan Kecamatan belum begitu signifikan.

c. Permasalahan terkait Bidang Seksi Pelayanan Umum

1) Kurangnya SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan dibidang Pelayanan administrasi publik dalam hal ini Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
2) Belum adanya Standar Operasional Prosedur dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

d. Permasalahan terkait Bidang Pembangunan

1) Masih banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terakomodir dalam pembangunan kota Pangkalpinang.
2) Belum ada diterbitkan tentang sanksi kepemilikan IMB dan tidak adanya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan

e. Permasalahan terkait Bidang Seksi Kesejahteraan Rakyat

1) Kurangnya kualitas SDM dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan data kesejahteraan masyarakat.

f. Permasalahan terkait Bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kurangnya SDM dalam bidang keamanan dan ketertiban umum.
2) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian keamanan dan ketertiban.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang dalam Rencana Kerja merupakan penjabaran dari pernyataan misi, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju.

3.1 Telaahan Tehadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan prioritas Nasional dan Provinsi Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gerunggang adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan.Peningkatan kualitas administrasi, meliputi peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat diwilayah kecamatan Gerunggang. Yang mana hal ini berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Gerunggang berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Gerunggang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Rumusan Tujuan

No	Isu Strategis	Tujuan
1	2	3
1	Rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Gerunggang
2	Masih rendahnya pemahaman perihal penegakan PERDA	
3	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan.	
4	Pelayanan Publik	
5	Pembangunan infrastruktur	

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Gerunggang yang diperoleh dari pencapaian outcome program Kecamatan Gerunggang. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Gerunggang yang akan dicapai adalah

"Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Gerunggang" dan "Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Gerunggang".

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gerunggang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2021/2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Gerunggang		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Gerunggang	PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	%	98,64	86,00	87,00	88,00
		Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Gerunggang	Persentase Peyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Gerunggang	Jumlah Surat Keterangan atau Rekomendasi dan Lain- lain yang Dikeluarkan oleh Kecamatan Tahun Berkenaan/ Jumlah Permintaan Surat Keterangan Atau Surat Rekomendasi dan Lain-lain Dari Masyarakat yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	100,00	100,00	100,00
		Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Gerunggang	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %	%	100	100,00	100,00	100,00

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan, hingga sub kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu pada peraturan berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya keputusan menteri ini, praktis seluruh nomenklatur program maupun kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam dokumen RPJMD) mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk reklasifikasi dan rekodefikasi;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang HasiL Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
4. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

a. Dasar pertimbangan penentuan program dan kegiatan

Dalam Renja Kecamatan Gerunggang Tahun 2025, penentuan program dan kegiatan yang prioritas maupun non prioritas didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tertentu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gerunggang. Program dan kegiatan yang dipilih dianggap dapat mengakomodir dan menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gerunggang, terutama yang berkaitan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi unsur kewilayahan Tahun 2025 dijabarkan dalam program dan kegiatan berikut ini :

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator
5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian APIP**
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Dengan Metode Survey**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Penyampaian Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan, Penganggarana dan Kinerja yang Disusun Tahun Berkenaan x 100 %**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP**	**Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai SAP Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Seluruh Laporan Keuangan yang Disusun Tahun Berkenaan x 100 %**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Menurunnya Pelanggaran Disiplin Pegawai Perangkat Daerah**	**Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN**	**Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Tahun Lalu x 100 %**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tercantum Dalam APBD Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan x 100 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi Tahun Berkenaan (unit) Dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan (unit) x 100 %**
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercantum Dalam APBD Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun berkenaan x 100 %**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik**	**Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Terpelihara Dengan Baik Tahun Berkenaan (unit) Dibagi Jumlah Seluruh Barang Milik Perangkat Daerah yang Ada Tahun Berkenaan (unit) x 100 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gerunggang**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gerunggang**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan / Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan x 100 %**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan penugasan kepala daerah yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan penugasan kepala daerah yang direncanakan dalam Renja Tahun berkenaan x 100%**
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal (STQ/MTQ)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Meningkatnya Sarana dan Prasaranan Publik yang Terbangun di Kecamatan Gerunggang**	**Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Gerunggang**	**Jumlah Sarana Prasarana Publik yang Dibangun Tahun Berkenaan (unit) / Jumlah Sarana dan Prasarana Publik yang Akan Dibangun Tahun Berkenaan (unit) x 100 %**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Gerunggang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Gerunggang**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Gerunggang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan

		Gerunggang	
Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Taman Bunga	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Taman Bunga**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Bunga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Bunga yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Merapin	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Merapin**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Merapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Merapin yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Air Kepala Tujuh	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Air Kepala Tujuh**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Kepala Tujuh yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Sari	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Sari**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Sari yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tua Tunu Indah	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tua Tunu Indah**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Tua Tunu Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Tua Tunu Indah yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kacang Pedang	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kacang Pedang**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Kacang Pedang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kacang Pedang yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

	Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang Akitf / Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakata di Kecamatan dan Kelurahan x 100 %**
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gerunggang**	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gerunggang**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam renja tahun berkenaan x 100%**
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Taman Bunga	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Taman Bunga**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%**
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Taman Bunga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Taman Bunga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Taman Bunga
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Merapin	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Merapin**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%**
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Bukit Merapin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Merapin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Merapin
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Kepala Tujuh	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Air Kepala Tujuh**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%**
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Air Kepala Tujuh
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Sari	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Sari**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%**
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Bukit Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Sari
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tua Tunu	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan**

	Indah	**Kelurahan Tua Tunu Indah**	**tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%**
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Tua Tunu Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Tua Tunu Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Tua Tunu Indah
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kacang Pedang	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Kacang Pedang**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%**
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Kacang Pedang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Kacang Pedang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Kacang Pedang
		Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	**Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Meningkatnya waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**	**Jumlah waktu pelayanan administrasi tepat waktu yang terselenggara dibagi jumlah waktu pelayanan administrasi tepat waktu x 100 %**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Gerunggang**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Gerunggang**	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Gerunggang**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Gerunggang**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%**
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Taman Bunga	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Taman Bunga**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak**

			dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Taman Bunga)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Taman Bunga)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Taman Bunga)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Merapin	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Merapin**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Merapin)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Merapin)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Merapin)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Air Kepala Tujuh	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Air Kepala Tujuh**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Air Kepala Tujuh)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Air Kepala Tujuh)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Air Kepala Tujuh)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Sari	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Sari**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Sari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Sari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Sari)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Tua Tunu Indah	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Tua Tunu Indah**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang**

			direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tua Tunu Indah)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tua Tunu Indah)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tua Tunu Indah)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Kacang Pedang	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Kacang Pedang**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kacang Pedang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kacang Pedang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kacang Pedang)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Gerunggang**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Gerunggang**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan tahun berkenaan Dibagi Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang direncanakan tahun berkenaan x 100%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gerunggang**	**Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Gerunggang**	**Jumlah Laporan atau Pengaduan dari Masyarakat yang Ditindaklanjuti Tahun berkenaan / Jumlah Laporan Atau Pengaduan yang Diterma Tahun Berkenaan x 100 %**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tahun berkenaan dibagi jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan tahun berkenaan x 100%**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung indikator setingkat outcome masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai targetnya untuk pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gerunggang ini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengembangan sumber daya pegawai dan sumber daya masyarakat. dimana kualitas dan kuantitas pegawai masih belum memadai. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan sampai saat ini adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan belum jelas status dan legitimasinya sehingga dalam pelaksanaan tugas sering terjadi tumpang tindih dan keterbatasan sarana penunjang kegiatan kantor dan pemerintahan yang belum memadai sehingga berpengaruh kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penataan sistem informasi kependudukan di kecamatan yang lebih maju dan tersistematis dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga sistem pelayanan yang diberikan pun lebih cepat dan efektif serta tersedianya data yang lebih akurat dan sistematis.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi, sebagian pelimpahan yang diwenangkan serta tugas-tugas lain dari pemerintah kota merupakan embrio kecamatan akan menjadi pusat pelayanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana termasuk penambahan dana yang terpisah dari anggaran rutin kecamatan dikarenakan saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala

wilayah melainkan tempat wilayah kerja bagi fungsi-fungsi lain yang melekat di satuan kerja, dengan demikian pelimpahan kewenangan sepenuhnya kepada kecamatan sangat diperlukan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas ke depan untuk dapat mencapai Visi Misi Walikota terpilih serta sasaran dan tujuan Kecamatan Gerunggang, diharapkan juga kepada semua unit organisasi di lingkungan Kecamatan Gerunggang dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya agar dapat terumuskan dengan baik di dalam Rencana Kerja Kecamatan Gerunggang tahun 2025. sehingga tahun berikutnya target dari rencana kerja dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran.

Pangkalpinang, Juni 2025
CAMAT GERUNGGANG

RICHARD SYAM, S.STP., M.AP
NIP. 19860429 200602 1001

RENJA PERUBAHAN
Tahun 2025

KECAMATAN BUKIT INTAN

KOTA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Pelepas Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Telp. 0717 – 4262468 e-Mail : kec-bukitintan@pangkalpinangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 merupakan rangkaian lanjutan pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang. Penyusunan dokumen ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dokumen Renja ini memuat beberapa hal penting terkait lanjutan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan RKPD Perubahan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025. Dokumen ini yang nantinya menjadi dasar penentuan pengukuran kinerja Kecamatan Bukit Intan kota pangkal Pinang selama Tahun 2025, dan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang sebagai program dan kegiatan unggulan dalam pelayanan masyarakat di Kota Pangkal Pinang umumnya dan masyarakat Bukit Intan khususnya. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini juga menjadi cerminan atas pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Diakhir penyusunan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini, kami mengucapkan Alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami selama penyusunan Renja ini. Tak lupa juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Renja ini dapat direalisasikan dengan baik, benar, penuh tanggungjawab dan menjadi alat penunjuk arah yang tepat bagi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang dalam mengemban tugas memajukan Kota Pangkal Pinang.

Pangkalpinang, 20 Mei 2025
Camat Bukit Intan,

Muhamad Amir, S.Pd.MM
NIP. 19700927 200604 1004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud danTujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukit Intan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 9

2.2 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 46

BAB IV PENUTUP 63

4.1 Catatan-catatan Penting 63

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 64

4.3 Rencana Tindak Lanjut 65

DAFTAR TABEL

Tabel TC 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukit Intan Triwulan II Tahun 2025 11

Tabel TC 31 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 24

Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 50

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat menjadi Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan lanjutan dari tindak lanjut penjabaran Renstra Kecamatan Bukit Intan Periode 2024 – 2026. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Perubahan Renja wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan lanjutan program dan kegiatan Kecamatan Bukit Intan untuk tahun anggaran 2025. Perubahan Renja merupakan penterjemahan lanjutan pencapaian dari program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bukit Intan Tahun 2024 – 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang.

Perubahan Renja ini disusun dengan menyesuaikan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024- 2026. Dalam penyusunan Renja dimaksud, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang Kota Pangkal Pinang yang menjadi koordinator perencanaan di Kota Pangkal Pinang dan juga dengan para pemangku kepentingan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Intan tahun 2025 adalah penjabaran pencapaian lanjutan dari Renstra Kecamatan Bukit Intan 2024 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang tahun 2025 yang serta mendasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026. Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan berfungsi sebagai pedoman dan rujukan lanjutan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Bukit Intan tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen perencanaan, Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan mempunyai arti strategis dalam pencapaian penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Pangka Pinang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Renja perangkat daerah merupakan acuan bagi perangkat daerah untuk memasukkan program dan kegiatan lanjutan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan pada tahun 2025.
2. Perubahan Renja perangka daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi lanjutan pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya keputusan menteri ini, praktis seluruh nomenklatur program maupun kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam dokumen RPJMD) mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk reklasifikasi dan rekodefikasi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023);
19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148)..
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 230).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan

Bukit Intan untuk tahun terakhir Renstra. Dengan adanya dokumen Perubahan Renja, pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga pencapaian terhadap visi misi Kepala Daerah di bidang pelayanan masyarakat dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 juga bertujuan untuk melengkapi rangkaian penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, dimana Renja organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bagian penting yang terkandung di dalamnya. Perubahan Renja Tahun 2025 memuat uraian detail lanjutan program – program dan kegiatan yang direncanakan akan direalisasikan di tahun 2025 sesuai dengan proyeksi kekuatan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangka Pinang, sebagai upaya mendukung kesuksesan pelaksanaan program-program prioritas kepala daerah tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 meliputi bagian – bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

1.2 landasan hukum

1.3 maksud dan tujuan, dan

1.4 sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bukit Intan tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Bukit Intan.

2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan – Catatan Penting

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencantumkan pembahasan atas Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Bukit Intan hingga tahun 2021. Untuk itu pada bagian ini dijabarkan hasil kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025. Hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Bukit Intan berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2025 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Bukit Intan atau realisasi APBD untuk Kecamatan Bukit Intan selama 1 triwulan. Adapun pokok- pokok materi yang akan dirangkum dalam tabel yang akan dijabarkan setelah ini memuat poin – poin diantaranya :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Bukit Intan ;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Keenam uraian di atas dijabarkan dalam tabel T.C 29 berikut ini :

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	85	7.358.347.356	31	2.245.525.724		0		0		0	31	2.245.525.724	35,90	30,52	SEKRETARIS CAMAT
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	71										0		0,00		SEKRETARIS CAMAT
2		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100		50	0							50		50		KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
3		070101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0	1	0											KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
5		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	0	1	0											KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
6		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	6.756.682.360	32	2.090.490.762		0		0		0	32	2.090.490.762	32	30,940	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
7		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	60	6.756.682.360	59	2.090.490.762							59	2.090.490.762	98	30,940	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	1	0											

8		070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	0		0											KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN
9		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	118.837.100	50	59154290		0		0		0	50	59.154.290	50	49,778	KASI PELAYANAN UMUM
10		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2.812.500	1	1986000							1	1.986.000	100	70,613	KASI PELAYANAN UMUM
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	10.000.000	0	0											
11		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	52.002.600	1	21077000							1	21.077.000	100	40,531	KASI PELAYANAN UMUM
12		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	29.022.000	1	18045645							1	18.045.645	100	62,179	KASI PELAYANAN UMUM
14		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.000.000	1	18045645							1	18.045.645	100	72,183	KASI PELAYANAN UMUM
17		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	410.667.896	22	89.894.472		0		0		0	22	89.894.472	22	21,890	KASI PELAYANAN UMUM
18		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	74.500.000	1	708000							1	708.000	100	0,950	KASI PELAYANAN UMUM
19		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	10.750.000	1	7250000							1	7.250.000	100	67,442	KASI PELAYANAN UMUM
20		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	325.417.896	1	81.936.472							1	81.936.472	100	25,179	KASI PELAYANAN UMUM
21		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	72.160.000	8	5986200		0		0		0	8	5.986.200	8	8,296	KASI PELAYANAN UMUM
22		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	1	72.160.000	1	5986200							1	5.986.200	100	8,296	KASI PELAYANAN UMUM

22			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0		0											KASI PELAYANAN UMUM
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					17,951	30,517	
																	PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
23	**-**	**070102**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**90**	**530.596.952**	**42**	**224.468.066**		**0**		**0**		**0**	**42**	**224.468.066**		**47**	**42,305**	**SEKRETARIS CAMAT**
24		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)	100	0	0	0		0		0		0						KASI TATA PEMERINTAHAN
25		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	0												KASI TATA PEMERINTAHAN
26		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:PERSEN)	100	474.321.952	47	224.468.066		0		0		0	47	224.468.066		47	47,324	
				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan (Dengan Satuan:PERSEN)	100		46								46			46		
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kelurahan Semabung Lama (Dengan Satuan:persen)	100		39								39			39		
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kelurahan Air Mawar (Dengan Satuan:persen)	100		37								37			37		
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kelurahan Bacang (Dengan Satuan:persen)	100		39								39			39		

				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kelurahan Air Itam (Dengan Satuan:persen)	100		46								46		46		
				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	100		45								45		45		
				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100		44								44		44		
27		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	10.000.000	0	0							0	0	0	0,000	KASI PELAYANAN UMUM
28		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	75.080.044	1	33.756.567							1	33.756.567	100	44,961	LURAH PASIR PUTIH
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	84294316	1	33101938							1	33.101.938	100	39,269	LURAH SINAR BULAN
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	72.320.444	1	26418047							1	26.418.047	100	36,529	LURAH TEMBERAN
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	7643844	1	29835422							1	29.835.422	100	390,320	LURAH SEMABUNG LAMA
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	73.976.044	1	34208282							1	34.208.282	100	46,242	LURAH AIR MAWAR
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	67.236.944	1	29930922							1	29.930.922	100	44,516	LURAH BACANG
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	83.770.316	1	37.216.888							1	37.216.888	100	44,427	LURAH AIR ITAM

29		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	100	56.275.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0,000	KASI TATA PEMERINTAHAN
30		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	56.275.000	0	0							0	0	0	0,000	KASI TATA PEMERINTAHAN
																	47,005	42,305	
31	-	070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:%)	100	8.323.715.896	11	887.804.656		0		0		0	11	887.804.656	11	10,666	SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	85										0		0		SEKRETARIS CAMAT
32		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan (Dengan Satuan:Persen)	100	4.170.070.448		887.804.656		0		0		0	0	887.804.656	0	21,290	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan Pasir Putih (Dengan Satuan:PERSEN)	100										0		0		LURAH PASIR PUTIH
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan	85										0		0		
				Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan Sinar Bulan (Dengan Satuan:PERSEN)	100										0		0		LURAH SINAR BULAN
				Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan Temberan (Dengan Satuan:PERSEN)	100										0		0		LURAH TEMBERAN
				Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan Semabung Lama (Dengan Satuan:persen)	100										0		0		LURAH SEMABUNG LAMA
				Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan Air Mawar (Dengan Satuan:jenis)	3										0		0		LURAH AIR MAWAR
				Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan bacang (Dengan Satuan:persen)	100										0		0		LURAH BACANG

				Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan Air Itam (Dengan Satuan:jenis)	3										0		0		LURAH AIR ITAM
33		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	1	16.425.000	1	15525000							1	15.525.000	100	94,521	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
34		070103202002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	0							0		0		LURAH PASIR PUTIH
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1		0								0		0		LURAH SINAR BULAN
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1		0								0		0		LURAH TEMBERAN
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1		0								0		0		LURAH SEMABUNG LAMA
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1		0								0		0		LURAH AIR MAWAR
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1		0								0		0		LURAH BACANG
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1		0								0		0		LURAH AIR ITAM
35		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	0								0		0		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
36		070103203	PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan (Dengan Satuan:%)	100	4.153.645.448	21	872.279.656		0		0		0	21	872.279.656	21	21,000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100		22								22		22		LURAH PASIR PUTIH
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100		20								20		20		LURAH SINAR BULAN
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100		17								17		17		LURAH TEMBERAN

				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100		21								21		21		LURAH SEMABUNG LAMA
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100		21								21		21		LURAH AIR MAWAR
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100		17								17		17		LURAH BACANG
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100		9								9		9		LURAH AIR ITAM
37		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	610.409.328	6	136.839.496							6	136.839.496	100	22,418	LURAH PASIR PUTIH
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	594880712	6	116481293							6	116.481.293	100	19,581	LURAH SINAR BULAN
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	496415904	6	96948893							6	96.948.893	100	19,530	LURAH TEMBERAN
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	759898368	6	165744094							6	165.744.094	100	21,811	LURAH SEMABUNG LAMA
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	453522480	6	104276493							6	104.276.493	100	22,993	LURAH AIR MAWAR
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	596009328	6	130603094							6	130.603.094	100	21,913	LURAH BACANG
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	596009328	6	121386293							6	121.386.293	100	20,367	LURAH AIR ITAM
38		070103203002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	1	46.500.000	1	0							1	0	100	0,000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												**5,333**	**10,666**	
				PREDIKAT KINERJA														
39	**-**	**070104**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)**	**85**	**50.750.000**	**60**	**30.700.000**		**-**		**-**		**-**	**60**	**30.700.000**	**71**	**60,493**	**SEKRETARIS CAMAT**
40		070104202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100	50.750.000	60	30.700.000		-		-		-	60	30.700.000	60	60,493	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
41		070104202001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dengan Satuan:Laporan)	1	50.750.000	1	30.700.000							1	30.700.000	100	60,493	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												**71,168**	**60,493**	
				PREDIKAT KINERJA														
42	**-**	**070105**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan (Dengan Satuan:persen)**	**85**	**233.450.000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**	**SEKRETARIS CAMAT**
43		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	233.450.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0,000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
44		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang BukanMerupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	233.450.000	0	0							0	0	0	0,000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												**0,000**	**0,000**	
				PREDIKAT KINERJA														
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)												**28,291**	**28,796**	
				PREDIKAT KINERJA														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	**- isi faktor pendorong**
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	**- isi faktor penghambat**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	**- -**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	**- -**

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 07-02-2025
CAMAT BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG
Muhamad Amir, S.Pd., M.M. NIP.197009272006041004

Berdasarkan evaluasi atas Tabel T.C 29, serapan anggaran Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang sampai dengan triwulan I (Januari – Maret) tahun 2025 sebesar 38,31 Persen dengan capaian kinerja sebesar persen, dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30,52 persen, dengan serapan anggaran tertinggi di kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar 50 persen dan yang masih rendah di kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebesar 8 persen. Capaian kinerja program sebesar 35,90 persen, untuk indicator indeks kepuasan pelayanan internal kecamatan Bukit Intan dengan target nilai sebesar 85 dan di triwulan I baru mencapai 31 sedangkan indikator nilai SAKIP kecamatan Bukit Intan sudah 93,9 persen dengan target nilai 70 sudah tercapai dengan nilai 65,75 ditahun 2024. untuk indikator kegiatan yang masih rendah yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebesar 8 persen. Ini dikarenakan masih ada yang belum terlaksana yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik serapan angggarannya sebesar 35,88 persen. Untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan baru terealisasi sebesar 1,52 persen. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar 40,45 persen, sedangkan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat masih 0 persen dikarenakan baru dilaksanakan di triwulan berikutnya. Capaian kinerja program mencapai 100 persen dengan indikator persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu, yang berarti semua dokumen pelayanan yang dikeluarkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pencapaian target kinerja kegiatan yang masih rendah yaitu sebesar 0 persen terdapat dikegiatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat karena belum adanya pelaksanaan kegiatan tersebut di triwulan II.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian serapan anggaran sebesar 38,40 persen. Serapan anggaran tertinggi di kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar 98,25 persen. Capaian kinerja program sebesar 100 persen untuk indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif, sedangkan untuk indikator Persentase sarpras publik yang terbangun masih 0 persen. Hal ini terjadi karena belum berjalannya pembangunan di kelurahan dan baru akan dilaksanakan di triwulan berikutnya. Capaian kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar 100 persen. Begitu juga untuk Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan sebesar 100 persen.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian anggaran masih 0 persen begitu juga capaian kinerja. Hal ini terjadi karena belum terlaksananya kegiatan tersebut di triwulan II.

2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 juga memperhatikan kesesuaian terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini dikarenakan Renja perangkat daerah merupakan penterjemahan pelaksanaan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKPD sehingga harus terjalin kesesuaian/ kesinkronan satu sama lain. Berikut dijabarkan hasil review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2024 yang ditampilkan pada tabel T.C 3.1 berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BUKIT INTAN							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**KECAMATAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				**71** **85 Nilai** **Nilai**	**71** **85 Nilai** **Nilai**	**5.884.734.007,00**	**7.358.347.356,00**	**6.014.807.360,10**	**463.225.993,00**							**10.347.960.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 %	100 %	1.020.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		1.360.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			680.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			680.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP*				100 %	100 %	7.478.914.907,00	6.756.682.360,00	7.324.112.464,10	-154.802.442,90			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		7.700.600.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	7.478.464.907,00	6.756.682.360,00	7.324.112.464,10	-154.352.442,90	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			7.700.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			200.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			400.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	584.169.100,00	118.837.100,00	104.651.600,00	-479.517.500,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		656.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.587.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	-4.755.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittinan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			8.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	377.070.000,00	50.000.000,00	0,00	-377.070.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittinan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			400.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.869.600,00	52.002.600,00	47.817.100,00	-31.052.500,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittinan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			134.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.662.000,00	29.022.000,00	29.022.000,00	-11.640.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittinan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			29.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-55.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittinan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			85.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.702.750.000,00	410.667.896,00	513.883.296,00	-1.188.866.704,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		1.805.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00	2.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittinan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			80.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.750.000,00	10.750.000,00	18.250.000,00	7.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittinan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			25.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.620.000.000,00	325.417.896,00	421.133.296,00	-1.198.866.704,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittinan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			1.700.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	17.880.000,00	72.160.000,00	72.160.000,00	-45.720.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		185.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	77.880.000,00	72.160.000,00	72.160.000,00	-5.720.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			85.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			100.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**90 %**	**90 %**	**598.584.200,00**	**599.391.552,00**	**663.895.948,00**	**60.415.800,00**							**659.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Bukit Intan*				100 %	100 %	28.500.000,00	0,00	0,00	-28.500.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	28.500.000,00	0,00	0,00	-28.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			30.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada*				100 %	100 %	386.084.200,00	543.116.552,00	607.620.948,00	221.536.748,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		439.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	13.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-3.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		14.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Bukit Intan*				100 %	100 %	184.000.000,00	56.275.000,00	56.275.000,00	-127.725.000,00			-	-	-		190.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	184.000.000,00	56.275.000,00	56.275.000,00	-127.725.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukittintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-			190.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan**				**100 85 %**	**100 85 %**	**2.991.300.640,00**	**4.138.599.064,00**	**4.417.961.716,00**	**69.199.360,00**							**3.060.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan*				100 % 85 %	100 % 85 %	153.225.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	-136.800.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		195.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	16.425.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			18.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER		Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			17.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	2.838.075.640,00	4.122.174.064,00	4.401.536.716,00	1.563.461.076,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		2.865.500.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	53.800.000,00	46.500.000,00	41.500.000,00	-12.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			55.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Bukit Intan**				**85 %**	**85 %**	**125.440.000,00**	**50.750.000,00**	**50.750.000,00**	**-40.440.000,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	125.440.000,00	50.750.000,00	50.750.000,00	-74.690.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		85.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	125.440.000,00	50.750.000,00	50.750.000,00	-74.690.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER		Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			85.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bukit Intan**				**85 %**	**85 %**	**210.600.000,00**	**233.450.000,00**	**86.750.000,00**	**-39.400.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	210.600.000,00	233.450.000,00	86.750.000,00	-123.850.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kew enangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	210.600.000,00	233.450.000,00	86.750.000,00	-123.850.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing			250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
		KELURAHAN PASIR PUTIH							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**KECAMATAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**90 %**	**90 %**	**598.584.200,00**	**599.391.552,00**	**663.895.948,00**	**60.415.800,00**							**659.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada*				100 %	100 %	396.084.200,00	543.116.552,00	607.620.948,00	221.536.748,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		439.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	70.238.000,00	75.080.044,00	59.951.428,00	-286.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitntan, Pesir Puth	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			80.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif** **Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan**				**100** **85 %** **%**	**100** **85 %** **%**	**2.991.300.640,00**	**4.138.599.064,00**	**4.417.961.716,00**	**69.199.360,00**							**3.060.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* *Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan*				100 % 85 %	100 % 85 %	153.225.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	-136.800.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		195.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitntan, Pesir Puth	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			0,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	2.838.075.640,00	4.122.174.064,00	4.401.536.716,00	1.563.461.076,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		2.865.500.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	420.110.896,00	605.409.328,00	648.046.872,00	227.935.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitntan, Pesir Puth	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			430.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
		KELURAHAN SINAR BULAN							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**KECAMATAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**90 %**	**90 %**	**598.584.200,00**	**599.391.552,00**	**663.895.948,00**	**60.415.800,00**							**659.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada*				100 %	100 %	396.084.200,00	543.116.552,00	607.620.948,00	221.536.748,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		439.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	41.425.400,00	84.294.316,00	99.498.088,00	58.072.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitntan, Sinar Bulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif** **Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan**				**100** **85 %** **%**	**100** **85 %** **%**	**2.991.300.640,00**	**4.138.599.064,00**	**4.417.961.716,00**	**69.199.360,00**							**3.060.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* *Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan*				100 % 85 %	100 % 85 %	153.225.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	-136.800.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		195.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	2.838.075.640,00	4.122.174.064,00	4.401.536.716,00	1.563.461.076,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		2.865.500.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	414.110.896,00	593.409.328,00	621.946.716,00	207.835.820,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			420.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
		KELURAHAN TEMBERAN							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**KECAMATAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**90 %**	**90 %**	**598.584.200,00**	**599.391.552,00**	**663.895.948,00**	**60.415.800,00**							**659.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja*				100 %	100 %	386.084.200,00	543.116.552,00	607.620.948,00	221.536.748,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		439.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	40.350.000,00	72.320.444,00	63.956.292,00	43.606.292,00	Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif** **Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan**				**100** **85 %** **%**	**100** **85 %** **%**	**2.991.300.640,00**	**4.138.599.064,00**	**4.417.961.716,00**	**69.199.360,00**							**3.060.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* *Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan*				100 % 85 %	100 % 85 %	153.225.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	-136.800.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		195.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	2.838.075.640,00	4.122.174.064,00	4.401.536.716,00	1.563.461.076,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		2.865.500.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	920.392.672,00	691.415.904,00	534.053.448,00	213.660.776,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Tamberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			330.500.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
		KELURAHAN SEMABUNG LAMA							**13.810.658.647,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.810.658.647,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**KECAMATAN**							**13.810.658.647,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**90 %**	**90 %**	**598.584.200,00**	**599.391.552,00**	**663.895.948,00**	**60.415.800,00**							**659.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada*				100 %	100 %	386.084.200,00	543.116.552,00	607.620.948,00	221.536.748,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		439.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	40.827.100,00	76.438.444,00	83.006.368,00	42.179.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif** **Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan**				**100 %** **85 %**	**100 %** **85 %**	**2.991.300.640,00**	**4.139.599.064,00**	**4.417.961.716,00**	**69.199.360,00**							**3.060.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* *Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan*				100 % 85 %	100 % 85 %	153.225.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	-136.800.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		195.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	2.838.075.640,00	4.122.174.064,00	4.401.536.716,00	1.563.461.076,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		2.865.500.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	531.627.936,00	754.898.368,00	796.755.912,00	265.127.976,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			540.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
		KELURAHAN AIR MAWAR							**13.810.658.647,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.810.658.647,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**KECAMATAN**							**13.810.658.647,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**90 %**	**90 %**	**598.584.200,00**	**599.391.552,00**	**663.895.948,00**	**60.415.800,00**							**659.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja*				100 %	100 %	386.084.200,00	543.116.552,00	607.620.948,00	221.536.748,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		439.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	70.003.000,00	73.976.044,00	84.861.892,00	14.858.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			75.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif** **Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan**				**100** **85 %**	**100** **85 %**	**2.991.300.640,00**	**4.138.599.064,00**	**4.417.961.716,00**	**69.199.360,00**							**3.060.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* *Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan*				100 % 85 %	100 % 85 %	153.225.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	-136.800.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		195.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			0,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Keluruhan*				100 %	100 %	2.838.075.640,00	4.122.174.064,00	4.401.536.716,00	1.563.461.076,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		2.865.500.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	264.390.448,00	448.522.480,00	491.160.024,00	226.769.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
		KELURAHAN BACANG							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**KECAMATAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**90 %**	**90 %**	**598.584.200,00**	**599.391.552,00**	**663.895.948,00**	**60.415.800,00**							**659.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja*				100 %	100 %	386.084.200,00	543.116.552,00	607.620.948,00	221.536.748,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		439.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	39.391.000,00	67.236.944,00	77.372.792,00	37.981.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukintan, Bacang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan**				**100 85 % %**	**100 85 % %**	**2.991.300.640,00**	**4.138.599.064,00**	**4.417.961.716,00**	**69.199.360,00**							**3.060.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan*				100 % 85 %	100 % 85 %	153.225.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	-136.800.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		195.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang	SISA LEBIH PEMHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	2.838.075.640,00	4.122.174.064,00	4.401.536.716,00	1.563.461.076,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		2.865.500.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	414.110.896,00	591.009.328,00	634.426.872,00	220.315.976,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) /PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		420.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
		KELURAHAN AIR ITAM							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
	7	**KECAMATAN**							**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**-576.493.822,90**							**14.402.460.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**				**90 %**	**90 %**	**598.584.200,00**	**599.391.552,00**	**663.895.948,00**	**60.415.800,00**							**659.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada*				100 %	100 %	386.084.200,00	543.116.552,00	607.620.948,00	221.536.748,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		439.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	70.349.700,00	83.770.316,00	98.974.088,00	28.624.388,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) /PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan**				**100 85 % %**	**100 85 % %**	**2.991.300.640,00**	**4.138.599.064,00**	**4.417.961.716,00**	**69.199.360,00**							**3.060.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan*				100 % 85 %	100 % 85 %	153.225.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	-136.800.000,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		195.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing	-		0,00	KECAMATAN BUKIT INTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan* *Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan*				100 %	100 %	2.838.075.640,00	4.122.174.064,00	4.401.536.716,00	1.563.461.076,00			-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta	-		2.865.500.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	419.531.896,00	591.009.328,00	633.646.872,00	214.114.976,00	Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kota Pangkal Pinang, Bukintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Serta			420.000.000,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	JUMLAH								**13.810.658.847,00**	**12.380.537.972,00**	**13.234.165.024,10**	**197.411.203.431,82**							**14.402.460.000,00**	

hasil review menunjukkan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Perubahan RKPD telah mengakomodir Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan walaupun anggaran yang tercantum dalam RKPD lebih dari anggaran renja, ini disebabkan oleh efisiensi anggaran. Namun secara keseluruhan penyusunannya Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 telah berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2024 diusulkan untuk melanjutkan kegiatan atau kegiatan yang dibutuhkan demi menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

UNSUR KEWILAYAHAN

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasir Garam)
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ketapang)
4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ampui)
5. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lontong Pancur)

6. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejosari)

2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Garam
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ketapang
4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ampui
5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lontong Pancur
6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejosari
7. Evaluasi Kelurahan

3.2 Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari

3.3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Garam
2. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ketapang
3. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ampui
4. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lontong Pancur

5. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rejosari
6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum , dengan sub kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah , dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

BAB IV
P E N U T U P

4.1 Catatan-catatan Penting

Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan lanjutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tahun 2025 sebagai gambaran pelaksanaan RKPD Kota Pangkal Pinang untuk pelayanan terhadap masyarakat sekaligus pencapaian visi misi kepala Daerah.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan ini diupayakan mengakomodir pencapaian indikator yang menjadi kinerja utama Kecamatan Bukit Intan. Tidak maksimalnya pencapaian kinerja Kecamatan Bukit Intan sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan Kecamatan Bukit Intan, serta tentunya berpengaruh pula pada kebijakan – kebijakan Pemerintah yang akan diambil di Kota Pangkal Pinang. Adapun indikator kinerja utama yang berupaya dicapai oleh Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dijabarkan melalui tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Tahun 2024
1	2	3		4
1	Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Bukit Intan	1.1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Bukit Intan	100 %
2	Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Bukit Intan	2.1	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Bukit Intan	100

4.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan acuan bagi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pelayanan masyarakat. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Kecamatan Bukit Intan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Kota Pangkalpinang 2025.

2. Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman lanjutan dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
3. Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, yang menjadi tolak ukur lanjutan dalam pencapaian target kinerja.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya lanjutan untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan harus selaras dengan Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Renja ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dalam mensukseskan program – program strategis pembangunan Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

RENCANA KERJA PERUBAHAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

TAHUN

2025

KATA PENGANTAR

Assalammua'laikum Warohmatullahiwabarokatuh,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'la yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Renja Perubahan ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk Tahun 2025.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Renja Perubahan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Renja Perubahan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Pangkal Pinang, 21 Mei 2025
Inspektur Kota Pangkal Pinang

MUHAMAD SYAHRIAL, SH, MH., QRMP.,CGCAE., CGRE
NIP 19710713 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah 15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 16

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 17

BAB IV PENUTUP 24

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari RPJD Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam RPJD Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJD Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Perencanaan kinerja ini juga merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan

kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal PinangTahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);

30. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lainnya.

Tujuan Dokumen Rencana Kerja ini menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang. Sistematika penyajian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan**

   Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan yang terdiri dari:

   a. **Latar Belakang.**

      Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan RPJMN dan RPJPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

   b. **Landasan Hukum.**

      Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan Renja OPD.

   c. **Maksud dan Tujuan.**

      Maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD tahun rencana, kaitanya dengan Renstra, dan isu strategis.

   d. **Sistematika Penulisan.**

      Susunan dokumen terkait pengaturan bab serta garis besar di dalamnya.

2. **Bab II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu.**

   a. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah.**

      Berisikan kajian terhadap Evaluasi terhadap pelaksanaan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

   b. **Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian Kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1) Perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah terkait dengan fungsi pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
3) Dampanya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Pangkal Pinang terhadap capaian program nasional;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti permusuan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

d. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan Akhir RKPD

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

3. **Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah**

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program /kegiatan/Sub Kegiatan, indikator kinerja,target dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 hasil inputan ke SIPD

4. **Bab IV Penutup**

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pangkal Pinang sampai dengan Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah. Sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah

s/d Semester I Tahun 2025 Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Nama OPD : **Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	
	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	**9.888.985.069,00**	100%	**3.042.724.120,00**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.955.192.869,00	100 %	2.816.420.756,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	7.955.192.869,00	58 Orang/bulan	2.808.070.916,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	316.400.000,00	100 %	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	46.400.000,00	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Orang	270.000.000,00	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	505.622.200,00	100 %	79.902.146,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	18.678.500,00	-	8.501.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	24.251.000,00	-	8.934.500,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	182.606.000,00	-	34.981.800,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	68.457.500,00	-	-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	27.484.846,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	11.629.200,00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	655.350.000,00	100 %	135.861.218,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	500.000,00	1 Laporan	19.703.772,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	97.850.000,00	1 Laporan	26.284.434,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	137.000.000,00	-	1.240.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	420.000.000,00	1 Laporan	88.633.012,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	456.420.000,00	100 %	10.540.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	356.420.000,00	9 Unit	10.540.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000,00	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**100%**	**2.274.562.216,00**	**100%**	**257.300.000,00**
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	1.870.400.000,00	100 %	216.800.000,00
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	432.000.000,00	1 Laporan	34.000.000,00
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	100.800.000,00	1 Laporan	13.200.000,00
Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	432.000.000,00	1 Laporan	58.200.000,00
Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	396.800.000,00	1 Laporan	53.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	508.800.000,00	1 Dokumen	58.400.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	404.162.216,00	100 %	40.500.000,00

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	404.162.216,00	1 Laporan	40.500.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100%	**326.200.000,00**	-	-
Pendampingan dan Asistensi	100 %	326.200.000,00	-	-
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	326.200.000,00	-	-
		12.489.747.285,00		**3.300.024.120,00**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan sebagai unsur Penunjang dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang berupaya agar mampu berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan tupoksinya *yaitu membantu walikota dalam menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.*

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah adalah Lembaga Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Daerah Kota berdasarkan sinergi pengawasan.

Dalam rangka kinerja Inspektorat Kota Pangkal Pinang sumber daya manusia yang meliputi:

a. Inspektur Daerah membawahi :
b. Sekretaris, terdiri atas :
   - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
   - Sub Bagian Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi
c. Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset;
d. Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM;

e. Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan
f. Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Permasalahan Pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

a. Masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan.
b. Masih kurangnya tenaga fungsional auditor dan P2UPD.
c. Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan.

Hambatan Pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

a. Kurang tanggapnya SKPD dalam menindaklanjuti hasil temuan.
b. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
c. Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Adapun Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD merupakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan RKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang berisi Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang, yaitu sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal ini, Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Lembaga Pembinaan dan Pengawasan sehingga dalam hal usulan Program dan Kegiatan Masyarakat langsung berhubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang ini mengacu pada:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, yaitu :
   1) Pencapaian RPD Pangkal Pinang
   2) Penguatan sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi
b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan kegiatan antara lain, yaitu :
   1) Sebanyak 3 Program, 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.
   2) Lokasi program dan Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
   3) Total dana sebesar **Rp. 9.843.522.607,10**

Adapun tabel Rencana Kerja sebagai berikut :

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	16	20
						INSPEKTORAT DAERAH				12.489.747.285,00	10.331.779.361,00	9.843.522.607,10		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12.489.747.285,00	10.331.779.361,00	9.843.522.607,10		
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				12.489.747.285,00	10.331.779.361,00	9.843.522.607,10		
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.00	78.00	9.888.985.069,00	8.846.979.361,00	8.915.522.607,10		
							Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90	90					
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	100 %	7.955.192.869,00	7.844.636.597,00	7.844.636.597,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	7.955.192.869,00	7.844.636.597,00	7.891.954.943,10	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	100 %	316.400.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	46.400.000,00	0,00	0,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	10 Orang	270.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	505.622.200,00	258.740.540,00	258.740.540,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.678.500,00	17.005.000,00	18.442.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.251.000,00	18.618.200,00	22.412.800,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	182.606.000,00	120.699.840,00	138.508.190,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	68.457.500,00	26.562.500,00	19.747.450,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH

	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.629.200,00	5.855.000,00	5.855.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	655.350.000,00	604.372.224,00	604.372.224,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	500.000,00	70.315.088,00	70.315.088,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	97.850.000,00	97.850.000,00	97.850.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	137.000.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	420.000.000,00	386.007.136,00	386.007.136,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH

	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	456.420.000,00	69.230.000,00	69.230.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	356.420.000,00	69.230.000,00	69.230.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset (Dengan Satuan:%) - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan SDM (Dengan Satuan:%) - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan (Dengan Satuan:%) - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pencegahan dan investigasi (Dengan Satuan:%)	100 %	100 %	2.274.562.216,00	1.484.800.000,00	928.000.000,00		
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	1.870.400.000,00	1.198.080.000,00	1.198.080.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	432.000.000,00	286.720.000,00	179.200.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								

							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.800.000,00	45.600.000,00	28.500.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja								
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	432.000.000,00	286.720.000,00	179.200.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan								
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	396.800.000,00	266.720.000,00	166.700.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	508.800.000,00	312.320.000,00	195.200.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	100 %	404.162.216,00	286.720.000,00	286.720.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	4 Laporan	404.162.216,00	286.720.000,00	179.200.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang keuangan dan aset (Dengan Satuan:%) - Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan SDM (Dengan Satuan:%) - Persentase penerapan SPIP	100 %	100 %	326.200.000,00	0,00	0,00		

							pada perangkat daerah bidang pelayanan publik dan sosial dan kemasyarakatan (Dengan Satuan:%) - Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pencegahan dan investigasi (Dengan Satuan:%)							
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %	326.200.000,00	0,00	0,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	326.200.000,00	0,00	0,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
									JUMLAH	**12.489.747.285,00**	**10.331.779.361,00**	**9.843.522.607,10**		

BAB IV
PENUTUP

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, RPD Kota Pangkal Pinang, Renstra, Renja, DPA Inspektorat.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun kekurangan anggaran melalui APBD. Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkal Pinang, 21 Mei 2025
Inspektur Kota Pangkal Pinang

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
INSPEKTORAT

MUHAMAD SYAHRIAL, SH, MH., QRMP.,CGCAE., CGRE
NIP 19710713 200501 1 006

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025

DINAS TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra perangkat daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen perangkat daerah, Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Renja Perangkat daerah disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara partisipatif.

Dokumen ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2022 Nomor 11 Seri E);

14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkalpinnag Tahun 2024 – 2026, dan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025.
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 27 Mei 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan P-Renja Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026;
2. Sebagai sarana untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;

3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan Sasaran SKPD
- 1.3 Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memiliki anggaran APBD 2025 sebesar Rp. 3.046.853.046,- dengan mengampu 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 21 sub kegiatan,untuk Pagu yang mengalami efisiensi Belanja Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar 2.896.762.275,- sedangkan untuk pagu APBDP Perubahan yang sudah ditambah dengan kekurangan Gaji sebesar Rp.3.496.762.275,- dengan mengampu 4 (empat) program, 8 (delapan), kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegaiatan.

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14	-	021801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	87	2.255.493.090	81,92	793.199.163		0		0		0	82	793.199.163	94,161	35.167	SEKRETARIS
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77		78,90								79		102,468		SEKRETARIS
				Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	4,64		0								0		0,000		SEKRETARIS
15		021801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	1.727.792.939	25	647.214.265		0		0		0	25	647.214.265	25	37	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		021801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	23	1.727.792.939	25	647.214.265							25	647.214.265	109	37	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		021801205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	0													SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		021801205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	10	0													SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		021801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	253.305.363	81	26.016.750		0		0		0	81	26.016.750	81	10	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

21		021801206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5.352.500	100	3.389.500							100	3.389.500	10000	63	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		021801206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	8	77.780.000	4												SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23		021801206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	85.084.663	100	7.198.000											SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		021801206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	35.088.200	100	8.069.250											SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		021801206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	50.000.000	100	7.360.000											SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		021801207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	0													SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27		021801207010	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	0													SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	0													
28		021801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	185.534.788	50	46.517.848		0		0		0	50	46.517.848	50	25	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29		021801208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	81.400.000	25	12.686.000							25	12.686.000	2499	16	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
30		021801208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.050.000	100	16.170.000							100	16.170.000	10000	65	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
31		021801208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	79.084.788	25	17.661.848							25	17.661.848	2499	22	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

32		021801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	88.860.000	100	73.450.300		0		0		0	100	73.450.300	100	83	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
33		021801209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	0													SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
34		021801209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	5	38.680.000	100	24.000.000							100	24.000.000	2000	62	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
35		021801209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	50.180.000	100	49.450.300							100	49.450.300	10000	99	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				65,543	35,167	
													PREDIKAT KINERJA						
1	-	020703	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan (Dengan Satuan:Kebijakan)**	1	51.460.000	5	0		0		0		0	5	0	500,000	0,000	B I D A N G KETENAGAKERJAAN
2		020703201	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Dengan Satuan:Laporan)	1	51.460.000	5	0		0		0		0	5	0	500	0	SUB KOORDINATOR P E R L U A S A N , P E N E M P A T A N , PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
3		020703201001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dengan Satuan:dokumen)	1	51.460.000	5								5	0	500	0	SUB KOORDINATOR P E R L U A S A N , P E N E M P A T A N , PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
3		020703201001	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Dengan Satuan:Orang)	50	0									0	0			SUB KOORDINATOR P E R L U A S A N , P E N E M P A T A N , PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				500,000	0,000	
													PREDIKAT KINERJA						
1	-	020703	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (Dengan Satuan:%)**	79	285.160.000	5	0		0		0		0	5	0	6,329	0,000	B I D A N G KETENAGAKERJAAN
2		020703201	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah laporan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (Dengan Satuan:Laporan)	1	285.160.000	5	0		0		0		0	5	0	500	0	SUB KOORDINATOR P E R L U A S A N , P E N E M P A T A N , PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

3		020703201001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Dengan Satuan:Orang)	45	285.160.000	5								5	0	11	0	SUB KOORDINATOR PERLUASAN, PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			6,329	0,000	
														PREDIKAT KINERJA					
4	-	020704	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang ditempatkan (Dengan Satuan:%)	45	274.723.260	15	15.635.848		0		0		0	15	15.635.848	33,333	5,691	BIDANG KETENAGAKERJAAN
5		020704203	Pengelolaan informasi Pasar Kerja	jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Dengan Satuan:laporan)	1	274.723.260	15	15.635.848		0		0		0	15	15.635.848	1500	6	SUB KOORDINATOR PERLUASAN, PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
6		020704203002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Dengan Satuan:Orang)	120	136.611.000	25	15.635.848							25	15.635.848	21	11	SUB KOORDINATOR PERLUASAN, PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
7		020704203003	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Dengan Satuan:Orang)	60	138.112.260	5								5	0	8	0	SUB KOORDINATOR PERLUASAN, PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			33,333	5,691	
														PREDIKAT KINERJA					
8	-	020705	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (Dengan Satuan:%)	45	180.016.696	19	8.208.616		0		0		0	19	8.208.616	42,222	4,560	BIDANG KETENAGAKERJAAN
9		020705201	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/PKB (Dengan Satuan:%)	8,48	68.090.000	4	0		0		0		0	4	0	47	0	SUB KOORDINATOR SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
10			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Dengan Satuan:perusahaan)	70	47.960.000	4								4	0	6	0	SUB KOORDINATOR SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Dengan Satuan:Laporan)	55	20.130.000	4							4	0	7	0	SUB KOORDINATOR SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
11		020705202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:laporan)	1	111.926.696	33	8.208.616		0		0		0	33	8.208.616	3300	7	SUB KOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN
12			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Dengan Satuan:Perkara)	50	52.380.000	4							4	0	8	0	SUB KOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN
		020705202002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Dengan Satuan:Perkara)	25	34.746.696	25	4.378.616						25	4.378.616	100	13	SUB KOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Asosiasi dan Serikat Pekerja)	56	11.370.000	100	3.830.000						100	3.830.000	179	34	
13		020705202004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Dengan Satuan:Lembaga)	1	13.430.000	4							4	0	400	0	SUB KOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				42,222	4,560	
												PREDIKAT KINERJA						
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)				129,485	9,084	
												PREDIKAT KINERJA						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	--

Dievaluasi

Kota Pangkalpinang, tanggal 07-02-2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

ENDANG SUPRIYADI, S.T., M.T. NIP.197606122000031003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan tenaga kerja Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu tenaga kerja.

Pencapaian IKU Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 202 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	76,36%	54,55 %	71,43%
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	19,09%	16,67%	87,32%

Sedangkan capaian IKU Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi Jan-Juni 2025
1.	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	6,90
		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	$= \frac{9}{12}$ x 100% = 75%
			Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	%	$= \frac{10}{412}$ x 100% = 2,43%
2.	Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi		Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN	%	$\frac{(251643484268{,}533 - 1710403669)}{171040366995} x$ 100 = 47,12%
		Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	Milyar Rupiah	Rp.251.643.484.268,533

2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berikut ini tercantum isu penting penyelenggaraan dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan, yang mungkin di kemudian hari dapat diselesaikan demi optimalnya pelaksanaan tugas :

1. Tingginya angka penganguran di kota Pangkalpinang:
2. Rendahnya kompetensi dan kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
3. Belum optimalnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Ranwal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2025		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2025	
				Target capaian kinerja	Pagu indikatif					Target capaian kinerja	Pagu indikatif
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**PGK**	**Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan**	**kebijakan**	**1**	**51.460.000**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**PGK**	**Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan**	**kebijakan**	**1**	**51.460.000**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*PGK*	*jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*	*laporan*	*1*	51.460.000	*Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*	*PGK*	*jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*	*laporan*	*1*	51.460.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	PGK	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1	51.460.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	PGK	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1	51.460.000
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*PGK*	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	orang	50	51.460.000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*PGK*	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	orang	50	51.460.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PGK**	***Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan***	***%***	***79***	***285.160.000***	***PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA***	**PGK**	***Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan***	***%***	***79***	***285.160.000***

						KERJA					
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*PGK*	*jumlah laporan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	*laporan*	*1*	*285.160.000*	*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	*PGK*	*jumlah laporan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	*laporan*	*1*	*285.160.000*
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	PGK	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	orang	340	*285.160.000*	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	PGK	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	orang	340	*285.160.000*
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PGK**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**%**	***45***	**274.723.260**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PGK**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**%**	***45***	**274.723.260**
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*PGK*	*jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	*laporan*	*1*	274.723.260	*Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	*PGK*	*jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	*laporan*	*1*	274.723.260
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	PGK	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui	orang	120	136.611.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	PGK	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	120	136.611.000

		Sistem Online (Karir Hub)									
Job Fair/Bursa Kerja	PGK	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	60	138.112.260	Job Fair/Bursa Kerja	PGK	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	60	138.112.260
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**PGK**	**Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)**	**%**	**45**	**180.016.696**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PGK**	**Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)**	**%**	**45**	**180.016.696**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*PGK*	*persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB*	*%*	*8,48*	*68.090.000*	*Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	*PGK*	*persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB*	*%*	*8,48*	*68.090.000*
Pengesahan Peraturan Perusahaan	PGK	Jumlah Perusahaan yang	perusahaan	70	47.960.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan	PGK	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan	perusahaan	70	47.960.000

bagi Perusahaan		Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				bagi Perusahaan		Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	PGK	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	*laporan*	55	20.130.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	PGK	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	*laporan*	55	20.130.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*PGK*	*jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota*	*laporan*	*1*	*111.926.696*	*Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota*	*PGK*	*jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota*	*laporan*	*1*	*111.926.696*
Pencegahan Perselisihan	PGK	Jumlah Perselisihan	perkara	50	52.380.000	Pencegahan Perselisihan	PGK	Jumlah Perselisihan yang	perkara	50	52.380.000

Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		yang Dicegah				Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Dicegah			
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PGK	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	perkara	25	34.746.696	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PGK	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	perkara	25	34.746.696
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan	PGK	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	56	11.370.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi	PGK	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	56	11.370.000

Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	PGK	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga	1	13.430.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	PGK	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga	1	13.430.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**PGK**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**77**	**1.727.792.939**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PGK**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**77**	**1.727.792.939**
	PGK	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**87**			**PGK**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**87**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*PGK*	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*	*%*	*100*	*175.525.363*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*PGK*	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*	*%*	*100*	*175.525.363*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PGK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	18	1.727.792.939	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PGK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	18	1.727.792.939
Administrasi Kepegawaian Perangkat	*PGK*	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran*	%	-33	-	*Administrasi Kepegawaian Perangkat*	*PGK*	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin*	%	-33	-

Daerah		*disiplin ASN*				*Daerah*		*ASN*			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PGK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PGK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*PGK*	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*	%	100	-	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*PGK*	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*	%	100	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PGK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	5.352.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PGK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	5.352.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK/ Luar PGK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	77.780.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK/ Luar PGK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	77.780.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PGK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	85.084.663	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PGK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	85.084.663
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PGK	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	35.088.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PGK	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	35.088.200
Penyelenggaraan Rapat	PGK	Jumlah Laporan	laporan	-	-	Penyelenggaraan Rapat	PGK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	laporan	1	-

Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*PGK*	*Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah*	%	100	*88.860.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*PGK*	*Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah*	%	100	*88.860.000*
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	38.680.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	38.680.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	337.470.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	337.470.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*PGK*	*Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	%	100	-	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*PGK*	*Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	%	100	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	laporan	1	85.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	laporan	1	85.000.000

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Disediakan			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	46.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	46.250.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*PGK*	*Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik*	%	100	-	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*PGK*	*Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik*	%	100	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PGK	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	38.680.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PGK	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	38.680.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaa	PGK	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	1	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	PGK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	unit	1	-

n, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				n, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PGK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	50.180.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PGK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	50.180.000
					3.046.853.046						**3.046.853.046**

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA							5.575.841.450,00	3.048.853.046,00	3.496.762.275,00	-2.379.079.175,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.575.841.450,00	3.048.853.046,00	3.496.762.275,00	-2.379.079.175,00							0,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							5.575.841.450,00	3.048.853.046,00	3.496.762.275,00	-2.379.079.175,00							0,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMPRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.940.681.450,00	2.215.893.046,00	2.794.960.401,00	+854.660.451,00							0,00	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.227.750.839,00	2.327.750.839,00	2.327.750.839,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	0,00	1.227.750.839,00	2.327.750.839,00	2.327.750.839,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RED.DAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Penyelesaian Gaji Pokok Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Notifikasi / Laporan yang Mengajukan Permohonan Gaji Pokok				10 Orang	10 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TERDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	440.681.450,00	340.305.568,00	197.827.614,00	-242.853.836,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Jalin Penyediaan Barang dan Kantor																		
			Jumlah Paket Pengadaan Instalasi Listrik/Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.700.000,00	6.312.500,00	3.000.000,00	-3.700.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RED.DAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	286.165.457,00	77.750.000,00	77.750.000,00	-161.365.457,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RED.DAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Barang Cetakan Kantor																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	75.079.672,00	60.084.000,00	48.863.000,00	-26.193.672,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RED.DAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Rutin Cetak dan Penggandaan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	67.079.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-48.079.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RED.DAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	11 Laporan	150.000.000,00	90.000.000,00	49.489.086,00	-100.510.914,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RED.DAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	674.340.000,00	0,00	0,00	-674.340.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	337.470.000,00	0,00	0,00	-337.470.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RED.DAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	337.470.000,00	0,00	0,00	-337.470.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RED.DAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	163.210.000,00	18.304.046,00	179.000.000,00	+374.170.000,00			+	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Kebersihan, Sanitasi Dan Air dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Administrasi Sistem Dan Jaringan Data yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	21.420.000,00	31.100.000,00	+3.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Daerah, Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perbatasan dan Tatalingkungan Kantor																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16.250.000,00	25.055.000,00	25.950.000,00	+21.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Daerah, Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Kebersihan Di Lingkungan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	122.500.000,00	70.534.788,00	73.129.038,00	-349.370.962,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Daerah, Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	101.600.000,00	88.865.000,00	88.980.000,00	-12.749.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Daerah, Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Memenuhi Kelaikan				1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Daerah, Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Kebersihan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Memenuhi Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	19.215.000,00	19.665.000,00	-10.335.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Daerah, Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0004	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	26.165.000,00	30.160.000,00	-9.840.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Daerah, Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah Kebijakan Perencanaan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan**				**1 Kebijakan**	**1 Kebijakan**	**167.550.000,00**	**51.480.000,00**	**35.710.000,00**	**-167.550.000,00**							**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				1 Laporan	1 Laporan	167.550.000,00	51.480.000,00	35.710.000,00	-131.840.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kemasyarakatan, Peningkatan Kualitas Ekonomi Kemasyarakatan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	67.890.000,00	51.480.000,00	35.710.000,00	-82.180.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kemasyarakatan, Peningkatan Kualitas Ekonomi Kemasyarakatan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perencana yang Mampu Menyusun RTK Mikro				30 Orang	50 Orang	79.660.000,00	0,00	0,00	+79.660.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja, Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja			0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Besaran tenaga kerja yang memanfaatkan pelatihan**				**70 %**	**70 %**	**2.431.785.000,00**	**255.160.000,00**	**275.160.000,00**	**+2.431.785.000,00**							**0,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Job Kompetensi	Jumlah laporan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				1 Laporan	1 Laporan	2.431.785.000,00	255.160.000,00	275.160.000,00	+2.156.625.000,00			-	Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja, Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan dan Pelatihan Kecakapan Kerja Berbasis Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan berbasis Kompetensi Pada Tahun				340 Orang	45 Orang	2.431.785.000,00	255.160.000,00	275.160.000,00	+2.156.625.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja, Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja			0,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**				**45 %**	**45 %**	**174.540.000,00**	**274.723.260,00**	**254.920.000,00**	**+174.540.000,00**							**0,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				1 Laporan	1 Laporan	77.540.000,00	274.723.260,00	254.920.000,00	+80.380.000,00			-	Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja, Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (11-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Pengawasan Hubungan Pekerja/Buruh dan Pengusaha																		
			Analisis Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar/Aktif di Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kerja Hub)				170 Orang	170 Orang	53,840,000.00	76,511,000.00	175,570,000.00	69,410,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja			0.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Analisis Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	60 Orang	20,200,000.00	138,712,280.00	134,865,000.00	10,865,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Pemerataan Kesempatan Memperoleh Elektron Pencarian Peningkatan Kesempatan Elektron			0.00	DINAS TENAGA KERJA
5	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan penjatuhan sanksi (PB)**				**45.00 %**	**45.00 %**	**161,395,000.00**	**180,016,696.00**	**138,911,696.00**	**-161,395,000.00**						**0.00**		
	2.07.05.2.01	Pengelolaan Pengaduan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase perusahaan yang telah memiliki PP PKB				8.46 Perusahaan	8.46 Perusahaan	77,130,000.00	62,250,000.00	50,090,000.00	-79,940,000.00			-	Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	-		0.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengelolaan Hasil dan Perjanjian Bipartit																		
			Analisis Perselisihan yang Ditindaklanjuti Pengolah Hubungan Industrial yang Tuntas sebagai Rekomendasi Penyelesaian Perselisihan di PHI/Pengadilan Negeri				20 Perusahaan	20 Perusahaan	19,500,000.00	17,250,000.00	41,000,000.00	3,940,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja			0.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pengelolaan Pendaftaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perjanjian Kerja Bersama, dan Peraturan Perusahaan																		
			Analisis Data dan Informasi Serikat Pekerja (SP/SB), Serikat Buruh, dan UKS Beserta Jml Pekerja yang Tercatat sebagai Peserta Pendaftaran dan Pengesahan				55 Laporan	55 Laporan	37,140,000.00	80,120,696.00	10,130,000.00	-27,800,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja			0.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	84,115,000.00	111,826,696.00	78,821,696.00	-5,335,304.00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kompetitif Peningkatan Kualitas Ekonomi Kompetitif	-		0.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan Umum dan/atau Pelayanan Vital																		
			Analisis Kesehatan yang Dicegah				90 Perkara	90 Perkara	9,615,000.00	10,780,000.00	30,000,000.00	20,385,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kompetitif Peningkatan Kualitas Ekonomi Kompetitif			0.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan Umum dan/atau Pelayanan Vital																		
			Analisis Perkara Perselisihan yang Diselesaikan				75 Perkara	75 Perkara	8,000,000.00	94,046,696.00	70,841,696.00	62,841,696.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kompetitif Peningkatan Kualitas Ekonomi Kompetitif			0.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Perhitungan dan Pembayaran Uang Pesangon, Penghargaan, Uang Pisah, dan Ganti Kerugian																		
			Analisis Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	17,200,000.00	11,040,000.00	2,140,000.00	-8,060,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kompetitif Peningkatan Kualitas Ekonomi Kompetitif			0.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Orientasi ke Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Analisis LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	5,500,000.00	10,410,000.00	8,550,000.00	1,050,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kompetitif Peningkatan Kualitas Ekonomi Kompetitif			0.00	DINAS TENAGA KERJA
	JUMLAH								**5,676,841,450.00**	**3,045,553,046.00**	**3,496,702,275.00**	**-2,379,979,175.00**						**0.00**		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak tersedia usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN,PROGRAM PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema RKP pada 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Prioritas Kota Pangkalpinang Tahun 2025 :

1. Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah;
2. Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim
3. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Serta Daya Saing Masyarakat
4. Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan
5. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan
6. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
7. Peningkatan kualitas pembangunan gender

Pencapaian pembangunan daerah tidak terlepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kota Pangkalpinang. Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas dijabarkan melalui tabel keterkaitan tujuan sasaran Kota dengan Dinas, dimana tujuan sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan seperti yang terdapat pada bab empat dokumen Renja ini

TUJUAN KOTA	IND TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	IND SASARAN KOTA	TUJUAN OPD	IND TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IND SASARAN OPD
mewujudkan SDM dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing	Tingkat Kemiskinan	meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	TPAK	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
							persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

Kebijakan lain yang menjelaskan mengenai evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Permendagri 18 Tahun 2020. Dari beberapa kegiatan yang terdapat pada Permendagri tersebut, telah diakomodir dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

No.	Substansi kegiatan sesuai Permendagri 18 Tahun 2020	Diakomodir dalam RPD 2025
1.	Urusan Tenaga Kerja **Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencanan tenaga kerja** **Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi** **Tingkat produktivitas tenaga kerja** **Persentase perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenegakaerjaan)** **Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota**	
	- Dokumen perencanaan tenaga kerja Kab/Kota;	√
	- Presentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja;	
	- Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kab/Kota;	√
	- Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster;	
	- Persentase instruktur bersertifikat kompetensi;	√
	- Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan;	√
	- Persentase LPK yang terakreditasi;	
	- Persentase LPK yang memiliki perizinan;	
	- Jumlah penganggur yang dilatih;	√
	- Persentase lulusan bersertifikat pelatihan;	√
	- Persentase penyerapan lulusan;	
	- Lulusan bersertifikat kompetensi;	
	- Jumlah Calon Peserta Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan;	
	- Jumlah pelatihan Calon Peserta Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);	

	- Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas; - Data tingkat produktivitas total; - Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP); - Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB); - Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan; - Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah; - Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan; - Persentase jumlah perusahaan yang berselisih; - Jumlah mogok kerja; - Jumlah penutupan perusahaan; - Jumlah perselisihan kepentingan; - Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 perusahaan; - Jumlah perselisihan PHK; - Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK; - Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite; - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kab/Kota yan diberdayakan; - Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Mediator Hubungan Industrial; - Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab/Kota; - Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kab/Kota; - Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kab/Kota; - Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota; - Jumlah pejabat fungsional Pengantar Kerja; - Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kab/Kota; - Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagkaerjaan Kab/kota;	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

	- Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER); - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi; - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata; - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan; - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja; - Data pemberdayaan pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya; Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	√ √ √

3.2 Tujuan dan Sasaran P-Renja

Tujuan dan sasaran Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 seperti pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun ke		
				2021	2022	2023
Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	60	61	62
	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	94,55	67,27	76,36
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	%	13,03	16,06	19,09

Sedangkan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026 berdasarkan Renstra Transisi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan		*TPAK*	*%*	*65,16*	*65,78*	*60*	*61*	*62*	*62*
	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100,00	6,89	90,00	90,00	90,00	90,00
		persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	6,03	7,09	6,40	6,90	7,10	7,10

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 berikut:

Tujuan RPD:
mewujudkan SDM dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing
Sasaran RPD:
meningkatnya kualitas kesempatan kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja perlu melaksanakan program, kegiatan serta sub kegiatan:

Kode						**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**
2	**07**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**
2	07	02	2	01		*KEGIATAN* Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	07	02	2	01	0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2	07	02	2	01	0003	SUB KEGIATAN Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
2	07	03				**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**
2	07	03	2	01		*KEGIATAN* Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	07	03	2	01	0001	SUB KEGIATAN Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	04				**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**
2	07	04	2	03		*KEGIATAN* Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	04	2	03	0002	SUB KEGIATAN Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	2	03	0003	SUB KEGIATAN Job Fair/Bursa Kerja
2	07	05				**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**
2	07	05	2	01		*KEGIATAN* Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2	07	05	2	01	0001	SUB KEGIATAN Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2	07	05	2	01	0003	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2	07	05	2	01		*KEGIATAN* Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2	01	0001	SUB KEGIATAN Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2	01	0002	SUB KEGIATAN Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2	01	0003	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
2	07	05	2	01	0004	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2	07	01				***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***
2	07	01	2	02		*KEGIATAN* *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
2	07	01	2	02	0001	SUB KEGIATAN penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2	07	01	2	05		*KEGIATAN* *administrasi kepegawaian perangkat daerah*
2	07	01	2	05	0009	SUB KEGIATAN pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
2	07	01	2	06		*KEGIATAN* *Administrasi Umum perangkat daerah*
2	07	01	2	06	0001	SUB KEGIATAN penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2	07	01	2	06	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	07	01	2	06	0004	SUB KEGIATAN penyediaan bahan logistik kantor
2	07	01	2	06	0005	SUB KEGIATAN penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2	07	01	2	06	0009	SUB KEGIATAN penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2	07	01	2	07		*KEGIATAN* *pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*
2	07	01	2	07	0001	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	07	01	2	07	0002	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	07	01	2	08		*KEGIATAN* *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

2	07	01	2	08	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	07	01	2	08	0003	SUB KEGIATAN penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2	07	01	2	08	0004	SUB KEGIATAN penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2	07	01	2	09		*KEGIATAN* *pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*
2	07	01	2	09	0001	SUB KEGIATAN penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2	07	01	2	09	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	07	01	2	09	0009	SUB KEGIATAN pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja (work plan report) tahun 2024 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategi (strategic plan report). Rencana strategi atau disebut dengan Renstra sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

PENJABARAN KEGIATAN RENJA SATUAN PENGUATAN DAERAH

DINAS TENAGA KERJA KOTA PANGKAL PINANG

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA							**5.875.841.450,00**	**3.046.053.046,00**	**3.496.762.275,00**	**-2.379.079.175,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.875.841.450,00**	**3.046.053.046,00**	**3.496.762.275,00**	**-2.379.079.175,00**							**0,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.875.841.450,00**	**3.046.053.046,00**	**3.496.762.275,00**	**-2.379.079.175,00**							**0,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**1.940.691.450,00**	**2.255.493.096,00**	**2.794.060.491,00**	**+1.940.691.450,00**							**0,00**	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.727.792.939,00	2.327.792.939,00	2.327.792.939,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	21 Orang/bulan	0,00	1.727.792.939,00	2.327.792.939,00	2.327.792.939,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	648.361.450,00	350.305.563,00	197.827.614,00	-342.663.836,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.770.200,00	5.382.600,00	3.386.000,00	-5.384.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	239.168.460,00	77.780.000,00	77.780.000,00	-161.388.460,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	75.676.632,00	65.364.663,00	49.663.528,00	-26.193.072,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	67.379.000,00	35.286.000,00	18.786.000,00	-48.593.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	80.000.000,00	49.489.086,00	-100.510.914,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	874.540.000,00	0,00	0,00	-874.540.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	337.470.000,00	0,00	0,00	-337.470.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	337.470.000,00	0,00	0,00	-337.470.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	653.750.000,00	185.334.284,00	179.379.928,00	-374.370.072,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	93.000.000,00	81.400.000,00	81.400.000,00	-3.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0003	Penyediaan Jasa Pendalam dan Pelengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pendalam dan Pelengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.250.000,00	25.050.000,00	25.050.000,00	-21.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	422.500.000,00	79.084.788,00	73.129.938,00	-349.370.062,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	101.600.000,00	88.860.000,00	88.860.000,00	-12.740.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	32.490.000,00	36.690.000,00	36.690.000,00	5.940.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.600.000,00	90.160.000,00	90.160.000,00	9.360.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang disiapkan**				**1 Kebijakan**	**1 Kebijakan**	**167.550.000,00**	**51.460.000,00**	**35.710.000,00**	**-167.550.000,00**							**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*				1 Laporan	1 Laporan	167.550.000,00	51.460.000,00	35.710.000,00	-131.840.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	87.890.000,00	51.460.000,00	35.710.000,00	-52.180.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				60 Orang	60 Orang	79.660.000,00	0,00	0,00	-79.660.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Pelatihan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja				0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Besaran tenaga kerja yang memlupakan pelatihan**				**79 %**	**79 %**	**3.431.765.000,00**	**285.160.000,00**	**275.160.000,00**	**-3.431.765.000,00**							**0,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah laporan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*				1 Laporan	1 Laporan	3.431.765.000,00	285.160.000,00	275.160.000,00	-3.156.605.000,00			-	Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				340 Orang	45 Orang	3.431.765.000,00	285.160.000,00	275.160.000,00	-3.156.605.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja				0,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**				**45 %**	**45 %**	**174.540.000,00**	**274.723.260,00**	**254.909.088,00**	**-174.540.000,00**							**0,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*				1 Laporan	1 Laporan	174.540.000,00	274.723.260,00	254.909.088,00	80.369.088,00			-	Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kota Mutu)				120 Orang	120 Orang	50.640.000,00	136.611.000,00	123.250.000,00	69.410.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja			2,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				60 Orang	60 Orang	120.700.000,00	138.112.268,00	131.865.000,00	10.965.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Pelayanan Perangkaman Keamanan Elektron Pelayanan Perangkaman Keamanan Elektron			0,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)**				**45,00 %**	**45,00 %**	**101.305.000,00**	**180.016.896,00**	**136.911.896,00**	**+161.305.900,00**							**0,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*perusahaan perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB*				8,48 Perus ahaan	8,48 Perus ahaan	77.130.000,00	88.060.000,00	58.060.000,00	+19.840.000,00			-	Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Tercatat di HLKP Online				70 Perusah aan	70 Perusah aan	49.950.000,00	47.960.000,00	47.960.000,00	2.010.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Peserta yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				55 Laporan	55 Laporan	31.140.000,00	20.130.000,00	10.130.000,00	+21.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota*				1 Laporan	1 Laporan	84.175.000,00	111.826.696,00	78.821.696,00	+5.353.304,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraksatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraksatan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Ditangani				50 Perkara	50 Perkara	57.850.000,00	52.380.000,00	36.680.000,00	+21.170.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraksatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraksatan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				25 Perkara	25 Perkara	8.000.000,00	34.740.696,00	26.871.696,00	-18.871.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraksatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraksatan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				55 Asosiasi dan Serikat Pekerja	55 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.420.000,00	11.370.000,00	7.170.000,00	+4.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraksatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraksatan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	6.900.000,00	13.430.000,00	8.180.000,00	1.280.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraksatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraksatan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	JUMLAH								**5.875.941.450,00**	**3.040.883.046,00**	**3.466.762.270,00**	**-2.370.079.175,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya tujuan sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran tujuan sasaran RPD Kota Pangkalpinang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

PERUBAHAN 2025 RENJA

RENCANA KERJA

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS SOSIAL
Jl. Usman Ambon No. 25 Kota Pangkalpinang || Telp. [0717] 421896 / 421897
www.dinsos.pangkalpinangkota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang. Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan mengacu pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Sebagai dokumen rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2025.

Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020, antara lain :

- Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPJMD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2024-2026.
- Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

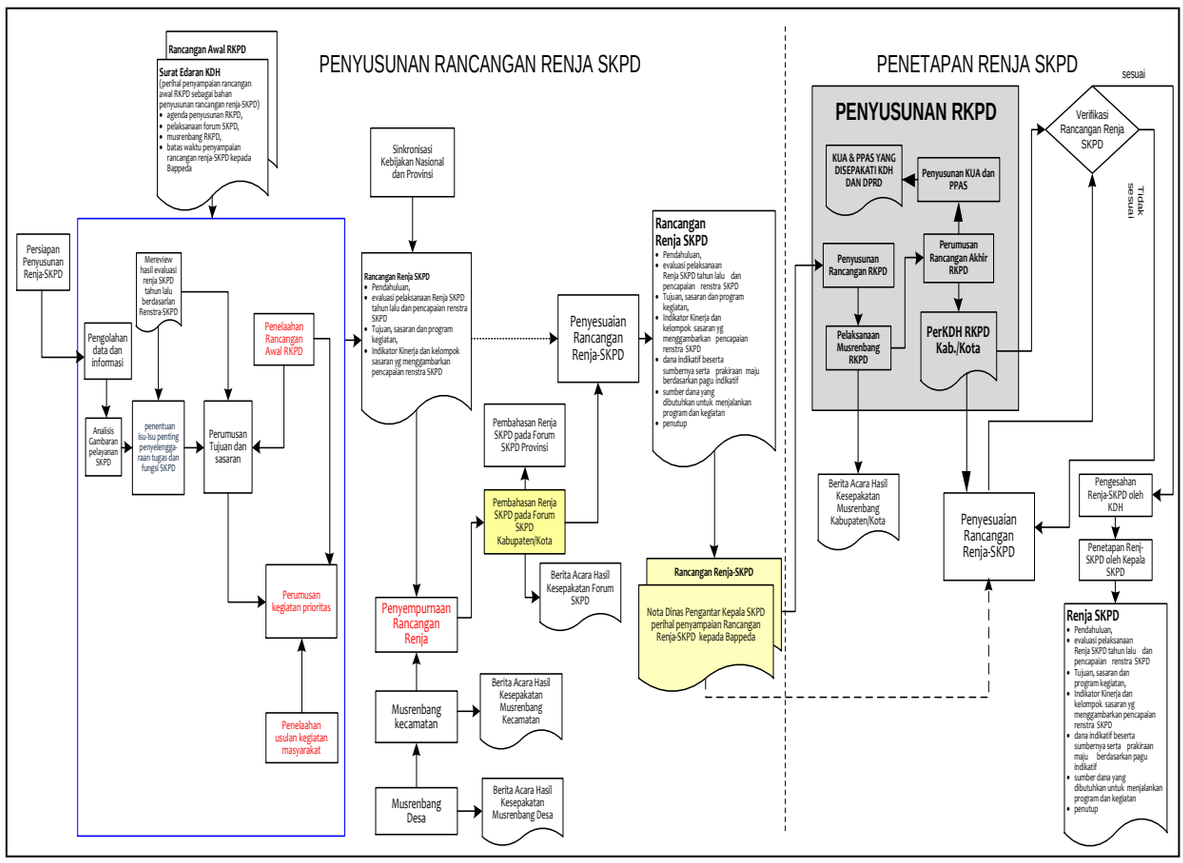

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang HasiL Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ;
22. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
25. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50).
27. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpianng Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Noor 144);
28. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
29. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 246);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam penyusunan RKA Tahun 2025 serta panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 sebagai :

1. Perumusan program-program prioritas.
2. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh OPD.
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pengukuran keberhasilan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rincian rencana-rencana kerja OPD dan rincian anggaran untuk menunjang rencana-rencana kerja OPD.

BAB IV Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu ditujukan untuk mengindetifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengindentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu OPD Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	010601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	95	4,969,035,982	20.25	1,297,808,884		0		0		0	20	1,297,808,884	21	26	SEKRETARIS (Dinas Sosial)
				Nilai SAKIP Perangkat D a e r a h (D e n g a n Satuan:Nilai)	72.55										0		0		SEKRETARIS (Dinas Sosial)
2		010601201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0		0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
3		10601201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0									0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
4		10601201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- S K P D (D e n g a n Satuan:Dokumen)	2	0									0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
5		10601201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0									0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
6		10601201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- S K P D (D e n g a n Satuan:Dokumen)	2	0									0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

7		10601201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0									0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
8		10601201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	0									0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
9		10601201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	0									0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
10		10601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4,142,265,858	25	1,164,190,964		0		0		0	25	1,164,190,964	25	28	Sub Koordinator Keuangan
11		10601202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	36	4,142,265,858	36	1,164,190,964							36	1164190964	100	28	Sub Koordinator Keuangan
12		10601202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	8	0	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Keuangan
13		10601202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan K e u a n g a n Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	9	0	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Keuangan
14		10601203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	0		0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
15		10601203002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16		10601203005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17		010601205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	42,009,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	2	42,009,000									0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

		10601205005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	108	0									0	0	0	#DIV/0!	
19		10601205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	6	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
20		010601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	132,089,900	15.75	28,383,759		0		0		0	16	28,383,759	16	21	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
21		10601206001	Penyediaan Komponen I n s t a l a s i Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
22		10601206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
23		10601206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
24		10601206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	32,089,900	1	900,000							1	900000	50	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
25		10601206005	Penyediaan Barang C e t a k a n d a n Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
26		10601206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	4	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
27		10601206008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
28		10601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	J u m l a h L a p o r a n Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	100,000,000	1	27,483,759							1	27483759	25	27	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
29		10601206011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
30		010601207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100	0	0	0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
31		010601207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	40	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
32		010601207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	6	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

33		010601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	423,803,744	25.00	76,745,081		0		0		0	25	76,745,081	25	18	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
34		010601208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	90,000,000	1	9,444,457							1	9444457	25	10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
35		010601208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
36		010601208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	333,803,744	1	67,300,624							1	67300624	25	20	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
37		010601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	228,867,480	25.00	28,489,080		0		0		0	25	28,489,080	25	12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
38		10601209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	53,231,696	1	7,324,616							1	7324616	100	14	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
39		10601209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	19	125,086,784	7	21,164,464							7	21164464	37	17	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
40		10601209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	50,549,000									0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**10.658**	**26.118**	
PREDIKAT KINERJA																			
41	**-**	**010602**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:%)**	**85.57**	**1,079,782,032**	**23.50**	**191,963,672**		**0**		**0**		**0**	**24**	**191,963,672**	**27**	**18**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**
42		010602202	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	90	0	0	0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Lembaga Masyarakat

43		010602202001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dengan Satuan:Dokumen)	50	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat
44		010602203	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	80.07	1,079,782,032	25.00	191,963,672		0		0		0	25	191,963,672	31	18	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat
45		010602203001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	42	946,825,568	42	168,470,928							42	168470928	100	18	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat
46		010602203002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	7	82,413,072	7	13,735,512							7	13735512	100	17	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:lembaga)	17	50,543,392	4	9,757,232							4	9757232	24	19	
47		010602203005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sertifikat)	7	0													Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**27.463**	**17.778**	

														PREDIKAT KINERJA					
48	-	010604	**P R O G R A M REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar nya diluar panti (Dengan Satuan:%)**	**100**	**329,646,784**	**7.12**	**13,135,848**		**0**		**0**		**0**	**7**	**13,135,848**	**7**	**4**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**
49		010604201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar; Anak Telantar; Lanjut Usia Telantar; dan Gelandangan dan Pengemis (Dengan Satuan:%)	100	185,300,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
50		010604201001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	48,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
51		010604201002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	20,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
52		010604201003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	48,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
53		010604201004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	10	12,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
54		010604201005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	15	11,700,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
55		010604201006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan P e n g e m i s d a n Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	15	15,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

56		010604201007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	2,500,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
57		010604201008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	60	2,500,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
58		010604201009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	2,400,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
59		010604201010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	10	12,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
60		010604201011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	20	4,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
61		010604201012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	7,200,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
62		010604202	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial (Dengan Satuan:%)	100	144,346,784	15.25	13,135,848		0		0		0	15	13,135,848	15	9	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Hiv/Aids
63		010604202001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0													Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Hiv/Aids

64		010604202002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	30	29,760,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Hiv/Aids
65		010604202012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	30	99,586,784	6	13,135,848							6	13135848	20	13	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Hiv/Aids
66		010604202014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	10	15,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Hiv/Aids
																	7.120	**3.985**	
67	**-**	**010605**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)**	**100**	**0**	**0**												**Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial**
68		010605202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	0	0												Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
69		010605202001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Dengan Satuan:Orang)	3,000	0													Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
70		010605202002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	260	0													Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin

71		010605202003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	100	0													Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
72		010605202004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	30	0													Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			
PREDIKAT KINERJA																			
73	-	**010606**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota (Dengan Satuan:%)**	**100**	**678,095,704**	**15.25**	**106,808,168**		**0**		**0**		**0**	**15**	**106,808,168**	**15**	**16**	**Bidang Penanganan Bencana**
74		010606201	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat b e n c a n a d a e r a h kabupaten/kota. (Dengan Satuan:%)	100	51,675,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
75		010606201001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	537	20,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
76		010606201002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	537	21,248,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
77		010606201003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	135	7,200,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
78		010606201004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	135	2,327,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

79		010606201005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	537	900,000								0	0	0	0	Dinas Sosial
80		010606202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK) (Dengan Satuan:%)	100	626,420,704	40.57	106,808,168		0		0	0	41	106,808,168	41	17	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
81		010606202001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kampung)	4	0												Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
82		010606202002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	626,420,704	50	106,808,168						50	106808168	100	17	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																**15.250**	**15.751**	
PREDIKAT KINERJA																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																**15.123**	**15.908**	
PREDIKAT KINERJA																		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Restra, maka dapat dirumuskan isi-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD).

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar bagi PPKS dan penanganan bencana;
2. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum terstandar;
3. Keterbatasan infrastruktur sosial yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam penanganan PPKS;
5. Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai penunjang SDM bidang sosial yang menangani langsung permasalahan sosial di masyarakat;
6. Sinkronisasi dan pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Basis Data Terpadu/BDT) dengan data sektoral penerima bantuan dan data PPKS belum maksimal dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar *inclusion* dan *exclusion error* ;
7. Belum optimalnya pemberdayaan sosial dan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan;
8. Dukungan kebijakan alokasi anggaran dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang belum memadai;

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh

Dinas Sosial untuk tahun 2025 secara umum berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, di antaranya sebagai berikut :

1. Masih berfluktuasinya tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang dengan rentang indikator Persentase Penduduk Miskin di tahun 2020 sebesar 4,36 %, Tahun 2021 meningkat signifikan sebesar 4,76 % dan sedikit menurun Tahun 2022 sebesar 4,55 % dari populasi jumlah penduduk yang terus meningkat;
2. Ketersediaan database PPKS yang belum memadai;
3. Masih maraknya gelandangan dan pengemis yang memenuhi jalanan kota;
4. Belum memadainya sarana/prasarana rumah singgah/ penampungan sementara yang representatif;
5. Kerjasama, koordinasi dan sinergisitas antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, lintas sektoral untuk penanganan gelandangan dan pengemis belum efektif dan terintegrasi dengan baik.
6. Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK)/Penyandang Disabilitas (difabel) yang memperoleh pelayanan dasar dan bantuan sosial terutama jaminan sosial bagi ODK;
7. Aksesibilitas bagi ODK/Penyandang Disabilitas di luar panti;
8. Belum optimalnya pengembangan potensi dan pemberdayaan orang dengan kecacatan (ODK)/Penyandang Disabilitas (difabel).
9. Masih merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial masyarakat di wilayah perkotaan;
10. Sarana dan prasarana pelayanan sosial yang belum memadai.
11. Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam, kondisi geografis perkotaan, faktor ketidaksengajaan/ kecelakaan seperti banjir, puting beliung, gelombang pasang, kebakaran dan lain sebagainya;
12. Potensi konflik sosial/keresahan sosial akibat pergesekan kepentingan yang berlatar belakang ekonomi, budaya, sosial dan politik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD 2024 dengan hasil analisa kebutuhan pada Renja 2024, adapun review terhadap Rancangan akhir RKPD dapat dilihat pada table T-C.31. dibawah ini.

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kota pangkalpinang

Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Da
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**5,963,723,416**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5,963,723,416**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Pk. Pinang**	**Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**100 %**	**22,680,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Pk. Pinang**	**Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**100 %**	**22,680,000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	900,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	900,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	420,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	420,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	210,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	210,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6,270,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6,270,000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12,360,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12,360,000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Pk. Pinang**	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	**100 %**	**4,469,778,993**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pk. Pinang**	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	**100 %**	**4,469,778,993**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Org/Bln	4,454,638,993	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Org/Bln	4,454,638,993
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	10,060,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	10,060,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	5,080,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	5,080,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Pk. Pinang**	**Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir**	**100 %**	**3,960,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pk. Pinang**	**Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir**	**100 %**	**3,960,000**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,800,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,800,000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4 Laporan	2,160,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4 Laporan	2,160,000

			Barang Milik Daerah pada SKPD			SKPD		Barang Milik Daerah pada SKPD		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Pk. Pinang**	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**	**100 %**	**69,439,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pk. Pinang**	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**	**100 %**	**69,439,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta stribut kelengkapan	2 Paket	42,009,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta stribut kelengkapan	2 Paket	42,009,000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	108 Dokumen	2,430,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	108 Dokumen	2,430,000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pk. Pinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25,000,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pk. Pinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**295,258,423**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pk. Pinang	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**295,258,423**
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,682,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,682,500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15,268,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15,268,500
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	72,459,900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	72,459,900

			Disediakan					Disediakan		
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26,686,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26,686,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5,000,000
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,540,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,540,000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	132,021,523	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	132,021,523
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8,600,000	Dukungan Pelaksaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8,600,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pk. Pinang**	**Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah**	**100%**	**158,758,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pk. Pinang**	**Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah**	**100%**	**158,758,000**
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	40 Unit	97,159,000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	40 Unit	97,159,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	61,599,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	61,599,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**538,550,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**538,550,000**

15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	96,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	96,000,000
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	22,550,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	22,550,000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	420,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	420,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pk. Pinang**	**Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**405,299,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pk. Pinang**	**Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**405,299,000**
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,750,000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	215,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	215,000,000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,549,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,549,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Pk. Pinang**	**Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial**	**85,57%**	**757,707,504**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Pk. Pinang**	**Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial**	**85,57%**	**757,707,504**

	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pk. Pinang**	**Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**90%**	**32,719,000**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pk. Pinang**	**Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**90 %**	**32,719,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50 Dokumen	32,719,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50 Dokumen	32,719,000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Pk. Pinang**	**Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota**	**80,07 %**	**724.988.504**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Pk. Pinang**	**Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota**	**80,07 %**	**724.988.504**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	543,662,432	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	543,662,432
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	87,413,072	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	87,413,072

	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pk. Pinang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Sertifikat	59,174,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pk. Pinang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Sertifikat	59,174,000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pk. Pinang			**453,387,392**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Pk. Pinang**			**453,387,392**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Pk. Pinang**	**Persentase Penyandang Disabilitas Telantar; Anak Telantar; Lanjut Usia Telantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100 %**	**360.374.392**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Pk. Pinang**	**Persentase Penyandang Disabilitas Telantar; Anak Telantar; Lanjut Usia Telantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100 %**	**360.374.392**
	Penyediaan Permakanan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	157,350,000	Penyediaan Permakanan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	157,350,000
	Penyediaan Sandang	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25,500,000	Penyediaan Sandang	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25,500,000

	Penyediaan Alat Bantu	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5,000,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	13,200,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	10,750,000
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	12,500,000

	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	2,500,000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	2,500,000
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	2,500,000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	2,500,000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4,000,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4,000,000
	Pemberian Layanan Rujukan	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	46,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	46,000,000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Pk. Pinang**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti**	**100 %**	**93.013.000**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Pk. Pinang**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti**	**100%**	**93.013.000**

			sosial					**sosial**		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70,513,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70,513,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7,500,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7,500,000
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	15,000,000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	15,000,000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**Pk. Pinang**	**Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial**	**%**	**562.040.000**	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**Pk. Pinang**	**Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial**	**%**	**562.040.000**

	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		**Persentase Anak-Anak Terlantar Yang Mendapatkan Pemeliharaan di Daerah Kewenangan Kabupaten/kota**	**0%**	**0**	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**Persentase Anak-Anak Terlantar Yang Mendapatkan Pemeliharaan di Daerah Kewenangan Kabupaten/kota**	**0%**	**0**
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	**0**	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	**0**
	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	**0**	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	**0**
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	**0**	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	**0**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Pk. Pinang**	**Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**562.040.000**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pk. Pinang**	**Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**562.040.000**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3000 Orang	39,880,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3000 Orang	39,880,000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	260 Keluarga	376,600,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	260 Keluarga	376,600,000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pk Pinang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang	100 Keluarga	65,180,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pk Pinang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang	100 Keluarga	65,180,000

			Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pk Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	80.380,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pk Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	80.380,000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				**403.685.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**403.685.000**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Pk Pinang**	**Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**251.685.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Pk Pinang**	**Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**251.685.000**
	Penyediaan Makanan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	100,000,000	Penyediaan Makanan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	100,000,000
	Penyediaan Sandang	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	62,310,000	Penyediaan Sandang	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	62,310,000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Pk Pinang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan	135 Unit	51,550,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Pk Pinang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan	135 Unit	51,550,000

			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	22,825,000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	22,825,000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pk Pinang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	15,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pk Pinang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	15,000,000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)	100 %	**152.000.000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Pk Pinang	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)	100 %	**152.000.000**
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	12,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	12,000,000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	140,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	140,000,000

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metode pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan.Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.

2. Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.

3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaan.

Pengumpulan data dan informasi setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan,capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Penyiapan daftar isi dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatantahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi:

a. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025
b. Rancangan kerangka ekonomi daerah
c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD.

Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD. Pagu indikatif SKPD dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD untuk pelaksanaan tahun sebelumnya .

Dari langkah-langkah diatas maka Dinas Sosial telah menyiapkan rancangan rencana kerja perubahan tahun 2025 seperti tabel berikut.

Rencana Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang
Tahun 2025

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Pagu Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
		Persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	**%**	**4.48**	**7,242,195,888**	**KADINSOS**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**72.55**	**5,190,243,688**	**SEKDIN**
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	**Nilai**	**95**		
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**5,484,000**	**Sub Koord PEP**
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,957,000	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,400,000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	2,127,000	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP**	**%**	**100**	**4,469,778,993**	**Sub. Koord. Keuangan**
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	36	4,289,207,904	
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**	**%**	**100**	**89.209.000**	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	89,209,000	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**	**176,354,260**	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	3,299,000	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	5,872,160	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	36,783,100	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	12,400,000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	118,000,000	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**389,121,044**	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	90,000,000	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	11,550,000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	287,571,044	

1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**240,867,480**	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	63,231,696	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	19	127,086,784	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	50,549,000	
		Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	**%**	**100**	**1,086,782,032**	**KADINSOS**
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial**	**%**	**85.57**	**1,086,782,032**	**KABID. DAYASOS**
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**65.12**	**1,086,782,032**	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	42	953,825,568	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	7	82,413,072	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	17	50,543,392	
		Capaian SPM Sosial	**%**	**100**	**177,700,000**	**KADINSOS**
		Persentase PPKS yang tertangani	**%**	**86.83**	**297,375,088**	**KADINSOS**
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar nya diluar panti**	**%**	**100**	**177,700,000**	
		Persentase PPKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	**%**	**100**	**119,675,088**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase Penyandang Disabilitas Telantar; Anak Telantar; Lanjut Usia Telantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**%**	**100**	**453.387.392**	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	48,000,000	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	20,000,000	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	48,000,000	

	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	12,000,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	15	11,700,000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	15	7,400,000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	2,500,000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	60	2,500,000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	2,400,000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	12,000,000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	4,000,000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	7,200,000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial**	**%**	**100**	**119,675,088**	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	29,760,000	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				2,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	77,315,088	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10,600,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	**%**	**100**	**562.040.000**	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**562.040.000**	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	3,000	30,000,000	

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota**	**%**	**100**	**637,795,080**	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**%**	**100**	**51,675,000**	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	537	20,000,000	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	537	21,248,000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	135	7,200.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	135	2,327,000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	537	900,000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)**	**%**	**100**	**586,120,080**	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	586,120,080	
				TOTAL :	**7,242,195,888**	

BAB V

PENUTUP

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Pangkalpinang dan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan perubahan rencana kerja yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Bagi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2025. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci kedalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Pangkalpinang, 03 Juni 2025

Kepala Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS SOSIAL

Khotaman Barka, S.STP.,M.Tr.IP

NIP. 198302102001121002

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan untuk periode tahun 2025. Rencana ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor perumahan dan permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan kajian mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Kami berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan arah kebijakan nasional maupun lokal.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi panduan utama bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi serta profesionalisme. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari internal maupun eksternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kami sadar sepenuhnya bahwa implementasi rencana ini akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan dukungan semua pihak terkait, kami yakin dapat mengatasi setiap hambatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap rencana ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dan menjadi landasan yang kokoh dalam membangun masa depan perumahan yang lebih baik untuk semua.

Pangkalpinang, 05 Mei 2025

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

M.BELLY JAWARI, ST. M.Si
PEMBINA TK.I / IV b
NIP 197907252005011008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penyusunan 11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH.....13

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....25

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33

3.1. Telaahan Terhadap Program Nasional.....33

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 40

3.3. Program dan Kegiatan 41

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DAERAH.....53

4.1. Kaidah Pelaksana Rencana Kerja Perubahan 53

4.2. Rencana Tindak Lanjut.....54

BAB V PENUTUP.....53

5.1. Uraian Penutup.....55

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bagian Ketiga Pasal 12 Ayat 1 huruf d, menyatakan bahwa Bidang Perumahan dan Kawasan Perumahan adalah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Pangkalpinang harus segera membentuk Kelembagaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bagian Kedua Pasal 2 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk:

a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan awasan Permukiman; dan
c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan- SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan

   kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) tahun

   2025
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun sebelumnya

   dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun ketiga RPJMD paruh ke empat dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Laporan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkin), merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang khususnya pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perubahan

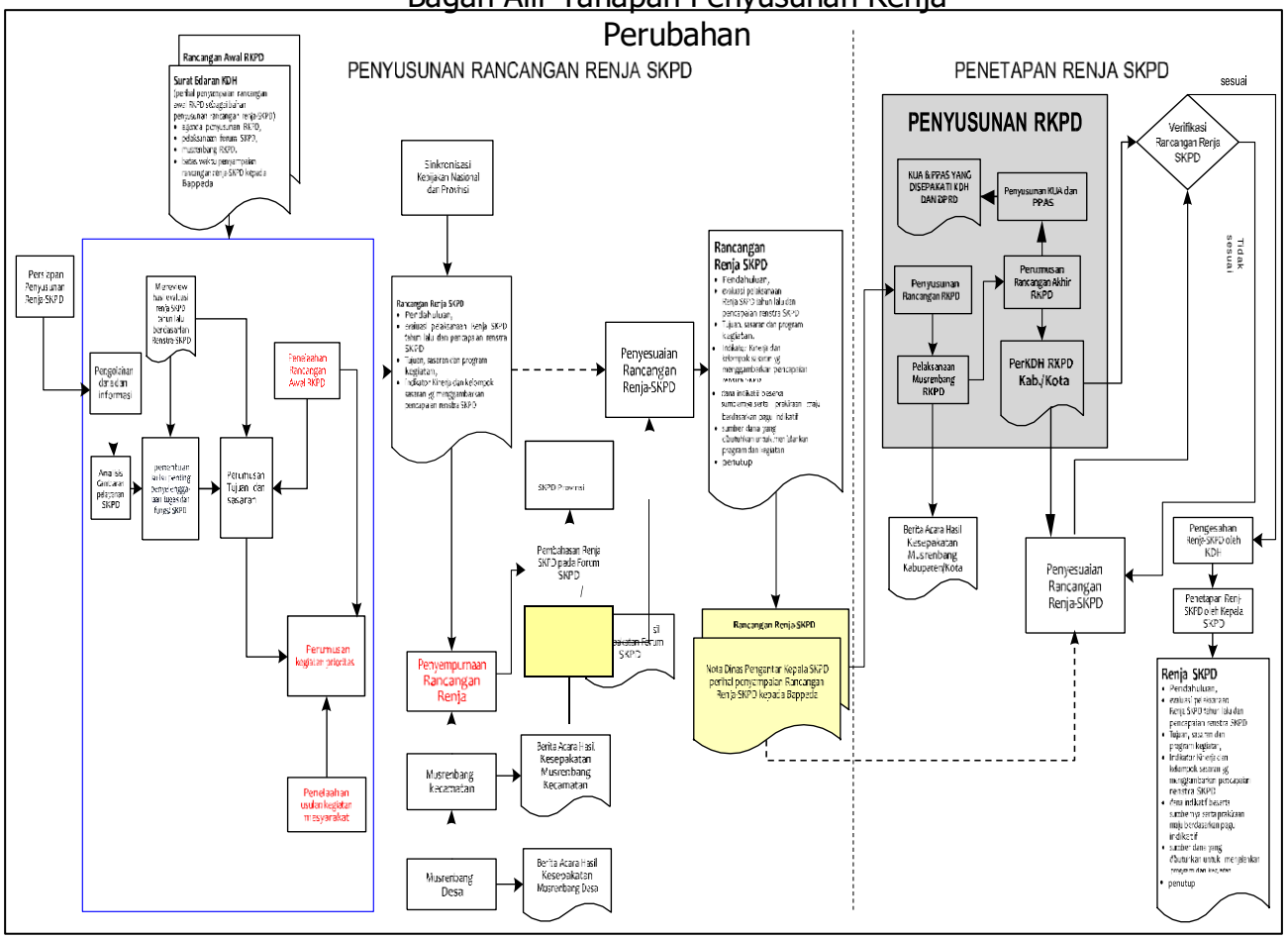

I.2. Landasan Hukum

Perencanaan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab X Hak Asasi Manusia : ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan ”.

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang yang antara lain meliputi :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan;
26. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Untilitas Umum untuk Perumahan Umum;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 seri E Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
31. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
36. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 seri E Nomor 03);
37. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);

38. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Kota Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
40. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).
41. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144).
42. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah selain untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025, juga untuk merumuskan arah kebijakan dasar

dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen Masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera

Sebagai tindaklanjut dari uraian diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang telah menyusun target yang akan dicapai oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam periode tiga tahun ke depan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian bidang perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
3. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
4. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Renja Perubahan sampai dengan triwulan II tahun 2023, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD, Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1. Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sampai dengan triwulan 2 tahun 2023, berikut ini :

TRIWULAN IV
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Perumahan Dan Permukiman
Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	010401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	14.764.124.234	0	0	74,860	5.819.882.712	74	709.834.983	74	1.684.902.048	74.000	1.359.348.623	74	1.628.238.633	74	5.382.324.287	74	5.382.324.287	100	36,455	SEKRETARIAT
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0		0		80		70		75		80		80		80		80		100		SEKRETARIAT
2		010401201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	52.392.500	0	0	100	14.466.000	20	0	40	0	75	4.455.000	100	7.695.000	100	12.150.000	100	12.150.000	100	23,190	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3		010401201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	42.181.500	0	0	1	12.970.000	1	0	1	0	1	4.455.000	1	7.695.000	1	12.150.000	1	12.150.000	100	28,804	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4		010401201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.211.000	0	0	1	1.496.000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
5		010401202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	0	10.839.530.654	0	0	100	3.773.507.594	17,100	616.654.631	50	1.244.173.107	75	853.459.384	100	754.076.944	100	3.468.364.066	100	3.468.364.066	100	31,997	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
6		010401202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	10.608.227.654	0	0	35	3.691.253.106	30	604.518.783	28	1.219.969.335	28	835.255.612	28	726.848.248	28	3.386.591.978	28	3.386.591.978	100	31,924	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
7		010401202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	9.523.000	0	0	1	2.266.050	1	0	1	0	1	0	1	1.935.000	1	1.935.000	1	1.935.000	100	20,319	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
8		010401202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	221.780.000	0	0	18	79.988.438	4	12.135.848	9	24.203.772	14	18.203.772	18	25.293.696	18	79.837.088	18	79.837.088	100	35,998	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
9		010401203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	0	46.398.000	0	0	100	101.086.784	15	15.514.464	50	31.271.696	75	23.271.696	100	31.028.928	100	101.086.784	100	101.086.784	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
10		010401203006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	46.398.000	0	0	1	101.086.784	1	15.514.464	1	31.271.696	1	23.271.696	1	31.028.928	1	101.086.784	1	101.086.784	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11		010401204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	0,185	3.198.700	0,046	0	0,092	0	0,138	0	0,182	2.865.000	0,182	2.865.000	0,182	2.865.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
12		010401204005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	12	1.599.350	3	0	6	0	9	0	12	1.435.000	12	1.435.000	12	1.435.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
13		010401204007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	12	1.599.350	3	0	6	0	9	0	12	1.430.000	12	1.430.000	12	1.430.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
14		010401205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	472.500.000	0	0	20	133.543.392	5	3.878.616	5	87.742.924	5	5.817.924	5	7.757.232	5	105.196.696	5	105.196.696	100	22,264	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		010401205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	80.000.000	1	0	1	79.925.000	1	0	1	0	1	79.925.000	1	79.925.000	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		010401205003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	472.500.000	0	0	12	53.543.392	3	3.878.616	6	7.817.924	9	5.817.924	12	7.757.232	12	25.271.696	12	25.271.696	100	5,349	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		010401206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	0	1.247.269.000	0	0	100	553.990.726	7	33.622.496	50	140.581.418	75	142.277.699	100	213.583.503	100	530.065.116	100	530.065.116	100	42,498	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		010401206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	26.787.500	0	0	1	10.850.700	1	0	1	3.620.700	1	0	1	6.602.200	1	10.222.900	1	10.222.900	100	38,163	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		010401206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	2.160.000	0	0	1	8.500.000	1	0	1	1.850.000	1	3.650.000	1	2.100.000	1	7.600.000	1	7.600.000	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		010401206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	71.703.500	0	0	1	85.187.050	1	0	1	620.000	1	33.530.600	1	33.074.200	1	67.224.800	1	67.224.800	100	93,754	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21		010401206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	36.700.000	0	0	2	35.718.000	2	0	2	14.012.000	2	0	2	19.062.000	2	33.074.000	2	33.074.000	100	90,120	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		010401206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	450.000.000	0	0	12	200.000.000	0	0	6	58.044.974	9	54.663.355	12	85.500.111	12	198.208.440	12	198.208.440	100	44,046	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23		010401206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	98.500.000	0	0	12	28.271.696	3	4.378.616	6	8.567.924	9	6.567.924	10	8.757.232	10	28.271.696	10	28.271.696	100	28,702	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		010401206011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	544.500.000	0	0	12	185.463.280	3	29.243.880	6	53.865.820	9	43.865.820	10	58.487.760	10	185.463.280	10	185.463.280	100	34,061	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		010401208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	0	1.132.865.880	0	0	100	359.637.516	12	40.164.776	50	116.558.359	75	81.286.685	100	101.917.608	100	339.927.428	100	339.927.428	100	30,006	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		010401208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	135.597.600	0	0	12	50.543.392	3	7.757.232	6	15.635.848	9	11.635.848	12	15.514.464	12	50.543.392	12	50.543.392	100	37,275	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27		010401208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	404.500.000	0	0	12	86.981.000	3	0	6	26.105.395	9	22.728.829	12	19.612.488	12	68.446.712	12	68.446.712	100	16,921	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28		010401208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	592.768.280	0	0	12	222.113.124	3	32.407.544	6	74.817.116	9	46.922.008	12	66.790.656	12	220.937.324	12	220.937.324	100	37,272	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29		010401209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	973.168.200	0	0	100	880.452.000	5	0	50	64.574.544	60	248.780.235	100	509.314.418	100	822.669.197	100	822.669.197	100	84,535	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
30		010401209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	525.263.200	0	0	1	40.450.000	1	0	1	11.823.298	1	7.507.796	1	19.231.287	1	38.562.381	1	38.562.381	100	7,342	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
31		010401209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	89.100.000	0	0	14	193.380.000	14	0	14	30.904.246	14	30.406.039	14	78.487.131	14	139.797.416	14	139.797.416	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
32		010401209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	78.330.000	0	0	20	44.975.000	20	0	20	21.847.000	20	11.088.400	20	11.999.000	20	44.934.400	20	44.934.400	100	57,366	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
33		010401209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	280.475.000	0	0	1	601.647.000	1	0	1	0	1	199.778.000	1	399.597.000	1	599.375.000	1	599.375.000	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						**100,000**	**36,455**	
																	PREDIKAT KINERJA						**ST**	**SR**	
34	-	**010402**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana (Dengan Satuan:%)**	**0**	**6.412.436.649**	**0**	**0**	**100**	**1.601.336.115**	**15**	**194.150.248**	**50**	**266.749.060**	**75**	**430.523.046**	**100**	**602.674.168**	**100**	**1.494.096.522**	**100**	**1.494.096.522**	**100**	**23,300**	**BIDANG PERUMAHAN**
35		010402201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabiltiasi Rumah Korban bencana atau Relokasi yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	0	463.557.870	0	0	100	220.524.480	9	17.393.080	50	70.448.800	75	73.279.620	100	49.371.160	100	210.492.660	100	210.492.660	100	45,408	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
36		010402201002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	104.460.180	0	0	1	28.430.696	1	3.378.616	0	7.067.924	1	9.987.924	1	7.216.232	1	27.650.696	1	27.650.696	100	26,470	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
37		010402201003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dengan Satuan:Dokumen)	0	150.000.180	0	0	1	929.000	1	0	0	0	0	0	1	459.000	2	459.000	2	459.000	100	0,306	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
38		010402201004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	105.789.855	0	0	1	29.997.696	1	3.378.616	1	7.067.924	1	5.067.924	1	7.756.232	1	23.270.696	1	23.270.696	100	21,997	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
39		010402201006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	0	103.307.655	0	0	1	41.195.696	1	3.378.616	0	7.312.924	1	22.817.924	1	7.216.232	1	40.725.696	1	40.725.696	100	39,422	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
40		010402201009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	0	0	0	0	1	119.971.392	0	7.257.232	0	49.000.028	0	35.405.848	1	26.723.464	1	118.386.572	1	118.386.572	100	100	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
41		010402202	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah (Dengan Satuan:%)	0	435.272.655	0	0	100	82.458.746	9	4.378.616	50	8.567.924	75	33.220.496	100	29.259.492	100	75.426.528	100	75.426.528	100	17,329	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
42		010402202001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	135.270.060	0	0	20	20.975.000	0	0	0	0	20	9.321.494	20	11.279.000	20	20.600.494	20	20.600.494	100	15,229	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
43		010402202004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Dengan Satuan:Orang)	0	300.002.595	0	0	20	5.709.000	0	0	0	0	0	0	20	5.534.000	20	5.534.000	20	5.534.000	100	1,845	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
44		010402202009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	50	55.774.746	0	4.378.616	0	8.567.924	20	23.899.002	30	12.446.492	30	49.292.034	30	49.292.034	100	100	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
45		010402203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	0	400.006.740	0	0	100	12.500.000	5	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0	100	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
46		010402203001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	0	400.006.740	0	0	2	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
47		010402205	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:%)	0	3.913.636.484	0	0	100	1.088.458.285	20	157.659.104	50	140.017.918	75	285.518.804	100	443.793.612	100	1.026.989.438	100	1.026.989.438	100	26,241	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
48		010402205002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3.913.636.484	0	0	12	1.088.458.285	3	157.659.104	6	140.017.918	9	285.518.804	12	443.793.612	12	1.026.989.438	12	1.026.989.438	100	26,241	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
49		010402206	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase layanan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	0	1.050.039.000	0	0	100	185.494.704	9	14.719.448	50	46.514.418	75	38.504.126	100	70.634.904	100	170.372.896	100	170.372.896	100	16,225	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
50		010402206001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	375.015.150	0	0	1	101.502.842	1	11.340.832	1	25.813.248	1	19.881.248	1	41.922.624	1	98.957.952	1	98.957.952	100	26,388	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
51		010402206003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	375.034.900	0	0	1	71.279.496	1	3.378.616	1	20.701.170	1	18.622.878	1	18.315.314	1	61.017.978	1	61.017.978	100	16,270	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
52		010402206004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Dengan Satuan:Laporan)	0	149.999.150	0	0	1	12.712.366	0	0	0	0	0	0	1	10.396.966	1	10.396.966	1	10.396.966	100	6,931	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
53		010402207	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (Dengan Satuan:%)	0	149.923.900	0	0	100	11.899.900	5	0	50	1.200.000	75	0	100	9.615.000	100	10.815.000	100	10.815.000	100	7,214	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
54		010402207001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (Dengan Satuan:Laporan)	0	149.923.900	0	0	1	11.899.900	0	0	0	1.200.000	1	0	1	9.615.000	1	10.815.000	1	10.815.000	100	7,214	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	23,300	
																	PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
55	-	010403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (Dengan Satuan:%)	0	17.475.625.000	0	0	86	2.715.613.536	96	76.520.872	96	1.111.123.732	98	765.681.136	98	726.208.617	98	2.679.534.357	98	2.679.534.357	100	15,333	BIDANG PERMUKIMAN
56		010403201	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Izin Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	77.906.392	11	7.757.232	45	20.494.556	75	21.757.456	100	27.401.394	100	77.410.638	100	77.410.638	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
57		010403201001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	77.906.392	1	7.757.232	1	20.494.556	1	21.757.456	1	27.401.394	1	77.410.638	1	77.410.638	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
58		010403202	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dengan Satuan:%)	0	912.000.000	0	0	60	239.694.880	7	17.893.080	40	61.609.836	75	65.663.620	80	87.009.892	80	232.176.428	80	232.176.428	100	25,458	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
59		010403202001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	0	625.740.000	0	0	1	113.774.992	1	6.757.232	1	26.382.848	1	31.735.848	1	48.062.464	1	112.938.392	1	112.938.392	100	18,049	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
60		010403202003	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Kelompok Masyarakat)	0	0	0	0	1	78.395.192	1	7.757.232	1	15.635.848	1	22.879.848	1	26.056.266	1	72.329.194	1	72.329.194	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
61		010403202004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	24.574.696	1	3.378.616	1	7.067.924	1	5.067.924	1	9.060.232	1	24.574.696	1	24.574.696	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
62		010403202007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	22.950.000	1	0	1	12.523.216	1	5.980.000	1	3.830.930	1	22.334.146	1	22.334.146	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
63		010403203	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha (Dengan Satuan:%)	0	16.563.625.000	0	0	40	2.398.012.264	10	50.870.560	20	1.029.019.340	30	678.260.060	40	611.797.331	40	2.369.947.291	40	2.369.947.291	100	14,308	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
64		010403203007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	446.120.000	0	0	1	43.080.000	1	3.378.616	1	7.067.924	1	5.067.924	1	26.785.232	1	42.299.696	1	42.299.696	100	9,482	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
65		010403203009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Ha)	0	0	0	0	10	2.354.932.264	0	47.491.944	0	1.021.951.416	0	673.192.136	0	585.012.099	0	2.327.647.595	0	2.327.647.595	0	100	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	15,333	
																	PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
66	-	010404	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	97	640.371.788	20	11.885.848	45	88.269.508	75	503.151.447	97	36.043.696	97	639.350.499	97	639.350.499	100	100	BIDANG PERMUKIMAN
67		010404201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	0	640.371.788	1	11.885.848	1	88.269.508	1	503.151.447	1	36.043.696	1	639.350.499	1	639.350.499	100	100	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
68		010404201001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	0	0	0	0	16	640.371.788	0	11.885.848	0	88.269.508	8	503.151.447	8	36.043.696	8	639.350.499	8	639.350.499	100	100	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	100,000	
																	PREDIKAT KINERJA					ST	ST	
69	-	010405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU (Dengan Satuan:%)	0	7.635.555.055	0	0	97,200	1.215.127.498	10	36.741.144	50	698.303.300	75	136.692.124	98	29.802.834	98	901.539.402	98	901.539.402	100	11,807	BIDANG PERUMAHAN
70		010405201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang dibangun (Dengan Satuan:Unit)	0	7.635.555.055	0	0	9	1.215.127.498	1	36.741.144	1	698.303.300	2	136.692.124	2	29.802.834	2	901.539.402	2	901.539.402	100	11,807	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
				Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan (Dengan Satuan:%)	0		0		100		10		60		80		100		100		100		100		SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
71		010405201001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	350.990.385	0	0	1	89.152.192	1	10.340.832	0	33.550.500	1	18.202.248	1	7.170.416	1	69.263.996	1	69.263.996	100	19,734	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
72		010405201002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Dengan Satuan:Lokasi)	0	7.103.626.120	0	0	10	1.033.697.922	1	22.021.696	1	654.969.876	2	96.432.544	2	12.360.848	2	785.784.964	2	785.784.964	100	11,062	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
73		010405201003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	180.938.550	0	0	1	55.195.000	1	4.378.616	1	8.567.924	1	15.579.454	1	2.189.308	1	30.715.302	1	30.715.302	100	16,976	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
74		010405201005	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	37.082.384	1	0	1	1.215.000	1	6.477.878	1	8.082.262	1	15.775.140	1	15.775.140	100	100	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	11,807	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
75	-	010406	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	1.200.000	8	0	30	0	60	0	100	719.000	100	719.000	100	719.000	100	100	BIDANG PERUMAHAN
76		010406201	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Layanan Sertifikasi dan Registrasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	1.200.000	5	0	30	0	60	0	100	719.000	100	719.000	100	719.000	100	100	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN
77		010406201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1	719.000	1	719.000	1	719.000	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	100,000	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	ST	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)					100,000	47,816	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- Kesiapan Tim pelaksana
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Adanya kendala dilapangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	- -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	- -

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 06-02-2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA PANGKALPINANG

M. BELLY JAWARI,ST,M.Si.
NIP.197907252005011008

KOTA PANGKALPINANG

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang terbentuk pada tanggal 03 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Dalam mencapai target kinerjanya, dibutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, dan juga dibutuhkan dukungan dana serta ide kreatif, hal ini tidak bisa hanya dikerjakan dan ditumpukan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kasi yang membidanginya, inilah yang menjadi kendala diinternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang.

Secara garis besar permasalahan pokok kinerja pelayanan bidangperumahan dan permukiman meliputi; rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan.

Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi;

rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, serta rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum. Sedangkan permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage), serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Permasalahan pokok persampahan meliputi;

masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan, serta masih lemahnya manajemen dan operasional teknis pengelolaan sampah.

Sedangkan masih luasnya daerah genangan serta banyak terjadinya banjir di kawasan perkotaan merupakan permasalahan pokok dalam penanganan drainase.

Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannnya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung.

Adapun dalam bidang pengembangan perkotaan, permasalahan pokok meliputi;

perkembangan perkotaan yang tidak seimbang antara kota-kota metropolitan/besar dengan kota-kota menengah dan kecil, serta memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi.

Mengingat permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan permukiman tersebut yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan. Menurut Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah Huruf D, Sub Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman memiliki 4 (empat) Urusan yaitu :

1. Perumahan

   Pembagian Urusan untuk Perumahan, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal :

   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
   b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
   c. Fasilitasi Site Plan pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
   d. Fasilitasi Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

2. Permukiman

   Pembagian Urusan untuk Permukiman, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal :

   a. Pengkajian dan Pengawasan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
   b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

   Pembagian Urusan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota

4. Prasarana, Sarana**,** dan Utilitas Umum (PSU)

   Pembagian Urusan untuk Prasarana, Sarana**,** dan Utilitas Umum (PSU), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal Penyelenggaraan PSU perumahan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 2.3

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang
Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Unit OPD Penanggung Jawab
1	3	7		12	13	14 = 6 + 12	16
		K	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5,819,882,712	5,382,324,287	100%	5,382,324,287	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100%**		
	Predikat Kinerja				**T**		
2	Program Pengembangan Perumahan		1,601,336,115	1,494,096,522	100%	1,494,096,522	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%)				**100%**		
	Predikat Kinerja				**T**		
3	Program Kawasan Permukiman		2,715,613,536	2,679,534,357	100%	2,679,534,357	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%)				**100%**		
	Predikat Kinerja				**T**		
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		640,371,788	639,350,499	100%	639,350,499	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%)				**100%**		
	Predikat Kinerja				**T**		
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		1,215,127,498	901,539,402	100%	901,539,402	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%)				**100%**		
	Predikat Kinerja				**T**		

6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		1,200,000	719,000	100%	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%)				**100%**		
	Predikat Kinerja				**T**		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**11,993,531,649**	**11,365,192,509**		**11,365,192,509**	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)					**100%**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)					**T**		

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam menopang pembangunan berkelanjutan maka perlu didukung beberapa langkah-langkah strategis yang diestimasi akan berpengaruh dalam pembangunan daerah ini, untuk itu diperlukan adanya identifikasi sekaligus tindakan analisis. Faktor strategis yang berpengaruh terhadap arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2024-2026 dapat dianalisis melalui lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatknya Jumlah Kekurangan Rumah (Backlog) dan rendahnya angka pemenuhan rumah terutama bagi MBR;
2. Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum memadai.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan dikarenakan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kmuh
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkatan kelurahan, kecamatan maupun Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Kebijakan dan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan

program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni yang dilengkapi sarpras PSU, dan pengentasan Kawasan kumuh, terkendala prilaku atau pola fikir beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses penganggaran dan pembangunan program pemerintah;
b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
c. Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan/jalan setapak, jembatan gantung/plat, draenase, Ruang Terbuka Publik dsb;

2.5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian bermukim bagi masyarakat melalui :
    1) Pemberian bantuan pembangunan rumah baru layak huni;
    2) Rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana di lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan korban relokasi program pemerintah;

3) Penyusunan Pedoman, standar dan petunjuk teknis pelaksanaan;
4) fasilitasi termasuk monev pra-sertifikasi dan pasca-sertifikasi rumah bersubsidi serta realisasi pembangunan dan pemanfaatannya;
5) Pemuktahiran data perumahan;
6) pengembangan RUSUNAWA.

B. Meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan perumahan melalui:
1) Pembangunan PSU Lingkungan Perumahan;
2) Pemeliharaaan PSU Lingkungan Perumahan;
3) Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan PSU Lingkungan Perumahan;
4) Pemuktahiran data kawasan lingkungan permukiman kumuh

2.5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pemenuhan layanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan penataan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
3. Meningkatkan pelaksanaan penataan dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi.
4. Meningkatkan pelaksanaan penanganan Kawasan permukiman kumuh
5. Meningkatkan Pelaksanaan Prasarana, Sasaran dan Utilitas Umum (PSU)
6. Meningkatkan Layanan Sertifikasi dan Registrasi Pelaksanaan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Program Nasional

Mengacu pada Renstra Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 pada point 3.3.4 tentang ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG "Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau", dijelaskan bahwa :

Tujuan ketiga pada Renstra Kementerian PUPR adalah terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan untuk Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bangka Belitung yang mengacu pada Visinya yaitu "Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi", dan Misi I yaitu Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang permukiman dan perumahan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dan pembangunan kewilayahan dan pemerataan dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan

menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, maka Kementerian PUPR juga mengarahkan kebijakan pembangunan bidang permukiman dan perumahan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan/wilayah prioritas nasional dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional, melalui ;

a) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni: cakupan pelayanan akses air minum, penanganan permukiman kumuh perkotaan, dan cakupan pelayanan akses sanitasi;
b) Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni dan peningkatan rumah yang layak huni; serta
c) Peningkatan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni, dan peningkatan aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN

Pembinaan dan Pengembangan Permukiman diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan SDGs serta mendukung penyelenggaraan agenda prioritas nasional pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman menggunakan tiga strategi pendekatan

yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota pada kawasan yang memiliki fungsi strategis secara nasional. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pengembangan perumahan dan pengembangan pembiayaan perumahan dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, juga dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik terbangun (jaringan infrastruktur), potensi pengembangan dan daya tampung wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta kejadian bencana. Maka dari itu, arah Kebijakan pengembangan perumahan difokuskan pada prioritas pembangunan nasional:

a) kawasan industri/KEK,
b) Kawasan pariwisata,
c) pengembangan kota hijau yang berketahan iklim dan bencana,

d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi,
e) keterkaitan desa dan kota
f) kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga (187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar),
g) daerah tertinggal, dan
h) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (melalui bansos rumah swadaya pada masyarakat nelayan dan pekerja industri perikanan dll).

Selain itu arah Kebijakan pengembangan perumahan juga difokuskan pada program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, yaitu peningkatan kontribusi pengembangan perumahan bagi MBR dengan memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pembiayaan perumahan berdasarkan dukungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah:

a) kawasan industri/KEK;
b) Kawasan pariwisata;
c) pengembangan kota hijau yang berketahan iklim dan bencana;

d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi;
e) keterkaitan desa dan kota;
f) kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar);
g) daerah tertinggal; dan
h) dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional.

Visi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah:
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan".

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, maka tujuan pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024, adalah meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan:

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air;
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional;
3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau;

4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian sasaran ke-3 : Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.	Kurangnya Kesadaran dan peran serta masyarakat untuk Bersama-sama berusaha keluar dari zona kumuh	Pemberian izin membangun diatas tanah masyarakat	Dilaksanakannya Musrenbang dari tingkatan Kelurahan sampai Kota dan Sosialisasi
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pengadaan barang jasa hibah kepada masyarakat oleh pemerintah	Masih ada warga yang meminta RLH berupa PB padahal dalam rap dan anggarannya adalah PK	Adanya penganggaran berkelanjutan dan sosialisasi pra pembangunan

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perunahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan asas otonomi dan tugas pembantuan, meliputi : perencanaan, bangunan gedung, perumahan, PSU dan permukiman, pengendalian bangunan

III.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sebagai berikut: "Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nyaman, produktif dan berkelanjutan"

III.2.2. Sasaran

Sasaran pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: "Meningkatnya Penyediaan Akses (dan/ pemenuhan kebutuhan) Hunian Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman Dan Terjangkau"

III.3. Program dan Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas maupun kegiatan belanja langsung yang telah disetujui oleh lembaga legislatif yang bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pangkalpinang. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang meliputi :

1. Program Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang;
2. Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota;
3. Penajaman program melalui forum SKPD;
4. Penyelarasan program-program yang selanjutnya dilakukan penelaahan

sebagai program prioritas.

Dari uraian diatas dan jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Pengembangan Perumahan

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
4. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
5. Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
6. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

Program Kawasan Permukiman

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kulaifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemabngunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan beserta pendanaannya yang diajukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang pada perubahan Renja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**9.038.841.926,00**	**9.410.725.408,00**	**7.655.642.458,00**	**-1.383.199.468,00**							**2.903.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.038.841.926,00**	**9.410.725.408,00**	**7.655.642.458,00**	**-1.383.199.468,00**							**2.903.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**9.038.841.926,00**	**9.410.725.408,00**	**7.655.642.458,00**	**-1.383.199.468,00**							**2.903.000.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				**74,96 85 Nilai Nilai**	**74,96 85 Nilai Nilai**	**6.132.348.926,00**	**5.398.973.736,00**	**4.764.697.790,00**	**-3.229.348.926,00**							**2.903.000.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP*				100 %	100 %	3.965.841.926,00	3.679.297.824,00	3.663.848.518,00	-301.993.408,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.903.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.965.841.926,00	3.599.387.236,00	3.584.413.430,00	-381.428.496,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.095.500,00	620.000,00	620.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	78.815.088,00	78.815.088,00	78.815.088,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir*				100 %	100 %	30.000.000,00	95.515.088,00	95.515.088,00	65.515.088,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	95.515.088,00	95.515.088,00	65.515.088,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase kontribusi daerah terhadap PAD*				0,180 %	0,180 %	0,00	1.092.000,00	546.000,00	546.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.092.000,00	546.000,00	546.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*				-37,5 %	-37,5 %	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-150.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	643.774.000,00	826.373.276,00	414.620.636,00	-229.153.364,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.993.000,00	19.993.000,00	9.997.000,00	-9.996.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	264.000.000,00	205.175.000,00	0,00	-264.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.795.000,00	10.395.000,00	10.395.000,00	600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	153.659.300,00	89.479.200,00	-10.520.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.986.000,00	29.416.000,00	14.920.000,00	-35.066.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	27.271.696,00	27.271.696,00	27.271.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	180.463.280,00	162.557.740,00	162.557.740,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	13 Unit	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.061.753.000,00	417.346.548,00	409.367.548,00	-652.385.452,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	48.543.392,00	48.543.392,00	48.543.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00	18.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	981.753.000,00	270.403.156,00	262.424.156,00	-719.328.844,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	280.980.000,00	323.949.000,00	123.400.000,00	-157.580.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.250.000,00	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	219.880.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-189.380.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	20.850.000,00	52.650.000,00	52.650.000,00	31.800.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	200.549.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**100 %**	**-**	**1.108.144.000,00**	**1.717.000.284,00**	**1.227.180.400,00**	**-1.108.144.000,00**							**0,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabiltiasi Rumah Korban bencana atau Relokasi yang terlaksana*				100 %	100 %	137.636.000,00	315.544.480,00	257.024.480,00	119.388.480,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	2 Dokumen	3.259.000,00	4.659.000,00	4.659.000,00	1.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	2 Dokumen	43.459.000,00	55.602.392,00	55.602.392,00	12.143.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	30.459.000,00	59.330.696,00	45.830.696,00	15.371.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	60.459.000,00	195.952.392,00	150.932.392,00	90.473.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah*				100 %	100 %	29.152.000,00	38.137.000,00	22.697.000,00	-6.455.000,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	2.734.000,00	5.509.000,00	5.509.000,00	2.775.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				20 Orang	35 Orang	4.509.000,00	6.509.000,00	6.509.000,00	2.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				0 Orang	0 Orang	21.909.000,00	26.119.000,00	10.679.000,00	-11.230.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*				100 %	100 %	790.000.000,00	1.108.545.116,00	760.665.232,00	-29.334.768,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	790.000.000,00	1.108.545.116,00	760.665.232,00	-29.334.768,00	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Persentase layanan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan*				100 %	100 %	141.897.000,00	254.773.688,00	186.793.688,00	44.896.688,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	3 Dokumen	64.354.000,00	123.242.296,00	88.002.296,00	23.648.296,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				0 Laporan	3 Laporan	62.409.000,00	118.512.392,00	85.772.392,00	23.363.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				0 Laporan	3 Laporan	15.134.000,00	13.019.000,00	13.019.000,00	-2.115.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung*				100 %	100 %	9.459.000,00	0,00	0,00	-9.459.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				0 Laporan	1 Laporan	9.459.000,00	0,00	0,00	-9.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau**				**93.00 %**	**93.00 %**	**475.042.000,00**	**840.388.540,00**	**706.113.545,00**	**-475.042.000,00**							**0,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Persentase Pengawasan dan Pengendalian Izin Pengembangan Kawasan Pemukiman yang terlaksana*				100 %	100 %	49.975.000,00	175.716.688,00	155.491.733,00	105.516.733,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	2 Laporan	49.975.000,00	175.716.688,00	155.491.733,00	105.516.733,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*				80 %	80 %	246.817.000,00	532.528.460,00	460.479.420,00	213.662.420,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	73.100.000,00	235.948.384,00	214.050.844,00	140.950.844,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	53.127.000,00	175.164.988,00	147.534.488,00	94.407.488,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	3 Dokumen	120.590.000,00	121.415.088,00	98.894.088,00	-21.695.912,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha*				60 %	60 %	178.250.000,00	132.143.392,00	90.142.392,00	-88.107.608,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	3 Dokumen	178.250.000,00	132.143.392,00	90.142.392,00	-88.107.608,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota**				**98 %**	**98 %**	**641.605.000,00**	**509.425.688,00**	**494.559.103,00**	**-641.605.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh*				2 %	2 %	641.605.000,00	509.425.688,00	494.559.103,00	-147.045.897,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				2 Unit Rumah	4 Unit Rumah	641.605.000,00	509.425.688,00	494.559.103,00	-147.045.897,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU**				**98.00 %**	**98.00 %**	**652.243.000,00**	**944.937.160,00**	**463.091.620,00**	**-652.243.000,00**							**0,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan*				100 %	100 %	652.243.000,00	944.937.160,00	463.091.620,00	-189.151.380,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				0 Dokumen	1 Dokumen	59.284.000,00	151.997.288,00	123.897.288,00	64.613.288,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				0 Lokasi	42 Lokasi	450.541.000,00	592.240.176,00	165.244.636,00	-285.296.364,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				0 Laporan	1 Laporan	42.459.000,00	97.790.696,00	95.290.696,00	52.831.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				0 Laporan	1 Laporan	99.959.000,00	102.909.000,00	78.659.000,00	-21.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman**				**100 %**	**100 %**	**29.459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.459.000,00**							**0,00**	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	*Persentase Layanan Sertifikasi dan Registrasi yang dilaksanakan*				100 %	100 %	29.459.000,00	0,00	0,00	-29.459.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				0 Laporan	1 Laporan	29.459.000,00	0,00	0,00	-29.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H								**9.038.841.926,00**	**9.410.725.408,00**	**7.655.642.458,00**	**-1.383.199.468,00**							**2.903.000.000,00**	

BAB. IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DAERAH

IV.1. Kaidah Pelaksana Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)

Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1. Sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
2. Sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) SKPD setiap tahun
3. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja SKPD dalam 1 (satu) tahun

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota melalui Musyawarah Rencana Kerja Perubahan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2024. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif atau reses.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang dilayani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni, pembangunan dan rehab jalan setapak/ jalan lingkungan, pembangunan dan rehab drainase, pembangunan talud, plat duiker, pembangunan dan pemeliharaan taman, sehingga dalam setiap kesempatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan selalu menyangkut atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi usulan atau aspirasi

atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan yang nantinya harus dialokasikan dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan.

IV.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan mengoptimalisasikan pemanfaatkan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengikuti dinamika zaman dan tantangan untuk mewujudkan penataan Kota Pangklapinang yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi harus disampaikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan yang meliputi detail/rinci Perumahan Layak Huni, Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh, Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi serta penetapan kelembagaan dan koordinasi yang lebih efektif diantara instansi guna mendukung perencanaan dan penentuan kebijakan pembiayaan serta untuk menentukan arah kebijakan dan strategi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dan strategis, serta berkelanjutan.

BAB. V
PENUTUP

V.1. Uraian Penutup

Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen yang berisi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Dinas dalam kurun waktu satu tahun. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk memberi gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan terhadap rencana strategis Dinas dan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah agar kegiatan dapat berjalan secara baik dan terarah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi keuangan, hasil dan juga manfaatnya bagi masyarakat.

Selain dengan melakukan inventarisasi/pendataan berbagai data dan informasi yang relevan dalam rangka menunjang kelayakan berbagai program kerja dan kegiatan yang direncanakan, Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang juga merupakan implementasi dan regulasi serta kerangka kebijakan yang disusun untuk 1 (satu) tahun untuk rencana dinas.

Dari Uraian yang kami sajiakan diatas, saat ini kami menyajikan Renja Perubahan Tahun 2025 berdasarkan program-program Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman yang mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengelola Keuangan Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini, dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan dinas dalam rangka mendukung tujuan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang berdasarkan prinsip efisiensi dan efektif menuju terwujudnya visi dan misi kota Pangkalpinangg tahun 2024-2026.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita yang merupakan misi Presiden terpilih ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga berimbas kepada percepatan penyusunan perubahan Renja Tahun 2025 yang dalam hal ini salah satu Asta Cita yang di ampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang yaitu Asta Cita yang ke empat yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas dengan Program Prioritas ke delapan yaitu Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.

Terkait hal tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dalam upaya memenuhi pencapaian target dan sasaran kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, sekaligus dalam rangka mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang telah menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sesuai yang diamanatkan dengan berpedoman pada pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Kota Pangkalpinang umumnya.

Pangkalpinang, Mei 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG,

Dr.Hj. ETI FAHRIATY, S.Pd.I,. M.Pd
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 19650724 198703 2 002

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini telah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang beserta Tim pada tanggal …… Mei 2025, untuk kesesuaian antara program dan kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dengan program dan kegiatan yang ada di Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini disahkan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang.

Disahkan di Pangkalpinang
Pada tanggal, Mei 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG,

Dr.Hj. ETI FAHRIATY, S.Pd.I,. M.Pd
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 19650724 198703 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Lembar Pengesahan iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang 25

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 32

BAB V Penutup 42

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL / GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja	3
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubhan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang yang mencacu pada peruaturan perundang undangan yang berlaku	13
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang	21
Tabel T-C.31	Reviu terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ……..	26
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 …..	31
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ..	42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) untuk penyesuaian perencanaan tahunan. Disamping Undang-undang di atas perubahan Renja juga di dasarkan adanya perubahan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2025 ini ada sejumlah aturan yang membuat perubahan besar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sebabkan adanya perubahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain:

a. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;.
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025;
e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Adanya kebijakan di atas membuat seluruh daerah termasuk Pemerintah Kota Pangkal Pinang harus melakukan efisiensi dengan

melakukan pengurangan, penyesuaian dan perubahan pada belanja yang tidak prioritas dan belanja yang hanya bersifat pendukung, termasuk perlunya dukungan penganggaran untuk pelaksanaan Pilkada Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 yang akan datang. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita yang merupakan misi Presiden terpilih ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga berimbas kepada percepatan penyusunan perubahan Renja Tahun 2025 yang dalam hal ini salah satu Asta Cita yang di ampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang yaitu Asta Cita yang ke empat yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas dengan Program Prioritas ke delapan yaitu Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan perubahan untuk menyesuaikan program kerja dan target yang ada dalam suatu organisasi dalam tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan tujuan, sasaran dan program prioritas Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang

Tahun 2024-2026 sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025.

2. Perubahan RENJA merupakan acuan OPD untuk menyesuaikan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2025.
3. Perubahan RENJA PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan RENJA PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Penentuan/penetapan target indikator kinerja program/kegiatan/ subkegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada realisasi/capaian yang telah diperoleh tahun sebelumnya atau mengacu pada hasil pengendalian dan evaluasi tahun berjalan (sampai dengan

triwulan I tahun 2025). Jika realisasi/ capaian indikator kinerja tahun 2024 atau tahun berjalan 2025 telah melampaui/melebihi target pada Renstra atau Renja tahun 2025, maka target indikator kinerja pada Perubahan Renja Tahun 2025 dapat disesuaikan.

2. Program dalam Perubahan RENJA 2025 harus berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2020-2024 dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2020-2024, Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.
3. Program dan kegiatan dalam RENJA OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum MUSRENBANG.

Program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA

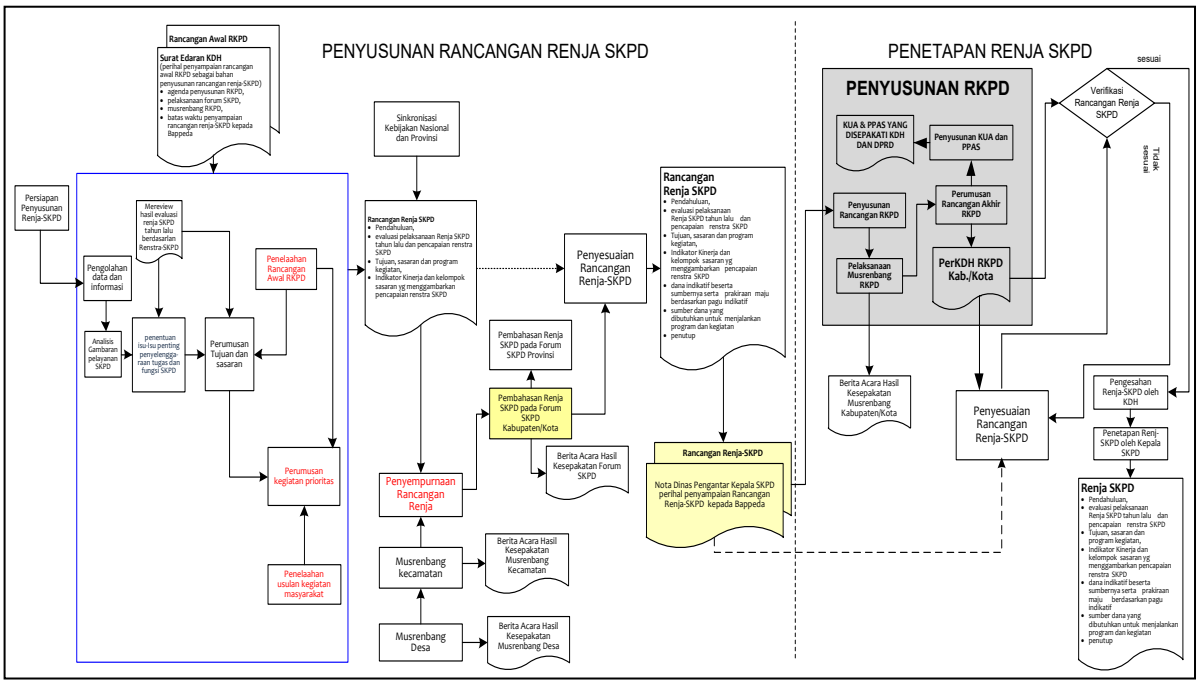

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2024, adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Kota Pangkalpinang (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 03)
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50);

17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 No. 277).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang dan hubungan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya.

Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rencana kerja serta pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang pada tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang tahun 2025 Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, diberi wewenang untuk menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam **Urusan Kearsipan** dan **Urusan Perpustakaan.** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Pada Tahun 2025 untuk urusan Kearsipan ada 2 (dua) program dengan 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, sedangkan untuk urusan Perpustakaan ada 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang terurai dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Pangkalpinang, yaitu:

1. Program Pengelolaan arsip, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan:
    a. Pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 2 sub kegiatan yaitu:
        1) Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis, sub kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk layanan pembenahan arsip yang dilakukan secara manual atau terjun langsung ke lapangan guna mendata dan menata arsip inaktif yang belum dipilah secara benar mulai dari mengambil /menerima arsip-arsip yang masih kacau dari Organisasi

Perangkat Daerah kemudian dipilah dan dipisahkan antara arsip dengan non arsip, kemudian dikelompokkan berdasarkan masing–masing kode klasifikasi kearsipan (mulai dari kode 000–umum sampai dengan kode 900–keuangan), selanjutnya dimasukkan ke dalam map/kertas pembungkus dan dicatat dalam daftar arsip sementara untuk kemudian digabungkan dengan folder yang berisikan arsip yang hampir sama isi informasinya ke dalam boks arsip yang telah diberi nomor urut dan label klasifikasi. Boks-boks arsip ini kemudian akan disimpan dan ditata dengan rapi sesuai kategori dan urutannya pada rak arsip maupun *roll o'pack* serta diberi kapur barus untuk menghindarkannya dari faktor perusak arsip seperti rayap dan kutu buku (*silverfish*). Untuk realisasi anggaran kegiatan ini sampai Triwulan I sebesar Rp. Rp 4.378.616,00 atau mencapai 7,55% dari total pagu Rp. Rp 57.974.596,00. Hasil/output dari kegiatan ini adalah :

1. Terpilah dan terdatanya arsip daerah yang kacau.
2. Terkelolanya arsip dinamis dan arsip statis di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Terdata dan tertatanya arsip inaktif di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
4. Tersedianya daftar arsip.
5. Tersedianya arsip foto berupa foto dokumentasi kegiatan apabila kegiatan ini di laksanakan.

2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan audit kearsipan baik eksternal maupun internal oleh Tim Pengawas Kearsipan secara efektif dan efisien dengan tujuan terwujudnya Laporan Pengawasan Kearsipan baik Eksternal maupun Internal secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk realisasi anggaran kegiatan ini sampai Triwulan I sebesar Rp. 24.683.080,00 atau mencapai 43,58% dari total pagu Rp.56.543.392,00

b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi 1 sub kegiatan yaitu Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, sub

kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk upaya untuk mendapatkan atau menambah khazanah atau koleksi arsip yang sebelumnya dimiliki oleh pencipta arsip (creating agency) selaku 'donor arsip' kepada pihak yang bermaksud menambah khazanah arsip selaku pihak lain yang menerima donor. Sampai triwulan 1 realisasi anggaran sub kegiatan ini masih Rp. 0,00 karena sub kegiatan ini dilakukan pada Semester I oleh Bidang Pengelolaan Kearsipan.

c. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota yang meliputi 2 sub kegiatan yaitu:
   1) Penyediaan Informasi,Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
   2) Pemberdayaan Kapasitas Unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi bagi masyarakat terkait arsip dan menciptakan arsiparis dan/atau pengelola arsip yang ada di unit-unit kearsipan Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditunjuk untuk mendapat bimbingan tentang pengelolaan arsip dinamis (arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip terjaga) secara baik dan benar berdasarkan kaidah dan peraturan kearsipan yang berlaku.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kearsipan khususnya pengelola arsip dan arsiparis tentang bagaimana mengelola arsip dinamis (arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip terjaga) serta menyeamakan persepsi tentang bagaimana mengelola kearsipan di unit pencipta arsip (OPD) yang telah dipilih di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
2. Memberikan materi tentang kearsipan, yang berisi bagaimana cara pengelolaan arsip dinamis, arsip vital, arsip terjaga dan arsip statis yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku, serta memberikan dasar hukum, tanggungjawab, fungsi dan tugas pokok sebagai pengelolaan kearsipan.
3. Pembinaan secara langsung dengan cara praktek langsung pengelolaan arsip dinamis di tempat, proses dan penggunaan komponen kearsipan serta tata

cara pengolahan dan penyimpanan arsip yang memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai standar kearsipan nasional.

4. Melaksanakan konsultasi dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh pengelola arsip di Unit Pencipta Arsip, serta memberikan solusi secara bersama.
5. Menyediakan sarana informasi terkait kearsipan melalui aplikasi srikandi dan SIKN

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 0,00 dari anggaran sebesar Rp. 158.085.000

2. Program pembinaan Perpustakaan, dengan 2 (dua) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota, yang menaungi 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
      1) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), bentuk dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan pada perpustakaan sekolah-sekolah sesuai standar yang telah ditetapkan. Anggaran Sub kegiatan ini sudah terealisasi sebesar Rp.5.378.616,00 atau 5,52% dengan jumlah pagu sebesar Rp.97.381.696,00.
      2) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Bentuk dari sub kegiatan ini adalah melakukan pengembangan layanan perpustakaan. Perpustakaan Kota Pangkalpinang adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang dengan segala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)nya, berusaha keras secara bertahap menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, rekreasi serta pelestarian khasanah budaya bangsa merupakan wadah bagi pelajar/mahasiswa maupun masyarakat yang memerlukannya. Melalui kegiatan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan pelayanan perpustakaan, sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku, membuat kartu anggota, perawatan bahan bacaan dan statistik. Disamping itu Dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Pangkalpinang melakukan layanan perpustakaan kepada masyarakat dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling yang

merupakan sarana sekaligus media untuk mendekatkan perpustakaan ke masyarakat. Perpustakaan keliling ini juga merupakan sarana untuk mengembangkan minat dan budaya baca masyarakat. Sasaran kegiatan mobil perpustakaan keliling ini adalah kunjungan masyarakat ke sekolah-sekolah, kampus, taman pendidikan masyarakat, Lembaga Permasyarakatan, pusat keramaian. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan memperluas wawasan masyarakat Kota Pangkalpinang.

3) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Bentuk kegiatan pemeliharaan berupa perbaikan buku rusak dan penyiangan buku–buku yang rusak. Sedangkan pengolahan bahan pustaka berupa melaksanakan inventarisasi buku - buku, melaksanakan klasifikasi buku berdasarkan subyek dengan klas 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 dan 900. Katalogisasi berdasarkan AACR2 dengan menentukan tajuk entri utama terlebih dahulu. Kemudian memberi kelengkapan buku seperti kantong buku, kartu buku, *data due* dan label bercode. Hal ini diharapkan agar pemustaka dapat menemukan bahan pustaka secara cepat dan mudah. Selain itu juga untuk menata dan memelihara bahan pustaka dari serangga atau karena cuaca (kelembaban) sehingga kondisi dapat lebih berdaya guna dengan waktu yang lama.

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatannya yaitu Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang di danai oleh dana DAK sebesar Rp. 554.000.000,00. Bentuk sub kegiatan ini adalah pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan dengan membentuk kehidupan sosial yang lebih berkualitas. Sebab, pada masyarakat inklusif, adanya kerja sama dan kolaborasi menjadi nilai yang didorong. Banyak kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini di antaranya kegiatan Gerakan pembudayaan membaca yang meliputi: Bimtek membaca nyaring untuk guru, pustakawan, pengiat literasi, orang tua, Lomba bertutur tingkat SD,

Bimtek literasi informasi untuk pustakawan, guru, dan pengiat literasi, Kegiatan Pengembangan konten literasi berbasis kearifan lokal yang meliputi Bimtek kepenulisan berbasis konten budaya lokal, Lomba video konten literasi Kegiatan Pekan literasi daerah, yang meliputi Lomba perpustakaan desa terbaik, Festival lietrasi { pameran produk literasi, gelar wicara literasi, penampilan karya literasi}, Kegiatan Pendataan perpustakaan yang meliputi Pendataan Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Kelurahan.

Realisasi kinerja yang telah di capai dalam Perubahan Renja ini dapat di lihat pada Laporan realisasi Renja Triwulan 1 pada tabel berikut :

Tabel 2.1 (T.C 29)
Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 DAN capaian renstra dinas perpustakaan dan kearsipan kota pangkalpinang tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	022301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	-	5.106.005.374		1.286.917.598		0		0		0	0	1.286.917.598		25,20	BIDANG SEKRETARIAT
				Indeks Kepuasaan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90		90								90		100		BIDANG SEKRETARIAT
2		022301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4.273.063.422	100	1.233.752.822		0		0		0	100	1.233.752.822	100	28,87	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
3		022301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	35	4.273.063.422	35	1.233.752.822							35	1.233.752.822	100	28,87	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
4		022301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	205.024.100	100	0		0		0		0	100	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
5		022301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5.693.600	1								1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
7		022301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2.080.000	1								1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
8		022301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	33.089.000	1								1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
9		022301206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	14.161.500	1								1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
10		022301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	10	150.000.000	10								10	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
13		022301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	479.449.460	100	48.786.160		0		0		0	100	48.786.160	100	10,18	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN

14		022301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	192.000.000	4								4	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
15		022301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	37.750.000	4								4	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
16		022301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	249.699.460	4	48.786.160							4	48.786.160	100	19,54	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
17		022301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	148.468.392	100	4.378.616		0		0		0	100	4.378.616	100	2,95	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
18		022301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	61.496.696	1								1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
19		022301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	8	65.700.000	8								8	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
20		022301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	21.271.696	1	4.378.616							1	4.378.616	100	20,58	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				**100,000**	**25,20**	
												PREDIKAT KINERJA						
21	-	**022302**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)**	**3**	**863.623.568**	**3**	**37.778.928**		**0**		**0**		**0**	**3**	**37.778.928**	**100**	**4,37**	**BIDANG PERPUSTAKAAN**
				Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya (Dengan Satuan:%)	**6**		**6**								**6**		**100**		**BIDANG PERPUSTAKAAN**
22		022302201	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Dengan Satuan:Perpustakaan)	25	356.150.568	25	37.778.928		0		0		0	25	37.778.928	100	10,61	SUB KORDINATOR DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
23		022302201004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Dengan Satuan:Perpustakaan)	60	97.381.696	15	5.378.616							15	5.378.616	25	5,52	SUB KORDINATOR DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Dengan Satuan:layanan)	4	174.497.176	1	27.521.696							1	27.521.696	25	15,77	

24		022302201006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	2	0													SUB KORDINATOR DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
26		022302201009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Dengan Satuan:Eksemplar)	2.000	84.271.696	50	4.878.616							50	4.878.616	3	5,79	SUB KORDINATOR DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
27		022302202	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase perpustakaan yang berbas Inklusi Sosial (Dengan Satuan:%)	29	507.473.000	5	0		0		0		0	5	0	17	0,00	SUB KORDINATOR DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
28		022302202004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Perpustakaan)	2	507.473.000	2								2	0	100	0,00	SUB KORDINATOR DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**4,37**	
												PREDIKAT KINERJA							
29	-	**022402**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah yangmenerapkan Pengelolaan arsip secara baku (Dengan Satuan:%)**	**93**	**329.327.988**	**15**	**14.635.848**		**0**		**0**		**0**	**15**	**14.635.848**	**16**	**4,44**	**BIDANG PENGELOLAAN ARSIP**
				Persentase Arsiparis yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	**53**		15								**15**		**28**		**BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN**
				Persentase OPD yang memperoleh nilai pengawasan arsip "baik (Dengan Satuan:%)	**100**		15								**15**		**15**		**BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN**
30		022402201	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	berkas arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:berkas)	2.000	137.217.988	30	14.635.848		0		0		0	30	14.635.848	2	10,67	SUB KORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
32		022402201002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Dengan Satuan:Berkas)	1.500	57.974.596	30	4.378.616							30	4.378.616	2	7,55	SUB KORDINATOR LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS
33		022402201003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	4	79.243.392	1	10.257.232							1	10.257.232	25	12,94	SUB KORDINATOR LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS
34		022402202	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	objek Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:objek)	4	34.025.000	4	0		0		0		0	4	0	100	0,00	SUB KOORDINATOR AKUISISI, PENGELOLAAN DAN PRESERVASI ARSIP STATIS
35		022402202002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Dengan Satuan:Arsip)	52	34.025.000	5								5	0	10	0,00	SUB KOORDINATOR AKUISISI, PENGELOLAAN DAN PRESERVASI ARSIP STATIS
30			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:perangkat daerah)	34	158.085.000	5	0		0		0		0	5	0	15	0,00	SUB KORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

31			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Dengan Satuan:pengguna)	30	54.000.000	2								2	0	7	0,00	SUB KORDINATOR LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS
32			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	104.085.000	1								1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**19,810**	**4,44**	
PREDIKAT KINERJA																			
36	-	**022403**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)**	**80**	**51.472.000**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**13**	**0,00**	**BIDANG PENGELOLAAN ARSIP**
37		022403201	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan did lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun (Dengan Satuan:berkas)	400	1.472.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	SUB KORDINATOR LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS
38		022403201001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Dengan Satuan:Arsip)	600	1.472.000									0	0	0	0,00	SUB KORDINATOR LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS
39		022403205	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	jumlah objek Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang (Dengan Satuan:objek)	4	50.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0,00	SUB KORDINATOR LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS
40		022403205001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Dengan Satuan:Arsip)	25	50.000.000									0	0	0	0,00	SUB KORDINATOR LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**12,500**	**0,00**	
PREDIKAT KINERJA																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	**58,078**	**8,51**	
PREDIKAT KINERJA																			

Sementara itu apabila kita telaah lebih jauh Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional RI 2025-2029 berfokus pada tiga program prioritas, yaitu:

1. penguatan budaya membaca dan literasi;
   Perpusnas akan terus mendorong peningkatan literasi melalui berbagai program, termasuk pengembangan koleksi, penyediaan ruang baca yang nyaman, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem literasi yang kuat.
2. pengarusutamaan naskah Nusantara;
   Perpusnas akan fokus pada pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno Nusantara, baik melalui digitalisasi, publikasi, maupun penyediaan akses bagi peneliti dan masyarakat
3. standardisasi dan akreditasi perpustakaan.
   Perpusnas akan terus mengembangkan standar dan sistem akreditasi perpustakaan untuk memastikan kualitas pelayanan dan pengelolaan perpustakaan di seluruh Indonesia

Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dan peranannya dalam pembangunan literasi di Indonesia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, dan menyelenggarakan serta mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Sementara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara/ pemerintahan daerah, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip

sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang setingkat Eselon II yang memiliki wewenang penyelenggaraan sebagian urusan wajib pemerintahan daerah dengan tugas pokok dan fungsi dititikberatkan pada urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kedua urusan wajib pemerintahan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang melaksanakan program kegiatan yang relevan serta bersinergi dengan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD maupun RPD Kota Pangkalpinang serta tidak terpisahkan dan atau menyimpang dari tujuan dan sasaran dalam memberikan pelayanan aparatur kepada pemerintah itu sendiri secara kelembagaan dan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai stakeholdernya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pembagian urusan bidang perpustakaan dalam Pemerintah Daerah yaitu Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup;

- Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara jumlah perpustakaan di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2024 bertambah menjadi sebanyak 122 perpustakaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 15 Ayat (4) huruf q dan r, disebutkan bahwa urusan Perpustakaan dan Kearsipan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan yang harus masuk dalam program prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026, kedua urusan ini sudah masuk baik dalam perencanaan maupun pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan dalam RKPD dan APBD Kota Pangkalpinang tahun berkenaan program dan kegiatan urusan Kearsipan dan Perpustakaan secara rutin dianggarkan dan dilaksanakan. Atas perencanaan dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku harus dilakukan analisis terhadap pencapaian

kinerja hasil dan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada tolak ukur/indikator kinerja kuncinya.

Sebagai salah satu lembaga teknis pusat layanan informasi serta belajar masyarakat di Kota Pangkalpinang, basis layanannya lebih dititikberatkan pada layanan publik yang ditujukan untuk menyediakan layanan informasi Kearsipan dan Kepustakaan yang terbuka dan representatif bagi masyarakat Kota Pangkalpinang karena perpustakaan merupakan wahana belajar dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat yang berilmu, kreatif dan mandiri sementara arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 mempunyai 1 (satu) Program urusan Perpustakaan, 2 (dua) program urusan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. **Program pengelolaan arsip**, yang meliputi kegiatan–kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah:
      1). Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
      2). Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis;
      3). Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota.
   b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah:
      1). Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
   c. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota.
      1). Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
      2). Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
2. **Program perlindungan dan penyelamatan arsip**, yang meliputi kegiatannya adalah :
   a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun dengan sub kegiatan yaitu

Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun.

b. Pencarian arsip statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang, dengan sub kegiatan yaitu Penilaian dan penetapan arsip statis yang dinyatakan hilang.

3. **Program pembinaan perpustakaan**, yang meliputi kegiatannya yaitu :

a. Pengelolaan perpustakaan daerah tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu:

1). Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

2). Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

3). Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota;

4). Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka.

Sedangkan kegiatan layanan kepada para pemangku kepentingan khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang berupa :

1) layanan pengolahan dan penyajian arsip inaktif,
2) layanan peminjaman bahan bacaan,
3) layanan membaca di tempat
4) layanan bahan referensi baik arsip statis maupun bahan pustaka,
5) layanan bahan rujukan,
6) layanan sirkulasi,
7) layanan perpustakaan keliling, dan
8) layanan keanggotaan perpustakaan.

Memenuhi ketentuan Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka berikut ini kami sajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang yang digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang
Tahun 2019-2023

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Persentase kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan.	---	---	100	100				100	100				
2.	Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola secara baku	---	---	4,9	5,0				6,33	8,00				
3.	Tingkat pertumbuhan pengunjung perpustakaan	---	---	0,59	0,62				0,46	-0,70				
4.	Rasio perbandingan judul buku terhadap koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	---	---	1 : 2	1 : 2				1,06 : 2	1,06 : 2				
5.	Persentase pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan yang memiliki kompetensi	---	---	16	16				30	30				
6.	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	---	---			5,2	5,3	5,4			5,0	8,0	6,0	
7.	Jumlah kunjungan pemustaka	---	---			50.000	52.500	55.000			19.573	148.460	249.432	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target	Realisasi
				Tahun 2024	Tahun 2024
1	2	3	4	7	8
1.	Persentase pertumbuhan kunjungan masyarakat ke perpustakaan pertahun	---	---	10	45,11
2..	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional	---	---	55	99,16

Dari uraian indikator kinerja dalam kolom indikator pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja tersebut merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Kemudian indikator kinerja tersebut dibuat berdasarkan pencapaian sasaran kinerja dari setiap indikator sasaran layanan bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang bisa diukur seperti persentase arsip, tingkat pertumbuhan pengunjung, maupun rasio perbandingan, dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang sebagai lembaga teknis penyedia layanan publik bidang kearsipan dan perpustakaan.

Ketujuh indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 ini merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik untuk urusan Kearsipan maupun untuk urusan Perpustakaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun;
2) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;
3) Rasio perpustakaan persatuan penduduk;
4) Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun;
5) Jumlah koleksi judul buku perpustakaan;
6) Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat;

7) Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku;

Berdasarkan realisasi pencapaian indikator sasaran diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 capaian realisasi mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Bidang-Bidang per urusan dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang.

Identifikasi permasalahan pada perangkat daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dari bab II yang telah di paparkan terdahulu terdapat capaian kinerja perangkat daerah yang dapat kita telaah dari capaian kinerja tersebut, permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan terkendalanya dalam mencapai target kinerja yang telah di tetapkan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu dibidang kearsipan maupun bidang perpustakaan baik dari kualitas maupun kuantitas.
b. Belum adanya sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan untuk pengunjung berkebutuhan khusus
c. Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar karena belum adanya Depo Arsip

d. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan
e. Masih kurangnya koleksi arsip personal file yang bisa dijadikan bahan referensi dan/atau bahan pendidikan
f. Rasio perpustakaan persatuan penduduk masih kurang.

Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang sebagai berikut :diambil dari permasalhan, di kerucutkan lagi

1. Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu dibidang kearsipan maupun bidang perpustakaan baik dari kualitas maupun kuantitas.
2. Belum adanya sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan untuk pengunjung berkebutuhan khusus.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang kearsipan serta ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar karena belum adanya Depo Arsip.
4. Masih kurangnya koleksi arsip personal file yang bisa dijadikan bahan referensi dan/atau bahan pendidikan.
5. Rasio perpustakaan persatuan penduduk masih kurang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan perubahan Rencana Kerja harus mengacu pada Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah. Hal ini penting untuk menjaga kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang harus disusun. Kemudian perlu dilakukan sinkronisasi dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang, untuk dilakukan review agar diperoleh kesesuaian atau relevansinya.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja Kota Pangkalpinang
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025 (N)					Catatan Penting	Hasil analisis kebutuhan		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					**Rp 6.350.428.930**	**APBD**				**Rp 6.323.325.375**
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					**Rp 5.969.628.942**	**APBD**				**Rp 6.039.446.287**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**OPD**	**75,5**	**Nilai**	**Rp 5.106.005.374**	**APBD**		**75,5**	**Nilai**	**Rp 5.237.499.719**
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	**OPD**	**85**	**persen**				**85**	**persen**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**OPD**	**100**	**%**	**Rp -**	**APBD**		**100**	**%**	**Rp -**
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	3	dokumen	Rp -	**APBD**		3	dokumen	Rp -
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	2	laporan	Rp -	**APBD**		2	laporan	Rp -
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP**	**OPD**	**100**	**%**	**Rp 4.273.063.422**	**APBD**		**100**	**%**	**Rp 4.440.381.767**
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	35	orang/bulan	Rp 4.273.063.422	APBD		35	orang/bulan	Rp 4.440.381.767
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	3	laporan	Rp -	APBD		3	laporan	Rp -

03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	OPD	3	laporan	Rp -	APBD		3	laporan	Rp -
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**	OPD	**100**	**%**	**Rp -**			**100**	**%**	**Rp -**
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	OPD	1	paket	Rp -	APBD		1	paket	Rp -
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	OPD	4	orang	Rp -	APBD		4	orang	Rp -
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**OPD**	**100**	**%**	**Rp 205.024.100**			**100**	**%**	**Rp 170.982.100**
01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	OPD	1	paket	Rp 5.693.600	APBD		1	paket	2.853.100,00
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	OPD	1	paket	Rp -	APBD		1	paket	Rp -
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	OPD	2	paket	Rp 2.080.000	APBD		2	paket	2.080.000,00
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	OPD	1	paket	Rp 33.089.000	APBD		1	paket	26.964.000,00
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	OPD	1	paket	Rp 14.161.500	APBD		1	paket	9.085.000,00
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	8	laporan	Rp 150.000.000	APBD		8	laporan	130.000.000,00
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah**	**OPD**	**100**	**%**	**Rp -**	APBD		**100**	**%**	**Rp -**
01	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	OPD	0	unit	Rp -	APBD		1	unit	Rp -
02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	OPD	1	unit	Rp -	APBD		1	unit	Rp -
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**OPD**	**100**	**%**	**Rp 479.449.460**	APBD		**100**	**%**	**Rp 477.667.460**
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	OPD	4	laporan	Rp 192.000.000			4	laporan	192.000.000,00

02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	OPD	4	laporan	Rp	37.750.000			4	laporan		37.750.000,00
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OPD	4	laporan	Rp	249.699.460	APBD		4	laporan		247.917.460,00
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik**	**OPD**	**100**	**%**	**Rp**	**148.468.392**	APBD		**100**	**%**	**Rp**	**148.468.392**
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	OPD	1	unit	Rp	61.496.696	APBD		1	unit		61.496.696,00
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	OPD	8	unit	Rp	65.700.000	APBD		8	unit		65.700.000,00
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	OPD	1	unit	Rp	21.271.696	APBD		1	unit		21.271.696,00
II	**Program pembinaan perpustakaan**	**Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustkaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya**	**OPD**	**5**	**%**	**Rp**	**863.623.568**	**APBD**		**5**	**%**	**Rp**	**801.946.568**
		Persentase perpustakaan sekolah yang mengikuti dan memahami tentang perpustakaan yang memenuhi standar pelayanan		**2**	**%**			**APBD**		**2**	**%**		
		Persentase pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat		**3**	**%**			**APBD**		**3**	**%**		
1	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)**	**OPD**	**21**	**Perpustakaan**	**Rp**	**356.150.568**	**APBD**		**21**	**Perpustakaan**	**Rp**	**294.473.568**
01	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	OPD	50	perpustakaan	Rp	97.381.696	APBD		50	perpustakaan		97.381.696,00
02	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	OPD	2	Orang	Rp -		APBD		2	Orang	Rp -	

03	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	OPD	4	layanan	Rp	174.497.176	APBD		4	layanan		172.820.176,00
04	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	OPD	1650	eksemplar	Rp	84.271.696	APBD		1650	eksemplar		24.271.696,00
2	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase perpustakaan yang berbasis inklusi sosial**	**OPD**	**29**	**%**	**Rp**	**507.473.000**			**29**	**%**	**Rp**	**507.473.000**
01	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	OPD	2	perpustakaan	Rp	507.473.000	APBD		2	perpustakaan		507.473.000,00
	URUSAN KEARSIPAN					**Rp**	**380.799.988**					**Rp**	**283.879.088**
III	**Program pengelolaan arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku**	**OPD**	**91**	**%**	**Rp**	**329.327.988**	**APBD**		**91**	**%**	**Rp**	**263.007.088**
		Persentase OPD yang memperoleh nilai pengawasan arsip"baik"	**OPD**	**100**	**%**			**APBD**		**100**	**%**		
		Persentase Arsiparis yang bersertifikat	**OPD**	**40**	**%**			**APBD**		**40**	**%**		
1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**berkas arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota**	**OPD**	**1500**	**berkas**	**Rp**	**171.242.988**	APBD		**1500**	**berkas**	**Rp**	**134.922.088**
		jumlah laporan audit kearsipan terhadap pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota	**OPD**	**4**	**laporan audit**	**Rp**	**137.217.988**	APBD		**4**	**laporan audit**	**Rp**	**120.752.088**
01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	OPD	1020	berkas		Rp -	APBD		1020	berkas		Rp -
02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	OPD	1500	berkas	Rp	57.974.596			1500	berkas		50.098.696,00
03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD	4	laporan	Rp	79.243.392	APBD		4	laporan		70.653.392,00
2	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**objek Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	OPD	**3**	**objek**	**Rp**	**34.025.000**	**APBD**		**3**	**objek**	**Rp**	**14.170.000**
01	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	OPD	50	arsip	Rp	34.025.000	APBD		50	arsip		14.170.000,00
3	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**OPD**	**34**	**Perangkat Daerah**	**Rp**	**158.085.000**	APBD		**34**	**Perangkat Daerah**	**Rp**	**128.085.000**

01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	OPD	20	pengguna	Rp	54.000.000			20	pengguna		54.000.000,00
02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota	OPD	1	laporan	Rp	104.085.000			1	laporan		74.085.000,00
IV	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan**	OPD	**80**	**%**	**Rp**	**51.472.000**	APBD		**80**	**%**	**Rp**	**20.872.000**
1	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**jumlah arsip yang dimusnahkan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	OPD	**300**	**berkas**	**Rp**	**1.472.000**			**300**	**berkas**	**Rp**	**1.472.000**
01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	OPD	500	arsip	Rp	1.472.000	APBD		500	arsip		1.472.000,00
2	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**jumlah objek Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	OPD	**3**	**objek**	**Rp**	**50.000.000**			**3**	**objek**	**Rp**	**19.400.000**
01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	OPD	20	arsip	Rp	50.000.000			20	arsip		19.400.000,00
						Rp	**6.350.428.930**					**Rp**	**6.323.325.375**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah sebagai pelaksana program, Perubahan Renja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Perubahan Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, diharapkan dana yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang dalam OPD, OPD dengan perangkat daerah lainnya, maupun OPD dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi,akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk jelasnya rencana kerja dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat kita lihat pada tabel TC 33 berikut:

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERUBAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025 SESUDAH	PAGU INDIKATIF (Rp) RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			**6.323.325.375,00**	**321.411.329,00**				**5.008.127.901,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.323.325.375,00**	**321.411.329,00**				**5.008.127.901,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**6.039.446.287,00**	**332.582.141,00**				**4.878.127.901,00**	
1,	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**90 - Nilai Nilai**	**5.237.499.719,00**	**-934.736.245,00**				**4.622.127.901,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu*	100 %	0,00	0,00				6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2.23.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP*	100 %	4.440.381.767,00	-75.570.579,00				3.907.173.233,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.440.381.767,00	-75.570.579,00	Kota Pangkal Pinang,	(PAD) DAU		3.901.173.233,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	3 Laporan	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*	100 %	0,00	-48.000.000,00				60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	-48.000.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000, 00	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000, 00	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	170.982.100,00	10.796.300,00				78.954.668, 00	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.853.100,00	-2.840.500,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,0 0	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.080.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		4.654.668,0 0	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN

	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.964.000,00	-9.066.700,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.085.000,00	-7.296.500,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	130.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah*	100 %	0,00	0,00				45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	477.667.460,00	-233.603.540,00				395.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	192.000.000,00	800.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	37.750.000,00	5.000.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	247.917.460,00	-239.403.540,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik*	100 %	148.468.392,00	27.013.392,00				130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	61.496.696,00	21.931.696,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	65.700.000,00	-16.190.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.271.696,00	21.271.696,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2,	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustkaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya**	**3 6 % %**	**801.946.568,00**	**106.000.000,00**				**256.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)*	23 Perpustakaan	294.473.568,00	198.756.568,00				236.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	60 Perpustakaan	97.381.696,00	97.381.696,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4 Layanan	172.820.176,00	137.103.176,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		154.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar	24.271.696,00	-35.728.304,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase perpustakaan yang berbasis inklusi sosial*	29 %	507.473.000,00	453.190.000,00				20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	507.473.000,00	453.190.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**283.879.088,00**	**-11.170.812,00**				**130.000.000,00**	
1,	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase OPD yang memperoleh nilai pengawasan arsip "baik" Persentase Arsiparis yang bersertifikat Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku**	**100 53 93 % % %**	**263.007.088,00**	**-123.277.900,00**				**120.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*berkas arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota*	2000 berkas	120.752.088,00	24.074.188,00				105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1360 Berkas	0,00	-25.175.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1500 Berkas	50.098.696,00	7.395.796,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	70.653.392,00	41.853.392,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*objek Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*	4 objek	14.170.000,00	-30.605.000,00				5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	52 Arsip	14.170.000,00	-30.605.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*	34 Perangkat Daerah	128.085.000,00	26.260.000,00				10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	30 Pengguna	54.000.000,00	-3.500.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									

			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	74.085.000,00	29.760.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2,	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan**	**80 %**	**20.872.000,00**	**-41.772.000,00**				**10.000.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*jumlah arsip yang dimusnahkan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun*	400 berkas	1.472.000,00	-300.000,00				5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	600 Arsip	1.472.000,00	-300.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	*jumlah objek Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang*	4 objek	19.400.000,00	-30.600.000,00				5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang									
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	25 Arsip	19.400.000,00	-30.600.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H				**6.323.325.375,00**	**196.363.127.421,82**				**5.008.127.901,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan, pengajuan usulan program, perumusan, penyusunan, verifikasi sampai dengan pengesahan dan penetapannya. Dalam proses ini terdapat banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki guna menuju kesempurnaan agar diperoleh kesesuaian dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya baik secara top down maupun bottom up.

Rumusan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan bagi Tim Forum Musrenbang dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dan menjadi pedoman unit kerja pelaksana lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja baik itu belanja operasi maupun belanja modal tahun anggaran 2025.

Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kami harapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pembangunan dan pemerintahan.

Pangkalpinang, 14 Mei 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG,

Dr. Hj. ETI FAHRIATY, S.Pd.I., M.Pd
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 19650724 198703 2 002

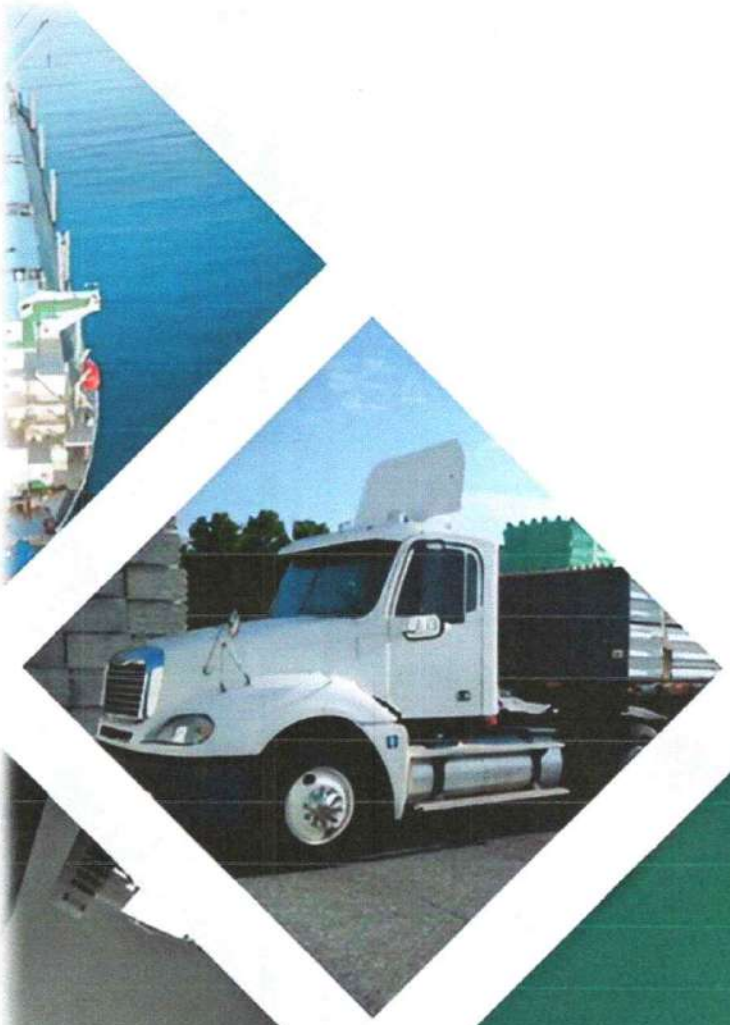
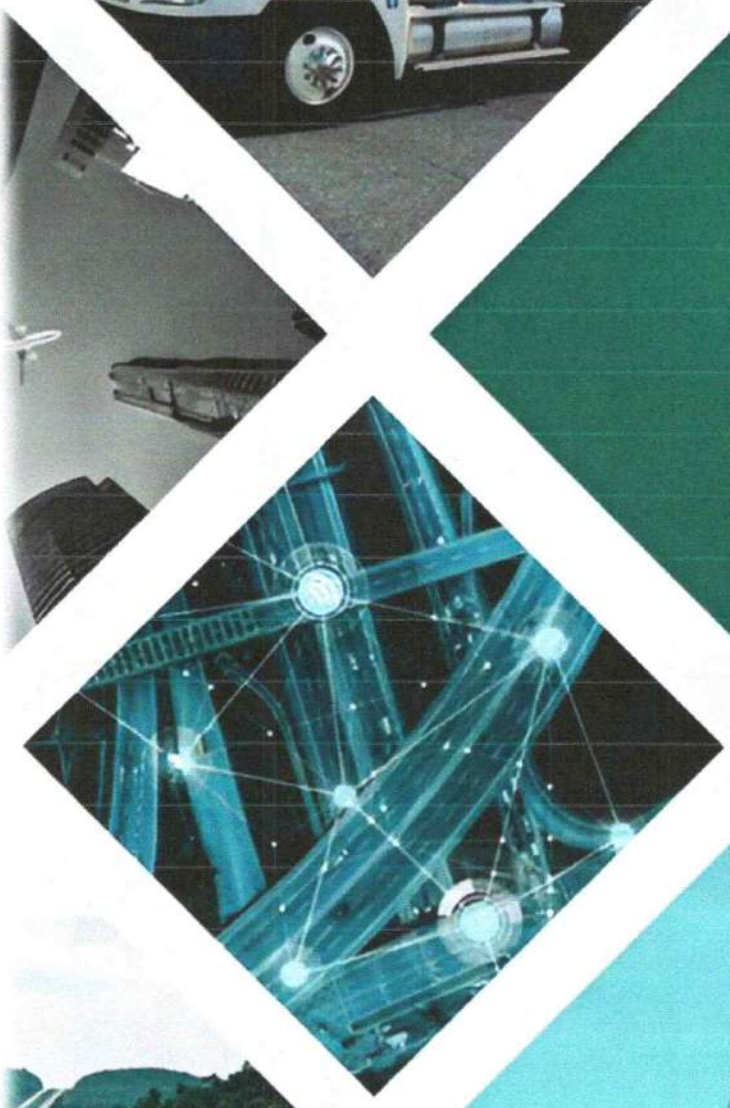

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	9
	1.1 Latar Belakang	9
	1.2 Landasan Hukum	11
	1.3 Maksud dan Tujuan	13
	1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2023	15
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD	15
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
	2.3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	31
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	31
	3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja	31
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	32
	4.1 Program dan Kegiatan	32
	4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan OPD	39
BAB V	PENUTUP	40

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat selesai disusun sesuai dengan yang diharapkan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Renja Perubahan ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkal Pinang.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Renja Perubahan Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Program Prioritas dan Sasaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, dimana Prioritas dan sasaran daerah tersebut mengacu pada prioritas dan sasaran yang terkandung dalam :

1. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026

Atas tersusunnya rencana kerja perubahan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkal Pinang, 28 Mei 2025
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pangkal Pinang,

Akhmad Subekti
Pembina Utama Muda
NIP 19660326 198603 1 004

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Pahlawan 12 Kel. Gajah Mada Kec. Rangkui Telp/Fax.(0717) 431265
Kota Pangkal Pinang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Kerja (RENJA);

b. bahwa RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tentang Rencana Kerja (Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025), dengan ketentuan umum, yaitu:

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

6. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

7. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

8. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

10. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu

program atau kegiatan.

11. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

12. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kedua : Sistematika penyusunan ***RENJA***, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu

Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan

Menjelaskan Rencana Kerja Berupa Program dan Kegiatan OPD berikut dengan Pendanaannya

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

Ketiga : Penjelasan lebih lanjut terlampir dalam keputusan ini.

Ditetapan : di Pangkal Pinang
Pada tanggal : 28 Mei 2025

Pangkal Pinang, Mei 2025
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pangkal Pinang,

Akhmad Subekti
Pembina Utama Muda
NIP 19660326 198603 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kota Pangkal Pinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkal Pinang yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis (RPD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkal Pinang sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan organisasi perangkat daerah, Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan Program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organsasi Perangkat Daerah.

Mengingat pentingnya dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025, RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

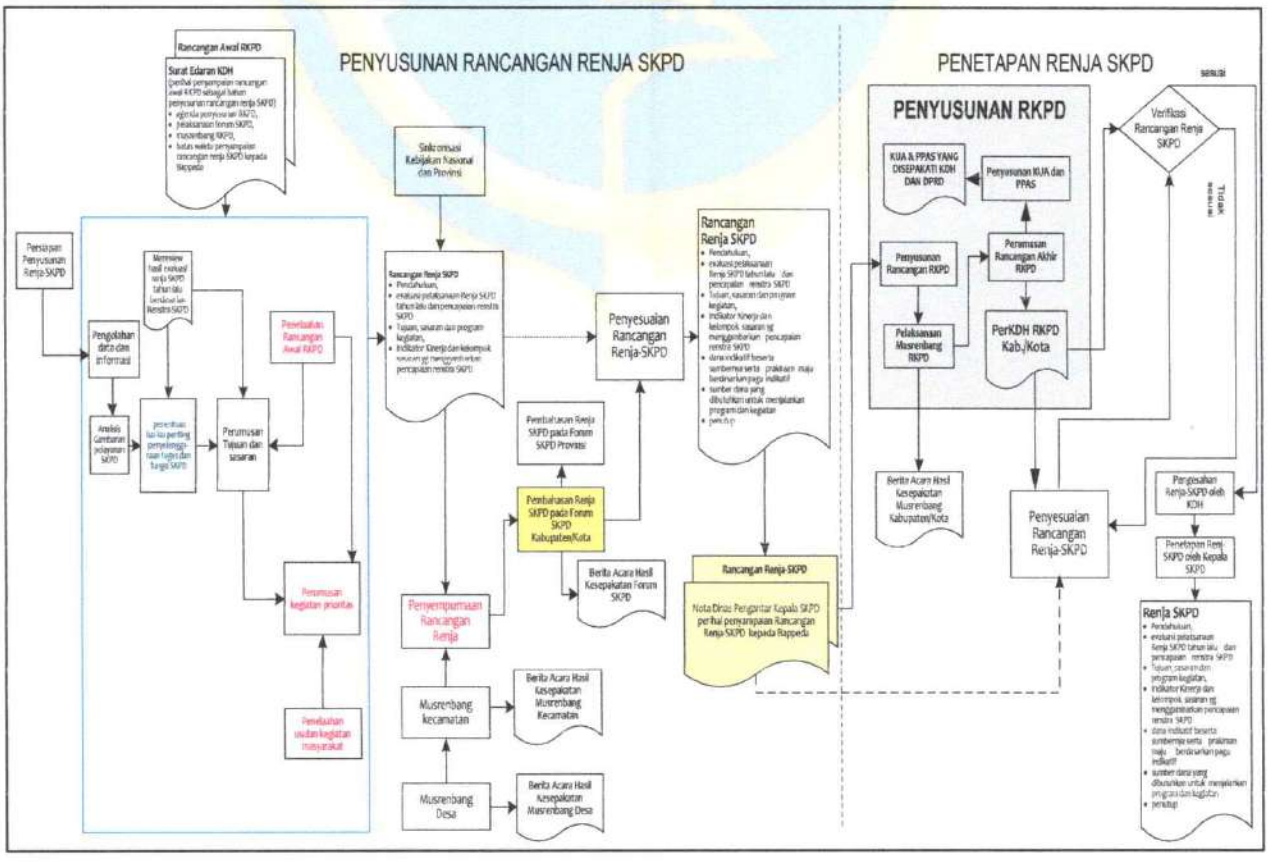

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Mentri Dalam Negri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);

18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025, acuan dalam penyusunan SAKIP, LPPD dan LKPJ, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang perhubungan, Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional, mewujudkan sinergitas dan keselaran antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang perhubungan, mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang perhubungan, memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam SAKIP, LPPD dan LKPJ memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Perencanaan kinerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU berisi :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Rencana Penyelenggaraan Tupoksi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN berisi :

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta mengiventarisasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disahkan.

Visi pembangunan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 merupakan visi Wali kota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah: **"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur).** Sedangkan Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: ***"UNGGUL"*** Adapun misi RPJMD Perubahan yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu misi ke-3 yaitu: **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.**

Tujuan	:	**Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah,**
Indikator Tujuan	:	**Indeks Reformasi Birokrasi**
Sasaran	:	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).**
Indikator Sasaran	:	**Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**

Misi merupakan turunan, penerjemahan atau perincian rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, upaya dengan pola yang dirumuskan menjadi misi–misi Dinas Perhubungan merupakan kepanjangan atau penjabaran dalam bentuk yang lebih operasional dari visi. Dari penetapan dan perumusan visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan profesional.
2. Mengembangkan kualitas sarana angkutan perhubungan yang efektif dan efesien.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan guna menunjang transportasi yang aman dan lancar.

Selama Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan-kegiatan OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja. Kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut merupakan kunci sukses keberhasilan dan kelancaran program/kegiatan. Hasil Renja Dishub Kota Pangkalinang Tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan Tahun 2023 melaksanakan 1 urusan, 2 (Dua) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Perhubungan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

		Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.2
Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023
Urusan Perhubungan

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	**Retribusi Jasa Umum**	**1.350.000.000**	**1.362.764.000**
	- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.050.000.000	1.071.023.000
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000	291.741.000
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**470.000.000**	**530.864.000**
	- Retribusi Terminal Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.000.000	73.815.000
	- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	400.000.000	457.049.000
3	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	**3.091.200**	**11.246.500**
	- Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.091.200	11.246.500
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.823.091.200**	**1.904.874.500**

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 adalah Sebagai Berikut :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	021501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	9.758.628.079	100	9.357.574.569	100	95,890	SEKRETARIS
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS
				Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS
2		021501201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	11.730.000	2	11.730.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
3		021501201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2.000.000	3	2.000.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
4		021501201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	9.730.000	5	9.730.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
5		021501202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3.610.868.835	3	3.453.879.294	100	95,652	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
6		021501202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	30	3.605.388.835	30	3.448.379.294	100	95,645	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
7		021501202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	3.500.000	1	3.500.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8		021501202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan Laporan)	2	2.000.000	2	2.000.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
9		021501204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan Laporan)	1	217.381.500	1	208.899.000	100	96,098	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
10		021501204001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan Dokumen)	1	217.381.500	1	208.899.000	100	96,098	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
11		021501205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan Laporan)	2	20.180.000	2	20.059.000	100	99,400	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
12		021501205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan Paket)	181	20.180.000	181	20.059.000	100	99,400	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13		021501206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah (Dengan Satuan Laporan)	5	279.257.400	6	278.856.860	100	99,857	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		021501206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Paket)	1	27.500.000	1	27.430.600	100	99,748	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		021501206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Paket)	1	10.917.400	1	10.917.400	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		021501206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Paket)	1	40.560.000	1	40.360.000	100	99,507	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		021501206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan Paket)	1	12.780.000	1	12.780.000	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		021501206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan Laporan)	35	187.500.000	35	187.368.860	100	99,930	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		021501207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan Laporan)	2	114.275.000	2	110.603.050	100	96,787	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		021501207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan Unit)	5	30.000.050	5	28.753.050	100	95,844	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21		021501207011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan Unit)	1	84.275.000	1	81.850.000	100	97,123	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		021501208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan Laporan)	3	4.946.933.648	3	4.731.820.266	100	95,652	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23		021501208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan Laporan)	3	4.200.000.000	3	3.996.233.158	100	95,148	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		021501208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Laporan)	10	28.700.000	10	28.700.000	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		021501208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan Laporan)	12	718.233.648	12	706.887.108	100	98,420	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		021501209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan Laporan)	1	557.981.696	2	541.727.099	100	97,087	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27		021501209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan Unit)	15	557.981.696	15	541.727.099	100	97,087	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**95,890**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
28	-	**021502**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**PERSENTASE TINGKAT KESELAMATAN LALULINTAS DAN LAYANAN ANGKUTAN JALAN (Dengan Satuan:Persen)**	**70**	**8.437.732.712**	**70**	**8.375.714.211**	**100**	**99,265**	**BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN**
				PERSENTASE PENGGUNA MODA TRANSPORTASI UMUM DI PERKOTAAN (Dengan Satuan:Persen)	**2,170**		**2,170**		**100**		**BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**
29		021502201	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Perhubungan yang Dilaksanakan (Dengan Satuan Laporan)	2	1.287.176.632	2	1.285.449.982	100	99,866	SEKSI LALU LINTAS
30		021502201002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Dokumen)	1	50.800.000	1	49.573.350	100	97,585	SEKSI LALU LINTAS
31		021502201003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Laporan)	4	1.236.376.632	4	1.235.876.632	100	99,960	SEKSI LALU LINTAS
32		021502202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota (Dengan Satuan Laporan)	3	5.374.339.388	3	5.326.689.891	100	99,113	SEKSI PRASARANA
33		021502202001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Dengan Satuan Unit)	10	378.600.000	10	378.221.113	100	99,900	SEKSI KESELAMATAN
34		021502202002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan Unit)	225	4.351.177.180	225	4.307.762.270	100	99,002	SEKSI PRASARANA

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
35		021502202004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Dengan Satuan Unit)	100	644.562.208	100	640.706.508	100	99,402	SEKSI PRASARANA
36		021502203	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Tipe C (Dengan Satuan Laporan)	2	237.196.960	5	236.215.930	100	99,586	SEKSI PENGEMBANGAN
37		021502203003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan (Dengan Satuan Unit)	2	12.000.000	2	11.018.970	100	91,825	SEKSI PENGEMBANGAN
38		021502203005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan Orang)	2	225.196.960	2	225.196.960	100	100	SEKSI PENGEMBANGAN
39		021502204	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Dengan Satuan Laporan)	1	961.829.456	1	956.821.260	100	99,479	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
40		021502204002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Laporan)	4	961.829.456	4	956.821.260	100	99,479	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
41		021502205	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dengan Satuan Laporan)	2	566.731.276	4	560.078.148	100	98,826	SEKSI PENGUJIAN SARANA
42		021502205003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Dengan Satuan Unit)	5.000	264.260.352	5.000	264.260.352	100	100	SEKSI PENGUJIAN SARANA
43		021502205007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Dengan Satuan Unit)	4	302.470.924	4	295.817.796	100	97,800	SEKSI PENGUJIAN SARANA
44		021502209	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Laporan)	1	10.459.000	1	10.459.000	100	100	SEKSI ANGKUTAN
45		021502209002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Laporan)	1	10.459.000	1	10.459.000	100	100	SEKSI ANGKUTAN
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	99,265	
				PREDIKAT KINERJA					ST	ST	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)					100,000	97,578	
				PREDIKAT KINERJA					ST	ST	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- SDM yang Memenuhi Syarat dan Anggaran yang Cukup							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Cuaca							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Program Tahun 2023 sudah Diselesaikan							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				- Akan Dilaksanakan di Tahun 2024							

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 29-02-2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PANGKALPINANG

Drs. UBAIDI
NIP 196412101992031006

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

GAMBARAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKAL PINANG

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Pangkal Pinang Dinas Perhubungan merupakan unsur Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan diwilayah kota pada sektor Perhubungan yang implementasinya dijabarkan sebagai unit yang melaksanakan dan menata, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pengamanan, pengawasan dan evaluasi terhadap semua aspek yang berkenaan dengan Perhubungan.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman dalam kaitannya dengan fungsi dan Tugas Dinas Perhubungan sebagai bagian dari penyelenggara tugas umum pemerintahan Kota Pangkal Pinang yang bertumbuh pesat, kebijakan dan program strategis diarahkan kepada hal – hal yang factual didalam kehidupan masyarakat, kita angkat menjadi perencanaan strategis dan merupakan prioritas dalam jangka pendek (tahunan).

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a. ***Efektivitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;***
b. ***Sarana dan Prasarana Jalan dan Penerangan Jalan Umum;***
c. ***Penataan Parkir Guna Peningkatan PAD;***
d. ***Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;***
e. ***Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;***

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
b. Sasaran dan Prioritas Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;

c. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Dinas Perhubungan. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*sustainable*);
5. Kesadaran akan interdepensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan sebagai sub ordinansi dari Organisasi Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan, pelaksanaan rekruitmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental serta latar belakang pendidikan yang memadai, yang ditunjang dengan mekanisme pendidikan dan pelatihan pegawai pada program Diklat Berjenjang maupun Diklat Fungsional Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator.

Beberapa indikator kinerja utama dinas perhubungan kota Pangkal Pinang sesuai dengan matrik di bawah ini :

MATRIK 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kinerja lalu lintas kota	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik			93%	95%	97%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan perhubungan	Meningkatnya rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,93	0,94	0,95		

MATRIK 2.2
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN DISHUB KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 2023 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran (sebelum perubahan)	
		2023	2024
1.	Pendapatan	1.820.000.000	1.500.000.000
2.	Belanja tidak langsung	3.709.047.273	4.079.162.132
3.	Belanja langsung	9.683.587.920	11.568.078.626

Pada tabel diatas terjadi penurunan target pendapatan pada tahun 2024, hal ini disebabkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, bahwa retribusi uji kendaraan bermotor dan retribusi terminal dihilangkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pembangunan suatu wilayah, juga sangat terkait dengan berbagai isu yang berkembang baik pada skala lokal maupun global. Isu-isu mengenai pembangunan berkelanjutan (subtainable development) dan khususnya transportasi berkelanjutan (subtainable transportation) telah menjadi isu global yang setiap negara dituntut menunjukkan tanggung jawabnya sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan lokal. Strategi pembangunan berkelanjutan muncul pada konferensi di Stockholm dimana 113 negara menekankan perlunya mulai membersihkan lingkungan secara global dikarenakan permasalahan polusi udara, polusi air, dan kontaminasi kimia tidak mengenal batas. Melalui Kyoto Protocol lebih dari 160 negara sepakat untuk mengurangi emisi gas buang rumah kaca. Masalah keberlanjutan pembangunan merupakan isu yang jelas berkaitan dengan masalah transportasi. Kebijakan yang diterapkan dalam mengelola sistem transportasi menjadi bagian sentral dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dampak lingkungan yang dirasakan akibat pengoperasian transportasi ini yang umumnya menjadi isu-isu yang berkepanjangan karena terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas manusia. Permasalahan mobilitas perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan degradasi lingkungan dari tahun ke tahun semakin komplek. Selain itu dominasi kendaraan pribadi yang masih sangat besar memberikan konsekuensi terhadap kebutuhan parkir di perkotaan yang makin besar sementara space / lahan parkir yang tersedia sangat terbatas, di samping juga dampak terhadap kepadatan lalu lintas di jalan. Kondisi kapasitas jalan yang relatif sama dengan jumlah pertambahan kendaraan yang demikian pesat mengakibatkan pergerakan kendaraan semakin sempit apalagi ditambah dengan aktivitas perparkiran di Tepi Jalan Umum / badan jalan maka tidak bisa dihindari terjadinya penurunan kinerja jalan di daerah perkotaan. Mencermati berbagai isu strategis yang berkembang baik secara global maupun lokal serta permasalahan transportasi yang ada di Kota Pangkal Pinang, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis transportasi Kota Pangkal Pinang adalah :" Masih Rendahnya Peran Angkutan Umum di Kota Pangkal Pinang dalam mendukung mobilitas perkotaan yang akan Berdampak pada Penurunan Kinerja Lalu Lintas, Kualitas Lingkungan dan Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan."

d. Lambatnya pertumbuhan jalan di kota Pangkal Pinang yang tidak sebanding dengan peningkatan volume kendaraan dijalan, sehingga kelancaran lalu lintas menurun.

e. Sebagai Wajah dari Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Kota Pangkal Pinang masih sangat kurang dalam hal ketersediaan fasilitas tempat khusus parkir. Masih banyaknya parkir on street (Parkir Tepi Jalan Umum) berdampak pada kemacetan yang terjadi di wilayah Kota Pangkal Pinang.

f. Masih ada masyarakat yang belum memahami dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas belum bisa terwujud, hal itu terlihat dari adanya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

1. **Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang**

Tabel 2.4
Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang

No	Peluang	No	Tantangan
1	Letak Kota Pangkal Pinang Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan prasarana jalan
2	Mengoptimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah yang berorientasi pada peluang investasi seperti Pengembangan transportasi Angkutan Massal	2	Kurangnya Minat Masyarakat Menggunakan Angkutan Umum dikarenakan Perkembangan Moda Transpotasi Umum berbasis Online
3	Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang	3	Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan
4	Mengoptimalkan Peranan Media Massa Cetak dan Elektronik Guna Menyebarluaskan Informasi Terkait Permasalahan Keselamatan Berkendara	4	Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien
		5	Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan ratarata diatas 10 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan
		6	Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan
		7	Masih terbatasnya pengembangan Kualitas SDM dibidang Perhubungan

3. Formulasi Isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

Prioritas tahun yang direncanakan :

a. Kebijakan yang komperhensif untuk setiap pengambilan keputusan.

- Melaksanakan pengembangan pengelolaan transportasi jalan yang handal.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang telah tersedia.
- Memberdayakan pegawai sesuai dengan jabatan, kemampuan dan profesionalitasnya.
- Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan instansi-instansi yang terkait dengan ketugasan di bidang perhubungan, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Kepolisian dan Instans-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang
- Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui penataan sistem transportasi jalan, menyusun, merevisi dan menyempurnakan peraturan-peraturan bidang perhubungan berupa Peraturan daerah, Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Walikota.

b. Perlunya Konsistensi peraturan perundang mulai dari pusat sampai dengan peraturan-peraturan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Proses review ini dilakukan dengan alasan agar program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang tercover dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang akuntabel.
3. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dalam hal transportasi beserta sarana dan prasarana penunjang transportasi.
2. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat disajikan dengan Tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel 2.5 Hasil Musrenbang Kecamatan

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN
3	561398	26-01-2024	Rudi Kurniawan,S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan Sehingga Tingkat Kriminal Sangat Tinggi dan Sering Terjadi Tabrakan	Jalan Yos Sudarso Gang Cempaka V RT 001/RW 001 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	Titik
8	568550	29-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan Sehingga Sering Terjadi Kemalingan	Jalan Asam RT 002/RW 001, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
9	568789	29-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak Ada Lampu Jalan Sehingga di Daerah Tersebut Gelap	Jalan Sempayo III RT 005/RW 002, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
13	568943	29-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Bangkalan RT 009/RW 003, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
17	569618	29-01-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalan Dalam Keadaan Gelap Sehingga Sering Terjadi Kecelakaan	Jalan Lada RT/RW 009/003 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
19	569748	29-01-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalan Gelap Tidak Berlampu Sehingga Mengganggu Aktivitas Warga	Jalan Salak III RT/RW 002/003 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
20	569764	29-01-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalan Gelap Tidak Berlampu	Jalan Duku II RT/RW 002/003 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
21	569813	29-01-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Ada Rumah yang Menutupi Persimpangan Jalan Sehingga Sering Terjadi Kecelakaan	Jalan Cempedak I RT/RW 009/003 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
23	570358	29-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak ada lampu jalan, Sehingga pada malam hari jalan tersebut gelap. Membahayakan bagi pejalan kaki, kendaraan roda dua & roda empat yang melewatinya.	Jalan Trem Dalam RT 007 RW 003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	8	Titik
24	570367	29-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan pada jalan tersebut sehingga membutuhkan lampu jalan .	Jalan Trem Kolong Nangka 1 RT 006 RW 002 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	8	Titik
26	570503	29-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak ada penerangan jalan, di perbatasan RT 008 dan RT 006 oleh karnanya meminta kepada pihak terkait untuk dapat memasang lampu jalan di area yang di tuju.	Jalan Air Nangka 1 RT 008 RW 003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	6	Titik
29	570680	29-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan di jalan tersebut, Oleh karna itu di butuhkan pemasangan lampu jalan	Jalan Lada RT 007 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui (antara kantor lurah ke rumah pak madirin), Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
33	570781	29-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan jalan ,Dibutuhkan pemasangan lampu jalan.	Jalan Abdul Somad RT 002 RW 001 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
42	572455	30-01-2024	Kalok	Pemasangan Lampu Jalan	Permintaan penerangan lampu jalan	Gang. Labu IV, RT. 003. RW. 003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
44	572768	30-01-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Kampung Samak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	30	titik
45	572800	30-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan Sehingga Sering Terjadi Kecelakaan di Pertigaan dan Tikungan	Jalan Air Nangka I RT 006/RW 002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
47	573235	30-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan pada jalan tersebut sehingga dibutuhkan pemasangan lampu jalan.	Jalan Cempedak 1 RT 009 RW 003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
54	577529	31-01-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Penambahan lampu jalan dan perbaikan lampu yang rusak	Jl. Gaja Mada I, RT/RW 07/02 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
56	577650	31-01-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Belum ada lampu penerangan jalan sehingga dimalam hari terlihat gelap.	Jalan Parit Lalang, Gang Bandes, RT.06 RW 02 Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
61	578291	31-01-2024	Endang Kristiani	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan karena kurangnya penerangan pada malam hari	Jalan Zambrud Dua , RT 013 / RW 003, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
62	578336	31-01-2024	Endang Kristiani	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan karena kurangnya penerangan pada malam hari	Jalan Abdullah Bursyah Nomor 56, RT 005 / RW 002 , Kelurahan Bukit Besar , Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
72	579116	31-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan Sehingga Rawan Terjadi Kriminalitas	Jalan Cendawan RT 003/RW 001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
74	579240	31-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Lion Boen RT 006/RW 002, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
78	579371	31-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Hormen Maddati Gang Buah Batu RT 002/RW 001, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	6	Titik
80	579408	31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Karna kurangnya penerangan di daerah yang di tuju ,membuat suasana kurang baik,dan berpotensi menjadi lokasi hal-hal yang berkaitan dengan kriminal,seperti pencurian dan transaksi narkoba	Jalan Cendawan ,Gang Panti RT 003 RW 001 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	Titik

81	579437	31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Karena belum adanya kaca cembung di daerah yang di tuju, Dengan lokasi tikungan yang tajam sehingga sulit para pengemudi melihat ada tidaknya kendaraan yang melaju dari arah yang berlawanan Untuk menghindari kecelakaan berkendaraan .	Jalan Cendawan RT 003 RW 001 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
87	579761	31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan pada jalan yang dituju	Jalan Solihin sampai Gang Pisang RT 006 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
89	579999	31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan pada jalan yang dituju, oleh karena itu di butuhkan pemasangan lampu jalan	Jalan Asam RT 002 RW 001 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
91	580073	31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan pada lokasi yang dituju	Jalan puri nirwana Gang Rukam 1 RT 004 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
94	580217	31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Karena Kurangnya Penerangan Pada lokasi yang di tuju	Jalan Sriwijaya RT 005 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	6	Titik
96	580755	31-01-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	banyak masyarakat mengeluh karena sering terjadi kecelakaan dan terjadi tindakan kriminal dikarenakan gelapnya daerah tersebut	Jalan Mustika II RT. 003 RW. 002 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik
98	581275	31-01-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Bedade Gang Pelita RT.006 RW. 002 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	9	titik
110	583961	01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Kopi RT 006/RW 003, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	8	Titik
113	584352	01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Diperlukan Kaca Cembung di Setiap Persimpangan	Jalan Jakfar Yusuf RT 001, RT 002, RT 003, RT 004 / RW 001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
114	584473	01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Lada RT 005 - RT 007/RW 002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
116	584507	01-02-2024	Rudi Hentoni, S.T.	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan dikarenakan kurangnya penerangan jalan yang ada didaerah tersebut	Jalan Tempoa, RT 003 / RW 001, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
117	584567	01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Trem RT 006/RW 002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
118	584579	01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Diperlukan Kaca Cembung di Setiap Persimpangan	Jalan Air Nangka I RT 006/RW 002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
121	584766	01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Sungai Rangkui RT 003/RW 001, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
125	585154	01-02-2024	Hibir	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan jalan pada malam hari sehingga jalan menjadi gelap di sepanjang jalan Lada	Jalan Lada RT 007 dan RT 002 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui (samping SMA Negeri 3 Pangkalpinang)., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
128	587229	02-02-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalan terlalu gelap karena tidak ada penerangan, sehingga sering terjadi kecelakaan.	Jalan K.H Ahmad Dahlan Dari persimpangan ada gorong-gorong sampai ke Universitas Muhammadiyah RT/RW 09/03, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
129	587231	02-02-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Kondisi dan Sepanjang jalan dimalam hari gelap, maka butuh penerangan lampu jalan di belakang SMA N 3	Jl. cempedak I RT 07 RW 03. Belakang SMA N 3 Pangkalpinang, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
139	589051	02-02-2024	Hibir	Pemasangan Lampu Jalan	Membutuhkan penerangan jalan karena dimalam hari jalan gelap	Jalan Semangka II RT 007/RW 003 Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
141	589681	02-02-2024	Kalok	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan, Kondisi gelap, rawan transaksi Narkoba membutuhkan 3 Unit lampu	Jalan Gegading (Dekat Kantor Lurah Melintang) RT.009/RW.003, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
143	589760	02-02-2024	Rudi Hentoni, S.T.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya lampu penerangan jalan	Jalan Kampung Melayu Gang. Sukun, RT 003 / RW 003, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
146	589852	02-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Pengajuan Pemasangan Lampu Jalan, Untuk Menghindari Kecelakaan dan Hal-Hal yang Dapat Merugikan Masyarakat	Jalan Kenali Asem RT 009/RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	9	Titik
148	589973	02-02-2024	Kalok	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Persimpangan Jalan Toko Andika yang Rawan Kecelakaan	Jalan Veteran (Simpang Toko Andika) RT. 003/RW. 001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
149	589993	02-02-2024	Kalok	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Persimpangan Jalan Yang Rawan Kecelakaan	Jalan Cendawan menuju Kantor Lurah, RT. 003/RW.001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
150	590006	02-02-2024	Kalok	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Persimpangan jalan Buncis yang rawan kecelakaan	Jalan Buncis, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik

162	590300	02-02-2024	Kalok	Pemasangan Lampu Jalan	butuh penerangan lampu di jalan sriwijaya, sebagai akses masyarakat dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Sriwijaya RT. 005/RW. 002, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
164	590732	02-02-2024	Hibir	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan jalan di simpang Masjid Baiturrahman karena dalam dua bulan terakhir sudah ada dua kali kecelakaan	Jalan Kenali Asam RT 009/RW 003 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
166	590894	02-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Usada RT 003/RW 001, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
168	590981	02-02-2024	Mentarini,S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Memerlukan perbaikan lampu jalan yang sudah putus	Jalan Soekarno Hatta RT 006/RW 002 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
177	593343	03-02-2024	Syahrumadhon	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak ada penerangan Lampu Jalan di Simpang Perumahan Panorama Zamrud	Jalan Masjid Al Husna, RT 006/RW 002, Perumahan Panorama Zamrud, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
183	593580	03-02-2024	Djubaidah	Pemasangan Lampu Jalan	Dari jalan SMA N 04 Pangkalpinang kesimpang Lontong Pancur menuju Lontong Pancur dan Terminal Selindung, masih gelap dan sering terjadi kecelakaan	Jalan R. Hundani Gabek 2 (simpang Lontong Pancur), Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Gabek , Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
188	597933	04-02-2024	Panji Akbar, S.IP	Pemasangan Lampu Jalan	Jalanan gelap karena kurangnya penerangan jalan	Jalan Air Salemba RT 007/RW 002 Gang Dapid Wijaya, Perum Guru SD 39 Gabek Permai, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
192	598125	04-02-2024	Panji Akbar, S.IP	Pemasangan Lampu Jalan	Ada beberapa titik penerangan jalan yang belum terealisasikan, karena sudah lama diajukan, mengingat rawannya kecelakaan.	Dijalan Baong RT 006/RW 002 , di simpang 4 Pancur, Jalan Bedukang sampai terminal Selindung, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
194	598170	04-02-2024	Syahrumadhon	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak ada penerangan lampu jalan Sehingga Mereka Merasa Aman Dalam Melakukan Aktivitas Perjalanan di Malam Hari	Jalan Hidayatussalikin Dalam, Depan Rumah Bidan Nuri, Depan TPA Hidayatussalikin, Depan Rumah Ana, dan Depan Rumah Ustad Jamel, RT 004/RW 002, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
196	598212	04-02-2024	Syahrumadhon	Pemasangan Lampu Jalan	Untuk Memberikan Penerangan Bagi Pengguna Jalan Sehingga Mereka Merasa Aman Dalam Melakukan Aktivitas Perjalanan di Malam Hari	Jalan Nilam, RT 007/RW 003, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
197	598218	04-02-2024	Syahrumadhon	Pemasangan Lampu Jalan	Untuk Memberikan penerangan Bagi Pengguna Jalan Sehingga Mereka Merasa Aman Dalam Melakukan Aktivitas Perjalanan di Malam Hari	Jalan SMP Negeri 10, RT 005/RW 002, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
204	599094	05-02-2024	Dr. Zufriady, S.E,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan karena kurangnya penerangan pada malam hari	Jalan Gandaria II Belakang Masjid Jannatul Ma'wa, RT. 007 RW. 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik
206	599109	05-02-2024	Endang Kristiani	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan pada malam hari	Jalan Pasir Putih, RT 009 / RW 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
208	599150	05-02-2024	Endang Kristiani	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan pada malam hari	Jalan Tegal, RT 004 / RW 002, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
211	599296	05-02-2024	Pribadi Muslim	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Banyak nya motor dan mobil yang berlalu lalang, pemasangan cermin cembung agar mencegah terjadinya kecelakaan	Jalan Sakura , RT 001 RT 004 RT 005, RW 001, Kelurahan Gedung Nasional , Kecamatan Taman Sari., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	titik
214	599380	05-02-2024	Pribadi Muslim	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	banyak aktivitas yang melalui jalan persimpangan dengan titik buta sehingga menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan	Jalan Trem , RT 01 , RW 01, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	titik
216	599447	05-02-2024	Pribadi Muslim	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	banyak aktivitas yang melalui jalan persimpangan dengan titik buta sehingga menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan	Jalan Raden Eddy Martadinata, RT 01, RW 05, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	titik
240	600167	06-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Perbaikan Lampu Jalan yang Sudah Rusak	Jalan Jakpar Yusuf RT 008/RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
241	600183	05-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Perbaikan Lampu Jalan yang Sudah Rusak	Jalan Marica RT 008/RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
274	602622	06-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Rambutan I RT 003/RW 001, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
275	602629	06-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Salak I RT 003/RW 001, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
276	602643	06-02-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Penambahan Lampu Jalan dan Perbaikan Lampu Jalan Agar Warga Semakin Aman Saat Berkendara di Malam Hari	Jalan Dewi Sartika RT/RW 004/002 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik

280	602933	06-02-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak Adanya Penerangan Jalan	Jalan Gegading RT/RW 006/002 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
281	602951	06-02-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalanan Gelap Sehingga Menggangggu Aktivitas Warga di Malam Hari	Jalan Masjid Al-Huda RT/RW 005/002 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
282	602980	06-02-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak Ada Penerangan Lampu Jalan	Jalan Tomat RT/RW 004/002 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
284	603025	06-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Perbaikan Lampu Jalan, Sudah Banyak yang Rusak	Jalan Irian RT 003 - RT 004/RW 002, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
298	604043	06-02-2024	Indrawati	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan jalan di Jalan R.E.Martadinata	Jalan R.E.Martadinata RT 001/RW 001 Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
306	605889	07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan dikarenakan Kondisi Jalan Gelap, Sehingga Rawan Kecelakaan	Jl. Gandaria (Flamenggo) 1 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	20	Titik
309	605970	07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan dikarenakan Adanya Tikungan Tajam di Kawasan Tersebut Sehingga Rawan Kecelakaan Karena Tidak Saling Terlihat Pengendara yang Berlawanan Arah	Jl. Gandaria 1 (Flamenggo) RT.007 RW. 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
310	606019	07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan dibutuhkan karena Kondisi Lampu yang Sudah Rusak	Jl. Kapten Sulaiman Arief RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mesjid Jamik Kecamatan Rangkui , Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	20	Titik
311	606156	07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan Tikungan Rawan Kecelakaan di Karenakan Pengendara Tidak Saling Telihat yang Berlawanan Arah	Jl. Abdurrahman Siddik Gang. Merpati RT.001 RW. 001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
312	606360	07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan karena Kondisi Jalan Yang Gelap dan Rawan Tindak Kriminal	Jalan Cendrawasih RT. 009 RW. 003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	20	Titik
317	607254	07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan Jalan yang Ada di Kawasan Tersebut Sehingga Rawan Kecelakaan	Jl. Tempoa RT. 003 RW. 001 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
323	607596	07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan Karena Kurangnya Penerangan di Sepanjang Jalan Dari SD Negeri 3 Sampai di Titik Simpang Raskin	Sepanjang Jalan Tampuk Pinang Pura RT. 009 RW. 003 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	30	Titik
328	608133	07-02-2024	Dr. Zufriady, S.E,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Masjid Istiqlal RT. 007 RW. 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik
329	608194	07-02-2024	Dr. Zufriady, S.E,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan karena kurangnya penerangan pada malam hari	Gang Wijaya Kusoma RT. 003 RW. 002 Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	titik
333	608427	07-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Diperlukan Kaca Cembung di Setiap Persimpangan	Jalan Jakfar Yusuf RT 005, RT 006, RT 007 / RW 002, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
334	608440	07-02-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	sering terjadi kecelakaan karena terbatasnya pandangan pengendara motor dan mobil	Jalan Pulau Gelasa RT. 009 RW. 002 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	titik
335	608441	07-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Diperlukan Kaca Cembung di Setiap Persimpangan	Jalan Jakfar Yusuf RT 005, RT 009 / RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
338	608543	07-02-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Sinar Bulan RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik
339	608567	07-02-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	sering terjadi kecelakaan karena terbatasnya pandangan kendaraan bermotor	Jalan Sinar Bulan RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	titik
340	608603	07-02-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	minimnya lampu penerangan jalan	Jalan Tanjung Bunga 1 Perumahan Korpri RT. 007 RW. 003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	8	titik
342	610175	08-02-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak adanya penerangan jalan, sehingga membuat jalan menjadi gelap.	Jl. kenali asam RT/RW 09/03 didekat SD Negeri 16 Pangkalpinang, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
343	610178	08-02-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak ada penerangan lampu jalan dan ada beberapa lampu yang rusak	Jl. KH Abdul Rasyid dari mulai masjid Al-Karomah sampai SMA N 3 Pangkalpinang RT/RW 05/02 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	Titik
344	611790	08-02-2024	Rano	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan di Daerah Tersebut	Jalan Mustika II RT 003/RW 001 (Jalan SMK PGRI), Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	Titik
346	611946	08-02-2024	Rudi Kurniawan,S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan Sehingga Tingkat Kriminal Sangat Tinggi dan Sering Terjadi Tabrakan	Jalan Yos Sudarso Gang Cempaka VI RT 001/RW 001 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	Titik

349	612742	09-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan Minimnya Penerangan Jalan yang Hanya Mengandalkan Penerangan dari Rumah Rumah Penduduk Mengingat Kondisi Jalanan Sepi	Jl. Air Kampak RT. 010 RW. 003 Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
354	614855	09-02-2024	Zainuri	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan 2 titik lampu jalan dan perbaikan 2 titik lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Yossudarso 1, Gang Cempaka 1, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	titik
356	614882	09-02-2024	Zainuri	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Gang Cempaka 6, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	titik
360	647245	21-02-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	perbaikan lampu yang sudah ada, namun lampu yang sudah tidak menyala lagi atau rusak	Jl. bathin iso RT/RW 05/02 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
368	652896	21-02-2024	Muhammad Rusdi, S.E.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan Pada Titik Jalan	Samping SMP Negeri 3 Pangkalpinang, RT 002 RW 001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
369	653016	21-02-2024	Hibir	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Pada alamat yang dituju berada ditikungan sehingga sulit untuk melihat orang yang berkendara dari arah yang berlawanan, oleh karena itu dibutuhkan cermin cembung	Persimpangan Jalan Veteran simpang Toko Andika, Jalan Cendawan RT 003/RW 001, menuju Kantor Lurah Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
381	661351	22-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	lampu jalan masing kekurangan beberapa titik dan banyak lampu yang mati	Jalan Bukit Sari Gang. Nyatoh, RT 005 RW 002, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	30	titik
383	661415	22-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	lampu jalan masing kekurangan beberapa titik dan banyak yang rusak	Jalan Bukit Sari Gang. Nyatoh, RT006 RW 002, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	15	titik
384	662060	22-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	kurangnya jumlah lampu yang hidup	Jalan Cendrawasih, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
386	668877	23-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	lampu jalan masih banyak kurang berapa titik dan banyak rusak	Jalan Kakak Tua, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
387	668944	23-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Titik Lampu Pada Jalan	Jalan Bukit Manggis, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
388	669066	23-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	penambahan lampu jalan yang baru	Jalan Vanila, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik
389	669356	23-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	penambahan titik lampu di jalan	Jalan Rejeki, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
390	669511	23-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	titik tiang besar sudah ada tinggal jaringan dan tambahkan lampunya saja	Jalan Hasadah, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	20	titik
393	671930	23-02-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalanan Gelap Tidak Ada Penerangan Sehingga Mengganggu Aktivitas Warga di Malam Hari	Jalan Lada RT/RW 009/003 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
397	672915	23-02-2024	Sadiri	Pemasangan Lampu Jalan	Karna banyak lampu jalan yang sudah padam/rusak, warga menghimbau untuk di lakukan pemeliharaan atau perbaikan lampu jalan di seluruh kelurahan Sriwijaya.	RT 007/RW 002 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya , Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
401	683491	25-02-2024	Meitarini,S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurang nya penerangan jalan pada malam hari di ujung Pasar Induk tepat di simpang sebelah Masjid	Jalan Jagal RT 001/RW 001 Kelurahan Pasar Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
402	684173	25-02-2024	Meitarini,S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurang nya penerangan jalan pada malam hari	RT 002/RW 001 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
405	684582	25-02-2024	Hibir	Pemasangan Lampu Jalan	Kurang nya penerangan jalan	Jalan Veteran RT 003/RW 003 Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
407	684631	25-02-2024	Hibir	Pemasangan Lampu Jalan	Kurang nya penerangan jalan dimalam hari	Jalan Min 2 RT 003/RW 001 Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
408	684637	25-02-2024	Hibir	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Membutuhkan cermin cembung karena berada di persimpangan	Jalan Min 2 RT 003/RW 001 Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Unit
417	686614	26-02-2024	Muhammad Rusdi, S.E.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Penambahan Titik Lampu Baru	Gang Belinjo, RT 002 RW 001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
426	688945	26-02-2024	Muhammad Rusdi, S.E.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Pengganti Bola Lampu Rusak atau Padam	Jalan Sumedang, Gang Pipit Dalam II, Dekat Masjid Baitul Hikmah (Depan Rumah Bapak Supranto), RT 006, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang , Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
427	689028	26-02-2024	Muhammad Rusdi, S.E.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Pengganti Bola Lampu Rusak Atau Padam	Jalan Sumedang, (Depan Rumah Bapak Kemas Rozal), RT 006, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN
11	1423606	15-02-2024	Kelurahan Rejo Sari	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	[Pemasangan Lampu] Lingkungan Gelap dan untuk mengantisipasi kejahatan serta mencegah tindakan kriminal)	Jln. Bandeng RT.03/01, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Pangkal Balam	Rejo Sari	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	-
14	1423677	15-02-2024	Kelurahan Rejo Sari	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Pemasangan Lampu jalan untuk mengurangi daerah rawan dan gelap dalam mengantisipasi kerawanan tindakan kriminal	Jln. Bandeng I RT. 02/01, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Pangkal Balam	Rejo Sari	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	-
13	1423702	15-02-2024	Kelurahan Rejo Sari	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Pemasangan Lampu jalan untuk mengurangi daerah rawan dan gelap dalam mengantisipasi kerawanan tindakan kriminal	Jln. Bandeng 2 RT. 02/01, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Pangkal Balam	Rejo Sari	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	-
35	1429718	16-02-2024	Kelurahan Tua Tunu/Indeh	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Penerangan penggunaan Jalan sebanyak 15 titik	Jalan Baskin RT08 RW03 , Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gerunggang	Tua Tunu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Prioritas
36	1430081	16-02-2024	Kelurahan Kacang Pedang	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Penerangan untuk penggunaan Jalan Jumlah usulan 7 titik	Jalan Istiklal Raya RT 10 RW 03 , Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gerunggang	Kacang Pedang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Prioritas
81	1435755	16-02-2024	Kelurahan Batin Tikal	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Pemasangan Lampu Gang	Gg. Musholah Nurul Ihsan Rt. 001/ 002, Kota	Kota Pangkal Pinang	Taman Sari	Batin Tikal	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-
129	1437248	17-02-2024	Kelurahan Gedung Nasional	Kelurahan / Desa	Pemasangan Cermin Cembung	Pengadaan cermin cembung	Depan Gang Aster RT 005 Kelurahan Gedung Nasional,	Kota Pangkal Pinang	Taman Sari	Gedung Nasional	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-
147	1450025	19-02-2024	Kelurahan Ampui	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	(Blokasi Gelap ,Untuk Mempermudah Aktifitas Warga (4 Titik)	(Lokasi 2 Kawah SMP 4 Rt. 4, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Pangkal Balam	Ampui	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Mohon untuk dapat diproses lebih lanjut
171	1553674	04-03-2024	Kelurahan Batu Intan	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Tidak adanya Penerangan Jalan saat malam hari. Volume 2 Titik	H. Basuki Rachmad Gang Iman II Rt 001 Rw.001, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Girimaya	Bukitintan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Ditindaklanjuti
175	1553713	04-03-2024	Kelurahan Batu Intan	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Tidak adanya Penerangan Jalan saat malam hari. Volume 3 Titik	Gang Batu Rubi II dan Tikungan Sumur Umum RT 007 Rw 002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Girimaya	Bukitintan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Ditindaklanjuti
213	1570540	07-03-2024	Kelurahan Pintu Air	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	DI SEPANDANG JALAN SUNGAI RANGKUI KUMANGNYA PENERANGAN VOLUME = 8 TITIK	RT. 001 RT. 002 RT. 003, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Rangkui	Pintu Air	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Sangat direkomendasikan
221	1576499	07-03-2024	Kelurahan Temberan	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	masih adanya akses jalan kalau malam hari sangat gelap tanpa penerangan jalan	jalan gang sawo sapu rt 03 rw 01 atau masuk perumahan damai lestari 6 sepanjang jalan	Kota Pangkal Pinang	Bukitintan	Temberan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	untuk ditindak lanjuti
224	1576620	07-03-2024	Kelurahan Bukitmerapin	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Untuk Penerangan Jalan jumlah 3 TITIK	Jalan Melati 1 RT003 RW001, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gerunggang	Bukitmerapih	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Prioritas
225	1576660	07-03-2024	Kelurahan Bukitmerapin	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Untuk Penerangan Jalan jumlah 1 titik	Jalan Rumbia RT003 RW001 , Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gerunggang	Bukitmerapih	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Prioritas
226	1576679	07-03-2024	Kelurahan Bukitmerapin	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Untuk Penerangan Jalan Jumlah 11 Titik	Jalan Bukit Merapin RT017 RW 002 , Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gerunggang	Bukitmerapin	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Prioritas
227	1576701	07-03-2024	Kelurahan Bukitmerapin	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Untuk penerangan jalan Jumlah 4 titik lampu	Jalan Bukit Permai RT 07 RW 02 , Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gerunggang	Bukitmerapin	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Prioritas
232	1577733	08-03-2024	Kelurahan Jerambah Gantung	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kondisi gelap, rawan kecelakaan, begal	Jl. Mukholis Mardhotillah/Jl. TPU China RT. 001/RW. 001 , Kota Pangkal	Kota Pangkal Pinang	Gabek	Jerambah Gantung	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
233	1577746	08-03-2024	Kelurahan Jerambah Gantung	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kondisi gelap, rawan kecelakaan, begal	Jl. Kelenteng RT. 002/RW. 001, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gabek	Jerambah Gantung	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-
234	1577759	08-03-2024	Kelurahan Jerambah Gantung	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kondisi gelap, rawan kecelakaan,	Jl. Lim Lochik 30 RT. 003/RW. 001 dan RT. 006/RW 002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gabek	Jerambah Gantung	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
239	1578118	08-03-2024	Kelurahan Jerambah Gantung	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kondisi gelap, rawan kecelakaan	Jl. H. Bakir RT. 006/RW. 002, Kota Pangkal	Kota Pangkal Pinang	Gabek	Jerambah Gantung	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-
240	1578131	08-03-2024	Kelurahan Jerambah Gantung	Kelurahan / Desa	Pemasangan Cermin Cembung	Sering terjadi kecelakaan	Jl. H. Bakir RT. 006/RW. 002, Kota Pangkal	Kota Pangkal Pinang	Gabek	Jerambah Gantung	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-
266	1580596	08-03-2024	Kelurahan Sinar Bulan	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penorangan Jalan	tidak adanya penerangan jalan jadi jalan tersebut gelap, bisa mengundang terjadinya kejahatan pencurian	JALAN KAMPUNG SAMAK RT 003 RW 001 KELURAHAN SINAR BULAN KECAMATAN	Kota Pangkal Pinang	Bukitintan	Sinar Bulan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	untuk ditindak lanjuti
268	1580625	08-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	SERING TERJADI PENJAMBRETAN KARNA MALAM MALAM GELAP	JL.PERMATA RT.12/03, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Bukitintan	Semabung Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	Usulan WAJIB dimasukkan foto. Jangan menginput usulan diluar kesepakatan, masukan usulan yang menjadi prioritas dengan jumlah yang disepakati	-	-
269	1580639	08-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Sering terjadi kecelakaan karna jalanan gelap	RT.007/002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Bukitintan	Semabung Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-
271	1580660	08-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Sering terjadi penjambretan kerawanan	RT. 002/001, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Bukitintan	Semabung Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	Usulan WAJIB dimasukkan foto. Jangan menginput usulan diluar kesepakatan, masukan usulan yang menjadi prioritas dengan jumlah yang disepakati	-	-
272	1580665	08-03-2024	Kelurahan Sinar Bulan	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jalan tersebut gelap	gang Parit Cat rt 004 rw 002 kelurahan sinar bulan kecamatan bukit intan kota	Kota Pangkal Pinang	Bukitintan	Sinar Bulan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	untuk ditindak lanjuti
274	1580690	08-03-2024	Kelurahan Sinar Bulan	Kelurahan / Desa	Pemasangan Cermin Cembung	banyaknya bangunan di tepi jalan jadi susahnya pengendara melihat pandangan kedepan saat di tikungan karna tertutup oleh bangunan	gang gotasa rt 009 rw 003 kelurahan sinar bulan kecamatan bukit intan kota	Kota Pangkal Pinang	Bukitintan	Sinar Bulan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	untuk ditindak lanjuti
275	1580697	08-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Sering terjadi kecelakaan karna gelap	RT.005/001, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Bukitintan	Semabung Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-

280	1580731	08-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	sering terjadinya kecelakaan karena gelap	JLMustika IV RT.007/002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Bukiktetan	Semabung Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	Usulan WAJIB dimasukkan foto. Jangan menginput usulan diluar kesepakatan, masukkan usulan yang menjadi prioritas dengan jumlah yang disepakati	-	-
281	1580744	08-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	sering terjadi kecelakaan karna gelap	Gang Mustika II RT.010/002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Bukiktetan	Semabung Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	Usulan WAJIB dimasukkan foto. Jangan menginput usulan diluar kesepakatan, masukkan usulan yang menjadi prioritas dengan jumlah yang disepakati	-	-
286	1580801	08-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	SERING TRIADI KECELAKAAN	JL.ZAMRUD RT.012/003, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Bukiktetan	Semabung Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	Usulan WAJIB dimasukkan foto. Jangan menginput usulan diluar kesepakatan, masukkan usulan yang menjadi prioritas dengan jumlah yang disepakati	-	-
290	1580835	08-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	SERING TERJADI KECELAKAAN	GG.ZAMRUD II RT.012/003, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Bukiktetan	Semabung Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-
309	1593512	12-03-2024	Kelurahan Air Itam	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	belum ada penerangan sehingga pada waktu malam kondisi jalan gelap dan rawan kecelakaan	JL.air Bunyik RT03/01 sebanyak 4 tiang, hub. 085368997775	Kota Pangkal Pinang	Duktatetan	Air Itam	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	untuk ditindaklanjuti
310	1593517	12-03-2024	Kelurahan Air Itam	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	belum ada penerangan di sekitarnya	JL Bandes RT03/03 ,di butuhkan 6 Tiang Hub. 081273304425.	Kota Pangkal Pinang	Bukiktetan	Air Itam	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	untuk ditindaklanjuti
322	1595065	13-03-2024	Kelurahan Air Salemba	Kelurahan / Desa	Pemasangan APIL	rawan terjadi kecelakaan dan kendaraan masuk jurang	jalan jakas 1, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gabek	Air Salemba	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
336	1595430	13-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	SERING TERJADI KECELAKAAN DAN PENJAMBRETAN	RT.012/002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Bukiktetan	Semabung Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	untuk ditindaklanjuti
338	1595439	13-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	SERING TERJADI KECELAKAAN	RT.007/002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Bukiktetan	Semabung Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	untuk ditindaklanjuti
343	1595573	13-03-2024	Kelurahan Gabek Satu	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	belum ada lampu penerangan jalan sehingga mengakibatkan rawan kecelakaan dan pencurian	JL. Gabus RT.005 RW.002 (Dekat Masjid Al-Kholiq), Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gabek	Gabek Satu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
346	1595638	13-03-2024	Kelurahan Gabek Satu	Kelurahan / Desa	Pemasangan Cermin Cembung	Tikungan / belokan jalan terlalu tajam jadi bila ada kendaraan lewat tidak terlihat yang bisa menyebabkan kecelakaan	JL Sembilang RT.005 RW.002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gabek	Gabek Satu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
363	1601166	14-03-2024	Kelurahan Selindung Baru	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jalan Gelap, tidak ada penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan dan rawan kejahatan	RT/RW 001 dan RT/RW 002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Gabek	Selindung Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
374	1608886	18-03-2024	Kelurahan Melintang	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kuburan terlalu gelap sering di salahgunakan	Jalan hortem maddad RT/RW 001/001 , Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Rangkui	Melintang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Sangat direkomendasikan
382	1609341	18-03-2024	Kelurahan Melintang	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jalan yg perlu penerangan di lalui masyarakat (4 titik lampu)	Jl Masjid Alhuda RT/RW 005/002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Rangkui	Melintang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Sangat direkomendasikan
389	1609523	18-03-2024	Kelurahan Melintang	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	4 titik lampu penerangan jalan	Jl Tomat 4 RT/RW 006/002, Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Rangkui	Melintang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun	Sangat direkomendasikan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang yaitu:

a. Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
b. Fungsi dari Dinas Perhubungan adalah perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.

2.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang

a. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang yaitu:
   "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Penyelenggaraan Perhubungan"
b. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang yaitu:
   Meningkatnya Rasio konektivitas kabupaten/kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

a. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

- Berdasarkan Hasil Pemetaan Permendagri No 90 Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Mempunyai 1 Program Non Urusan dan 1 Program Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar Perhubungan Terdiri dari 12 Kegiatan dan 82 Sub Kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian target yang ditetapkan.
- Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP

h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
b) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
d) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
e) Pengolahan Data Retribusi Daerah
f) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
g) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
f) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
g) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
h) Pemindahan Tugas ASN
i) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
j) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
k) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g) Penyediaan Bahan/Material
h) Fasilitasi Kunjungan Tamu
i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pengadaan Alat Besar
d) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
e) Pengadaan Mebel
f) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
h) Pengadaan Aset Tak Berwujud
i) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
j) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
k) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
e) Pemeliharaan Mebel
f) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
h) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
i) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
j) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

k) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
l) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
b) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

a) Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
b) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
c) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
b) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
c) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
c) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan :

a) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
b) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
c) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
d) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

10. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
b) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

11. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana UmumJaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
b) Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

12. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

13) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
b) Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
c) Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan untuk Pagu Indikatif sebelum KUA-PPAS yang ditetapkan Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk Dinas Perhubungan Sebesar **Rp. 16.161.150.951** dari APBD Kota Pangkal Pinang.

b. Jenis Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang mengacu pada sasaran dan prioritas Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dengan Indikator Sasaran yaitu : **Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota.** Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan yaitu Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

c. Untuk Pendanaan tidak sesuai dengan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan karena :

- Adanya permintaan dan kebutuhan untuk peningkatan fasilitas publik di bidang perhubungan;
- Adanya Kebutuhan untuk perawatan dan pengadaan lampu Jalan umum
- Penambahan Tenaga Pengendalian dan Pengawasan Lalin

d. Selanjutnya setelah melalui proses pembahasan-pembahasan baik saat examininasi anggaran dengan TAPD, Komisi dan melalui proses Evaluasi Gubernur, maka anggaran Dinas Perhubungan untuk Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 15.023.786.294,30**

Tabel 4.1 Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**16.161.519.951,00**	**18.479.961.160,00**	**15.103.786.294,30**	**-1.057.724.656,70**							**1.750.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.161.519.951,00**	**18.479.961.160,00**	**15.103.786.294,30**	**-1.057.724.656,70**							**1.750.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**16.161.519.951,00**	**18.479.961.160,00**	**15.103.786.294,30**	**-1.057.724.656,70**							**1.750.000.000,00**	
1.	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				75/ 80 Nilai Nilai	75 85 Nilai Nilai	**10.963.829.951,00**	**9.642.953.924,00**	**8.868.269.610,30**	**-19.963.829.951,00**							**0,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	46.425.000,00	23.162.500,00	9.211.500,00	-37.213.500,00				Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	8.850.000,00	5.437.500,00	937.500,00	-7.912.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-4.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7.850.000,00	1.350.000,00	3.515.000,00	-4.335.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.400.000,00	900.000,00	900.000,00	-6.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	15.225.000,00	12.975.000,00	1.359.000,00	-13.866.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terealisasinya laporan keuangan sesuaidengan sistem SAP*				100 %	100 %	3.902.264.684,00	3.906.141.325,00	3.709.532.986,30	-192.731.697,70				Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	3.973.365.184,00	3.906.498.325,00	3.795.889.986,30	-177.475.697,70	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11 Laporan	11 Laporan	11.799.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	-10.440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.100.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	-4.816.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*				0,566 %	0,566 %	209.522.750,00	242.022.750,00	235.772.500,00	26.249.750,00				Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0001	Pemecanan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	209.522.750,00	242.022.750,00	235.772.500,00	26.249.750,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*				0 %	0 %	188.268.000,00	100.459.000,00	30.459.000,00	-157.809.000,00				Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU PENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	47 Paket	87.909.000,00	0,00	0,00	-87.909.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	100.459.000,00	100.459.000,00	30.459.000,00	-70.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	963.216.707,00	369.173.515,00	231.227.790,00	-731.988.917,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.655.000,00	5.480.000,00	5.108.000,00	453.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	612.051.885,00	13.627.280,00	8.379.090,00	-603.672.795,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.079.000,00	8.469.000,00	0,00	-74.079.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	69.097.422,00	112.263.885,00	87.241.700,00	18.144.278,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.124.400,00	19.904.559,00	13.925.000,00	-6.199.400,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	200.459.000,00	200.459.000,00	116.574.000,00	-83.885.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah*				100 %	100 %	291.358.000,00	254.898.000,00	0,00	-291.358.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	93.459.000,00	97.959.000,00	0,00	-93.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	197.899.000,00	156.939.000,00	0,00	-197.899.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.632.300.610,00	4.471.641.138,00	4.470.709.138,00	-161.591.472,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.26.0002	Penyediaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.007.935.610,00	4.007.935.610,00	4.007.935.610,0	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Penelitian dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penelitian dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	21.847.000,00	27.097.000,00	27.097.000,0	5.450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	602.716.000,00	436.695.525,00	436.676.528,0	-167.041.472,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik penunjang daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	610.474.000,00	260.455.695,00	91.356.695,0	-519.117.304,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	509.925.000,00	99.906.696,00	91.356.695,0	-418.568.304,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.549.000,00	100.549.000,00	0,0	-100.549.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUB JNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas** **Persentase peningkatan standar keselamatan lalu jalan kendaraan bermotor**				**30,5** **63 %** **%**	**30,5** **63 %** **%**	**5.197.691.000,00**	**5.827.107.176,00**	**5.235.510.664,0**	**-3.447.691.000,00**							**1.750.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penyelesaian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen/Laporan Rencana Induk yang Tersusun*				100 %	100 %	443.295.000,00	1.511.763.192,00	1.306.048.416,0	862.753.416,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		1.500.000.000,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen penilaian Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	443.295.000,00	1.511.763.192,00	1.306.048.416,0	862.753.416,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			1.500.000.000,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase terselenggaranya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*				65 %	65 %	2.245.017.000,00	4.014.267.152,00	2.694.345.456,0	449.328.456,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		250.000.000,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				125 Unit	125 Unit	483.265.000,00	483.265.000,00	483.265.000,0	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			250.000.000,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				350 Unit	350 Unit	1.654.918.000,00	2.486.081.400,00	1.224.931.400,0	-429.986.600,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.02.2.03.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				50 Unit	50 Unit	108.834.000,00	1.042.920.752,00	988.149.056,0	879.315.056,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*				75 %	75 %	361.143.000,00	160.684.000,00	0,0	-361.143.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.459.000,00	0,00	0,0	-100.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	260.684.000,00	160.684.000,00	0,0	-260.684.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUB JNGAN
	2.15.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir	*Persentase terselenggaranya/adanya laporan dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*				100 %	100 %	1.160.903.000,00	1.726.120.648,00	928.396.712,0	-232.506.288,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERHUB JNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU PENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Penerimaan Penyerahan Pendirian Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Penerbitan Persyaratan Perizinan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	200.549.000,00	464.660.555,00	0,00	-200.549.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Aksesirasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Aksesirasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	960.364.000,00	1.273.439.792,00	928.396.712,00	-31.967.288,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase kendaraan umum/barang laik jalan yang lulus uji di Kota Pangkalpinang*				80 %	80 %	500.807.000,00	339.102.264,00	264.835.160,00	-236.971.840,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Tercatat				5000 Unit	5000 Unit	66.809.000,00	115.124.088,00	95.641.700,00	28.832.700,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	523.808.000,00	223.978.176,00	199.203.480,00	-324.604.520,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota yang dilaksanakan*				100 %	100 %	159.945.000,00	873.598.920,00	568.428.920,00	738.483.920,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	159.945.000,00	873.598.920,00	568.428.920,00	738.483.920,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Penetapan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase terusun/Ja laporan dokumen Penetapan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang tersusun*				100 %	100 %	86.512.000,00	86.512.000,00	30.703.000,00	-55.809.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				4 Laporan	4 Laporan	49.384.000,00	49.384.000,00	20.384.000,00	-29.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																		
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				2 Orang	2 Orang	20.469.000,00	20.469.000,00	0,00	-20.469.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Penetapan Teknis Andalalin yang terawasi				4 Laporan	4 Laporan	16.069.000,00	16.069.000,00	16.310.000,00	45.359.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah dokumen/laporan pengendalian/pengawasan yang tersusun*				100 %	100 %	150.059.000,00	113.059.000,00	112.759.000,00	-37.300.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Kelaikedilan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Kelaikedilan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	150.059.000,00	113.059.000,00	112.759.000,00	-37.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	JUMLAH								**16.161.318.951,00**	**18.476.061.190,00**	**15.103.786.294,20**	**-1.057.724.656,79**							**1.750.000.000,00**	

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025 mendatang akan menetapkan 2 program, 16 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan penyebaran lokasi program dan kegiatan di pangkal Pinang serta kegiatan dan subkegiatan tersebut sesuai dengan program nasional dan prioritas sasaran daerah, didanai oleh APBD Tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1 (satu) Tahun kedepan, dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**16.161.516.951,00**	**15.478.061.196,00**	**15.193.786.254,30**	**-1.057.724.696,70**							**1.750.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.161.516.951,00**	**15.478.061.196,00**	**15.193.786.254,30**	**-1.057.724.696,70**							**1.750.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**16.161.516.951,00**	**15.478.061.196,00**	**15.193.786.254,30**	**-1.057.724.696,70**							**1.750.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				75 80 Nilai Nilai	75 80 Nilai Nilai	**10.963.829.951,00**	**9.642.953.924,00**	**8.868.269.819,30**	**-10.963.829.951,00**							**0,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	46.425.000,00	25.102.000,00	9.211.500,00	-37.213.500,00				Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	8.650.000,00	5.437.500,00	937.500,00	-7.912.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-4.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7.850.000,00	1.350.000,00	3.515.000,00	-4.335.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.400.000,00	900.000,00	900.000,00	-6.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	15.225.000,00	12.975.000,00	1.359.000,00	-13.866.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pertanggungjawaban terselesaikannya laporan keuangan berdasarkan sesuai SAP*				100 %	100 %	3.992.264.484,00	3.990.141.325,00	3.796.532.986,30	-192.731.997,70				Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	3.973.365.484,00	3.986.466.325,00	3.795.889.986,30	-177.475.997,70	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11 Laporan	11 Laporan	11.799.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	-10.440.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.100.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	-4.816.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Keuangan Perangkat Daerah	*Pertanggung jawaban terhadap retribusi daerah terhadap PAD*				0,656 %	0,656 %	209.522.750,00	242.022.750,00	235.772.500,00	26.249.750,00				Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	209.522.750,00	242.022.750,00	235.772.500,00	26.249.750,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*				0 %	0 %	186.268.000,00	100.459.000,00	30.459.000,00	-157.809.000,00				Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	47 Paket	87.909.000,00	0,00	0,00	-87.909.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	100.459.000,00	160.459.000,00	30.459.000,00	-70.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	983.216.707,00	360.173.515,00	231.227.790,00	-751.988.917,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.655.000,00	5.460.000,00	5.108.000,00	453.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	612.051.885,00	13.627.260,00	8.370.090,00	-603.672.795,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.079.000,00	8.459.000,00	0,00	-74.079.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	89.097.422,00	112.263.885,00	87.241.700,00	-1.855.722,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.124.400,00	19.904.550,00	13.925.000,00	-6.199.400,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	200.459.000,00	200.459.000,00	116.574.000,00	-83.885.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengelolaan barang milik perangkat daerah*				100 %	100 %	291.358.000,00	254.898.000,00	0,00	-291.358.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Meubel																		
			Jumlah Paket Meubel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	33.459.000,00	97.959.000,00	0,00	-33.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	137.809.000,00	156.509.000,00	0,00	-137.809.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Aksesteras Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Aksesteras Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.632.300.610,00	4.471.641.138,00	4.470.709.138,00	-161.591.472,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.007.936.610,00	4.007.936.610,00	4.007.936.610,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	21.847.000,00	27.097.000,00	27.097.000,00	5.450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	602.719.000,00	436.609.528,00	436.876.528,00	-197.041.472,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik penunjang daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	610.474.000,00	260.455.896,00	91.356.696,00	-519.117.304,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	509.925.000,00	99.900.896,00	91.356.696,00	-418.568.304,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.549.000,00	100.549.000,00	0,00	-100.549.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas** **Persentase peningkatan standar keselamatan lalu jalan kendaraan bermotor**				**30,0** **63 %** **%**	**30,5** **63 %** **%**	**3.197.881.090,00**	**8.827.197.176,00**	**5.230.516.684,00**	**-3.447.681.096,00**							**1.750.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen/Laporan Rencana Induk yang Tersusun*				100 %	100 %	443.295.000,00	1.811.763.192,00	1.306.040.416,00	862.763.416,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	443.295.000,00	1.811.763.192,00	1.306.040.416,00	862.763.416,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase terpasangnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*				65 %	65 %	2.245.517.000,00	4.014.267.152,00	2.694.345.458,00	449.328.458,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				125 Unit	125 Unit	483.265.000,00	483.265.000,00	483.265.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				350 Unit	350 Unit	1.654.918.000,00	2.488.081.400,00	1.224.931.400,00	-429.986.600,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				50 Unit	50 Unit	106.834.000,00	1.042.920.752,00	966.149.058,00	879.315.058,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*				75 %	75 %	361.143.000,00	160.684.000,00	0,00	-361.143.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.459.000,00	0,00	0,00	-100.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	260.684.000,00	160.684.000,00	0,00	-260.684.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penertiban dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase terealisasinya laporan dokumen Penertiban dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*				100 %	100 %	1.160.903.000,00	1.728.120.648,00	928.396.712,00	-232.506.288,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Penerbitan Persyaratan Perizinan Izin Per yelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Penerbitan Persyaratan Perizinan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	200.549.000,00	454.660.656,00	0,00	-200.549.000,00	Kota Pangkal Pinang, Se mua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	960.354.000,00	1.273.439.752,00	926.396.712,00	-31.957.288,00	Kota Pangkal Pinang, Se mua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase kendaraan umum/barang laik jalan yang lulus uji di Kota Pangkalpinang*				80 %	80 %	592.807.000,00	339.102.264,00	254.835.180,00	-295.971.820,00			-					
																			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				5000 Unit	5000 Unit	86.909.000,00	115.124.088,00	95.841.700,00	38.632.700,00	Kota Pangkal Pinang, Se mua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	533.859.000,00	223.979.176,00	199.293.480,00	-334.654.520,00	Kota Pangkal Pinang, Se mua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota yang diinventarisir*				100 %	100 %	159.945.000,00	873.598.920,00	868.429.920,00	708.483.920,00			-					
																Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	159.945.000,00	873.598.920,00	868.429.920,00	708.483.920,00	Kota Pangkal Pinang, Se mua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Penetapan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase terusunnya laporan dokumen Penetapan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang tersusun*				100 %	100 %	86.512.000,00	86.512.000,00	30.703.000,00	-55.809.000,00			-					
																Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				4 Laporan	4 Laporan	49.384.000,00	49.384.000,00	20.384.000,00	-29.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Se mua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Pada Andalalin																		
			Jumlah peserta Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				2 Orang	2 Orang	20.459.000,00	20.459.000,00	0,00	-20.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Se mua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Penyelesaian Teknis Andalalin yang terawasi				4 Laporan	4 Laporan	16.869.000,00	16.869.000,00	10.319.000,00	-6.550.000,00	Kota Pangkal Pinang, Se mua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah dokumen/laporan pengendalian/pengawasan yang tersusun*				100 %	100 %	150.089.000,00	113.059.000,00	112.759.000,00	-37.330.000,00			-					
																Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	150.089.000,00	113.059.000,00	112.759.000,00	-37.330.000,00	Kota Pangkal Pinang, Se mua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		J U M L A H							**19.161.519.991,00**	**18.479.061.100,00**	**15.103.786.294,30**	**-1.957.724.656,70**							**1.750.000.000,00**	

BAB V
PENUTUP

A. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan untuk Urusan Perhubungan, Dinas Perhubungan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui DAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran Perubahan.

B. Kaidah–kaidah pelaksanaan

pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

C. Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja – OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang.

Rencana Kerja Perubahan OPD Tahunan ini akan dilaksanakan di tahun 2025 dengan memperhatikan pedoman dan peraturan yang harus dipatuhi. Perencanaan Tahun 2025 ini diharapkan bisa mengcover semuanya dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai tindak lanjutnya dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen saja.

Demikian rencana kerja perubahan OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pangkal Pinang, 28 Mei 2025
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pangkal Pinang,

Akhmad Subekti
Pembina Utama Muda
NIP 19660326 198603 1 004

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025

JL.RASAKUNDA, KELURAHAN BATU INTAN,
KECAMATAN GIRIMAYA,
KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI BANGKA BELITUNG

(0717) 421163

dikbud@pangkalpinangkota.go.id

https://dikbud.pangkalpinangkota.go.id

Made with PosterMyWall.com

KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025. Penyusunan dokumen ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Di dalamnya diamanatkan bahwa dokumen perencanaan dapat dirubah atau disesuaikan bilamana dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal urgent yang perlu dilakukan penyesuaian.

Sebagai perangkat daerah yang taat azas perencanaan pembangunan, keberadaan Dokumen Renja merupakan perpanjangan implementasi dari Dokumen Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan aspek strategis seperti program prioritas Kepala Daerah, Amanat Pencapaian SPM Pendidikan maupun ketercapaian keberhasilan urusan kebudayaan di Kota Pangkal Pinang yang sesuai dengan peraturan terkait. Dengan kata lain, seluruh program dan kegiatan yang tercantum di dalam Dokumen Renja Tahun 2025 sudah menterjemahkan program prioritas dan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah tersusun di dalam Renstra, khusus untuk tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat beberapa hal penting terkait program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026 dan Perubahan RKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini juga menjadi cerminan atas pencapaian tujuan dan sasaran Kota Pangkal Pinang untuk memajukan dunia pendidikan dan kebudayaan di Kota Pangkal Pinang.

Di akhir penyusunan Perubahan Dokumen Renja Tahun 2025 ini, kami mengucapkan Alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami selama penyusunan Renjaini serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Perubahan Renja ini dapat memaksimalkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan.

Pangkal Pinang, Mei 2025
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Pangkal Pinang

Erwandy, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 197207202006041004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **6**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 48
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50
2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD 2025 50

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **80**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 80
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81
3.3. Program dan Kegiatan 84

BAB IV PENUTUP **115**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (TC. 29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	7
Tabel 2.2 (TC 31)	Review Terhadap Perubahan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025	51
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan	81
Tabel 3.2	Keselarasan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	82
Tabel 3.3	Sasaran dan Target Indikator Sasaran	83
Tabel 3.1 (TC. 33)	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025	90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mempedomani ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pasal 343, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi
    a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau
    b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
2. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala Daerah dengan ketua DPRD
3. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan
4. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional. Keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan
5. Perubahan RKPD sebgaimana dimaksud pada ayat (1)
6. Perubahan RKPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan
    a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah
    b. Target sasaran pembangunan Daerah
    c. Prioritas pembangunan daerah
    d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;dan
    e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang berpedoman kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026, dengan arahan sebagai berikut :

- P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026;
- Perangkat daerah tidak boleh mengajukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan baru dalam P - Renja Tahun 2024 yang tidak ada dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2024 - 2026 (Tabel 6.1 Renstra Perangkat Daerah);
- Pagu Sebelum Perubahan pada P-Renja Tahun 2025 adalah pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2025.
- Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi (DAK Fisik/Non Fisik/DABA Provinsi/Dana Insentif Daerah,dll) yang belum ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Induk Tahun Anggaran 2025 untuk dilaporkan dan dicantumkan dalam P-Renja Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
20. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2015Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2015 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18);
26. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 56);
27. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 277).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah untuk mengusulkan kekurangan anggaran pada APBD induk 2025, serta untuk mencantumkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi (DAK Fisik/Non Fisik/DABA Provinsi/Dana Insentif Daerah,DAU yang ditentukan penggunaannya dll) yang belum ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Induk Tahun Anggaran 2025. Setiap perangkat daerah tidak terkecuali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang wajib melakukan perubahan dokumen Renja apabila dalam perjalanannya terdapat perubahan esensi Dokumen Renja baik dari segi anggaran maupun program dan kegiatan yang terkandung di dalamnya.

Hal ini adalah konsekuensi yang wajar, mengingat setiap perubahan yang terjadi di luar dokumen Renja yang telah ditetapkan sebelumnya harus tetap terekam dalam dokumen perencanaan. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah agar tersedianya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan APBD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistimatika Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD 2024

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dalam penyusunan Perubahan Dokumen Renja Tahun berjalan, Evaluasi hasil pelaksanaan Renja pada triwulan kedua tahun berkenaan diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan setiap tahun sebagai dasar dalam menentukan target kinerja pada tahun tahun berikutnya. Hal ini sangat penting karena dengan adanya evaluasi pada tahun sebelumnya dapat menjadi koreksi dan panduan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya sehingga penetuan target menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Evaluasi atas capaian pelaksanaan Renja triwulan kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 (TC 29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKAL PINANG
s/d TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	010101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75	186.207.462.976		75	173.609.438.592	18,01	30.678.581.809	18,01	30.678.581.809	24,01	17,67	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Indeks kepuasan pelayanan internal perangkat daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90			90		90		90		100,00		Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		010101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan	100	183.598.425.076		100	171.302.254.686	100	30.498.841.633	100	30.498.841.633	100,00	17,80	Kasubbag Keuangan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Satuan:%)												
3		010101 202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	1.268	183.458.425.076		1.268	171.283.254.686	1.268	30.498.841.633	1.268	30.498.841.633	100,00	17,81	Kasubbag Keuangan
4		010101 202003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	20.000.000		1	4.000.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Keuangan
5		010101 202004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	120.000.000		1	15.000.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Keuangan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12		010101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	80.000.000		100	25.000.000	25	0	25,00	-	25,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
14		010101205005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	1	80.000.000		1	25.000.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16		010101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.078.000.000		100	961.616.350	25	0	25,00	-	25,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17		010101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1	17.000.000		1	12.995.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)												
		010101 206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	400.000.000		1	193.750.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18		010101 206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	150.000.000		1	258.478.150	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
19		010101 206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	50.000.000		1	99.393.200	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
20		010101	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	2	6.000.000		2	2.000.000	2		2,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		206006	Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)												Kepegawaian
21		010101 206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	455.000.000		1	395.000.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
22			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100	50.000.000		100	35.000.000	25	0	25,00	-	25,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	50.000.000		1	35.000.000	0		-	-			Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22		010101 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.085.000.000		100	1.165.764.164	25	170.872.944	25,00	170.872.944	25,00	14,66	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
23		010101 208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	10.000.000		1	5.000.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
24		010101 208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	200.000.000		1	240.000.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
25		010101 208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	75.000.000		1	35.000.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)												
26		010101 208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	800.000.000		1	885.764.164	1	170.872.944	1,00	170.872.944	100,00	19,29	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
27		010101 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	316.037.900		100	119.803.392	25	8.867.232	25,00	8.867.232	25,00	7,40	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
28		010101 209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan	3	140.000.000		1	73.531.696	1	4.488.616	1,00	4.488.616	100,00	6,10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Satuan:Unit)												
29		010101 209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	55.000.000		1	25.000.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
30		010101 209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	121.037.900		1	21.271.696	1	4.378.616	1,00	4.378.616	100,00	20,58	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														**62,007**	**17,671**	
PREDIKAT KINERJA																
32	**-**	**010102**	**P R O G R A M P E N G E L O L A A N PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Negeri Berakreditasi**	**100**	**25.633.456.869**		**100**	**81.487.187.402**	**25,00**	**2.305.807.064**	**25,00**	**2.305.807.064**	**25,00**	**2,83**	**Bidang Pengelolaa Ketenagaan**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				minimal B												
				Capaian SPM Pendidikan Dasar	**100**			**100**		**90,48**		**90,48**		**90,48**		**Bidang Pengelolaa Ketenagaan**
				Capaian SPM Pendidikan Paud	**100**			**100**		**71,07**		**71,07**		**71,07**		**Bidang Pengelolaa Ketenagaan**
				Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	**100**			**100**		**76,30**		**76,30**		**76,30**		**Bidang Pengelolaa Ketenagaan**
				Proporsi Lulusan Program Guru Penggerak Yang diangkat menjadi Kepala Sekolah Dan Kepala Sekolah/Pengawas/Penilik (Paud/SD/SMP/Kesetaraan)	**100**			**100**		**100**		**100**		**100,00**		**Bidang Pengelolaa Ketenagaan**
33		010102201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Persentase guru Sekolah Dasar yang	87	15.915.863.424		87	46.692.049.734	87	1.633.250.824	87	1.633.250.824	100,00	3,50	Sub Koordinator Peserta Didik

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Dasar	berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)												dan Pendidikan Karakter
				Persentase satuan pendidikan berakreditasi B (Dengan Satuan:%)	100			100		100		100		100,00	0,00	Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas
				Iklim Keamanan SD	74,98			74,98		74,98		74,98		100,00	0,00	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian
				Iklim Kebhinekaan SD	74,05			74,05		74,05		74,05		100,00	0,00	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian
				Iklim Inklusivitas SD	58,53			58,53		58,53		58,53		100,00	0,00	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	84,09			84,09		84,09		84,09		100,00	0,00	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Dengan Satuan:%)	75,79			75,79		75,79		75,79		100,00	0,00	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian
35		010102 201006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	10	900.000.000		10	1.649.867.900			-	-		0,00	Sub Koordinator PTK DIKDAS
		010102	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang	54	2.448.000.		54	2.749.998			-	-		0,00	Sub Koordinator

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		201014	Sekolah	Tersedia		000			.410							PTK DIKDAS
41		010102 201025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	700	250.000.000		700	124.750.000			-	-		0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
42		010102 201026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Dengan Satuan:Orang)	344	8.567.763.424		344	8.223.763.424	344	1.633.250.824	344	1.633.250.824	100,00	19,86	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
43		010102 201029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Dengan Satuan:Satuan	89	100.000		89	30.802.980.000	89		89	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pendidikan)												Karakter
44		010102 201030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Dengan Satuan:Orang)	89	100.000.000		89	100.000.000	89		89	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
46		010102 201035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Dengan Satuan:Orang)	160	140.000.000		160	89.440.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
47		010102 201038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	200.000.000		1	46.900.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
48		010102 201039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	250.000.000		1	199.800.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
49		010102 201046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	450	250.000.000		450	171.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		010102 201048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25	760.000.000		25	650.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
51		010102 201049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Orang)	339	400.000.000		339	293.550.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
52		010102 201050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Dengan Satuan:Satuan	91	150.000.000		91	200.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pendidikan)												
53		010102 201051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	5	900.000.000		5	940.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Kesenian dan Perfilman
		010102 201054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450	600.000.000		450	450.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
54		010102 202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	91	5.563.709.641		91	22.552.181.240	91	459.075.752	91,00	459.075.752	100,00	2,04	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
				Persentase satuan pendidikan	100			100		100		100		100,00		Sub Koordinator Peserta Didik

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				berakreditasi B. (Dengan Satuan:%)												dan Pendidikan Karakter
				Iklim Keamanan SMP	71,10			71,10		71,05		71,05		99,93		Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
				Iklim Kebhinekaan SMP	75,00			75,00		75,05		75,05		100,07		
				Iklim Inklusivitas SMP	59,85			59,85		59,40		59,40		99,25		
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)	91,26			91,26		88,08		88,08		96,52		Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
				Rata-rata kompetensi	86,81			86,81		80,05		80,05		92,21		Sub Koordinator

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Dengan Satuan:%)												Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
56		010102 202012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	3	100.000.000		3	455.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
57		010102 202014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	1	227.068.345		1	350.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
62		010102 202025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	18	975.000.000		18	1.252.499.944	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator PAUD

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
63		010102 202032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	268	500.000.000		268	335.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
66		010102 202038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	700	300.000.000		700	113.910.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
67		010102 202039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	101	2.461.541.296		101	2.360.541.296	101	459.075.752	101	459.075.752	100,00	19,45	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pertama (Dengan Satuan:Orang)												
68		010102 202042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	27	100.000		27	16.741.680.000	27		27	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
71		010102 202048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Dengan Satuan:orang)	100	140.000.000		100	100.810.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
72		010102 202051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,	1	50.000.000		1	45.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Bidang Pendidikan	Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dengan Satuan:dokumen)												Pendidikan Karakter
73		010102 202052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:dokumen)	1	250.000.000		1	199.800.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
74		010102 202058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	28	35.000.000		28	200.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter
75		010102 202060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,	80	325.000.000		80	296.100.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Peserta Didik

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:orang)												dan Pendidikan Karakter
		010102 202062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	268	200.000.000		268	101.840.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	
76		010102 203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasu B	66	3.543.783.804		66	8.860.986.380	66	145.208.480	66	145.208.480	100,00	1,64	Sub Koordinator PAUD
				Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	70,43			70,43		70,43		70,43		100,00		Sub Koordinator PAUD

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				dalam pendidikan (APS)												
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kulifikasi S1/dIV	68			68		68		68		100,00		Sub Koordinator PAUD
80		010102 203011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	260	302.400.000		260	160.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator PAUD
82		010102 203015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Dengan Satuan:Orang)	30	2.333.932.800		30	1.993.250.880	58	145.208.480	58,00	145.208.480	100,00	7,29	Sub Koordinator PAUD
83		010102 203017	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan	104	190.000.003		104	299.994.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)												PAUD
84		010102 203018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	104	100.000		104	3.975.890 .000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator PAUD
85		010102 203019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Dengan Satuan:orang)	104	35.000.000		104	99.029.50 0			-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator PAUD
86		010102 203039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	363	50.000.001		363	282.930.0 00			-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator PAUD

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pendidikan	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Orang)												
		010102 203046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	27	50.000.000		27	1.749.892 .000			-	-	#DIV/0!	0,00	
		010102 203051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	582.351.00 0		4	300.000.0 00			-	-	#DIV/0!	0,00	
88		010102 204	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PNF yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C (Dengan	78	610.100.00 0		78	3.381.970 .048	78	68.272.008	78,00	68.272.008	100,00	2,02	Sub Koordinator Pendidikan Nonformal

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Satuan:%)												
89		010102 204010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	80	200.000.000		80	100.000.000			-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Pendidikan Nonformal
91		010102 204016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	8	100.000.000		8	119.959.000			-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Pendidikan Nonformal
92		010102 204017	Pengelolaan Dana BOP S e k o l a h N o n	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang	8	100.000		8	2.512.380.000			-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Kelembagaan dan SAPRAS

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Formal/Kesetaraan	Mengelola Dana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)												PAUD & PNF
94		010102 204027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dengan Satuan:dokumen)	1	200.000.000		1	259.599.000			-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Pendidikan Nonformal
95		010102 204046	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Dengan Satuan:didik)	459	110.000.000		459	390.032.048	459	68.272.008	459	68.272.008	100,00	17,50	Sub Koordinator Pendidikan Nonformal
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														**25,000**	**2,830**	
PREDIKAT KINERJA																

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
96	-	010103	P R O G R A M PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal (Dengan Satuan:%)	100	75.000.000		100	130.000.000	100	0	100,00	-	100,00	0,00	-
97		010103 201	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	90	75.000.000		90	130.000.000	90		90,00	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Pendidikan Nonformal
98		010103 201004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Dengan	117	75.000.000		90	130.000.000	0		-	-	#DIV/0!	0,00	Sub Koordinator Pendidikan Nonformal

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Satuan:Orang)												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														100,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA																
99	-	010104	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD (Dengan Satuan:%)	11	450.000.000		11	74.600.000	11	0	11	-	100,00	0,00	-
				Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	88			88		88		88		100,00	#DIV/0!	-
				Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	52			52		52		52		100,00	#DIV/0!	-

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
100		010104201	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rasio Pemenuhan Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	83	450.000.000		83	74.600.000	83	0	83	-	100,00	0,00	Sub Koordinator PAUD
101		010104201001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	250.000.000		1	33.300.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Sub Koordinator PAUD

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
102		010104201002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Laporan)	2	200.000.000		1	41.300.000	2		2,00		100,00	0,00	Sub Koordinator PAUD
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														**100,000**	**0,000**	
PREDIKAT KINERJA																
103	**-**	**010105**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional**	**100**	**215.000.000**		**100**	**45.745.400**	**100**	**0**	**100**	**-**	**100,00**	**0,00**	**Bidang Pengelolaa Ketenagaan**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(Dengan Satuan:%)												
				Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional (Dengan Satuan:%)	**88**			**88**		**88**		**88**		**100,00**	**#DIV/0!**	**Bidang Pengelolaa Ketenagaan**
104		010105201	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	100	125.000.000		100	14.000.000	100	0	100	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas
105		010105201001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	75.000.000		1	7.000.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(Dengan Satuan:dokumen)												
106		010105 201002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dengan Satuan:dokumen)	1	50.000.000		1	7.000.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas
107		010105 202	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Dengan Satuan:%)	100	90.000.000		100	31.745.400	100	0	100,00	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
108		010105 202001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dengan Satuan:dokumen)	1	60.000.000		1	17.926.400	1		1,00	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas
109		010105 202002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dengan Satuan:dokumen)	1	30.000.000		1	13.819.000	1		1,00	-	100,00	0,00	Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Dikdas
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														**100,000**	**0,000**	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											PREDIKAT KINERJA					
110	-	022202	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan (Dengan Satuan:%)**	**60**	**310.000.000**		**60**	**655.119.296**	**15**	**41.812.216**	**15,00**	**41.812.216**	**25,00**	**6,38**	**Bidang Kebudayaan**
111		022202201	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	125.000.000		100	238.050.000	25	12.000.000	25,00	12.000.000	25,00	5,04	Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseumann
112		022202201001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	8	125.000.000		8	238.050.000	1	12.000.000	1,00	12.000.000	12,50	5,04	Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuma

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)												nn
113		02220202	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Objek Kesenian tradisional Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	135.000.000		100	351.394.296	25	29.062.216	25,00	29.062.216	25,00	8,27	Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseumann
114		02220202001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	7	60.000.000		7	248.573.296	1	23.962.216	1,00	23.962.216	14,29	9,64	Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseumann
115		02220202002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	1	75.000.000		1	102.821.000	1	5.100.000	1,00	5.100.000	100,00	4,96	Sub Koordinator Cagar Budaya dan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pranata Tradisional (Dengan Satuan:Laporan)												Permuseumann
116		02220203	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	50.000.000		100	65.675.000	25	750.000	25,00	750.000	25,00	1,14	Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseumann
117		02220203001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	3	50.000.000		3	65.675.000	1	750.000	1,00	750.000	33,33	1,14	Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseumann
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														**25,000**	**6,382**	
PREDIKAT KINERJA																

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
123	-	022204	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Jumlah SDMyang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)**	**60**	**85.871.195**		**60**	**77.436.696**	**15**	**10.478.616**	**15,00**	**10.478.616**	**25,00**	**13,53**	**Bidang Kebudayaan**
124		022204 201	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan SDM Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	85.871.195		100	77.436.696	25	10.478.616	25,00	10.478.616	25,00	13,53	Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi
125		022204 201001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Dengan	100	24.800.000		100	50.165.000	10	5.100.000	10,00	5.100.000	10,00	10,17	Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Satuan:Orang)												
126		022204 201002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Dengan Satuan:Unit)	15	61.071.195		75	27.271.696	15	5.378.616	15,00	5.378.616	20,00	19,72	Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														**25,000**	**13,532**	
PREDIKAT KINERJA																
127	**-**	**022205**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan dan dikelola (Dengan Satuan:%)**	**80**	**778.110.950**		**80**	**196.283.092**	**10**	**10.007.232**	**10,00**	**10.007.232**	**12,50**	**5,10**	**Bidang Kebudayaan**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
128		022205201	Penetapan Cagar Budaya P e r i n g k a t Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	100	529.999.800		10	69.260.000	0	0	-	-	0,00	0,00	Sub Koordinator Cagar B u d a y a d a n Permuseumann
129		022205201001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Dengan Satuan:Objek)	3	264.999.950		5	14.510.000	0		-	-	0,00	0,00	Sub Koordinator Cagar B u d a y a d a n Permuseumann
130		022205201002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Objek)	3	264.999.850		10	54.750.000	0		-	-	0,00	0,00	Sub Koordinator Cagar B u d a y a d a n Permuseumann

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja Perngakat Daerah Th 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
										I						
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
131		0222052 02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:persen)	100	248.111.150		100	127.023.092	25	10.007.232	25,00	10.007.232	25,00	7,88	Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseumann
132		0222052 02001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Dengan Satuan:Objek)	4	248.111.150		4	127.023.092	1	10.007.232	1,00	10.007.232	25,00	7,88	Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseumann
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														**12,500**	**5,098**	
PREDIKAT KINERJA																
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)														**56,188**	**5,689**	
PREDIKAT KINERJA																

Berdasarkan data capaian kinerja dan anggaran yang telah dijabarkan tersebut, rata – rata **capaian kinerja dan anggaran** semua program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang hingga Tahun 2025 sampai dengan triwulan satu masing-masing sebesar **56,18%** dan **5,6%**. Tingginya capaian kinerja di triwulan I disebabkan indikator kinerja yang ditetapkan di semua program sudah tercapai di awal tahun anggaran dikarenakan sebagian besar indikator bersifat outcome (tidak serta merta dicapai dengan bantuan anggaran). Rendahnya serapan anggaran pada triwulan I dikarenakan sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai pada triwulan kedua.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah Tipe A menyelenggarakan urusan pendidikan dan bidang kebudayaan. Sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi organisasinya berdasarkan Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkal Pinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Penenetapan rencana kerja dinas;
5. pendidikan dan kebudayaan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya pada bawahan;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan yang membawahi:

1. Sekretaris;
2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
4. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
5. Bidang Kebudayaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis.

Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi unit kerja utama (jabatan Administrator) dibagi habis ke dalam kelompok pelaksana (jabatan Pengawas) sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris, secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
    1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
    2.1. Seksi Pendidikan Non Formal;
    2.2. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal.
3. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
    3.1. Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter;
    3.2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
4. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Ketenagaan secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
    4.1. Seksi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    4.2. Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan;
    4.3. Seksi PTK Pendidikan Dasar.
5. Tugas khusus, dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
    5.1. Kelompok Jabatan Fungsional;
    5.2. Unit Pelaksana Teknis.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang antara lain :

- Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Pendidikan Dasar) belum maksimal;
- Implementasi Kurikulum Merdeka belum terlaksana secara maksimal;
- Terbatasnya ketersediaan pengawas dan penilik sekolah;
- Belum maksimalnya penerapan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkeadilan;
- Komite Sekolah belum berfungsi dan berperan secara maksimal;
- Belum Tersedianya Guru Penggerak Jenjang PAUD, dan baru memiliki 2 orang calon guru Penggerak;
- Kurangnya sosialisasi tentang pelestarian tradisi lokal;
- Belum optimalnya pembinaan pelaku budaya di satuan pendidikan;
- Belum dimilikinya Gedung Kesenian sebagai tempat berekpresi budaya yang terpadu dan memadai.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2025

Review terhadap Perubahan RKPD 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan akhir RKPD 2025 dengan hasil analisis kebutuhan pada Renja Perubahan 2025, untuk mengantisipasi adanya perbedaan/catatan penting antara Rancangan akhir RKPD 2025 dengan hasil analisis kebutuhan pada Renja Perubahan 2025, baik dari sisi indikator, target indikator, berikut kebutuhan anggarannya. Berdasarkan review yang telah dilakukan, tidak terdapat perbedaan antara Rancangan Akhir RKPD 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dengan demikian, antara Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah sinkron dengan Rancangan Akhir RKPD 2025. Adapun review tersebut ditampilkan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 (TC 31)
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKAL PINANG

Rancangan Akhir Perubahan Renja 2025										Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2025									
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Sesudah Perubahan		Anggaran Sesudah Perubahan	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Sesudah Perubahan		Anggaran Sesudah Perubahan
					PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				240.802.236.677										240.802.236.677
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				239.831.012.943	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				239.831.012.943
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				239.831.012.943	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				239.831.012.943
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				170.006.770.973	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				170.006.770.973
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,5	NILAI								Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,5	NILAI	
						Indeks kepuasan pelayanan internal perangkat	90	NILAI								Indeks kepuasan pelayanan internal perangkat	90	NILAI	

						daerah										daerah			
1	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100	%	168.195.842.257	1	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100	%	168.195.842.257
1	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1268	orang/ bulan	168.186.342.257	1	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1268	orang/ bulan	168.186.342.257
1	01	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	2.000.000	1	01	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	2.000.000
1	01	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan akuntasnsi SKPD	1	Dokumen	7.500.000	1	01	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan akuntasnsi SKPD	1	Dokumen	7.500.000
1	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100	%	12.500.000	1	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100	%	12.500.000

1	01	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	12.500.000	1	01	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	12.500.000
1	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	472.440.950	1	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	472.440.950
1	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	16.497.500	1	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	16.497.500
1	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	168.111.950	1	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	168.111.950
1	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	60.681.500	1	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	60.681.500
1	01	01	2,06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	2	Dokumen	4.900.000	1	01	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	2	Dokumen	4.900.000

				6	undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan									undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
1	01	01	2,06	00009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	222.250.000	1	01	01	2,06	00009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	222.250.000
1	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.138.154.374	1	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.138.154.374
1	01	01	2,08	00001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	3.000.000	1	01	01	2,08	00001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	3.000.000
1	01	01	2,08	00002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	240.000.000	1	01	01	2,08	00002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	240.000.000
1	0	0	2,0	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan	1	laporan	35.000.000	1	01	01	2,0	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan	1	lapora	35.000.000

	1	1	8	03	Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							8	03	Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		n	
1	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	860.154.374	1	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	860.154.374
1	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100	%	187.833.392	1	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100	%	187.833.392
1	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	86.561.696	1	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	86.561.696
1	01	01	2,09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	3	Unit	30.000.000	1	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	3	Unit	30.000.000

				6		Dipelihara										Dipelihara			
1	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	71.271.696	1	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	71.271.696
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				69.586.280.270	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				69.586.280.270
						Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B	100	%								Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B	100	%	
						Capaian SPM Pendidikan Dasar	100	%								Capaian SPM Pendidikan Dasar	100	%	
						Capaian SPM Pendidikan PAUD	100	%								Capaian SPM Pendidikan PAUD	100	%	
						Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100	%								Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100	%	
						proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi	100	%								proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi	100	%	

						kepala sekolah dan pengawas/penilik (paud/sd/smp/kesetaraan).										kepala sekolah dan pengawas/penilik (paud/sd/smp/kesetaraan).			
1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				39.388.378.622	1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				39.388.378.622
						Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,86	%								Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,86	%	
						Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,61	%								Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,61	%	
						Persentase satuan pendidikan berakreditasi B	100%	%								Persentase satuan pendidikan berakreditasi B	100%	%	
						Iklim Keamanan SD	74,98	Nilai								Iklim Keamanan SD	74,98	Nilai	
						Iklim Kebinekaan SD	74,00	Nilai								Iklim Kebinekaan SD	74,00	Nilai	

						Iklim Inklusivitas SD	58,53	Nilai								Iklim Inklusivitas SD	58,53	Nilai	
						Persentase guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi S1/DIV	87%	%								Persentase guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi S1/DIV	87%	%	
1	01	02	2,01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	unit	1.860.094.000	1	01	02	2,01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	unit	1.860.094.000
1	01	02	2,01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli	54	paket	2.744.998.410	1	01	02	2,01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli	54	paket	2.744.998.410
1	01	02	2,01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	700	peserta didik	166.125.000	1	01	02	2,01	0023	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	700	peserta didik	166.125.000
1	01	02	2,01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah	344	orang	8.056.547.244	1	01	02	2,01	0006	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah	344	orang	8.056.547.244

						Dasar yang dikelola										Dasar yang dikelola			
1	01	02	2,01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	89	Satuan Pendidikan	22.536.150.000	1	01	02	2,01	0006	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	89	Satuan Pendidikan	22.536.150.000
1	01	02	2,01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	89	orang	78.000.000	1	01	02	2,01	0006	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	89	orang	78.000.000
1	01	02	2,01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	160	orang	81.960.000	1	01	02	2,01	0006	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	160	orang	81.960.000
1	01	02	2,01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	1	dokumen	37.100.000	1	01	02	2,01	0006	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	1	dokumen	37.100.000

						Pendidikan										Pendidikan			
1	01	02	2,01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan yang dilaksanakan	1	dokumen	199.800.000	1	01	02	2,01	0006	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan yang dilaksanakan	1	dokumen	199.800.000
1	01	02	2,01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	450	paket	171.000.000	1	01	02	2,01	0006	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	450	paket	171.000.000
1	01	02	2,01	0048	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabibitasi	25	unit	1.360.403.968	1	01	02	2,01	0006	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabibitasi	25	unit	1.360.403.968
1	01	02	2,01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	339	orang	373.800.000	1	01	02	2,01	0006	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	339	orang	373.800.000

1	01	02	2,01	00500	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar	91	Satuan Pendidikan	332.400.000	1	01	02	2,01	00006	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar	91	Satuan Pendidikan	332.400.000
1	01	02	2,01	00051	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	5	ruang	940.000.000	1	01	02	2,01	00006	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	5	ruang	940.000.000
1	01	02	2,01	00054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450	peserta didik	450.000.000	1	01	02	2,01	00054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450	peserta didik	450.000.000
1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				18.993.069.260	1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				18.993.069.260
						Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	91,26	%								Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	91,26	%	
						Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen	86,81	%								Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen	86,81	%	

						Nasional										Nasional			
						Persentase satuan pendidikan berakreditasi B	100%	%								Persentase satuan pendidikan berakreditasi B	100%	%	
						Iklim Keamanan SMP	71,10	Nilai								Iklim Keamanan SMP	71,10	Nilai	
						Iklim Kebinekaan SMP	75,00	Nilai								Iklim Kebinekaan SMP	75,00	Nilai	
						Iklim Inklusivitas SMP	59,85	Nilai								Iklim Inklusivitas SMP	59,85	Nilai	
						Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi S1/DIV	91%	%								Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi S1/DIV	91%	%	
1	01	02	2,02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun	3	UNIT	455.000.000	1	01	02	2,02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun	3	UNIT	455.000.000
1	01	02	2,02	0014	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	1	ruang	350.000.000	1	01	02	2,02	0014	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	1	ruang	350.000.000

						sedang/berat										sedang/berat			
1	01	02	2,02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli	18	paket	1.249.321.444	1	01	02	2,02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli	18	paket	1.249.321.444
1	01	02	2,02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	268	peserta didik	335.000.000	1	01	02	2,02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	268	peserta didik	335.000.000
1	01	02	2,02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	700	peserta didik	155.460.000	1	01	02	2,02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	700	peserta didik	155.460.000
1	01	02	2,02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	101	orang	2.251.307.816	1	01	02	2,02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	101	orang	2.251.307.816

1	01	02	2,02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	27	Satuan Pendidikan	13.133.130.000	1	01	02	2,02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	27	Satuan Pendidikan	13.133.130.000
1	01	02	2,02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	orang	100.840.000	1	01	02	2,02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	orang	100.840.000
1	01	02	2,02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	dokumen	37.150.000	1	01	02	2,02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	dokumen	37.150.000
1	01	02	2,02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan yang dilaksanakan	1	dokumen	199.700.000	1	01	02	2,02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan yang dilaksanakan	1	dokumen	199.700.000

1	01	02	2,02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar	28	Satuan Pendidikan	270.320.000	1	01	02	2,02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar	28	Satuan Pendidikan	270.320.000
1	01	02	2,02	0062	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	268	paket	101.840.000	1	01	02	2,02	0062	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	268	paket	101.840.000
1	01	02	2,02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	80	orang	354.000.000	1	01	02	2,02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	80	orang	354.000.000
1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD				7.696.680.752	1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD				7.696.680.752
						Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	66%	%								Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	66%	%	

						Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	74%	%								Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	74%	%	
						Persentase guru PAUD yang berkualifikasi S1/DIV	68%	%								Persentase guru PAUD yang berkualifikasi S1/DIV	68%	%	
1	01	02	2,03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	260	peserta didik	160.000.000	1	01	02	2,03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	260	peserta didik	160.000.000
1	01	02	2,03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan PAUD	30	orang	1.984.804.340	1	01	02	2,03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan PAUD	30	orang	1.984.804.340
1	01	02	2,03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	104	Satuan Pendidikan	369.401.300	1	01	02	2,03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	104	Satuan Pendidikan	369.401.300

1	01	02	2,03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	104	Satuan Pendidikan	2.505.740.000	1	01	02	2,03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	104	Satuan Pendidikan	2.505.740.000
1	01	02	2,03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	104	Orang	99.029.500	1	01	02	2,03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	104	Orang	99.029.500
1	01	02	2,03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	363	orang	327.500.000	1	01	02	2,03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	363	orang	327.500.000
1	01	02	2,03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang tersedia	27	paket	1.749.141.762	1	01	02	2,03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang tersedia	27	paket	1.749.141.762
1	01	02	2,03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4	Ruang	501.063.850	1	01	02	2,03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4	Ruang	501.063.850

						Sedang/Berat										Sedang/Berat			
1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PNF yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	78	%	3.508.151.636	1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PNF yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	78	%	3.508.151.636
1	01	02	2,04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	80	peserta didik	232.000.000	1	01	02	2,04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	80	peserta didik	232.000.000
1	01	02	2,04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	8	lembaga	120.209.000	1	01	02	2,04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	8	lembaga	120.209.000
1	01	02	2,04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga nonformal/kesetaraan yang mengelola Dana BOP	8	lembaga	2.512.380.000	1	01	02	2,04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga nonformal/kesetaraan yang mengelola Dana BOP	8	lembaga	2.512.380.000
1	01	02	2,0	002	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Jumlah Dokumen hasil	1	dokumen	260.849.000	1	01	02	2,04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Jumlah Dokumen hasil	1	dokumen	260.849.000

			4	7	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
1	01	02	2,04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar	459	peserta didik	382.713.636	1	01	02	2,04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar	459	peserta didik	382.713.636
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah megembangkan kurikulum muatan lokal	100	%	130.000.000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah megembangkan kurikulum muatan lokal	100	%	130.000.000
1	01	03	2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan	90	Dokumen	130.000.000	1	01	03	2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan	90	Dokumen	130.000.000
1	01	03	2,01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensin	117	orang	130.000.000	1	01	03	2,01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensin	117	orang	130.000.000

						ya										ya			
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				74.600.000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				74.600.000
						Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV	88	%								Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV	88	%	
						Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	52	%								Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	52	%	
						Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	11	%								Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	11	%	
1	01	04	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pemenuhan Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar	80	%	74.600.000	1	01	04	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pemenuhan Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar	80	%	74.600.000

1	01	04	2,01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Dokumen	33.300.000	1	01	04	2,01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Dokumen	33.300.000
1	01	04	2,01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	laporan	41.300.000	1	01	04	2,01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	laporan	41.300.000
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				33.361.700	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					33.361.700
						Persentase	100	%								Persentase	100	%		

						Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional										Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional			
						Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional	86	%								Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional	86	%	
1	01	05	2,01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar	100	%	8.500.000	1	01	05	2,01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar	100	%	8.500.000
1	01	05	2,01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen	4.250.000	1	01	05	2,01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen	4.250.000
1	01	05	2,01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan	1	Dokumen	4.250.000	1	01	05	2,01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan	1	Dokumen	4.250.000

					oleh Masyarakat	Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									oleh Masyarakat	Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	0 1	0 5	2, 0 2		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal	100	%	24.861.700	1	01	05	2,0 2		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal	100	%	24.861.700
1	0 1	0 5	2, 0 2	0 0 0 1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokum en	13.457.700	1	01	05	2,0 2	00 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Doku men	13.457.700
1	0 1	0 5	2, 0 2	0 0 0 2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	1	Dokum en	11.404.000	1	01	05	2,0 2	00 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	1	Doku men	11.404.000

						PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				971.223.734	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				971.223.734
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				971.223.734	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				971.223.734
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan	60	%	712.723.796	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan	60	%	712.723.796
2	22	02	2,01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang	100	%	333.070.000	2	22	02	2,01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang	100	%	333.070.000

2	2 2	0 2	2, 0 1	0 0 0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	8	Objek	333.070.000	2	22	02	2,0 1	00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	8	Objek	333.070.000
2	2 2	0 2	2, 0 2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Objek Kesenian tradisional Kota Pangkalpinang	100	%	313.978.796	2	22	02	2,0 2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Objek Kesenian tradisional Kota Pangkalpinang	100	%	313.978.796
2	2 2	0 2	2, 0 2	0 0 0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7	Objek	215.728.296	2	22	02	2,0 2	00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7	Objek	215.728.296
2	2 2	0 2	2, 0 2	0 0 0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	laporan	98.250.500	2	22	02	2,0 2	00 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	laporan	98.250.500

2	22	02	2,03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang	100	Lembaga	65.675.000	2	22	02	2,03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang	100	Lembaga	65.675.000
2	22	02	2,03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3	Objek	65.675.000	2	22	02	2,03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3	Objek	65.675.000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Jumlah SDM yang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan	60	%	77.436.696	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Jumlah SDM yang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan	60	%	77.436.696
2	22	04	2,01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan SDM Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang	100	%	77.436.696	2	22	04	2,01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan SDM Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang	100	%	77.436.696
2	22	04	2,01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	100	orang	50.165.000	2	22	04	2,01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	100	orang	50.165.000

					Kabupaten/Kota	Provinsi yang Diberdayakan									Kabupaten/Kota	Provinsi yang Diberdayakan			
2	2 2	0 4	2, 0 1	0 0 0 2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	15	Unit	27.271.696	2	22	04	2,0 1	00 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	15	Unit	27.271.696
2	2 2	0 5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan dan dikelola	80	%	181.063.242	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan dan dikelola	80	%	181.063.242
2	2 2	0 5	2, 0 1		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) Kota Pangkalpinang	28	%	66.760.000	2	22	05	2,0 1		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) Kota Pangkalpinang	28	%	66.760.000
2	2 2	0 5	2, 0 1	0 0 0 1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3	Objek	14.510.000	2	22	05	2,0 1	00 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3	Objek	14.510.000

2	2 2	0 5	2, 0 1	0 0 0 2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3	Objek	52.250.000	2	22	05	2,0 1	00 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3	Objek	52.250.000
2	2 2	0 5	2, 0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang	100	%	114.303.242	2	22	05	2,0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang	100	%	114.303.242
2	2 2	0 5	2, 0 2	0 0 0 1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	4	Objek	114.303.242	2	22	05	2,0 2	00 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	4	Objek	114.303.242

Setelah disandingkan, hasil evaluasi menunjukkan adanya keserasian antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, baik dari segi program dan kegiatan maupun besaran anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, antara rancangan perubahan RKPD dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang telah sinkron satu sama lain.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Cerdasnya kehidupan bangsa merupakan janji negara kepada seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama di tiap periode pemerintahan.

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025. Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, yang memuat 4 (empat) periode RPJMN. Pada periode RPJMN yang pertama (2005-2009), pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Lalu pada periode kedua (2009-2014), pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian pada periode ketiga (2015-2019), pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional. Dan pada periode keempat (2020-2024), pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing internasional.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyusunan dokumen Renja OPD merupakan satu kesatuan dengan penyusunan dokumen RKPD Pemerintah Daerah untuk tahun berkenaan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD dan RPJMN. Dikarenakan saat ini Kota Pangkal Pinang belum memiliki Kepala Daerah yang baru, maka dokumen perencanaan yang menjadi acuan adalah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan RPJMN yang menjadi patokan adalah RPJMN 2020-2024. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, untuk periode tahun 2020-2024 sistem pendidikan yang dibentuk adalah pendidikan yang mencetak anak bangsa menjadi insan yang berdaya saing di taraf internasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Adapun Tujuan dari Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan

No	Isu Strategis	Rumusan Tujuan
1	2	3
1	➢ Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD (capaian APS SD Tahun 2022 sebesar 99,7 persen); ➢ Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP (capaian APS SMP Tahun 2022 sebesar 98,9 persen);	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah
2	➢ Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian budaya benda dan tak benda di Kota Pangkalpinang.	Melindungi dan melestarikan budaya benda dan tak benda

Sasaran yang ingin dicapai dari Tujuan Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah **Meningkatnya APS Pendidikan Dasar**, dengan indikator APS SD dan SMP. Berdasarkan data capaian terakhir isu strategis, APS SD dan SMP Tahun 2022 masing-masing sebesar 99,7 dan 98,9 persen. Angka tersebut menunjukkan belum semua anak usia sekolah SD dan SMP yang bersekolah pada jenjang tersebut. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Pangkalpinan. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dari Tujuan melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda adalah **Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda**, dengan indikator Persentase Pelestarian Budaya Benda dan Benda.

Tabel 3.2.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Pembangunan
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	
1	2	3		4	5	
1.	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya APS Pendidikan Dasar	1.1.1.	*APS SD*
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah		1.1.2.	*APS SMP*
2.	Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda	2.1	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.1.1	*Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional*
					2.1.2	*Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan*

Secara lengkap sasaran serta target Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal pinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Sasaran dan Target Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi Tahun 2021	TARGET KINERJA SASARAN		
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
							Target	Target	Target
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah	Meningkatnya APS Pendidikan Dasar	1.1.1.	*APS SD*	*persen*	99,70	99,80	99,90	100,00
			1.1.2.	*APSSMP*	*persen*	98,90	90,00	90,2	90,25
2.	Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.1.1	*Persentase Cagar budaya yang terregistrasi secara nasional*	*persen*	61	70	80	91
			2.1.2	*Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan*	*persen*	60	70	80	90

Untuk urusan kebudayaan, target indikator sasaran yang ditetapkan berupa persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional dan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional;

   Hingga akhir periode Renstra yaitu tahun 2026, jumlah cagar budaya yang direncanakan akan diregistrasi secara nasional berjumlah 46 unit. Pencapaian target tersebut direncanakan bertahap dari tahun 2024 hingga tahun 2026.
2. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan;

   Hingga akhir periode Renstra yaitu tahun 2026, jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan di Kota Pangkal Pinang ditargetkan sebanyak 10 jenis. Pencapaian target tersebut direncanakan bertahap dari tahun 2014 hingga tahun 2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Penentuan Program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dijabarkan berikut ini :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Pengadaan Mebel Sekolah

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pengadaan Mebel Sekolah

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Perlengkapan Belajar Peserta Didik

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah

Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Pengelolaan Dana BOP PAUD

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
Penetapan Cagar Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Pelindungan Cagar Budaya

Total pagu perubahan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar Rp.240.802.236.677, dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp.250.607.036.676, sebagaimana diuraikan berikut ini :

TABEL 3.1 (TC 33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
	URUSAN PENDIDIKAN								**249.635.812.942**	**239.831.012.943**	**(9.698.639.997)**		
1:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**73,5**	**Nilai**	**75**	**Nilai**	**179.843.910.972**	**170.006.770.973**	**(9.837.139.999)**	**Sekdin DIKBUD**	
		Indeks kepuasan pelayanan internal peragkat daerah	**Indeks kepuasan pelayanan internal peragkat daerah**		***90***	**Nilai**	***90***	**Nilai**				**Sekdin DIKBUD**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP		100	%	100	%	***178.128.112.256***	***168.195.842.257***	***(9.932.269.999)***		
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		1.300	orang/bulan	1.268	orang/ bulan	*178.118.612.256*	*168.186.342.257*	*(9.932.269.999)*		
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD		1	dokumen	1	dokumen	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*		
1.01.01.2.02.0	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi		1	dokumen	1	dokumen	*7.500.000*	*7.500.000*	*0*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
004	Akuntansi SKPD	akuntansi SKPD	SKPD										
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**		100	**%**	100	**%**	***12.500.000***	***12.500.000***	***0***		
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		1	dokumen	1	dokumen	*12.500.000*	*12.500.000*	*0*		
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**		100	**%**	100	**%**	***448.940.950***	***472.440.950***	***23.500.000***		
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1	paket	1	paket	*6.497.500*	*16.497.500*	*10.000.000*		
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Yang Tersedia	Jumlah paket Bahan Logistik Yang Tersedia		1	paket	1	paket	*168.111.950*	*168.111.950*	*0*		
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		1	paket	1	paket	*50.081.500*	*60.681.500*	*10.600.000*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	dokumen	2	dokumen	*2.000.000*	*4.900.000*	*2.900.000*		
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat		1	laporan	1	laporan	*222.250.000*	*222.250.000*	*0*		
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100	**%**	100	**%**	***1.134.554.374***	***1.138.154.374***	***3.600.000***		
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	laporan	1	laporan	***0***	*3.000.000*	***3.000.000***		
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	laporan	1	laporan	*240.000.000*	*240.000.000*	***0***		
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	Laporan	1	Laporan	*35.000.000*	*35.000.000*	***0***		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1	laporan	1	laporan	*859.554.374*	*860.154.374*	***600.000***		
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar**	**Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik**		100	**%**	100	**%**	***119.803.392***	***187.833.392***	***68.030.000***		
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		7	unit	3	unit	*73.531.696*	*86.561.696*	*13.030.000*		
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainya Yang dipelihara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainya Yang dipelihara		8	unit	3	unit	*25.000.000*	*30.000.000*	*5.000.000*		
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi		1	unit	1	unit	*21.271.696*	*71.271.696*	*50.000.000*		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN**	Capaian SPM	Persentase satuan pendidikan negeri		100	%	100	%	**69.553.940.270**	**69.586.280.270**	**0**	KABID PEMBI	

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
	PENDIDIKAN	Pendidikan Dasar	berakreditasi minimal B		%		%					NAAN DIKDAS	
			Capaian SPM Pendidikan Dasar				100 %	%					
			Capaian SPM Pendidikan PAUD				100 %	%				KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF	
			Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan				100 %	%					
			proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas/penilik (paud/sd/smp/kesetaraan).				100	%				KABID PEMBINAAN KETENAGAAN	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional**	**Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional**				84,09	nilai	**39.375.778.622**	**39.388.378.622**	**12.600.000**	**Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar**	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD	**Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen**				75,79	nilai				**Kasi Kurikulum dan**	

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
		berdasarkan asesmen nasional	**nasional**									**Penilaian Pendidikan Dasar**	
		Persentase satuan pendidikan berakreditasi B	**Persentase satuan pendidikan berakreditasi B**				100 %	%				**Kasi Sapras Dikdas**	
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	**Iklim Keamanan SD**				74,98	nilai				**Kasi Kesiswaan**	
		Persentase guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi S1/DIV	**Iklim Kebhinekaan SD**				74,00	nilai				**Kasi Kesiswaan**	
			Iklim Inklusivitas SD				58,53	nilai				**Kasi Kesiswaan**	
			Persentase guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi S1/DIV				87%	%				**Kasi GTK Dikdas**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		*3*	unit	*10*	unit	*1.860.094.000*	*1.860.094.000*	*0*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli	Jumlah mebel yang dibeli		*20*	paket	*54*	paket	*2.744.998.410*	*2.744.998.410*	*0*		
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		450	peserta didik	450	peserta didik	*450.000.000*	*450.000.000*	*0*		
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik		700	peserta didik	700	peserta didik	*166.125.000*	*166.125.000*	*0*		
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola		344	orang	344	orang	*8.056.547.244*	*8.056.547.244*	*0*		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		89	Satuan Pendidikan	89	Satuan Pendidikan	*22.536.150.000*	*22.536.150.000*	*0*		
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		89	orang	89	orang	*78.000.000*	*78.000.000*	*0*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		75	orang	160	orang	*81.960.000*	*81.960.000*	*0*		
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		*1*	dokumen	*1*	dokumen	*37.100.000*	*37.100.000*	*0*		
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan yang dilaksanakan		*1*	dokumen	*1*	dokumen	*199.800.000*	*199.800.000*	*0*		
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		450	paket	450	paket	*171.000.000*	*171.000.000*	*0*		
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabibitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabibitasi		*2*	unit	*25*	unit	*1.360.403.968*	*1.360.403.968*	*0*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		*132*	orang	*339*	orang	*373.800.000*	*373.800.000*	*0*		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar		*91*	Satuan Pendidikan	*91*	Satuan Pendidikan	*319.800.000*	*332.400.000*	*12.600.000*		
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat		*4*	ruang	*5*	ruang	*940.000.000*	*940.000.000*	*0*		
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional**	**Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional**				86,81	**Nilai**	***18.987.669.260***	***18.993.069.260***	***5.400.000***	**Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar**	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan	**Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional**				91,26	**Nilai**				**Kepala Seksi Kurikulum dan Penilai**	

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
		asesmen nasional										**an Pendidikan Dasar**	
		Persentase satuan pendidikan berakreditasi B	**Persentase satuan pendidikan berakreditasi B**				100 %	**%**				**Kasi Sapras Dikdas**	
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah menengah pertama	**Iklim Keamanan SMP**				71,10	nilai				**Kasi Kesiswaan**	
		Persentase guru Sekolah Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi S1/DIV	**Iklim Kebhinekaan SMP**				75,00	nilai				**Kasi Kesiswaan**	
			Iklim Inklusivitas SMP				59,85	nilai				**Kasi Kesiswaan**	
			Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi S1/DIV				*91%*	**%**				**Kasi GTK Dikdas**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah		2	UNIT	3	UNIT	*455.000.000*	*455.000.000*	*0*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
		Dibangun	Dibangun										
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat		4	ruang	1	ruang	*350.000.000*	*350.000.000*	*0*		
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli	Jumlah mebel yang dibeli		3	paket	18	paket	*1.249.321.444*	*1.249.321.444*	*0*		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar		28	Satuan Pendidikan	28	Satuan Pendidikan	*264.920.000*	*270.320.000*	*5.400.000*		
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola		102	orang	101	orang	*2.251.307.816*	*2.251.307.816*	*0*		
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		268	peserta didik	268	peserta didik	*335.000.000*	*335.000.000*	*0*		
1.01.02.2.02.0	Pembinaan Minat, Bakat dan	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang		700	peserta didik	700	peserta didik	*155.460.000*	*155.460.000*	*0*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
038	Kreativitas Siswa	kompetensi/lomba akademik dan non akademik	kompetensi/lomba akademik dan non akademik										
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		27	Satuan Pendidikan	27	Satuan Pendidikan	*13.133.130.000*	*13.133.130.000*	*0*		
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50	orang	100	orang	*100.840.000*	*100.840.000*	*0*		
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		*1*	dokumen	*1*	dokumen	*37.150.000*	*37.150.000*	*0*		
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		*268*	paket	*268*	paket	*101.840.000*	*101.840.000*	*0*	-	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas		*80*	orang	*80*	orang	*354.000.000*	*354.000.000*	*0*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
	Pendidikan	Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Bidang Pendidikan yang dilaksanakan										
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan yang dilaksanakan		*1*	dokumen	*1*	dokumen	*199.700.000*	*199.700.000*	*0*		
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C**	**Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B**		75%	%	66%	%	**7.682.340.752**	**7.696.680.752**	**14.340.000**	Kasi Sapras Paud dan PNF	
		Angka Melanjutkan Siswa PAUD	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)**		50%	%	70.43%	%				Kasi PAUD	
		Persentase Guru PAUD yang berkualifikasi S1/DIV	**Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV**		68%	%	68%	%				Kasi GTK PAUD	
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2	paket	4	Ruang	*501.063.850*	*501.063.850*	*0*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik		260	peserta didik	260	peserta didik	*160.000.000*	*160.000.000*	*0*		
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang tersedia	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang tersedia		2	paket	27	paket	*1.749.141.762*	*1.749.141.762*	*0*		
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan PAUD		30	orang	30	orang	*1.984.804.340*	*1.984.804.340*	*0*		
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		104	Satuan Pendidikan	104	Satuan Pendidikan	*355.061.300*	*369.401.300*	*14.340.000*		
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP		104	Satuan Pendidikan	104	Satuan Pendidikan	*2.505.740.000*	*2.505.740.000*	*0*		
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD		104	Orang	104	Orang	*99.029.500*	*99.029.500*	*0*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		80	orang	363	orang	*327.500.000*	*327.500.000*	*0*		
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Proporsi jumlah satuan PNF yang mendapatlkan minimal akreditasi C**	**Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**		78%	%	78%	%	***3.508.151.636***	***3.508.151.636***	***0***	Kasi PNF	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	Jumlah peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik		80	peserta didik	80	peserta didik	*232.000.000*	*232.000.000*	*0*		
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	Jumlah Lembaga Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen		8	lembaga	8	lembaga	*120.209.000*	*120.209.000*	*0*		
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga nonformal/kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Jumlah lembaga nonformal/kesetaraan yang mengelola Dana BOP		8	lembaga	8	lembaga	*2.512.380.000*	*2.512.380.000*	*0*		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	dokumen	1	dokumen	*260.849.000*	*260.849.000*	*0*		
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar		459	peserta didik	459	peserta didik	*382.713.636*	*382.713.636*	*0*		
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase satuan pendidikan dasar yang telah megembangkan kurikulum muatan lokal**	**Persentase satuan pendidikan dasar yang telah megembangkan kurikulum muatan lokal**		**100**	**%**	**100**	**%**	**130.000.000**	**130.000.000**	**130.000.001**	KABID PEMBINAAN DIKDAS	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan**	**Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan**		90	**dokumen**	90	**dokumen**	**130.000.000**	**130.000.000**	**130.000.001**	**Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar**	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat		117	orang	117	orang	130.000.000	130.000.000	0		

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
	Dasar	Kompetensinya	Kompetensinya										
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV**	**Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV**		88%	%	88%	%	**74.600.000**	**74.600.000**	**74.600.000**	KABID PEMBINAAN KETENAGAAN	
		Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	**Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV**		52%	%	52%	%				KABID PEMBINAAN KETENAGAAN	
		Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	**Rasio Pengawas dan Penilik PAUD**		11%	%	11%	%				KABID PEMBINAAN KETENAGAAN	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Rasio Pemenuhan Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar**	**Rasio Pemenuhan Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar**		**80%**	**persen**	**80%**	**persen**	**74.600.000**	**74.600.000**	**74.600.000**	**Kasi Data dan TIK**	

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		3	dokumen	1	dokumen	*33.300.000*	*33.300.000*	*0*		
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		3	laporan	2	laporan	*41.300.000*	*41.300.000*	*0*		
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional**	**Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional**		**100 %**	**%**	**100 %**	**%**	**33.361.700**	**33.361.700**	**8.500.001**	KABID PEMBINAAN DIKDAS	
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional	**Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional**		**86%**	**%**	**86%**	**%**				KABID PEMBINAAN PAUD dan	

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
												PNF	
1.01.05.2.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase penerbitan izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar**	**Persentase penerbitan izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar**		100	%	100	%	***8.500.000***	***8.500.000***	***8.500.001***	**Kasi Sapras Dikdas**	
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul PerizinanPendidikan Dasaryang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi		1	**dokumen**	1	**dokumen**	*4.250.000*	*4.250.000*	*0*		
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	dokumen	1	dokumen	*4.250.000*	*4.250.000*	*0*		
1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase penerbitan izin Operasional Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal**	**Persentase penerbitan izin Operasional Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal**		**100, 00%**	%	**100, 00%**	%	***24.861.700***	***24.861.700***	***0***	**Kasi Sapras Paud dan PNF**	

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidkan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidkan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidkan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi		1	dokumen	1	dokumen	*13.457.700*	*13.457.700*	*0*		
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	dokumen	1	dokumen	*11.404.000*	*11.404.000*	*0*		
	KEBUDAYAAN								**971.223.734**	**971.223.734**			
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan**	**Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan**		**60**	**Persen**	**60**	**Persen**	**712.723.796**	**712.723.796**		**KABID KEBUDAYAAN**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan Daerah Kota**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan Daerah Kota**		100 %	%	100 %	%	***333.070.000***	***333.070.000***			

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
	Daerah Kabupaten/Kota	**Pangkalpinang**	**Pangkalpinang**										
2.22.02.2.01.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kabudayaan yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kabudayaan yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		8	Objek	8	Objek	*333.070.000*	*333.070.000*			
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelestarian Objek Kesenian tradisional Kota Pangkalpinang**	**Persentase Pelestarian Objek Kesenian tradisional Kota Pangkalpinang**		100 %	%	100 %	%	***313.978.796***	***313.978.796***			
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembagan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembagan dan Pemanfaatan		7	Objek	7	Objek	*215.728.296*	*215.728.296*			
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata		1	Laporan	1	Laporan	*98.250.500*	*98.250.500*			

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
		Tradisional	Tradisional										
2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang**	**Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang**		100 %	Lembaga	100 %	Lembaga	***65.675.000***	***65.675.000***			
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		3	Objek	3	Objek	*65.675.000*	*65.675.000*			
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Jumlah SDM yang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan**	**Persentase Jumlah SDM yang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan**		**60**	**Persen**	**60**	**Persen**	***77.436.696***	***77.436.696***		**KABID KEBUDAYAAN**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan SDM Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang**	**Persentase Pembinaan SDM Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang**		100 %	%	100 %	%	***77.436.696***	***77.436.696***			

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang yang Diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang yang Diberdayakan		100	Orang	100	Orang	*50.165.000*	*50.165.000*			
2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		15	Unit	15	Unit	*27.271.696*	*27.271.696*			
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan dan dikelola**	**Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan dan dikelola**		**80%**	**Persen**	**80%**	**Persen**	***181.063.242***	***181.063.242***		**KABID KEBUDAYAAN**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) Kota Pangkalpinang**	**Persentase Penetapan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) Kota Pangkalpinang**		100	%	100	%	*66.760.000*	*66.760.000*			
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftakan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftakan		3	Objek	3	Objek	*14.510.000*	*14.510.000*			

Kode rek	Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif			Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan		3	Objek	3	Objek	*52.250.000*	*52.250.000*			
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang**	**Persentase Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang**		100 %	%	100 %	%	*114.303.242*	*114.303.242*			
2.22.05.2.02.0001	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi		4	Objek	4	Objek	*114.303.242*	*114.303.242*			
TOTAL									**250.607.036.676**	**240.802.236.677**			

Pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang menuun pada perubahan RENJA disebabkan efisiensi anggaran. Dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp.240.802.236.677 tersebut, sebesar 69,84% merupakan anggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN , baik itu PNS maupun P3K. Disusul kemudian sebesar 16,89% merupakan anggaran Pengelolaan Dana BOS dan BOSP jenjang Paud , SD hingga SMP. Kemudian disusul dengan anggaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 16,86%. Selain mendapat Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapat alokasi Dana Alokasi Umum Spesific Grand sebesar Rp32.138.092.000. Selebihnya, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang dimaksimalkan untuk peningkatan implementasi kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana Paud, SD dan SMP, peningkatan kompetensi guru Paud, SD dan SMP, serta pengelolaan pendidikan lainnya.

BAB IV
P E N U T U P

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu wujud taat azas perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam amanat peraturan tersebut, setiap perangkat daerah wajib mengusulkan perubahan dokumen rencana program dan kegiatannya apabila sepanjang perjalanan tahun anggaran dibutuhkan penyesuaian secara signifikan , baik itu dari kegiatan maupun anggaran. Diharapkan dengan disusunnya dokumen ini, perangkat daerah dapat lebih maksimal dalam hal pencapaian target kinerja.

Pangkal Pinang, Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pangkal Pinang

Erwandy, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP.197207202006041O

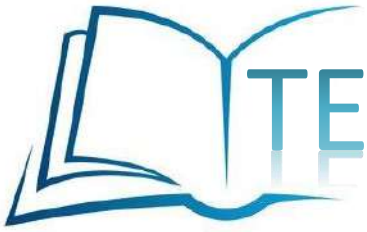

TERIMA KASIH

DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

JALAN RASAKUNDA, BATU INTAN, GIRIMAYA,
KOTA PANGKAL PINANG (33143)
Telepon (0717) 436772 Post-El dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id
Laman dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan dokumen ini dengan baik. Perubahan Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang meliputi pergeseran belanja dan penambahan anggaran kegiatan yang telah terdapat pada Rencana Kerja Induk 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Pangkal Pinang, Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang

ENDANG SUPRIYADI, S.T., M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760612 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... *ii*

DAFTAR ISI ..... *iii*

BAB I PENDAHULUAN *1*

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... *6*

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 18

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH *24*

BAB IV PENUTUP *28*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode sampai dengan Desember tahun 2025. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 memuat program dan kegiatan Tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, kebutuhan pagu. Renja ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 2);

14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang;
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah untuk merencanakan program/kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan program, kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
2	18	01			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***
2	18	01	2.02		***KEGIATAN*** ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
2	18	01	2.02	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2	18	01	2.05		***KEGIATAN*** ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
2	18	01	2.05	0002	SUB KEGIATAN Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelangkapannya
2	18	01	2.05	0009	SUB KEGIATAN Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
2	18	01	2.06		***KEGIATAN*** ***Administrasi Umum perangkat daerah***
2	18	01	2.06	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2	18	01	2.06	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2	18	01	2.06	0004	SUB KEGIATAN Penyediaan bahan logistik kantor
2	18	01	2.06	0005	SUB KEGIATAN Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2	18	01	2.06	0009	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
2	18	01	2.07		***KEGIATAN*** ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
2	18	01	2.07	0010	SUB KEGIATAN Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya
2	18	01	2.08		***KEGIATAN*** ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
2	18	01	2.08	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	18	01	2.08	0003	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2	18	01	2.08	0004	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2	18	01	2.09		***KEGIATAN*** ***pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***
2	18	01	2.09	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2	18	01	2.09	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	18	01	2.09	0009	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2	18	02			***PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL***
2	18	02	2.02		***KEGIATAN*** ***Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota***
2	18	02	2.02	0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota
2	18	03			***PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL***
2	18	03	2.01		***KEGIATAN*** ***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***
2	18	03	2.01	0002	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
2	18	04			***PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL***
2	18	04	2.01		***KEGIATAN*** ***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***
2	18	04	2.01	0005	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	04	2.01	0006	SUB KEGIATAN Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2	18	04	2.01	0008	SUB KEGIATAN Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
2	18	05			***PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL***
2	18	05	2.01		***KEGIATAN*** ***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***
2	18	05	2.01	0004	SUB KEGIATAN Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
2	18	05	2.01	0005	SUB KEGIATAN Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	0006	SUB KEGIATAN Pengawasan Penanaman Modal
2	18	06			***PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL***
2	18	06	2.01		***KEGIATAN*** ***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
2	18	06	2.01	0002	SUB KEGIATAN Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Hasil dari pelaksanaan Program/Kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Triwulan I tahun 2025 dan Pencapaian kinerja dapat dibagikan dalam tabel berikut ini :

TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	021801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	87,000	5.840.998.980	82,602	1.158.853.832		0		0		0	82,602	1.158.853.832	94,945	19,840	SEKRETARIS
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77,000		71,160								71,16		92,416		SEKRETARIS
				Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	4,640		0,213								0		4,593		SEKRETARIS
2		021801302	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksanaya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100,000	4.257.288.926	25,000	1.054.840.541		0		0		0	25	1.054.840.541	25,000	24,777	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3		021801302001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	34	4.257.288.926	28	1.054.840.541							28	1.054.840.541	82,353	24,777	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4		021801305	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	-33,000	68.400.000		0		0		0		0	0	-	0,000	0,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5		021801305002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	33.600.000									0	-	0,000	0,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6		021801305009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan: Orang)	10	15.000.000									0	-	0,000	0,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7		021801306	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100,000	843.686.350	100,000	32.523.216		0		0		0	100	32.523.216	100,000	3,855	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8		021801306001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	12.494.500									0	-	0,000	0,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9		021801J06002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	5	659.023.350									0	-	0,000	0,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10		021801J06004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	47.447.500									0	-	0,000	0,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11		021801J06005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2	49.501.000									0	-	0,000	0,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
12		021801J06009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	75.000.000	1	32.523.219							1	32.523.219	100,000	43,364	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13		021801J07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100,000	87.459.000	100,000	0	0		0		0		100	-	100,000	0,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		021801J07010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)	2	87.459.000									0	-	0,000	0,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		021801J08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100,000	452.791.312	100,000	50.212.543		0		0		0	100	50.212.543	100,000	11,090	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		021801J08002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	1	253.000.000	1	20.590.847							1	20.590.847	100,000	8,139	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		021801J08003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	1	43.150.000									0	-	0,000	0,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		021801J08004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	156.611.312	1	29.621.696							1	29.621.696	100,000	18,914	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19		0216013D9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100,000	131.200.392	97,681	21.274.532		0		0		0	98	21.274.532	97,681	16.215	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		0216013D9001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	58.931.696	1	8.003.616							1	8.003.616	100.000	13.581	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21		0216013D9002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	5	51.000.000	5	8.892.300							5	8.892.300	62.500	17.436	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		0216013D9009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	21.271.696		4.378.616							0	4.378.616	0.000	20.584	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				63,985	19,840	
													PREDIKAT KINERJA						
23	-	021802	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN (Dengan Satuan:Rp)	2,85	34.621.696	905,54	4.378.616		0		0		0	906	4.378.616	31794,096	12,647	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
24		021802202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	34.621.696		4.378.616		0		0		0	0	4.378.616	0.000	12,647	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
25		021802202004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	1	34.621.696		4.378.616							0	4.378.616	0.000	12,647	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				31794,096	12,647	
													PREDIKAT KINERJA						
26	-	021803	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN (Dengan Satuan:NB)	6.646	187.985.536	1.446	9.757.232		0		0		0	1.446	9.757.232	21,757	5,190	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27		021803201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event yang diikuti (Dengan Satuan:Event)	1	187.985.536		9.757.232		0		0		0	0	9.757.232	0,000	5,190	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
28		021803201002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Dokumen)	1	187.985.536		9.757.232							0	9.757.232	0,000	5,190	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	21,757	5,190	
PREDIKAT KINERJA																			
29	-	021804	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanganan pengaduan dan atau konsultasi masyarakat yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	87,000	231.468.480	0,000	27.743.080		0		0		0	0	27.743.080	0,000	11,986	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAN PELAYANAN PERIZINAN
30	-	021804201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Layanan)	3	231.468.480	3	27.743.080		0		0		0	3	27.743.080	100,000	11,986	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAN PELAYANAN PERIZINAN
31		021804201004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	7.550.000									0	-	0,000	0,000	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAN PELAYANAN PERIZINAN
32		021804201006	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	5.000	178.798.480	2.322	25.893.080							2322	25.893.080	46,440	14,482	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAN PELAYANAN PERIZINAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
33		021804J01008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Dengan Satuan: Kegiatan Usaha)	200	45.120.000	33	1.850.000							33	1.850.000	16,500	4,100	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAN PELAYANAN PERIZINAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	0,000	11,984	
PREDIKAT KINERJA																			
34	-	021805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM. (Dengan Satuan:%)	30,000	171.235.000	0,000	0		0		0		0	0	-	0,000	0,000	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPALA BIDANG DATA DAN SISTEM INFORMASI
35		021805J01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	171.235.000		0		0		0		0	0	-	0,000	0,000	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPALA BIDANG DATA DAN SISTEM INFORMASI
36		021805J01004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Dengan Satuan: Kegiatan Usaha)	7	5.500.000									0		0,000	0,000	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
37		021805J01005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dengan Satuan Pelaku Usaha)	150	143.605.000									0		0,000	0,000	KEPALA BIDANG DATA DAN SISTEM INFORMASI

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
38		021805201006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan , serta Dilakukan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Dengan Satuan: Kegiatan Usaha)	15	21.930.000									0		0,000	0,000	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	0,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA																			
39	-	021806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang diterbitkan secara online (Dengan Satuan:%)	100,000	127.415.068	2322	15.635.848		0		0		0	2.322	15.635.848	2322	12,272	KEPALA BIDANG DATA DAN SISTEM INFORMASI
40		021806201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:laporan)	1	127.415.068		15.635.848		0		0		0	0	15.635.848	0,000	12,272	KEPALA BIDANG DATA DAN SISTEM INFORMASI
41		021806201001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dengan Satuan: Dokumen)	1	127.415.068		15.635.848							0	15.635.848	0,000	12,272	KEPALA BIDANG DATA DAN SISTEM INFORMASI
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	2322,000	12,272	
PREDIKAT KINERJA																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	5700,304	10,322	
PREDIKAT KINERJA																			

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh program termasuk dalam kategori rendah sedangkan rata-rata capaian keuangan masih sangat rendah.

Penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.1.216.368.608 (18,45%) dari total APBD tahun 2025 sebesar Rp.6.593.724.780. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan dua, tiga dan empat tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkal Pinang dan kebijakan Wali kota;
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. penetapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f. pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatnya hasil evaluasi kinerja Layanan Penanaman Modal	Nilai hasil evaluasi kinerja	75	81,598	Sangat Baik
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN	500 M	Rp.4.897.235.335.715	Realisasi PMDN Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang memiliki dua sasaran dinas. Sasaran 1 yaitu nilai hasil evaluasi kinerja merupakan penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah berdasarkan Penilaian Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dan sasaran ke-2 (dua) yaitu nilai investasi PMDN merupakan jumlah perkembangan realisasi penanaman modal berdasarkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

Realisasi nilai hasil evaluasi kinerja Layanan Penanaman Modal tahun 2024 memperoleh nilai sangat baik, yaitu sebesar 81,598 dan realisasi nilai investasi PMDN tahun 2024 adalah sebesar Rp.4.897.235.335.715 yang diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2024.

2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berikut ini tercantum isu penting penyelenggaraan dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan masing-masing bidang, yang mungkin di kemudian hari dapat diselesaikan demi optimalnya pelaksanaan tugas :

1. Kurangnya penguatan iklim usaha dan daya tarik penanaman modal daerah;
2. Kurangnya kesadaran penanam modal dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, non perizian dan pengaduan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 mengalami perubahan yang signifikan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan perubahan dapat dilihat pada besaran anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing dan efisiensi belanja secara besar-besaran untuk menyiasati menurunnya pendapatan daerah dan pelaksanaan pilkada ulang tahun 2025.

Tabel berikut ini menyajikan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 berdasarkan rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**9.244.463.235,00**	**6.779.253.708,00**	**5.709.695.324,10**	**-3.534.767.910,90**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.244.463.235,00**	**6.779.253.708,00**	**5.709.695.324,10**	**-3.534.767.910,90**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9.244.463.235,00**	**6.779.253.708,00**	**5.709.695.324,10**	**-3.534.767.910,90**							**0,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				**4,64 77.00 87 % Nilai Nilai**	**4,64 77.00 87 % Nilai Nilai**	**8.429.868.735,00**	**5.944.513.444,00**	**5.030.191.132,10**	**-8.429.868.735,00**							**0,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*				100 %	100 %	6.488.587.085,00	4.257.288.926,00	4.304.613.828,10	-2.183.973.256,90			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6.488.587.085,00	4.257.288.926,00	4.304.613.828,10	-2.183.973.256,90	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*				-33 %	-33 %	103.750.000,00	83.600.000,00	35.000.000,00	-68.750.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	0 Paket	33.750.000,00	33.600.000,00	0,00	-33.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	5 Orang	70.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	756.704.650,00	918.686.350,00	142.663.300,00	-614.041.350,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.694.500,00	12.494.500,00	6.247.250,00	-2.447.250,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	496.817.650,00	659.023.350,00	0,00	-496.817.650,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	49.434.500,00	47.667.500,00	32.752.300,00	-16.682.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51.758.000,00	49.501.000,00	28.663.750,00	-23.094.250,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah*				100 %	0 %	175.459.000,00	87.459.000,00	0,00	-175.459.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	175.459.000,00	87.459.000,00	0,00	-175.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	718.978.000,00	466.275.776,00	386.710.612,00	-332.267.388,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	219.630.000,00	253.000.000,00	189.000.000,00	-30.630.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	53.150.000,00	43.150.000,00	43.150.000,00	-10.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	446.198.000,00	170.125.776,00	154.560.612,00	-291.637.388,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	186.390.000,00	131.203.392,00	161.203.392,00	-25.186.608,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	58.931.696,00	58.931.696,00	21.931.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	8 Unit	88.190.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-37.190.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	61.200.000,00	21.271.696,00	51.271.696,00	-9.928.304,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investasi PMDN**				**284812334 4741 Rp**	**284812334 4741 Rp**	**49.900.000,00**	**42.121.696,00**	**21.271.696,00**	**-49.900.000,00**							**0,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*jumlah laporan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00	42.121.696,00	21.271.696,00	-28.628.304,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49.900.000,00	42.121.696,00	21.271.696,00	-28.628.304,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor PMDN**				**6646 NIB**	**6646 NIB**	**249.500.000,00**	**226.500.000,00**	**187.108.928,00**	**-249.500.000,00**							**0,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah event yang diikuti*				1 Event	1 Event	249.500.000,00	226.500.000,00	187.108.928,00	-62.391.072,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	249.500.000,00	226.500.000,00	187.108.928,00	-62.391.072,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**persentase penanganan pengaduan dan atau konsultasi masyakarat yang diselesaikan**				**87 %**	**87 %**	**143.115.000,00**	**243.968.480,00**	**214.478.480,00**	**-143.115.000,00**							**0,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*jumlah Pelayanan yang dilaksanakan*				3 Pelayanan	3 Pelayanan	143.115.000,00	243.968.480,00	214.478.480,00	71.363.480,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	14.000.000,00	12.550.000,00	0,00	-14.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				13240 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	75.535.000,00	186.298.480,00	173.838.480,00	98.303.480,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	53.580.000,00	45.120.000,00	40.640.000,00	-12.940.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM**				**30.00 %**	**30.00 %**	**333.279.500,00**	**185.735.000,00**	**129.230.000,00**	**-333.279.500,00**							**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	333.279.500,00	185.735.000,00	129.230.000,00	-204.049.500,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				5 Kegiatan Usaha.	7 Kegiatan Usaha.	24.024.500,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-18.524.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				140 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	261.925.000,00	158.305.000,00	101.800.000,00	-160.125.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				9 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	47.330.000,00	21.930.000,00	21.930.000,00	-25.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase izin yang diterbitkan secara online**				**100 %**	**100 %**	**38.800.000,00**	**136.415.088,00**	**127.415.088,00**	**-38.800.000,00**							**0,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	38.800.000,00	136.415.088,00	127.415.088,00	88.615.088,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				3 Dokumen	1 Dokumen	38.800.000,00	136.415.088,00	127.415.088,00	88.615.088,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**9.244.463.235,00**	**6.779.253.708,00**	**5.709.695.324,10**	**-3.534.767.910,90**							**0,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan dari masyarakat kepada perangkat daerah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja (*work plan report*) tahun 2025 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategi (*strategic plan report*). Rencana strategi atau disebut dengan Renstra sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perkiraan maju. Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**9.244.463.235,00**	**6.779.253.708,00**	**5.709.695.324,10**	**-3.534.767.910,90**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.244.463.235,00**	**6.779.253.708,00**	**5.709.695.324,10**	**-3.534.767.910,90**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9.244.463.235,00**	**6.779.253.708,00**	**5.709.695.324,10**	**-3.534.767.910,90**							**0,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				**4,64 77.00 87 % Nilai Nilai**	**4,64 77.00 87 % Nilai Nilai**	**8.429.868.735,00**	**5.944.513.444,00**	**5.030.191.132,10**	**-8.429.868.735,00**							**0,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*				100 %	100 %	6.488.587.085,00	4.257.288.926,00	4.304.613.828,10	-2.183.973.256,90			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6.488.587.085,00	4.257.288.926,00	4.304.613.828,10	-2.183.973.256,90	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*				-33 %	-33 %	103.750.000,00	83.600.000,00	35.000.000,00	-68.750.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	0 Paket	33.750.000,00	33.600.000,00	0,00	-33.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	5 Orang	70.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	756.704.650,00	918.686.350,00	142.663.300,00	-614.041.350,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.694.500,00	12.494.500,00	6.247.250,00	-2.447.250,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	496.817.650,00	659.023.350,00	0,00	-496.817.650,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	49.434.500,00	47.667.500,00	32.752.300,00	-16.682.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51.758.000,00	49.501.000,00	28.663.750,00	-23.094.250,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah*				100 %	0 %	175.459.000,00	87.459.000,00	0,00	-175.459.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	175.459.000,00	87.459.000,00	0,00	-175.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	718.978.000,00	466.275.776,00	386.710.612,00	-332.267.388,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	219.630.000,00	253.000.000,00	189.000.000,00	-30.630.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	53.150.000,00	43.150.000,00	43.150.000,00	-10.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	446.198.000,00	170.125.776,00	154.560.612,00	-291.637.388,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	186.390.000,00	131.203.392,00	161.203.392,00	-25.186.608,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	58.931.696,00	58.931.696,00	21.931.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	8 Unit	88.190.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-37.190.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	61.200.000,00	21.271.696,00	51.271.696,00	-9.928.304,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investasi PMDN**				**284812334 4741 Rp**	**284812334 4741 Rp**	**49.900.000,00**	**42.121.696,00**	**21.271.696,00**	**-49.900.000,00**							**0,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*jumlah laporan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	49.900.000,00	42.121.696,00	21.271.696,00	-28.628.304,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49.900.000,00	42.121.696,00	21.271.696,00	-28.628.304,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor PMDN**				**6646 NIB**	**6646 NIB**	**249.500.000,00**	**226.500.000,00**	**187.108.928,00**	**-249.500.000,00**							**0,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah event yang diikuti*				1 Event	1 Event	249.500.000,00	226.500.000,00	187.108.928,00	-62.391.072,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	249.500.000,00	226.500.000,00	187.108.928,00	-62.391.072,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**persentase penanganan pengaduan dan atau konsultasi masyakarat yang diselesaikan**				**87 %**	**87 %**	**143.115.000,00**	**243.968.480,00**	**214.478.480,00**	**-143.115.000,00**							**0,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*jumlah Pelayanan yang dilaksanakan*				3 Pelayanan	3 Pelayanan	143.115.000,00	243.968.480,00	214.478.480,00	71.363.480,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	14.000.000,00	12.550.000,00	0,00	-14.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				13240 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	75.535.000,00	186.298.480,00	173.838.480,00	98.303.480,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	53.580.000,00	45.120.000,00	40.640.000,00	-12.940.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM**				**30.00 %**	**30.00 %**	**333.279.500,00**	**185.735.000,00**	**129.230.000,00**	**-333.279.500,00**							**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	333.279.500,00	185.735.000,00	129.230.000,00	-204.049.500,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				5 Kegiatan Usaha.	7 Kegiatan Usaha.	24.024.500,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-18.524.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				140 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	261.925.000,00	158.305.000,00	101.800.000,00	-160.125.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				9 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	47.330.000,00	21.930.000,00	21.930.000,00	-25.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase izin yang diterbitkan secara online**				**100 %**	**100 %**	**38.800.000,00**	**136.415.088,00**	**127.415.088,00**	**-38.800.000,00**							**0,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	38.800.000,00	136.415.088,00	127.415.088,00	88.615.088,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				3 Dokumen	1 Dokumen	38.800.000,00	136.415.088,00	127.415.088,00	88.615.088,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**9.244.463.235,00**	**6.779.253.708,00**	**5.709.695.324,10**	**-3.534.767.910,90**							**0,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja Perubahan berdasarkan Rencana Strategis Perubahan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya tujuan sasaran RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran tujuan sasaran RPD Kota Pangkal Pinang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkal Pinang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan tahunan, yang disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan kebijakan, dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyesuaian terhadap hasil evaluasi capaian kinerja tahun berjalan. Dokumen Renja-P ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan target pembangunan daerah, khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dalam proses penyusunannya, dokumen ini dirancang secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, RKPD Tahun 2025, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Pangkalpinang, Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Pangkalpinang

M. Belly Jawari, S. T., M. Si.
NIP. 19790725 200501 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR 4
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Landasan Hukum 8
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan Renja 10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga 12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Realisasi Capaian Pelaksanaan Anggaran 12
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga 24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 36
3.2. Telaah terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 37
3.2.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 37
3.2.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 38
3.3. Program dan Kegiatan 42
BAB IV RENJA DAN PENDANAAN 51
4.1. Program dan Kegiatan 51
BAB V PENUTUP 53

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja 7

Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah 15

Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 25

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 39

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 – 2026..... 40

Tabel T-C. 32 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang beserta Target Capaian Kinerja Tahun 2024-2026 41

Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan bagian dalam satu kesatuan siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja PD disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Pemerintah Daerah untuk mendukung ketercapaian target sasaran Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (PRenja) yang merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. P-Renja disusun oleh Perangkat Daerah (PD) sebelum menyusun P-RKPD. P-Renja yang disusun meliputi renja awal yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tentukan program-program strategis yang ada di setiap Perangkat Daerah yang merupakan renja akhir yang akan dituangkan ke dalam dokumen P-RKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan perubahan untuk menyesuaikan program kerja yang ada dalam suatu organisasi dalam tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah karena beberapa hal sebagai berikut :

a. Perubahan Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. Perubahan RENJA merupakan acuan OPD untuk menyesuaikan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2025.
c. Perubahan RENJA PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan RENJA PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
b. Program dalam Perubahan RENJA 2024 harus berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024–2026, Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007–2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.
c. Program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum MUSRENBANG.
d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar di bawah.

Gambar Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

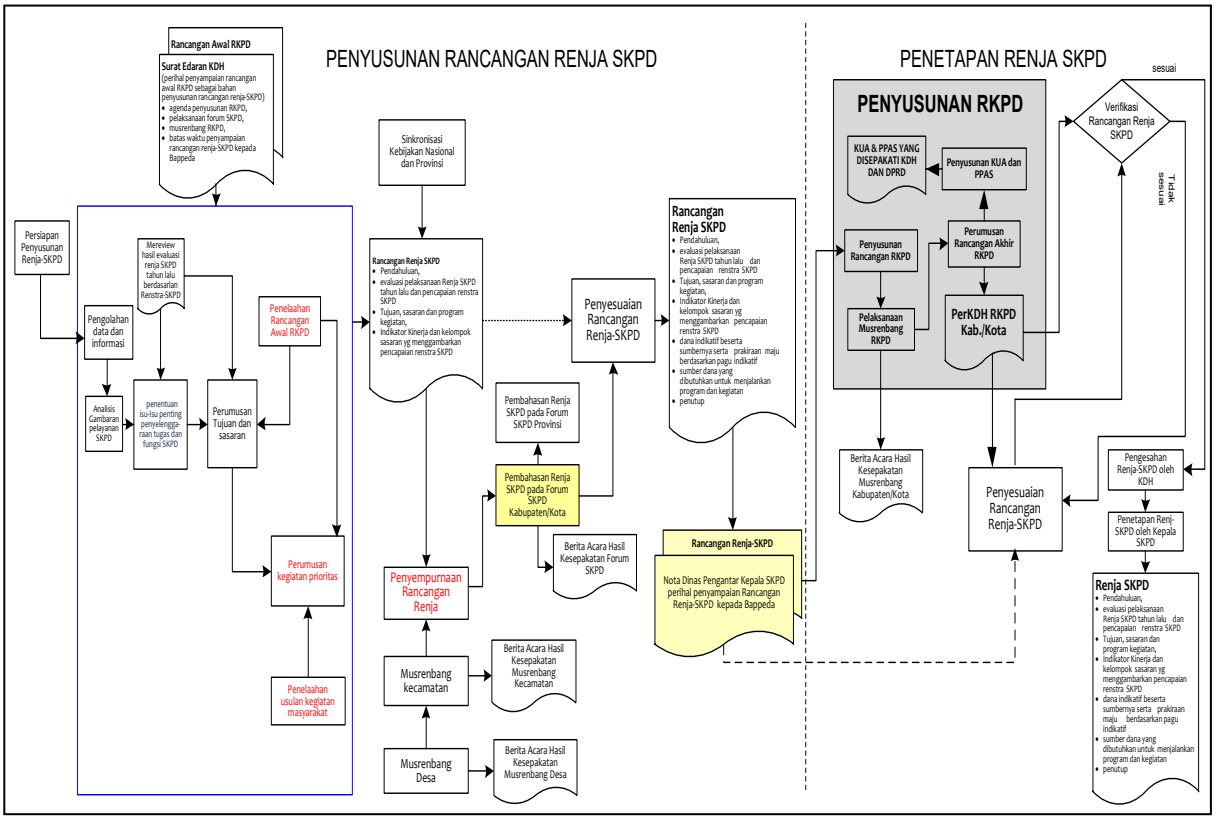

Perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 disusun untuk dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan olahraga di tahun 2025 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) ;
7. Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
13. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15).
14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 No. 277).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Perencanaan kinerja (Renja) Perubahan tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang dan hubungan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan arah kebijakan dan prioritas nasional yang yang terkati dengan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rencana kerja serta pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari penyusunan dokumen.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkal Pinang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam satu bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu Urusan Kepemudaan dan Urusan keolahragaan. Hasil Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Di tahun 2025 dilaksanakan 4 (Empat) program prioritas dengan 15 kegiatan prioritas. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :.

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan:
    1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, yang meliputi 2 sub kegiatan yaitu :
        i. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
        ii. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
    2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Meliputi Sub Kegiatan :
        i. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan:
    1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, yang meliputi Sub

kegiatan yaitu :

i. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaaan, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan:

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Meliputi Sub Kegiatan :
   i. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   i. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
   i. Pengembangan Organisasi Keolahragaan
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Rekreasi
   i. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan, Festival dan Olahraga Rekreasi
   ii. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kinerja Pelayanan Dispora akan dibahas antara lain:

a. Kinerja pelayanan Dispora berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan;

b. Kinerja pelayanan Dispora berdasarkan capaian realisasi anggaran.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Realisasi Capaian Pelaksanaan Anggaran

Analisis kinerja pelayanan Dispora berdasarkan realisasi capaian pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Bapperida dengan cara menganalisis hal-hal antara lain:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah; dan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kepemudaan, Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan nasional, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, dan melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas : menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdaasrkan kebijakan keolahragaan dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang setingkat Eselon II yang memiliki wewenang penyelenggaraan sebagian urusan wajib pemerintahan daerah dengan tugas pokok dan fungsi dititikberatkan pada urusan Kepemudaan dan urusan Keolahragaann. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kedua urusan wajib pemerintahan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang melaksanakan program kegiatan yang relevan serta bersinergi dengan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD maupun RPJMD Kota Pangkalpinang serta tidak terpisahkan dan atau menyimpang dari pencapaian visi dan misinya dalam memberikan pelayanan aparatur kepada pemerintah itu sendiri secara kelembagaan dan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai stakeholdernya.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) indikator urusan pemerintahan di bidang Kearsipan yakni persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, dan peningkatan SDM kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 15 Ayat (4) huruf q dan r, disebutkan bahwa urusan Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan yang harus masuk dalam program prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023, kedua urusan ini sudah masuk baik dalam perencanaan maupun pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan dalam RKPD dan APBD Kota Pangkalpinang tahun berkenaan program dan kegiatan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan secara rutin dianggarkan dan dilaksanakan. Atas perencanaan dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku harus dilakukan analisis terhadap pencapaian kinerja hasil dan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada tolak ukur / indikator kinerja kuncinya.

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka berikut ini kami sajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

TRIWULAN II

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda Dan Olahraga

Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	72	3.028.273.638		652.704.270		299.447.855		0		0	0	952.152.125	0	31	Sekretariat
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	95										0		0		Sekretariat
2		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan: %)	100	0	-	0											Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Program
3		2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	2	0	-	0											Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Program
5		2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	0	-	0											Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Program

6		**2.19.01.2.01.0006**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)**	**4**	**0**	**-**	**0**											**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Program**
7		**2.19.01.2.01.0007**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)**	**4**	**0**	**-**	**0**											**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Program**
8		**2.19.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP (Dengan Satuan: %)**	**100**	**2.441.502.154**		**618.553.958**		**177.779.381**		**0**		**0**	**0**	**796.333.339**	**0**	**33**	**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Program**
9		**2.19.01.2.02.0001**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/Bulan)**	**34**	**2.441.502.154**		**618.553.958**		**177.779.381**					**0**	**796.333.339**	**0**	**33**	**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Program**
10		**2.19.01.2.02.0005**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan: Laporan)**	**1**	**0**	**-**	**0**											**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Program**
11		**2.19.01.2.02.0007**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)**	**1**	**0**	**-**	**0**											**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Program**

12		2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	0	2.000.000		0		0		0		0	0	0		0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13		2.19.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	10	2.000.000	-	0							0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14		2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan: %)	75	30.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15		2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	1	0	-	0											Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16		2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan: Orang)	5	30.000.000	-	0							0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: %)	100	88.142.300		0		51.955.827		0		0	0	51.955.827	0	59	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18		2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	2.966.000	-	0		2.851.000					0	2851000	0	96	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	0	-	0							0		0		
19		2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2	12.842.500	-	0		300.000					0	300000	0	2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

20		**2.19.01.2.06.0005**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)**	**2**	**12.333.800**	**-**	**0**		**1.716.000**					**0**	**1716000**	**0**	**14**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
21		**2.19.01.2.06.0009**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)**	**4**	**60.000.000**	**-**	**0**		**47.088.827**					**0**	**47088827**	**0**	**78**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
22		**2.19.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan: %)**	**100**	**298.078.676**		**29.771.696**		**42.716.357**		**0**		**0**	**0**	**72.488.053**	**0**	**24**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
23		**2.19.01.2.08.0002**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)**	**4**	**130.000.000**	**-**	**0**		**28.566.509**					**0**	**28566509**	**0**	**22**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
24		**2.19.01.2.08.0003**	**Penyediaan, Jasa Peralatan dan Perlengkapa Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)**	**4**	**12.500.000**	**-**	**0**		**910.000**					**0**	**910000**	**0**	**7**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
25		**2.19.01.2.08.0004**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)**	**4**	**155.578.676**	**4**	**29.771.696**		**13.239.848**					**4**	**43011544**	**100**	**28**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
26		**2.19.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan: %)**	**100**	**168.550.508**		**4.378.616**		**26.996.290**		**0**		**0**	**0**	**31.374.939**	**0**	**19**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

27		**2.19.01.2.09.0001**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)**	**2**	**62.181.696**	**-**	**0**		**19.845.982**					**0**	**19845982**	**0**	**32**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
28		**2.19.01.2.09.0006**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)**	**1**	**35.097.116**	**-**	**0**		**5.461.000**					**0**	**5461000**	**0**	**16**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
29		**2.19.01.2.09.0009**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)**	**1**	**71.271.696**	**1**	**4.378.616**		**1.689.308**					**1**	**6067924**	**100**	**9**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**0.000**	**31.442**	
PREDIKAT KINERJA																			
30	**-**	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Dengan Satuan: %)**	**0.47**	**449.865.088**		**14.135.848**		**5.567.924**		**0**		**0**	**0**	**19.703.772**	**0**	**4**	**Bidang Pemuda**
				Persentase Cakupan Pembinaan Kepemudaan (Dengan Satuan: %)	**100**										**0**		**0**		**Bidang Pemuda**
				Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (Dengan Satuan: %)	**78.9**										**0**		**0**		**Bidang Pemuda**

31		**2.19.02.2.01**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: %)**	**100**	**269.834.088**		**14.135.848**		**5.567.924**		**0**		**0**	**0**	**19.703.772**	**0**	**7**	**Ketua Tim Pemberdayaan Pemuda**
32		**2.19.02.2.01.0010**	**Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Dokumen)**	**1**	**0**													**Ketua Tim Pemberdayaan Pemuda**
		2.19.02.2.01.0011	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Dengan Satuan: Orang)**	**80**	**78.811.696**	**80**	**5.378.616**		**2.189.308**					**80**	**7567924**	**100**	**10**	**Ketua Tim Pemberdayaan Pemuda**
33		**2.19.02.2.01.0015**	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Dengan Satuan: Orang)**	**240**	**191.022.392**	**240**	**8.757.232**		**3.378.616**					**240**	**12135848**	**100**	**6**	**Ketua Tim Pemberdayaan Pemuda**

35		**2.19.02.2.02**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: %)**	**100**	**180.031.000**		**149.700.000.**				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ketua Tim Infastruktur dan Kemitraan Pemuda**
36		**2.19.02.2.02.0003**	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaran Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Dengan Satuan: Organisasi)**	**1**	**180.031.000**	**1**	**149.700.000.**							**1**	**0**	**100**	**0**	**Ketua Tim Infastruktur dan Kemitraan Pemuda**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**0.000**	**4.380**	
PREDIKAT KINERJA																			
37	**-**	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pelatih Bersertifikasi (Dengan Satuan: %)**	**89**	**4.745.674.156**		**173.258.792**		**88.022.628**		**0**		**0**	**0**	**261.281.420**	**0**	**6**	**Bidang Olahraga**
				Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Dengan Satuan: %)	**100**										**0**		**0**		**Bidang Olahraga**
38		**2.19.03.2.01**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Atlet Berprestasi Tingkat SD dan SMP (Dengan Satuan: %)**	**66.67**	**1.325.543.816**	**0**	**163.501.560**		**64.250.780**		**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**Ketua Tim Peningkatan Prestasi Olahraga**
39		**2.19.03.2.01.0005**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dengan Satuan: Unit)**	**4**	**1.325.543.816**		**163.501.560**		**64.250.780**					**0**		**0**	**0**	**Ketua Tim Peningkatan Prestasi Olahraga**

		2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dengan Satuan: Dokumen)	1										0	0	0	#DIV/0!	Ketua Tim Peningkatan Prestasi Olahraga
40		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: %)	100	999.086.948		0		10.136.000		0		0	0	10.136.000	0	1	Ketua Tim Pembudayaan Olahraga
41		2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Kegiatan)	4	999.086.948				10.136.000					0	10136000	0	1	Ketua Tim Pembudayaan Olahraga
42		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Terbinanya Organisasi Keolahragaan Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: %)	100	2.272.500.000				0		0		0	0	0	0	0	Ketua Tim Peningkatan Prestasi Olahraga
43		2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Dokumen)	1	2.272.500.000									0	0	0	0	Ketua Tim Peningkatan Prestasi Olahraga
44		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Event Olahraga Rekreasi yang Dilaksanakan (Dengan Satuan: %)	100	148.543.392		9.757.232		13.635.848		0		0	0	23.393.080	0	16	Ketua Tim Pembudayaan Olahraga
45		2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2	100.000.000									0	0	0	0	Ketua Tim Pembudayaan Olahraga

				(Dengan Satuan: Dokumen)															
46		2.19.03.2.05.0010	Pemasalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional	Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dengan Satuan: Lembaga)	42	48.543.392		9.757.232		13.635.848					0	23393080	0	48	Ketua Tim Pembudayaan Olahraga
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0.000	5.506	
PREDIKAT KINERJA																		
47	-	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif dalam Kegiatan Kepramukaan (Dengan Satuan: %)	100	300.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	Bidang Pemuda
48		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (Dengan Satuan: %)	100	300.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	KetuaTim Infastruktur dan Kemitraan Pemuda
49		2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	1	300.000.000									0	0	0	0	0	Ketua Tim Infastruktur dan Kemitraan Pemuda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0.000	0.000	
PREDIKAT KINERJA																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																0.000	10.332	
PREDIKAT KINERJA																		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	meningkatnya kinerja dan komunikasi yang baik anter pegawai
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	minimnya komunikasi, atau rapat internal kepegawaian
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	meningkatnya kinerja dan komunikasi yang baik anter pegawai
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	melalukan evaluasi kegiatan yang sedang berjalan

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga

Disadari atau tidak bahwa dalam penyelenggaran Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, masih dihadapkan pada isu dan permasalahan, antara lain :

a. Rendahnya partisipasi pemuda dalam bidang kewirausahaan;
b. Kurangnya pembinaaan bagi pemuda berprestasi;
c. Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga;
d. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga.

Dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, maka digunakan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pengembangan karya dan prestasi pemuda melalui pelatihan dan penguatan kepemudaan
b. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan didukung dengan sarana olahraga yang baik dan pemberian penghargaan

Dalam melaksanakan strategi tersebut, diperlukan adanya arah kebijakan yang menjadi prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, yaitu:

a. Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan pemuda;
b. Peningkatan prestasi atlet;
c. Peningkatan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi.

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tahun 2025 dapat di lihat pada tabel T-C. 31 di bawah ini:

TABEL. T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				**14.482.806.526.00**	**11.366.184.900.00**	**8.523.812.882.00**	**-5.958.993.644.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**14.482.806.526.00**	**11.366.184.900.00**	**8.523.812.882.00**	**-5.958.993.644.00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**14.482.806.526.00**	**11.366.184.900.00**	**8.523.812.882.00**	**-5.958.993.644.00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**71 90 Nilai Nilai**	**71 90 Nilai Nilai**	**4.536.127.876.00**	**3.084.503.004.00**	**3.028.273.638.00**	**-644.317.810.00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	100 %	2.875.289.612.00	2.464.515.520.00	2.441.502.154.00	-433.787.458.00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	2.875.289.612.00	2.464.515.520.00	2.441.502.154.00	-433.787.458.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dau Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			3.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	-1.000.000.00	
	2.19.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah								

			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	-1.000.000.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	75 %	75 %	97.600.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	-67.600.000.00	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	47.600.000.00	0.00	0.00	-47.600.000.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	5 Orang	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	-20.000.000.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	179.708.500.00	169.752.300.00	88.142.300.00	-91.566.200.00	
	2.19.01.2.06.0001	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.001.000.00	5.966.000.00	2.966.000.00	-2.035.000.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	48.118.500.00	19.092.500.00	12.842.500.00	-35.276.000.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.589.000.00	24.693.800.00	12.333.800.00	-4.255.200.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	110.000.000.00	120.000.000.00	60.000.000.00	-50.000.000.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.320.399.764.00	299.684.676.00	298.078.676.00	-1.022.321.088.00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	110.000.000.00	130.000.000.00	130.000.000.00	20.000.000.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	7.500.000.00	12.500.000.00	12.500.000.00	5.000.000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1.202.899.764.00	157.184.676.00	155.578.676.00	-1.047.321.088.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	60.130.000.00	118.550.508.00	168.550.508.00	108.420.508.00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	53.380.000.00	62.181.696.00	62.181.696.00	8.801.696.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	6.750.000.00	35.097.116.00	35.097.116.00	28.347.116.00	Pendapatan Transfer
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0.00	21.271.696.00	71.271.696.00	71.271.696.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan** **Persentase cakupan pembinaan kepemudaan** **Persentase organisasi pemuda yang aktif**	**0,47 %** **100 %** **78,9 %**	**0,47 %** **100 %** **78,9 %**	**451.054.000.00**	**521.619.696.00**	**449.865.088.00**	**628.466.200.00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda kader Kabupaten /Kota Persentase terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda	100 %	100 %	426.845.000.00	341.317.696.00	269.834.088.00	-157.010.912.00	

			Pemula, dan Pemuda kader Kabupaten /Kota.							
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota								
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	89.014.000.00	0.00	0.00	-89.014.000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota								
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	80 Orang	80 Orang	123.470.000.00	101.286.696.00	78.811.696.00	-44.658.304.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota								
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	240 Orang	240 Orang	214.361.000.00	240.031.000.00	191.022.392.00	-23.338.608.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	24.209.000.00	180.302.000.00	180.031.000.00	155.822.000.00	

	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	24.209.000.00	180.302.000.00	180.031.000.00	155.822.000.00	Pendapatan Transfer
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Atlet Muda** **Cakupan Pelatih Bersertifikasi**	**100 %** **89 %**	**100 %** **89 %**	**9.195.624.650.00**	**7.460.062.200.00**	**4.745.674.156.00**	**864.375.350.00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi tingkat SD dan SMP Persentase atlet berprestasi tingkat SD dan SMP.	66.67 %	66.67 %	5.022.000.000.00	3.923.009.360.00	1.325.543.816.00	-3.696.456.184.00	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	4 Unit	4.822.000.000.00	3.823.009.360.00	1.325.543.816.00	-3.496.456.184.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000.00	100.000.000.00	0.00	-200.000.000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer

	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan even olahraga di Kabupaten/kota	100 %	100 %	1.238.499.800.00	999.086.948.00	999.086.948.00	-239.412.852.00	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.238.499.800.00	999.086.948.00	999.086.948.00	-239.412.852.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase terbinanya organisasi keolahragaan tingkat kota	100 %	100 %	2.500.000.000.00	2.300.000.000.00	2.272.500.000.00	-227.500.000.00	
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait								
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000.000.00	2.300.000.000.00	2.272.500.000.00	-227.500.000.00	Pendapatan Transfer
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase even olahraga rekreasi yang dilaksanakan	100 %	100 %	435.124.850.00	237.965.892.00	148.543.392.00	-286.581.458.00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	185.130.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	-85.130.000.00	Pendapatan Transfer
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional								

			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	42 Lembaga	42 Lembaga	249.994.850.00	137.965.892.00	48.543.392.00	-201.451.458.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase organisasi pramuka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan**	**100 %**	**100 %**	**300.000.000.00**	**300.000.000.00**	**300.000.000.00**	**200.000.000.00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	100 %	300.000.000.00	300.000.000.00	300.000.000.00	0.00	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah								
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000.00	300.000.000.00	300.000.000.00	0.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
J U M L A H						**14.482.806.526.00**	**11.366.184.900.00**	**8.523.812.882.00**	**-5.958.993.644.00**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional merujuk pada Visi Kementrian Pemuda dan Olahraga tahun 2020 – 2024, yaitu: Kementrian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Dalam Rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementrian Pemuda dan Olahraga adalah :

a. Mengembangkan kebijakan Pembangunan kepemudaan yang adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan.
b. Mendorong peningkatan pemasalah dan pembudayaan olahraga yang komprehensif kepada seluruh lapisan Masyarakat dan didukung dengan pengembangan industry olahraga serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri olahraga, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan secara berjenjang, sistematis dan berkesinambungan.
c. Meningkatkan tata Kelola dan kapasitas kelembagaan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Dari visi misi diatas maka dirumuskan tujuan Kemenpora yaitu sebagai berikut :

a. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan serta berkualitas dan berkontribusi dalam Pembangunan dan kemajuan bangsa;
b. Mewujudkan Masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul dan industri olahraga yang maju serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di Tingkat dunia;
c. Mewujudkan tata Kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu.

Sasaran strategis yang ingin dicapai kementrian Pemuda dan Olahraga tahun 2020 – 2024 adalah :

a. "Terwujudnya Pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing" dengan Indikator Indeks Pembangunan Pemuda dan Tingkat Pelaksanaan Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan. Indeks Pembangunan Pemuda disusun sebagai salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, serta merefleksikan capaian dari upaya pembangunan Pemuda.
b. "Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di Tingkat Asia dan Dunia"; dengan indikator sebagai berikut :
    1) Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir
    2) Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat
    3) Peringkat pada Asean Games
    4) Jumah Perolehan Medali Emas pada Olimpiade
    5) Jumlah Perolehan Medali Emas Paralimpiade
    6) Persentase atlet junior yang berprestasi ditingkat internasional
    7) Tingkat Prestasi olahraga Indonesia pada Level Internasional
c. "Terwujudnya Kementrian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani" dengan indikator Indeks Reformasi dan Birokrasi, Opini BPK atas Laporan keuangan dan Indeks Pelayanan Publik

Sesuai tugas dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mendukung Pencapaian sasaran pertama dan kedua pada sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga yaitu dengan sasaran strategis :

a. Meningkatnya Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi; dan
b. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri.

3.2. Telaah terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan

dicapai dalam pelaksanaan Renstra Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

a. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Provinsi
   Indikator : Persentase prestasi olahraga pada kejuaraan tingkat provinsi
b. Meningkatkan wirausaha muda yang mandiri
   Indikator : Persentase wirausaha muda yang mandiri/mapan

3.2.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

a. Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi di tingkat Provinsi
   Indikator : Persentase pembinaan cabang olahraga
b. Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
   Indikator : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka pencapaian

Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
Mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Provinsi	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi di tingkat Provinsi	Persentase prestasi olahraga pada kejuaraan tingkat provinsi
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.	Realisasi Investasi	Meningkatkan wirausaha muda yang mandiri	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Definisi Operasional
Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Provinsi	Persentase prestasi olahraga pada kejuaraan tingkat provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi pada event olahraga di Tingkat Provinsi dibagi jumlah seluruh atlet yang ada di Kota Pangkalpinang
Meningkatkan wirausaha muda yang mandiri	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	Jumlah Pemuda yang berwirausaha di Kota Pangkalpinang dibagi jumlah seluruh Pemuda yang ada di Kota Pangkalpinang

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya.

Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. :

Tabel T-C. 32

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Pangkalpinang Beserta Target Capaian Kinerja Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Target Kinerja			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
Meningkatkan Prestasi Olahraga ditingkat provinsi		Persentase prestasi olahraga pada kejuaraan tingkat provinsi	%		46	49	53	53
	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi ditingkat provinsi	Persentase pembinaan cabang olahraga	%		100	100	100	100
Meningkatkan Wirausaha Muda yang Mandiri		Persentase wirausaha muda yang mandiri/mapan	%		0,82	0,95	1,04	1,04
	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%		0,20	0,22	0,24	0,24

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegritasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.1.1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Perancangan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    1) Penyusunan dokumen perancangan perangkat daerah
    2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
    3) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
    4) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    5) Evaluasi kinerja perangkat daerah
b. Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan semesteran SKPD
c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
    2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
d. Administrasi umum perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    1) Penyediaan kompponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
    2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    3) Penyediaan peralatan rumah tangga
    4) Penyediaan bahan logistik kantor
    5) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
    6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Pengadaan kendaran dinas operasional atau lapangan
   2) Pengadaan moubelair
   3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
   4) Pengadaan asset tak terwujud
f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   2) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak, kendaraan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   2) Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya
   3) Pemeliharaan dan rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya

1.2.2. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Koordinasi, sinkronisasi dan penyelengaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor
   2) Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula
   3) Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskrimatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan

4) Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda dan berjasa atau berprestasi
5) Penyelengaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera

b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota

1.2.3. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelengaraan kompetisi oleh satuan Pendidikan dasar
   2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota
b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyelengaraan kejuaraan olahraga multi even dan single even tingkat kabupaten/kota
   2) Penyelengaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota
c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Seleksi atlet daerah
   2) Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota (ppop)
   3) Pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota
d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Pengembangan organisasi keolahragaan (BAPOPSI + KONI)
e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyelengaraan pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi
   2) Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat

1.2.4. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 terlampir dalam Tabel T-C.33. di bawah ini :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	2	3	4	5	6	7
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			**8.523.812.882.00**		**15.531.330.266.00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**8.523.812.882.00**		**15.531.330.266.00**
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**8.523.812.882.00**		**15.531.330.266.00**
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**71 Nilai** **90 Nilai**	**3.028.273.638.00**		**3.891.810.066.00**
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	0.00		14.000.000.00
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0.00		3.500.000.00
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0.00		3.500.000.00
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0.00		3.500.000.00
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0.00		3.500.000.00
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	2.441.502.154.00		2.955.876.916.00
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	2.441.502.154.00		2.948.876.916.00
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0.00		3.500.000.00
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0.00		3.500.000.00
	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-		2.000.000.00		4.000.000.00
	2.19.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah					
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	10 Dokumen	2.000.000.00		4.000.000.00
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	75 %	30.000.000.00		104.250.000.00
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0.00		52.250.000.00
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	30.000.000.00		52.000.000.00
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	88.142.300.00		311.000.000.00
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.966.000.00		7.000.000.00
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.00		110.000.000.00
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.842.500.00		17.000.000.00
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.333.800.00		17.000.000.00
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	60.000.000.00		160.000.000.00
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	298.078.676.00		361.350.650.00
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	130.000.000.00		175.000.000.00
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12.500.000.00		5.225.000.00
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	155.578.676.00		181.125.650.00
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	168.550.508.00		141.332.500.00
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	62.181.696.00		97.000.000.00
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	35.097.116.00		21.500.000.00
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	71.271.696.00		22.832.500.00
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Persentase Cakupan Pembinaan Kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	**0,47 % 100 % 78,9 %**	**449.865.088.00**		**1.079.520.200.00**

	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda kader Kabupaten /Kota Persentase Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota.	100 %	269.834.088.00		579.520.200.00
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0.00		175.000.000.00
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota					
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	80 Orang	78.811.696.00		110.370.000.00
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota					
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	240 Orang	191.022.392.00		294.150.200.00
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	180.031.000.00		500.000.000.00
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaran Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota					
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	180.031.000.00		500.000.000.00
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pelatih Bersertifikasi**	**100 % 89 %**	**4.745.674.156.00**		**10.060.000.000.00**
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat SD Dan SMP Persentase Atlet Berprestasi Tingkat SD dan SMP.	66.67 %	1.325.543.816.00		1.850.000.000.00

	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota					
			Jumlah Sarana Dan Prasarana Olahraga Di Tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	1.325.543.816.00		1.500.000.000.00
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	0.00		350.000.000.00
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga di Kabupaten/Kota	100 %	999.086.948.00		1.500.000.000.00
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	999.086.948.00		1.500.000.000.00
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Terbinanya Organisasi Keolahragaan Tingkat Kota	100 %	2.272.500.000.00		6.000.000.000.00
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait					
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.272.500.000.00		6.000.000.000.00
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Event Olahraga Rekreasi yang Dilaksanakan	100 %	148.543.392.00		710.000.000.00
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen	100.000.000.00		335.000.000.00
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional					
			Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	42 Lembaga	48.543.392.00		375.000.000.00
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif dalam Kegiatan Kepramukaan**	**100 %**	**300.000.000.00**		**500.000.000.00**
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	300.000.000.00		500.000.000.00
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	300.000.000.00		500.000.000.00
	J U M L A H				**8.523.812.882.00**		**15.531.330.266.00**

BAB IV
RENJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metode pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen Renja dan memberi catatan batas waktu (*deadline*) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.
b. Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.
c. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metode dan jadwal pelaksanaan.

Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadaidan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Informasi pagu indikatif bagi setiap Perangkat Daerah dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan kepada Perangkat Daerah. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Pagu indikatif Perangkat Daerah dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah maupun dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan. Dari langkah-langkah diatas maka Dinas Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dengan tabel T-C.33.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya tujuan kota Pangkal Pinang serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga ditujukan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari Anggaran APBD Perubahan Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu.

Dengan adanya Renja Perubahan ini, maka penerapan prioritas Pembangunan merupakan Upaya penjabaran tujuan dan sasaran OPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD Lingkup Pemerintah Kota Pangkal Pinang maupun dnegan OPD yang membidangi fungsi lain.

Pangkalpinang, Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Pangkalpinang

M. Belly Jawari, S. T., M. Si.
NIP. 19790725 200501 1 008

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) PerubahanTahun 2025 ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukannya. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam bekerja serta dalam membangun Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 28 Mei 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG

Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAKB TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAKB 31

2.3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DPPPAKB 48

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 49

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 78

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 78

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 81

3.3 Program dan Kegiatan 90

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 120

BAB V PENUTUP 137

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C. 29. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2025..... 10

Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 51

Tabel T-C. 32. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPPAKB Beserta Target Capaian Tahun 2024-2026. 88

Tabel T-C. 33. Rumusan Rencana Program Dinas PPPAKB Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 96

Tabel T-C. 34. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PPPAKB Tahun 2025..... 122

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan DPPPAKB Tahun 2025 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) DPPPAKB Tahun 2024-2026.
2. Renja Perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA Perubahan dan PPAS Perubahan serta perencanaan program kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025. Renja Perubahan Perangkat Daerah berpedoman pada Dokumen Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Tata Cara Perubahan PPJPD, RPJMD dan RKPD antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang dan Renstra DPPPAKB Tahun 2024-2026.

3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

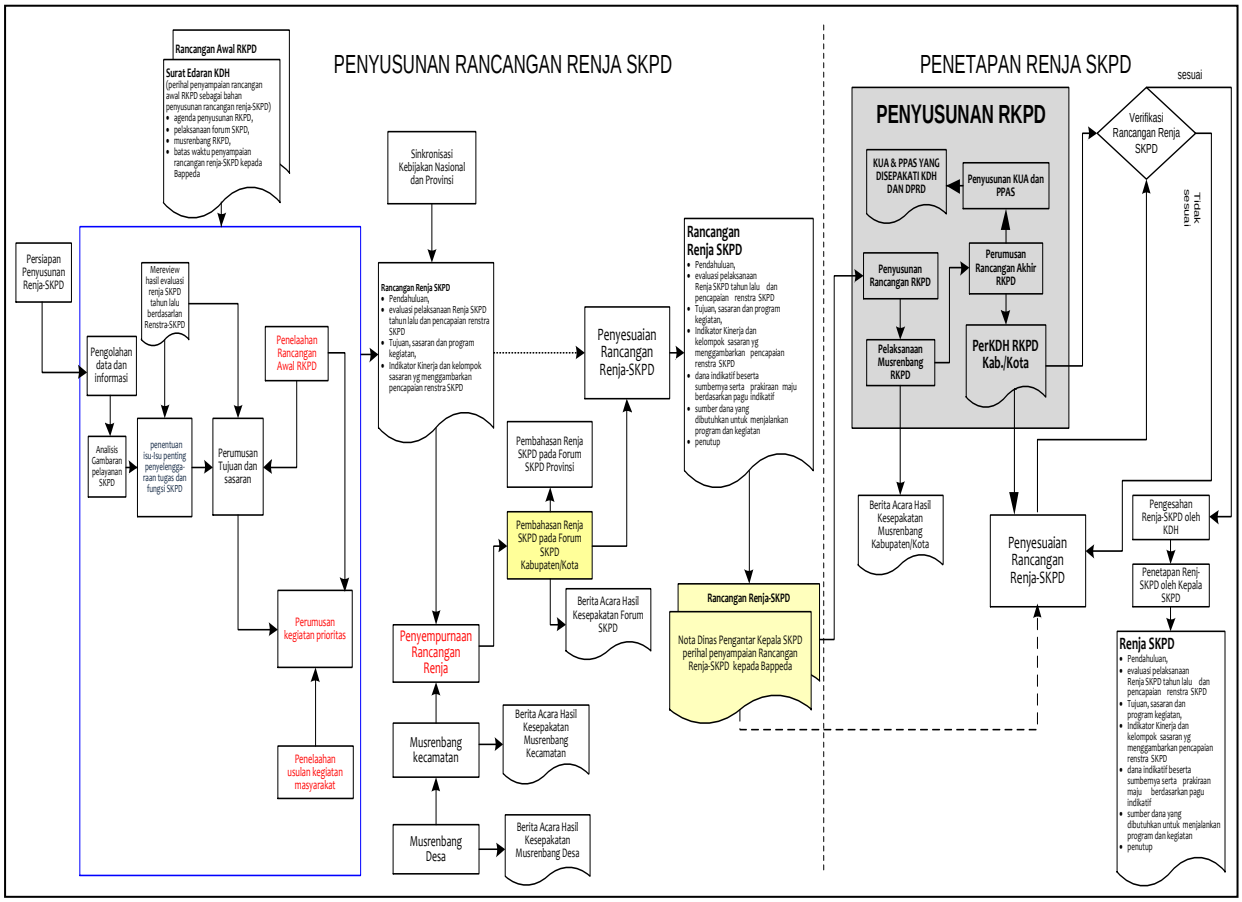

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaran urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagi berikut:

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
   Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga
   Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga
3. Mewujudkan Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik
   Indikator : Persentase Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Sasasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
   Indikator : Persentase Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
2. Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
   Indikator : Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

3. Meningkatnya Nilai KLA
   Indikator : Predikat Kota Layak Anak
4. Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang
   Indikator : Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun
5. Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera
   Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut :

1.	Tujuan RPD	:	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang berdaya saing
	Sasaran RPD	:	Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
2.	Tujuan RPD	:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik menuju tercapainya Good Governance
	Sasaran RPD	:	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efesiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melaluii Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efesiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);

17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 157);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);
20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 252);
21. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan perubahan tahun 2025, dan tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS Perubahan) Tahun 2025 sebagai :

1. Perwujudan Tujuan dan Sasaran ke dalam rencana kegiatan pembangunan.
2. Perumuskan program-program prioritas.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rincian rencana-rencana kerja PD dan rincian anggaran untuk menunjang rencana-rencana kerja PD.

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut.

Tabel T-C.29
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	020801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	12.847.597.121	0	0	67	4.822.833.114	0	1.003.306.219	74,300	1.334.404.963	74,300	1.024.559.774	74,300	1.179.006.239	74,300	4.541.277.195	74,300	4.541.277.195	100	35,347	Sekretariat
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0		0		85		0		0		0		89,740		89,740		89,740		100		Sekretariat
2		020801201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	3.727.850	25	0	100	1.784.050	100	613.800	100	1.330.000	100	3.727.850	100	3.727.850	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
3		020801201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	533.800	1	0	1	180.000	2	353.800	2	0	2	533.800	2	533.800	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
4		020801201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	506.450	1	0	1	506.450	1	0	1	0	1	506.450	1	506.450	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
5		020801201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	525.000	0	0	0	0	0	0	1	525.000	1	525.000	1	525.000	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
6		020801201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	560.000	1	0	1	560.000	1	0	1	0	1	560.000	1	560.000	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7		020801201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	560.000	0	0	0	0	0	0	1	560.000	1	560.000	1	560.000	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
8		020801201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	537.600	4	0	4	537.600	4	0	4	0	4	537.600	4	537.600	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
9		020801201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	505.000	1	0	2	0	3	260.000	4	245.000	4	505.000	4	505.000	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
10		020801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	0	10.812.512.417	0	0	100	3.803.171.570	25	801.693.695	100	1.098.720.803	100	789.210.958	100	897.388.226	100	3.587.013.682	100	3.587.013.682	100	33,175	Sub Koordinator Keuangan
11		020801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	10.812.512.417	0	0	30	3.802.106.570	30	801.693.695	30	1.098.160.803	30	788.705.958	30	897.388.226	30	3.585.948.682	30	3.585.948.682	100	33,165	Sub Koordinator Keuangan
12		020801202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	560.000	4	0	4	560.000	4	0	4	0	4	560.000	4	560.000	100	100	Sub Koordinator Keuangan
13		020801202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	505.000	1	0	2	0	2	505.000	4	0	4	505.000	4	505.000	100	100	Sub Koordinator Keuangan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14		020801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	0	178.402.100	0	0	100	316.937.550	0	57.492.367	100	67.969.505	100	81.582.339	100	99.876.510	100	306.920.721	100	306.920.721	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15		020801206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	15.790.000	0	0	1	10.452.800	0	0	1	7.937.650	1	459.000	1	0	1	8.396.650	1	8.396.650	100	53,177	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16		020801206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	75.787.000	0	0	0	0	1	19.000.000	1	54.834.000	1	73.834.000	1	73.834.000	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17		020801206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Di se di akan (Dengan Satuan:Paket)	0	89.461.600	0	0	2	39.998.750	0	0	2	20.314.900	2	13.499.000	2	4.536.000	2	38.349.900	2	38.349.900	100	42,867	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18		020801206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	73.150.500	0	0	2	30.740.000	0	10.962.750	1	430.000	1	7.320.000	2	7.942.550	2	26.655.300	2	26.655.300	100	36,439	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
19		020801206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	159.959.000	0	46.529.617	0	39.286.955	1	41.304.339	1	32.563.960	1	159.684.871	1	159.684.871	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20		020801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	0	1.217.810.204	0	0	100	430.096.752	0	97.259.416	100	75.642.673	100	100.044.429	100	109.976.259	100	382.922.777	100	382.922.777	100	31,444	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
21		020801208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	576.100.000	0	0	4	223.452.568	1	51.475.468	2	30.450.312	3	52.475.468	4	63.259.624	4	197.660.872	4	197.660.872	100	34,310	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22		020801208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	376.813.294	0	0	4	80.459.000	1	13.794.328	2	14.116.569	3	16.860.944	4	19.089.139	4	63.860.980	4	63.860.980	100	16,948	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23		020801208004	Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	264.896.910	0	0	4	126.185.184	1	31.989.620	2	31.075.792	2	30.708.017	4	27.627.496	4	121.400.925	4	121.400.925	100	45,829	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

24		020801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	0	638.872.400	0	0	100	268.899.392	0	46.860.741	100	90.287.932	100	53.108.248	100	70.435.244	100	260.692.165	100	260.692.165	100	40,805	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
25		020801209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	150.464.000	0	0	1	53.090.696	0	12.232.924	1	7.738.616	1	18.242.824	1	14.661.232	1	52.875.596	1	52.875.596	100	35,142	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
26		020801209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	385.410.000	0	0	5	112.349.696	0	28.559.893	5	13.033.300	5	28.248.500	5	35.062.530	5	104.904.223	5	104.904.223	100	27,219	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
27		020801209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	88	30.459.000	0	0	44	16.028.400	47	0	88	13.954.250	88	29.982.650	88	29.982.650	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
28		020801209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	102.998.400	0	0	1	73.000.000	0	6.067.924	1	53.487.616	1	6.616.924	1	6.757.232	1	72.929.696	1	72.929.696	100	70,807	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	35,347		
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR		

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
29	-	020802	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD (Dengan Satuan:%)**	0	0	0	0	2,400	184.882.500	0	0	0	0	1,800	17.771.000	2,260	159.020.970	2,260	176.791.970	2,260	176.791.970	100	100	**Bidang PPA**
30		020802201	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	13	30.000.000	0	0	0	0	0	17.771.000	0	6.500.000	0	24.271.000	0	24.271.000	0	100	Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
31		020802201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	JumlahDokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	17.771.000	1	6.500.000	1	24.271.000	1	24.271.000	100	100	Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
32		020802202	PemberdayaanPerempuanBidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	154.882.500	0	0	0	0	0	0	100	152.520.970	100	152.520.970	100	152.520.970	100	100	Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
33		020802202002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Organisasi)	0	0	0	0	30	154.882.500	0	0	0	0	0	0	30	152.520.970	30	152.520.970	30	152.520.970	100	100	Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							ST	ST	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34	-	020803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)(Dengan Satuan:Rasio)	0	825.145.000	0	0	14,350	338.057.850	0	9.811.000	20,530	4.657.000	45,570	65.678.000	65,830	161.692.900	65,830	241.838.900	65,830	241.838.900	100	29,309	Bidang PPA
35		020803201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Dengan Satuan:Media)	0	459.530.000	0	0	2	100.721.850	0	9.811.000	0	1.057.000	1	2.050.000	2	87.096.350	2	100.014.350	2	100.014.350	100	21,764	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
36		020803201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	JumlahDokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Programdan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	147.230.000	0	0	1	65.000.000	0	0	0	0	0	0	1	64.943.000	1	64.943.000	1	64.943.000	100	44,110	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
37		020803201002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang MendapatAdvokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	312.300.000	0	0	34	35.721.850	0	9.811.000	34	1.057.000	34	2.050.000	34	22.153.350	34	35.071.350	34	35.071.350	100	11,230	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
38		020803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani (Dengan Satuan:%)	0	365.615.000	0	0	100	175.536.000	0	0	30	3.600.000	70	61.994.000	100	17.474.350	100	83.068.350	100	83.068.350	100	22,720	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
39		020803202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	16	24.736.000	0	0	30	0	63	7.516.000	78	735.000	78	8.251.000	78	8.251.000	100	100	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
40		020803202002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Layanan)	0	365.615.000	0	0	16	150.800.000	0	0	30	3.600.000	63	54.478.000	78	16.739.350	78	74.817.350	78	74.817.350	100	20,463	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
41		020803203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang MendapatkanPelatihan (Dengan Satuan:organisasi)	0	0	0	0	49	61.800.000	0	0	0	0	0	1.634.000	49	57.122.200	49	58.756.200	49	58.756.200	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
42		020803203002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	80	44.200.000	0	0	0	0	0	0	81	42.670.000	81	42.670.000	81	42.670.000	100	100	Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
43		020803203004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	JumlahDokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	17.600.000	0	0	0	0	0	1.634.000	1	14.452.200	1	16.086.200	1	16.086.200	100	100	Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	29,309	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
44		020806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PersentaseFasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	30	72.059.096	0	7.567.924	0	4.378.616	10	24.137.924	30	27.654.732	30	63.739.196	30	63.739.196	100	100	Bidang PPA
45		020806201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	0	0	20	72.059.096	0	7.567.924	0	4.378.616	20	24.137.924	20	27.654.732	20	63.739.196	20	63.739.196	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
46		020806201001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Dengan Satuan:Organisasi)	0	0	0	0	20	21.060.000	0	0	0	0	20	13.700.000	20	3.000.000	20	16.700.000	20	16.700.000	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
47		020806201002	Koordinasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	JumlahDokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	50.999.096	0	7.567.924	0	4.378.616	0	10.437.924	1	24.654.732	1	47.039.196	1	47.039.196	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							ST	ST	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
48	-	020807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	0,410	284.670.250	0	0	0,010	20.750.000	0,029	26.391.000	0,044	130.057.500	0,044	177.198.500	0,044	177.198.500	100	100	Bidang PPA
49		020807201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang telah mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:orang)	0	0	0	0	50	65.000.000	0	0	0	0	0	0	81	64.972.000	81	64.972.000	81	64.972.000	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
50		020807201004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	80	65.000.000	0	0	0	0	0	0	81	64.972.000	81	64.972.000	81	64.972.000	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
51		020807202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	175.470.250	0	0	0	20.750.000	85	26.391.000	100	22.415.500	100	69.556.500	100	69.556.500	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
52		020807202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	29	24.670.250	0	0	8	1.150.000	26	500.000	36	736.500	36	2.386.500	36	2.386.500	100	100	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
53		020807202006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	30	150.800.000	0	0	8	19.600.000	26	25.891.000	36	21.679.000	36	67.170.000	36	67.170.000	100	100	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
54		020807203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapat Pelatihan (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	0	0	15	44.200.000	0	0	0	0	0	0	49	42.670.000	49	42.670.000	49	42.670.000	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
55		020807203006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	81	44.200.000	0	0	0	0	0	0	81	42.670.000	81	42.670.000	81	42.670.000	100	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							ST	ST	
56	-	021304	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik (Dengan Satuan:%)**	0	0	0	0	100	42.610.000	0	0	100	22.360.000	100	9.425.000	100	10.825.000	100	42.610.000	100	42.610.000	100	100	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
57		021304201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	42.610.000	0	0	100	22.360.000	100	9.425.000	100	10.825.000	100	42.610.000	100	42.610.000	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
58		021304201018	FasilitasiEvaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	42.610.000	0	0	0	22.360.000	0	9.425.000	1	10.825.000	1	42.610.000	1	42.610.000	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							ST	ST	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
59		021305	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase LKK Aktif (Dengan Satuan:%)**	0	0	0	0	100	1.059.699.134	0	28.021.696	100	293.495.160	100	284.642.862	100	444.456.308	100	1.050.616.026	100	1.050.616.026	100	100	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
60		021305201	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKK Yang Melaksanakan Kegiatan EkonomiProduktif dan Pemberdayaan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	1.059.699.134	0	28.021.696	100	293.495.160	100	284.642.862	100	444.456.308	100	1.050.616.026	100	1.050.616.026	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
61		021305201003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	0	0	252	36.967.450	0	0	0	0	117	11.700.000	252	25.067.450	252	36.767.450	252	36.767.450	100	100	Sub Koordinator Kelembagaan, Perkembangan dan Kerjasama
62		021305201006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	32.485.000	0	0	0	19.560.000	0	12.469.141	1	0	1	32.029.141	1	32.029.141	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
63		021305201009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	990.246.684	0	28.021.696	0	273.935.160	0	260.473.721	1	419.388.858	1	981.819.435	1	981.819.435	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							ST	ST	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
64		021402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	204.220.000	0	0	0	14.536.500	100	4.830.000	100	180.505.560	100	199.872.060	100	199.872.060	100	100	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
65		021402201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	5.500.000	0	0	0	0	0	4.830.000	1	668.000	1	5.498.000	1	5.498.000	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
66		021402201023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	JumlahLaporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	0	0	0	1	5.500.000	0	0	0	0	0	4.830.000	1	668.000	1	5.498.000	1	5.498.000	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
67		021402202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	198.720.000	0	0	0	14.536.500	0	0	4	179.837.560	4	194.374.060	4	194.374.060	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
68		021402202002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	14.536.500	0	0	1	14.520.500	1	29.057.000	1	29.057.000	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
69		021402202009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	1	59.338.500	1	59.338.500	1	59.338.500	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
70		021402202012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	51.600.000	0	0	0	0	0	0	1	50.743.200	1	50.743.200	1	50.743.200	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
71		021402202013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan PelayananKB (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	57.120.000	0	0	0	0	0	0	1	55.235.360	1	55.235.360	1	55.235.360	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							ST	ST	
72	-	021403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (Dengan Satuan:%)	0	3.340.985.000	0	0	100	4.989.011.688	0	97.730.936	100	158.611.474	100	576.225.386	100	4.037.493.868	100	4.870.061.664	100	4.870.061.664	100	100	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR) (Dengan Satuan:%)	0		0		78		0		66,450		68,910		71,340		71,340		71,340		100		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15 - 19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15 - 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 -19) (Dengan Satuan:Kelahiran)	0		0		8,230		0		0		0		20,700		20,700		20,700		100		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Persentase Kebutuhan Ber- KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) (Dengan Satuan:%)	0		0		7,620		0		7,890		6,020		5,370		5,370		5,370		100		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
73		021403201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	5	1.141.479.850	0	0	0	89.300.850	0	91.382.500	5	958.270.120	5	1.138.953.470	5	1.138.953.470	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
74		021403201001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dengan Satuan:Organisasi)	0	0	0	0	15	54.960.000	0	0	0	0	0	0	15	54.960.000	15	54.960.000	15	54.960.000	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
75		021403201004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	149.156.000	1	149.156.000	1	149.156.000	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
76		021403201006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	10	201.250.000	0	0	0	0	0	0	10	201.250.000	10	201.250.000	10	201.250.000	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
77		021403201008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	128.790.000	0	0	0	0	0	0	2	128.400.000	2	128.400.000	2	128.400.000	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
78		021403201010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	606.479.850	0	0	0	89.300.850	0	91.382.500	1	424.504.120	1	605.187.470	1	605.187.470	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
79		021403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB) (Dengan Satuan:Laporan)	0	316.600.000	0	0	2	980.000.000	0	0	0	0	0	0	2	977.284.000	2	977.284.000	2	977.284.000	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
80		021403202004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dengan Satuan:Orang)	0	316.600.000	0	0	398	133.000.000	0	0	0	0	0	0	398	132.960.000	398	132.960.000	398	132.960.000	100	41,996	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
81		021403202006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	847.000.000	0	0	0	0	0	0	1	844.324.000	1	844.324.000	1	844.324.000	100	100	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
82		021403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:%)	0	2.675.505.000	0	0	18,920	2.631.901.838	0	97.730.936	0	69.310.624	0	484.842.886	15,780	1.866.322.748	15,780	2.518.207.194	15,780	2.518.207.194	100	94,121	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
83		021403203001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	0	33.801.000	0	0	1	19.800.000	0	0	0	0	0	5.400.000	1	2.900.000	1	8.300.000	1	8.300.000	100	24,555	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
84		021403200303	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:Orang)	0	273.354.000	0	0	432	1.714.053.000	0	0	0	0	432	191.627.500	432	1.437.797.500	432	1.629.425.000	432	1.629.425.000	100	100	ERNA, SKM
85		021403200306	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dengan Satuan:Unit)	0	2.357.900.000	0	0	21	748.149.788	0	97.730.936	0	69.310.624	11	256.454.486	21	317.601.248	21	741.097.294	21	741.097.294	100	31,430	ERNA, SKM
86		021403200308	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.450.000	0	0	1	18.900.000	0	0	0	0	0	9.700.000	1	7.550.000	1	17.250.000	1	17.250.000	100	100	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesertaan ber-KB
87		021403203011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	130.999.050	0	0	0	0	0	21.660.900	1	100.474.000	1	122.134.900	1	122.134.900	100	100	ERNA, SKM
88		021403204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/ Kota dengan Kesertaan Rendah (Dengan Satuan:%)	0	348.880.000	0	0	55,480	235.630.000	0	0	0	0	0	0	56,610	235.617.000	56,610	235.617.000	56,610	235.617.000	100	67,535	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
89		021403204002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	3.075.000	0	0	0	0	0	0	1	3.075.000	1	3.075.000	1	3.075.000	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
90		021403204003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (Dengan Satuan:Kampung)	0	348.880.000	0	0	23	232.555.000	0	0	0	0	0	0	23	232.542.000	23	232.542.000	23	232.542.000	100	66,654	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							ST	ST	
91	-	**021404**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan (Dengan Satuan:%)**	**0**	**4.610.370.150**	**0**	**0**	**100**	**1.280.766.000**	**0**	**0**	**12**	**57.251.000**	**100**	**0**	**100**	**1.216.992.400**	**100**	**1.274.243.400**	**100**	**1.274.243.400**	**100**	**27,639**	**Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		021404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) diSetiap Kecamatan (Dengan Satuan:%)	0	4.610.370.150	0	0	100	1.280.766.000	0	0	12	57.251.000	100	0	100	1.216.992.400	100	1.274.243.400	100	1.274.243.400	100	27,639	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Dengan Satuan:%)	0		0		66,660		0		88		88		88		88		88		100		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (Dengan Satuan:%)	0		0		83,720		0		12		32,270		55,710		55,710		55,710		100		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
92		021404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun (Dengan Satuan:Rata-rata usia kawin)	0	319.882.500	0	0	21,100	360.966.000	0	0	0	57.251.000	0	0	22,200	300.145.400	22,200	357.396.400	22,200	357.396.400	100	100	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
93		021404201002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	25	300.000.000	0	0	0	0	0	0	31	296.465.400	31	296.465.400	31	296.465.400	100	100	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
94		021404201008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Dengan Satuan:Laporan)	0	319.882.500	0	0	1	60.966.000	0	0	1	57.251.000	1	0	1	3.680.000	1	60.931.000	1	60.931.000	100	19,048	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

			Program,	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangk	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi	Unit Kerja

No	Sasaran	Kode	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		at Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		berjalan 2024		tahun 2024								Daerah yang dievaluasi tahun 2024		s/d tahun 2024		Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
95		021404202	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang BeresikoStunting yang mendapat pendampingan dan pemantauan (Dengan Satuan:%)	0	4.290.487.650	0	0	68	919.800.000	0	0	0	0	0	0	83,330	916.847.000	83,330	916.847.000	83,330	916.847.000	100	21,369	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
96		021404202005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	438.000.000	0	0	0	0	0	0	1	435.047.000	1	435.047.000	1	435.047.000	100	100	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
97		021404202006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	481.800.000	0	0	0	0	0	0	1	481.800.000	1	481.800.000	1	481.800.000	100	100	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	27,639	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																							100,000	79,229	
PREDIKAT KINERJA																							ST	T	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB Kota Pangkalpinang Tahun 2025 TRIWULAN I

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	020801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	69	4.540.358.367	72,25	-		0		0		0	72	0	105	0	Sekretariat
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90										0		0		Sekretariat
10			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3.522.548.575	25								25	0	25	0	Sub Koordinator Keuangan
11			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	30	3.522.548.575	30	1.101.092.702							30	1.101.092.702	100	31	Sub Koordinator Keuangan
10			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	10	0									0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Keuangan
11			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:paket)	1	0		-							0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Keuangan
14			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	161.937.000	25								25	0	25	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15		020801206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12.149.500	1	6.597.000							1	6.597.000	100	54	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16		020801206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	0	-	-							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	0	-	-							0	0	0	#DIV/0!	
17		020801206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	66.989.500	2	35.987.606							2	35.987.606	40	54	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18		020801206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	32.339.000	-	-							0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

19		020801206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	50.459.000	-	2.460.000							0	2.460.000	0	5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerahh (Dengan Satuan:%)	100	0									0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:unit)	31	0	-	-							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:unit)	1	0	-	-							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20		020801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	100	758.064.096	25								25	0	25	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22		020801208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	130.000.000	1	15.481.567							1	15.481.567	25	12	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23		020801208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	628.064.096	1	121.965.400							1	121.965.400	25	19	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
24		020801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	97.808.696	25								25	0	25	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
25		020801209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	52.390.696	1	15.348.616							1	15.348.616	100	29	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
26		020801209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	21.959.000	2	8.020.000							2	8.020.000	100	37	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
27		020801209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	68	23.459.000	23	7.400.000							23	7.400.000	34	32	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
28		020801209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	0	-	-							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**52,355**	**0,000**	
PREDIKAT KINERJA																	**R**	**SR**	

29	**-**	**020802**	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD (Dengan Satuan:%)**	**2,43**	**19.914.000**		**-**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Bidang PPA**
30		020802201	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:program)	14	17.964.000	-	-		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
31		020802201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	17.964.000	-	-							0	0	0	0	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
32		020802202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	1.950.000	-	-		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
33		020802202002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Organisasi)	30	1.950.000	-	-							0	0	0	0	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**0,000**	**0,000**	
												PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	
34	**-**	**020803**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Dengan Satuan:Rasio)**	**13,460**	**349.888.000**	**15,87**	**87.988.673**		**0**		**0**		**0**	**16**	**87.988.673**	**84,10**	**25**	**Bidang PPA**
35		020803201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Dengan Satuan:Media)	2	82.624.000	-	-		0		0		0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
37			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota ((Dengan Satuan:Dokumen)	1	65.000.000	-	-							0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	34	17.624.000	-	-							0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

38		020803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani (Dengan Satuan:%)	100	160.805.000	100	5.391.303		0		0		0	100	5.391.303	100	3	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
39		020803202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Dengan Satuan:Orang)	10	0		-							0	0	0	#DIV/0!	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Layanan)	20	160.805.000	19	5.391.303							19	5.391.303	95	3	
41		020803203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan (Dengan Satuan:organisasi)	20	106.459.000	20	82.597.370		0		0		0	20	82.597.370	100	78	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
43			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	150	88.400.000	150	82.597.370							150	82.597.370	100	93	Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan
43			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	1	18.059.000	-	-							0	0	0	0	Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**84,100**	**25,148**	
												PREDIKAT KINERJA					**T**	**SR**	
29	-		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG (Dengan Satuan:%)**	**40,00**	**0**													**Bidang PPA**
30			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)		0													Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
31			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0		-											Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							
												PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	

44	-	020806	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar (Dengan Satuan:%)**	**34**	**35.700.000**		-		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Bidang PPA**
45		020806201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak (Dengan Satuan:Lembaga)	25	35.700.000	-	-		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Anak
46		020806201001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Dengan Satuan:Organisasi)	20	6.450.000	-	-							0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Anak
47		020806201002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	29.250.000	-	-							0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Anak
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**0,000**	**0,000**	
												PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	
48	-	**020807**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:%)**	**0,39**	**203.035.000**	**0,023**								**0**	**0**	**6**	**0**	**Bidang PPA**
51			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang Telah Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	70	65.000.000	-								0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Anak
52			Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM Yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA (Dengan Satuan:Orang)	70	65.000.000	-	-							0	0	0	0	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
51		020807202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani (Dengan Satuan:%)	100	138.035.000	100								100	0	100	0	Sub Koordinator Perlindungan Anak
52		020807202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Dengan Satuan:Orang)	10	0		-							0	0	0	#DIV/0!	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
52			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan (Dengan Satuan:Orang)	32	138.035.000	15	9.498.145							15	9.498.145	47	7	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**5,897**		
												PREDIKAT KINERJA					**SR**		

56	-	021304	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik (Dengan Satuan:%)	100	25.000.000		11.000.000		0		0		0	0	11.000.000	0	44	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
57		021304201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (Dengan Satuan:%)	100	25.000.000	-	11.000.000		0		0		0	0	11.000.000	0	44	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
58		021304201018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	25.000.000	-	11.000.000							0	11.000.000	0	44	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					0,000	44,000	
												PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
59	-	021305	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK Aktif (Dengan Satuan:%)	100	355.086.784		57.079.464		0		0		0	0	57.079.464	0	16	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
60		021305201	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan (Dengan Satuan:%)	100	355.086.784	-	57.079.464		0		0		0	0	57.079.464	0	16	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
61		021305201003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	252	30.000.000	-	7.500.000							0	7.500.000	0	25	Sub Koordinator Kelembagaan, Perkembangan dan Kerjasama
62		021305201006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.000.000	-	315.000							0	315.000	0	1	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
63		021305201009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	1	300.086.784	-	49.264.464							0	49.264.464	0	16	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					0,000	16,075	
												PREDIKAT KINERJA					SR	SR	

64	-	021402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100	235.514.000		1.000.000		0		0		0	0	1.000.000	0	0	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
67		021402202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota (Dengan Satuan:Laporan)	3	235.514.000	-	1.000.000		0		0		0	0	1.000.000	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
70			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	1	65.574.000	-	-							0	0	0	0	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	1	104.630.000	-	-							0	0	0	0	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dengan Satuan:Dokumen)	1	65.310.000	-	1.000.000							0	1.000.000	0	2	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					0,000	0,425	
												PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
72	-	021403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (Dengan Satuan:%)	100	1.487.160.000	100	69.630.000		0		0		0	100	69.630.000	100	5	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) (Dengan Satuan:%)	7,6		5								5		60		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR) (Dengan Satuan:%)	78,20		70								70		89		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Dengan Satuan:kelahiran per 1000 WUS)	8,2										0		0		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
73		021403201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	4	583.830.000	-	-		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
78		021403201010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Laporan)	1	212.840.000	-	-							0	0	0	0	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dengan Satuan:Laporan)	1	140.700.000	-	-							0	0	0	0	
			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	1	109.850.000	-	-							0	0	0	0	
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi Yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dengan Satuan:Organisasi)	10	120.440.000	-	-							0	0	0	0	
79		021403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (Dengan Satuan:Laporan)	2	149.205.000	-	60.835.000		0		0		0	0	60.835.000	0	41	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
80			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dengan Satuan:Orang)	398	119.335.000	398	37.120.000							398	37.120.000	100	31	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
			Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Dengan Satuan:Organisasi)	7	29.870.000	7	23.715.000							7	23.715.000	100	79	
82		021403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:%)	18,97	551.171.000	22	8.795.000		0		0		0	22	8.795.000	118	2	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
83			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.740.000	-	-							0	0	0	0	

			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:Orang)	811	489.501.000	300	1.200.000							300	1.200.000	37	0	
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.935.000	-	-							0	0	0	0	
		021403203001	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak(Dengan Satuan:Laporan)	1	9.995.000	-	7.595.000							0	7.595.000	0	76	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
88		021403204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah (Dengan Satuan:%)	55,58	202.954.000		-		0		0		0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
90		021403204003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Kampung)	42	202.954.000	-	-							0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**62,342**	**4,682**	
PREDIKAT KINERJA																	**R**	**SR**	

91	**-**	**021404**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**2.381.995.000**	**100**	**50.130.000**		**0**		**0**		**0**	**100**	**50.130.000**	**100**	**2,105**	**Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
				Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Dengan Satuan:%)	**69,04**		**90,47**								**90**		**131**		**Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (Dengan Satuan:%)	**83,74**		**45,83**								**46**		**55**		**Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
92		021404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun (Dengan Satuan:Rata-rata usia kawin)	21,2	2.381.995.000	-	50.130.000		0		0		0	0	50.130.000	0	2	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
94		021404201008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Dengan Satuan:Laporan)	1	50.130.000	1	50.130.000							1	50.130.000	100	100	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Dengan Satuan:Laporan)	1	70.000.000	-	-							0	0	0	0	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS (Dengan Satuan:Laporan)	1	230.665.000	-	-							0	0	0	0	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Dengan Satuan:Unit)	8	104.000.000	-	-							0	0	0	0	

			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang Beresiko Stunting yang Mendapat Pendampingan dan Pemantauan (Dengan Satuan: %)	69	963.600.000		-							0	0	0	0	
			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (Dengan Satuan:Laporan)	1	438.000.000	-	-							0	0	0	0	
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang Mendapat Pendampingan (Dengan Satuan:Laporan)	1	525.600.000	-	-							0	0	0	0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**95,256**	**2,105**	
PREDIKAT KINERJA																	**ST**	**SR**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	**29,995**	**10,270**	
PREDIKAT KINERJA																	**SR**	**SR**	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sesuai tabel berikut ini :

A. Capaian Kinerja 2024

Capaian Indikator Sasaran IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	2.	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	20%	33,23%	166,15%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	3.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,014%	0,066%	<50%
4.	Meningkatnya nilai KLA	4.	Predikat Kota Layak Anak	701-800 (Nindya) Predikat	Masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PPA	
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	5.	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita	87,5%

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Akuntanbilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang. Dimana Perjanjian Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah kinerja.

Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024 akan disajikan dalam capaian Indikator Kinerja dengan cara pembandingan-pembandingan antara lain :

1. Target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

   Berdasarkan perbandingan antara tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2023		Realisasi 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	-	-	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	-	-	20%	33,23%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	-	0,042%	0,014%	0,066%
4.	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	-	670 (Madya)	701-800 (Nindya) Predikat	Masih menunggu hasil penialain dari Kementerian
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	-	2,26 Rata-Rata Anak per Wanita	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita

Target tidak diisi karena adanya perbedaan indikator Sasaran antara Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Semua Indikator Sasaran Strategisnya berbeda. Sehingga hanya diisi realisasi sesuai dengan data yang ada pada bidang terkait.

2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel Perbandingan Kinerja dalam beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	-	-	-	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	-	-	-	33,23%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,015%	0,028%	0,042%	0,066%
4.	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	635 (Madya)	686 (Madya)	690 (Madya)	Masih menunggu hasil penialain dari Kementerian
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2 Rata-Rata Anak per Wanita	1,98 Rata-Rata Anak per Wanita	2,26 Rata-Rata Anak per Wanita	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita

3. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	33,23%	35%	38%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,066%	0,013	0,012
4.	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	Masih menunggu hasil penialain dari Kementerian	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2 Rata-Rata Anak per Wanita

4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

1) Sasaran : Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

A. Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Perhatian penuh dari pimpinan sehingga untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan rutin dilaksanakan sampai berjenjang di tingkat terbawah mulai dari RT/RW
2. Adanya stimulan untuk Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan yang aktif melalui anggaran yang mendukung dalam kegiatan tersebut.
3. Pelaksanaan lomba-lomba yang berjenjang dari Tingkat Kota sampai Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengaktifkan Lembaga Kemasyakatan Kelurahan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap tahunnya untuk melihat keberlangsungan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan tersebut.
5. Apresiasi untuk bagi kader yang berprestasi.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan

1. Letak Demografis sebagian kecamatan daerah perkotaan sehingga perlu inovasi yang baik untuk membuat keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan tersebut.
2. Perlu perhatian yang intens dari pimpinan untuk keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

C. Strategi atau Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Hal Tersebut

1. Pelaksanaan lomba untuk inovasi dalam mengaktifkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
2. Reward untuk apresiasi kepada kader yang berprestasi.
3. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan kerjasama lintas sektoral dalam mendukung keaktifan kader kelembagaan tersebut.
4. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kader dan manfaat dapat langsung dirasakan kader.

5. Kebijakan pimpinan yang dikeluarkan sangat mendukung dalam keaktifan Lembaga Kemasyarakatan.
6. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan.

D. Upaya yang Dilakukan Ke Depan

1. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan pembinaan dan kegiatan dalam mengaktifkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
2. Apresiasi atau reward kepada kader yang ada di tingkat bawah.

2) Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

A. Faktor Pendukung Keberhasilan diantaranya adalah :
   1. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga, masyarakat, pemerintahan dan dunia usaha.
   2. Penguatan kebijakan yang melindungi hak perempuan untuk bisa terlibat di dalam Lembaga Pemerintahan.
   3. Komitmen dan kerjasama dari semua pihak.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah :
   1. Adanya stigma di masyarakat yang menganggap remeh tenaga perempuan.
   2. Kurangnya dukungan kebijakan yang kuat.
   3. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

C. Strategi atau Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Hal Tersebut
   1. Memberikan KIE kepada masyarakat terkait pentingnya mewujudkan kesetaraan gender.
   2. Memberikan Advokasi kepada pengambil pemangku/pengambil kebijakan agar memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi pada Lembaga Pemerintahan.

D. Upaya yang Dilakukan Kedepan

Upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah :

- Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.

3) Sasaran : Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

A. Faktor Pendukung Keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan penggunaan teknologi.
3. Meningkatnya Literasi Digital oleh masyarakat.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah :

1. Pengaruh dari teknologi

   Adanya kemajuan teknologi berdampak sangat besar terhadap peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan. Penggunaan Telpon Seluler secara tidak terbatas yang memungkinkan kita bebas mengakses apa saja yang memungkinkan kita mencontoh perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan.
2. Literasi Digital

   Kurangnya Literasi Digital oleh sebagian masyarakat kita secara tidak langsung bisa meningkatkan kekerasan terhadap perempuan.
3. Kurang massifnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terhadap masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan

   Pergeseran stigma oleh sebagian masyarakat kita yang menjadi korban kekerasan, dimana mereka menganggap menjadi korban kekerasan adalah aib keluarga yang harus ditutupi.

C. Strategi atau Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Hal Tersebut

3. Rapat koordinasi dan sinkronisasi terkit Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan.
4. Advokasi kebijakan dan Layanan kekerasan terhadap Perempuan.
5. Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan korban kekerasan.
6. Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Penyedia Korban Kekerasan.
7. Diseminasi informasi terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

D. Upaya yang Dilakukan Kedepan

Upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah :

1. Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk Penyebarluasan Informasi terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Layanan Perlindungan Perempuan.
2. Menyusun MOU atau PKS dengan Dinas Instansi, Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi dan lain-lain terkait Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan.
3. Melakukan sosialisasi ke Lembaga Masyarakat (TP PKK kecamatan dan Kelurahan) terkait Pencegaham Kekerasan terhadap Perempuan).
4. Penyuluhan LIterasi Digital kepada Lembaga Masyarakat kerjasama dengan DInas KOmunikasi dan Informatika.
5. Membuat Nota Kesepatan Lintas instansi dalam rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.

4) Sasaran : Meningkatnya Nilai KLA

A. Faktor Pendukung Keberhasilan dalam pencapaian meningkatnya Nilai KLA (Predikat Kota Layak Anak) diantaranya adalah :

1. Komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
2. Kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
3. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.
4. Partisipasi anak dalam pengambilan keputusan.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan dalam dalam pencapaian meningkatnya Nilai KLA (Predikat Kota Layak Anak) diantaranya adalah :
   1. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tempat bermain ramah anak.
   2. Kurangnya komitmen lintas sektor dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak.
   3. Belum dipahaminya hak-hak anak.

C. Strategi atau Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Hal Tersebut
   1. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bisa berbentuk kebijakan.
   2. Setiap proses pembangunan yang dilakukan harus mengintegarsikan seluruh hak-hak anak ke dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.
   3. Pengembangan inovasi pemerintah khususnya dalam mengakselerasi program Kota Layak Anak.

D. Upaya yang Dilakukan Kedepan

   Upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah :
   1. Komitmen kuat bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
   2. Peran lintas sektor diperlukan dalam pemenuhan hak anak.
   3. Melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai pentingnya pemenuhan hak anak.

5) Sasaran : Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang

A. Faktor Pendukung Keberhasilan dalam pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun) diantaranya adalah :
   1. Penguatan pengetahuan masyarakat tentang KB.
   2. Sosialisasi Program KB melalui berbagai media seperti keluarga, tetangga, organisasi masyarakat serta media massa.
   3. Dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah.
   4. Partisipasi masyarakat.
   5. Layanan konseling.
   6. Dukungan suami.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan dalam dalam pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun) diantaranya adalah :

1. Rendahnya literasi masyarakat dikarenakan masyarakat belum mamahami konsep berkeluarga dan Program KB.
2. Mitos dan kesalahan pemahaman dalam ber-KB.
3. Kurangnya sosialisasi, kurangnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang pelayanan kontrasepsi.
4. Pandangan masyarakat.
5. Kurangnya peran Tokoh Agama dalam mendukung Program KB.

C. Strategi atau Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Hal Tersebut

1. Melakukan penyuluhan.
2. Melakukan pelayanan KB.
3. Pelatihan.
4. Sosialisasi.
5. Promosi KB.
6. Program Bina Keluarga Remaja (BKR).
7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
8. MOU (kerjasama) dengan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat.
9. Inovasi

D. Upaya yang Dilakukan Kedepan

Upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah :

1. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga.
2. Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan mitra kerja.
3. Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan.
4. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB.
5. Pelaksanaan mekanisme operasional Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok).
6. Koordinasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan.

7. Pembinaan pelayanan KB di fasilitas kesehatan.
8. Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
9. Pengendalian dan pendidtribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja;

   Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024, ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

   1) Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Target dan Realisasi Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan realisasi 100%. Dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sudah aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera yaitu :

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2) Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

Target dan Realisasi Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	20%	33,23%	166,15%

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan yaitu :

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pengarusutamaan Gender	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3) Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Target dan Realisasi Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,014%	0,066%	<50%

Untuk Indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase capaian kinerja untuk indikator ini masih kurang dari 50%. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain kegiatan pencegahan kekerasan, penyediaan layanan dan penguatan lembaga-lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan akan tetapi hasilnya belum maksimal.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu :

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PeningkatanKapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

4) Predikat Kota Layak Anak

Target dan Realisasi Predikat Kota Layak Anak

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Predikat Kota Layak Anak	701-800 (Nindya) Predikat	Masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PPPA	-

Untuk Indikator Predikat Kota Layak Anak masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PPPA. Upaya-upaya telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan data-data yang dibutuhkan untuk penilaian telah diinput pada Aplikasi dari Kementerian PPPA sehingga saat ini hanya menunggu nilai KLA keluar. Biasanya nilai KLA akan diumumkan pada Bulan Juli pada saat Hari Anak Nasional.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Predikat Kota Layak Anak yaitu :

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Predikat Kota Layak Anak

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
2.	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan / program/ kegiatan pencegahan KTA
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kota

5) Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun

Target dan Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita	87,5%

Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 2 Rata-Rata Anak per Wanita realisasi nya 2.25 Rata-Rata Anak per Wanita dengan persentase capaian kinerja 87,5%.

Dalam rangka mencapai kinerja ini, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana sudah dilaksanakan kepada masyarakat melalui Media Mass Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang. Selain itu Penyuluh Keluarga Berencana(PKB)/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta para Kader PPKBD dan Sub PPKBD sudah bekerja dilapangan akan tetapi hasilnya masih belum maksimal sehingga belum mencapai target.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun yaitu:

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Predikat Kota Layak Anak

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

			Pengolahan dan Pelaporan Data PengendalianLapangan dan Pelayanan KB
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik sertaMedia Luar Ruang
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program BanggaKencana di Kampung Keluarga Berkualitas
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

2.3 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan di dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, dalam hal ini untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertangggungjawabkan.

Melalui pengintegrasian kajian berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang secara umum dan dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu pada hasil telaahan terhadap RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026, Renstra Kementerian/Lembaga, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Gambaran Pelayanan PD, dapatlah disusun isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun mendatang.

Pada sub ini akan diuraikan identifikasi permasalahan yang harus dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Lembaga yang melaksanakan PPRG dan anggaran berbasis gender di Kota Pangkalpinang.
2. Masih kurangnya pegawai terutama pada UPTD PPPA.
3. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19).
5. Belum Optimalnya Capaian Penggunaan Metode Kontrasepsi semua cara.
6. Meningkatnya Angka Total Fertility Rate (TFR).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada beberapa

Sub Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dilakukan penyesuaian.

Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31. dibawah ini.

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kota pangkalpinang

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota**		**Indeks kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**90 Nilai**	**5.607.914.782**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota**		**Indeks kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**90 Nilai**	**4.749.896.813**	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**69 Nilai**				**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72,35 Nilai**		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP**	**100%**	**4.242.464.782**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP**	**100%**	**3.790.434.845**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	4.242.464.782	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	3.790.434.845	

	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN**	**10%**	**30.059.000**	-	-	-	**-**	**-**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pk.Pinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	30.059.000	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**468.938.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**104.157.100**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.149.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.814.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	122.459.000	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk.Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.199.000	-	-	-	-	-	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	90.704.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	45.878.100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	88.967.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.639.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.459.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	32.826.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pk. Pinang**	**Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah**	**100%**	**44.068.000**	-	-	-	**-**	**-**	
	Pengadaan Mebel	Pk. Pinang	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	31 Unit	29.709.000	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.359.000	-	-	-	-	-	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pk. Pinang**	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**545.459.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pk. Pinang**	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**757.496.172**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	125.459.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	420.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	627.496.172	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**100%**	**276.926.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**100%**	**97.808.696**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.459.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.390.696	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	120.459.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	21.959.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	35.459.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	23.459.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	90.549.000	-	-	-	-	-	
II	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**		**Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah Pada APBD**	**2,43%**	**20.000.000**	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**		**Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah Pada APBD**	**2,43%**	**14.914.000**	
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Pk. Pinang**	**Jumlah Program PUG Pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis Gender Tingkat Kabupaten/ Kota**	**14 program**	**18.000.000**	**Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Pk. Pinang**	**Jumlah Program PUG Pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis Gender Tingkat Kabupaten/ Kota**	**14 program**	**12.964.000**	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	18.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.964.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		**Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**100%**	**2.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**		**Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**100%**	**1.950.000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	2.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	1.950.000	

III	**Program Perlindungan Perempuan**		**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**13,46 rasio**	**64.480.000**	**Program Perlindungan Perempuan**		**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**13,46 rasio**	**339.888.000**	
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah Media Massa (cetak, elektronik) yang berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**2 media**	**17.700.000**	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Media Massa (cetak, elektronik) yang berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**2 media**	**77.624.000**	
	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	17.700.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	12.624.000	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		**Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani**	**100%**	**28.680.000**	**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani**	**100%**	**160.805.000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 orang	28.680.000	-	-	-	-	-	

				-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	160.805.000	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/ Kota		**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Pelatihan**	**20 organisasi**	**18.100.000**	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota**		**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan**	**20 organisasi**	**101.459.000**	
	-	-	-	-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang	88.400.000	

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	18.100.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	13.059.000	
IV	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**		**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG**	**40%**	**19.915.000**	-	-	-	**-**	**-**	
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Tersusunnya Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	19.915.000	-	-	-	**-**	**-**	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	19.915.000	-	-	-	-	-	

V	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**		**Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar**	**34%**	**38.745.000**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**		**Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar**	**34%**	**29.550.000**	
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		**Jumlah Lembaga yang telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak**	**25 Lembaga**	**38.745.000**	**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Lembaga yang telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak**	**25 Lembaga**	**29.550.000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	9.225.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	6.450.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.520.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.100.000	
VI	**Program Perlindungan Khusus Anak**		**Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak**	**0,39%**	**28.680.000**	**Program Perlindungan Khusus Anak**		**Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak**	**0,39%**	**203.035.000**	
	-	-	-	**-**	**-**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase SDM yang mengikuti advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA**	**100%**	**65.000.000**	
	-	-	-	-	-	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Pk. Pinang	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	70 Orang	65.000.000	

	Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani**	**100%**	**28.680.000**	**Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani**	**100%**	**138.035.000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 orang	28.680.000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Pk. Pinang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	32 Layanan	138.035.000	
VII	**Program Administrasi Pemerintah Desa**		**Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik**	**100%**	**70.000.000**	**Program Administrasi Pemerintah Desa**		**Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik**	**100%**	**25.000.000**	

	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa		**Persentase Kelurahan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**70,000,000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa**		**Persentase Kelurahan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**25.000.000**	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	1 dokumen	70.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	1 dokumen	25.000.000	
VIII	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**		**Persentase LKK Aktif**	**100%**	**1.386.539.600**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**		**Persentase LKK Aktif**	**100%**	**343.536.784**	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan**	**100%**	**1.386.539.600**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan**	**100%**	**343.536.784**	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pk. Pinang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 lembaga	60.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pk. Pinang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 lembaga	30.000.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	50.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	20.950.000	
	Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.276.539.600	Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	292.586.784	

IX	**Program Pengendalian Penduduk**		**Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan**	**100%**	**39.800.000**	**Program Pengendalian Penduduk**		**Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan**	**100%**	**220.314.000**	
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1 laporan**	**39.800.000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**3 laporan**	**220.314.000**	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	65.574.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	39.800.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	89.430.000	
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	65.310.000	

X	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,2 kelahiran per 1000 WUS	144.714.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,2 kelahiran per 1000 WUS	1.479.541.000	
			Cakupan PKB/PLKB yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100%				Cakupan PKB/PLKB yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100%		
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceftive Prevanlence Rate/MCPR)	78,20%				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceftive Prevanlence Rate/MCPR)	78,20%		

			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	**7,58%**				**Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)**	**7,58%**		
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1 laporan**	**31.020.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**4 laporan**	**583.830.000**	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana Penyuluhan Bangga Kencana	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	31.020.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana Penyuluhan Bangga Kencana	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	212.840.000	

	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	140.700.000	
	-	-	-	-	-	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	109.850.000	

	-	-	-	-	-	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	120.440.000	
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		**Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**1 laporan**	**56.840.000**	**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**1 laporan**	**148.770.000**	
	-	-	-	-	-	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pk. Pinang	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	398 Orang	118.900.000	

	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7 organisasi	56.840.000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7 organisasi	29.870.000	
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**18,97%**	**29.500.000**	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**18,97%**	**551.171.000**	
	-	-	-	-	-	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	25.740.000	

	-	-	-	-	-	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	811 Orang	489.501.000	
	-	-	-	-	-	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	25.935.000	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	29.500.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	9.995.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		**Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/ Kota dengan Kesertaan Rendah**	**55,58%**	**27.354.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah**	**55,58%**	**195.770.000**	

	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pk. Pinang	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	26 kampung	27.354.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pk. Pinang	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	42 kampung	195.770.000	
XI	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**		**Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**	**100%**	**58.080.000**	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**		**Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**	**100%**	**1.418.830.000**	
			Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	**69,04%**				**Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa**	**69,04%**		

			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	**83,74%**				**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**	**83,74%**		
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		**Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun**	**21,2 rata-rata usia kawin**	**58.080.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun**	**21,2 rata-rata usia kawin**	**455.230.000**	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pk. Pinang	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	58.080.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pk. Pinang	Jumlah laporan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	50.130.000	

	-	-	-	-	-	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pk. Pinang	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	70.000.000	
	-	-	-	-	-	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	231.100.000	
	-	-	-	-	-	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pk. Pinang	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	8 Unit	104.000.000	

	-	-	-	-	-	**Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Persentase Keluarga yang Beresiko Stunting yang Mendapat Pendampingan dan Pemantauan**	**69 %**	**963.600.000**	
	-	-	-	-	-	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pk. Pinang	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	438.000.000	

						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pk. Pinang	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	525.600.000	
				TOTAL	**7.478.868.382**				**TOTAL**	**8.824.505.597**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN 2025 – 2029, telah ditetapkan Visi Presiden terpilih yaitu :

"***Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"***

Untuk mencapai visi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mencanangkan delapan misi yang disebut astacita. Sesuai dengan namanya, astacita terdiri atas delapan pokok haluan antara lain :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Keduanya meyakini bahwa Pancasila, demokrasi, dan HAM secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis untuk menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Menurut Prabowo-Gibran, negara yang kuat ialah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan yang baik serta dapat melindungi dan menjamin kedamaian.

Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Untuk itu, Prabowo-Gibran meyakini Indonesia perlu fokus pada swasembada dalam berbagai sektor krusial, mencakup pangan, energi, air, dan ekonomi kreatif.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Prabowo-Gibran memandang bahwa keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penyediaan pekerjaan yang layak.

Selain itu, inovasi juga dipandang perlu dalam pengembangan industri kreatif nasional. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya Indonesia, industri kreatif berpotensi menjadi pendorong utama roda ekonomi sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terencana diyakini Prabowo-Gibran dapat memperkuat jaringan dan mobilitas, sekaligus menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan di berbagai sektor, dan memastikan kesempatan yang adil bagi setiap warga.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Pembangunan bangsa yang berkualitas terletak pada kemajuan warganya. Dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, Prabowo-Gibran yakin Indonesia dapat membangun dasar yang kuat untuk generasi mendatang.

Keduanya juga menaruh perhatian terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, generasi muda, serta penyandang disabilitas. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang inklusif.

Atas dasar itu, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi pendidikan dan kesehatan, serta inklusif terhadap perempuan, kaum muda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat merupakan fokus Prabowo-Gibran. Hilirisasi dan industrialisasi dipilih menjadi salah satu cara dalam pemaksimalan tersebut.

Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi. Tidak hanya itu, cara ini juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Dalam 5 tahun ke depan, Prabowo-Gibran ingin menjaga keseimbangan pengembangan di setiap wilayah yang dimulai dari komunitas desa. Peran esensial komunitas desa akan dimanfaatkan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, membangun dari desa juga dilakukan dalam bentuk pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kemudahan akses ke berbagai sumber daya.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Korupsi dan narkoba perlu dicegah dan ditanggulangi dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Oleh sebab itu, Prabowo-Gibran bertekad untuk melakukan reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Selama 5 tahun ke depan, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya.

Dengan pendekatan holistik ini, Prabowo-Gibran ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, berkesempatan sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam membangun masa depan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendukung ASTACITA point ke 4 yaitu :

"**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas".**

3.2 Telaah terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
   Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga
   Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga
3. Mewujudkan Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik
   Indikator : Persentase Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Sasasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
   Indikator : Persentase Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
2. Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
   Indikator : Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
3. Meningkatnya Nilai KLA
   Indikator : Predikat Kota Layak Anak
4. Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang
   Indikator : Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun
5. Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera
   Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
Mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia			
	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender			
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender
				Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan
				Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
				Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
			Meningkatnya pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga
				Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya good governance		Indeks Reformasi Birokrasi			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik		Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik
				Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang
Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Definisi Operasional
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	**Indeks Pemberdayaan Gender**	
Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan	Jumlah pekerja perempuan di Lembaga pemerintahan dibagi jumlah pekerja perempuan dikali 100
Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Jumlah korban perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100
Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	
Meningkatnya pembangunan keluarga	**Indeks Pembangunan Keluarga**	
Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	
Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	**Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik**	**Jumlah kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tahun berkenaan dibagi jumlah total kelurahan dikali 100**
Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera dibagi jumlah total kelurahan dikali 100

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setiap tahunnya.

Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

T-C. 32

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Beserta Target Capaian Kinerja

Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	61,29	61,39	61,49	61,49
	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan	%	20	22	24	24
	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,014	0,013	0,012	0,012
	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)
Meningkatnya pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	56,93	56,97	57	57
	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per-wanita	2	2	2	2

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik		Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	%	100	100	100	100
	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	%	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegritasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
   b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasinal atau lapangan.
   c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan :

1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

3. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota

   Sub Kegiatan :

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.

2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub kegiatan :

   a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Sub kegiatan :

   a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
   b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :

1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan :

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Sub kegiatan :

   a. Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA.

2) Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Sub kegiatan :

   a. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

6. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

   sub kegiatan :

   a. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan :

1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Sub kegiatan :

   a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
   b. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
   c. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

8. Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

1) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

   Sub kegiatan :

   a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
   b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.
   c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan :

1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

   Sub Kegiatan :

   a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana.
   b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).

c. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
d. Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.

2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Sub Kegiatan :
a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
b. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.

3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
d. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.

4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan :

1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan :
a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).
b. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
d. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sub Kegiatan :

a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita).
b. Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita).

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 terlampir dalam Tabel T-C.33. di bawah ini.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana dan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah		90 Nilai	4.749.896.813			90	5.224.886.556
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		72,35 Nilai				72,37	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP		100%	3.790.434.845			100%	4.169.478.392

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	30 Orang/ Bulan	3.790.434.845	PENDAPATAN TRANSFER, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Pengganjian P3K		35 Orang/Bulan	4.169.478.392
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pk.Pinang**	**100%**	**104.157.100**			**100%**	**114.572.810**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pk. Pinang	1 Paket	7.814.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Paket	8.595.400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pk. Pinang	7 Paket	45.878.100	PENDAPATAN TRANSFER		7 Paket	50.465.910
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pk. Pinang	2 Paket	17.639.000	PENDAPATAN TRANSFER		2 Paket	19.402.900

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	1 Laporan	32.826.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	36.108.600
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pk. Pinang**	**100%**	**757.496.172**			**100%**	**833.245.789**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pk. Pinang	4 Laporan	130.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		4 Laporan	143.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pk. Pinang	4 Laporan	627.496.172	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	690.245.789
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**Pk. Pinang**	**100%**	**97.808.696**			**100%**	**107.589.565**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pk. Pinang	1 Unit	52.390.696	PENDAPATAN ASLI DAERAH bdan (PAD), PENDAPATAN TRANSFER		1 Unit	57.629.765
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pk. Pinang	2 Unit	21.959.000	PENDAPATAN TRANSFER		5 Unit	24.154.900
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pk. Pinang	54 Unit	23.459.000	PENDAPATAN TRANSFER		60 Unit	25.804.900

II	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD**	**Pk. Pinang**	**2,43%**	**14.914.000**			**2,46%**	**16.405.400**
	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pk. Pinang**	**14 program**	**12.964.000**			**15 program**	**14.260.400**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	1 Dokumen	12.964.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	14.260.400
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Pk. Pinang**	**100%**	**1.950.000**			**100%**	**2.145.000**

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendamping Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	30 organisasi	1.950.000	PENDAPATAN TRANSFER		30 organisasi	2.145.000
III	**Program Perlindungan Perempuan**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)**	**Pk. Pinang**	**13.46 rasio**	**339.888.000**			**12.56 rasio**	**373.876.800**
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**Pk. Pinang**	**2 Media**	**77.624.000**			**2 Media**	**85.386.400**

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	1 Dokumen	65.000.000	DAK NON FISIK		1 Dokumen	71.500.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	34 Perangkat Daerah	12.624.000	PENDAPATAN TRANSFER		34 Perangkat Daerah	13.886.400
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani**	**Pk. Pinang**	**100%**	**160.805.000**			**100%**	176.885.500

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	20 Layanan	160.805.000	DAK NON FISIK		20 Layanan	176.885.500
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan**	**Pk. Pinang**	**20 Organisasi**	**101.459.000**			**20 Organisasi**	**111.604.900**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Pk. Pinang	150 Orang	88.400.000	DAK NON FISIK		150 Orang	97.240.000

	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	1 dokumen	13.059.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	14.364.900
IV	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar**	**Pk. Pinang**	**34%**	**29.550.000**			**38%**	**30.505.000**
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Jumlah Lembaga yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak**	**Pk. Pinang**	**25 lembaga**	**29.550.000**			**20 lembaga**	**32.505.000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Pk. Pinang	20 Organisasi	6.450.000	PENDAPATAN TRANSFER		20 Organisasi	7.095.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	1 Dokumen	23.100.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	25.410.000
V	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Prevalensi kekerasan terhadap anak**	**Pk. Pinang**	**0.39%**	**203.035.000**			**0,37%**	**223.338.500**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SDM yang Mengikuti advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA**	**Pk. Pinang**	**100 %**	**65.000.000**			**100 %**	**71.500.000**
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Pk. Pinang	70 Orang	65.000.000	DAK NON FISIK		70 Orang	71.500.000

	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani**	**Pk. Pinang**	**100%**	**138.035.000**			**100%**	151.838.500
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Pk. Pinang	32 Layanan	138.035.000	DAK NON FISIK		32 Layanan	151.838.500
VI	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik**	**Pk. Pinang**	**100%**	**25.000.000**			**100%**	**27.500.000**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**Pk. Pinang**	**100%**	**25.000.000**			**100%**	**27.500.000**
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pk. Pinang	1 dokumen	25.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	27.500.000

VII	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase LKK Aktif**	**Pk. Pinang**	**100%**	**343.536.784**			**100%**	**357.190.462**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota	**Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan**	**Pk. Pinang**	**100%**	**343.536.784**			**100%**	**357.190.462**

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pk. Pinang	252 Lembaga	30.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		252 Lembaga	33.000.000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pk. Pinang	1 laporan	20.950.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 laporan	23.045.000
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	1 dokumen	292.586.784	PENDAPATAN TRANSFER dan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	321.845.462
VIII	**Program Pengendalian Penduduk**	**Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan**	**Pk. Pinang**	**100%**	**220.314.000**			**100%**	**242.345.000**

	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	**Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pk. Pinang**	**3 laporan**	**220.314.000**			**3 laporan**	**242.345.000**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pk. Pinang	1 Laporan	65.574.000	DAK NON FISIK BOKB-KB		1 Laporan	72.131.400
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk. Pinang	1 laporan	89.430.000	PENDAPATAN TRANSFER & DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 laporan	98.373.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pk. Pinang	1 Dokumen	65.310.000	PENDAPATAN TRANSFER & DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 Dokumen	71.841.000

IX	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**	**Pk.Pinang**	**8.2 kelahiran per 1000 WUS**	**1.479.541.000**			**8,17 kelahiran per 1000 WUS**	**1.627.505.100**
		Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	**Pk.Pinang**	**100%**				**100%**	
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR)	**Pk. Pinang**	**78,20%**				**78,40%**	
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	**Pk. Pinang**	**7,58%**				**7,54%**	

	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Pk.Pinang**	**4 Laporan**	**583.830.000**	PENDAPATAN TRANSFER		**4 Laporan**	**642.213.000**
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Pk. Pinang	1 laporan	212.840.000	PENDAPATAN TRANSFER & DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 laporan	234.124.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pk. Pinang	1 Laporan	140.700.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 Laporan	154.770.000

	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Pk. Pinang	1 Dokumen	109.850.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 Dokumen	120.835.000
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pk. Pinang	10 Organisasi	120.440.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		10 Organisasi	132.484.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Pk. Pinang**	**2 laporan**	**148.770.000**			**2 laporan**	**163.647.000**

	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pk. Pinang	398 Orang	118.900.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		398 Orang	130.790.000
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pk. Pinang	7 organiasi	29.870.000	PENDAPATAN TRANSFER		7 organiasi	32.857.000
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**Pk. Pinang**	**18.97%**	**551.171.000**			**18.97%**	**606.280.100**

	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	1 Laporan	25.740.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 Laporan	28.314.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pk. Pinang	811 Orang	489.501.000	PENDAPATAN TRANSFER DAK FISIK BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BOKB-KB		811 Orang	538.451.100
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	1 Laporan	25.935.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 Laporan	28.528.500

	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pk. Pinang	1 laporan	9.995.000	PENDAPATAN TRANSFER dan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	10.994.500
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah**	**Pk. Pinang**	**55,58%**	**195.770.000**				**215.347.000**
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pk.Pinang	42 Kampung	195.770.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB dan PENDAPATAN TRANSFER		42 Kampung	215.347.000

XI	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**	**Pk.Pinang**	**83.74%**	**1.418.830.000**			**83.76%**	**1.560.443.000**
		Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	**Pk.Pinang**	**100%**				**100%**	
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	**Pk.Pinang**	**69.04%**				**71.42%**	
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 tahun**	**Pk. Pinang**	**21,2 Rata-Rata Usia Kawin**	**455.230.000**			**21,3 Rata-Rata Usia Kawin**	**500.753.000**

	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pk. Pinang	1 Laporan	50.130.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	55.143.000
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pk. Pinang	1 Laporan/ Dokumen	70.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 Laporan/ Dokumen	77.000.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pk. Pinang	1 Laporan	231.100.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 Laporan	254.210.000

	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Pk. Pinang	8 Unit	104.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		8 Unit	114.400.000
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Persentase Keluarga yang Beresiko Stunting yang Mendapat Pendampingan dan Pemantauan**	**Pk. Pinang**	**69 %**	**963.600.000**			**70 %**	**1.059.960.000**

	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pk. Pinang	1 laporan	438.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 laporan	481.800.000
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pk. Pinang	1 laporan	525.600.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 laporan	578.160.000
JUMLAH					**8.824.505.597**				**9.683.995.818**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metode pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen Renja dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.

2. Merumuskan keluaran/output serta metode pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.

3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metode dan jadwal pelaksanaan.

Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadaidan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan,capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Informasi pagu indikatif bagi setiap Perangkat Daerah dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan kepada Perangkat Daerah. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Pagu indikatif Perangkat Daerah dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah maupun dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Dari langkah-langkah diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah menyiapkan Rencana Kerja tahun 2025 seperti tabel T-C.34 berikut.

Tabel T-C.34
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

No	Prioritas Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Organisasi	Jumlah Plafond
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota**	**Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**90 Nilai**	**DPPPAKB**	**4.749.896.813**
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**72,35 Nilai**	**DPPPAKB**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP**	**Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP**	**100%**	**DPPPAKB**	**3.790.434.845**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	DPPPAKB	3.790.434.845
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**DPPPAKB**	**104.157.100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	DPPPAKB	7.814.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	DPPPAKB	45.878.100

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	DPPPAKB	17.639.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	DPPPAKB	32.826.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**DPPPAKB**	**757.496.172**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	DPPPAKB	130.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	DPPPAKB	627.496.172
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**100%**	**DPPPAKB**	**97.808.696**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	DPPPAKB	52.390.696

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	DPPPAKB	21.959.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	DPPPAKB	23.459.000
II	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Meningkatnya Persentase ARG pada belanja langsung**	**Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD**	**2,43%**	**DPPPAKB**	**14.914.000**
	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota**	**14 program**	**DPPPAKB**	**12.964.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	DPPPAKB	12.964.000
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota /Kota**	**100%**	**DPPPAKB**	**1.950.000**

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	DPPPAKB	1.950.000
III	**Program Perlindungan Perempuan**	**Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)**	**13,46 rasio**	**DPPPAKB**	**339.888.000**
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**2 media**	**DPPPAKB**	**77.624.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	DPPPAKB	65.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	DPPPAKB	12.624.000

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani**	**100%**	**DPPPAKB**	**160.805.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	DPPPAKB	160.805.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan**	**20 organisasi**	**DPPPAKB**	**18.100.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang	DPPPAKB	88.400.00

	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	DPPPAKB	13.059.00
IV	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Terwujudnya Kota yang Memenuhi Hak-Hak Anak**	**Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar**	**34%**	**DPPPAKB**	**29.550.000**
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak**	**25 Lembaga**	**DPPPAKB**	**29.550.000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	DPPPAKB	6.450.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	DPPPAKB	23.100.000

V	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Terlaksananya Perlindungan Khusus Anak**	**Prevalensi kekerasan terhadap anak**	**0,39%**	**DPPPAKB**	**203.035.000**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM yang mengikuti advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA**	**100 %**	**DPPPAKB**	**65.000.000**
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	70 Orang	DPPPAKB	65.000.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani**	**100%**	**DPPPAKB**	**138.035.000**
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Layanan AMPK yang Terintergrasi dan Komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	32 Layanan	DPPPAKB	138.035.000
VI	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik**	**100%**	**DPPPAKB**	**25.000.000**
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**100%**	**DPPPAKB**	**25.000.000**

	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	DPPPAKB	25.000.000
VII	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase LKK Aktif**	**100%**	DPPPAKB	**343.536.784**
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota**	**Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan**	**100%**	DPPPAKB	**343.536.784**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 lembaga	DPPPAKB	30.000.000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	DPPPAKB	20.950.000

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	DPPPAKB	292.586.784
VIII	**Program Pengendalian Penduduk**	**Terlaksananya Penyediaan Data Keluarga dan KB**	**Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan**	**100%**	**DPPPAKB**	**220.314.000**
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	**Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota**	**Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**3 Laporan**	**DPPPAKB**	**220.314.000**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	DPPPAKB	65.574.000
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	DPPPAKB	89.430.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	DPPPAKB	65.310.000
IX	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Menurunya ASFR 15-19 Tahun**	**Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19**	**8.20 kelahiran per 1000 WUS**	**DPPPAKB**	**1.479.541.000**
		Meningkatnya Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	**Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk**	**100%**	**DPPPAKB**	

		Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR)**	**78,20%**	**DPPPAKB**	
		Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	**Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)**	**7,58%**	**DPPPAKB**	
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**4 Laporan**	**DPPPAKB**	**583.830.000**
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 laporan	DPPPAKB	212.840.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	DPPPAKB	140.700.000

	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	DPPPAKB	109.850.000
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	DPPPAKB	120.440.000
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**2 Laporan**	**DPPPAKB**	**148.770.000**
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	398 Orang	DPPPAKB	118.900.000
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7 organisasi	DPPPAKB	29.870.000
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**18,97%**	**DPPPAKB**	**551.171.000**

	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	DPPPAKB	25.740.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	811 Orang	DPPPAKB	489.501.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	DPPPAKB	25.935.000
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	DPPPAKB	9.995.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase Kesertaan Ber-KB Kabupaten/ Kota dengan Kesertaan Rendah**	**55,58%**	**DPPPAKB**	**195.770.000**
	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	42 Kampung	DPPPAKB	195.770.000

X	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**	**83,74%**	**DPPPAKB**	**1.418.830.000**
		Meningkatnya Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	**Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**	**100%**	**DPPPAKB**	
		Meningkatnya Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	**Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa**	**69,04%**	**DPPPAKB**	
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 tahun**	**21,2 Rata-rata usia kawin**	**DPPPAKB**	**455.230.000**
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	DPPPAKB	50.130.000
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan /Dokumen	DPPPAKB	70.000.000

	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	DPPPAKB	231.100.000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	8 Unit	DPPPAKB	104.000.000
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Keluarga yang Beresiko Stunting yang Mendapat Pendampingan dan Pemantauan**	**69 %**	**DPPPAKB**	**963.600.000**
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stuntung (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	DPPPAKB	438.000.000

	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	DPPPAKB	525.600.000
						8.824.505.597

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kota Pangkalpinang tahun 2025.

Secara garis besar, rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tahun 2025 memuat 10 (Sepuluh) Program dan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan besaran atau total anggaran yakni sebesar Rp **8.824.505.597 (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)** untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang.

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat selesai seperti yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja) ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pangkalpinang, 2 Juni 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG

M.AGUS SALIM,S.T.
PEMBINA TINGKAT I / IV b
NIP. 197407162005011008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2025
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun pertama

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPJMD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

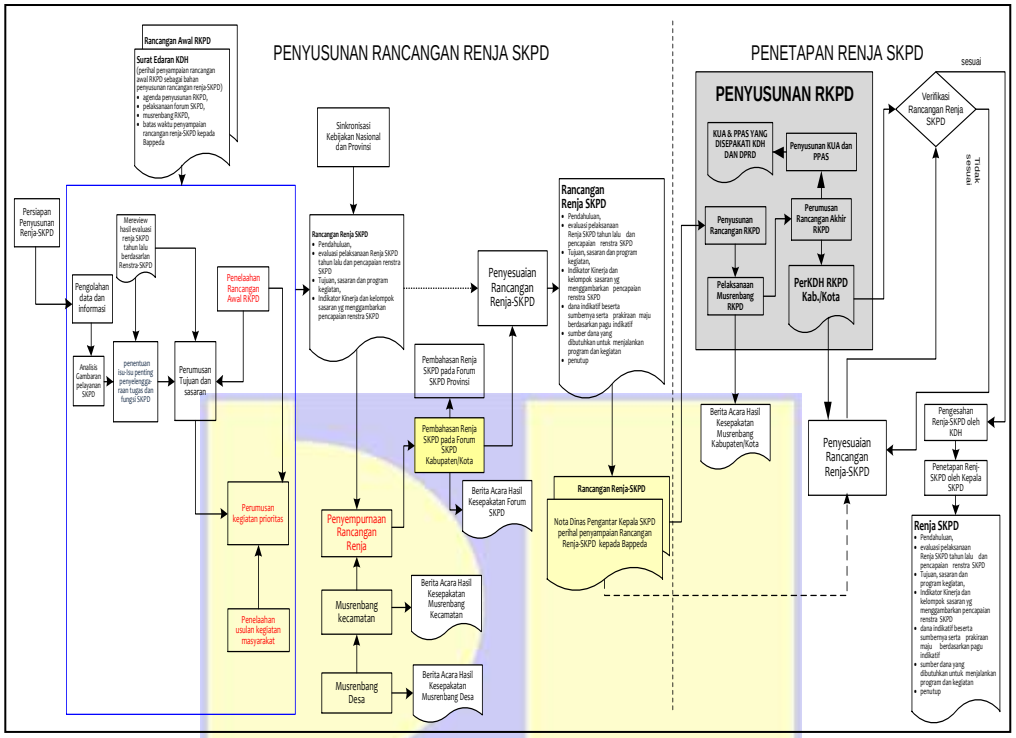

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, trakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
16. Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

17. Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

    Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);

20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).

22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu

Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Tahun 2024 (Tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

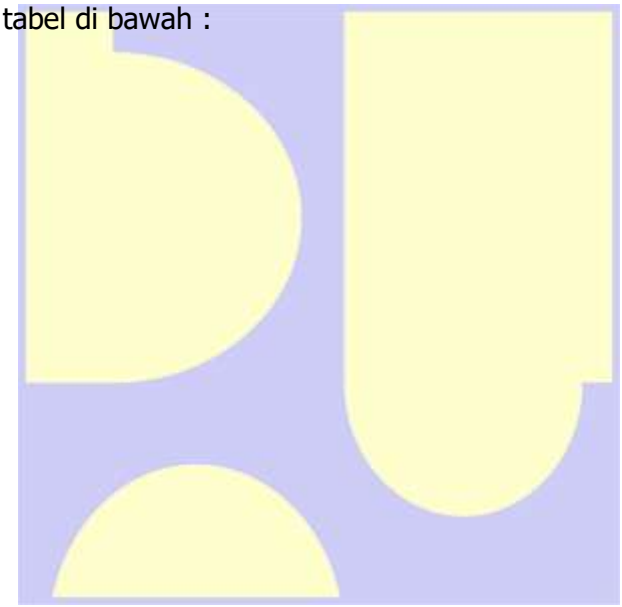

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang s.d 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	010301	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)**	**60**	**7.977.151.686**	**60**	**7.318.311.081**	**100**	**91,741**	**SEKRETARIS (PUPR)**
2		010301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	10.495.000	100	10.495.000	100	100	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
3		010301201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3.000.000	1	3.000.000	100	100	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
4		010301201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	4.695.000	2	4.695.000	100	100	Kasubbag. PEP dan Keuangan
5		010301201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	2.800.000	4	2.800.000	100	100	Kasubbag. PEP dan Keuangan
6		010301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	6.381.376.518	99,960	6.102.826.089	99,960	95,635	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
7		010301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	58	6.371.986.518	58	6.098.131.089	100	95,702	Kasubbag. PEP dan Keuangan
8		010301202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.695.000	1	4.695.000	100	100	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

9		010301202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.695.000	0	0	0	0	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
10		010301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	715.038.500	99,960	658.303.999	99,960	92,066	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
11		010301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	20.300.000	8	7.900.000	100	38,916	Kasubbag. PEP dan Keuangan
12		010301206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	23.300.000	2	22.585.000	100	96,931	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
13		010301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	60	109.738.500	100	84.771.000	100	77,248	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
14		010301206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	33.700.000	5	22.600.000	100	67,062	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
15		010301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	525.000.000	12	517.450.999	100	98,562	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
16		010301206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3.000.000	1	2.997.000	100	99,900	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
17		010301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	20.000.000	0	0	0	0	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
18		010301207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	20.000.000	0	0	0	0	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
19		010301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenetase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	604.659.972	99,960	409.726.046	99,960	67,761	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
20		010301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	216.000.000	1	97.465.544	100	45,123	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
21		010301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	57.500.000	1	17.610.150	100	30,626	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
22		010301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	331.159.972	1	294.650.352	100	88,975	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
23		010301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	245.581.696	99,960	136.959.947	99,960	55,770	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

24		010301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	63.681.696	1	47.876.292	100	75,181	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
25		010301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	7	181.900.000	7	89.083.655	100	48,974	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**91,741**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
26	**-**	**010302**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (Dengan Satuan:%)**	**35,020**	**4.157.026.448**	**45,810**	**2.776.825.012**	**100**	**66,798**	**Bidang Sumber Daya Air**
27		010302201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (Dengan Satuan:ha)	375,840	4.157.026.448	191,315	2.776.825.012	50,903	66,798	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
28		010302201011	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	1	201.229.000	1	200.268.000	100	99,522	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda
29		010302201014	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	1	501.848.000	3	499.827.000	100	99,597	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda
30		010302201049	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	3.453.949.448	1	2.076.730.012	100	60,126	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**66,798**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**S**	
31	**-**	**010303**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (Dengan Satuan:%)**	**31,300**	**251.889.800**	**307,260**	**237.214.122**	**100**	**94,174**	**Bidang Sumber Daya Air**
32		010303201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun (Dengan Satuan:%)	100	251.889.800	36	237.214.122	36	94,174	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
33		010303201028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Dengan Satuan:Liter/Detik)	170	251.889.800	350	237.214.122	100	94,174	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**94,174**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
34	-	010305	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. (Dengan Satuan:%)**	**85**	**1.213.898.284**	**99,750**	**1.102.933.906**	**100**	**90,859**	**Bidang Cipta Karya**
35		010305201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S (Dengan Satuan:Rumah)	550	1.213.898.284	2.564	1.102.933.906	100	90,859	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
36		010305201013	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja (Dengan Satuan:Unit)	2	467.592.284	2	376.190.606	100	80,453	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
37		010305201041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dengan Satuan:dokumen)	2	746.306.000	3	726.743.300	100	97,379	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**90,859**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
38	-	010306	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air (Dengan Satuan:%)**	**10**	**10.833.274.403**	**8,750**	**10.576.498.708**	**87,500**	**97,630**	**Bidang Sumber Daya Air**
39		010306201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota (Dengan Satuan:%)	100	10.833.274.403	113	10.576.498.708	100	97,630	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
40		010306201005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Dengan Satuan:Sistem Drainase Perkotaan)	59.420	6.984.121.000	38	6.926.723.828	0,064	99,178	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda
41		010306201028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Sistem Drainase Perkotaan)	11.655	3.849.153.403	37	3.649.774.880	0,317	94,820	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**87,500**	**97,630**	
				PREDIKAT KINERJA					**T**	**ST**	
42	-	010308	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota (Dengan Satuan:%)**	**25**	**7.781.339.676**	**9**	**7.430.016.442**	**36**	**95,485**	**Bidang Cipta Karya**
43		010308201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting (Dengan Satuan:Dokumen)	250	7.781.339.676	121	7.430.016.442	48,400	95,485	Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

44		010308201021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	10	7.532.062.676	1	7.211.539.442	10	95,745	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
45		010308201023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dengan Satuan:dokumen)	1	249.277.000	51	218.477.000	100	87,644	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**36,000**	**95,485**	
				PREDIKAT KINERJA					**SR**	**ST**	
46	**-**	**010310**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)**	**94,100**	**24.852.491.346**	**93,910**	**24.584.883.183**	**99,798**	**98,923**	**Bidang Bina Marga**
47		010310201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:%)	100	24.852.491.346	100	24.584.883.183	100	98,923	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
48		010310201001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dengan Satuan:Dokumen)	2	303.231.000	3	299.381.638	100	98,731	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
49		010310201004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Dengan Satuan:KM)	1	195.149.000	228,676	139.382.350	100	71,424	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
50		010310201005	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:KM)	406,140	1.168.572.000	407,570	1.161.433.659	100	99,389	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
51		010310201008	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Dengan Satuan:KM)	2	11.040.405.100	4,295	10.992.049.100	100	99,562	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
52		010310201010	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Dengan Satuan:KM)	3	7.594.535.000	6,592	7.538.583.800	100	99,263	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
53		010310201011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Dengan Satuan:KM)	1	2.561.327.512	2,850	2.477.893.586	100	96,743	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
54		010310201012	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Dengan Satuan:Jembatan)	240	1.685.574.234	21	1.674.328.000	8,750	99,333	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan

											Ahli Muda
55		010310201030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (Dengan Satuan:KM)	3	303.697.500	3	301.831.050	100	99,385	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**99,798**	**98,923**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
56	-	**010312**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW (Dengan Satuan:%)**	**80**	**673.043.568**	**99,960**	**630.369.703**	**100**	**93,660**	**Bidang Tata Ruang**
57		010312202	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronasi penyusunan RRTR (Dengan Satuan:%)	100	281.500.000	99,960	271.632.553	99,960	96,495	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
58		010312202002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	281.500.000	1	271.632.553	100	96,495	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda
59		010312203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronasi Pemanfaatan Ruang (Dengan Satuan:%)	100	263.400.176	99,960	256.619.036	99,960	97,426	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda
60		010312203003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dengan Satuan:dokumen)	1	263.400.176	1	256.619.036	100	97,426	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
61		010312204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang (Dengan Satuan:%)	100	128.143.392	99,930	102.118.114	99,930	79,691	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
62		010312204004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	1	128.143.392	2	102.118.114	100	79,691	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**93,660**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
63	-	**021004**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Dengan Satuan:%)**	**100**	**535.382.134**	**100**	**515.049.327**	**100**	**96,202**	**Bidang Pertanahan**
64		021004201	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen penyelesaian tanah sengketa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	535.382.134	3	515.049.327	100	96,202	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
65		021004201001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	10	488.382.134	11	478.616.349	100	98,000	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda

66		021004201002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	2	47.000.000	2	36.432.978	100	77,517	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**96,202**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
67	-	**021005**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (Dengan Satuan:%)**	**100**	**2.280.585.838**	**100**	**1.930.628.476**	**100**	**84,655**	**Bidang Pertanahan**
68		021005201	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian (Dengan Satuan:%)	100	2.280.585.838	50	1.930.628.476	50	84,655	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
69		021005201002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2.280.585.838	2	1.930.628.476	66,667	84,655	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**84,655**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**T**	
70	-	**021006**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dengan Satuan:%)**	**100**	**111.650.000**	**100**	**84.559.860**	**100**	**75,737**	**Bidang Pertanahan**
71		021006201	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee (Dengan Satuan:SK)	2	111.650.000	1	84.559.860	50	75,737	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
72		021006201001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	29.950.000	1	24.770.000	100	82,705	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
73		021006201002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	81.700.000	2	59.789.860	100	73,182	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**75,737**	
				PREDIKAT KINERJA					**ST**	**T**	
74	-	**021008**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase pengelolaan tanah kosong (Dengan Satuan:%)**	**100**	**451.851.960**	**100**	**443.219.039**	**100**	**98,089**	-

75		021008202	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong (Dengan Satuan:%)	100	451.851.960	100	443.219.039	100	98,089	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
76		021008202001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Dengan Satuan:Laporan)	1	256.051.960	3	252.825.289	100	98,740	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
77		021008202002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dengan Satuan:Dokumen)	1	195.800.000	2	190.393.750	100	97,239	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									**100,000**	**98,089**	
PREDIKAT KINERJA									**ST**	**ST**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)									**93,608**	**90,329**	
PREDIKAT KINERJA									**ST**	**ST**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- -
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	- -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	- -

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 21-02-2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKALPINANG
M.AGUS SALIM. ,S.T. NIP.197407162005011008

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra sudah cukup baik dilihat dari persentase capaian kegiatan karena sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik, namun apabila dibandingkan dari kesesuaian antara IKU kota, dokumen RENSTRA, IKU, Perkin dan RKT maka tidak dapat dikatakan sesuai. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu RPJMD Kota Pangkalpinang disusun isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dua tahun mendatang.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KOTA PANGKALPINANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANALISIS HASIL KEBUTUHAN			
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA (Rp)	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA (Rp)	LOKASI
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**59.716.944.081,00**		**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**39.635.687.405,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**48.114.047.153,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**38.858.485.533,00**	
-	**-**			**48.114.047.153,00**		**-**			**38.858.485.533,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota***	**35,02 %**	**2.129.305.000,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota***	**35,02 %**	**1.655.230.704,00**	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota*	338,256 ha	2.129.305.000,00		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota*	338,256 ha	1.655.230.704,00	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya									

		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.518.468.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara*	1 Unit	1.543.556.704,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai									
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	3 Dokumen	610.837.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun*	2 Dokumen	111.674.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi***	**36,17 %**	**706.092.000,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi***	**36,17 %**	**11.197.534.950,00**	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun*	100 %	706.092.000,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun*	100 %	11.197.534.950,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									

		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	35 Liter/Detik	706.092.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun*	35 Liter/Detik	11.197.534.950,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Persentase volume sampah yang tertangani***	**87,5 %**	**3.672.900.000,00**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Persentase volume sampah yang tertangani***	**87,5 %**	**120.000.000,00**	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Timbunan Sampah yang ditangan*	22,5 %	3.672.900.000,00		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Timbunan Sampah yang ditangan*	15,0%	120.000.000,00	
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
		Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	8 Unit	3.672.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan*	1 Unit	120.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik***	**90 %**	**235.842.610,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik***	**90 %**	**338.830.982,00**	

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S*	700 rumah	235.842.610,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S*	700 rumah	338.830.982,00	
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja									
		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit	175.342.610,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan*	2 Unit	251.380.982,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	60.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun*	1 Dokumen	87.450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air***	**-10 %**	**10.514.376.000,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air***	**-10 %**	**5.011.919.704,00**	

1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota*	100 %	10.514.376.000,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota*	100 %	5.011.919.704,00	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	22 Sistem Drainase Perkotaan	3.755.181.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi*	3 Sistem Drainase Perkotaan	1.824.919.704,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	49 Sistem Drainase Perkotaan	6.759.195.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*	37 Sistem Drainase Perkotaan	3.187.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota***	**30 %**	**7.323.184.000,00**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota***	**30 %**	**2.919.974.176,00**	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting*	250 Dokumen	7.323.184.000,00		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting*	250 Dokumen	2.919.974.176,00	

1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	7.029.834.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	7 Dokumen	2.743.674.176,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250 Dokumen	293.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*	250 Dokumen	176.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota***	**94,7 %**	**14.414.777.200,00**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota***	**94,7 %**	**7.210.237.762,00**	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Panjang Jalan yang Dibangun*	100 %	14.414.777.200,00		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Panjang Jalan yang Dibangun*	100 %	7.210.237.762,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									

		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	201.674.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun*	0 Dokumen	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa									
		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	403,137 KM	25.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya*	403,137 KM	100.450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									
		Panjang Jalan yang Dibangun	1,3 KM	1.613.481.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Panjang Jalan yang Dibangun*	1,04 KM	789.192.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan									
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,7 KM	4.150.602.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*	0,4 KM	4.447.310.450,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									

		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,7 KM	6.364.221.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala*	0,15 KM	205.538.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	120 KM	67.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*	120 KM	70.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	1.992.299.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*	0,7 KM	1.597.347.312,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW***	**90 %**	**2.377.269.994,00**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW***	**90 %**	**2.076.543.568,00**	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase tersusunnya dokumen RDTR*	100 %	57.100.000,00		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase tersusunnya dokumen RDTR*	100 %	48.350.000,00	
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									

		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	57.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.*	1 Laporan	48.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronasi penyusunan RRTR*	100 %	2.019.649.994,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronasi penyusunan RRTR*	100 %	1.597.000.000,00	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota									
		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.019.649.994,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1.597.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronasi Pemanfaatan Ruang*	100 %	104.500.000,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronasi Pemanfaatan Ruang*	100 %	47.750.000,00	
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang									

		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	104.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku*	1 Layanan	47.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang*	100 %	196.020.000,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang*	100 %	383.443.568,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	196.020.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*	1 Dokumen	383.443.568,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	**65 Nilai 60.50 Nilai**	**11.740.300.349,00**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	**65 Nilai 60.50 Nilai**	**8.328.213.687,00**	

-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	1.958.980.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	523.990.352,00	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	174.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	1.222.327.150,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	294.990.352,00	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	600.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	320.253.038,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu*	100 %	14.400.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu*	100 %	3.510.000,00	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.550.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	1.210.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	1.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*	100 %	7.246.222.199,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*	100 %	6.208.978.301,00	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	7.246.222.199,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	58 Orang/bulan	6.208.978.301,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	1.222.327.150,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	442.053.338,00	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.420.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	2.656.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	161.102.150,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	60 Paket	97.919.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	380.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	7 Paket	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	39.655.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 Paket	18.225.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	36.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah*	100 %	0,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah*	100 %	0,00	
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	0 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	1.958.980.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	523.990.352,00	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	55.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	55.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.687.980.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	294.990.352,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik perangkat daerah*	100 %	1.298.371.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik perangkat daerah*	100 %	1.149.681.696,00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	66.181.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	1.255.121.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	27 Unit	1.083.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.602.896.928,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**777.201.872,00**	
-	**-**			**6.602.896.928,00**		**-**			**777.201.872,00**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi***	**100 %**	**372.429.000,00**		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi***	**100 %**	**22.200.000,00**	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen penyelesaian tanah sengketa*	2 Dokumen	372.429.000,00		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen penyelesaian tanah sengketa*	2 Dokumen	22.200.000,00	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	27.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	2 Berita Acara	10.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

		Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	345.229.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	10 Dokumen	12.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum***	**100 %**	**5.611.598.128,00**		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum***	**100 %**	**741.001.872,00**	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian*	100 %	5.611.598.128,00		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian*	100 %	741.001.872,00	
2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	3 Laporan	5.611.598.128,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan*	3 Laporan	741.001.872,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee***	**100 %**	**173.500.000,00**		**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee***	**100 %**	**0**	

2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee*	2 SK	173.500.000,00		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee*	2 SK	0	
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah									
		Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	114.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah									
		Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	***Persentase pengelolaan tanah kosong***	**100 %**	**445.369.800,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	***Persentase pengelolaan tanah kosong***	**100 %**	**14.000.000,00**	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong*	100 %	445.369.800,00		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong*	100 %	14.000.000,00	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong									
		Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	226.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.*	1 Laporan	7.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong									
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	218.469.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong*	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
J U M L A H				**59.716.944.081,00**		**J U M L A H**			**39.635.687.405,00**	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang melaksanakan kegiatan teknis yang sering langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horizontal, sehingga dapat mengakomodir usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran dari pernyataan misi, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah: "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah jabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional;
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
   1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;

2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
3) Kapasitas tampung per kapita;
4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.

2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
   1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
   2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
   1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
   2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
   1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
   2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
   3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
   4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
   5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;

6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian sasaran ke-: 5 (lima) yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif yang ditetapkan dalam salah satu tujuan RPD kota pangkalpinang yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup Yang Berkelanjutan.

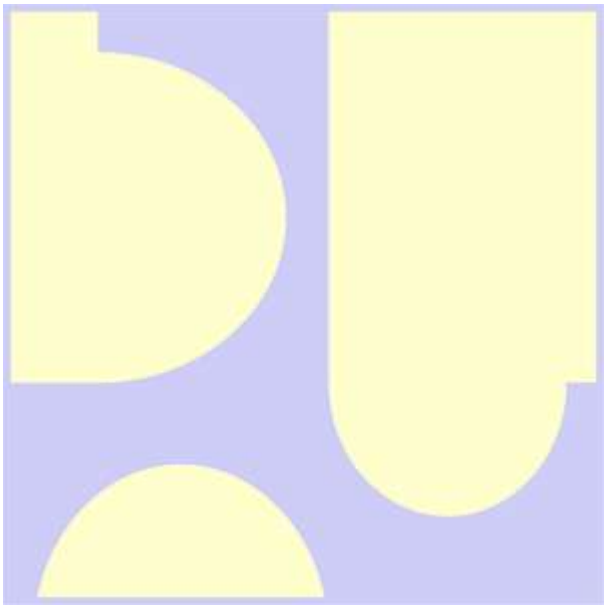

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

a. Tujuan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu :
   1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Handal

b. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu :
   1. Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum
   2. Meningkatnya Pelayanan Air Bersih
   3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah
   4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota Pangkalpinang
   5. Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah Kota Pangkalpinang

3.3 Program dan Kegiatan

Bersasarkan hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Didalam RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2025 program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang akan melaksanakan 9 program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4 Program pada urusan Pertanahan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
1,03,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1,03,02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
1,03,03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1,03,04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**

1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1,03,05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1,03,06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1,03,08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
1,03,10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan
1,03,12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

2,10,04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2,10,05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2,10,06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
2,10,08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang pada APBD Perubahan Tahun 2025 mendatang akan melaksanakan 9 program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 4 Program pada urusan Pertanahan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk sisa tahun anggaran berjalan, dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

TABEL 4.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**59.716.944.081,00**	**56.613.802.883,00**	**39.635.687.405,00**	**-20.081.256.676,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**53.114.047.153,00**	**51.530.901.011,00**	**38.858.485.533,00**	**-14.255.561.620,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**53.114.047.153,00**	**51.530.901.011,00**	**38.858.485.533,00**	**-14.255.561.620,00**							**0,00**	
1,	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**60.50 65 Nilai Nilai**	**60.50 65 Nilai Nilai**	**11.740.300.349,00**	**9.519.159.603,00**	**8.328.213.687,00**	**-11.740.300.349,00**							**0,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu*	100 %	100 %	14.400.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	-10.890.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Birokrasi dan Demokrasi Daerah				
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.550.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-4.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.750.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	-3.540.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-2.950.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*	100 %	100 %	7.246.222.199,00	6.806.617.367,00	6.208.978.301,00	-1.037.243.898,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	57 Orang/bulan	7.246.222.199,00	6.806.617.367,00	6.208.978.301,00	-1.037.243.898,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

											PERJANJIAN KERJA						
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	1.222.327.150,00	1.064.110.188,00	442.053.338,00	-780.273.812,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.420.000,00	5.420.000,00	2.656.000,00	-2.764.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Daerah				
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	380.150.000,00	447.730.000,00	0,00	-380.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	161.102.150,00	153.702.150,00	97.919.300,00	-63.182.850,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	39.655.000,00	40.255.000,00	18.225.000,00	-21.430.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	381.003.038,00	320.253.038,00	-279.746.962,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	3.000.000,00	-33.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah*	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	100 %	1.958.980.000,00	495.240.352,00	523.990.352,00	-1.434.989.648,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	144.000.000,00	174.000.000,00	-42.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.687.980.000,00	296.240.352,00	294.990.352,00	-1.392.989.648,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik perangkat daerah*	100 %	100 %	1.298.371.000,00	1.149.681.696,00	1.149.681.696,00	-148.689.304,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.250.000,00	66.181.696,00	66.181.696,00	22.931.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	1.255.121.000,00	1.083.500.000,00	1.083.500.000,00	-171.621.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2,	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota**	**35,02 %**	**35,02 %**	**2.129.305.000,00**	**1.755.230.704,00**	**1.655.230.704,00**	**-2.129.305.000,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota*	338,256 ha	338,256 ha	2.129.305.000,00	1.755.230.704,00	1.655.230.704,00	-474.074.296,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya															
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1.518.468.000,00	1.543.556.704,00	1.543.556.704,00	25.088.704,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai															

			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	3 Dokumen	2 Dokumen	610.837.000,00	211.674.000,00	111.674.000,00	-499.163.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi**	**36,17 %**	**36,17 %**	**706.092.000,00**	**11.553.795.962,00**	**11.197.534.950,00**	**-706.092.000,00**							**0,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun*	100 %	100 %	706.092.000,00	11.553.795.962,00	11.197.534.950,00	10.491.442.950,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	35 Liter/Detik	35 Liter/Detik	706.092.000,00	11.553.795.962,00	11.197.534.950,00	10.491.442.950,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

											GULER		Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan				
4,	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase volume sampah yang tertangani**	**87,5 %**	**87,5 %**	**3.672.900.000,00**	**145.000.000,00**	**120.000.000,00**	**-3.672.900.000,00**							**0,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Timbunan Sampah yang ditangani*	15,0 %	15,0 %	3.672.900.000,00	145.000.000,00	120.000.000,00	-3.552.900.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS															
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	8 Unit	1 Unit	3.672.900.000,00	145.000.000,00	120.000.000,00	-3.552.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**90 %**	**90 %**	**235.842.610,00**	**363.830.982,00**	**338.830.982,00**	**-235.842.610,00**							**0,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S*	700 rumah	700 rumah	235.842.610,00	363.830.982,00	338.830.982,00	102.988.372,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja															
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	175.342.610,00	251.380.982,00	251.380.982,00	76.038.372,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	60.500.000,00	112.450.000,00	87.450.000,00	26.950.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan				
6,	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air**	**-10 %**	**-10 %**	**10.514.376.000,00**	**10.432.392.704,00**	**5.011.919.704,00**	**-10.514.376.000,00**							**0,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota*	100 %	100 %	10.514.376.000,00	10.432.392.704,00	5.011.919.704,00	-5.502.456.296,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan															
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	22 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3.755.181.000,00	2.589.919.704,00	1.824.919.704,00	-1.930.261.296,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan															

			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	49 Sistem Drainase Perkotaan	37 Sistem Drainase Perkotaan	6.759.195.000,00	7.842.473.000,00	3.187.000.000,00	-3.572.195.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7,	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota**	**30 %**	**30 %**	**7.323.184.000,00**	**4.592.774.176,00**	**2.919.974.176,00**	**-7.323.184.000,00**							**0,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting*	250 Dokumen	250 Dokumen	7.323.184.000,00	4.592.774.176,00	2.919.974.176,00	-4.403.209.824,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															

			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	7 Dokumen	7.029.834.000,00	4.395.974.176,00	2.743.674.176,00	-4.286.159.824,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250 Dokumen	250 Dokumen	293.350.000,00	196.800.000,00	176.300.000,00	-117.050.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8,	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota**	**94,7 %**	**94,7 %**	**14.414.777.200,00**	**10.713.423.312,00**	**7.210.237.762,00**	**-14.414.777.200,00**							**0,00**	

	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Panjang Jalan yang Dibangun*	100 %	100 %	14.414.777.200,00	10.713.423.312,00	7.210.237.762,00	-7.204.539.438,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan															
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	201.674.000,00	0,00	0,00	-201.674.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa															
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	403,137 KM	403,137 KM	25.000.000,00	100.450.000,00	100.450.000,00	75.450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun	1,3 KM	1.04 KM	1.613.481.000,00	1.184.192.000,00	789.192.000,00	-824.289.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,7 KM	0.4 KM	4.150.602.000,00	5.976.496.000,00	4.447.310.450,00	296.708.450,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJ	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

											AAN UMUM						
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan															
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,7 KM	0.15 KM	6.364.221.000,00	1.656.538.000,00	205.538.000,00	-6.158.683.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan															

			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	120 KM	120 KM	67.500.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00	2.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan															
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	0.7 KM	1.992.299.200,00	1.725.347.312,00	1.597.347.312,00	-394.951.888,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9,	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW**	**90 %**	**90 %**	**2.377.269.994,00**	**2.455.293.568,00**	**2.076.543.568,00**	**-2.377.269.994,00**							**0,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase tersusunnya dokumen RDTR*	100 %	100 %	57.100.000,00	57.100.000,00	48.350.000,00	-8.750.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang															

			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	1 Laporan	57.100.000,00	57.100.000,00	48.350.000,00	-8.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronasi penyusunan RRTR*	100 %	100 %	2.019.649.994,00	1.880.500.000,00	1.597.000.000,00	-422.649.994,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota															
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2.019.649.994,00	1.880.500.000,00	1.597.000.000,00	-422.649.994,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronasi Pemanfaatan Ruang*	100 %	100 %	104.500.000,00	104.500.000,00	47.750.000,00	-56.750.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang															
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	1 Layanan	104.500.000,00	104.500.000,00	47.750.000,00	-56.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang*	100 %	100 %	196.020.000,00	413.193.568,00	383.443.568,00	187.423.568,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang															

			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	196.020.000,00	413.193.568,00	383.443.568,00	187.423.568,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.602.896.928,00**	**5.082.901.872,00**	**777.201.872,00**	**-5.825.695.056,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**6.602.896.928,00**	**5.082.901.872,00**	**777.201.872,00**	**-5.825.695.056,00**							**0,00**	
1,	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**100 %**	**100 %**	**372.429.000,00**	**200.000.000,00**	**22.200.000,00**	**-372.429.000,00**							**0,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen penyelesaian tanah sengketa*	2 Dokumen	2 Dokumen	372.429.000,00	200.000.000,00	22.200.000,00	-350.229.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															

			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	27.200.000,00	19.200.000,00	10.200.000,00	-17.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	345.229.000,00	180.800.000,00	12.000.000,00	-333.229.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2,	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum**	**100 %**	**100 %**	**5.611.598.128,00**	**4.682.901.872,00**	**741.001.872,00**	**-5.611.598.128,00**							**0,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian*	100 %	100 %	5.611.598.128,00	4.682.901.872,00	741.001.872,00	-4.870.596.256,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Wilayah Berbasis Lingkungan				
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	5.611.598.128,00	4.682.901.872,00	741.001.872,00	-4.870.596.256,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3,	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**100 %**	**100 %**	**173.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-173.500.000,00**							**0,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee*	2 SK	2 SK	173.500.000,00	0,00	0,00	-173.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah															

			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	114.500.000,00	0,00	0,00	-114.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah															
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	59.000.000,00	0,00	0,00	-59.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4,	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase pengelolaan tanah kosong**	**100 %**	**100 %**	**445.369.800,00**	**200.000.000,00**	**14.000.000,00**	**-445.369.800,00**							**0,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong*	100 %	100 %	445.369.800,00	200.000.000,00	14.000.000,00	-431.369.800,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong															
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	226.900.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	-219.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong															
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen	218.469.800,00	185.000.000,00	7.000.000,00	-211.469.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H					**59.716.944.081,00**	**56.613.802.883,00**	**39.635.687.405,00**	**-20.081.256.676,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta Renstra RPD Tahun 2024-2026, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pangkalpinang.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKALPINANG

Jalan Jend. Sudirman – Selindung Baru Pangkalpinang
✆ (0717) 424524

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan selama periode 2024-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian. Dokumen Renja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2025). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang pada akhir tahun anggaran 2025. Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disusun, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Perubahan Renja ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan potensi di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Perkebunan dan Holtikultura serta Peternakan.

Kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kontribusinya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini.

Pangkalpinang, 19 Mei 2025

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKAL PINANG

SAMRI, SP, M. Si
Pembina Tk. / IVb
NIP. 197205041993031006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR GAMBAR.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.1.1 Pengertian Renja 1

1.1.2. Proses Penyususnan Renja.....2

1.2 Landasan Hukum. 3

1.3 Maksud dan Tujuan.....8

1.4 Sistematika Penulisan.....9

BAB II EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....11

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan **Capaian** Renstra OPD11

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....16

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi SKPD.....1

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....32

3.1Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....32

3.2 Tujuan dan Sasaran OPD.....32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....34

BAB V PENUTUP.....50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja.....3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pangkal Pinang melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja 2025.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan daerah tiga tahunan. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pangkal Pinang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan pertanian dan ketahanan pangan. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur

Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Operasional Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah ini

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

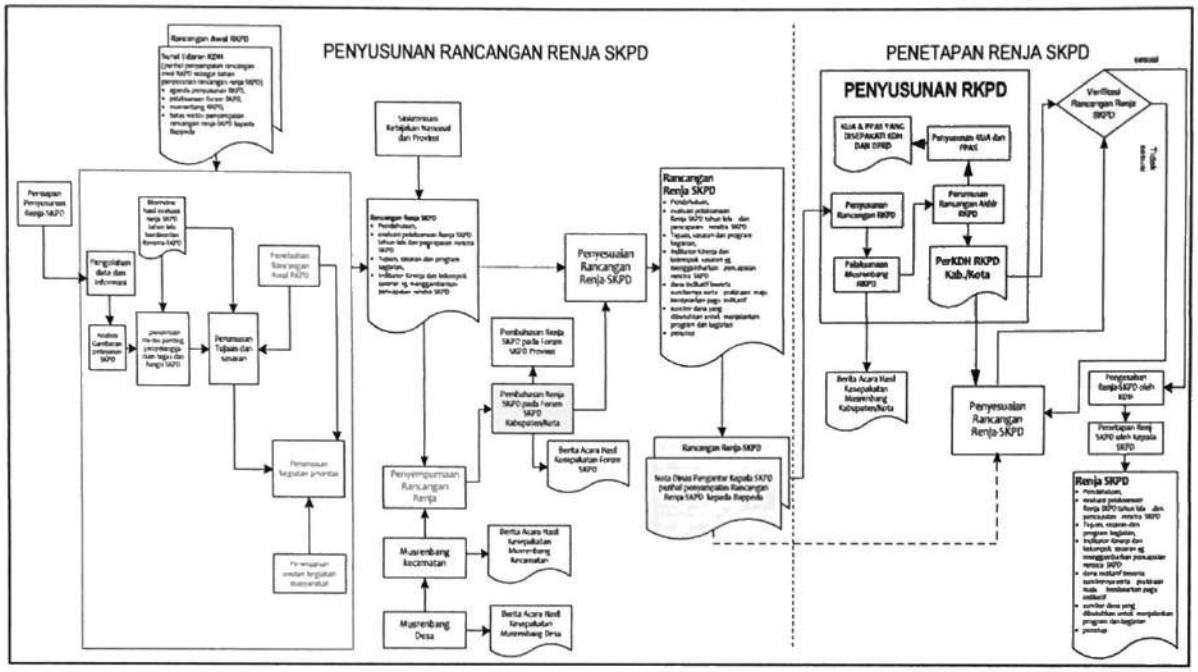

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasiifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang 2007-2025
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
16. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025 Tentang Perubahan RKPD 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 277)

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pangan dan Pertanian memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas
B. Sekretaris dengan dua Subbagian
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    b. Subbagian PEP dan Keuangan
C. Bidang Ketahanan Pangan; dengan tiga Seksi
    a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi pangan
    b. Seksi Konsumsi Pangan
    c. Seksi Seksi Keamanan Pangan

D. Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura; dengan tiga Seksi
   a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
   b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
   c. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan

E. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tiga Seksi
   a. Seksi Pembibitan dan Produksi
   b. Seksi Kesehatan Hewan
   c. Seksi Kesmavet dan PP

F. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari
   a. UPT. Rumah Potong Hewan (RPH) dengan satu Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
   b. UPT. Pusat Kesehatan Hewan dengan satu Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. UPT. Perbibitan dengan satu Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   a. Penyuluh Pertanian Pelaksana
   b. Penyuluh Pertanian Pertama
   c. Penyuluh Pertanian Utama

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang adalah untuk:

a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura, Peternakan selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di

Ketahanan Pangan, TPPH, Peternakan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang adalah :

1. Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 meliputi

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja TW 1

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja TW 1

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja TW 1 dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja TW 1 dan Capaian Renstra SKPD

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang selama tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan saran dan tujuan.

1. Evaluasi Renja Program Tahun 2025 TW 1 (terlampir)

2.2. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani Dinas Pangan dan Pertanian sebagai berikut:

1. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) sudah melampaui target tahun 2023 sebesar 90 tapi belum mencapai ideal. Skor Pola Pangan Harapan secara Nasional tahun 2024 sebesar 95.2;
2. Jumlah cadangan pangan masih dibawah seharusnya. Jumlah cadangan yang ada sebesar 25.932 ton. Seharusnya Kota Pangkalpinang mempunyai cadangan pangan sebesar 74 ton. Ketersediaan cadangan pangan Kota Pangkalpinang baru sebesar 35.04%;
3. Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian dan peternakan;
4. Berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak dari peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan analisa faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan di bidang pangan. pertanian dan peternakan yang menjadi kekuatan. kelemahan. tantangan dan peluang bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang dalam pelayanan pembangunan pangan dan pertanian.

2.2.1 Kekuatan

1) Adanya peluang usaha produk pangan berbasis pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman;
2) Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam hal ini Kota Pangkal Pinang untuk membangun dan melaksanakan kepemerintahan yang baik (*Good Governance);*
3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang memadai;
4) Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha.

2.2.2 Kelemahan

1) belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;

2) belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya;
3) Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya.

2.2.3 Peluang

1) Adanya peluang usaha produk pangan berbasis pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman;
2) Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah sehingga dapat bersaing dipasar domestic dan global;
3) Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha;
4) Pemanfaatan lahan pertanian melalui penerapan budidaya tanaman yang baik dan produk yang baik dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

2.2.4 Tantangan

1) Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman penduduk menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian sehingga akan berpengaruh terhadap hasil panen dan produktifitas pertanian;
2) Usaha pertanian dalam konteks budidaya tanaman memiliki resiko yang cukup tinggi sebagai akibat dari perubahan cuaca dan iklim. dan perubahan musim. akan berdampak pada peningkatkan perkembangan organisme penganggu tumbuhan (OPT) seperti serangan hama dan penyakit serta menurunnya kualitas pemeliharaan. sehingga mengakibatkan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya;
3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi seperti masih rendahnya investasi yang menggunakan potensi komoditas unggulan dan sumberdaya daerah. rendahnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah. belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal. dan masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
4) Terbatasnya lahan pertanian yang luas menyebabkan pemanfaatan pekarangan melalui Kelompok Wanita Tani perlu lebih dioptimalkan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang harus mengacu pada Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang agar tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan sehingga pencapaian tujuan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang tercapai.

3.2 Tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang

Tujuan adalah merupakan implementasi penjabaran dari Renstra Dinas Pangan dan Pertanian merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang, tujuan yang akan dicapai antara lain :

"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian"

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sedangkan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuatitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Produkitivitas komoditi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan
2. Menigkatnya Skor Pola Pangan Harapan
3. Menigkatnya Ketersediaan Pangan Utama

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang tahun 2025 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut : Adapun Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 (terlampir).

V. PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan dengan adanya Rancangan awal (Ranwal) ini dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang akan dlaksanakan. Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang penyusunannya dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024–2026, serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2025. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian Kota Pangkal Pinang tahun 2025 TW 1, kedepan diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi agar dapat terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu, koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

KEPALA DINAS PANGAN
DANPERTANIAN KOTA PANGKAL PINANG

SAMRI, SP, M. Si
NIP. 197205041993031006

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan. Jenderal Sudirman - Selindung Baru Pangkalpinang (33117),
Telepon/Fax : (0717) 424524
www.dpp.pangkalpinangkota.go.id Email:dispaper@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 188.4/040/KEP/DISPAPER/V/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKA LPINANG
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025;
b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. JUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturaran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasiifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang 2007-2025

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor)

18. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

19. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025 Tentang Perubahan RKPD 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 277)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan persiapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian;

2. menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan serta berpedoman pada draft awal RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKAL PINANG

SAMRI, SP, M. Si
Pembina Tk. / IVb
NIP. 197205041993031006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 188.4/040 /KEP/DISPAPER/V/2025
TANGGAL : 09 Mei 2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKAL PINANG

No.	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang	Ketua Tim
3.	Kasubbaq PEP dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Ketahanan Pangan	Ketua I Pokja
	a. Kasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
	b. Kasi Konsumsi Pangan	Anggota
	c. Kasi Keamanan Pangan	Anggota
5.	Kabid Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Ketua II Pokja
	a. Kasi Prasarana dan Sarana Penyuluhan	Anggota
	b. Kasi Perbenihan dan Perlindungan	Anggota
	c. Kasi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
6.	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua III Poka
	a. Kasi Pembibitan dan Produksi	Anggota
	b. Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	c. Kasi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
7.	Kasubbaq Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Ka.UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Ka.UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Ka.UPT Perbibitan	Anggota

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKAL PINANG

SAMRI, SP, M. Si
Pembina Tk. / IVb
NIP. 197205041993031006

TRIWULAN IV
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Pangan Dan Pertanian
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	020901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100	7.775.890.532	100	1.131.800.417	100	2.242.091.142	100	1.877.128.358	100	1.978.522.048	100	7.229.541.965	100	92,974	Sekretaris
				Persetase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:persen)	100		100		100		100		0		100		100		Sekretaris
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:persen)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretaris
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:persen)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretaris
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:persen)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretaris
2		020901202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	5.559.598.451	1	969.713.556	1	1.932.762.319	2	1.111.738.463	3	1.064.696.612	3	5.078.910.950	100	91,354	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3		020901202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	55	5.559.598.451	50	969.713.556	50	1.932.762.319	50	1.111.738.463	55	1.064.696.612	55	5.078.910.950	100	91,354	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4		020901206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	655.029.178	1	23.767.730	2	72.147.156	3	45.253.488	4	500.633.867	4	641.802.241	100	97,981	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5		020901206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	6.499.000	1	639.000	1	0	0	0	1	5.239.422	1	5.878.422	100	90,451	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6		020901206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	424.938.250	0	0	0	0	0	0	1	415.667.000	1	415.667.000	100	97,818	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7		020901206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	31.628.160	1	6.623.750	1	2.905.000	0	2.941.050	1	16.024.000	1	28.493.800	100	90,090	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8		020901206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	18.915.000	1	4.200.000	1	0	0	3.500.000	1	11.130.000	1	18.830.000	100	99,551	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9		020901206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	173.048.768	1	12.304.980	1	69.242.156	0	38.812.438	1	52.573.445	1	172.933.019	100	99,933	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10		020901207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	511.445.000	0	0	0	0	100	497.230.000	0	1.445.000	100	498.675.000	100	97,503	Kasubbaq Umum dan Kepegawaian
				Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1		0		0		1		1		1		100		KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11		020901207002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	15	511.445.000	0	0	0	0	14	497.230.000	15	1.445.000	15	498.675.000	100	97,503	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12		020901208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	755.105.204	1	120.919.515	2	182.023.743	3	166.206.983	3	246.498.634	3	715.648.875	100	94,775	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13		020901208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	108.620.000	1	23.776.347	1	23.461.491	1	17.487.231	1	36.931.498	1	101.656.567	100	93,589	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		020901208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	26.401.500	0	0	1	2.500.000	1	6.425.000	1	12.480.000	1	21.405.000	100	81,075	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		020901208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	620.083.704	1	97.143.168	1	156.062.252	1	142.294.752	1	197.087.136	1	592.587.308	100	95,566	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
16		020901209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	294.712.699	1	17.399.616	1	55.157.924	1	56.699.424	1	165.247.935	1	294.504.899	100	99,929	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		020901209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	5	192.511.696	1	17.399.616	2	55.157.924	4	56.699.424	5	63.046.932	5	192.303.896	100	99,892	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		020901209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	102.201.003	0	0	0	0	0	0	1	102.201.003	1	102.201.003	100	100	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,000	92,974	
PREDIKAT KINERJA																	ST	ST	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19	-	020903	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Kualitas konsumsi pangan yang dii ndi kasi kan oleh skor pola pangan harapan (PPH) (Dengan Satuan:%)**	**90**	**533.980.000**	**60**	**3.570.000**	**62**	**6.650.000**	**80**	**0**	**90**	**511.022.055**	**90**	**521.242.055**	**100**	**97,615**	**Bidang Ketahanan Pangan**
20		020903201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Dengan Satuan:Laporan)	3	1.000.000	1	0	1	450.000	2	0	3	500.000	3	950.000	100	95	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
21		020903201001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Dengan Satuan:Laporan)	3	500.000	0	0	2	225.000	2	0	3	250.000	3	475.000	100	95	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
22		020903201004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dengan Satuan:Dokumen)	5	500.000	2	0	3	225.000	3	0	5	250.000	5	475.000	100	95	Sub Koordinator Konsumsi Pangan
23		020903204	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Dengan Satuan:Laporan)	2	532.980.000	1	3.570.000	2	6.200.000	2	0	2	510.522.055	2	520.292.055	100	97,619	Sub Koordinator Konsumsi Pangan
24		020903204001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	5	500.000	0	0	0	0	5	0	5	470.000	5	470.000	100	94	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
25		020903204002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	3	532.480.000	2	3.570.000	3	6.200.000	3	0	0	510.052.055	3	519.822.055	100	97,623	Sub Koordinator Konsumsi Pangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**100,000**	**97,615**	
PREDIKAT KINERJA																	**ST**	**ST**	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
26	**-**	**020904**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase pengadaan cadangan pangan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**459.228.000**	**25**	**0**	**25**	**0**	**25**	**0**	**100**	**430.991.249**	**100**	**430.991.249**	**100**	**93,851**	**Bidang Ketahanan Pangan**
27		020904201	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.000.000	1	0	0	0	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	100	100	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
28		020904201001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.000.000	2	0	0	0	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	100	100	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
29		020904202	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	457.228.000	0	0	0	0	1	0	1	428.991.249	1	428.991.249	100	93,824	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
30		020904202002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	457.228.000	0	0	0	0	1	0	1	428.991.249	1	428.991.249	100	93,824	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**93,851**	
												PREDIKAT KINERJA					**ST**	**ST**	
31	**-**	**020905**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan yang aman dikonsumsi (Dengan Satuan:%)**	**90**	**54.403.650**	**20**	**0**	**80**	**10.368.000**	**90**	**435.000**	**90**	**42.638.596**	**90**	**53.441.596**	**100**	**98,232**	**Bidang Ketahanan Pangan**
32		020905201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	2	54.403.650	1	0	2	10.368.000	2	435.000	2	42.638.596	2	53.441.596	100	98,232	Sub Koordinator Keamanan Pangan
33		020905201004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	36.403.650	1	0	3	1.480.000	3	435.000	3	34.038.596	3	35.953.596	100	98,764	Sub Koordinator Keamanan Pangan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34		020905201005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	18.000.000	1	0	3	8.888.000	95,750	0	3	8.600.000	3	17.488.000	100	97,156	Sub Koordinator Keamanan Pangan
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				**100,000**	**98,232**	
													PREDIKAT KINERJA				**ST**	**ST**	
35	**-**	**032702**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktifitas pertanian per hektar per tahun (Dengan Satuan:%)**	**100**	**242.060.472**	**25**	**25.400.312**	**40**	**45.100.468**	**90**	**41.413.174**	**100**	**121.046.624**	**100**	**232.960.578**	**100**	**96,241**	**Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura**
				Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak (Dengan Satuan:%)	**30**		**15**		**10**		**25**		**30**		**30**		**100**		**Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura**
36		032702201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian (Dengan Satuan:unit)	9	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.850.000	0	8.850.000	0	98,333	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
				Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	1		0		1		1		1		1		100		Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
37		032702201001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.000.000	0	0	1	0	1	0	100	8.850.000	100	8.850.000	100	98,333	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
38		032702202	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Sumber Daya Genetik(SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:orang)	5	47.396.992	0	7.257.232	0	12.885.848	0	10.885.848	0	15.264.464	0	46.293.392	0	97,672	UPTD Perbibitan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		1		1		1		1		100		UPTD Perbibitan
39		032702202001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Dengan Satuan:VUB)	1	47.396.992	1	7.257.232	1	12.885.848	1	10.885.848	1	15.264.464	1	46.293.392	100	97,672	UPTD Perbibitan
40		032702203	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data hewan ternak dan produk ternak (Dengan Satuan:data)	5	4.000.000	0	0	0	0	0	2.677.500	0	1.180.000	0	3.857.500	0	96,438	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
				Jumlah laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:laporan)	1		0		1		1		1		1		100		Sub Koordinator Kesmavet, Pengelohan, dan Pemasaran
41		032702203001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.000.000	0	0	1	0	1	2.677.500	1	1.180.000	1	3.857.500	100	96,438	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
42		032702205	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Persen)	6	181.663.480	0	18.143.080	0	32.214.620	0	27.849.826	0	95.752.160	0	173.959.686	0	95,759	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	2		1		1		1		2		2		100		Sub Koordinator Kesmavet, Pengelohan, dan Pemasaran

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
43		032702205001	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Dengan Satuan:Ekor)	75	5.000.000	0	0	0	0	75	2.200.000	75	2.537.000	75	4.737.000	100	94,740	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelohan, dan Pemasaran
44		032702205005	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Dengan Satuan:Ton)	40	176.663.480	10	18.143.080	20	32.214.620	30	25.649.826	40	93.215.160	40	169.222.686	100	95,788	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													**100,000**	**96,241**	
				PREDIKAT KINERJA													**ST**	**ST**	
45	**-**	**032703**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase penyediaan dan pengembangan prasaranan Pertanian (Dengan Satuan:%)**	**80**	**49.114.000**	**20**	**0**	**0**	**3.500.000**	**75**	**0**	**80**	**45.447.000**	**80**	**48.947.000**	**100**	**99,660**	**Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura**
				Persentase penyediaan bibit ternak yg berkualitas (Dengan Satuan:%)	**20**		**5**		**0**		**5**		**20**		**20**		**100**		**Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura**
46		032703201	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.114.000	1	0	1	3.500.000	1	0	1	447.000	1	3.947.000	100	95,941	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
47		032703201001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dengan Satuan:Dokumen)	1	4.114.000	0	0	1	3.500.000	1	0	1	447.000	1	3.947.000	100	95,941	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
48		032703203	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	45.000.000	0	0	1	0	1	0	1	45.000.000	1	45.000.000	100	100	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelohan, dan Pemasaran
49		032703203002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Dengan Satuan:Laporan)	1	45.000.000	0	0	1	0	1	0	1	45.000.000	1	45.000.000	100	100	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,000	99,660	
PREDIKAT KINERJA																	ST	ST	
50	**-**	**032704**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase pelayanan kesehatan hewan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**653.972.402**	**30**	**45.543.392**	**40**	**96.702.788**	**80**	**211.342.278**	**100**	**280.941.389**	**100**	**634.529.847**	**100**	**97,027**	**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**
51		032704201	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.425.000	1	0	1	0	1	223.000	1	4.200.000	1	4.423.000	100	99,955	Seksi Kesehatan Hewan
52		032704201001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.425.000	1	0	1	0	1	223.000	1	4.200.000	1	4.423.000	100	99,955	Sub Koordinator Kesehatan Hewan
53		032704203	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	70	304.246.334	0	16.514.464	0	32.611.446	0	128.786.496	0	117.867.253	0	295.779.659	0	97,217	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
				Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		1		1		1		1		100		UPTD Pusat Kesehatan Hewan
54		032704203002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Dengan Satuan:Laporan)	1	304.246.334	1	16.514.464	1	32.611.446	1	128.786.496	1	117.867.253	1	295.779.659	100	97,217	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
55		032704204	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dengan Satuan:Laporan)	2	345.301.068	1	29.028.928	1	64.091.342	2	82.332.782	2	158.874.136	2	334.327.188	100	96,822	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
56		032704204001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Dengan Satuan:Laporan)	1	88.100.000	1	0	1	0	1	12.750.000	1	67.426.000	1	80.176.000	100	91,006	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
57		032704204002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Dengan Satuan:Laporan)	1	257.201.068	1	29.028.928	1	64.091.342	1	69.582.782	1	91.448.136	1	254.151.188	100	98,814	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													**100,000**	**97,027**	
				PREDIKAT KINERJA													**ST**	**ST**	
58	**-**	**032705**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian (Dengan Satuan:%)**	**100**	**3.435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**2.455.000**	**100**	**0**	**100**	**2.455.000**	**100**	**71,470**	**Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura**
59		032705201	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:laporan)	1	3.435.000	0	0	0	0	1	2.455.000	1	0	1	2.455.000	100	71,470	Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
60		032705201001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Dengan Satuan:Ha)	7	3.435.000	0	0	0	0	7	2.455.000	7	0	7	2.455.000	100	71,470	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													**100,000**	**71,470**	
				PREDIKAT KINERJA													**ST**	**S**	
61	**-**	**032707**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:%)**	**100**	**313.051.172**	**25**	**26.150.312**	**60**	**46.225.468**	**80**	**42.275.468**	**100**	**177.215.524**	**100**	**291.866.772**	**100**	**93,233**	**Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura**
62		032707201	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	2	313.051.172	1	26.150.312	1	46.225.468	2	42.275.468	2	177.215.524	2	291.866.772	100	93,233	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
63		032707201001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	1	190.223.172	1	26.150.312	1	46.225.468	1	42.275.468	1	67.469.424	1	182.120.672	100	95,741	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
64		032707201002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	40	122.828.000	0	0	0	0	5	0	40	109.746.100	40	109.746.100	100	89,349	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,000	93,233	
PREDIKAT KINERJA																	ST	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	100,000	93,367	
PREDIKAT KINERJA																	ST	ST	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- sudah sesuai antara angaran dan kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- sudah tidak ada yang menghambat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	- Sudahmelakukan kegiatan yang sesuai triwulan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	- Sudah melakukan kegiatan yang sesuai tahapan penyusunan renja

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 23-04-2024

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINANG

SAMRI,SP,M.Si
NIP.197205041993031006

KOTA PANGKALPINANG

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2025

Tujuan PD	SasaranPD /sasaran program/kegiatan/sub kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian				**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian**	**Proyeksi Target 2024-2026 mengacu pada realisasi dari Hasil Publikasi BPS "Pangkalpinang Dalam Angka"**	%	**3.35**	**9,448,240,269**		**Kepala Dinas**
	Meningkatnya Produkitivitas komoditi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan			**Produkitivitas komoditi tanaman pangan,holtikultura,perkebunan dan peternakan**	**Jumlah produkitivitas komoditi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan**	**ton**	**5084.555**			**Kepala Dinas**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP perangkat daerah hasil Penilaian APIP**	**Nilai**	**71.63**	**7,513,573,869**	**6,179,485,228**	**SEKRETARIS**
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	**Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey**	**Nilai**	**72**			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tepat waktu tahun berkenaan dibagi Jumlah seluruh dokumen perencanaan, penganggarana dan kinerja yang disusun tahun berkenaan x 100 %**	%	**100**	**-**	**-**	**Subkoordinator Kasubbag PEP dan Keuangan (Perencana Ahli Muda)**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	-	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	2	-	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	2	-	-	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	3	-	-	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP tahun berkenaan dibagi Jumlah seluruh laporan keuangan yang disusun tahun berkenaan x 100 %	**%**	**100**	**5,325,633,369**	**5,332,774,504**	**Subkoordinator Kasubbag PEP dan Keuangan (Perencana Ahli Muda)**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang	46	5,325,633,369	5,332,774,504	5,332,774,504
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	5	-		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	5	-		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin asn tahun berkenaan dikurangi jumlah pelaanggaran disiplin asn tahun lalu di bagi jumlah pelanggaran disiplin asn tahun lalu dikali 100	**%**	**25**	**77,259,000**	**-**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	1	77,259,000	-	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100 %**	%	**100**	**535,451,500**	**112,435,000**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	3,993,000	3,993,000	3,993,000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	255,329,000	-	35,769,000

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	53,339,500	33,383,500	33,383,500
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	42,790,000	25,058,500	25,058,500
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	180,000,000	50,000,000	50,000,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terealisasi tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan (unit) x 100 %**	**%**	**0**	**177,199,000**	**-**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0			
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	1	-		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	9	177,199,000	-	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100 %**	**100**	**100**	**1,172,631,000**	**595,475,028**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	1	124,100,000	124,100,000	124,100,000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	1	56,100,000	30,959,000	30,959,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	992,431,000	440,416,028	440,416,028
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik**	Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpelihara dengan baik tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada tahun berkenaan (unit) x 100 %	**%**	**100**	**225,400,000**	**138,800,696**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	**6**	225,400,000	138,800,696	138,800,696
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	**1**	-	-	
BIDANG PANGAN										
	Menigkatnya Skor Pola Pangan Harapan			**Skor Pola Pangan Harapan**	**skor PPH dihitung dari komposisi konsumsi pangan penduduk pada waktu / tahun tertentu**	**Skor**	**90**			**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE)**	**Angka konsumsi energi kota pangkalpinang dibagi standar angka konsumsi energi (2.150 kkal/kap/hari) x 100%**	**%**	**92**	**285,435,000**	**66,696,392**	**BIDANG KETAHANAN PANGAN**
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Persentase penyelesaian dokumen penyediaan dan penyaluran pangan pokokatau pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang tepat waktu**	**Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %**	**%**	**100**	**35,438,000**	**31,271,696**	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Prdusen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Laporan	3	35,285,000	10,000,000	**subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda)**

			Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Dokumen	3	153,000	21,271,696	**subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda)**
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Persentase penyelesaian dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang tepat waktu**	**Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %**	**%**	**100**	**249,997,000**	**35,424,696**	**Subkoordinator Konsumsi Pangan (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda)**
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Dokumen	3	153,000	153,000	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Laporan	3	249,844,000	35,271,696	35,271,696.
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**	**Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu / Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu x 100 %**	**%**	**100**	**79,690,500**	**21,271,696**	**BIDANG KETAHANAN PANGAN**
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyelesaian dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang tepat waktu**	**Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %**	%	**100**	79,690,500	21,271,696	**Subkoordinator Keamanan Pangan (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pangan Muda)**
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	3	59,840,500	21,271,696	21,271,696
			Penyediaan Sarana Pengujian dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	3	19,850,000	-	
	Menigkatnya Ketersediaan Pangan Utama			**Ketersediaan Pangan Utama**	**Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg) / Jumlah pendudduduk tahun berkenaan x 100 %**	%	90			**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase kertersediaan pangan**	**Jumlah cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan x 100 %**	**%**	**35**	**349,099,000**	**21,271,696**	**BIDANG KETAHANAN PANGAN**
			Penyusunan peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Persentase penyelesaian dokumen peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang tepat waktu**	**Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %**	%	100	**820,000**	**21,271,696**	**subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda)**
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan		Dokumen	3	820,000	21,271,696	21,271,696.
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase penyelesaian dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tepat waktu**	**Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %**	%	100	**348,279,000**	**-**	**subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda)**
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	3	348,279,000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	Meningkatnya Produkitivitas komoditi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan			**Produkitivitas komoditi tanaman pangan,holtikultura,perkebunan dan peternakan**	**Jumlah produkitivitas komoditi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan**	**ton**		**5,054**		**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya**	**jumlah sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah sarana pertanian yang ada x100%**	**%**	**90**	**20,000,500**	**-**	**BIDANG TPPH**

			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**jumlah sarana pertanian yang diawasai / jumlah sarana pertanian yang tersedia x100%**	**%**	**75**	**20,000,500**	**-**	**Subkoordinator Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda)**
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, teknologi dan Spesifik Lokasi		laporan	1	20,000,500	-	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya**	**jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah prasarana pertanian yang ada x 100%**	**%**	**100**	**24,998,000**	**9,000,000**	**BIDANG TPPH**
			Pengembangan Prasarana Pertanian	**persentase Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu tahun berkenaan / Jumlah dokumen yang disusun x 100 %**	%	**100**	**24,998,000**	**9,000,000**	**Subkoordinator Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran (Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Muda)**
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola		Dokumen	8	24,998,000	9,000,000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Cakupan bina kelompok petani**	**Jumlah kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan bantuan dibagi jumlah kelompok petani x 100%**	**%**	**30**	**416,982,000**	**99,786,784**	**BIDANG TPPH**
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**jumlah kelembagaan dibina dibagi jumlah kelembagaan yang terdata x 100%**	%	**75**	416,982,000	99,786,784	**Subkoordinator Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda)**
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		unit	1	246,982,000	91,086,784	91,086,784
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		unit	8	170,000,000	8,700,000	8,700,000
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit tanaman**	**Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan(t) dikurang jumlah kejadian/kasus penyakit tanaman tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit tanaman tahun sebelumnya (t-1) x 100%**	**%**	**90**	**14,980,000**	**4,995,000**	**BIDANG TPPH**
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**jumlah kawasan pertanian yang terkendali dari penyakit/kasus dibagi jumlah kawasan pertanian yang ada x100%**	%	**100**	14,980,000	4,995,000	**Sub koordinator Perbenihan dan Perlindungan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda)**
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		hektar	7	14,980,000	4,995,000	4,995,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PETERNAKAN										
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Penjaminan Peredaran BENIH/BIBIT TERNAK**	**Jumlah peredaran benih/bibit ternak yang dijamin dibagi jumlah benih/bibit ternak yang ada x100%**	**%**	**75**	**255,137,100**	**187,654,176**	**Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan**
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase keberhasilan mutu dan peredaran benih /bibit ternak**	**jumlah keberhasilan benih bibit / jumlah bibit yang beredar x100 %**	**%**	**62**	73,038,600	31,796,696	**Subkoordinator Perbibitan dan Produksi (Fungsional Pengawas Mutu Pakan Muda)**

			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Laporan	1	73,038,600	31,796,696	31,796,696
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase benih/ bibit ternak yang beredar**	**jumlah kelahiran dibagi jumlah bibit/ benih yang beredar x100 %**	**%**	**65**	**60,217,500**	**2,500,000**	
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		Laporan (ekor)	1(80)	60,217,500	2,500,000	**Subkoordinator Perbibitan dan Produksi (Fungsional Pengawas Mutu Pakan Muda)**
				Persentase terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	**Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Terkendali / jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan tersedia**	**%**	**83**	**121,881,000**	**153,357,480**	
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia		laporan (ton)	1	121,881,000	153,357,480	**Kepala UPTD. Perbibitan**
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya**	**jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah prasarana pertanian yang ada x100%**	**%**	**100**	**165,541,900**	**285,989,464**	**BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Pembangunan Prasarana Pertanian	**Persentase prasarana perternakan yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya**	**jumlah prasarana peternakan yang dapat beroperasi dengan baik / Jumlah prasarana peternakanyang ada x100%**	%	**100**	**165,541,900**	**285,989,464**	**Kepala UPTD RPH**
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		Unit	1	165,541,900	285,989,464	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan(t) dikurang jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	**%**	**84**	**322,802,400**	**190,626,676**	**BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyakit Hewan menular dibagi jumlah penyakit hewan menular yang tertanani x100%**	%	**80**	50,000,000	7,000,000	**Sub koordinator kesehatan hewan (medik Veteriner Muda)**
			Pemberantasan Penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam (1) satu daerah Kab	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Laporan	1	50,000,000	7,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan jasa medik veteriner**	**Jumlah pelayanan jasa medik veteriner dibagi jumlah pasien x 100%**	%	**92**	**199,996,500**	**153,204,980**	**Kepala UPT Puskeswan**
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Laporan	1	199,996,500	153,204,980	153,204,980
			Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Persentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan**	**Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan/jumlah pengawasan unit di bagi jumlah hewan dan produk hewan/jumlah unit x 100 %**	%	**86**	72,805,900	30,421,696	
			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		Laporan	1	7,809,000	2,000,000	**Subkoordinator kesehatan masyarakat veteriner pengolahan dan pemasaran (medik Veteriner Muda)**

			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Laporan	1	64,996,900	28,421,696	**Subkoordinator kesehatan masyarakat veteriner pengolahan dan pemasaran (medik Veteriner Muda)**
Pagu Total								**9,448,240,269**	**7,066,777,112**	

TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan Dan Pertanian

Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	020901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72	5,932,784,140	25	1,707,164,176				0		0	25	1,707,164,176	35	29	Sekretaris
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	71.63		25								25		35		Sekretaris
2		020901201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0	30								30	0	30	#DIV/0!	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
3			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	2								2	0	100	#DIV/0!	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
		020901201004	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0	2								2	0	100	#DIV/0!	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
4		020901201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	0	2								2	0	100	#DIV/0!	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
5		020901201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	0	3								3	0	100	#DIV/0!	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
6		020901202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:Persen)	100	5,150,774,616	33	1,563,007,847				0		0	33	**1,563,007,847**	33	30	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7		020901202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	50	5,150,774,616	50	1,563,007,847							50	**1,563,007,847**	100	30	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8		020901202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	5	0	5								5	0	100	#DIV/0!	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
9		020901202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	5	0	5								5	0	100	#DIV/0!	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
10		020901205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:Persen)	25	0	5	0		0		0		0	5	0	20	#DIV/0!	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
11		020901205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	0	0								0	0	0	#DIV/0!	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

12		020901206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	89,833,800	30	9,439,000		0		0		0	30	**9,439,000**	30	11	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13		020901206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	3,993,000	0								0	0	0	0	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		020901206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5,370,000	0								0	0	0	0	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		020901206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	26,883,500	1	6,224,000							1	**6,224,000**	100	23	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		020901206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	23,587,300	1	2,115,000							1	2115000	100	9	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		020901206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	30,000,000	1	1,100,000							1	**1,100,000**	100	4	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		020901207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	Kasubbaq Umum dan Kepegawaian
19		020901207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0								0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Kasubbaq Umum dan Kepegawaian
20		020901208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa (Dengan Satuan:Persen)	100	595,475,028	35	115,733,313				0		0	35	**115,733,313**	35	19	Kasubbaq Umum dan Kepegawaian
21		020901208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	124,100,000	1	25,158,225							1	**25,158,225**	100	20	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		020901208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	30,959,000	0								0	0	0	0	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23		020901208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	440,416,028	1	90,575,088							1	**90,575,088**	100	21	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		020901209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	96,700,696	30	18,984,016				0		0	30	**18,984,016**	30	20	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		020901209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	6	96,700,696	6	18,984,016							6	**18,984,016**	100	20	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		020901209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0								0	0	0	#DIV/0!	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**34.812**	**28.775**	
												PREDIKAT KINERJA							
27	-	**020903**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE) (Dengan Satuan:%)**	**92**	**66,696,392**	**33**	**16,277,232**				**0**		**0**	**33**	**16,277,232**	**36**	**24**	**Bidang Ketahanan Pangan**
28		020903201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyelesaian dokumen penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	31,271,696	33	10,898,616				0		0	33	**10,898,616**	33	35	Sub Koordinator Konsumsi Pangan

29		020903201012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	3	10,000,000	3	6,520,000							3	6,520,000	100	65	Sub Koordinator Konsumsi Pangan
30		020903201015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan P a n g a n (D e n g a n Satuan:Dokumen)	3	21,271,696	3	4,378,616							3	**4,378,616**	100	21	Sub Koordinator Konsumsi Pangan
31		020903204	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase penyelesaian dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	35,424,696	28	5,378,616				0		0	28	**5,378,616**	28	15	Sub Koordinator Konsumsi Pangan
32		020903204001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	3	153,000	0								0	0	0	0	Sub Koordinator Konsumsi Pangan
33		020903204002	P e m b e r d a y a a n Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	3	35,271,696	3	5,378,616							3	**5,378,616**	100	15	Sub Koordinator Konsumsi Pangan
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**35.870**	**24.405**	
												PREDIKAT KINERJA							
34	-	**020904**	**P R O G R A M P E N A N G A N A N KERAWANAN PANGAN**	**Persentase kertersediaan pangan (Dengan Satuan:%)**	**35**	**21,271,696**	**8**	**4,378,616**				**0**		**0**	**8**	**4,378,616**	**23**	**21**	**Bidang Ketahanan Pangan**
35		020904201	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase penyelesaian dokumen peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	21,271,696	33	4,378,616		0		0		0	33	**4,378,616**	33	21	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
36		020904201001	P e n y u s u n a n , Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	21,271,696	3	4,378,616							3	**4,378,616**	100	21	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
37		020904202	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	0		0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
38		020904202002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	0	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**22.857**	**20.584**	
												PREDIKAT KINERJA							
39	-	**020905**	**P R O G R A M P E N G A W A S A N KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**33,941,696**	**33**	**5,368,616**		**0**		**0**		**0**	**33**	**5,368,616**	**33**	**16**	**Bidang Ketahanan Pangan**
40		020905201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian dokumen pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	33,941,696	33	5,368,616		0		0		0	33	**5,368,616**	33	16	Sub Koordinator Keamanan Pangan
41		020905201004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	21,271,696	3	4,378,616							3	**4,378,616**	100	21	Sub Koordinator Keamanan Pangan
42		020905201005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	12,670,000	0	990,000							0	**990,000**	0	8	Sub Koordinator Keamanan Pangan
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**33.000**	**15.817**	
												PREDIKAT KINERJA							

43	-	032702	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penjaminan Peredaran BENIH/BIBIT TERNAK (Dengan Satuan:%)	75	187,667,176	30	32,741,896		0		0		0	30	32,741,896	40	17	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Persentase sarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Dengan Satuan:%)	90		30								30		33		Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura
44		032702201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	75	0	0	0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
45		032702201001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
46		032702203	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keberhasilan mutu dan peredaran benih /bibit ternak (Dengan Satuan:Persen)	62	29,799,696	23	5,784,416		0		0		0	23	5,784,416	38	19	Sub Koordinator Perbibitan dan Produksi
47		032702203001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	1	29,799,696	1	5,784,416							1	5,784,416	100	19	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
48		032702205	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase benih/ bibit ternak yang beredar (Dengan Satuan:Persen)	65	157,867,480	23	26,957,480		0		0		0	23	26,957,480	36	17	Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
				Persentase terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Dengan Satuan:Persen)	91		20								20		22		Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
49		032702205001	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Dengan Satuan:Laporan)	80	4,510,000	80	1,530,000							80	1,530,000	100	34	Sub Koordinator Perbibitan dan Produksi
50		032702205005	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Dengan Satuan:Ton)	12	153,357,480	2	25,427,480							2	25,427,480	17	17	Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					36.667	17.447	
												PREDIKAT KINERJA							
51	-	032703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Dengan Satuan:%)	100	273,211,468	33	38,028,928		-		-		-	33	38,028,928	33	14	Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura
52		032703201	Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	100	9,000,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
53		032703201001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dengan Satuan:Dokumen)	8	9,000,000	0								0	0	0	0	Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
54		032703202	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana perternakan yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Dengan Satuan:Persen)	100	264,211,468	28	38,028,928		0		0		0	28	38,028,928	28	14	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
55		032703202007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	264,211,468	1	38,028,928							1	38,028,928	100	14	UPTD Rumah Potong Hewan
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					33.000	13.919	
												PREDIKAT KINERJA							

56	-	032704	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Dengan Satuan:%)**	84	193,622,676	30	32,810,696		0		0		0	30	32,810,696	36	17	**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**
57		032704201	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	80	8,000,000	25	1,000,000		0		0		0	25	1,000,000	31	13	Sub Koordinator Kesehatan Hewan
58		032704201008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	8,000,000	1	1,000,000							1	1,000,000	100	13	Sub Koordinator Kesehatan Hewan
59		032704203	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa medik veteriner (Dengan Satuan:Persen)	92	153,204,980	28	24,893,080		0		0		0	28	**24,893,080**	31	16	Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan
60		032704203002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Dengan Satuan:Laporan)	1	153,204,980	1	24,893,080							1	**24,893,080**	100	16	Sub Koordinator Kesehatan Hewan
61		032704204	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (Dengan Satuan:Persen)	86	32,417,696	28	6,917,616		0		0		0	28	**6,917,616**	33	21	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
62		032704204002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Dengan Satuan:Laporan)	1	30,417,696	1	6,417,616							1	**6,417,616**	100	21	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
63			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik(Dengan Satuan: Unit Usaha)	1	2,000,000	1	500,000							1	**500,000**	100	25	Sub Koordinator Kesmavet, Pengelolaan, dan Pemasaran
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**35.714**	**16.946**	
												PREDIKAT KINERJA							
64	-	**032705**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit tanaman (Dengan Satuan:%)**	90	4,995,000	30	0		0		0		0	30	0	33	0	**Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura**
65		032705201	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	100	4,995,000	30	0		0		0		0	30	0	30	0	Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
66		032705201001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Dengan Satuan:Ha)	7	4,995,000	0								0	0	0	0	Sub Koordinator Perbibitan dan Produksi
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**33.333**	**0.000**	
												PREDIKAT KINERJA							
67	-	**032707**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok petani (Dengan Satuan:%)**	30	227,961,784	8	18,514,464		0		0		0	8	18,514,464	27	8	**Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura**
68		032707201	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	75	227,961,784	22	18,514,464		0		0		0	22	18,514,464	29	8	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
69		032707201001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	1	114,286,784	1	18,514,464							1	18,514,464	100	16	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
70		032707201002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	8	113,675,000	0								0	0	0	0	Sub Koordinator Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**26.667**	**8.122**	
												PREDIKAT KINERJA							

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)						32.436	16.224	
PREDIKAT KINERJA								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- pecairan sesuai dengan proses tahapan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- waktu pencairan anggaran masih kurang
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	- sudah sesuai tahapan belanja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	- capaian sudah sesuai target

Dievaluasi

Kota Pangkal Pinang, tanggal 07-03-2025

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKAL PINANG

[redacted]

NIP. 197205041993031006

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PERUBAHAN RENJA
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat selesai disusun sesuai dengan yang diharapkan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkal Pinang.

Perubahan Renja (P-Renja) Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Atas tersusunnya Perubahan Renja (P-Renja) ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

PIt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA PANGKAL PINANG,

Drs. WASPADA
PEMBINA TK. 1
NIP. 196705051998021001

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PARIWISATA
Jalan Rasakunda Kecamatan Girimaya; Pos-el : dispar@pangkalpinangkota.go.id
Laman : www.wonderful.pangkalpinangkota.go.id ; Pangkal Pinang 33143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 700/038/KEP/DISPAR/V/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA);

b. bahwa Perubahan RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025;

18. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);

19. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang;

20. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);

21. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 277).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tentang Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, dengan ketentuan umum, yaitu:

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana Kerja - Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

6. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
7. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
8. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
11. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kedua : Sistematika penyusunan Perubahan RENJA (P-Renja), yaitu:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Ketiga : Penjelasan lebih lanjut terlampir dalam Keputusan ini.

Ditetapan di Pangkal Pinang
pada tanggal 28 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Pangkal Pinang,

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PARIWISATA

Drs. WAPADA
PEMBINA Tk. 1
NIP. 196705051998021001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Perubahan Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkal

Pinang Tahun 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2027 Serta Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar di bawah.

Gambar Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perubahan

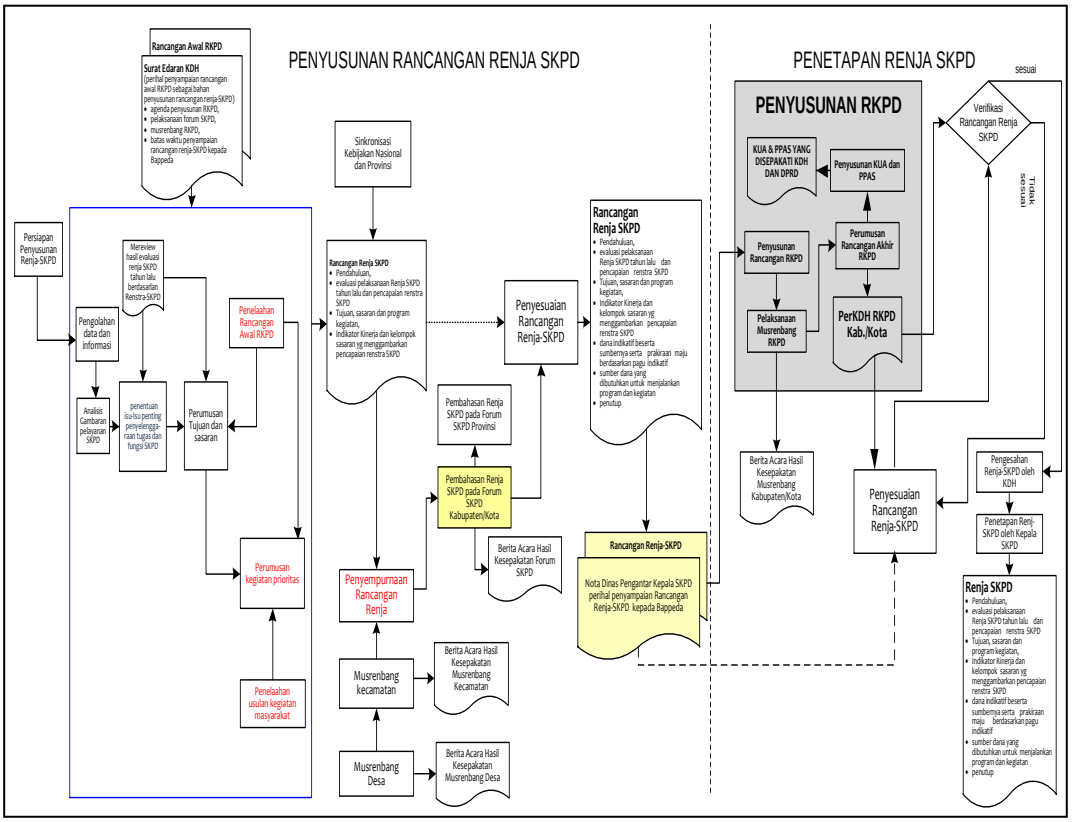

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (*Lembaran* Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1).
12. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 51);
13. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);

15. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 277).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan PD adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PKUA-PPAS) Tahun 2025.

Adapun dengan terbatasnya pendanaan sehingga terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami refocusing di anggaran induk tahun 2025. Untuk itu dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran di pos-pos belanja yang menunjang pelaksanaan operasional dinas.

1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renja

Perubahan Perencanaan kinerja (P-Renja) tahun 2025 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN berisi :
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 berisi :
- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.3. Isu-isu Rencana Penyelenggaraan Tupoksi OPD

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH berisi:
- 1.1. Tujuan dan Sasaran OPD
- 1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pariwisata

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	032601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	73.42	4.193.698.525	74,450	859.845.406	74,450	1.277.624.410	0	0	0	0	74,450	2.137.469.816	100	50,969	SEKRETARIAT
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	100		100		100		0		0		100		100		SEKRETARIAT
2		032601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3.391.627.165	100	717.953.057	100	1.051.797.402	0	0	0	0	100	1.769.750.459	100	52,180	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
3		032601202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	31	3.391.627.165	31	717.953.057	31	1.051.797.402	0	0	0	0	31	1.769.750.459	100	52,180	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
4		032601205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	20.000.000	100	0	300	0	0	0	0	0	400	0	100	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
5		032601205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	5	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
6		032601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	188.791.400	100	50.467.498	100	33.767.821	0	0	0	0	100	84.235.319	100	44,618	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7		032601206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	4.886.000	1	0	1	2.440.000	0	0	0	0	1	2.440.000	100	49,939	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
8		032601206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	21.007.400	1	138.000	1	5.451.000	0	0	0	0	1	5.589.000	100	26,605	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
9		032601206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	12.898.000	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0	1	3.500.000	50	27,136	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
10		032601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000	1	50.329.498	1	22.376.821	0	0	0	0	1	72.706.319	100	48,471	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
11		032601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	387.192.264	100	88.074.851	100	75.883.825	0	0	0	0	100	163.958.676	100	42,346	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
12		032601208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	128.400.000	1	14.895.611	1	14.766.815	0	0	0	0	1	29.662.426	100	23,102	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
13		032601208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	27.800.000	1	6.750.000	1	7.096.750	0	0	0	0	1	13.846.750	100	49,808	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
14		032601208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	230.992.264	1	66.429.240	1	54.020.260	0	0	0	0	1	120.449.500	100	52,144	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN

KOTA PINGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15		032601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	206.087.696	100	3.350.000	100	116.175.362	0	0	0	0	100	119.525.362	100	57,997	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
16		032601209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	62.681.696	1	2.800.000	1	5.724.455	0	0	0	0	1	8.524.455	100	13,600	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
17		032601209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	1	35.830.000	1	550.000	1	3.150.000	0	0	0	0	1	3.700.000	100	10,327	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
18		032601209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	107.576.000	1	0	1	107.300.907	0	0	0	0	1	107.300.907	100	99,744	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,000	50,969	
PREDIKAT KINERJA																	ST	R	
19	-	032602	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya (Dengan Satuan:%)**	6	4.475.561.072	1,630	152.669.104	1,630	242.014.385	0	0	0	0	1,630	394.683.489	27,167	8,819	**BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAN INDUSTRI PARIWISATA**
20		032602202	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	50	531.382.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
21		032602202002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	531.382.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

KUPANGKALPI

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22		032602203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	3.944.178.872	0	152.669.104	300	242.014.385	0	0	0	0	300	394.683.489	100	10,007	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
23		032602203004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	16	3.658.881.272	2	152.669.104	2	139.635.695	0	0	0	0	2	292.304.799	12,500	7,989	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
24		032602203006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	2	285.297.600	0	0	2	102.378.690	0	0	0	0	2	102.378.690	100	35,885	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							27,167	8,819	
										PREDIKAT KINERJA							SR	SR	
25	-	032603	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan (Dengan Satuan:%)**	**37**	**1.261.825.012**	**41**	**54.195.468**	**41**	**136.971.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**191.166.622**	**100**	**15,150**	**BIDANG PEMASARAN PARIWISATA**
26		032603201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase data pariwisata yang dikelola (Dengan Satuan:%)	100	1.261.825.012	100	54.195.468	100	136.971.154	0	0	0	0	100	191.166.622	100	15,150	SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA
				Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Even)	5		4		4		0		0		4		80		SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA
				Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata (Dengan Satuan:%)	5		4		4		0		0		4		80		SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA

KONGKALPI

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27		032603201001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. (Dengan Satuan:Promosi)	1	1.007.241.712	1	54.195.468	1	55.571.693	0	0	0	0	1	109.767.161	100	10,898	SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA
28		032603201002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:kegiatan)	1	254.583.300	0	0	1	81.399.461	0	0	0	0	1	81.399.461	100	31,974	SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,000	15,150	
				PREDIKAT KINERJA													ST	SR	
29	-	032604	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)**	28,080	178.538.000	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	21,368	0	**BIDANG EKONOMI KREATIF**
30		032604202	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang memperoleh insenti (Dengan Satuan:%)	67	178.538.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN
31		032604202005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	178.538.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													21,368	0,000	
				PREDIKAT KINERJA													SR	SR	
32	-	032605	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif (Dengan Satuan:%)**	22	251.173.300	50	92.434.721	15	17.181.000	0	0	0	0	15	109.615.721	68,182	43,641	**BIDANG EKONOMI KREATIF**
33		032605202	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Parwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh Sertifikasi (Dengan Satuan:%)	4	251.173.300	1,243	92.434.721	3,729	17.181.000	0	0	0	0	4,972	109.615.721	100	43,641	SUBKOORDINATOR RISET EDUKASI PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR

TAPI KALPINA

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34		032605202001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Orang)	30	137.345.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR RISET EDUKASI PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR
35		032605202007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Orang)	5	113.828.000	19	92.434.721	19	17.181.000	0	0	0	0	19	109.615.721	100	96,299	SUBKOORDINATOR RISET EDUKASI PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	68,182	43,641	
PREDIKAT KINERJA																	S	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	69,453	23,716	
PREDIKAT KINERJA																	S	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- -SDM yang berkompeten -Jadwal kegiatan yang teratur (BIDANG PEMASARAN) - -SDM yang dimiliki memadai - Aturan dan kebijakan yang mendukung kepariwisataan seperti perda dll - Tersedianya anggaran -Peralatan dan perlengkapan kerja yang mendukung tersedia (BIDANG DESTINASI PARIWISATA) - Mendapat dukungan langsung dari kemenparekraf karena ditetapkannya Pangkalpinang sebagai kota kreatif Indonesia (BIDANG EKRAF)
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Data yang diterima dari stakeholder sering terlambat (BIDANG PEMASARAN) - -Rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pariwisata -Terbatasnya wewenang, perencanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan pariwisata (BIDANG DESTINASI PARIWISATA) - Minimnya anggaran untuk melakukan koordinasi ke kota/kabupaten kreatif & kemenparekraf (BIDANG EKRAF)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan melakukan inovasi dalam setiap pekerjaan (BIDANG PEMASARAN) - -Melakukan koordinasi dengan stakeholder -Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal (BIDANG DESTINASI PARIWISATA) - Menjalin jejaring dengan kota/kabupaten kota kreatif lainnya baik jejaring nasional maupun internsional (BIDANG EKRAF)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	- Meningkatkan kunjungan jumlah wisatawan (BIDANG PEMASARAN) - Meningkatkatkan dan melakukan pengembangan destinasi pariwisata (BIDANG DESTINASI PARIWISATA) - Meningkatkan jejaring terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif (BIDANG EKRAF)

KOTA PANGKALPINANG

Adapun capaian indikator tujuan Dinas Pariwisata yaitu Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan tahun 2024 sebesar 17,58% atau Rp. 35.288.589.984,50 dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkal Pinang secara keseluruhan yaitu Rp. 200.725.271.208,80.

Sedangkan capaian indikator sasaran jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 sejumlah 351.906 orang dengan target 214.753 orang. Untuk capaian indikator sasaran rata-rata lama tinggal wisatawan pada tahun 2024 adalah 1,63 hari dengan target 1,06 hari. Sedangkan capaian indikator tingkat hunian akomodasi untuk tahun 2024 adalah 32,20 % dari target 25%. Untuk indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin dengan target 73,57% realisasinya tercapai 83,23%.

Berikut pencapaian kinerja program sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 73.42% dan capaian kinerja nilai 74,75 serta indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah dengan target 100% dan capaian kinerja 100%.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya dengan target 6 % dan capaian kinerja 18,03%.
3. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Persentase Daya Tarik Wisata yang Dipasarkan dengan target 38% dan capaian kinerja 55%.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dengan target 34,61% dan capaian kinerja 28,06%.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan target 32 % dan capaian kinerja 36,84%.

   Secara keseluruhan untuk rata-rata capaian kinerja sudah baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni sebesar Rp 9.833.265.436,40 (Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

   Dilaksanakan dengan kegiatan :

   1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   - Indikator : Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP
   - Biaya : Rp 3.262.278.462,-

   Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

   1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   - Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
   - Biaya : Rp 3.262.278.462,-

   1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   - Indikator : Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
   - Biaya : Rp 190.316.905,-

   Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

   1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   - Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
   - Biaya : Rp 4.886.000,-

1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 18.864.100,-

1.2.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- Biaya : Rp 17.392.500,-

1.2.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Biaya : Rp 149.817.305,-

1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Indikator : Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah
- Biaya : Rp 33.700.000,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.3.1. Pengadaan Mebel

- Indikator : Jumlah Paket Mebel yang disediakan
- Biaya : Rp 33.700.000,-

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Indikator : Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Biaya : Rp 355.289.889,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Biaya : Rp 70.399.419,-

1.4.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 27.379.250,-

1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 257.511.220,-

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Indikator : Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik
- Biaya : Rp 176.645.426,57,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- Biaya : Rp 36.092.220,-

1.5.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- Biaya : Rp 33.252.300,-

1.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi
- Biaya : Rp 107.300.906,57,-

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Dilaksanakan dengan kegiatan :

2.1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 526.240.970,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.1.1. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata
- Biaya : Rp 526.240.970,-

2.2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 3.910.885.062,83

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.2.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 3.645.295.292,83

2.2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 265.589.770,-

3. Program Pemasaran Pariwisata

Dilaksanakan dengan kegiatan :

3.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Persentase data pariwisata yang dikelola
  Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan
  Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata
- Biaya : Rp 858.956.753,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

3.1.1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
- Biaya : Rp 428.786.131,-

3.1.2. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- Biaya : Rp 430.170.622,-

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Dilaksanakan dengan kegiatan :

4.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- Indikator : Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang memperoleh insentif
- Biaya : Rp 178.033.200,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

4.1.1. Pengembangan Sistem Pemasaran

- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem

Pemasaran Ekonomi Kreatif

- Biaya : Rp 178.033.200,-

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dilaksanakan dengan kegiatan :

5.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Indikator : Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Biaya : Rp 101.819.047,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

5.1.1. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

- Indikator : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata
- Biaya : Rp 101.819.047,-

5.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Indikator : Persentase SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh Sertifikasi
- Biaya : Rp 239.099.721,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

5.2.1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

- Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- Biaya : Rp 129.484.000,-

5.2.1 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

- Indikator : Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif
- Biaya : Rp 109.615.721,-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pariwisata

Disadari bahwa dalam penyelenggaran Tupoksi Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, masih dihadapkan pada isu dan permasalahan, antara lain :

2.3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Urusan Pariwisata

Adapun yang menjadi isu strategis urusan pariwisata adalah :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
4. Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata

Dengan permasalahan sebagai berikut :

a. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
b. Belum adanya riset pasar wisatawan
c. Strategi komunikasi pemasaran belum optimal
d. Kegiatan promosi masih berjalan parsial
e. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder
f. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
g. Belum dilakukannya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif
h. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
i. Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun
j. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kepada Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas

Dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, maka digunakan strategi yaitu Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata, pengembangan promosi, kemitraan pariwisata.

Dalam melaksanakan strategi tersebut, diperlukan adanya arah kebijakan yang menjadi prioritas Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, yaitu:

1. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan pelayanan prima pada Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang;
2. Peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata dalam rangka mendukung pengembangan daya tarik wisata;
3. Peningkatan promosi pariwisata secara masif melalui media cetak dan elektronik;
4. Pembinaan dan peran serta pelaku ekonomi kreatif; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Disadari bahwa pembangunan pariwisata saat ini masih dihadapkan pada permasalahan antara lain :

a. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
b. Belum adanya riset pasar wisatawan
c. Strategi komunikasi pemasaran belum optimal
d. Kegiatan promosi masih berjalan parsial
e. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder
f. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
g. Belum dilakukannya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif
h. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
i. Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun

j. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas

Adapun faktor yang menghambat pelayanan perangkat daerah antara lain :

a. Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN
b. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital
c. Data kepariwisataan tidak lengkap
d. Masih kurangnya aksesibilitas, amenitas, acilliary dan atraksi pariwisata di daerah
e. Kurangnya diversifikasi produk wisata di daerah
f. Pemasaran belum fokus pada upaya meningkatkan dampak pada peningkatan
g. Masih banyak SDM pariwisata yang belum memiliki sertifikasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tahun 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA							**6.519.992.870,00**	**6.920.142.277,00**	**5.672.591.887,10**	**-847.400.982,90**							**6.274.747.365,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.519.992.870,00**	**6.920.142.277,00**	**5.672.591.887,10**	**-847.400.982,90**							**6.274.747.365,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.519.992.870,00**	**6.920.142.277,00**	**5.672.591.887,10**	**-847.400.982,90**							**6.274.747.365,00**	
1	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				**100** **73,42 Nilai** **Nilai**	**73,42** **100 Nilai** **Nilai**	**5.314.554.170,00**	**5.074.100.825,00**	**4.307.906.919,10**	**-269.793.889,90**							**5.044.760.581,00**	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP*				100 %	100 %	3.789.885.470,00	4.086.846.669,00	3.632.347.556,10	-157.537.910,90			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		3.774.783.581,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.789.885.470,00	4.086.846.669,00	3.632.347.556,10	-157.537.910,90	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DMU TAMBAHAN DUKUNGAN PERDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			3.774.783.581,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*				0 %	0 %	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		56.400.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			36.400.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	625.060.700,00	511.772.500,00	268.758.900,00	-356.301.800,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		340.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.878.000,00	4.878.000,00	2.440.000,00	-2.438.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	9 Paket	191.660.000,00	162.260.000,00	77.950.000,00	-113.710.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.250.000,00	0,00	0,00	-85.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	52.832.200,00	52.825.000,00	30.376.000,00	-22.456.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.440.500,00	41.809.500,00	25.492.900,00	-14.947.600,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	132.500.000,00	-117.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	580.090.000,00	486.469.960,00	359.619.460,00	-220.470.540,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		596.997.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	122.400.000,00	122.400.000,00	83.600.000,00	-38.800.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			128.400.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.300.000,00	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			29.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	427.390.000,00	253.769.960,00	245.719.460,00	-181.670.540,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan			438.797.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	275.518.000,00	60.011.696,00	47.080.000,00	-228.438.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		276.580.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.250.000,00	57.261.696,00	35.330.000,00	-4.920.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan			40.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.330.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	-23.580.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan			35.830.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.938.000,00	0,00	0,00	-199.938.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya**				**6 %**	**6 %**	**555.191.700,00**	**1.040.492.580,00**	**810.224.024,00**	**-28.104.916,00**							**527.086.784,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	555.191.700,00	1.040.492.580,00	810.224.024,00	255.032.324,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		527.086.784,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				17 Unit	17 Unit	555.191.700,00	1.040.492.580,00	810.224.024,00	255.032.324,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan			527.086.784,00	DINAS PARIWISATA
3	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan**				**38 %**	**38 %**	**479.011.000,00**	**654.812.872,00**	**488.025.944,00**	**20.989.000,00**							**500.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan Persentase data pariwisata yang diolah Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata*				100 % 5 % 5 Event	100 % 5 % 5 Event	479.011.000,00	654.812.872,00	488.025.944,00	9.014.944,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegatan	2 Kegatan	339.930.000,00	339.830.000,00	303.990.000,00	-35.940.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan			344.468.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Pengadan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengadan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	1 Promosi	139.081.000,00	314.982.872,00	184.035.944,00	44.954.944,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			155.592.000,00	DINAS PARIWISATA
4	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan**				**34,61 %**	**34,61 %**	**126.036.000,00**	**126.036.000,00**	**41.836.000,00**	**5.864.000,00**							**131.900.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang memperoleh insentif*				83 %	83 %	126.036.000,00	126.036.000,00	41.836.000,00	-84.200.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		131.900.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	126.036.000,00	126.036.000,00	41.836.000,00	-84.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan			131.900.000,00	DINAS PARIWISATA
5	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan kapasita pelaku ekonomi kreatif**				**32 %**	**32 %**	**45.200.000,00**	**24.700.000,00**	**24.700.000,00**	**-20.500.000,00**							**71.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*				11 %	11 %	45.200.000,00	24.700.000,00	24.700.000,00	-20.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		71.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang	30 Orang	21.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan			38.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				35 Orang	35 Orang	24.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-10.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Keraklyatan			41.000.000,00	DINAS PARIWISATA
			JUMLAH						**6.519.992.670,00**	**6.920.142.277,00**	**5.672.591.887,18**	**197.411.203.431,82**							**6.274.747.365,00**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan potensi pariwisata dengan indikator Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan dengan target 19% pada tahun 2025.

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pariwisata dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata dengan indikator sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan dengan target 455.493 orang
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target 1,06 hari
3. Tingkat hunian akomodasi dengan target 40%
4. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin dengan target 74,57%

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan yang dilaksanakan :

1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.2.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.2.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

1.3.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

1.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.4.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan yang dilaksanakan :

2.1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

2.1.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan yang dilaksanakan :

3.1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

3.1.1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

3.1.2. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan yang dilaksanakan :

4.1. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

4.1.1. Pengembangan Sistem Pemasaran

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan yang dilaksanakan :

5.1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

5.1.1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

5.1.2. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

BAB IV
PENUTUP

Demikian Perencanaan Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 yang penuh keterbatasan dalam penyusunan, semoga perencanaan kinerja dapat memberikan arah dan strategi yang sangat jelas bagi pembangunan pariwisata di Kota Pangkal Pinang serta dapat meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang.

Semoga dalam pelaksanaannya, Perencanaan Kinerja Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta mengarah kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang dan tentu saja muara akhirnya pada pencapaian Visi dan Misi Kota Pangkal Pinang.

Perencanaan Kinerja Perubahan ini jauh dari kesempurnaan dan memerlukan banyak perbaikan untuk itu masukan dan saran terhadap perbaikan sangat diharapkan dan atas perhatian serta keseriusan membaca panduan ini diucapkan terima kasih.

RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

RENJA

Rencana Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sriwijaya,
Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
e-mail : dlh@pangkalpinangkota.go.id

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Basuki Rahmat PangkalpinangTelepon 0717 - 422876

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : /KEP/DLH/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA);

b. bahwa Perubahan RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota PangkalPinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2012 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
21. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
22. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
23. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);

24. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264);

25. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 277).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tentang Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025), dengan ketentuan umum, yaitu:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

2. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat P-Renja OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

6. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

7. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kseinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

8. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya berupa indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

10. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

11. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kedua : Sistematika penyusunan Perubahan Renja, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

BAB II Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Menjelaskan Rencana Kerja Berupa Program dan Kegiatan OPD berikut dengan Pendanaannya.

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada Tanggal 28 Mei 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang

Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197208241998031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya jualah, aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjangan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

P-RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 menguraikan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan rencana kegiatan tahunan Perangkat Daerah.

Penyusunan P-RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) serta berorientasi kepada hasil (*result oriented*) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

P-RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, sebagai Perangkat Daerah (PD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.

Akhir kata, semoga dokumen P-RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan satu tahun kedepan dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pangkalpinang , 28 Mei 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang,

Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19720824 199803 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I. Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

1.4. Sistematika Penyusunan 6

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang..... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan..... 20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang..... 21

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 21

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan 29

3.1. Tujuan dan Sasaran 29

3.1. Program dan Kegiatan..... 29

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan 36

BAB V. Penutup 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) yang merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. P-Renja disusun oleh Perangkat Daerah (PD) sebelum menyusun P-RKPD. P-Renja yang disusun meliputi renja awal yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tentukan program-program strategis yang ada di setiap Perangkat Daerah yang merupakan renja akhir yang akan dituangkan ke dalam dokumen P-RKPD.

P-Renja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) bulan. P-Renja (*work plan report*) tahun 2025 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategi (*strategic plan report*). Rencana strategi atau disebut dengan Renstra sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja perangkat daerah dapat semakin baik dan lebih terfokus. P-Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perkiraan maju. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, P-Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. P-Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial mengacu kepada sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. P-Renja PD merupakan acuan setiap PD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. P-Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan PD dan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja selama Triwulan I sebagai wujud dari kinerja PD, tahun 2025 merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen P-Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. P-Renja disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I dan mengacu kepada P-RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam P-Renja harus sesuai dengan program prioritas. Dalam hal ini karena pada tahun 2025 merupakan tahun kedua di pemerintah Kota Pangkal Pinang, maka yang menjadi dasar dalam penyusunan P-Renja PD yaitu sasaran dan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam P-Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam P-Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan P-Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan P-Renja

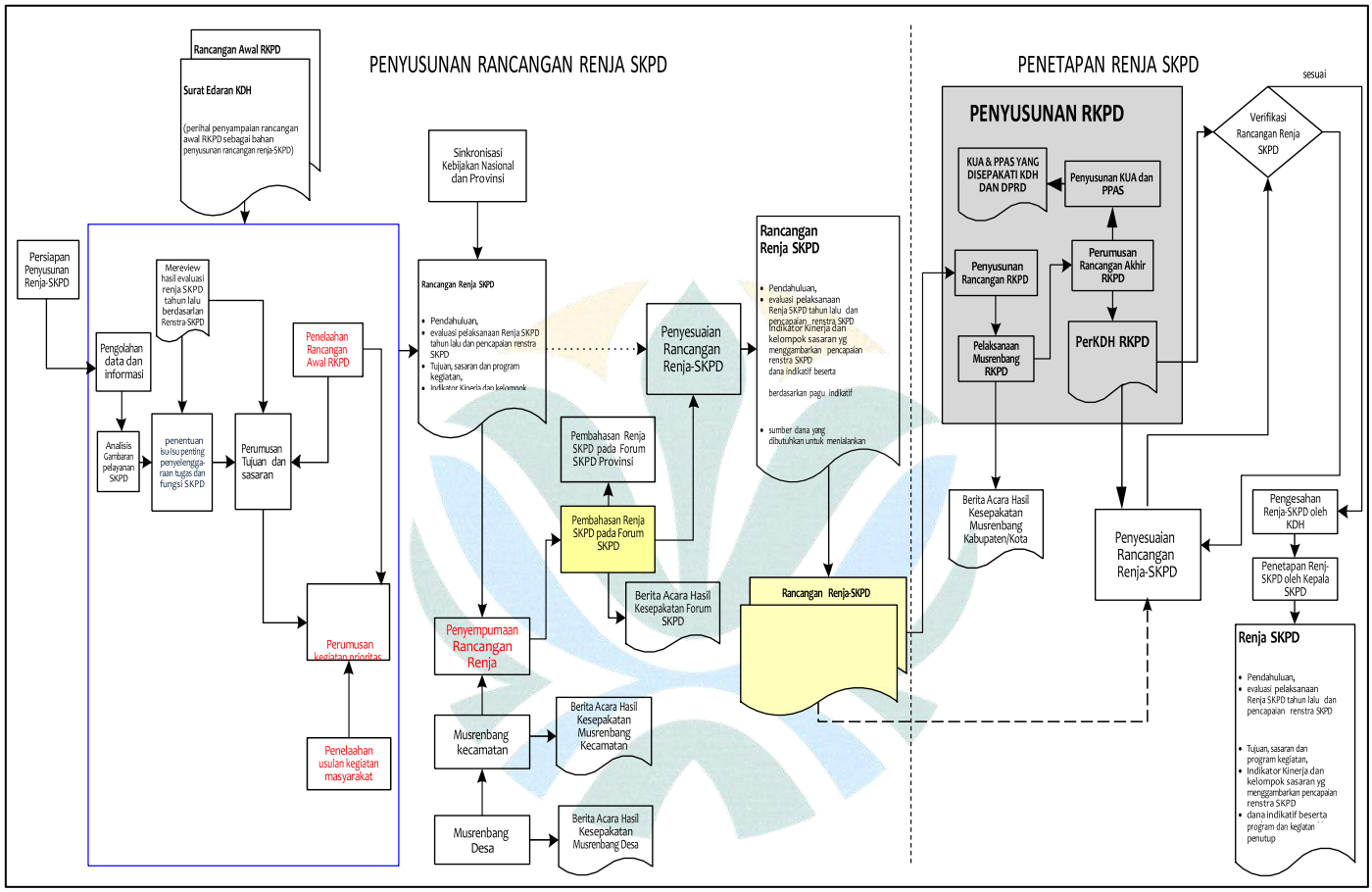

1.2. Landasan Hukum

Berikut ini landasan hukum dalam penyusunan P-Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang Tahun 2025:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
14. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
15. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
16. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);
17. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkal

Pinang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264);

18. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 277).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja PD adalah untuk merencanakan program/kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika P-Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025, meliputi:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan Renstra dan RPJMD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan Renja PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja PD tahun rencana, serta kaitannya dengan Renstra, dan isu strategis.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Susunan dokumen Renja PD terkait pengaturan bab serta garis besar isi bab di dalamnya.

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Memuat analisis kinerja pelayanan Dinas Lingungan Hidup Kota Pangkalpinang yang diukur dengan sejumlah indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Memuat hal-hal kritis terkait pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang serta masalah dan hambatannya, rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD.

Memuat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Memuat usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan, baik dari pemangku masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dalam pelaksanaan musrenbang.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, kebutuhan dana dan pagu indikatif.

BAB IV Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Memuat rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang pada Tahun 2025.

BAB IV Penutup

Memuat catatan penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam satu bidang urusan wajib yaitu lingkungan hidup.

Hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Di tahun 2025 dilaksanakan 9 (Sembilan) program prioritas dengan 14 kegiatan prioritas. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	11	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
2	11	01	2.02	0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
2	11	01	2.02	0002	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
2	11	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
2	11	01	2.05	0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
2	11	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
2	11	01	2.06	0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2	11	01	2.06	0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2	11	01	2.06	0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
2	11	01	2.06	0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
2	11	01	2.06	0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
2	11	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2	11	01	2.08	0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2	11	01	2.08	0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2	11	01	2.08	0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
2	11	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	11	01	2.09	0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
2	11	01	2.09	0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**
2	11	02	2.01		RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA
2	11	02	2.01	0001	PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA
2	11	02	2.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA
2	11	02	2.02	0001	PENYELENGGARAAN KLHS UNTUK KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK/RESIKO LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
2	11	03	2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
2	11	03	2.01	0001	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT
2	11	03	2.01	0002	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
2	11	03	2.01	0015	PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**
2	11	04	2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA
2	11	04	2.01	0003	PENGELOLAAN KEBUN RAYA
2	11	04	2.01	0004	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**
2	11	05	2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
2	11	05	2.01	0001	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
2	11	06	2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	11	06	2.01	0001	FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH
2	11	06	2.01	0009	PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN

					PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
2	11	09	2.01		PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	11	09	2.01	0001	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**
2	11	10	2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA
2	11	10	2.01	0004	PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**
2	11	11	2.01		PENGELOLAAN SAMPAH
2	11	11	2.01	0004	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	11	11	2.01	0012	PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN
2	11	11	2.01	0015	PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SAMPAH

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan Evaluasi Renja tahun 2025 Triwulan I dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk matrik sebagaimana tabel 2.1 berikut :

TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	021101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	74	7.912.241.839	0	1.652.690.196		0		0		0	0	1.652.690.196	0	21	Sekretariat
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	85		0								0		0		Sekretariat
2		021101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan: %)	100	0		0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
3		021101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	3	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
4		021101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	2	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
5		021101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
6		021101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan: %)	100	6.231.692.063	25	1.527.845.879		0		0		0	25	1.527.845.879	25	25	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
7		021101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	45	5.784.073.231	42	1.439.409.407							42	1.439.409.407	93	25	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
8		021101202002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan: Dokumen)	1	447.618.832	1	88.436.472							1	88.436.472	100	20	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
9		021101202003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	2	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
10		021101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
11		021101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	12	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
12		021101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan: %)	0	100.000.000	0	0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13		021101205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	45	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sasaran Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14		02.1.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |Dengan Satuan:Orang|	10	100.000.000	0	0							0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15		02.1.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah |Dengan Satuan:%|	100	387.167.700	15	58.347.403		0		0		0	15	58.347.403	25	15	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16		02.1.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |Dengan Satuan:Paket|	1	9.999.700	0	0							0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17		02.1.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |Dengan Satuan:Paket|	2	78.800.000	0	0							0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18		02.1.01.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |Dengan Satuan:Paket|	2	0	0	0							0	0	0	MDN/01	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
19		02.1.01.1.06.004	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |Dengan Satuan:Paket|	1	63.173.300	1	31.878.750							1	31.878.750	100	50	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20		02.1.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |Dengan Satuan:Paket|	2	35.194.700	2	7.455.750							2	7.455.750	100	21	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
21		02.1.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |Dengan Satuan:Laporan|	1	200.000.000	1	19.032.903							1	19.032.903	100	10	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22		02.1.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |Dengan Satuan:%|	100	1.039.381.392	15	51.596.914		0		0		0	15	51.596.914	25	5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23		02.1.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |Dengan Satuan:Laporan|	1	957.150.000	1	43.839.682							1	43.839.682	100	5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
24		02.1.01.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |Dengan Satuan:Laporan|	1	15.000.000	0	0							0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
25		02.1.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |Dengan Satuan:Laporan|	1	57.231.392	1	8.757.132							1	8.757.132	100	15	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
26		02.1.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik |Dengan Satuan:%|	100	154.000.684	15	13.900.000		0		0		0	15	13.900.000	25	9	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
27		02.1.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |Dengan Satuan:Unit|	1	33.681.636	1	2.000.000							1	2.000.000	100	6	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
28		02.1.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Kerizinannya |Dengan Satuan:Unit|	9	150.340.909	2	11.900.000							2	11.900.000	22	10	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi |Dengan Satuan:Unit|	1	0		0							0	0	0	MDN/01	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					0,000	10,888	
												PREDIKAT KINERJA							
31	-	0211102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun. (Dengan Satuan:%)	80	82.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Penataan dan Pemantau PPLH
32		0211102201	Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) Kota (Dengan Satuan:%)	Persentase tersusunnya Dokumen Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) Kota (Dengan Satuan:%)	100	67.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
33		0211102201002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	67.500.000	0	0							0	0	0	0	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
34		0211102201003	Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/ kota yang ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
35		0211102202	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS) Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	100	14.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
36		0211102202002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
37		0211102202006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/ Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/ risiko lingkungan hidup yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	14.550.000	0	0							0	0	0	0	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					0,000	0,000	
												PREDIKAT KINERJA							
38	-	0211103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu (Dengan Satuan:%)	36	890.784.156	23,51	59.036.160		0		0		0	24	59.036.160	65	7	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
39		0211103201	Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota (Dengan Satuan:Laporan)	4	890.784.156	2	59.036.160	0	0		0		0	2	59.036.160	50	7	Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan
40		0211103201001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dengan Satuan:Dokumen)	1	65.000.000	0	0							0	0	0	0	Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan
41		0211103201002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	51.100.000	0	0							0	0	0	0	Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
42		0211032001003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dengan Satuan: Dokumen)	2	734.684.156	2	59.036.160							2	59.036.160	100	8	UPTD. Laboratorium Lingkungan
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						65,351	6,627	
											PREDIKAT KINERJA								
43	-	0211104	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati (Dengan Satuan:%)	75	3.128.901.031	77	497.152.854		0		0		0	77	497.152.854	103	16	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
44		0211104201	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH publik yang dikelola (Dengan Satuan:Ha)	82	3.128.901.031	82	497.152.854		0		0		0	82	497.152.854	100	16	Sub Koordinator Pemeliharaan lingkungan
45		0211104201003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ha)	60,000	653.944.990	60,000	71.172.300							61	71.172.300	100	11	Sub Koordinator Pemeliharaan lingkungan
46		0211104201004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ha)	21,160	2.474.956.033	21,160	425.980.346							21	425.980.346	100	17	Sub Koordinator Pemeliharaan lingkungan
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						102,667	15,889	
											PREDIKAT KINERJA								
47	-	0211105	PROGRAM PENGENDALIAN B A H A N BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B2)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 (Dengan Satuan:%)	745	20.450.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
48		0211105201	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase terverifikasinya kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis (Dengan Satuan:%)	25	20.450.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Limbah B3
49		0211105201001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi Persetujuan Izin Penyimpanan sementara limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	12	20.450.000	0	0							0	0	0	0	Sub Koordinator Limbah B3
50		0211105201002	Verifikasi Lapangan untuk Menentukan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan limbah B3 (Dengan Satuan:Laporan)	3	0	0	0											Sub Koordinator Limbah B3
48			Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlayaninya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	61	0	0												Sub Koordinator Limbah B3
49			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan	1	0	0	0											Sub Koordinator Limbah B3
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						0,000	0,000	
											PREDIKAT KINERJA								

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Setiap Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
51	-	02 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	25	65.970.000	0,00	0		0		0		0	0	0	0	0	Bidang Penataan dan Penaatan PPLH
52		02 11 06 201	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	65.970.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penegakan Hukum dan Lingkungan
53		02 11 06 201 001	Fasilitasi Penerbitan Ketetuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Pelayakan Operasi yang Diberikan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	17.000.000	0	0							0	0	0	0	Sub Koordinator Penegakan Hukum dan Lingkungan
54		02 11 06 201 005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Dengan Satuan: Badan Usaha)	45	48.970.000	0	0							0	0	0	0	Sub Koordinator Penegakan Hukum dan Lingkungan
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					0,000	0,000	
												PREDIKAT KINERJA							
55	-	02 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0											Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
56		02 11 08 201	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0											Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas
57		02 11 08 201 003	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pemimpin Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dengan Satuan: dokumen)	1	0	0	0											Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas
57		02 11 08 201 003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terfasilitasi (Dengan Satuan: Orang)	50	0	0	0											Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas
57		02 11 08 201 003	Pemantauan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Layanan Kesehatan yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemantauan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Layanan Kesehatan yang Sehat (Dengan Satuan: keluarga)	10	0	0	0											Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ini tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
57		02.11.02.01.0003	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensi nya terkait PPLH | Dengan Satuan:lembaga|	3	0	0	0											Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas
														BATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					
														PREDIKAT KINERJA					
58	-	02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:%)	20	29.020.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
				Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:%)	10		0	0							0		0		Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
59		02.11.09.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat atau lembaga yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota | Dengan Satuan:%|	20	29.020.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas
60		02.11.09.02.001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Dengan Satuan:Entitas|	1	29.020.000	0	0							0	0	0	0	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas
														BATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			0,000	0,000	
														PREDIKAT KINERJA					
61	-	02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait tata lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, kegiatan usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	100	47.600.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Bidang Penataan dan Penaatan PPLH
62		02.11.10.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | PPLH | Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan|	20	47.600.000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
63		02.11.10.01.004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Penemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Penemaran dan Perusakan lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Dengan Satuan:Pengaduan|	20	47.600.000	0	0							0	0	0	0	Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
														BATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			0,000	0,000	
														PREDIKAT KINERJA					
64	-	02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di perkotaan (Dengan Satuan:%)	14	18.812.451.441	12,5	3.058.282.936		0		0		0	14	3.058.282.936	96	16	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
65		0211112O1	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang terangkut ke TPA (Dengan Satuan:%)	85	18.812.455.444	83,45	3.058.283.936		0		0		0	83	3.058.283.936	98	16	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
66		0211112O1004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Terbaik Masyarakat (Dengan Satuan: Kelompok)	2	118.259.912	0	0							0	0	0	0	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas
67		0211112O1012	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
67		0211112O1012	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan (Dengan Satuan:dokumen)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
67		0211112O1012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Dengan Satuan:Ton)	64.183,42	16.783.792.532	12.802,375	3.044.707.936							12.802	3.044.707.936	20	18	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
67		0211112O1012	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik.(Dengan Satuan:unit)	10,000	1.910.403.000	1	13.576.000							1	13.576.000	10	1	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
67		0211112O1012	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang ditetapkan (Dengan Satuan:dokumen)	1	0		0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			96,429	16,257	
														PREDIKAT KINERJA					
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)			29,384	8,629	
														PREDIKAT KINERJA					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 07-02-2026 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG BARTHOLOMEUS SUHARTO, S.T. NIP. 197208241998031002																			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang akan dibahas antara lain:

1. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang berdasarkan capaian realisasi anggaran.

2.2.1. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Berdasarkan Realisasi Capaian Pelaksanaan Anggaran

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang berdasarkan realisasi capaian pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dengan cara menganalisis hal-hal antara lain:

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang secara umum, hingga Tahun 2025 terdapat beberapa isu penting sebagai berikut:

NO	PERUMUSAN ISU –ISU PENTING DLH KOTA PANGKALPINANG	ASPEK KAJIAN
1	Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal	Pengelolaan Persampahan berupa pengembangan bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), pengawasan sampah mobile, serta kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif.
2	Keterbatasan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Pengelolaan Persampahan, hal ini memerlukan solusi jangka panjang, termasuk peningkatan kualitas TPA dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
3	Penurunan Kualitas Air dan Banjir	Penyusunan perencanaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4	Perubahan Fungsi Lahan	Penyusunan perencanaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan keanekaragaman hayati.
5	Kualitas Udara	Penyusunan perencanaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan keanekaragaman hayati.

Sumber: ***Hasil analisis, Tahun 2025***

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap rancangan awal RKPD 2025, dan perubahan dapat dilihat pada besaran anggaran. Hal ini disebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai unit pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan lingkungan hidup.

Tabel 2.4.1 berikut menyajikan program/kegiatan prioritas Tahun 2025 berdasarkan rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 serta hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.4.1 (T-C.31)
Review terhadap rancangan awal Perubahan RENJA Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 29.175.238.718	Rp. 1.929.800.000			Rp. 31.105.038.718	Rp. 28.263.090.094	Rp. 931.000.000			Rp. 29.194.090.094	Rp. 22.307.487.960,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 29.175.238.718	Rp. 1.929.800.000			Rp. 31.105.038.718	Rp. 28.263.090.094	Rp. 931.000.000			Rp. 29.194.090.094	Rp. 22.307.487.960,00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.885.985.231	Rp. 78.800.000			Rp. 7.964.785.231	Rp. 7.760.490.859	Rp. 0			Rp. 7.760.490.859	Rp. 8.942.128.131,00
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														Rp. 18.952.080,00
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 9.016.350,00
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.338.725,00
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 4.597.005,00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.284.235.455				Rp. 6.284.235.455	Rp. 6.350.512.277				Rp. 6.350.512.277	Rp. 6.489.748.629,00
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN TRANSFER - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.784.073.231				Rp. 5.784.073.231	Rp. 5.902.893.445				Rp. 5.902.893.445	Rp. 5.941.332.250,00
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.162.224				Rp. 500.162.224	Rp. 447.618.832				Rp. 447.618.832	Rp. 612.666.279,00
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 10.500.000,00
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.250.000,00
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
2	11	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 52.500.000,00
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 52.500.000,00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 308.397.700	Rp. 78.800.000			Rp. 387.197.700	Rp. 192.814.506	Rp. 0			Rp. 192.814.506	Rp. 514.312.660,00
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.999.700				Rp. 9.999.700	Rp. 29.995.800				Rp. 29.995.800	Rp. 10.499.685,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun -1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 78.800.000			Rp. 78.800.000		Rp. 0			Rp. 0	Rp. 30.870.000,00
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 121.705.585,00
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 83.173.300				Rp. 83.173.300	Rp. 37.711.850				Rp. 37.711.850	Rp. 40.475.295,00
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.194.700				Rp. 35.194.700	Rp. 17.597.100				Rp. 17.597.100	Rp. 100.762.095,00
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 107.509.956				Rp. 107.509.956	Rp. 210.000.000,00
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.039.381.392				Rp. 1.039.381.392	Rp. 1.033.183.392				Rp. 1.033.183.392	Rp. 1.538.250.000,00
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 957.150.000				Rp. 957.150.000	Rp. 957.150.000				Rp. 957.150.000	Rp. 945.000.000,00
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 26.250.000,00
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.231.392				Rp. 57.231.392	Rp. 51.013.392				Rp. 51.013.392	Rp. 667.000.000,00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 154.000.684				Rp. 154.000.684	Rp. 154.000.684				Rp. 154.000.684	Rp. 348.364.862,00
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.681.696				Rp. 33.681.696	Rp. 33.681.696				Rp. 33.681.696	Rp. 53.024.988,00
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 120.318.988				Rp. 120.318.988	Rp. 120.318.988				Rp. 120.318.988	Rp. 195.339.874,00
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 100.000.000,00
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 82.050.000				Rp. 82.050.000	Rp. 72.050.000				Rp. 72.050.000	Rp. 503.412.500,00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				Rp. 67.500.000				Rp. 67.500.000	Rp. 57.500.000				Rp. 57.500.000	Rp. 71.698.750,00
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 67.500.000				Rp. 67.500.000	Rp. 57.500.000				Rp. 57.500.000	Rp. 71.698.750,00
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 431.713.750,00
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa												Rp. 412.000.000,00
2	11	02	2.02	0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 19.713.750,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 770.784.156	Rp. 120.000.000			Rp. 890.784.156	Rp. 709.923.556	Rp. 0			Rp. 709.923.556	Rp. 619.306.725,00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Rp. 770.784.156	Rp. 120.000.000			Rp. 890.784.156	Rp. 709.923.556	Rp. 0			Rp. 709.923.556	Rp. 619.306.725,00
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- PENDAPATAN TRANSFER - Pajak Air Tanah	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.000.000				Rp. 85.000.000	Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 115.312.500,00
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 51.100.000				Rp. 51.100.000	Rp. 41.100.000				Rp. 41.100.000	Rp. 52.464.225,00
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 634.684.156	Rp. 120.000.000			Rp. 754.684.156	Rp. 598.823.556	Rp. 0			Rp. 598.823.556	Rp. 451.500.000,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Rp. 3.146.415.495				Rp. 3.146.415.495	Rp. 2.737.177.955				Rp. 2.737.177.955	Rp. 1.364.982.438,00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				Rp. 3.146.415.495				Rp. 3.146.415.495	Rp. 2.737.177.955				Rp. 2.737.177.955	Rp. 1.364.982.438,00
2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 653.944.998				Rp. 653.944.998	Rp. 425.844.998				Rp. 425.844.998	Rp. 314.982.622,00
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER - Pajak Air Tanah	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.492.470.497				Rp. 2.492.470.497	Rp. 2.311.332.957				Rp. 2.311.332.957	Rp. 1.049.999.816,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Rp. 20.450.000				Rp. 20.450.000	Rp. 10.400.000				Rp. 10.400.000	Rp. 125.812.500,00
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3				Rp. 20.450.000				Rp. 20.450.000	Rp. 10.400.000				Rp. 10.400.000	Rp. 125.812.500,00
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.450.000				Rp. 20.450.000	Rp. 10.400.000				Rp. 10.400.000	Rp. 115.312.500,00
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 10.500.000,00
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Rp. 65.970.000				Rp. 65.970.000	Rp. 40.570.000				Rp. 40.570.000	Rp. 89.268.500,00
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 65.970.000				Rp. 65.970.000	Rp. 40.570.000				Rp. 40.570.000	Rp. 89.268.500,00
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.000.000				Rp. 17.000.000	Rp. 12.000.000				Rp. 12.000.000	Rp. 17.850.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	08	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang ditetbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 48.970.000				Rp. 48.970.000	Rp. 28.570.000				Rp. 28.570.000	Rp. 51.418.500,00
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
2	11	08	2.01		Penyelanggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 36.771.000,00
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 36.771.000,00
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 36.771.000,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 47.600.000				Rp. 47.600.000	Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 76.629.000,00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				Rp. 47.600.000				Rp. 47.600.000	Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 76.629.000,00
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.600.000				Rp. 47.600.000	Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 76.629.000,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Rp. 17.126.963.836	Rp. 1.731.000.000			Rp. 18.857.963.836	Rp. 16.882.457.724	Rp. 931.000.000			Rp. 17.813.457.724	Rp. 10.569.177.166,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				Rp. 17.126.963.836	Rp. 1.731.000.000			Rp. 18.857.963.836	Rp. 16.882.457.724	Rp. 931.000.000			Rp. 17.813.457.724	Rp. 10.569.177.166,00
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 118.259.912				Rp. 118.259.912	Rp. 93.250.000				Rp. 93.250.000	Rp. 5.618.401.750,00
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.250.000,00
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Urusan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.829.300.924	Rp. 200.000.000			Rp. 16.829.300.924	Rp. 16.409.804.724	Rp. 0			Rp. 16.409.804.724	Rp. 4.007.739.768,00
2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 379.403.000	Rp. 1.531.000.000			Rp. 1.910.403.000	Rp. 379.403.000	Rp. 931.000.000			Rp. 1.310.403.000	Rp. 580.285.650,00
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 157.500.000,00
Jumlah									**Rp. 29.175.238.718**	**Rp. 1.920.800.000**			**Rp. 31.105.038.718**	**Rp. 28.263.090.094**	**Rp. 931.000.000**			**Rp. 29.194.090.094**	**Rp. 22.307.487.980,00**

Kota Pangkal Pinang, ...
Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.
NIP. 197208241998031002

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Tahun 2025 seyogyanya menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat daerah kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang memuat tentang bagaimana proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, dan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang melaksanakan forum PD untuk mengetahui usulan program/kegiatan pemangku kepentingan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.1.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal.

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6344).

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam

RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dalam Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun keempat. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 terlampir dalam Tabel 3.3.1 di bawah ini.

Tabel 2.4.1 (T-C.31)
Review terhadap rancangan awal Perubahan RENJA Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 29.175.238.718	Rp. 1.929.800.000			Rp. 31.105.038.718	Rp. 28.263.080.094	Rp. 931.000.000			Rp. 29.194.080.094	Rp. 22.307.487.966,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 29.175.238.718	Rp. 1.929.800.000			Rp. 31.105.038.718	Rp. 28.263.080.094	Rp. 931.000.000			Rp. 29.194.080.094	Rp. 22.307.487.966,00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.885.985.231	Rp. 78.800.000			Rp. 7.964.785.231	Rp. 7.760.490.859	Rp. 0			Rp. 7.760.490.859	Rp. 8.942.128.131,00
2	11	01	2.01		Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														Rp. 18.952.080,00
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 9.016.350,00
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.338.725,00
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 4.597.005,00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.284.235.455				Rp. 6.284.235.455	Rp. 6.350.612.277				Rp. 6.350.612.277	Rp. 6.469.748.529,00
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN TRANSFER - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.784.073.231				Rp. 5.784.073.231	Rp. 5.902.893.445				Rp. 5.902.893.445	Rp. 5.941.332.250,00
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.162.224				Rp. 500.162.224	Rp. 447.618.832				Rp. 447.618.832	Rp. 512.896.279,00
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 10.500.000,00
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.250.000,00
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
2	11	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 52.500.000,00
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 52.500.000,00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 306.367.700	Rp. 78.800.000			Rp. 387.167.700	Rp. 192.814.506	Rp. 0			Rp. 192.814.506	Rp. 514.312.660,00
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.999.700				Rp. 9.999.700	Rp. 29.999.600				Rp. 29.999.600	Rp. 10.499.685,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 78.800.000			Rp. 78.800.000		Rp. 0			Rp. 0	Rp. 30.870.000.00
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 121.705.585.00
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 83.173.300				Rp. 83.173.300	Rp. 37.711.860				Rp. 37.711.860	Rp. 40.476.295.00
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.194.700				Rp. 35.194.700	Rp. 17.697.100				Rp. 17.697.100	Rp. 180.762.095.00
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 107.509.956				Rp. 107.509.956	Rp. 210.000.000.00
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.039.391.392				Rp. 1.039.391.392	Rp. 1.033.163.392				Rp. 1.033.163.392	Rp. 1.598.250.000.00
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 957.150.000				Rp. 957.150.000	Rp. 957.150.000				Rp. 957.150.000	Rp. 945.000.000.00
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 26.250.000.00
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.231.392				Rp. 57.231.392	Rp. 51.013.392				Rp. 51.013.392	Rp. 567.000.000.00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 154.000.684				Rp. 154.000.684	Rp. 154.000.684				Rp. 154.000.684	Rp. 346.364.862.00
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.681.696				Rp. 33.681.696	Rp. 33.681.696				Rp. 33.681.696	Rp. 63.024.960.00
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 120.318.968				Rp. 120.318.968	Rp. 120.318.568				Rp. 120.318.568	Rp. 196.339.874.00
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 100.000.000.00
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 82.050.000				Rp. 82.050.000	Rp. 72.050.000				Rp. 72.050.000	Rp. 503.412.500.00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				Rp. 67.500.000				Rp. 67.500.000	Rp. 57.500.000				Rp. 57.500.000	Rp. 71.698.750.00
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 67.500.000				Rp. 67.500.000	Rp. 57.500.000				Rp. 57.500.000	Rp. 71.698.750.00
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 431.713.750.00
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa												Rp. 412.000.000.00
2	11	02	2.02	0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 19.713.750.00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 770.784.156	Rp. 120.000.000			Rp. 890.784.156	Rp. 709.923.556	Rp. 0			Rp. 709.923.556	Rp. 810.308.725.00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Rp. 770.784.156	Rp. 120.000.000			Rp. 890.784.156	Rp. 709.923.556	Rp. 0			Rp. 709.923.556	Rp. 810.308.725.00
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- PENDAPATAN TRANSFER - Pajak Air Tanah	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.000.000				Rp. 85.000.000	Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 116.312.500.00
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 51.100.000				Rp. 51.100.000	Rp. 41.100.000				Rp. 41.100.000	Rp. 52.494.225.00
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 634.684.156	Rp. 120.000.000			Rp. 754.684.156	Rp. 598.823.556	Rp. 0			Rp. 598.823.556	Rp. 681.500.000.00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Rp. 3.146.415.495				Rp. 3.146.415.495	Rp. 2.737.177.955				Rp. 2.737.177.955	Rp. 1.364.982.438.00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				Rp. 3.146.415.495				Rp. 3.146.415.495	Rp. 2.737.177.955				Rp. 2.737.177.955	Rp. 1.364.982.438.00
2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 663.644.998				Rp. 425.644.998	Rp. 425.644.998				Rp. 425.644.998	Rp. 314.982.622.00
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER - Pajak Air Tanah	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.482.470.497				Rp. 2.482.470.497	Rp. 2.311.332.957				Rp. 2.311.332.957	Rp. 1.049.999.816.00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Rp. 20.450.000				Rp. 20.450.000	Rp. 10.400.000				Rp. 10.400.000	Rp. 125.812.500.00
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3				Rp. 20.450.000				Rp. 20.450.000	Rp. 10.400.000				Rp. 10.400.000	Rp. 125.812.500.00
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.450.000				Rp. 20.450.000	Rp. 10.400.000				Rp. 10.400.000	Rp. 116.312.500.00
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 10.500.000.00
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Rp. 65.970.000				Rp. 65.970.000	Rp. 40.570.000				Rp. 40.570.000	Rp. 69.268.500.00
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 65.970.000				Rp. 65.970.000	Rp. 40.570.000				Rp. 40.570.000	Rp. 69.268.500.00
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.000.000				Rp. 17.000.000	Rp. 12.000.000				Rp. 12.000.000	Rp. 17.850.000.00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	08	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 48.970.000				Rp. 48.970.000	Rp. 28.570.000				Rp. 28.570.000	Rp. 51.418.600,00
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kepasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 36.771.000,00
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 36.771.000,00
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 36.771.000,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 47.600.000				Rp. 47.600.000	Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 76.829.000,00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				Rp. 47.600.000				Rp. 47.600.000	Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 76.829.000,00
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan pemasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.600.000				Rp. 47.600.000	Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 76.829.000,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Rp. 17.126.963.836	Rp. 1.731.000.000			Rp. 18.857.963.836	Rp. 16.882.457.724	Rp. 931.000.000			Rp. 17.813.457.724	Rp. 10.569.177.166,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				Rp. 17.126.963.836	Rp. 1.731.000.000			Rp. 18.857.963.836	Rp. 16.882.457.724	Rp. 931.000.000			Rp. 17.813.457.724	Rp. 10.569.177.166,00
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 118.259.912				Rp. 118.259.912	Rp. 93.250.000				Rp. 93.250.000	Rp. 5.816.401.750,00
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.250.000,00
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah									
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.629.300.924	Rp. 200.000.000			Rp. 16.829.300.924	Rp. 16.409.804.724	Rp. 0			Rp. 16.409.804.724	Rp. 4.007.739.766,00
2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 379.403.000	Rp. 1.531.000.000			Rp. 1.910.403.000	Rp. 379.403.000	Rp. 931.000.000			Rp. 1.310.403.000	Rp. 980.286.850,00
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 157.500.000,00
Jumlah									Rp. 29.175.238.718	Rp. 1.020.806.000			Rp. 31.105.038.718	Rp. 28.263.000.004	Rp. 931.000.000			Rp. 29.194.000.004	Rp. 22.307.467.950,00

Kota Pangkal Pinang, ...
Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.
NIP. 197208241998031002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja (work plan report) tahun 2024 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategi (strategic plan report). Rencana strategi atau disebut dengan Renstra sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perkiraan maju. Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dapat kita lihat pada Bab 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 29.175.238.718	Rp. 1.929.800.000			Rp. 31.105.038.718	Rp. 28.263.090.094	Rp. 931.000.000			Rp. 29.194.090.094	Rp. 22.307.487.960,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 29.175.238.718	Rp. 1.929.800.000			Rp. 31.105.038.718	Rp. 28.263.090.094	Rp. 931.000.000			Rp. 29.194.090.094	Rp. 22.307.487.960,00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.885.985.231	Rp. 78.800.000			Rp. 7.964.785.231	Rp. 7.760.490.859	Rp. 0			Rp. 7.760.490.859	Rp. 8.942.128.131,00
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														Rp. 18.952.080,00
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 9.016.350,00
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 6.338.725,00
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 4.597.005,00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.284.236.466				Rp. 6.284.236.466	Rp. 6.350.512.277				Rp. 6.350.512.277	Rp. 6.469.748.529,00
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN TRANSFER - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.784.073.231				Rp. 5.784.073.231	Rp. 5.902.893.445				Rp. 5.902.893.445	Rp. 5.941.332.260,00
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.182.224				Rp. 500.182.224	Rp. 447.618.832				Rp. 447.618.832	Rp. 512.668.279,00
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 10.500.000,00
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 5.250.000,00
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
2	11	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 52.500.000,00
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 52.500.000,00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 308.367.700	Rp. 78.800.000			Rp. 387.167.700	Rp. 192.814.506	Rp. 0			Rp. 192.814.506	Rp. 614.312.660,00
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.999.700				Rp. 9.999.700	Rp. 29.995.600				Rp. 29.995.600	Rp. 10.499.685,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 78.800.000			Rp. 78.800.000		Rp. 0			Rp. 0	Rp. 30.870.000,00
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 121.705.585,00
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 63.173.300				Rp. 63.173.300	Rp. 37.711.850				Rp. 37.711.850	Rp. 40.475.295,00
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.194.700				Rp. 35.194.700	Rp. 17.597.100				Rp. 17.597.100	Rp. 100.762.095,00
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 107.509.956				Rp. 107.509.956	Rp. 210.000.000,00
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.039.381.392				Rp. 1.039.381.392	Rp. 1.033.183.392				Rp. 1.033.183.392	Rp. 1.536.250.000,00
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 957.150.000				Rp. 957.150.000	Rp. 957.150.000				Rp. 957.150.000	Rp. 945.000.000,00
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 26.250.000,00
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.231.392				Rp. 57.231.392	Rp. 51.013.392				Rp. 51.013.392	Rp. 567.000.000,00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 154.000.684				Rp. 154.000.684	Rp. 154.000.684				Rp. 154.000.684	Rp. 348.364.862,00
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.681.696				Rp. 33.681.696	Rp. 33.681.696				Rp. 33.681.696	Rp. 53.024.988,00
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 120.318.988				Rp. 120.318.988	Rp. 120.318.988				Rp. 120.318.988	Rp. 196.339.874,00
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 100.000.000,00
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 82.050.000				Rp. 82.050.000	Rp. 72.050.000				Rp. 72.050.000	Rp. 503.412.500,00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				Rp. 67.500.000				Rp. 67.500.000	Rp. 57.500.000				Rp. 57.500.000	Rp. 71.696.750,00
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 67.500.000				Rp. 67.500.000	Rp. 57.500.000				Rp. 57.500.000	Rp. 71.696.750,00
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 431.713.750,00
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kel/Desa												Rp. 412.000.000,00
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 14.550.000				Rp. 14.550.000	Rp. 19.713.750,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 770.784.156	Rp. 120.000.000			Rp. 890.784.156	Rp. 709.923.556	Rp. 0			Rp. 709.923.556	Rp. 819.308.725,00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Rp. 770.784.156	Rp. 120.000.000			Rp. 890.784.156	Rp. 709.923.556	Rp. 0			Rp. 709.923.556	Rp. 819.308.725,00
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- PENDAPATAN TRANSFER - Pajak Air Tanah	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.000.000				Rp. 85.000.000	Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 115.312.500,00
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 51.100.000				Rp. 51.100.000	Rp. 41.100.000				Rp. 41.100.000	Rp. 52.484.225,00
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 634.684.156	Rp. 120.000.000			Rp. 754.684.156	Rp. 598.823.556	Rp. 0			Rp. 598.823.556	Rp. 451.500.000,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Rp. 3.146.415.495				Rp. 3.146.415.495	Rp. 2.737.177.955				Rp. 2.737.177.955	Rp. 1.364.982.438,00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				Rp. 3.146.415.495				Rp. 3.146.415.495	Rp. 2.737.177.955				Rp. 2.737.177.955	Rp. 1.364.982.438,00
2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 663.944.998				Rp. 663.944.998	Rp. 426.844.998				Rp. 426.844.998	Rp. 314.982.822,00
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER - Pajak Air Tanah	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.482.470.497				Rp. 2.482.470.497	Rp. 2.311.332.957				Rp. 2.311.332.957	Rp. 1.049.999.816,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Rp. 20.460.000				Rp. 20.460.000	Rp. 10.400.000				Rp. 10.400.000	Rp. 125.812.500,00
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3				Rp. 20.460.000				Rp. 20.460.000	Rp. 10.400.000				Rp. 10.400.000	Rp. 125.812.500,00
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.460.000				Rp. 20.460.000	Rp. 10.400.000				Rp. 10.400.000	Rp. 115.312.500,00
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 10.500.000,00
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Rp. 65.970.000				Rp. 65.970.000	Rp. 40.570.000				Rp. 40.570.000	Rp. 69.268.500,00
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 65.970.000				Rp. 65.970.000	Rp. 40.570.000				Rp. 40.570.000	Rp. 69.268.500,00
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.000.000				Rp. 17.000.000	Rp. 12.000.000				Rp. 12.000.000	Rp. 17.889.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	08	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 48.970.000				Rp. 48.970.000	Rp. 28.570.000				Rp. 28.570.000	Rp. 51.418.500,00
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa													
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa													
2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa													
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa													
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 38.771.000,00
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 38.771.000,00
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 29.020.000				Rp. 29.020.000	Rp. 38.771.000,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp. 47.600.000				Rp. 47.600.000	Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 76.629.000,00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				Rp. 47.600.000				Rp. 47.600.000	Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 76.629.000,00
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.600.000				Rp. 47.600.000	Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 76.629.000,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Rp. 17.126.963.836	Rp. 1.731.000.000			Rp. 18.857.963.836	Rp. 16.882.457.724	Rp. 931.000.000			Rp. 17.813.457.724	Rp. 10.569.177.186,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				Rp. 17.126.963.836	Rp. 1.731.000.000			Rp. 18.857.963.836	Rp. 16.882.457.724	Rp. 931.000.000			Rp. 17.813.457.724	Rp. 10.569.177.186,00
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 118.259.912				Rp. 118.259.912	Rp. 93.250.000				Rp. 93.250.000	Rp. 5.818.401.750,00
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa													Rp. 5.250.000,00
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/Kota	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa													

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.629.300.924	Rp. 200.000.000			Rp. 16.829.300.924	Rp. 16.409.604.724	Rp. 0			Rp. 16.409.604.724	Rp. 4.007.739.766,00
2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 379.403.000	Rp. 1.531.000.000			Rp. 1.910.403.000	Rp. 379.403.000	Rp. 931.000.000			Rp. 1.310.403.000	Rp. 580.285.650,00
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 157.500.000,00
Jumlah									Rp. 29.175.236.718	Rp. 1.929.800.000			Rp. 31.105.036.718	Rp. 29.263.690.094	Rp. 931.000.000			Rp. 29.194.090.094	Rp. 22.307.467.950,00

Kota Pangkal Pinang .....
Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.
NIP. 197208241998031002

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan, serta rencana tindak lanjut program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dan yang harus ditindak lanjuti kedepannya antara lain isu-isu strategis yang meliputi:

1. Pengelolaan Sampah yang belum Optimal
2. Keterbatasan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
3. Penurunan Kualitas Air dan Banjir
4. Perubahan Fungsi Lahan
5. Kualitas udara

Disamping isu-isu strategis di atas, yang perlu mendapat perhatian juga ketersediaan anggaran apabila tidak sesuai dengan kebutuhan dapat kita analisis dari program dan kegiatan yang strategis sehingga dapat diukur kebutuhan perencanaan yang akan datang.

Pangkalpinang , 28 Mei 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang,

Bartholomeus Suharto, S.T.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.197208241998031002

RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS KOPERASI,UMKM DAN PERDAGANGAN

DAFTAR ISI

BAB I 3
P E N D A H U L U A N 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II 8
EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025 8
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun ini dan capaian renstra perangkat daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 27
BAB III 43
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43
BAB IV 69
PENUTUP 69

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penyusunan renja perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Renja perubahan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan meliputi perubahan / penambahan anggaran program dan kegiatan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi pelaksanaan kegiatan dan perubahan target kinerja yang akan dicapai.

Renja perubahan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan tahun 2025 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Renja Perubahan ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD Tahun Anggaran 2025
5. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
   pembangunan daerah, tata cara evaluasi ranperda tentang rpjpd dan rpjmd serta tata cara perubahan rpjpd rpjmd dan rkpd
6. Peraturan kpu nomor 19 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota ulang tahun 2025
7. Kepmenkeu nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer kedaerah menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025
8. surat edaran bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor 900.1.3/6629.A/SJ dan 1/MK.07/2024 tentang tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2025
9. surat edaran menteri dalam negeri nomor 900.1.1.640/SJ tanggal 11 februari 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rkpd dan perubahan apbd tahun anggaran 2025
10. Surat wali kota pangkal pinang nomor 900/9/bakeuda/I/2025 tanggal 13 januari 2025 perihal pemberitahuan
11. Surat wali kota pangkal pinang nomor 900/107/bakeuda/IV/2025 tanggal 21 april 2025 perihal refocusing dan efisiensi belanja pada APBD tahuh 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja perubahan adalah sebagai acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja perubahan adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja perubahan 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ini dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun ini dan capaian renstra perangkat daerah

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	
					I		II			
1	2	3	4		5		6		7 = 5+6	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**73**	**6.974.558.248**	**20**	**1.659.682.035**			**20**	**1659682035**
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**70,5**		**20**				**20**	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	100	0	25					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	1	0						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1	0	1					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Sartuan : %)**	100	6.066.338.524	25	1.436.112.117			25	1436112117
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	47	6.066.338.524	47	1.436.112.117			47	1436112117

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	0						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1	0						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)**	100	4.000.000	25	4.000.000			25	4000000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	1	4.000.000	1	4000000			1	4000000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	0	0					0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)**	100	217.422.500	25	85.878.726			25	85878726
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	9.445.600	1	5.202.800			1	5202800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	70.540.300	1	43.263.400			1	43263400
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	37.436.600	1	7.865.350			1	7865350
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	100.000.000	1	29547176			1	29547176
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase pengadaaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan : %)**	100	19.220.000	25	0			25	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	3	19.220.000					0	0

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)**	100	566.368.832	25	113.763.960			25	113.763.960
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	138.000.000	1	19.670.256			1	19.670.256
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	24.750.000	1	1.900.000			1	1.900.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	1	403.618.832	1	92.193.704			1	92.193.704
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)**	100	101.208.392	25	19.927.232			25	19927232
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	56.576.696	1	12.038.616			1	12038616
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	44.631.696	2	7.888.616			2	7888616
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	1	0					0	0
2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang dlindungi dan diberdayakan (Dengan Satuan:%)**	**80**	**167.858.480**	**20**	**33.493.080**			**20**	**33493080**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)**	51	167.858.480	13	33.493.080			13	33493080
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)	62	167.858.480	15	33.493.080			15	33493080
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Prosentase Pelaku UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%)**	**1,7**	**42.014.000**	**0.3**	**5.800.000**			**0**	**5800000**
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%)	**20**		**5**				**5**	

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan , Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan : %)**	7	42.014.000	2	5.800.000			2	5800000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan : Unit)	300	42.014.000	50	5.800.000			50	5800000
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:persen)**	**0,7**	**82.000.000**	**0.2**	**0**			**0**	**0**
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha. (Dengan Satuan:%)	**8**		**2**				**2**	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan (Dengan Satuan:%)**	1	82.000.000		0			0	0
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	20	82.000.000	5				5	0
5.	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)**	**83,5**	**0**						
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)**	100	0						
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan : Dokumen)	6	0						
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	0						
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0						
6.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Presentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan :%)**	**50**	**1.133.227.752**	**12**	**259.458.492**			**12**	**259458492**
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan : %)**	100	1.133.227.752	25	259.458.492			25	259458492
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	1	204.120.264	1	56.111.316			1	56111316

	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	4	929.107.488	4	203.347.176			4	203347176
7.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)**	**22,7**	**233.490.088**	**5**	**9.757.232**			**5**	**9757232**
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	**Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dan penting minimal 12 kali dalam setahun (Dengan Satuan:%)**	100	233.490.088	25	9.757.232			25	9757232
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	147.115.088	1	9.757.232			1	9757232
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	86.375.000					0	0
8.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:%)**	**39**	**337.000.000**		**0**			**0**	**0**
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase promosi dan misi dagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan(Dengan Satuan:%)**	100	337.000.000		0			0	0
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	10	337.000.000					0	0
9.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%)**	**83**	**397.699.268**	**20**	**42.407.544**			**20**	**42407544**
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku(Dengan Satuan:%)	**5**						**0**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:unit)**	1560	397.699.268	320	42.407.544			320	42407544
		Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku(DenganSatuan:orang)	2250						0	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:Unit)	1.560	352.605.264	320	42.407.544			320	42407544
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	2.250	45.094.004					0	0

10.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern (Dengan Satuan:%)**	**11**	**0**						
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:%)**	100	0						
	Pemasarandan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (Dengan Satuan:UMKM)	12	0						
11.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)**	**80**	**3.730.216.960**	**20**	**441.281.946**			**20**	**441.281.946**
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)**	100	3.730.216.960	25	441.281.946			25	441.281.946
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	97.086.784		14.635.848			0	14.635.848
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	226.630.176		28.771.696			0	28.771.696
	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan Pemberdayaan Industri danPeranSerta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan : Dokumen)	1	3.406.500.000		397.874.402			0	397.874.402
12.	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota (Dengan Satuan : %)**	**100**	**0**	**25**					
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) , Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) , Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)**	100	0	25					

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0						
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0						
13.	**P R O G R A M PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINasTerhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:persen)**	**75**	**5.000.000**		**0**			**0**	**0**
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	**Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%**	100	5.000.000	25	0			25	0
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0						
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0						
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000					0	0
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	**0,000**	**0,000**
								PREDIKAT KINERJA		
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)	**16,096**	**10,712**
								PREDIKAT KINERJA	**SR**	**SR**

Dari tabel diatas dapatkan jabarkan bahwa di triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 2.768.872.340., ada beberapa kegiatan yang telah mencapai target kinerja dan ada pula yang belum mencapai target dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Renstra 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Renstra	Target Renstra OPD		Realisasi Capaian	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi Mobil dan sepeda Motor terhadap PDRB	24,60%	24,80%	25,79%	
2	Persentase kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	12%	12%	13,43%	
3	Persentase Koperasi yang aktif	56%	59%	54,62%	
4	Persentase pertumbuhan UMKM di Kota Pangkal Pinang	1,4%	1,6%	1,12%	
5	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	250.414.660,64 US$	262.935.393,88 US$	1.046.854.659US$	
6	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri di Kota Pangkal Pinang	1%	1%	79,10%	

2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isi-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD).

Sebagaimana kita ketahui bahwa orientasi pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perindustrian di Kota Pangkalpinang, diperlukan adanya dukungan kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal yang mendukung kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang belum optimal, baik dalam memberi layanan publik maupun dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat umumnya.

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dalam upaya mendukung program dan kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi daerah sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang isinya adalah dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia emas 2045, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di desa/kelurahan.Untuk itu Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal pinang melalui Bidang Koperasi dan UMKM memfasilitasi program dari pemerintah pusat melalui **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**. Selain itu masih dijumpai adanya berbagai Permasalahan internal dan ekternal yaitu :

A. Urusan Koperasi

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
    a. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) melaksanakan fungsi lembaga keuangan dengan melakukan kegiatan menghimpun dan meyaluran dana dari anggota kepada

anggota maupun non anggota. Karena itu dalam aktivitasnya memiliki resiko yang cukup tinggi, karena sangat rentan terhadap berbagai penyimpangan. Karena itu dalam pengelolaan usaha simpan pinjam oleh koperasi harus memenuhi prinsip kehati-hatian (prudent) dengan menerapkan manajemen pengelolaan yang baik serta perlu pengawasan oleh pemerintah.

b. Sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 1995, Usaha Simpan Pinjam Koperasi harus memiliki izin simpan pinjam sebagai salah satu aspek legalitas usaha. Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam, koperasi harus memenuhi persyaratan modal awal, kompetensi SDM pengelola, standar pelayanan dan perencanaan penghimpunan dan penyaluran dana, serta manajemen resiko yang baik.

c. Izin usaha simpan pinjam dapat menjadi salah satu indikator kelayakan koperasi untuk melaksanakan usahanya sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan anggota dan masyarakat. Namun dalam faktanya masih banyak koperasi yang belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam tersebut.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi

a. Koperasi sebagai badan usaha bersama yang berbadan hukum, dalam tata kelolanya diatur, dibina, diawasi dan dinilai agar dapat pelaksanaan usahanya mematuhi ketentuan yang berlaku. Akan tetapi dalam faktanya masih banyak koperasi yang menyimpang dan tidak patuh pada peraturan perkoperasian sehingga dapat memperburuk citra koperasi dikalangan masyarakat.

b. Kebanyakan pengawas internal koperasi tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara kosisten sehingga fungsi kontrol terhadap kinerja pengurus dalam melaksanakan kegiatan organisasi dan usaha koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c. Tidak semua anggota koperasi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap praktek-praktek perkoperasian sehingga peran pemerintah dalam menjaga dan mengawasi koperasi agar sesuai prinsip dan jatidiri koperasi masih sangat diperlukan.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

a. Sebagai lembaga keuangan anggota yang melaksanakan fungsi

intermediasi (menghimpun dan menyalurkan dana), KSP/USP Koperasi harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kesehatan agar dapat menjadi lembaga keuangan yang sehat dan terpercaya sehingga mampu berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap peningkatan ekonomi dan usaha anggota.

b. Terwujudnya KSP/USP Koperasi yang sehat dan berdaya saing akan menjadi daya ungkit terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang menjadi anggota koperasi.
c. Adanya Pengakuan berupa predikat “Sehat” dari pemerintah akan menumbuhkan kepercayaan dan menghapus keraguan masyarakat terhadap kinerja KSP/USP Koperasi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan gairah dan motivasi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
   a. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum koperasi, tata kelola koperasi harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku agar dalam prakteknya benar-benar dapat mewujudkan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip koperasi. Untuk itu semua unsur baik pengurus, pengawas maupun anggota koperasi seharusnya memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang koperasi. Dengan demikian dalam penyelenggaraaan kegiatan organisasi dan usahanya, koperasi dapat menampakan ciri dan watak yang menjadi jatidiri koperasi sebagai badan usaha yang demokratis, transparan dan akuntabel.
   b. Koperasi terbentuk dan didirikan karena adanya tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para pendiri yang belum tentu memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi dalam mengelola koperasi, sehingga dalam pengelolaan bisnisnya belum tentu dapat berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah ekonomi yang pantas bagi anggotanya.
   c. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan itu hanya dapat dicapai secara efektif apabila dalam pengelolaan koperasi menerapkan prinsip tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance), untuk itu dibutuhkan SDM pengelola koperasi yang memiliki kompetensi sehingga mampu membangun dan mengembangkan koperasi untuk menjadi badan

usaha yang profesional dengan berdasarkan prinsip dan jatidiri koperasi.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   a. Pengembangan kehidupan berkoperasi secara luas dikalangan masyarakat merupakan cita-cita pendiri bangsa yang telah meletakan semangat dan keinginan untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa, maka sudah seharusnya pemberdayaan koperasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa dari pusat sampai daerah.
   b. Tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan koperasi terbentuk dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang memiliki kesadaran untuk bersatu membangun kekuatan ekonomi dengan menyatukan kepentingan bersama dalam satu wadah koperasi. Karena itu secara kapasitas koperasi masih sangat lemah dan butuh upaya pemberdayaan dan keberpihakan pemerintah untuk dapat melindungi dan memfasilitasi hingga dapat menjadi badan usaha yang mandiri.

6. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha kecil dan usaha Mikro (UMKM)
   a. Dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, UMKM memiliki kedudukan dan peran yang strategis terutama dilihat dari jumlah pelakunya yang begitu banyak dan kontribusinya dalam peningkatan pendapatkan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu perlu terus diberdayakan dan dikembangkan agar stabilitas ekonomi dan sosial dapat tetap terpelihara sehingga terhindari dari kerawanan yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.
   b. Secara kuantitatif, UMKM memang mendominasi dan jumlahnya mencapai 99% dari jumlah pelaku usaha. Hal ini menunjukan bahwa UMKM terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, memberdayakan UMKM sama halnya dengan membangun masyarakat untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik.
   c. Banyaknya jumlah UMKM tak sebanding dengan kemampuan pemerintah untuk dapat memberikan dukungan yang maksimal, karena itu dibutuhkan peran dari semua pihak untuk bersinergi, berkolaborasi dan bahu membahu dalam pemberdayaan UMKM sehingga dapat

terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada.

7. Program Pengembangan UMKM
   a. Banyak UMKM terlahir bukan karena telah memiliki semua kemampuan dan keahlian dalam berproduksi, manajerial, pemasaran dan penguasaan teknologi, tetapi lebih didorong karena adanya peluang, kemauan dan kesempatan untuk mencoba suatu usaha tertentu
   b. Perkembangan dunia usaha berjalan begitu cepat dan makin kompetitif, maka untuk dapat mempertahankan daya saingnya UMKM harus mampu berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk agar tetap dapat eksis di pasar lokal maupun global.
   c. Tidak semua UMKM memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai sumberdaya produktif yang dapat mendorong kemajuan usahanya, karena itu untuk mengaklerasi perkembangan UMKM dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat menstimulasi dan memfasilitasi kebutuhan UMKM sehingga dapat meningkatkan skala usahanya.

B. Urusan Perindustrian

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah
9. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri :

Merupakan Program yang berisikan kegiatan

A. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang berisikan Penyusunan RPIK, Draft Raperda, sampai ditetapkannya sampai menjadi Perda tentang Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang terdiri dari pelaksanaan sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang melaksanakan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan:

1. Wilayah pusat pertumbuhan industri
2. Kawasan peruntukan industri
3. Kawasan industri
4. Sentra industri kecil dan industri menengah

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.Sumber daya manusia industri, meliputi:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi
2. Menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi
3. Memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri
4. Memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri
5. Memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri
6. Pelaksanaan Diklat Teknis Industri untuk ASN daerahSumber daya alam industri:

1. Penyediaan sumber daya alam untuk industri di daerah
2. Penyaluran sumber daya alam untuk industri di daerah

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri meliputi:

2. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri

Pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui:

1. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi
2. Pengembangan sentra Industri kreatif
3. Pelatihan teknologi dan desain
4. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak KekayaanIntelektual khususnya bagi Industri kecil
5. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri. Pemanfaatan kreativias dan inovasi tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakatfasilitas non fiskal bagi

industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku. fasilitas industry

bagi

1. industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib,
2. industri kecil dan industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan,
3. perusahaan industri kecil dan industri menengah yang berorientasi ekspor,
4. industri kecil dan industri menengah yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau, dan/ atau
5. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan produk industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi. Fasilitas industri tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pelaksanaan sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) tujuan pelaksanaan dari sub kegiatan adalah

1. Melalui SIINAS menerima permohonan verifikasi teknis dalam

proses pengefektifan IUI dan IPUI, atau permohonan pemeriksaan lapangan dalam proses pengefektifan IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota;

2. Melaksanakan verifikasi teknis, berupa pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan, untuk menilai pemenuhan komitmen dan kesiapan usaha dari perusahaan industri dengan IUI dan IPUI kewenangan kabupaten/ kota;
3. Menotifikasi untuk menerima atau menolak pengefektifan IUI dan IPUI kewenangan kabupaten/ kota melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS;
4. Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen

IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota;

5. Mengunggah BAP pemenuhan komitmen IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota dari SIINas ke Sistem OSS

C. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota pelaksanaan sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) tujuan pelaksanaan dari sub kegiatan adalah

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di lingkup Kab/Kota dapat dilakukan antara lain dengan :

1. Kegiatan Tatap Muka (meeting) menghadirkan Narasumber
2. Melalui media cetak, media elektronik, secara virtual ataupun media sosial
3. Melalui penyediaan layanan konsultansi baik fisik (gerai/ruangan khusus) ataupun elektronik (live chat dst).

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Kab/Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan :

1. Kegiatan FGD, rapat, seminar, konsinyering dst melibatkan

instansi penyedia data

2. Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Tukar Menukar data dengan instansi penyedia data
3. Pelaksanaan survey baik melalui swakelola ataupun pihak ketiga.

3. Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Lingkup Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan :

1. Swakelola melalui FGD, Rapat, Seminar, Konsinyering dll melibatkan narasumber tenaga ahli baik praktisi maupun akademisi; dan/atau
2. Pihak Ketiga, contohnya melalui Jasa Konsultansi dengan Tenaga Ahli Pengolahan Data;

10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
    a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk penerbitan dan non perizinan perdagangan masih rendah.
    b. Kurang optimalnya pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
    c. Kurangnya sinergisitas kebijakan dan regulasi antara pusat dan daerah terkait perizinan dan pengawasan.

C. Urusan Perdagangan

11. Program Sarana Distribusi Perdagangan
    a. Belum optimalnya pembangunan, revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
    b. Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
    c. Belum tersedianya kawasan gudang yang dikelola oleh pemerintah.

12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
    a. Belum optimalnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota.

b. Belum optimalnya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
c. Kurangnya sinergisitas terkait kelangkaan barang dan operasi pasar.
d. Belum optimalnya pengawasan sektor perdagangan.
e. Belum optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
f. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

13. Program Pengembangan Ekspor
    a. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada daerah kabupaten/kota.
    b. Minimnya penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
    c. Belum optimalnya pengembangan produk ekspor unggulan.

14. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
    a. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
    b. Perlunya pelaksanaan peengujian atau pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dengan memiliki SDM pengawasan kemetrologian
    c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaran kemetrologian

15. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
    a. Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
    b. Minimnya data sektor perdagangan.
    c. Belum tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

No	Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Sumber Dana	Keterangan
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)				
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN				**13.354.151.924,00**	**12.766.144.796,00**	**-588.007.128,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**8.551.361.924,00**	**7.206.167.960,00**	**-1.345.193.964,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				**8.551.361.924,00**	**7.206.167.960,00**	**-1.345.193.964,00**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**73** **70,5 Nilai Nilai**	**8.301.347.924,00**	**6.951.159.632,00**	**-1.350.188.292,00**	**APBD**	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)		100	0	0	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD (Dengan Satuan : Dokumen)		1	0	0	0		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan		1	0	0	0		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Sartuan : %)		100	6.699.847.924,00	6.088.363.680,00	-611.484.244,00	APBD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)		48	6.699.847.924,00	6.088.363.680,00	-611.484.244,00	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1 Laporan	0	0	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan		1 Laporan	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)		100	4.000.000,00	4.000.000,00	0	APBD	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)		1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)		10 Orang	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)		100	267.775.000,00	207.422.500,00	-60.352.500,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)		1	9.445.600,00	9.445.600,00	0	APBD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	70.892.800,00	68.040.300,00	-2.852.500,00	APBD	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)		1	37.436.600,00	37.436.600,00	0	APBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1	150.000.000,00	92.500.000,00	-57.500.000,00	APBD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan : %)		100	20.800.000,00	0	-20.800.000,00	APBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)		3	20.800.000,00	0	-20.800.000,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)		100	1.189.500.000,00	550.165.060,00	-639.334.940,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		1	138.000.000,00	138.000.000,00	0	APBD	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		1	31.500.000,00	24.750.000,00	-6.750.000,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)		1	1.020.000.000,00	387.415.060,00	-632.584.940,00	APBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)		100	119.425.000,00	101.208.392,00	-18.216.608,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)		1	39.565.000,00	56.576.696,00	17.011.696,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)		2	49.860.000,00	44.631.696,00	-5.228.304,00	APBD	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)		1	30.000.000,00	0	-30.000.000,00	APBD	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang dlindungi dan diberdayakan (Dengan Satuan:%)**		**80**	**40.500.000,00**	**170.994.328,00**	**130.494.328,00**	**APBD**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)		51	40.500.000,00	170.994.328,00	130.494.328,00		
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Dengan Satuan : Unit Usaha)		42	0	0	0		
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)		62	40.500.000,00	170.994.328,00	130.494.328,00		
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Prosentase Pelaku UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%)** **Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%)**		**1,7** **20**	**72.014.000,00**	**42.014.000,00**	**-30.000.000,00**		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan , Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan : %)		7	72.014.000,00	42.014.000,00	-30.000.000,00		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan : Unit)		300	72.014.000,00	42.014.000,00	-30.000.000,00	APBD	
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:persen)** **Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha. (Dengan Satuan:%)**		**0,7 %** **8%**	**137.500.000,00**	**42.000.000,00**	**-95.500.000,00**	**APBD**	

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan (Dengan Satuan:%)		1	137.500.000,00	42.000.000,00	-95.500.000,00	APBD	
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)		20	137.500.000,00	42.000.000,00	-95.500.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**4.802.790.000,00**	**5.559.976.836,00**	**757.186.836,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**4.102.790.000,00**	**1.885.381.260,00**	**-2.217.408.740,00**		
1	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)**		**83,5**	**26.450.000,00**	**0,00**	**-26.450.000,00**	**APBD**	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)		100	26.450.000,00	0,00	-26.450.000,00	APBD	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan : Dokumen)		6	26.450.000,00	0,00	-26.450.000,00	APBD	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)		100	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0,00	0,00	0,00		
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Presentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan :%)**		**50**	**3.259.803.000,00**	**1.099.291.904,00**	**-2.160.511.096,00**	**APBD**	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesua dengan yang direncanakan (Dengan Satuan : %)		100	3.259.803.000,00	1.099.291.904,00	-2.160.511.096,00	APBD	

	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)		1	3.035.803.000,00	204.120.264,00	-2.831.682.736,00	APBD	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)		4	224.000.000,00	895.171.640,00	671.171.640,00		
3	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)**		**22,7**	**239.097.000,00**	**225.990.088,00**	**-13.106.912,00**	**APBD**	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	**Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dan penting minimal 12 kali dalam setahun (Dengan Satuan:%)**		100	239.097.000,00	225.990.088,00	-13.106.912,00	APBD	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Laporan)		1	99.200.000,00	139.615.088,00	40.415.088,00		
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)		1	139.897.000,00	86.375.000,00	-53.522.000,00		
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:%)		**39**	**350.000.000**	**227.000.000,00**	**-123.000.000,00**	**APBD**	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi dan misi dagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan(Dengan Satuan:%)		100	350.000.000	227.000.000,00	-123.000.000,00	APBD	
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)		10	350.000.000	227.000.000,00	-123.000.000,00		

5	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%)** **Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku(Dengan Satuan:%)**		**83** **5**	**227.440.000,00**	**333.099.268,00**	**105.659.268,00**		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera , Tera Ulang , dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:unit) Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku(DenganSatuan:orang)		1560 Unit 2250 Orang	227.440.000,00	333.099.268,00	105.659.268,00		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:Unit)		1560 Unit	180.040.000,00	298.005.264,00	117.965.264,00		
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)		2250 Orang	47.400.000,00	35.094.004,00	-12.305.996,00		
6	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern (Dengan Satuan:%)**		**11**	**0**	**0**	**0**	**APBD**	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:%)		100	0	0	0	APBD	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (Dengan Satuan:UMKM)		12	0	0	0	APBD	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**700.000.000,00**	**3.674.595.576,00**	**2.974.595.576,00**	**DAK/APBD**	
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)		**80**	**665.000.000,00**	**3.669.595.576,00**	**3.004.595.576,00**		

	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)		100	665.000.000,00	3.669.595.576,00	3.004.595.576,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000,00	0	-5.000.000,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000,00	101.465.400,00	96.465.400,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen)		1	405.000.000,00	176.630.176,00	-228.369.824,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan : Dokumen)		1	250.000.000,00	3.391.500.000,00	3.141.500.000,00		
2	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait**		**100**	**15.000.000,00**	**0**	**-15.000.000,00**	**APBD**	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) , Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) , Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)		100	15.000.000,00	0	-15.000.000,00	APBD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)		1	10.000.000,00	0	-10.000.000,00	APBD	

	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000,00	0	-5.000.000,00		
3	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas**		**75**	**20.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-15.000.000,00**	**APBD**	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%		100	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00		
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dengan Satuan:Dokumen)		1	10.000.000,00	0	-10.000.000,00		
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000,00	0	-5.000.000,00		
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000,00	5.000.000,00	0		
				JUMLAH	**13.354.151.924,00**	**12.766.144.796,00**	**-588.007.128,00**		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 di anggaran induk, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan melaksanakan 13 (tiga belas) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan dengan pagu Rp. **13.354.151.924,00**. Untuk anggaran perubahan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mengusulkan pagu setelah recofusing sebesar Rp. **12.766.144.796,00** yaitu untuk pelaksanaan 13 (tiga belas) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Setelah Perubahan RKPD					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(5)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pangkal Pinang**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**73** **70,5 Nilai Nilai**	**8.301.347.924,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pangkal Pinang**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**73** **70,5 Nilai Nilai**	**6.951.159.632,00**	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	1 Dokumen	0	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1 Laporan	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Sartuan : %)	100	6.699.847.924,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Sartuan : %)	100	6.088.363.680,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	48	6.699.847.924,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	48	6.088.363.680,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	0	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1 Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	4.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	4.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	1	4.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	1	4.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	10	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	10	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	267.775.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	207.422.500,00	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	9.445.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	9.445.600,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	70.892.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	68.040.300,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	37.436.600,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	37.436.600,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	92.500.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan : %)	100	20.800.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan : %)	100	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	3	20.800.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	3	0	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.189.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	550.165.060,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	138.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	138.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	31.500.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	24.750.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	1	1.020.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	1	387.415.060,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	119.425.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	101.208.392,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	39.565.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	56.576.696,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	49.860.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	44.631.696,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	1	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	1	0	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**Persentase koperasi yang dlindungi dan diberdayakan (Dengan Satuan:%)**	**80**	**40.500.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**Persentase koperasi yang dlindungi dan Diberdayakan (Dengan Satuan:%)**	**80**	**170.994.328,00**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	51	40.500.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	51	170.994.328,00	

	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Dengan Satuan : Unit Usaha)	42	0	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Dengan Satuan : Unit Usaha)	42	0	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)	62	40.500.000,00	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)	62	170.994.328,00	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Prosentase Pelaku UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%)** **Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%)**	**1,7** **20**	**72.014.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Prosentase Pelaku UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%)** **Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%)**	**1,7** **20**	**42.014.000,00**	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan , Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan : %)	7	72.014.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan , Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan : %)	7	42.014.000,00	

	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan : Unit)	300	72.014.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan : Unit)	300	42.014.000,00	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:persen)** **Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha. (Dengan Satuan:%)**	**0,7 %** **8%**	**137.500.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:persen)** **Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha. (Dengan Satuan:%)**	**0,7 %** **8%**	**42.000.000,00**	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan (Dengan Satuan:%)	1	137.500.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan (Dengan Satuan:%)	1	42.000.000,00	
	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	20	137.500.000,00	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	20	42.000.000,00	
5	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)**	**83,5**	**26.450.000,00**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan**	**83%**	**0,00**	

	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	26.450.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	100%	0,00	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan : Dokumen)	6	26.450.000,00	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan : Dokumen)	6	0,00	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	100		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	0,00	
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0,00	
6	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		**Presentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan :%)**	**50**	**3.259.803.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		**Presentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan :%)**	**50**	**1.099.291.904,00**	

	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesua dengan yang direncanakan (Dengan Satuan : %)	100	3.259.803.000,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesua dengan yang direncanakan (Dengan Satuan : %)	100	1.099.291.904,00	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	1	3.035.803.000,00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	1	204.120.264,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	4	224.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	4	895.171.640,00	
7	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)**	**22,7**	**239.097.000,00**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)**	**22,7**	**225.990.088,00**	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota		**Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dan penting minimal 12 kali dalam setahun (Dengan Satuan:%)**	100	239.097.000,00	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota**		**Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dan penting minimal 12 kali dalam setahun (Dengan Satuan:%)**	100	225.990.088,00	

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	99.200.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	139.615.088,00	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	139.897.000,00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	86.375.000,00	
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:%)	**39**	**350.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:%)	**39**	**227.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase promosi dan misi dagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan(Dengan Satuan:%)	100	350.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase promosi dan misi dagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan(Dengan Satuan:%)	100	227.000.000,00	
	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	10	350.000.000	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	10	350.000.000	

9	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%)** **Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku(Dengan Satuan:%)**	**83** **5**	**227.440.000,00**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%)** **Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku(Dengan Satuan:%)**	**83** **5**	**333.099.268,00**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera , Tera Ulang , dan Pengawasan		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:unit) Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku(DenganSatuan:orang)	1560 Unit 2250 Orang	227.440.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera , Tera Ulang , dan Pengawasan		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:unit) Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku(DenganSatuan:orang)	1560 Unit 2250 Orang	333.099.268,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:Unit)	1560 Unit	180.040.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:Unit)	1560 Unit	298.005.264,00	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	2250 Orang	47.400.000,00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	2250 Orang	35.094.004,00	

10	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern (Dengan Satuan:%)**	**11**	**0**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern (Dengan Satuan:%)**	**11**	**0**	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:%)	100	**0**	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:%)	100	**0**	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (Dengan Satuan:UMKM)	12	0	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (Dengan Satuan:UMKM)	12	0	
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)	80	**665.000.000,00**	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)	80	**3.669.595.576,00**	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	665.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	**3.669.595.576,00**	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	101.465.400,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen	1	405.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen	1	176.630.176,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan : Dokumen)	1	250.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan : Dokumen)	1	3.391.500.000,00	
12	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait**	100	**15.000.000,00**	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait**	100	**0**	

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) , Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) , Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	15.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) , Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) , Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	

	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	
13	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		**Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas**	75	**20.000.000,00**	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		**Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas**	75	**5.000.000,00**	

	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%	100	20.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%	100	5.000.000,00	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	10.000.000,00	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	
				TOTAL	**13.354.151.924,00**				**TOTAL**	**12.766.144.796,00**	

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan ini sebagai acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025

Pangkalpinang, 2 JUNI 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM dan PERDAGANGAN KOTA PANGKALPINANG,

ANDIKA SAPUTRA,SH.,MH
NIP 198302082009031005

RENJA PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

2025

KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang secara substansial menjadi penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Mendasari ketentuan Mendasari ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja ini sesungguhnya mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan langkah lanjutan untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, juga merupakan integrasi optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG,

SURANTO, S. Sos., M.M.
Pembina Tk. I/ IVb
NIP. 197701292005011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 19

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 19
3.2. Tujuan dan Sasaran 20
3.3. Program dan Kegiatan 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 25

BAB V PENUTUP 40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 9

Tabel 2.2 11

Tabel 2.3 15

Tabel 3.1 21

Tabel 3.2 22

Tabel 4.1 26

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2023-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2023-2026.

Adapun yang mendasari untuk melakukan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 27 Mei 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 No.277) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesungguhnya Rencana Kerja (Renja) merupakan cerminan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan stakeholders terhadap masyarakat. Rencana Kerja menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah untuk integrasi dan optimalisasi sumber daya manusia serta sumber dayalain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategislokal, nasional dan global. Rencana Kerja akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan yang akan menjadi alat pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah dan satuan terkait.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan dokumen yang secara substansial Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang. Rencana Kerja (Renja) disusun sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan menjadi masukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 akan menghasilkan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perubahan (RKA) Perubahan tahun 2025 sebagai salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan organisasi perangkat daerah dalam upaya untuk mengetahui capaian kinerja yang tercatum dalam perjanjian kinerja sebagai wujud dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 ini akan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun program dankegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tantang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 6402);
16. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Bekelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Mennegah daerah, Serta Tata Cara Peubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keja Pemerintah Daerah (Beritas Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penetapan Standar pelayanan Minimal (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiarn Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keunagan Daerah;
25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru;
26. Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
27. Peraturan gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencanan pembangunan daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Walikota Pangaklpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Pernagkat daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).
29. Peraturan Walikota Pangkalpinang No.9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144), Tanggal 15 Maret 2023.
30. Peraturan Walikota Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 27 Mei 2025 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 No.277)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud**

  Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dasn Informatika Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah sebagai pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta mewujudkan sinergitas atara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

- Tujuan
  1. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Pendapatan dan Belanja Persangkat Daerah;
  2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
  3. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang elbih professional;
  4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
  5. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, disusun dengan sistematika yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN;

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUNSEBELUMNYA

Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugasdan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta rencana program dan kegiatan 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja merupakan bagian dari evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan daerah, yang dilaksanakan dengan menetapkan target capaiaan kinerja yang akan dicapai sampai dengan tahun 2025. Target capaian kinerja ini merupakan target capaian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis. Realisasi capaian yang menjadi tolak ukur pada evaluasi ini, diawali dari tahun sebelumnya yang selanjutnya menjadi acuan untuk menentukan target kinerja tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan setiap tahun untuk memberikan dasar dalam menentukan target kenerja pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sangat penting karena dengan adanya evaluasi pada tahunsebelumnya dapat menjadi koreksi dan panduan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya sehingga penentuan target menjadi lebih terarah dandapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinnag Tahun 2025

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		021601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77	4,376,910,568		1,034,562,921		0		0		0	0.000	103456292 1.000	0	24	SEKRETARIS DINAS
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77.96		77.75								77.750		100		SEKRETARIS DINAS
2		021601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3,513,479,728	100	972,140,913		0		0		0	100	97214091 3	100	28	SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
3		021601202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	28	3,513,479,728	28	972,140,913							28	97214091 3	100	28	SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
8		021601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	184,231,400	0	0		0		0		0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9		021601206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2,995,300		0							0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11		021601206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	24,636,400		0							0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
12		021601206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2,999,700		0							0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13		021601206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	360	3,600,000		0							0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		021601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150,000,000		0							0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		021601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150,000,000		0							0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		021601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)	100	532,959,440	100	62,422,008		0		0		0	100	62422008	100	12	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI
17		021601208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	165,000,000		0							0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		021601208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	7,000,000		0							0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		021601208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	360,959,440		62,422,008							0	62422008	0	17	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		021601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	146,240,000	100	0		0		0		0	100	0	100	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21		021601209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	98,920,000		0							0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23		021601209010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	47,320,000		0							0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			49.865	23.637	
														PREDIKAT KINERJA					

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

24		2.1.6.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah. (Dengan Satuan:persen)	100	1,691,740,656	25	344,046,160		0		0		0	25	344,046,160	25	20	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PULIK
25		2.1.6.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) (Dengan Satuan:%)	100	1,691,740,656	60	344,046,160		0		0		0	60	344,046,160	60	20	SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA
26			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Dengan Satuan:permohonan)	10	300,980,088	1	47,395,848						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA
27			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:rekomendasi)	10	54,546,696		4,378,616						0	4378616	0	0	SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA
28			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/kuliah (Dengan	140	1,286,213,872	34	292,271,696						34	292271696	340	23	SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA
29			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	5	50,000,000								0	0	0	0	SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					25,000	20,337	
											PREDIKAT KINERJA							
30		021603	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	100	3,560,208,896	98	128,308,840		0		0		0	98	128,308,840	98	4	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
31		021603201	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	70	45,000,000	68	0		0		0		0	68	0	97	0	SEKSI LAYANAN E-GOVERNMENT
32		021603201002	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	45,000,000	0	0						0	0	0	0	0	SEKSI LAYANAN E-GOVERNMENT
34		021603202	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)	50	3,515,208,896	23	128,308,840		0		0		0	23	128,308,840	46	4	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
35			Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Dengan Satuan: laporan)	2	39,665,000	0	0						0	0	0	0	0	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Dari tabel di atas dapat dilihat pada triwulan 1, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpiang mulai melaksanakan kegiatan pada belanja pegawai, belanja rutin, serta pelaksanaan Perjalanan Dinas sedangkan pelaksanaan kegiatan lainnya belum dilaksankan karena adanya beberapa hal, yaitu :

1. Adanya tagging di beberapa kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, sehingga belum dapat dilaksanakan.
2. Adanya Pengunduran diri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sehingga menghambat kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.
3. Adanya beberapa masalah internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang yang dapat menghambat pencairan belanja Dinas Kounikasi dan Informatika Kota Pangkalpiang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan merupakan bentuk analisa pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika KotaPangkalpinang. Hal ini dilakukan dengan menentukan indikator kinerja umum sebagai ukuran pencapaian kinerja yang telah di tuangkan dalam rencana strategis.

Hasil pencapaian target kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. Pencapaian ini menjadi tolak ukur kemajuan yang telah dicapai. Dari capaian ini bisa menjadi dasar sebagai pertimbangan dalam menentukan target kinerja pada tahun-tahun mendatang. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daearah			Realisasi Capaian			Proyeksi	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		IndeksSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.6	2.8	3	2.2	2.87	3.81	2.8	3
	Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Persentase data dan informasi penyelenggaraan pemerintah yang dikomunikasikan/didesiminasikan dengan baik	Persen	100	100	100	100	NA	100	100	100
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan	Persentase layanan public yang diselenggarakan	Persen	100	100	100	NA	NA	100	100	100

	pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	secara online terintegrasi									
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan layanan dan data statistik sektoral.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	Persen	100	100	100	NA	NA	100	100	100

Sebagaimana Tabel di atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang belum dapat diukur pada triwulan 1, karena belum bisa melakukan penilaian. Penilaian pencapaian Kinerja tersebut mulsi dilakukan pada triwulan III dan IV.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan (Threats)

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Perubahan ekonomi pasca-pandemi berdampak pada perencanaan dan penganggaran;
- Stabilitas keamanan nasional, penguatan ketahanan dan keamanan siber, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;
- Tingkat literasi digital penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK, keterbukaan informasi publik, keamanan informasi elektronik dan non elektronik serta satu data Indonesia yang masih rendah;
- Koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system pemerintahan berbasis elektronik, serta system manajemen data statistk terintegrasi belum optimal.

b. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Regulasi /peraturan yang mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi public, pengelolaan informasi dan komunikasi, pola hubungan komunikasi sandi, satu data Indonesia;
- Tren Global dan Potensi Indonesia di Bidang Ekonomi Digital dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peran dan tantangan TIK dalam pertumbuhan ekonomi. Distribusi

sektor informasi dan komunikasi dalam PDB cenderung mengalami peningkatan yang konsisten, Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0.;

- Standarisasi dan Sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

c. **Kekuatan** (**Strengths**)

Kekuatan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Masterplan Smart City Daerah Kota Pangkalpinang kota cerdas, rencana strategis dan anggaran pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi informasi, persandian dan statistic, regulasi /kebijakan penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK;
- Kelembagaan dan aparatur sipil negara penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi informasi, persandian dan statistic;
- Adaptasi kebiasaan baru, berupa kesadaran dan kebutuhan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan public pasca-pandemi
- Penyelenggaran pelayanan public, beberapa diantaranya sudah menggunakan system elektronik.
- kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system pemerintahan berbasis elektronik, serta system manajemen data statistk terintegrasi belum optimal.

d. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kelemahan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

- Penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik keterbukaan informasi publik, pengelolaan informasi dan komunikasi, layanan keamanan informasi elektronik dan non elektronik, ketersedian data sesuai prinsip satu data Indonesia, berbagipakai data dan kemudahan akses data belum terintegrasi dan terfasilitasi dengan baik;
- Efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa dimensi yang belum optimal;
- Budaya kerja birokrasi dan Tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum baik;

- Manajemen kepegawaian dalam pengelolaan sumberdaya manusia aparatur yang menguasai keahlian dibidang digital belum optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang merupakan review terhadap program dan anggaran pada tahun 2025 yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Hal ini dilakukan dengan mempedomani Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan.

Review ini diiringi dengan penentuan target dari indikator program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari target yang ditentukan terdapat jumlah pagu indikatif. Pagu indikatif ini dapat dibandingkan dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh program dan kegiatan. Adapun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
RIVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD-P 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG

Kode	Rancangan Awal RKPD		Kebutuhan Dana		Hasil Analisa Kebutuhan		Kebutuhan Dana	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2,16,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**77,96** **77**	**4.376.910.568,00**	**5.406.808.766,72**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**77,96** **77**	**4.376.910.568,00**	**5.406.808.766,72**
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3.513.479.728,00**	**4.625.554.466,72**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3.513.479.728,00**	**4.625.554.466,72**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33	3.513.479.728,00	4.625.554.466,72	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33	3.513.479.728,00	4.625.554.466,72
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**184.231.400,00**	**113.813.400,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**184.231.400,00**	**113.813.400,00**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	2.995.300,00	1.497.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	2.995.300,00	1.497.300,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	24.636.400,00	18.666.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	24.636.400,00	18.666.400,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	2.999.700,00	2.999.700,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	2.999.700,00	2.999.700,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360	3.600.000,00	3.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360	3.600.000,00	3.600.000,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	150.000.000,00	87.050.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	150.000.000,00	87.050.000,00
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**532.959.440,00**	**521.200.900,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**532.959.440,00**	**521.200.900,00**
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	165.000.000,00	165.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	165.000.000,00	165.000.000,00
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	7.000.000,00	7.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	7.000.000,00	7.000.000,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	360.959.440,00	349.200.900,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	360.959.440,00	349.200.900,00
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**146.240.000,00**	**146.240.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**146.240.000,00**	**146.240.000,00**

2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	-	40.250.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	-	40.250.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	98.920.000,00	58.670.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	98.920.000,00	58.670.000,00
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	47.320.000,00	47.320.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	47.320.000,00	47.320.000,00
2,16,02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**100**	**1.691.740.656,00**	**2.116.794.116,00**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**100**	**1.691.740.656,00**	**2.116.794.116,00**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.691.740.656,00**	**2.116.794.116,00**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.691.740.656,00**	**2.116.794.116,00**
2.16.02.2.01.07	Pelayanan Informasi Publik	10	300.980.088,00	284.883.548,00	Pelayanan Informasi Publik	10	300.980.088,00	284.883.548,00
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan Opini, dan Aspirasi Publik	10	54.546.696,00	50.696.696,00	Monitoring Informasi Kebijakan Opini, dan Aspirasi Publik	10	54.546.696,00	50.696.696,00
2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	140	1.286.213.872,00	1.781.213.872,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	140	1.286.213.872,00	1.781.213.872,00
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	50.000.000,00	-	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	50.000.000,00	-
2,16,03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**100**	**3.560.208.896,00**	**3.454.730.500,00**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**100**	**3.560.208.896,00**	**3.454.730.500,00**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**70**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**70**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1	45.000.000,00	45.000.000,00	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1	45.000.000,00	45.000.000,00
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**50**	**3.515.208.896,00**	**3.409.730.500,00**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**50**	**3.515.208.896,00**	**3.409.730.500,00**
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2	39.665.000,00	34.665.000,00	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2	39.665.000,00	34.665.000,00
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1	528.251.856,00	438.720.000,00	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1	528.251.856,00	438.720.000,00
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	1	-	-	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	1	-	-

2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	67	2.947.292.040,00	2.936.345.500,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	67	2.947.292.040,00	2.936.345.500,00
2,20,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**60**	**129.148.392,00**	**91.528.392,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**60**	**129.148.392,00**	**91.528.392,00**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**129.148.392,00**	**91.528.392,00**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**129.148.392,00**	**91.528.392,00**
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	100	115.828.392,00	84.328.392,00	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	100	115.828.392,00	84.328.392,00
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	3	13.320.000,00	7.200.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	3	13.320.000,00	7.200.000,00
2,21,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**100**	**105.126.696,00**	**82.326.696,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**100**	**105.126.696,00**	**82.326.696,00**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**34.605.000,00**	**34.605.000,00**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**34.605.000,00**	**34.605.000,00**
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	14.605.000,00	14.605.000,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	14.605.000,00	14.605.000,00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	20.000.000,00	20.000.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	20.000.000,00	20.000.000,00
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**21**	**70.521.696,00**	**47.721.696,00**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**21**	**70.521.696,00**	**47.721.696,00**
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7	70.521.696,00	47.721.696,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7	70.521.696,00	47.721.696,00
TOTAL			**9.863.135.208,00**	**11.152.188.470,72**			**9.863.135.208,00**	**11.152.188.470,72**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan usulan program dan kegiatan dilaksanakan dengan menentukan program, kegiatan, indikator program dan pagu indikatif dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan tahun 2025. Pagu indikatif usulan program 2025 ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan alokasi dana yang dibutuhkan pada tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencn Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan prioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastutur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementrian Komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Tantangan dan potensi program Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan peerintah indonesia tahun 2019-2024 antara lain sebagai berikut :

1. Masih tingginya kesenjangan digital wilayah indonesia
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah indonesia dengan jaringan infrastuktur pitalebar (Palapa Ring)
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan
5. Interolensasi dan krisis kepribadian bangsa

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah indonesia, antara lain:

1) Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2) Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3) Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4) Kebutuhan radio keselematan untuk nelayan.

Tujuan Kementrian Komunikasi dan Informatika meliputi focus pembangunan bidang komunikasi dan informatika yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastuktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementrian Komunikasi dan Infromatika anatara lain :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman ;
3. Menigkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2019-2024 disusun dengan 4 (empat) fokus utama, yaitu :

1. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastuktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
3. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik

3.2. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan startegi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapaianya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					Tahun 2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Permenpan No.5 Tahun 2018	Indeks	NA	2,6	2,8	3
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Persentase Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dikomunikasikan/didesiminasikan dengan baik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo terkait penyampaian data dan informasi penyelenggaraan tahun berkenaan/jumlah kegiatan terkait penyampaian data dan informasi yang direncanakan dalam renja tahun berkenaan x 100%	Persen	NA	100	100	100
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online trintegrasi	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan system IT dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan public/jumlah perangkat daerah x 100%	Persen	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan layanan dan data statistic sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi	Jumlah Perangkat daerah yang telah mengumpulkan, mengupdate dan memanfaatkan website data statistic daerah terpadu (hhtps: data.pangkalpinang.go.id)dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi dibagi jumlah perangkat perangkat daerah dikali 100%.	Persen	100	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan bentuk perwujudan dari strategi dan kebijakan yang telah ditentukan. Rencana Kerja 2025 mengarahkan program dan kegiatan dalam bentuk sebagai berikut :

- Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju terlampir dalam Tabel 3.2.

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

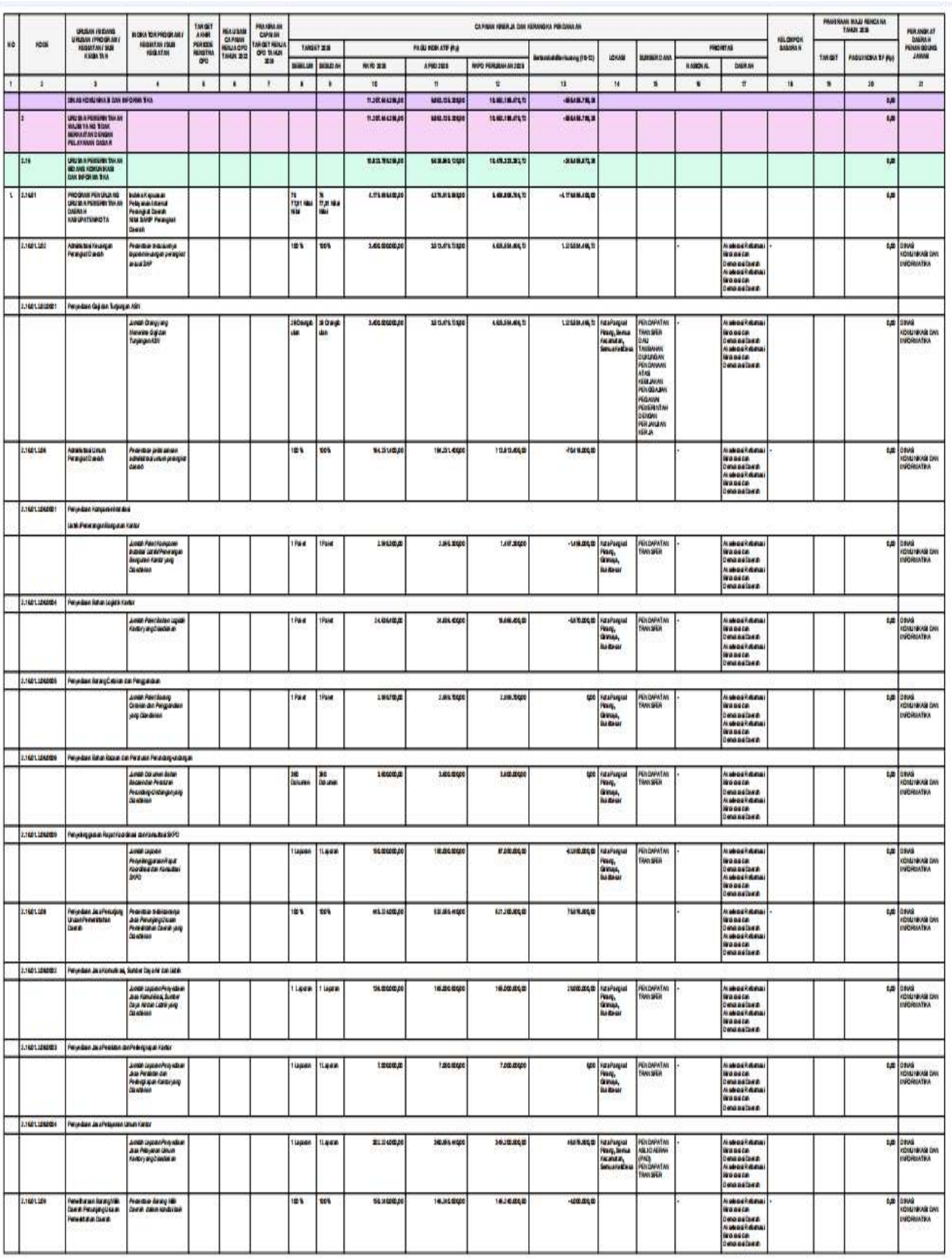

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

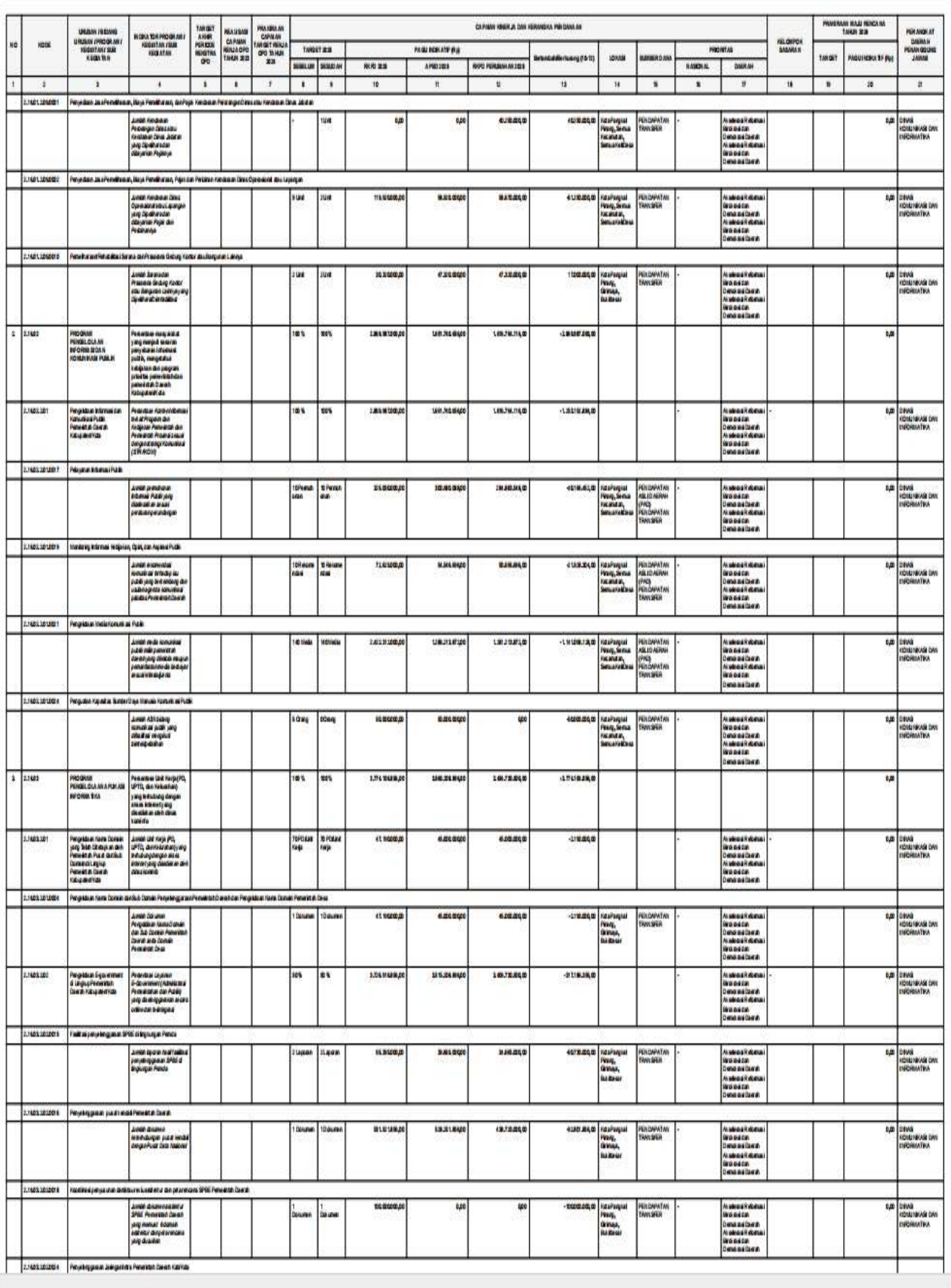

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

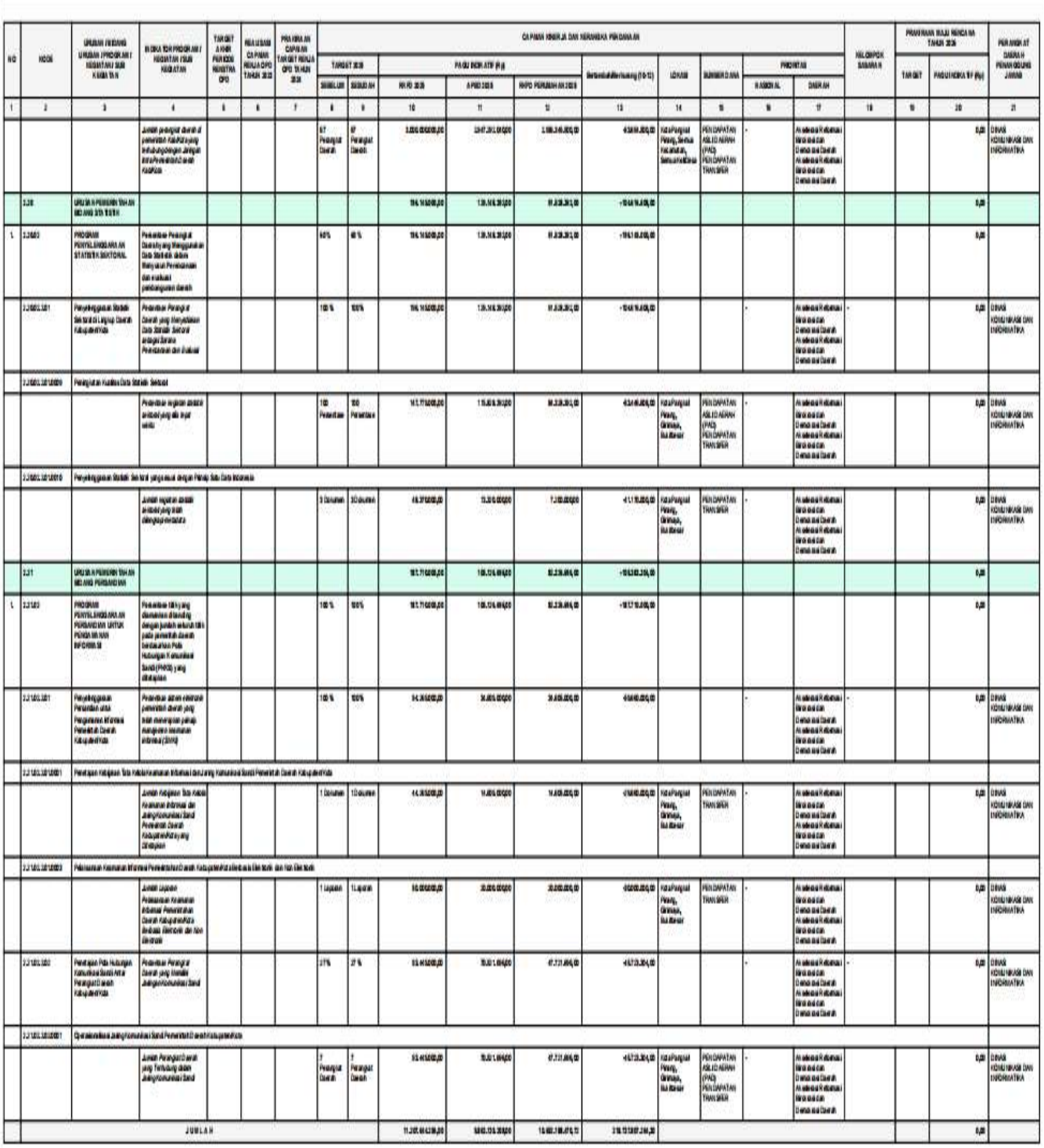

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah merupakan bentuk perencanaan untuk mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang pada belanja yang dianggarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun 2025. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disusun dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 terlampir dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Hasil Progres		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (2026)	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			SKPD	Jenis Kegiatan
													1/2/3	a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13,00	(14)	(15)
2,16,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Pangkalpinang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:NILAI)	77,96			Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:NILAI)	77,96	5.406.808.766,72	4.690.816.028,00		
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	77			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	77				
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100			Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4.625.554.466,72	3.938.115.799,00		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Pangkalpinang			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	33	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	33	4.625.554.466,72	3.938.115.799,00		

2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Pangkalpinang**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)**	**100**			**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)**	**100**	**113.813.400,00**	**243.279.480,00**	**-**	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1.497.300,00	5.303.000,00		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	18.666.400,00	43.000.580,00		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Pangkalpinang			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2.999.700,00	16.375.900,00		

2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pangkalpinang			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	360	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	360	3.600.000,00	3.600.000,00		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	87.050.000,00	175.000.000,00		
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Pangkalpinang**	**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)**	**100**			**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**521.200.900,00**	**373.513.624,00**	**-**	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan	1	165.000.000,00	192.180.000,00		

							Satuan:Laporan)		Satuan:Laporan)				
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	7.000.000,00	9.944.500,00		
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	349.200.900,00	171.389.124,00		
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Pangkalpinang**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)**	**100**			**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)**	**100**	**146.240.000,00**	**135.907.125,00**	**-**	

2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Pangkalpinang		1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	40.250.000,00	61.682.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	58.670.000,00	59.947.000,00		
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pangkalpinang		1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	47.320.000,00	14.278.125,00		

							Satuan:Unit)						
2,16,02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Pangkalpinang	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	2.116.794.116,00	3.759.465.960,00		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) (Dengan Satuan:%)	100			Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM)	100	2.116.794.116,00	3.759.465.960,00		

									(Dengan Satuan:%)					
2.16.02.2.01.07	Pelayanan Informasi Publik			Pangkalpinang		10	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Satuan: Permohonan)	10	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Satuan: Permohonan)	10	284.883.548,00	424.325.288,00		
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan Opini, dan Aspirasi Publik			Pangkalpinang		10	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Satuan: Rekomendasi)	10	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Satuan: Rekomendasi)	10	50.696.696,00	119.990.192,00		

2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Pangkalpinang		140	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Satuan: Media)	140	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Satuan: Media)	140	1.781.213.872,00	3.090.150.480,00		
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Pangkalpinang		0	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Satuan: Orang)	0	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Satuan: Orang)	0	-	125.000.000,00		
2,16,03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**			**Pangkalpinang**	**Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)**	**100**			**Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)**	**100**	**3.454.730.500,00**	**4.469.897.751,00**		

2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**Pangkalpinang**	**Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)**	**70**			**Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)**	**70**	**45.000.000,00**	**287.322.892,00**		
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			Pangkalpinang		1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Satuan: Dokumen)	1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Satuan: Dokumen)	1	45.000.000,00	287.322.892,00		
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**Pangkalpinang**	**Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)**	**50**			**Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)**	**50**	**3.409.730.500,00**	**4.182.574.859,00**		

2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda					**2**	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Satuan: Laporan)	2	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Satuan: Laporan)	2	34.665.000,00	979.388.171,00		
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					**1**	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Satuan: Dokumen)	1	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Satuan: Dokumen)	1	438.720.000,00	653.686.888,00		
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah					**1**	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Satuan: Dokumen)	1	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Satuan: Dokumen)	1	-	49.499.800,00		
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					**67**	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan	67	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	67	2.936.345.500,00	2.500.000.000,00		

							Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Satuan: Perangkat Daerah)		Daerah Kab/Kota (Satuan: Perangkat Daerah)				
2,20,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**Pangkalpinang**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)**	**60**			**Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)**	**60**	**91.528.392,00**	**130.289.692,00**	**#REF!**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**Pangkalpinang**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral sebagai Sarana Perencanaan dan Evaluasi (Dengan Satuan:%)**	**100**			**Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral sebagai Sarana Perencanaan dan Evaluasi (Dengan Satuan:%)**	**100**	**91.528.392,00**	**130.289.692,00**	**#REF!**	
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			Pangkalpinang		**100**	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Satuan: Persen)	100	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Satuan: Persen)	100	84.328.392,00	115.289.942,00		

2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			Pangkalpinang		**3**	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Satuan: Dokumen)	3	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Satuan: Dokumen)	3	7.200.000,00	14.999.750,00		
2,21,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**Pangkalpinang**	**Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemeritah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)**	**100**			**Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemeritah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**82.326.696,00**	**238.749.435,00**		
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**Pangkalpinang**	**Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:%)**	**100**			**Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:%)**	**100**	**34.605.000,00**	**161.353.035,00**		

2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	14.605.000,00	25.355.000,00		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1	20.000.000,00	135.998.035,00		
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Pangkalpinang**	**Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:%)**	**21**			**Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:%)**	**21**	**47.721.696,00**	**77.396.400,00**		

2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	7	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	7	47.721.696,00	77.396.400,00		
TOTAL											**11.152.188.470,72**	**13.289.218.866,00**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 masih mengacu kepada rencana Strategis 2024-2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan *Good Governance* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang khususnya dan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada umumnya. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pangkalpinang, Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG

SURANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I/IVb
NIP 197701292005011003

RENCANA KERJA

PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKAL PINANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(P-RENJA)
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN

KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai dinamika yang terjadi, baik dari aspek internal maupun eksternal, yang memerlukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan Kota Pangkalpinang, khususnya di bidang kesehatan. Dokumen ini disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi Renja Perubahan ini sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama dari semua pihak, baik dari jajaran pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, dan masukan dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat. Kami juga berharap dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 28 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

dr. Tri Wahyuni Masrohani
Pembina Tk.I/ IVb
NIP. 197606152010012010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan prioritas dalam rangka menjawab dinamika kebutuhan dan tantangan pembangunan kesehatan. Penyesuaian ini bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan target pembangunan kesehatan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

2. Tujuan

a) Menyesuaikan Perencanaan dengan Perubahan Kebijakan dan Kondisi Aktual

Renja Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan, program, dan kegiatan dengan perubahan regulasi, dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkembang sepanjang tahun 2025.

b) Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran dan Sumber Daya

Untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dan sumber daya yang tersedia dialokasikan secara tepat sasaran guna mendukung program kesehatan yang menjadi prioritas daerah.

c) Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Melalui Renja Perubahan ini, Dinas Kesehatan menargetkan peningkatan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas maupun fasilitas rujukan.

d) Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama Bidang Kesehatan

Renja Perubahan disusun untuk mendorong pencapaian indikator kinerja utama, meningkatkan capaian SPM, menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian bayi, menurunnya prevalensi gizi buruk.

e) Mendorong Inovasi dan Kolaborasi Antar Sektor

Untuk memfasilitasi implementasi inovasi layanan kesehatan yang adaptif terhadap perubahan serta mendorong sinergi dengan sektor lain dalam pembangunan kesehatan yang komprehensif.

f) Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Program Kesehatan
Dengan adanya Renja Perubahan, pelaksanaan program kesehatan dilakukan secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, Renja Perubahan ini menjadi dokumen strategis untuk mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kota Pangkal Pinang.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dinas kesehatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Penyusunan dokumen ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renja Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan target, sasaran, dan program strategis dengan perkembangan terbaru, termasuk perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan mendesak masyarakat yang memengaruhi pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program kesehatan yang berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan: Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
2. Adaptasi Terhadap Inovasi Kesehatan: Perubahan pola penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, yang memerlukan penyesuaian layanan berbasis teknologi dan inovasi.
3. Optimalisasi Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan.
4. Penguatan Pelayanan Primer: Perlunya penguatan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, terutama dalam meningkatkan kunjungan pasien dan cakupan layanan preventif dan promotif.

Dengan Renja Perubahan ini, Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus meningkatkan peran strategisnya dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Seluruh program yang direncanakan akan dilaksanakan secara terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada hasil demi terwujudnya visi dari Kota Pangkal Pinang.

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Peubahan OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.
12. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224 Tanggal 2 Juli 2024);
13. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kota Pangkal Pinang;
14. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023).
15. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023).
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 27 Mei 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 No. 277)

1.3 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN;

1.1 Maksud dan Tujuan
1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I;

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang untuk Triwulan I Tahun 2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan rekomendasi perbaikan guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Triwulan I
Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**329355**	**239.366.863.527**	**46.288.763.725**	**19,34**		**UNIT, LAPORAN, DOKUMEN, ORANG, KELUARGA & PAKET**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**295287**	**36.721.478.604**	**3.569.941.894**	**9,72**		**UNIT, LAPORAN, DOKUMEN, ORANG, KELUARGA & PAKET**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**142**	**15.616.018.000**	**5.400.000**	**0,03**		**UNIT, LAPORAN, DOKUMEN, ORANG, KELUARGA & PAKET**	
		Pembangunan Puskesmas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6	5.400.000.000	-	-	-	UNIT	PSDK
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	640.000.000	-	-	-	UNIT	PSDK
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	4.002.000.000	-	-	-	UNIT	PSDK
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	120	200.000.000	-	-	-	UNIT	PSDK
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	5.306.993.000	-	-	-	PAKET	PSDK
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	10.000.000	-	-	-	KELURGA	PSDK

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	12	57.025.000	5.400.000	9,47	1	PAKET	PSDK
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**295060**	**20.825.960.604**	**3.559.331.894**	**17,09**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3750	320.350.000		-	-	ORANG	KESMAS
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus FisikDana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3561	10.000.000		-	-	ORANG	KESMAS
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3413	19.950.000		-	-	ORANG	KESMAS
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	15856	15.900.000		-	-	ORANG	KESMAS
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	39016	104.500.000		-	-	ORANG	KESMAS
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	150217	104.440.000		-	-	ORANG	P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	16028	50.300.000		-	-	ORANG	P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	43957	14.250.000		-	-	ORANG	P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5643	36.000.000		-	-	ORANG	P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	429	68.400.000		-	-	ORANG	P2P

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3788	39.075.000		-	-	ORANG	P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6800	24.750.000	4.500.000	18,18	1236	ORANG	P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4	152.500.000		-	-	DOKUMEN	KESMAS
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	32.900.000		-	-	DOKUMEN	KESMAS
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	192.087.900		-	-	DOKUMEN	KESMAS
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus FisikDana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3	283.998.000		-	-	DOKUMEN	KESMAS
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	3.000.000		-	-	DOKUMEN	KESMAS
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2	16.500.000	1.350.000	8,18	1	DOKUMEN	KESMAS
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5	44.025.000		-	-	DOKUMEN	P2P
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	16	203.080.000	3.000.000	1,48	1	DOKUMEN	P2P
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	16.075.815.088	3.030.417.448	18,85	1	DOKUMEN	PJK
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	400	6.000.000		-	-	ORANG	P2P

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	27.146.500		-	-	DOKUMEN	KESMAS
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	175	920.861.116	62.247.532	6,76	12	DOKUMEN	LABKESDA
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	50.037.000		-	0	UNIT	PSDK
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2	2.725.000		-	0	LAPORAN	P2P
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	1.494.500.000	252.116.914	16,87	1	UNIT	PSDK
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	779	10.200.000	2.550.000	25,00	195	ORANG	P2P
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	677	204.950.000	201.650.000	98,39	666	ORANG	P2P
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus FisikDana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	532	6.000.000	1.500.000	25,00	133	ORANG	P2P
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1	291.720.000		-	-	DOKUMEN	KESMAS
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		**1**	**3.200.000**	**1.760.000**	**55,00**			
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	3.200.000	1.760.000	55,00	1	DOKUMEN	PEP
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**84**	**276.300.000**	**3.450.000**	**1,25**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	204.000.000		-	-	UNIT	PSDK

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	3.000.000		-	-	UNIT	PSDK
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	9	66.300.000	3.450.000	5,20	1	UNIT	PSDK
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	3.000.000		-	-	DOKUMEN	PSDK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			**24**	**403.848.000**	**-**	**-**			
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		**24**	**163.150.000**	**-**	**-**			
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	23	139.750.000	-	-	-	ORANG	PSDK
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	23.400.000	-	-	-	DOKUMEN	PSDK
		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kab/kota			**240.698.000**	**-**	**-**			
		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kab/kota		60	240.698.000	-	-		ORANG	PSDK
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			**182**	**385.919.000**	**-**	**-**			
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		**60**	**75.340.000**	**-**	**-**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	60	75.340.000		-	-	DOKUMEN	PSDK
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		**120**	**303.579.000**	**-**	**-**			

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	120	303.579.000		-	-	DOKUMEN	PSDK
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		**1**	**4.000.000**	**-**	**-**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	4.000.000		-	-	DOKUMEN	KESMAS
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		**1**	**3.000.000**	**-**	**-**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	3.000.000	-	-	-	DOKUMEN	KESMAS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**8**	**113.513.000**	**-**	**-**			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1**	**10.000.000**	**-**	**-**			
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	10.000.000		-	-	DOKUMEN	KESMAS
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**3**	**36.240.000**	**-**	**-**			
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3	36.240.000		-	-	DOKUMEN	KESMAS
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**4**	**67.273.000**	**-**	**-**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4	67.273.000		-	-	DOKUMEN	KESMAS

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**33**	**105.082.152.154**	**30.809.103.114**	**29,32**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**2**	**34.130.000**	**-**	**-**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	2.580.000		-	-	DOKUMEN	PEP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	31.550.000		-	-	LAPORAN	PEP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**4**	**100.646.827.154**	**30.163.057.471**	**29,97**	**-**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	100.635.327.154	30.160.057.621	29,97	1	ORANG / BULAN	KEUANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	5.250.000	2.999.850	57,14	1	LAPORAN	KEUANGAN
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	1.000.000		-	-	DOKUMEN	KEUANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	5.250.000		-	-	LAPORAN	KEUANGAN
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		**1**	**21.000.000**	**-**	**-**			
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	21.000.000		-	-	DOKUMEN	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**16**	**71.450.000**	**-**	**-**	**-**		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	21.450.000		-	-	DOKUMEN	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15	50.000.000		-	-	ORANG	PSDK
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**5**	**525.429.000**	**36.132.588**	**6,88**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	18.741.500		-	-	PAKET	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	25.167.500	450.000	1,79	1	PAKET	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	160.000.000		-	-	PAKET	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	121.520.000	7.160.000	5,89	1	PAKET	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	200.000.000	28.522.588	14,26	1	LAPORAN	UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**3**	**3.631.321.500**	**598.796.748**	**16,49**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	550.000.000	105.719.900	19,22	1	LAPORAN	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	115.010.000	4.200.000	3,65	1	LAPORAN	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	2.966.311.500	488.876.848	16,48	1	LAPORAN	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**2**	**151.994.500**	**11.116.307**	**7,31**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	30.000.000	2.922.607	9,74	1	UNIT	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	121.994.500	8.193.700	6,72	1	UNIT	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (GERUNGGANG)			**2791**	**1.367.204.264**	**221.781.377**	**16,22**			**GERUNGGANG**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**2791**	**1.367.204.264**	**221.781.377**	**16,22**			
		Ibu hamil	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1080	30.600.000	4.950.000	16,18	217	ORANG	
		Usia Pendidikan Dasar	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	73.500.000	22.000.000	29,93	1	ORANG	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		25	7.200.000	1.800.000	25,00	7	ORANG	
		Orang Terduga Tuberkolosis	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1585	31.000.000	8.800.000	28,39	286	ORANG	
		Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	8	322.474.000	14.200.000	4,40	1	DOKUMEN	
		Kesjaor		5	10.550.000	3.300.000	31,28	1	DOKUMEN	
		Kesling	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	13	33.250.000	5.500.000	16,54	1	DOKUMEN	
		Surveylans Kesehatan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	5	44.996.000	16.728.000	37,18	1	DOKUMEN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ODMK		25	9.600.000	2.400.000	25,00	6	ORANG	
		PM & PTM	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	14	68.500.000	29.800.000	43,50	5	DOKUMEN	

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24	647.434.264	89.353.377	13,80	2	DOKUMEN	
		Kesehatan Reproduksi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	9.600.000	2.400.000	25,00	0	DOKUMEN	
		Ibu dan Anak	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	1.500.000		-	0	DOKUMEN	
		Lansia		1015	49.200.000	16.800.000	34,15	664	DOKUMEN	
		Imunisasi		7515	27.800.000	3.750.000	13,49	407	DOKUMEN	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (GERUNGGANG)			**1**	**10.300.000**	**1.600.000**	**15,53**			**GERUNGGANG**
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1**	**10.300.000**	**1.600.000**	**15,53**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	10.300.000	1.600.000	15,53	0	DOKUMEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GERUNGGANG)				**967.000.000**	**-**	**-**			**GERUNGGANG**
		BLUD			**967.000.000**	**-**	**-**			
		BLUD		1	967.000.000	-	-	-	UNIT/KERJA	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (SELINDUNG)			**9902**	**1.141.916.496**	**122.117.010**	**10,69**			**SELINDUNG**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**9902**	**1.141.916.496**	**122.117.010**	**10,69**			
		Ibu hamil	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	720	46.800.000	11.700.000	25,00	60	ORANG	
		Usia Pendidikan Dasar	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	56.000.000	4.800.000	8,57	1	ORANG	
		ODGJ		48	4.800.000	-	-	0	ORANG	
		Orang Terduga Tuberkolosis	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	44	5.000.000	1.200.000	24,00	1	ORANG	
		Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	7	225.900.000	9.600.000	4,25	2	DOKUMEN	
		Kesjaor		3	48.900.000	450.000	0,92	1	DOKUMEN	
		Kesling	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	1.600.000	700.000	43,75	1	DOKUMEN	
		Surveylans Kesehatan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	44.856.000	16.620.700	37,05	2	DOKUMEN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ODMK		6250	8.500.000		-	0	ORANG	
		PM & PTM	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	10	42.902.000	5.400.000	12,59	3	DOKUMEN	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8	622.958.496	63.096.310	10,13	4	DOKUMEN	

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ibu dan Anak	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	4.150.000	-	-	0	DOKUMEN	
		Lansia	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	7.200.000	1.800.000	25,00	1	DOKUMEN	
		Imunisasi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2800	22.350.000	6.750.000	30,20	1	DOKUMEN	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (SELINDUNG)			**2**	**7.200.000**	**-**	**-**			**SELINDUNG**
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**2**	**7.200.000**	**-**	**-**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	7.200.000		-	-	DOKUMEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (SELINDUNG)				**634.000.009**	**-**	**-**			**SELINDUNG**
		BLUD			**634.000.009**	**-**	**-**			
		BLUD		1	634.000.009		-	-	UNIT/KERJA	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PASIR PUTIH)			**2316**	**881.997.496**	**103.476.720**	**11,73**			**PASIR PUTIH**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**2316**	**881.997.496**	**103.476.720**	**11,73**			
		Ibu hamil	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	248	26.100.000	4.350.000	16,67	27	ORANG	
		Usia Pendidikan Dasar	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	18.850.000	1.950.000	10,34	1	ORANG	
		ODGJ	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	28	1.000.000	600.000	60,00	9	ORANG	
		Orang Terduga Tuberkolosis	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	301	4.800.000	900.000	18,75	169	ORANG	
		Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	7	217.460.000	4.300.000	1,98	3	DOKUMEN	
		Kesjaor	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	2.400.000	-	-	0	DOKUMEN	
		Kesling	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	3	10.100.000	1.000.000	9,90	1	DOKUMEN	
		Surveylans Kesehatan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	6	34.304.000	2.200.000	6,41	3	DOKUMEN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan (ODMK)		40	3.600.000	600.000	16,67	30	ORANG	
		PM & PTM	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	11	26.137.000	8.700.000	33,29	3	DOKUMEN	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	67	484.446.496	71.826.720	14,83	10	DOKUMEN	
		Kesehatan Reproduksi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	3	25.900.000	4.250.000	16,41		DOKUMEN	
		Ibu dan Anak	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	800.000	-	-	0	DOKUMEN	

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Lansia	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1147	12.300.000	1.800.000	14,63		DOKUMEN	
		Imunisasi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	449	13.800.000	1.000.000	7,25		DOKUMEN	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (PASIR PUTIH)			**1**	**5.740.000**	**684.250**	**11,92**			**PASIR PUTIH**
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1**	**5.740.000**	**684.250**	**11,92**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	5.740.000	684.250	11,92	-	DOKUMEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PASIR PUTIH)				**560.000.000**	**-**	**-**			**PASIR PUTIH**
		BLUD			**560.000.000**	**-**	**-**			
		BLUD		1	560.000.000		-	-	UNIT/KERJA	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (AIR ITAM)			**4138**	**1.343.980.064**	**172.330.760**	**12,82**			**AIR ITAM**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**4138**	**1.343.980.064**	**172.330.760**	**12,82**			
		Ibu hamil	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	514	41.760.000	6.000.000	14,37	129	ORANG	
		Usia Pendidikan Dasar	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	47.200.000	15.800.000	33,47	2	ORANG	
		ODGJ	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	45	2.400.000	-	-	20	ORANG	
		Orang Terduga Tuberkolosis	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	100	10.600.000	1.400.000	13,21	101	ORANG	
		Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	7	197.600.000	900.000	0,46	2	DOKUMEN	
		Kesjaor	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	2.250.000	-	-	0	DOKUMEN	
		Kesling	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	10.800.000	1.600.000	14,81	2	DOKUMEN	
		Surveylans Kesehatan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	6	37.232.000	4.364.500	11,72	3	DOKUMEN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan (ODMK)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	230	3.000.000	500.000	16,67	20	ORANG	
		PM & PTM	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11	65.891.000	8.100.000	12,29	4	DOKUMEN	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	26	863.577.064	124.086.260	14,37	10	DOKUMEN	
		Kesehatan Reproduksi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	3	20.280.000	3.780.000	18,64	2	DOKUMEN	
		Ibu dan Anak	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	1.190.000	100.000	8,40	0	DOKUMEN	
		Lansia		1185	21.400.000	3.500.000	16,36	486	DOKUMEN	

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Imunisasi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2000	18.800.000	2.200.000	11,70	450	DOKUMEN	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (AIR ITAM)			**1**	**3.865.000**	**-**	**-**			**AIR ITAM**
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1**	**3.865.000**	**-**	**-**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	3.865.000		-	-	DOKUMEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (AIR ITAM)				**800.000.000**	**-**	**-**			**AIR ITAM**
		BLUD			**800.000.000**	**-**	**-**			
		BLUD		1	800.000.000		-	-	UNIT/KERJA	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (GIRIMAYA)			**1293**	**1.181.137.136**	**175.072.856**	**14,82**			**GIRIMAYA**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1293**	**1.181.137.136**	**175.072.856**	**14,82**			
		Ibu hamil	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	295	30.000.000	6.500.000	21,67	73	ORANG	
		Usia Pendidikan Dasar	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	32.000.000	-	-	0	ORANG	
		ODGJ	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	32	4.500.000	-	-	8	ORANG	
		Orang Terduga Tuberkolosis	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	365	22.150.000	5.000.000	22,57	136	ORANG	
		Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	5	216.900.000	10.850.000	5,00	5	DOKUMEN	
		Kesjaor	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	3	2.000.000	200.000	10,00	1	DOKUMEN	
		Kesling	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	9	31.100.000	4.800.000	15,43	2	DOKUMEN	
		Surveylans Kesehatan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	23.000.000	2.650.000	11,52	1	DOKUMEN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan (ODMK)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	32	4.900.000	-	-	0	ORANG	
		PM & PTM	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	36	52.880.000	18.380.000	34,76	9	DOKUMEN	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	718.944.136	119.742.856	16,66	1	DOKUMEN	
		Kesehatan Reproduksi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	14.900.000	2.900.000	19,46	1	DOKUMEN	
		Ibu dan Anak	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	1.375.000	-		0	DOKUMEN	
		Lansia		231	6.000.000	1.500.000		2	DOKUMEN	
		Imunisasi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	275	20.488.000	2.550.000	12,45	4	DOKUMEN	

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (GIRIMAYA)			**1**	**4.900.000**	**4.900.000**	**100,00**			**GIRIMAYA**
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1**	**4.900.000**	**4.900.000**	**100,00**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	4.900.000	4.900.000	100,00	1	DOKUMEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GIRIMAYA)				**636.000.000**	**-**	**-**			**GIRIMAYA**
		BLUD			**636.000.000**	**-**	**-**			
		BLUD		1	636.000.000		-	-	UNIT/KERJA	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (TAMAN SARI)			**777**	**884.766.996**	**122.160.860**	**13,81**			**TAMAN SARI**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**777**	**884.766.996**	**122.160.860**	**13,81**			
		Ibu hamil	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	153	18.000.000	4.950.000	27,50	32	ORANG	
		Usia Pendidikan Dasar	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	20.751.500	1.100.000	5,30	2	ORANG	
		ODGJ	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	22	2.400.000	1.200.000	50,00	12	ORANG	
		Orang Terduga Tuberkolosis	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	204	17.475.000	4.100.000	23,46	84	ORANG	
		Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	197.200.000	13.200.000	6,69	1	DOKUMEN	
		Kesjaor	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	3	1.100.000	-	-	0	DOKUMEN	
		Kesling	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	9	23.500.000	2.750.000	11,70	5	DOKUMEN	
		Surveylans Kesehatan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	35.962.000	6.845.200	19,03	8	DOKUMEN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan (ODMK)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	22	6.800.000	1.800.000	26,47	12	ORANG	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1	532.188.496	81.635.660	15,34	1	DOKUMEN	
		Kesehatan Reproduksi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	15.350.000	1.380.000	8,99	2	DOKUMEN	
		Ibu dan Anak	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	300.000	200.000	66,67	2	DOKUMEN	
		Lansia	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	200	3.600.000	900.000	25,00	35	DOKUMEN	
		Imunisasi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	150	10.140.000	2.100.000	20,71	1	DOKUMEN	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (TAMAN SARI)			**1**	**2.430.000**	**-**	**-**			**TAMAN SARI**

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1**	**2.430.000**	**-**	**-**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	2.430.000		-	-	DOKUMEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (TAMAN SARI)				**530.000.000**	**-**	**-**			**TAMAN SARI**
		BLUD			**530.000.000**	**-**	**-**			
		BLUD		1	530.000.000		-	-	UNIT KERJA	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PANGKALBALAM)			**8029**	**1.101.504.388**	**134.791.142**	**12,24**			**PANGKALBALAM**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**8029**	**1.101.504.388**	**134.791.142**	**12,24**			
		Ibu hamil	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	419	30.000.000	7.500.000	25,00	86	ORANG	
		Usia Pendidikan Dasar	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	20.100.000	2.100.000	10,45	1	ORANG	
		ODGJ	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	48	4.800.000	800.000	16,67	8	ORANG	
		Orang Terduga Tuberkolosis	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	430	15.000.000	2.500.000	16,67	148	ORANG	
		Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	10	238.750.000	10.700.000	4,48	1	DOKUMEN	
		Kesjaor	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	3	2.600.000	-	-	0	DOKUMEN	
		Kesling	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	8	18.800.000	3.600.000	19,15	2	DOKUMEN	
		Surveylans Kesehatan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	8	29.916.000	11.044.800	36,92	3	DOKUMEN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan (ODMK)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)		6.200.000	1.500.000	24,19	954	DOKUMEN	
		PM & PTM	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3823	30.594.000	3.950.000	12,91	3	ORANG	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	7	665.191.888	86.446.342	13,00	1	DOKUMEN	
		Kesehatan Reproduksi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2	9.900.000	400.000	4,04	0	DOKUMEN	
		Ibu dan Anak	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	552.500	-	-	0	DOKUMEN	
		Lansia	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	2503	6.000.000	1.500.000	25,00	1275	DOKUMEN	
		Imunisasi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	763	23.100.000	2.750.000	11,90	189	DOKUMEN	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (PANGKALBALAM)			**1**	**4.640.000**	**-**	**-**			**PANGKALBALAM**

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1**	**4.640.000**	**-**	**-**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	4.640.000		-	-	DOKUMEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PANGKALBALAM)				**740.000.000**	**-**	**-**			**PANGKALBALAM**
		BLUD			**740.000.000**	**-**	**-**			
		BLUD		1	740.000.000		-	-	UNIT KERJA	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (KACANG PEDANG)			**3376**	**837.151.264**	**58.915.439**	**7,04**			**KACANG PEDANG**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**3376**	**837.151.264**	**58.915.439**	**7,04**			
		Ibu hamil	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	285	13.440.000		-	63	ORANG	
		Usia Pendidikan Dasar	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	21.400.000		-	0	ORANG	
		ODGJ	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	38	3.000.000		-	32	ORANG	
		Orang Terduga Tuberkolosis	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	37	11.200.000		-	0	ORANG	
		Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	7	162.000.000		-	0	DOKUMEN	
		Kesjaor	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	3	2.000.000		-	0	DOKUMEN	
		Kesling	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	8	22.000.000		-	0	DOKUMEN	
		Promkes	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	3.000.000		-	0	DOKUMEN	
		Surveylans Kesehatan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	15.213.000		-	0	DOKUMEN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan (ODMK)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	38	2.600.000		-	32	ORANG	
		PM & PTM	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	13	50.874.000		-	0	DOKUMEN	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	26	501.224.264	58.915.439	11,75	4	DOKUMEN	
		Kesehatan Reproduksi		3	4.400.000		-	0	DOKUMEN	
		Ibu dan Anak		1	1.200.000		-	0	DOKUMEN	
		Lansia		939	12.000.000		-	458	DOKUMEN	
		Imunisasi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1969	11.600.000		-	100	DOKUMEN	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (KACANG PEDANG)			**1**	**3.310.000**	**-**	**-**			**KACANG PEDANG**

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1**	**3.310.000**	**-**	**-**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	3.310.000		-	-	DOKUMEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KACANG PEDANG)				**360.000.000**	**-**	**-**			**KACANG PEDANG**
		BLUD			**360.000.000**	**-**	**-**			
		BLUD		1	360.000.000		-	-	UNIT KERJA	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (MELINTANG)			**1111**	**1.190.159.656**	**175.104.876**	**14,71**			**MELINTANG**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1111**	**1.190.159.656**	**175.104.876**	**14,71**			
		Ibu hamil	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	216	31.680.000	7.620.000	24,05	118	ORANG	
		Usia Pendidikan Dasar	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	28.300.000	2.250.000	7,95	2	ORANG	
		ODGJ	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	192	9.600.000	2.400.000	25,00	10	ORANG	
		Orang Terduga Tuberkolosis	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	180	9.000.000	3.300.000	36,67	60	ORANG	
		Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	5	223.750.000	7.600.000	3,40	3	DOKUMEN	
		Kesjaor	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	3	600.000	150.000	25,00	1	DOKUMEN	
		Kesling	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	10	22.900.000	3.900.000	17,03	3	DOKUMEN	
		Surveylans Kesehatan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	51.476.000	17.387.600	33,78	3	DOKUMEN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan (ODMK)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	24	1.200.000	-	-	10	ORANG	
		PM & PTM	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21	74.367.000	19.500.000	26,22	11	DOKUMEN	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	7	685.921.656	90.122.276	13,14	4	DOKUMEN	
		Kesehatan Reproduksi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	4	28.825.000	14.275.000	49,52	2	DOKUMEN	
		Ibu dan Anak	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	528.000	-	-	0	DOKUMEN	
		Lansia		44	2.200.000	1.200.000	54,55	1		
		Imunisasi	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	396	19.812.000	5.400.000	27,26	1	DOKUMEN	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (MELINTANG)			**1**	**5.880.000**	**4.000.000**	**68,03**			**MELINTANG**

NO	PROGRAM	Kegiatan & Sub Kegiatan	Sumber Dana	Volume Fisik	Plafon Dana	Realisasi Tw I			Keterangan	Penanggung Jawab
						Keuangan		Capaian Kinerja		
						(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1**	**5.880.000**	**4.000.000**	**68,03**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)	1	5.880.000	4.000.000	68,03	1	DOKUMEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (MELINTANG)				**990.000.000**	**-**	**-**			**MELINTANG**
		BLUD			**990.000.000**	**-**	**-**			
		BLUD		1	990.000.000		-	-	UNIT KERJA	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)			**77**	**40.464.870.000**	**-**	**-**			**RSUD**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**77**	**40.464.870.000**	**-**	**-**			
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	74	16.076.850.000		-	-	UNIT	
		Pengembangan Rumah Sakit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	3	24.388.020.000		-	-	UNIT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD)			**1**	**40.000.000.000**	**10.612.783.427**	**26,53**			
		Peningkatan Pelayanan BLUD		**1**	**40.000.000.000**	**10.612.783.427**	**26,53**			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	1	40.000.000.000	10.612.783.427	26,53	1	UNIT / KERJA	**RSUD**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kota Pangkalpinang untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan;
b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali kota;
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kesehatan;
d. penetapan rencana kerja dinas Kesehatan, menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan;
f. pelaksanaan perencanaan bidang Kesehatan;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Kesehatan di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga dan sarana dan prasarana. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang pada saat ini mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang berjumlah 12 UPTD, yang terdiri dari : UPTD. Puskesmas Girimaya, UPTD. Puskesmas Pangkal Balam, UPTD. Puskesmas Melintang, UPTD. Puskesmas Taman Sari, UPTD. Puskesmas Pasir Putih, UPTD. Puskesmas Kacang Pedang, UPTD. Puskesmas Air Itam, UPTD. Puskesmas Gerunggang, UPTD. Puskesmas Selindung, UPTD. Laboratorium Kesehatan, UPTD. Pembiayaan Jaminan Kesehatan, UPTD. RSUD Depati Hamzah.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, dengan menggunakan format Tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Kesehatan
Kota Pangkal Pinang

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Kinerja			Realisasi			Proyeksi	
				2024	2025	2026	2023	2024	2025 TW I	2025	2026
Rendahnya angka kematian ibu melahirkan		Angka Kematian Ibu	Angka (per 100.000 KH)	110	105	100	52	196		105	100
Rendahnya prevalensi gizi buruk		Angka Kesakitan	%	33,00	32,00	31,00	23,57	60,45		32,00	31,00
Rendahnya Angka Kematian Bayi		Angka Kematian Bayi	Angka (per 1000 KH)	2,4	2,3	2,2	8	8,7		2,3	2,2
Rendahnya Angka Kesakitan		Prevalensi Gizi Buruk	%	0,80	0,70	0,60	0,26	0,60		0,70	0,60
Capaian SPM Kesehatan	Pelayanan Kesehatan ibu hamil		%	100%	100%	100%	95,66%	99,70%	25,44%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin		%	100%	100%	100%	98,24%	99,80%	24,72%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir		%	100%	100%	100%	100%	99,90%	25,12%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Balita		%	100%	100%	100%	99,32%	99,40%	19,33%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar		%	100%	100%	100%	98,70%	99,80%	30,10%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif		%	100%	100%	100%	99,43%	100%	24,54%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		%	100%	100%	100%	96,82%	99,50%	21,06%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi		%	100%	100%	100%	99%	100%	32,63%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan orang dengan diabetes melitus		%	100%	100%	100%	100%	100%	26,71%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		%	100%	100%	100%	100%	100%	48,65%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis		%	100%	100%	100%	100%	100%	30,03%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV		%	100%	100%	100%	100%	100%	20,98%	100%	100%

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang tahun 2024 – 2026 dalam perkembangannya, terdapat usulan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan tahun 2024 yang tidak terdapat pada Renstra. Perbedaan usulan berada pada sub kegiatan baru yang muncul pada Renja Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang setelah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhitan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sub kegiatan tersebut yaitu Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, Pengelolaan pelayanan orang dengan terinfeksi HIV ODHIV, Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi, dan upaya kesehatan Ibu dan Anak.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang

Rancangan awal RKPD merupakan rancangan awal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun kedepan, pada rancangan awal RKPD ini masih mengacu pada program/kegiatan tahun sebelumnya karena merupakan program/kegiatan rutin yang dilaksanakan terus menerus. Namun demikian Dinas Kesehatan tetap menerima masukan dari berbagai pihak dalam menyusun program dan kegiatan. Terutama pada sasaran, lokasi, sumber pembiayaan, sarana dan prasarana, serta metode yang akan digunakan. Nomenklatur program dan kegiatan sudah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang.
Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tabel 3.1
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
						DINAS KESEHATAN				143.344.158.414,00	159.101.911.463,00	166.023.482.882,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				143.344.158.414,00	159.101.911.463,00	166.023.482.882,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				143.344.158.414,00	159.101.911.463,00	166.023.482.882,00		
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bidang Dinkes	75,15 Nilai	75,15 Nilai	110.352.823.710,00	105.150.439.914,00	109.990.697.602,00		
							Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90,22 Nilai	90,22 Nilai					
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaa, penganggaran daerah tepat waktu	100 %	100 %	36.876.000,00	34.130.000,00	24.130.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.196.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.206.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.206.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.206.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.206.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	29.856.000,00	31.550.000,00	21.550.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	100 %	105.770.508.710,00	100.646.827.154,00	105.861.603.956,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/ bulan	1 Orang/ bulan	105.759.518.710,00	100.635.327.154,00	105.851.603.956,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.990.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	5.250.000,00	3.750.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	0,13 %	0,13 %	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0 %	0 %	134.000.000,00	71.450.000,00	10.650.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	52.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	21.450.000,00	10.650.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	15 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	525.429.000,00	525.429.000,00	265.975.950,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.741.500,00	18.741.500,00	9.369.200,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.167.500,00	25.167.500,00	25.167.500,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	160.000.000,00	160.000.000,00	80.679.250,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	121.520.000,00	121.520.000,00	60.760.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	3.725.010.000,00	3.699.609.260,00	3.655.343.196,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	115.010.000,00	115.010.000,00	115.010.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.060.000.000,00	3.034.599.260,00	2.990.333.196,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik perangkat Daerah	100 %	100 %	140.000.000,00	151.994.500,00	151.994.500,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	121.994.500,00	121.994.500,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Dengan Satuan:%)	100%	100%	23.866.062.704,00	36.734.993.068,00	36.582.615.628,00		
							Persentase ibu bersalin mendapatkan persalinan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan persalianan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	20
			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Terlaksananya pelayanan orang terduga TB sesuai standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	20
			Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) (Dengan Satuan:%)	0,8%	0,8%					
			Persentase sarana air minum yang diawasi/ yang diperiksa sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya Kesehatan Kerja dan Olaraga (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Persentase Kab/Kota yang menerapkan GERMAS (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Cakupan deteksi dini penyakit Hepatitis B (Dengan Satuan:%)	83%	83%					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	20
			Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Prevalensi HIV/AIDS (Dengan Satuan:%)	0.0038 %	0.0038 %					
			Cakupan Kelurahan UCI (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Angka Kejadian Malaria (Dengan Satuan:Per 1000)	<1 / 1000	<1 / 1000					
			Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 Jam (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Cakupan penemuan orang dengan NAPZA (Dengan Satuan:%)	0%	0%					
			Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Persentase Puskesmas yang sesuai standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial (Dengan Satuan:%)	100%	100%					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	20
			Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan terkalibrasi (Dengan Satuan:%)	90%	90%					
			Terlaksananya program UHC (Dengan Satuan:%)	98%	98%					
			Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda (Dengan Satuan:Per 100.000 Penduduk)	86/ 100.000 penduduk	86/ 100.000 penduduk					
			Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah (Dengan Satuan:%)	91%	91%					
			Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Dengan Satuan:%)	85%	85%					
			Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Dengan Satuan:%)	100%	100%					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100 %	100 %	1.972.000.000,00	15.616.018.000,00	15.184.163.000,00		DINAS KESEHATAN
							Persentase Puskesmas dan Labkes dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100 %	100 %					
							Persentase Obat dan Vaksin yang disediakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) (Dengan Satuan:%)	100 %	100 %					
							Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100 %	100 %					
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas								
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	6 Unit	0,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	1.700.000.000,00	640.000.000,00	214.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	4.002.000.000,00	4.001.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Unit	120 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	5.306.993.000,00	5.301.993.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 Keluarga	1 Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	9.645.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	12 Paket	0,00	57.025.000,00	57.025.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Dengan Satuan:%)	100%	100%	21.612.762.704,00	20.839.475.068,00	21.140.522.628,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Persentase ibu bersalin mendapatkan persalinan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan persalianan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Terlaksananya pelayanan orang terduga TB sesuai standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) (Dengan Satuan:%)	0,8%	0,8%					
							Persentase sarana air minum yang diawasi/ yang diperiksa sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya Kesehatan Kerja dan Olaraga (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase Kab/Kota yang menerapkan GERMAS (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Cakupan deteksi dini penyakit Hepatitis B (Dengan Satuan:%)	83%	83%					
							Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Prevalensi HIV/AIDS (Dengan Satuan:%)	0.0038 %	0.0038 %					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Cakupan Kelurahan UCI (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Angka Kejadian Malaria (Dengan Satuan:Per 1000)	<1 / 1000	<1 / 1000					
							Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 Jam (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Cakupan penemuan orang dengan NAPZA (Dengan Satuan:%)	0%	0%					
							Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase Puskesmas yang sesuai standard (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan terkalibrasi (Dengan Satuan:%)	90%	90%					
							Terlaksananya program UHC (Dengan Satuan:%)	98%	98%					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda (Dengan Satuan:Per 100.000 Penduduk)	86/ 100.000 penduduk	86/ 100.000 penduduk					
							Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah (Dengan Satuan:%)	91%	91%					
							Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Dengan Satuan:%)	85%	85%					
							Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
							Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	3750 Orang	170.350.000,00	320.350.000,00	315.350.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	3561 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	3413 Orang	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	15856 Orang	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	39016 Orang	54.500.000,00	104.500.000,00	102.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	150217 Orang	139.990.000,00	104.440.000,00	104.440.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	16028 Orang	48.500.000,00	50.300.000,00	50.300.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	43957 Orang	19.950.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	5643 Orang	40.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	429 Orang	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	3788 Orang	94.450.000,00	39.075.000,00	39.075.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	6800 Orang	40.550.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	4 Dokumen	135.000.000,00	152.500.000,00	152.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.990.000,00	192.087.900,00	189.837.900,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	283.998.000,00	284.251.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2 Dokumen	7.950.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	5 Dokumen	32.365.000,00	44.025.000,00	32.775.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	16 Dokumen	10.000.000,00	203.080.000,00	203.080.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	18.155.472.388,00	16.075.815.088,00	16.454.446.688,00	PENDAPATAN TRANSFER Pajak Rokok DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah								
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1 Orang	400 Orang	7.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	27.146.500,00	26.166.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	175 Dokumen	692.058.316,00	934.375.580,00	915.929.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	50.037.000,00	50.037.000,00	47.002.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	2 Laporan	1.050.000,00	2.725.000,00	1.350.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	1.524.500.000,00	1.494.500.000,00	1.464.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	779 Orang	3.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	677 Orang	205.000.000,00	204.950.000,00	204.950.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	532 Orang	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	291.720.000,00	291.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %	100 %	5.000.000,00	3.200.000,00	2.000.000,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.200.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	276.300.000,00	276.300.000,00	255.930.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	1 Unit	204.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	9 Unit	66.300.000,00	66.300.000,00	45.930.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan SDM Kesehatan sesuai standar Bidang PSDK (Dengan Satuan:%)	50%	50%	163.150.000,00	403.848.000,00	524.458.500,00		
							Capaian profesionalitas SDM Kesehatan di RSUD Depati Hamzah (Dengan Satuan:%)	100%	100%					
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunya laporan pembinaan dan pengawasan sumberdaya kesehatan RSUD (Dengan Satuan:%)	100%	100%	163.150.000,00	163.150.000,00	283.760.500,00		DINAS KESEHATAN
							Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	50%	50%					
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	23 Orang	139.750.000,00	139.750.000,00	145.150.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.400.000,00	23.400.000,00	138.610.500,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	240.698.000,00	240.698.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-	60 Orang	0,00	240.698.000,00	240.698.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dan PIRT (Dengan Satuan:%)	25%	25%	83.420.000,00	385.919.000,00	385.919.000,00		
							Persentase sarana sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat (Dengan Satuan:%)	99%	99%					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %	100 %	35.300.000,00	75.340.000,00	75.340.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	60 Dokumen	35.300.000,00	75.340.000,00	75.494.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	100 %	41.120.000,00	303.579.000,00	303.579.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	120 Dokumen	41.120.000,00	303.579.000,00	303.425.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% Posyandu Aktif	74,36 %	74,36 %	24.000.000,00	113.513.000,00	113.260.000,00		
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	10.000.000,00	36.240.000,00	36.240.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	36.240.000,00	36.240.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	4.000.000,00	67.273.000,00	67.020.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	67.273.000,00	67.020.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	7.371.000.000,00	6.217.000.009,00	8.485.600.000,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	7.371.000.000,00	6.217.000.009,00	8.485.600.000,00		DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Gerunggang				1.134.000.000,00	967.000.000,00	1.163.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.134.000.000,00	967.000.000,00	1.163.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Selindung				760.000.000,00	634.000.009,00	724.000.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	760.000.000,00	634.000.009,00	724.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Pasir Putih				680.000.000,00	560.000.000,00	648.600.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	680.000.000,00	560.000.000,00	648.600.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Air Itam				944.000.000,00	800.000.000,00	980.000.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	944.000.000,00	800.000.000,00	980.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Girimaya				725.000.000,00	636.000.000,00	1.764.000.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	725.000.000,00	636.000.000,00	1.764.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Taman Sari				660.000.000,00	530.000.000,00	685.000.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	660.000.000,00	530.000.000,00	685.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Pangkalbalam				914.000.000,00	740.000.000,00	864.000.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	914.000.000,00	740.000.000,00	864.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kacang Pedang				435.000.000,00	360.000.000,00	457.000.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	435.000.000,00	360.000.000,00	457.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Melintang				1.119.000.000,00	990.000.000,00	1.200.000.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.119.000.000,00	990.000.000,00	1.200.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penemuan orang dengan NAPZA	0%		1.483.702.000,00	10.047.933.472,00	9.892.557.152,00		
							Prevalensi HIV/AIDS	0,0038%						
							Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	0,8%						
							Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 Jam	100%						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Angka Kejadian Malaria	<1/ 1000 Penduduk						
							Cakupan deteksi dini penyakit Hepatitis B	83%						
							Persentase Penduduk yangMemanfaatkan Labkesda	86/ 100.000 Penduduk						
							Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan terkalibrasi	90%						
							Terlaksananya program UHC	98%						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kematian DBD	1%		1.483.702.000,00	10.047.933.472,00	9.892.557.152,00		DINAS KESEHATAN
							Cakupan imunisasi campak	94,8%						
							Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainya sesuai standar	33,33%						
							Persentase tersusunnya laporan GERMAS	100						
							persentase layanan kesehatan untuk balita	100%						
							Persentase tersusunnya laporan NAPZA	100%						
							Persentase tersusunnya laporan orang dengan HIV	100%						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Persentase Puskesmas yang mempunyai minimam 75% dengan pencapaian SPM	100%						
							Persentase tersusunnya laporan Kab/Kota Sehat	100%						
							Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%						
							Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi ekslusif	72%						
							Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%						
							Persentase Kelurahan dengan Stop BABS	100%						
							persentase layanan kesehatan untuk bayi baru lahir	100%						
							persentase layanan kesehatan untuk ibu bersalin	100%						
							persentase layanan kesehatan untuk ibu hamil	100%						
							persentase layanan kesehatan untuk penderita DM	100%						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	20
			persentase layanan kesehatan untuk penderita hipertensi	100%						
			persentase layanan kesehatan untuk penderita ODGJ	100%						
			persentase layanan kesehatan untuk usia 15 - 59 tahun	100%						
			persentase layanan kesehatan untuk Anak Usia Pendidikan Dasar	100%						
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat sesuai standar	100%						
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%						
			Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju UHC	98%						
			Persentase penurunan angka kejadian Kanker Serviks	-20,00%						
			Persentase tersusunnya laporan Kasus KLB	100%						
			Persentase tersusunnya laporan kejadian malaria	100%						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Tingkat prevalensi TB (per 100.000 Penduduk)	164,50/ 100.000 penduduk						
							Persentase ketersediaan tempat tidur	100%						
							Persentase Puskesmas dan Labkes dalam kondisi baik	100%						
							Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%						
							Persentase layanan kesehatan untuk usia 60 tahun keatas	100%						
							Persentase Obat dan Vaksin yang disediakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Obat (RKO)	100%						
							Persentase Pos UKK yang telah melaksanakan Pos Upaya Kesehatan Kerja	69,05%						
						Puskesmas Gerunggang				163.301.000,00	1.367.204.264,00	1.356.704.264,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	794 Orang	0,00	30.600.000,00	19.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	8935 Orang	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	88 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1080 Orang	0,00	31.000.000,00	34.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	8 Dokumen	0,00	322.474.000,00	322.474.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	5 Dokumen	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	13 Dokumen	0,00	33.250.000,00	27.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	5 Dokumen	0,00	44.996.000,00	59.764.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	25 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	14 Dokumen	0,00	68.500.000,00	70.450.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	24 Dokumen	163.301.000,00	647.434.264,00	633.766.264,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	2 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	3986 Dokumen	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	5800 Dokumen	0,00	27.800.000,00	27.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Selindung				168.860.000,00	1.157.430.960,00	1.092.984.420,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	720 Orang	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	4 Orang	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	48 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	44 Orang	0,00	5.000.000,00	3.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	7 Dokumen	0,00	225.900.000,00	225.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 Dokumen	0,00	48.900.000,00	8.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	2 Dokumen	0,00	1.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2 Dokumen	0,00	44.856.000,00	38.556.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	6250 Orang	0,00	8.500.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	10 Dokumen	0,00	42.902.000,00	28.752.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	8 Dokumen	168.860.000,00	638.472.960,00	619.776.420,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	0,00	17.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	2 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	2800 Dokumen	0,00	22.350.000,00	22.350.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Pasir Putih				123.310.000,00	895.511.960,00	868.825.420,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	248 Orang	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	4 Orang	0,00	18.850.000,00	26.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	28 Orang	0,00	1.000.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	301 Orang	0,00	4.800.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	7 Dokumen	0,00	217.460.000,00	151.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	3.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	3 Dokumen	0,00	10.100.000,00	20.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	6 Dokumen	0,00	34.304.000,00	36.454.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	40 Orang	0,00	3.600.000,00	1.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	11 Dokumen	0,00	26.137.000,00	34.357.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	67 Dokumen	123.310.000,00	497.960.960,00	480.514.420,00	PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan dari BLUD DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	3 Dokumen	0,00	25.900.000,00	29.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1147 Dokumen	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	449 Dokumen	0,00	13.800.000,00	35.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Air Itam				272.916.000,00	1.404.037.920,00	1.357.591.760,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	476 Orang	0,00	41.760.000,00	39.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	4264 Orang	0,00	47.200.000,00	36.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	44 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	513 Orang	0,00	10.600.000,00	13.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	7 Dokumen	0,00	197.600.000,00	171.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	5 Dokumen	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	4 Dokumen	0,00	10.800.000,00	18.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	5 Dokumen	0,00	37.232.000,00	63.783.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	44 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	17 Dokumen	0,00	65.891.000,00	70.099.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	18 Dokumen	272.916.000,00	923.634.920,00	877.188.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan dari BLUD DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	3 Dokumen	0,00	20.280.000,00	20.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1955 Dokumen	0,00	21.400.000,00	15.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	2000 Dokumen	0,00	18.800.000,00	22.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Girimaya				131.613.000,00	1.181.137.136,00	1.171.452.136,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	295 Orang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	4 Orang	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	32 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	365 Orang	0,00	22.150.000,00	22.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	5 Dokumen	0,00	216.900.000,00	216.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	9 Dokumen	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2 Dokumen	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	32 Orang	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	14 Dokumen	0,00	52.880.000,00	52.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	131.613.000,00	718.944.136,00	709.259.136,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	2 Dokumen	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	231 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	275 Dokumen	0,00	20.488.000,00	20.488.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Taman Sari				136.476.000,00	900.281.460,00	943.290.920,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	136 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	656 Orang	0,00	20.751.500,00	20.751.500,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	24 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	204 Orang	0,00	17.475.000,00	17.475.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	4 Dokumen	0,00	197.200.000,00	197.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 Dokumen	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	5 Dokumen	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	8 Dokumen	0,00	35.962.000,00	35.962.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	24 Orang	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	10 Dokumen	0,00	0,00	63.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	136.476.000,00	547.702.960,00	527.712.420,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	2 Dokumen	0,00	15.350.000,00	15.350.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1418 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	150 Dokumen	0,00	10.140.000,00	10.140.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Pangkalbalam				213.860.000,00	1.115.018.852,00	1.097.047.312,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	332 Orang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	3135 Orang	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	48 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	418 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	7 Dokumen	0,00	238.750.000,00	238.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 Dokumen	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	6 Dokumen	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	6 Dokumen	0,00	29.916.000,00	34.366.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	48 Orang	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	18 Dokumen	0,00	30.594.000,00	26.594.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	19 Dokumen	213.860.000,00	678.706.352,00	660.284.812,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	2 Dokumen	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	552.500,00	552.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	2517 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	741 Dokumen	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kacang Pedang				124.493.000,00	837.151.264,00	824.788.764,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	253 Orang	0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2019 Orang	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	36 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	175 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9 Dokumen	0,00	162.000.000,00	157.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	7 Dokumen	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	9 Dokumen	0,00	15.213.000,00	18.213.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	36 Orang	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	22 Dokumen	0,00	50.874.000,00	52.674.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	19 Dokumen	124.493.000,00	501.224.264,00	484.061.764,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	3 Dokumen	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1048 Dokumen	0,00	12.000.000,00	18.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1969 Dokumen	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Melintang				148.873.000,00	1.190.159.656,00	1.179.872.156,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	216 Orang	0,00	31.680.000,00	31.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	4 Orang	0,00	28.300.000,00	28.300.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	192 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	180 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	5 Dokumen	0,00	223.750.000,00	223.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	10 Dokumen	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	4 Dokumen	0,00	51.476.000,00	51.476.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	24 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	21 Dokumen	0,00	74.367.000,00	74.367.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	7 Dokumen	148.873.000,00	685.921.656,00	675.634.156,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	4 Dokumen	0,00	28.825.000,00	28.825.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	528.000,00	528.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	44 Dokumen	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	396 Dokumen	0,00	19.812.000,00	19.812.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
8	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	48.265.000,00	48.375.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	48.265.000,00	48.375.000,00		DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Gerunggang								
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Selindung								
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
						Puskesmas Pasir Putih								
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	5.740.000,00	5.940.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Air Itam								
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	3.865.000,00	3.775.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Girimaya								
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Taman Sari								
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
						Puskesmas Pangkalbalam								
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kacang Pedang								
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Melintang								
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						RSUD Depati Hamzah				**34.000.000.000,00**	**80.464.870.000,00**	**93.164.322.684,00**		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.000.000.000,00	80.464.870.000,00	93.164.322.684,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				34.000.000.000,00	80.464.870.000,00	93.164.322.684,00		
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90,22 Nilai	90,22 Nilai	34.000.000.000,00	40.000.000.000,00	52.699.452.684,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	36 %	36 %	34.000.000.000,00	40.000.000.000,00	52.699.452.684,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	34.000.000.000,00	40.000.000.000,00	52.699.452.684,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RS sesuai standar	-	100 %	0,00	40.464.870.000,00	40.464.870.000,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	0,00	40464870000,00	40.464.870.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	74 Unit	0,00	16.076.850.000,00	16.076.850.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	14	20
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	3 Unit	0,00	24.388.020.000,00	24.388.020.000,00	PENDAPATAN TRANSFER DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	DINAS KESEHATAN
					J U M L A H	177.344.158.414,00	239.566.781.463,00	259.187.805.566,00		

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, perubahan situasi, dan prioritas pembangunan daerah. Melalui dokumen ini, Dinas Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, inovatif, dan responsif terhadap tantangan kesehatan masyarakat.

Kami berharap rencana ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dengan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, diharapkan implementasi rencana ini dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja Perubahan ini. Semoga upaya kita bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pangkalpinang.

RENCANA KERJA PERUBAHAN

JL.Rasakunda Pangkalpinang Telp/Fax.(0717)421142

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Kota Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang digunakan sebagai bahan Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Implementasi pembangunan berkelanjutan menyangkut spektrum yang luas dan mengandung pengertian yang komprehensif, menuntut keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat. Disamping itu, dalam proses perencanaan diperlukan data dan informasi untuk menilai dan menentukan prioritas masalah dan memberikan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun fungsi Renja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah untuk memberikan panduan bagi perencanaan pembangunan secara komprehensif sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efesiensi melalui program/kegiatan yang terukur.

Di akhir kata semoga Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) yang telah disusun dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Pangkalpinang , 06 Mei 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang,

Darwin, S.Pd Mat
Pembina Utama Muda/IV c
NIP.196807091994121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Sistematika Penyusunan Renja Perubahan 4

II Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang 27

III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 31

3.1. Program dan kegiatan PD 31

IV Penutup 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Administrasi Kependudukan melibatkan berbagai pihak baik Perencana, Pengambil Keputusan, dan Pejabat Pemerintah, serta masyarakat. Oleh karenanya kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan kependudukan perlu dibina agar pengelolaan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagai lembaga Institusi yang bertugas membantu Walikota Pangkalpinang dalam menentukan kebijakan di bidang kependudukan telah menetapkan Program serta Kegiatan kependudukan yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan menyesuaikan berbagai perubahan dari Rencana Kerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 – 2026. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung program penyelenggaraan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penutupan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan satu dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam renja perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini, akan memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang lebih akuntabel.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Rencana Kerja tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada dokumen RKPD Perubahan tahun 2025 dalam upaya pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Perubahan nantinya dapat menjadi pedoman dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan yaitu sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada semester kedua tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
h. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
m. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
n. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
o. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);

p. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
q. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224);
r. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);
s. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 246);
t. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 252);
u. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264).

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA).

Sistematika Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .

BAB IV Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, serta hambatan permasalahan dan dihadapai. Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam satu bidang urusan yaitu administrasi kependudukan.

Hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai terget yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Ditahun 2025 dilaksanakan 4 (empat) Program dengan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 21 (dua puluh satu) Subkegiatan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Derah	2. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4. Penyediaan bahan logistik kantor
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	8. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

	9. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah	10. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	11. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
Program Pendaftaran Penduduk	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
	2. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Peenataan Pendaftaran Penduduk	3. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai Kebutuhan
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	4. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Program Pencatatan Sipil	
Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Pencatatan, Penataushaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
	3. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
	4. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Penyelenggaraan Pencatatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan Evaluasi Renja tahun 2025 Triwulan I dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk matriks sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	021201	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90	6.083.034.528		1.254.941.500		0		0		0	0	1.254.941.500	0,000	20,630	SEKRETARIAT
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72		71,50								72		99,306		SEKRETARIAT
7		021201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4.258.887.064		967.456.178		0		0		0	0	967.456.178	0	23	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
8		021201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	28	4.258.887.064	28	967.456.178							28	967456178	100	23	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
9		021201202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	0	0								0	0			SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
15		021201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	370.369.000	0	7.993.670		0		0		0	0	7.993.670	0	2	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		021201206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	13.898.000	0								0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		021201206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	31.750.500	0								0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		021201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	156.928.500	0	3.000.000							0	3000000	0	2	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

20		021201206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	37.792.000	0								0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21		021201206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	130.000.000	0	4.993.670							0	4993670	0	4	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		021201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlakananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.311.928.464		240.915.602		0		0		0	0	240.915.602	0	18	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23		021201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	163.200.000	1	26.375.114							1	26375114	100	16	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		021201208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	68.500.000	0								0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		021201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.080.228.464	1	214.540.488							1	214540488	100	20	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		021201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Barang Milik Perangkat Darah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	141.850.000		38.576.050		0		0		0	0	38.576.050	0	27	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27		021201209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	39.650.000	1	1.550.000							1	1550000	100	4	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28		021201209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	102.200.000	4	37.026.050							4	37026050	133	36	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**49,653**	**20,630**	
												PREDIKAT KINERJA							
29	**-**	**021202**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga (Dengan Satuan:%)**	**97,3**	**468.525.000**	**99,8**	**0**		**0**		**0**		**0**	**100**	**0**	**102,528**	**0,000**	**BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**
				Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (Dengan Satuan:%)	**99,5**		**100,0**								**100**		**100,492**		**BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**
				Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA (Dengan Satuan:%)	**73**		**76,7**								**77**		**105,027**		**BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**
30		021202201	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan (Dengan Satuan:%)	100	435.500.000		0		0		0		0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK

31		021202201001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	17.000.000									0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK
32		021202201002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:Dokumen)	1	418.500.000	0								0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK
34		021202202	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan (Dengan Satuan:%)	100	23.025.000		0		0		0		0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK
35		021202202002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	2	23.025.000	0								0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK
36		021202203	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:%)	72	10.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK
37		021202203002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:Dokumen)	1	10.000.000	0								0	0	0	0	SUB KOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**102,683**	**0,000**	
PREDIKAT KINERJA																			
38	**-**	**021203**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kepemilikan Akte Kelahiran (Dengan Satuan:%)**	**98,5**	**54.600.000**	**98,8**	**0**		**0**		**0**		**0**	**99**	**0**	**100,274**	**0,000**	**BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**
39		021203201	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran (Dengan Satuan:Per 1.000 Kelahiran)	930	34.600.000	997	0		0		0		0	997	0	107	0	SUB KOORDINATOR PERUBAHAAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
40		021203201001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dengan Satuan:Dokumen)	1	34.600.000	0								0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERUBAHAAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
42		021203202	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kematian (Dengan Satuan:%)	100	20.000.000	100	0		0		0		0	100	0	100	0	SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
				Persentase Penerbitan Akta Cerai (Dengan Satuan:%)	69,5		76,31								76,31		110		SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
				Persentase Penerbitan Akta Perkawinan (Dengan Satuan:%)	67,8		76,22								76,22		112		SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

44		021203202003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Laporan)	1	8.730.000	0								0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
45		021203202004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.000.000	0								0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
46		021203202006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.270.000	0								0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**100,274**	**0,000**	
PREDIKAT KINERJA																			
47	**-**	**021204**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Dengan Satuan:%)**	**84,84**	**411.958.000**	**58,82**	**0**		**0**		**0**		**0**	**59**	**0**	**69,331**	**0,000**	**BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA**
51		021204203	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:%)	80	411.958.000		0		0		0		0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
52		021204203001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Laporan)	1	32.000.000	0								0	0	0	0	SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
53		021204203003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Laporan)	1	379.958.000	0								0	0	0	0	SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**69,331**	**0,000**	
PREDIKAT KINERJA																			
58	**-**	**021205**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan (Dengan Satuan:%)**	**90**	**0**													**BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA**
59		021205201	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan (Dengan Satuan:%)	80	0													SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
60		021205201001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0													SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			

PREDIKAT KINERJA							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)					**80,485**	**5,158**	
PREDIKAT KINERJA							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- Adanya target yang ditentukan pusat - Adanya penilaian kinerja yang berkaitan dengan inovasi - Banyaknya permintaan data dari lembaga dan OPD sehingga memacu untuk meningkatkan kualitas SDM untuk menyediakan data - Adanya Koordinasi, Komunikasi antara DInas Dukcapil Kota Pangkalpinang dengan Dirjen Dukcapil - Adanya Regulasi baru sehingga mempermudah dalam penyusunan dokumen kependudukan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Peralatan komputer jaringan dan sarana prasarana yang berkaitan dengan SIAK sudah tidak support disistem - Perjanjian kerja sama pemanfaatan data masih kurang adanya respon atau dukungan dari lembaga pengguna - Masih banyak wajib KTP yang belum melakukan perekaman berada diluar daerah - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengupdate Kartu Keluarga (KK) - Capaian Kinerja Program Tahun 2025 disajikan Menggunakan Data DKB Semester II (dua) tahun 2024 dikarenakan data DKB semester I (satu) tahun 2025 belum dirrelease KEMENDAGRI sehingga capaian kinerja yang disajikan belum maksimal - Target sub. kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dirubah pada saat perubahan (4 unit)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	- Melaksanakan kegiatan setiap triwulan sesuai target yang telah ditentukan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	- Melaksanakan rencana kerja sesuai target yang telah ditentukan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 diukur melalui beberapa parameter yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Pelayanan Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Penetapan Kinerja Dinas DUKCAPIL Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	%	78,85
2	Meningkatnya Rata-rata Lama pengurusan dokumen kependudukan	Lama pengurusan dokumen kependudukan	Hari	3
		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72
		2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	90
		3. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	%	99,5
		4. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA	%	73
		5. Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,3
		6. Kepemilikan Akta Kelahiran	%	98,5
		7. Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	84,84
		8. Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan	%	90

Untuk lebih jelasnya, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang ada disetiap indikator Program sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 dapat dilihat di Tabel 2.2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.2

Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
Tahun 2021-2024

NO	**Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang**	**Target SPM**	**Target IKK**	**Target Indikator Lainnya**	**Target Renstra SKPD Tahun ke-**					**Realisasi Capaian Tahun ke-**					**Rasio Capaian pada Tahun ke-**				
					2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**Meningkatkan Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil**	**---**	**---**					**78,82**	**78,85**				**93,79**					**119**	
1	Meningkatnya Rata-rata Lama Pengurusan Dokumen	---	---		**7**	**7**	**7**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**						
	Resio Penduduk berKTP persatuan penduduk	---	---		650	670	690	-	-	682	690	984	-		104,92	102,98	142,60	-	
	Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga	---	---		95	96	97	97	97,3	96,84	99,79	99,94	99,76		101,93	103,95	103,03	103	
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	---	---		99,10	99,6	99,6	-	-	99,08	97,67	98,42	-		99,98	98,06	98,81	-	
	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	---	---		99,2	99,5	99,7	-	-	100	100	100	-		100,80	100,50	100,30	-	
	Perekaman KTP Elektronik	---	---		97	98	99	99,4	99,5	99,08	97,67	98,42	99,99		102,14	99,66	99,41	101	
	Persentase anak usia 0-17 tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	---	---		65	70	75	70	73	68,29	70	73,04	76,67		105,06	100	97,38	110	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk	---	---		890	920	920	-	-	991	999	998	-		111,34	108,57	108,47	-	
	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	---	---		84	88	92	-	-	49,69	56,78	58,26	-		59,15	64,52	63,32	-	
	Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	---	---		750	765	780	-	-	631	688	736	-		84,13	89,93	94,35	-	
	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	---	---		28	31	35	-	-	100	100	100	-		322,58	332,58	285,71	-	
	Peningkatan Cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	---	---		2,7	3,5	4	-	-	6,01	13,65	2,61	-		222,59	390	65,25	-	
	Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran	---	---		87	92	95	96,5	98,5	95,36	97,25	98,43	98,77		109,60	105,71	103,61	102	
	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan	---	---		61	65	68	-	-	63,13	68,87	73,57	-		103,49	105,95	108,19	-	
	Peningkatan Cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	---	---		65	72	75	-	-	53,39	70,95	73,92	-		82,13	98,54	98,56	-	
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang tercatat kelahirannya oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	---	---		87	88	89	-	-	99,06	99,52	99,66	-		113,86	113,09	111,97	-	
	Persentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja	---	---		1,4	2,1	2,8	78,79	84,84	20,59	60,60	60,60	58,82		1.470	2.885	2.164	74,65	
	Persentase keserasian database kependudukan	---	---		95	96	97	80	90	98,40	97,31	-	-		103,57	101,36	-	-	
	Persentase tersajinya data Kependudukan yang Akurat	---	---		50	50	50	-	-	100	100	100	-		200	200	200	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan peraturan tersebut merupakan Dinas tipe B yang merupakan unsur pelaksana teknis daerah urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Kepala Dinas membawahi Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan perubahan struktur organisasi tersebut diharapkan terjadi peningkatan kinerja pada masing-masing program/ kegiatan. Akan tetapi dengan terjadinya perubahan struktur organisasi tersebut maka dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun secara kualitas untuk menunjang kinerja dan program-program kegiatan di tahun 2025. Begitu juga terjadi peningkatan jumlah kebutuhan SDM untuk pencapaian kinerja sesuai dengan target yang diharapkan. Sampai dengan tahun 2025, diprediksikan pencapaian tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara keseluruhan akan mencapai target perkiraan yang ditetapkan dalam RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 – 2026. Namun sejalan dengan tercapainya tujuan dan sasaran serta realisasi program dan kegiatan tersebut, ada beberapa permasalahan dan hambatan yang timbul seiring dengan proses dan waktu pelaksanaannya.

Permasalahan dan hambatan yang timbul/terjadi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang sampai saat ini masih merupakan masalah substansial yang berkaitan dengan formasi sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kualitas, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang belum memenuhi standar nasional serta ketersediaan anggaran yang juga belum mendukung pelaksanaan program dan kegiatan teknis secara optimal, sehingga memberi kesan perencanaan dan pelaksanaan keseluruhan kegiatan dilakukan seadanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan secara makro, permasalahan dan hambatan yang substansial tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil perencanaan awal dan pencapaian target kinerja yang ingin diwujudkan seperti

yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk isu-isu strategis yang akan dihadapi dan diselesaikan seiring dengan telah ditetapkannya program dan kegiatan kedua urusan tersebut dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024– 2026 sebagai program / kegiatan prioritas pembangunan daerah. Untuk pengusulan program dan kegiatan OPD harus berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 dan RPJPD Kota Pangkalpinang 2007-2025 serta program nasional. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

a. Masih terdapat jumlah penduduk wajib KTP belum ber KTP el.
b. Tingginya Perkawinan/Perceraian yang belum dicatatkan di Pencatatan Sipil.
c. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan akta kematian yang sudah meninggal dunia belum diuruskan akta kematiannya jika belum dibutuhkan.
d. Kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang valid pada dokumen kependudukannya masih rendah.
e. Dengan Sistem SIAK Terpusat Terbaru Daerah hanya sebagai user dan tidak diberikan kewenangan untuk mengolah database kependudukkan sehingga hanya ada beberapa data yang dapat diperoleh dan sebagian data tidak dapat diperoleh.

Adapun peluang-peluang yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang dapat menunjang kemajuan Dinas adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas;
2. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang yang besar merupakan potensi peningkatan perkembangan penduduk
3. Adanya dukungan dari pimpinan/walikota;
4. Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit kerja lain
5. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan dilingkungan dinas secara konsekwen.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil dan menjaga kesinambungan program, maka diperlukan langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholder mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP).
4. Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil.
5. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stalsel aktif.
6. Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan.
7. Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT dengan menerapkan inovasi aplikasi sistem.
8. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui website dengan alamat *DISDUKCAPIL.PANGKALPINANG.go,id* & *diskucapil@pangkalpinangkota.go.id*
9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dan pemanfaatannya untuk keperluan pembangunan.

Dari permasalahan dan hambatan yang timbul, dampaknya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta tantangan dan peluang yang diprediksikan akan dihadapi, dapat diformulasikan menjadi isu-isu penting/strategis yang harus ditindaklanjuti guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran yang berorientasi pada pencapaian hasil dan target kinerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

a. Terbatasnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran.
b. Masih rendahnya tingkat capaian kinerja pelayanan.
c. Pelayanan yang dilakukan belum terintegrasi secara maksimal.

d. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pembangunan.
e. Masih rendahnya sinkronisasi database dengan hasil konsolidasi pusat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dalam merumuskan kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diperlukan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang akan melaksanakan 4 program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dari 4 program diatas, diturunkan menjadi 10 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yang akan mengalami penyesuaian perubahan anggaran pada tahun 2025. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

TABEL 3.1

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

KOTA PANGKALPINANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	72 Nilai 90 Nilai	72 Nilai 90 Nilai	4.656.635.551,00	6.090.548.992,00	6.120.624.357,60		72,5 Nilai 95 Nilai	6.370.695.901,00
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	100 %	3.590.866.951,00	4.258.887.064,00	4.353.833.893,60		100 %	4.544.073.550,00

	2	1 2	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bula n	30 Orang/bula n	3.582.978.951,0 0	4.258.887.064,0 0	4.353.833.893,6 0	PENDAPATA N TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAA N ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIA N PEGAWAI PEMERINTA H DENGAN PERJANJIA N KERJA	30 Orang/bula n	4.535.948.910,0 0
	2	**1 2**	**0 1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**338.808.600,00**	**360.369.000,00**	**293,562.000,00**		**100 %**	**352.652.733,00**
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	13.898.000,00	6.971.000,00	PENDAPATA N TRANSFER	1 Paket	14.420.000,00
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.220.500,00	21.750.500,00	15.821.000,00	PENDAPATA N TRANSFER	1 Paket	12.586.800,00
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	163.606.100,00	156.928.500,00	128.215.000,00	PENDAPATA N TRANSFER	1 Paket	168.514.283,00
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.982.000,00	37.792.000,00	22.555.000,00	PENDAPATA N TRANSFER	2 Paket	23.231.650,00
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	120.000.000,00	PENDAPATA N TRANSFER	1 Laporan	133.900.000,00
	2	**1 2**	**0 1**	**2.0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlakananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**585.300.000,00**	**1.329.442.928, 00**	**1.331.378.464, 00**		**100 %**	**1.328.059.818, 00**

	2	1 2	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	121.200.000,00	163.200.000,00	163.200.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	124.836.000,00
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	43.500.000,00	68.500.000,00	113.750.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	117.162.500,00
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	420.600.000,00	1.097.742.928,00	1.054.428.464,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	1.086.061.318,00
	2	**1 2**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentasi Barang Milik Perangkat Darah Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**100 %**	**141.660.000,00**	**141.850.000,00**	**141.850.000,00**		**100 %**	**145.909.800,00**
	2	1 2	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.650.000,00	39.650.000,00	39.650.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Unit	40.839.500,00
	2	1 2	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4 Unit	102.010.000,00	102.200.000,00	102.200.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	4 Unit	105.070.300,00

2	**2**	**1 2**	**0 2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik**	**73 % 97,3 % 99,5 %**	**73 % 97,3 % 99,5 %**	**470.025.000,00**	**468.525.000,00**	**452.205.000,00**		**76 % 97,6 % 99,6 %**	**482.683.750,00**
	2	**1 2**	**0 2**	**2.0 1**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan Persentase Pelayanan Penduduk yang dilakukan**	**100 %**	**100 %**	**437.000.000,00**	**435.500.000,00**	**433,000.000,00**		**100 %**	**450.110.000,00**
	2	1 2	0 2	2.0 1	000 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	17.000.000,00	14.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	19.055.000,00
	2	1 2	0 2	2.0 1	000 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	418.500.000,00	418.500.000,00	418.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	431.055.000,00
	2	**1 2**	**0 2**	**2.0 2**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan**	**100 %**	**100 %**	**23.025.000,00**	**23.025.000,00**	**10,605,000,00**		**100 %**	**23.715.750,00**

	2	1 2	0 2	2.0 2	000 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	23.025.000,00	23.025.000,00	10.605.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	2 Dokumen	23.715.750,00
	2	**1 2**	**0 2**	**2.0 3**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk**	**72 %**	**72 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.600.000,00**		**72 %**	**8.858.000,00**
	2	1 2	0 2	2.0 3	000 2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	8.858.000,00
3	**2**	**1 2**	**0 3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kepemilikan Akta Kelahiran**	**98,5 %**	**98,5 %**	**54.600.000,00**	**54.600.000,00**	**33.210.000,00**		**99%**	**56.238.000,00**
	2	**1 2**	**0 3**	**2.0 1**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Rasio Bayi Berakte Kelahiran**	**930 Per 1.000 Kelahiran**	**930 Per 1.000 Kelahiran**	**34.600.000,00**	**34.600.000,00**	**18.210.000,00**		**935 Per 1.000 Kelahiran**	**35.638.000,00**
	2	1 2	0 3	2.0 1	000 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1 Dokumen	34.600.000,00	34.600.000,00	18.210.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	35.638.000,00

	2	**1 2**	**0 3**	**2.0 2**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Penerbitan AKta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Persentase Penerbitan Akta Perceraian**	**100 % 67,8 % 69,5 %**	**100 % 67,8 % 69,5 %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**15.000.000,00**		**100 % 78 % 71 %**	**20.600.000,00**
	2	1 2	0 3	2.0 2	000 3	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.730.000,00	3.730.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	8.240.000,00
	2	1 2	0 3	2.0 2	000 4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	2.060.000,00
	2	1 2	0 3	2.0 2	000 6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.270.000,00	9.270.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	10.300.000,00
4	**2**	**1 2**	**0 4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**84,84 %**	**84,84 %**	**35.200.000,00**	**276.958.000,00**	**389.258.000,00**		**90,90%**	**403.974.240,00**
	2	**1 2**	**0 4**	**2.0 3**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**80 %**	**80 %**	**35.200.000,00**	**276.958.000,00**	**389.258.000,00**		**90%**	**403.974.240,00**

	2	1 2	0 4	2.0 3	000 1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	12.950.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	13.338.500,00
	2	1 2	0 4	2.0 3	000 3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	22.250.000,00	244.958.000,00	379.258.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	390.635.740,00
									J U M L A H	**5.226.510.551, 00**	**6.890.631.992, 00**	**6.995.297.357, 60**			**7.323.943.391, 00**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan kembali program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dengan mempertimbangkan berbagai hal. Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan maksud untuk mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 serta meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 serta diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja.

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

KOTA PANGKALPINANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	18	19
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.226.510.551,00	6.890.631.992,00	6.995.297.357,60			7.323.943.391,00
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	72 Nilai 90 Nilai	72 Nilai 90 Nilai	4.656.635.551,00	6.090.548.992,00	Rp 6.120.624.357,60		72,5 Nilai 95 Nilai	6.370.695.901,00
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	100 %	3.590.866.951,00	4.258.887.064,00	Rp 4.353.833.893,60		100 %	4.544.073.550,00

	2	1 2	0 1	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.582.978.951,00	4.258.887.064,00	Rp 4.353.833.893,60	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	30 Orang/bulan	4.535.948.910,00
	2	**1 2**	**0 1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**338.808.600,00**	**360.369.000,00**	**Rp 293.562.000**		**100 %**	**352.652.733,00**
	2	1 2	0 1	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	13.898.000,00	6.971.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Paket	14.420.000,00
	2	1 2	0 1	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.220.500,00	21.750.500,00	15.821.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Paket	12.586.800,00

	2	1 2	0 1	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	163.606.100 ,00	156.928.500 ,00	128.215.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Paket	168.514.283 ,00
	2	1 2	0 1	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.982.000, 00	37.792.000, 00	22.555.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	2 Paket	23.231.650, 00
	2	1 2	0 1	2.0 6	00 09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000 ,00	130.000.000 ,00	120.000.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Laporan	133.900.000 ,00
	2	**1 2**	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah**	**Persentase Terlakanany a Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**585.300.00 0,00**	**1.329.442.9 28,00**	**Rp 1.331.378.464, 00**		**100 %**	**1.328.059.8 18,00**
	2	1 2	0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	121.200.000 ,00	163.200.000 ,00	163.200.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Laporan	124.836.000 ,00
	2	1 2	0 1	2.0 8	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	43.500.000, 00	68.500.000, 00	113.750.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Laporan	117.162.500 ,00

	2	1 2	0 1	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	420.600.000 ,00	1.097.742.9 28,00	1.054.428.464,0 0	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Laporan	1.086.061.3 18,00
	2	**1 2**	**0 1**	**2. 09**		**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah**	**Persentasi Barang Milik Perangkat Darah Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**100 %**	**141.660.00 0,00**	**141.850.00 0,00**	**Rp 141.850.000,00**		**100 %**	**145.909.80 0,00**
	2	1 2	0 1	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.650.000, 00	39.650.000, 00	39.650.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Unit	40.839.500, 00
	2	1 2	0 1	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4 Unit	102.010.000 ,00	102.200.000 ,00	102.200.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	4 Unit	105.070.300 ,00

2	**2**	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik**	**73 % 97,3 % 99,5 %**	**73 % 97,3 % 99,5 %**	**470.025.000,00**	**468.525.000,00**	**Rp 452.205.000,00**		**76 % 97,6 % 99,6 %**	**482.683.750,00**
	2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan Persentase Pelayanan Penduduk yang dilakukan**	**100 %**	**100 %**	**437.000.000,00**	**435.500.000,00**	**Rp 433.000.000,00**		**100 %**	**450.110.000,00**
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	17.000.000,00	14.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	19.055.000,00

	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	418.500.000,00	418.500.000,00	418.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	431.055.000,00
	2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan**	**100 %**	**100 %**	**23.025.000,00**	**23.025.000,00**	**10.605.000,00**		**100 %**	**23.715.750,00**
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	23.025.000,00	23.025.000,00	10.605.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	2 Dokumen	23.715.750,00

	2	**1 2**	**0 2**	**2. 03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk**	**72 %**	**72 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.600.000,00**		**72 %**	**8.858.000,00**
	2	1 2	0 2	2.0 3	00 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	8.858.000,00
3	**2**	**1 2**	**0 3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kepemilikan Akta Kelahiran**	**98,5 %**	**98,5 %**	**54.600.000,00**	**54.600.000,00**	**Rp 33.210.000,00**		**99%**	**56.238.000,00**
	2	**1 2**	**0 3**	**2. 01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Rasio Bayi Berakte Kelahiran**	**930 Per 1.000 Kelahiran**	**930 Per 1.000 Kelahiran**	**34.600.000,00**	**34.600.000,00**	**18.210.000,00**		**935 Per 1.000 Kelahiran**	**35.638.000,00**
	2	1 2	0 3	2.0 1	00 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	1 Dokumen	1 Dokumen	34.600.000,00	34.600.000,00	18.210.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Dokumen	35.638.000,00

							Pelaporan Peristiwa Penting								
	2	**1 2**	**0 3**	**2. 02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Penerbitan AKta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Persentase Penerbitan Akta Perceraian**	**100 % 67,8 % 69,5 %**	**100 % 67,8 % 69,5 %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**Rp 15.000.000,00**		**100 % 78 % 71 %**	**20.600.000,00**
	2	1 2	0 3	2.0 2	00 03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.730.000,00	3.730.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	8.240.000,00
	2	1 2	0 3	2.0 2	00 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	2.060.000,00

						Pencatatan Sipil	Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil								
	2	1 2	0 3	2.0 2	00 06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000, 00	9.270.000,0 0	9.270.000,00	PENDAP ATAN TRANSF ER	1 Laporan	10.300.000, 00
4	**2**	**1 2**	**0 4**			**PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN**	**Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatk an data kependuduk an berdasarkan perjanjian kerjasama**	**84,84 %**	**84,84 %**	**35.200.000, 00**	**276.958.00 0,00**	**Rp 389.258.000,00**		**90,90%**	**403.974.24 0,00**
	2	**1 2**	**0 4**	**2. 03**		**Penyelenggar aan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an**	**Persentase Penyelengga raan Pengelolaan Informasi Administras i Kependuduk an**	**80 %**	**80 %**	**35.200.000, 00**	**276.958.00 0,00**	**Rp 389.258.000,00**		**90%**	**403.974.24 0,00**

	2	1 2	0 4	2.0 3	00 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	12.950.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	13.338.500,00
	2	1 2	0 4	2.0 3	00 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	22.250.000,00	244.958.000,00	379.258.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	1 Laporan	390.635.740,00
	J U M L A H									**5.226.510.551,00**	**6.890.631.992,00**	**Rp 6.995.297.357,60**			**7.323.943.391,00**

KOTA PANGKAL PINANG
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800/ 48 /DISDUKCAPIL/I/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA) ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 2025
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran untuk penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Tim Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);

13. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182).

14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);

15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Derah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 157).

16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukkan nama-nama sebagaimana lampiran 1 keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tim Kerja Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
a. Penanggungjawab;
b. Ketua;
c. Sekretaris;
d. Tim Asistensi; dan
e. Anggota.

KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
b. membagi peran anggota Tim Kerja Penyusunan Renja sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
d. memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja Penyusunan Renja;

e. melakukan pemantauan bahwa semua proses telah sesuai prosedur dan dilakukan pemantauan oleh Tim Kerja Penyusunan Renja; dan
f. melakukan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota Tim Kerja Penyusunan Renja.

KEEMPAT : Tim Kerja Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, c, d, dan e mempunyai tugas:
a. Menghimpun semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025;
b. Mempersiapkan data-data yang diperlukan; dan
c. Menyusun RENJA (RKT, RKA dan DPA), tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendap
atan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal Januari 2025
a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

DARWIN, S.Pd.Mat
Pembina Tk.I / IVB
NIP. 19680709 199412 1 002

Tembusan Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang;
2. Inspektur Daerah Kota Pangkal Pinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang;
4. Kepala BKPSDM Kota Pangkal Pinang; dan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800 /48 /DISDUKCAPIL/I/2025
TANGGAL : Januari 2025

PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA) ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 2025
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

NO	POSISI DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
3.	Sekretaris	Kassubag PEP dan Keuangan
4.	Tim Asistensi	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
5.	Anggota	1. Supriadi, SE; 2. Aprilisa Madona Bachari, SE; 3. Ahmad Zuhri, A.Md.

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

DARWIN, S.Pd.Mat
Pembina Tk.I / IVB
NIP. 19680709 199412 1 002

RENJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN
2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

- Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang biasanya dilaksanakan pada periode triwulan akhir tahun,tetapi karena adanya percepatan Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 berdasarkan SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.1/640/SJ TANGGAL 11 FEBRUARI 2025 TENTANG PENYESUAIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan analisis dari kegiatan sebelumnya. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun karena terdapat perubahan-perubahan dalam rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah didiskusikan dan disetujui.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini, maka Dinas Kelautan

dan Perikanan Kota Pangkalpinang telah memiliki rencana yang rinci dan telah dijabarkan dengan skala prioritas dan sesuai dengan Dokumen Ranwal Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022-2026.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana di tahun-tahun yang akan datang.

Perubahan Renja ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan perubahan RENJA tahun 2025 ini. Semoga RENJA perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang serta dapat mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 29 Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang

Dr. DAVID OKTAVIANDI,.SP.,MT
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197410262002121004

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTARGAMBAR..... iv
DAFTARTABEL..... iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025..... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan..... 27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 31
3.1 Tujuan dan Sasaran OPD 31
3.2 Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025 34
BAB IV PENUTUP..... 45
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1. Diagram Alir Penyusunan Rencana Kerja Perubahan..... 2

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Fisik Bulan Maret Tahun 2025 7
Tabel 2.2 Dalev Triwulan I..... 20

LAMPIRAN

Hal

Matrik RKA Perubahan..... 38
Notulen Rapat Perubahan Renja 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) transisi Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RENJA.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan

Bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perubahan

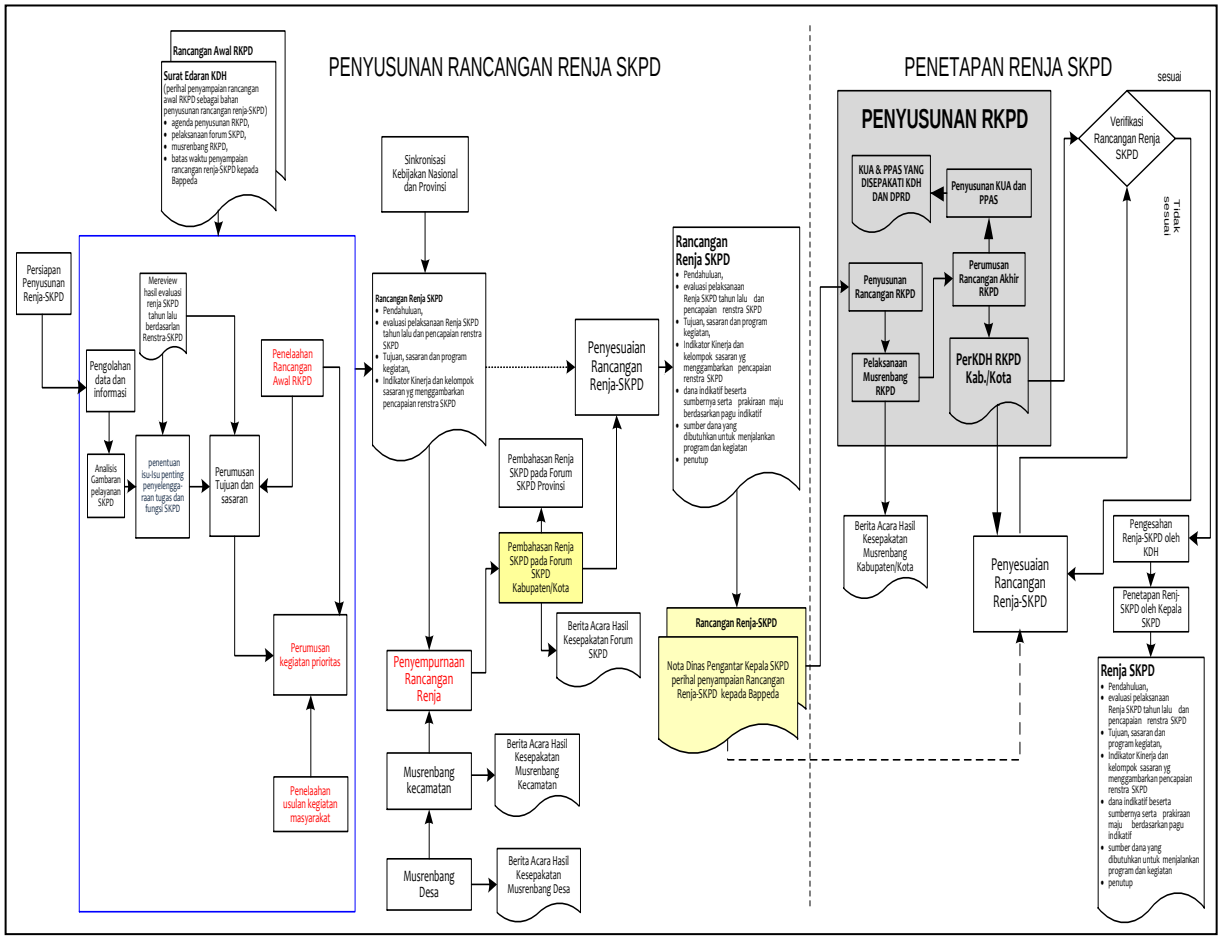

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN Dan Tahun Anggaran 2025
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
3. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota

Dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025

4. Kepmenkeu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 900.1.3/6629.A/Sj Dan 1/Mk.07/2024 Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/Sj Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD Dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
7. Surat Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 900/9/Bakeuda/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 29 Mei 2025 tentang Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai dasar acuan dalam melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD adalah agar terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penggangaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Rencana Penyelenggara Tupoksi SKPD
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
3.1 Tujuan dan Sasaran SKPD
3.2 Program dan Kegiatan Perubahan APBD Tahun 2025
BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan program/kegiatan yang telah ditetapkan. Rata-rata realisasi seluruh Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 per maret adalah 27,92 % untuk Realisasi Kinerja dan 17,10 % untuk Realisasi Keuangan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dibawah ini.

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Fisik Bulan Maret Tahun 2025 Sumber Dana APBD Kota Pangkalpinang

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BULAN : Maret 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PLAFOND DANA		REALISASI			SUMBER DANA	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
		APBD INDUK	APBD PERUBAHAN	KEUANGAN		FISIK			
					%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**4.627.946.631,00**	**0,00**	**814.325.186,00**	**17,60**	**27,92**			
3,25,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.465.104.810,00**	**0,00**	**701.694.250,00**	**20,25**	**10,22**			
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.411.498.377,00**	**0,00**	**614.769.162,00**	**25,49**	**18,74**			
3.25.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**2.411.498.377,00**	**0,00**	**614.769.162,00**	**25,49**	**18,74**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	2.411.498.377,00	0,00	614.769.162,00					
5.1.01	Belanja Pegawai	2.339.100.858,00	0,00	602.244.330,00					
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.407.474.858,00	0,00	399.444.330,00		**24,99**			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.034.295.580,00	0,00	299.240.600,00					
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.034.295.580,00	0,00	299.240.600,00					
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	105.000.000,00	0,00	31.253.092,00					
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	105.000.000,00	0,00	31.253.092,00					
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140.301.000,00	0,00	38.600.000,00					
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140.301.000,00	0,00	38.600.000,00					
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	50.400.000,00	0,00	8.820.000,00					
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.400.000,00	0,00	8.820.000,00					

5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**13.923.000,00**	**0,00**	**3.680.000,00**					
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.923.000,00	0,00	3.680.000,00					
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**61.000.000,00**	**0,00**	**17.091.120,00**					
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.000.000,00	0,00	17.091.120,00					
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**2.535.278,00**	**0,00**	**755.290,00**					
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.535.278,00	0,00	755.290,00					
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**20.000,00**	**0,00**	**4.228,00**					
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000,00	0,00	4.228,00					
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**881.122.000,00**	**0,00**	**202.800.000,00**		**24,99**			
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	881.122.000,00	0,00	202.800.000,00					
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	881.122.000,00	0,00	202.800.000,00					
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**50.504.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Prosuksi Usaha Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	48.004.000,00	0,00	0,00					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48.004.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	72.397.519,00	0,00	12.524.832,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.397.519,00	0,00	12.524.832,00		**24,99**			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	72.397.519,00	0,00	12.524.832,00					
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	63.782.767,00	0,00	11.164.608,00					
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.829.032,00	0,00	604.512,00					
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.785.720,00	0,00	755.712,00					

3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**28.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
3.25.01.2.05.09	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**28.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	28.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.000.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	28.000.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**214.215.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,72**			
3.25.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**1.547.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	1.547.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	1.547.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	1.547.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.547.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.547.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**29.358.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	29.358.500,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	29.358.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	29.358.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.358.500,00	0,00	0,00		**49,98**			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.987.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.251.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	400.000,00	0,00	0,00					

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	10.920.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**8.678.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	8.678.500,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	8.678.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	8.678.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.678.500,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.678.500,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**174.631.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,91**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	174.631.905,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	174.631.905,00	0,00	0,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	174.631.905,00	0,00	0,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.631.905,00	0,00	0,00		**16,91**			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	174.631.905,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**471.617.136,00**	**0,00**	**78.057.856,00**	**16,55**	**20,83**			
3.25.01.2.08.02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**72.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,99**	**APBD Kota PKP**		
5,1	**BELANJA OPERASI**	**72.000.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5,1,02	**Belanja Barang dan Jasa**	**72.000.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	0,00	0,00		**24,99**			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	72.000.000,00	0,00	0,00					

3.25.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**8.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**APBD Kota PKP**		
5,1	**BELANJA OPERASI**	**8.850.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5,1,02	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.850.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.850.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.850.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**390.767.136,00**	**0,00**	**78.057.856,00**	**19,98**	**37,49**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	390.767.136,00	0,00	78.057.856,00					
5,1,02	**Belanja Barang dan Jasa**	**390.767.136,00**	**0,00**	**78.057.856,00**					
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.420.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.420.000,00	0,00	0,00		**49,98**			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.420.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**388.347.136,00**	**0,00**	**78.057.856,00**					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	388.347.136,00	0,00	78.057.856,00		**24,99**			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	130.358.480,00	0,00	25.893.080,00					
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	103.086.784,00	0,00	20.514.464,00					
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.543.392,00	0,00	9.757.232,00					
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	106.358.480,00	0,00	21.893.080,00					

3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**339.773.392,00**	**0,00**	**8.867.232,00**	**2,61**	**15,27**			
3.25.01.2.09.01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**61.981.696,00**	**0,00**	**4.488.616,00**	**7,24**	**24,99**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	61.981.696,00	0,00	4.488.616,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	61.981.696,00	0,00	4.488.616,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.731.696,00	0,00	4.488.616,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.731.696,00	0,00	4.488.616,00		**24,99**			
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.931.696,00	0,00	4.488.616,00					
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.250.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.250.000,00	0,00	0,00		**24,99**			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.250.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**25.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,50**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.500.000,00	0,00	0,00		**24,99**			

5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	19.500.000,00	0,00	0,00					
3.25.01.2.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**252.291.696,00**	**0,00**	**4.378.616,00**	**1,74**	**8,33**	**APBD Kota PKP**		
5,1	**BELANJA OPERASI**	**22.291.696,00**	**0,00**	**4.378.616,00**					
5,1,02	**Belanja Barang dan Jasa**	**22.291.696,00**	**0,00**	**4.378.616,00**					
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.020.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.020.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**21.271.696,00**	**0,00**	**4.378.616,00**					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00		**24,99**			
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
5,2	**BELANJA MODAL**	**230.000.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5,2,05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	230.000.000,00	0,00	0,00					
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	230.000.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	230.000.000,00	0,00	0,00					
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	230.000.000,00	0,00	0,00					
3,25,03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**259.696.676,00**	**0,00**	**28.271.696,00**	**10,89**	**12,50**			
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**140.115.088,00**	**0,00**	**15.135.848,00**	**10,80**	**12,50**			
3.25.03.2.01.01	**Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**	**75.815.088,00**	**0,00**	**15.135.848,00**	**19,96**	**24,99**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00					

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00		24,99			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75.815.088,00	0,00	15.135.848,00					
3.25.03.2.01.02	**Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap**	**64.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	64.300.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	**Belanja Barang dan Jasa**	**64.300.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5.1.02.01	Belanja Barang	64.300.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.300.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Baranguntuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	64.300.000,00	0,00	0,00					
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**53.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
3.25.03.2.02.003	**Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, b**antuan pembiayaan, Kemitraan usaha	**53.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	53.700.000,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	53.700.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	50.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**50.400.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.000.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.02.01.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	30.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	20.400.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	20.400.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	0,00	0,00					

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	0,00	0,00					
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**65.881.588,00**	**0,00**	**13.135.848,00**	**19,94**	**24,99**			
3.25.03.2.03.02	**Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**65.881.588,00**	**0,00**	**13.135.848,00**	**19,94**	**24,99**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	65.881.588,00	0,00	13.135.848,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	65.881.588,00	0,00	13.135.848,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	2.066.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.066.500,00**	**0,00**	**0,00**		24,99			
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan - bahan kimia	560.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	972.500,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	534.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**63.815.088,00**	**0,00**	**13.135.848,00**					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.815.088,00	0,00	13.135.848,00		24,99			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
3,25,04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**796.765.864,00**	**0,00**	**84.359.240,00**	**10,59**	**5,21**			
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**29.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
3.25.04.2.02.04	**Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**	**29.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**APBD Kota PKP**		
5.01	BELANJA OPERASI	29.800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	29.800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.800.000,00	0,00	0,00		0,00			

5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk dijual /diserahkan kepada masyarakat	6.600.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	900.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	22.000.000,00	0,00	0,00					
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**766.965.864,00**	**0,00**	**84.359.240,00**	**11,00**	**10,41**			
3.25.04.2.04.01	**Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**96.275.088,00**	**0,00**	**15.635.848,00**	**16,24**	**8,33**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	96.275.088,00	0,00	15.635.848,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	96.275.088,00	0,00	15.635.848,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	660.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	660.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	78.815.088,00	0,00	15.635.848,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.815.088,00	0,00	15.635.848,00		**24,99**			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.815.088,00	0,00	15.635.848,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.800.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.800.000,00	0,00	0,00					
3.25.04.2.04.0002	**Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**670.690.776,00**	**0,00**	**68.723.392,00**	**10,25**	**12,50**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	670.690.776,00	0,00	68.723.392,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	670.690.776,00	0,00	68.723.392,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	238.707.728,00	0,00	15.180.000,00					

5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**238.707.728,00**	**0,00**	**15.180.000,00**		**24,99**			
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	17.278.500,00	0,00	15.180.000,00		**24,99**			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.112.828,00	0,00	0,00		**24,99**			
5.1.02.01.01.0009	Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran	1.840.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0012	Belanja bahan -bahan lainnya	4.990.000,00	0,00	0,00		**24,99**			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.564.400,00	0,00	0,00		**24,99**			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.822.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.700.000,00	0,00	0,00		0,00			
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	194.400.000,00	0,00	0,00		**99,96**			
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**282.532.048,00**	**0,00**	**53.543.392,00**					
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**282.532.048,00**	**0,00**	**53.543.392,00**		**24,99**			
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	45.543.392,00	0,00	9.257.232,00					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	215.716.960,00	0,00	39.907.544,00					
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.271.696,00	0,00	4.378.616,00					
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**149.451.000,00**	**0,00**	**0,00**					
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan gedung tempat kerja -Bangunan gedung tempat kerja lainnya	110.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	39.451.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan - jaringan listrik - jaringan listrik lainnya	39.451.000,00	0,00	0,00					
3,25,06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**106.379.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**106.379.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
3.25.06.2.01.0005	**Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**106.379.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**APBD Kota PKP**		
5,1	BELANJA OPERASI	106.379.281,00	0,00	0,00					
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	106.379.281,00	0,00	0,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	87.629.281,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.629.281,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.179.281,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat /bahan untuk kegiatan kantor- Benda Pos	50.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.100.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	75.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	800.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.050.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.600.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.100.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	0,00	0,00					

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	1.250.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.900.000,00	0,00	0,00					
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.900.000,00	0,00	0,00		**0,00**			
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.900.000,00	0,00	0,00					

Tabel 2.4 DALEV Triwulan I

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	032501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	80	3.465.104.810	0,00	855.277.083		0		0		0	0	855.277.083	0	25	SEKRETARIS (Dinas Kelautan dan Perikanan)
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	69,7		71,2								71		102		SEKRETARIS (Dinas Kelautan dan Perikanan)
8		032501202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	2.411.498.377	25	715.432.016		0		0		0	25	715.432.016	25	30	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
9		032501202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	20	2.411.498.377	19	715.432.016							19	715.432.016	95	30	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
12		032501205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	-50	28.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		032501205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	4	28.000.000		0							0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		032501206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	214.215.905		28.304.985		0		0		0	0	28.304.985	0	13	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		032501206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1.547.000		0							0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		032501206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	29.358.500		0							0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		032501206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	8.678.500		0							0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

19		032501206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	174.631.905	1	28.304.985							1	28.304.985	100	16	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		032501208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	471.617.136	25	90.383.150		0		0		0	25	90.383.150	25	19	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		032501208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	72.000.000	1	12.325.294							1	12.325.294	100	17	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		032501208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	8.850.000		0							0	0	0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27		032501208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	390.767.136	1	78.057.856							1	78.057.856	100	20	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28		032501209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	339.773.392	25	21.156.932		0		0		0	25	21.156.932	25	6	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29		032501209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	61.981.696	1	11.693.616							1	11.693.616	100	19	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
30		032501209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	25.500.000	2	5.084.700							2	5.084.700	50	20	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
31		032501209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	252.291.696		4.378.616							0	4.378.616	0	2	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	**51,076**	**24,683**	
PREDIKAT KINERJA																			
33	-	032503	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)**	**1.649,33**	**259.696.676**	**165,65**	**28.271.696**		**0**		**0**		**0**	**166**	**28.271.696**	**10**	**11**	**PERIKANAN TANGKAP**
				Cakupan bina kelompok perikanan tangkap (Dengan Satuan:%)	**66,67**		**17,00**								**17**		**25**		**PERIKANAN TANGKAP**
34		032503201	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan sarana prasarana usaha perikanan tangkap (Dengan Satuan:dokumen)	1	140.115.088	1	15.135.848		0		0		0	1	15.135.848	100	11	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

35		032503201001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan D a r a t d a l a m S a t u Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	1	75.815.088	1	15.135.848						1	15.135.848	100	20	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
36		032503201002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	4	64.300.000		0						0	0	0	0	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
37		032503202	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kelompok nelayan yang terfasilitasi (Dengan Satuan:laporan)	3	53.700.000		0		0		0		0	0	0	0	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
38		032503202003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Dengan Satuan:Unit Usaha)	250	53.700.000		0						0	0	0	0	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
39		032503203	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Tempat Pelayanan Pelelangan hasil Perikanan (Dengan Satuan:layanan)	1	65.881.588	1	13.135.848		0		0		0	1	13.135.848	100	20	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
40		032503203002	P e l a y a n a n Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dengan Satuan:Layanan)	1	65.881.588	1	13.135.848							1	13.135.848	100	20	KASI PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																**17,771**	**10,886**		
PREDIKAT KINERJA																			
41	-	032504	**P R O G R A M P E N G E L O L A A N PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan produksi perikanan Budidaya (Dengan Satuan:ton)**	**850**	**796.765.864**	**67,67**	**85.359.240**		**0**		**0**		**0**	**68**	**85.359.240**	**8**	**11**	**P E R I K A N A N BUDIDAYA**
				Cakupan bidang kelompok perikanan budidaya (Dengan Satuan:%)	**96**		**35,00**								**35**		**36**		**P E R I K A N A N BUDIDAYA**
42		032504202	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembinaan Kelompok (Dengan Satuan:kali)	25	29.800.000		0		0		0		0	0	0	0	SUB KOORDINATOR BINA USAHA PERIKANAN
44		032504202004	P e m b e r i a n P e n d a m p i n g a n , Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan I n f o r m a s i , S e r t a Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Kelompok)	20	29.800.000		0						0	0	0	0	SUB KOORDINATOR BINA USAHA PERIKANAN
47		032504204	P e n g e l o l a a n Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Dengan Satuan:dokumen)	1	766.965.864	1	85.359.240		0		0		0	1	85.359.240	100	11	SUB KOORDINATOR PEMBENIHAN IKAN DAN KESEHATAN IKAN
48		032504204001	Penyediaan Data dan I n f o r m a s i Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	96.275.088	1	15.635.848							1	15.635.848	100	16	SUB KOORDINATOR S A R A N A D A N PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA
49		032504204002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	1	670.690.776	1	69.723.392							1	69.723.392	100	10	SUB KOORDINATOR PEMBENIHAN IKAN DAN KESEHATAN IKAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																**22,210**	**10,713**		
PREDIKAT KINERJA																			

50	-	032506	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Angka Konsumsi Ikan kg/kapita /tahun	**69,73**	**106.379.281**	**18,50**	**0**		**0**		**0**		**0**	**19**	**0**	**27**	**0**	**PERIKANAN TANGKAP**
				Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan kemanan pangan (Dengan Satuan:%)	**56**	**106.379.281**	**15**	**0**		**0**		**0**		**0**	**15**	**0**	**27**	**0**	**PERIKANAN TANGKAP**
51		032506201	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan (Dengan Satuan:dokumen)	1	106.379.281		0		0		0		0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR BINA USAHA PERIKANAN
52		032506201001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Dokumen)	1	106.379.281		0							0	0	0	0	SUB KOORDINATOR BINA USAHA PERIKANAN
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**26,531**	**0,000**	
												PREDIKAT KINERJA							
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)					**29,397**	**11,571**	
												PREDIKAT KINERJA							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	**1. untuk mengatasi tingginya harga pakan digunakan pakan alternatif seperti maggot,belicot, daun kelor dll melalui pembuatan pakan ikan mandiri, mengatasi penyakit ikan dengan melakukan pembinaan CPIB.**
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	**1. rendahnya target budidaya disebabkan ada beberapa pembudidaya tidak beroperasional disebabkan tingginya harga pakan,dan cuaca ekstrim sehingga menyebabkan banyak penyakit dan kematian ikan 2. karena efisensi anggaran dari pusat maka untuk angka konsumsi ikan perhitungan dilakukan oleh dkp prov berdasarkan data susenas.**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2025 triwulan I Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 4 (empat) Program, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan rata-rata capaian kinerja :
   - Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai) :nol (belum ada penilaian)
   - Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai) :71,20

   yang dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

  Indikator :Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan

2. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

  Indikator :Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi

3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

  Indikator:Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

  Indikator :Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

  Indikator :Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

- Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

  Indikator :Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

4. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik

  Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

  Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

  Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani

5. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

  Indikator : Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan

  Indikator : Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara

- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

  Indikator : Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara

2. **Program Pengolahan Perikanan Tangkap** dengan rata-rata capaian kinerja :

   - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)165,646 ton
   - Cakupan bina kelompok perikanan tangkap (Dengan Satuan:%) :17 %

     yang dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Pengolahan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
  Indikator :Jumlah dokumen yang tervalidasi
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  Indikator : Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia

2. **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
  Indikator : Jumlah Kelompok Nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan

3. **Pengolahan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  Indikator : Jumlah UPT TPI yang beroperasi

3. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** dengan rata-rata capaian kinerja :

- Peningkatan produksi perikanan Budidaya (Dengan Satuan:ton) 67,67 Ton
- Cakupan bidang kelompok perikanan budidaya (Dengan Satuan:%) :35%

  yang dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**

- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
  Indikator : Jumlah pokdakan yang mendapat pendampingan

2. **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**

- Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota

- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

  Indikator: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. **Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan** dengan rata-rata capaian kinerja :
   - Angka konsumsi Ikan (AKI) dengan satuan kg/kapita/tahun realisasi TW I :18,5
   - Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan kemanan pangan (Dengan Satuan:%) 15 %

   1. **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**

   - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota berdasarkan skala usaha dan resiko.

     Indikator : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan

Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

i. Menurunnya produksi perikanan tangkap
ii. Menurunnya produksi perikanan budidaya
iii. Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan budidaya.

iv. Belum optimalnya produktivitas pengolahan hasil perikanan serta legalitas produk hasil perikanan dan ,masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan.

v. Masih adanya anak2 terdampak stunting di Lokus Kota Pangkalpinang

Permasalahan Pelayanan **Perangkat Daerah**	**Faktor**	
	Penghambat	**Pendorong**
. 1. Pelimpahan wewenang sesuai dgn uu no 23 tahun 2014 belum tuntas sampai dengan sekarang dan kewenangan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan belum diserahkan ke kabupaten Kota 2. urusan ke pelabuhan seperti rekomendasi BBM masih dilaksanakan kab/kota dan belum adanya dasar hukum yang mengatur pembelian BBM penugasan(pertalite) utk nelayan motor temple 3. Peruntukan kawasan perikanan baik lahan dan kolong belum dipetakan secara jelas dan Maraknya alih fungsi lahan budidaya untuk kegiatan non budidaya. 4. Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik)	1. Belum adanya kejelasan terkait Kewenangan Pengelolaan TPI antara Provinsi Babel dan Kabupaten/Kota dan Belum adanya UPT PPP (Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai)Muara Batu Rusa supaya penyelenggaraan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan dapat terlaksana dan optimal 2. Lambatnya proses penyelesaian /penyerahan terkait Pengelolahan TPI 3. Tidak ada payung hukum wilayah dan zonasi untuk perikanan budidaya sehingga tidak beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman atau kawasan industri 4. Penerapan CBIB yang belum optimsl sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit ikan.	1. Dikeluarkannya perda provinsi tentang pembentukan pelabuhan Perikanan pantai muara sungai batu rusa bahwa pelimpahan wewenang yang seharusnya dilaksanaka oleh provinsi babel bukan dlaksanakan oleh Kabupaten/Kota 2. dikeluarkannya peraturan BPH Migas khusus mengatur pembelian BBM penugasan(Pertalite) Khusus Bagi nelayan 3. Adanya komitmen dari pemerintah Kota Pangkalpinang untuk perikanan agar tidak terjadi pengurangan areal untuk perikanan 4. Adanya peningkatan kebutuhan benih ikan di kota Pangkalpinang dan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat dijadikan sebagai

5. Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan 6. Belum berkembangnya diversifikasi pengolahan hasil pengolahan untuk menambah nilai tambah produk pengolahan hasil perikanan. 7. Masih adanyanya anak-anak stunting di Lokus kota Pangkalpinang 8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi bagi Masyarakat Khususnya Nelayan, Pembudiaya Ikan dan Pelaku Usaha terkait informasi dan data perikanan	5. Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana 6. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan bagi pengusaha/ POKLAHSAR hasil perikanan untuk melaksanakan prinsip pengolahan ikan yang baik dan benar 7. Kurangnya minat anak-anak untuk mengkonsumsi ikan 8. Kurangnya pemahaman tentang teknologi infromasi bagi Masyarakat Khususny Nelayan, Pembudidaya ikan dan pelaku usaha	sentra penghasil benih ikan berkualitas di Kota Pangkalpinang 5. Pemberian bantuan Sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan. 6. Adanya kebutuhan pasar yang tinggi untuk produk hasil pengolahan ikan sehingga diperlukan Bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengusaha/POKLAHSAR dan Adanya fasilitasi dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha produk pengolahan Hasil perikanan 7. Mengadakan Sosialisasi 1 Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) di Lokus Stunting di Kota Pangkalpinang 8. Mengadakan Pelatihan dan membuat inovasi terkait teknologi informasi

Kekuatan (Stength)
1. Tersedianya landasan hukum yang jelas dan mengacu pada bidang Perikanan
2. Tersedianya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) tenaga perikanan
3. Adanya pendanaan bagi pelaksanaan urusan Perikanan
4. Tersedianya layanan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung .

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan

Dalam penyusunan rencana kerja perubahan Dinas Kelautan dan PerikananTahun 2025 dilakukan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah. Rincian isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
2. Belum optimalnya produktivitas pengolahan hasil perikanan serta legalitas produk hasil perikanan dan ,masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan;
3. Keterbatasan akses sumber data, sehingga keakuratan data perikanan masih harus disempurnakan;
4. Masih rendahnya Sumber DayaManusia (SDM) perikanan;
5. Masih seringterjadiperusakan wilayah pesisir dan sumberdaya ikan oleh masyarakat;
6. Mutu hasil tangkapan masih rendah;
7. Iklim yang tidak menentu, sehingga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN APBD TAHUN 2025

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan perikanan 2024-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang untuk OPD Pengampu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah Tujuan 2 yaitu : "Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraaan Masyarakat yang berdaya saing" dengan indikator tujuan Tingkat kemiskinan. Dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang untuk OPD Pengampu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah Sasaran 5 yaitu :Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator sasaran Gini Rasio.

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang TAhun 2024-2026 adalah

1. Meningkatkan Nilai TukarNelayan (NTN).
2. Meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)

Dengan Indikator Tujuan

1. Nilai Tukar Nelayan /NTN (%)

2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan /NTPI (%)

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah sebaga iberikut:

1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap (%)
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya (%)
3. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan /AKI (kg/kapita/Tahun)

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang TAhun 2024-2026 dapat dilihat hubungan tujuan dan sasaran RPD dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Renstra Dinas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Target		
						2024	2025	2026
RPD Kota Pangkalpinang								
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup	Tingkat kemiskinan					4,25	4,2	4,15
		Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini ratio			0.243	0,235	0,233
Renstra Dinas Kelautan dan								

Perikanan								
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			Jumlah Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan / Target Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan x 100%	%	113,77	114,05	114,34
		Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap tahun berkenaan(ton) / Target produksi tangkap tahun berkenaan (ton) x 100%	%	90,90	90,91	90,91
		Meningkatnya angka konsumsi ikan	angka konsumsi ikan per tahun	jumlah konsumsi ikan (kg)/target konsumsi ikan tahun berkenaan x 100%	%	98,02	98,04	98,33
Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)			Jumlah Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan / Target Nilai Tukar tahun berkenaan x 100%	%	92	92,5	93
		meningkatnya produksi perikanan budidaya	produksi perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya tahun berkenaan (ton)/target produksi ikan budidaya tahun berkenaan (ton) x 100%	%	95	96,47	100

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai

dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah

1. Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

b.Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalahsebagaiberikut:

1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap (%)
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya (%)
3. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan/AKI (%)

3.2 Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Program yang mengalami perubahan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 diantaranya adalah :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
    2. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

      Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
    3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

      Indikator:Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

  Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

  Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

  Indikator :Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik

  Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

  Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

  Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

  Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan

  Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

  Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2. **Program Pengolahan Perikanan Tangkap** dengan kegiatan sebagai berikut :

   1. **Pengolahan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

   - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

     Indikator : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia

   - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

     Indikator : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia

   2. **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**

   - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

     Indikator : Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

   3. **Pengolahan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

   - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

     Indikator : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** yang dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

   1. **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**

   - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Indikator : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2. **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**

- Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota

  Indikator : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. **Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan** dengan kegiatan sebagai berikut :

   1. **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**

   - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota berdasarkan skala usaha dan resiko.

     Indikator : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko

dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							5.516.742.005,00	4.627.946.631,00	4.861.434.134,60							5.820.079.950,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.516.742.005,00	4.627.946.631,00	4.861.434.134,60							5.820.079.950,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							5.516.742.005,00	4.627.946.631,00	4.861.434.134,60							5.820.079.950,00	
1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah				69,780 Nilai Nilai	69,780 Nilai Nilai	4.534.593.175,00	3.465.104.810,00	3.691.160.550,60							4.755.014.202,00	
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	-			100 %	100 %	2.723.846.675,00	2.411.498.377,00	2.411.498.377,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		2.852.659.296,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.723.846.675,00	2.411.498.377,00	2.867.791.335,60	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			2.852.659.296,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-			-50 %	-50 %	140.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00			-	Percepatan Penanganan Kemiski	-		147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

																		nan Ekstrem				
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	4 Orang	140.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	240.526.500,00	214.215.905,00	214.215.905,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		244.450.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.547.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			2.143.050,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	29.358.500,00	29.358.500,00	17.115.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			31.307.850,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.621.000,00	8.678.500,00	6.579.250,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	174.631.905,00	76.191.209,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	-			100 %	100 %	29.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		60.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	29.400.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			60.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	563.270.000,00	471.617.136,00	471.617.136,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		553.094.006,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			75.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.850.000,00	8.850.000,00	14.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			5.512.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	482.420.000,00	390.767.136,00	375.563.364,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			471.981.506,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	837.550.000,00	339.773.392,00	339.773.392,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		896.910.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.810.000,00	61.981.696,00	61.981.696,00	Kota Pangkalpinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			42.052.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	152.720.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kota Pangkalpinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			182.857.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3 Unit	641.020.000,00	252.291.696,00	172.291.696,00	Kota Pangkalpinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			672.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan bina kelompok perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				1649.3366,67 Ton %	66,671649.33 % Ton	179.956.000,00	259.696.676,00	244.371.520,00							223.078.275,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah data dan sarana prasarana usaha perikanan tangkap	-			1 Dokumen	1 Dokumen	113.812.500,00	140.115.088,00	140.115.088,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		95.475.975,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

						Daerah Kabupaten/ Kota																
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	42.450.000,00	75.815.088,00	60.489.932,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			20.212.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				85 Unit	4 Unit	71.362.500,00	64.300.000,00	64.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			75.263.475,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kelompok nelayan yang terfasilitasi	-			3 Kali	1 Laporan	58.150.000,00	53.700.000,00	53.700.000,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		121.317.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	58.150.000,00	53.700.000,00	53.700.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			121.317.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya tempat pelelangan hasil perikanan	-			1 Layanan	1 Layanan	7.993.500,00	65.881.588,00	65.881.588,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		6.285.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																

							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	7.993.500,00	65.881.588,00	65.881.588,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			6.285.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan Budidaya Cakupan bidan kelompok perikanan budidaya				85096 Ton %	85096 Ton %	695.313.549,00	796.765.864,00	849.602.064,00							688.079.228,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembinaan Kelompok	-			25 Kali	25 Kali	313.655.821,00	29.800.000,00	29.800.000,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		336.394.612,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	20 Kelompok	313.655.821,00	29.800.000,00	22.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			336.394.612,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	381.657.728,00	766.965.864,00	766.965.864,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		351.684.616,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	54.660.000,00	96.275.088,00	84.145.088,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			50.337.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	326.997.728,00	670.690.776,00	743.156.976,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			301.347.616,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan kemanan pangan				55 %	55 %	106.879.281,00	106.379.281,00	76.300.000,00							153.908.245,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	106.879.281,00	106.379.281,00	106.379.281,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		153.908.245,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	106.879.281,00	106.379.281,00	76.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			153.908.245,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	JUMLAH												**5.516.742.005,00**	**4.627.946.631,00**	**4.861.434.134,60**							**5.820.079.950,00**	

BAB IV
PENUTUP

4.1 Penutup

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 bertujuan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2025. Dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat diketahui capaian target dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan tahun yang berjalan. Sehingga dapat diketahui pencapaian kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) dan dilakukan percepatan pencapaian target yang belum tercapai pada tahun selanjutnya.

Seluruh elemen pelaksana di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan ini. Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan,pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yangdilaksanakanoleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja. Adanya perubahan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Perubahan ini merupakan program

dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaanya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalampenyusunan Rencana Kerja Perubahan di masa mendatang akan lebih baik.

Pangkalpinang, 29 Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang

Dr. DAVID OKTAVIANDI,.SP.,MT
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP. 197410262002121004

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(R E N J A)

TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Bahwa berdasarkan Pasal 343 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ditetapkan dengan Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 28 April 2025. Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang.

Pada tahun 2025 adanya aturan yang membuat perubahan besar dalam RKPD, aturan tersebut adalahInpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Keputusan Menteri Keuangan No.29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi / Kabupaten / Kota TA 2025 dalam rangka efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD dan APBDTA 2025. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900 / 833 / SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra BPBD Kota Pangkalpinang) ke dalam rencana, program, dan penganggaran. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD

dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita kedalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas Pembangunan serta menjamin efektivitasdan efisiensi perencanaan di Kota Pangkalpinang sehingga dapat menghasilkan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukannya. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam bekerja serta dalam membangun Kota Pangkalpinang.

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

DEDY REVANDI, SH, MH
PEMBINA TK.I/IVb
NIP. 197609192002121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
BAB I 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan 10
BAB II 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I BPBD 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19
2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan OPD 19
2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD 20
BAB III 22
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 26
3.2.1. Tujuan 26
3.2.2. Sasaran 26
BAB IV 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang juga Menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang menyusun rencana guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, karena pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara Bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku Pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;

2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan, serta RPD kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir RPJPD Kota Pangkalpinang. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pemerintah Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku Pembangunan, tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta Masyarakat dalam pencapaian tujuan Pembangunan Kota Pangkalpinang.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita kedalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun untuk memberikan arah dalam perencanaan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan Masyarakat utamanya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, karena pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 219 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBDTA 2025;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemdbangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);

24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 57);
27. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224);
28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);
29. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 246);
30. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 252);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana kerja (Renja) ini adalah untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rancangan kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025. Serta berpedoman pada ketentuan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2025 Tentang Pedoman

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ini dimaksudkan juga sebagai pedoman untuk melaksanakan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang sangat penting dan menunjang untuk dilaksanakan hingga akhir (Desember) pada tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah terwujudnya Dokumen Rencana Kerja Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Pembangunan Daerah dan untuk memasukkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang ada untuk direncanakan dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) .

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistimatika Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI RENCANA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I BPBD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja BPBD
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I BPBD

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan I Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini (terlampir).

TABEL 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA)

PERANGKAT DAERAH BPBD KOTA PANGKALPINANG

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					I		II		III		IV					
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)**	**90**	**3,645,960,863**	**80**	**968,332,126**		**0**		**0**		**0**	**80**	**968332126**	**89**	**27**
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	**72.000**		**70.450**								**70**		**98**	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0	25	0		0		0		0	25	0	25	#DIV/0!
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0	1	0							1	0	50	#DIV/0!

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	0	2	0							2	0	100	#DIV/0!
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	1	0							1	0	100	#DIV/0!
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3,177,407,491	25	892,115,618		0		0		0	25	892115618	25	28
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	27	3,177,407,491	26	892,115,618							26	892115618	96	28
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	1	0							1	0	100	#DIV/0!
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:orang)	27	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	130,841,500	25	21,379,293		0		0		0	25	21379293	25	16
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	3,080,500	1	1,192,500							1	1192500	100	39
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	16,482,000	1	5,734,000							1	5734000	100	35
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	11,279,000	1	4,024,000							1	4024000	100	36

16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	6	100,000,000	1	10,428,793							1	10428793	17	10
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	274,780,176	25	43,440,955		0		0		0	25	43440955	25	16
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	97,000,000	1	10,097,875							1	10097875	100	10
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	17,200,000	1	6,500,000							1	6500000	100	38
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	160,580,176	1	26,843,080							1	26843080	100	17
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	62,931,696	25	11,396,260		0		0		0	25	11396260	25	18
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	51,931,696	1	8,516,260							1	8516260	100	16
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	1	11,000,000	1	2,880,000							1	2880000	100	26
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!

26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
															93.368	26.559
27	**P R O G R A M PENANGGULANGAN BENCANA**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Dengan Satuan:orang)**	**6,000**	**3,519,797,827**	**0**	**582,833,931**		**0**		**0**		**0**	**0**	**582833931**	**0**	**17**
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan p e n c e g a h a n d a n kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:ORANG)	**500**		**0**								**0**		**0**	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Dengan Satuan:ORANG)	**600**		**0**										**0**	
		Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	**6**		**0**										**0**	
28	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Dengan Satuan:%)	100	50,000,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0
29	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Dengan Satuan:orang)	525	50,000,000	0	0							0	0	0	0
30	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana (Dengan Satuan:orang)	500	100,000,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0

31	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:keluarga)	60	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Dengan Satuan:kawasan)	3	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Dengan Satuan:orang)	100	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	100,000,000	0	0							0	0	0	0
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
35	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam (Dengan Satuan:orang)	600	3,369,797,827	0	582,833,931		0		0		0	0	582833931	0	17
36	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Dengan Satuan:Orang)	600	3,245,027,827	0	582,833,931							0	582833931	0	18
37	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	400	124,770,000	0	0							0	0	0	0

		Korban Bencana (Dengan Satuan:Orang)															
38	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pencapaian Tata Kelola Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	6	0	0	0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!
39	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
40	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
41	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Dengan Satuan:kegiatan)	1	0	0	0							0	0	0	#DIV/0!
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															**0.000**	**16.559**
PREDIKAT KINERJA																
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																
PREDIKAT KINERJA																

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk Menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025, dengan ketentuan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Nomor. 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila adanya perkembangan yang tisak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, serta Surat Walikota Pangkalpinang Nomor 900/107/BAKEUDA/IV/2025 tanggal 21 april 2025 perihal Refocusing dan Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah

Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana/Kepala Pelaksana
4. Sekretaris, membawahi subbagian dan jabatan pelaksana yaitu: Sub bagian Umum dan Kepegawaian serta Jabtan Pelaksana (Penelaah Teknis Kebijakan).
5. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan (PK2) membawahi beberapa Jabatan Pelaksana yaitu: Analis Mitigasi Bencana, Analis Bencana, Penyusun pemberian Bantuan Teknis.
6. Bidang Rekontruksi, Rehabilitasi dan Logistik (RRL) membawahi beberapa Jabatan Pelaksana yaitu: Analis Kerusakan fisik dan Bangunan, Analis Rehabilitasi Masalah Sosial, Pengelola Data Dampak Bencana, Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan OPD

Kota Pangkalpinang berdasarkan data yang ada mempunyai 6 potensi bencana alam berupa: kebakaran hutan dan lahan, banjir, genangan air, angin puting beliung, kekeringan dan longsor. Walaupun Kota Pangkalpinang adalah daerah yang terbilang aman bencana, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap memberikan pelayanan terutama menyangkut Standar Pelayanan Minimal dalam penanggulangan bencana.

Karakteristik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Upaya tersebut akan dijabarkan dalam pemberian layanan kepada masyarakat diantaranya dengan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan tersebut akan didukung dengan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Sehingga diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, mampu meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang merupakan OPD yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pangkalpinang antara lain:

a. Dalam aspek Kelembagaan

Secara organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang kurang selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini menjadikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan kurang maksimal sesuai amanat undang-undang yang mempengaruhi kinerja institusi.

b. Dalam aspek Ketugasan

1) Perlunya peningkatan kompetensi petugas (sumber daya manusia) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
2) Belum adanya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, yang menjadi dokumen penting.
3) Masih kurangnya informasi kepada Masyarakat tentang kebencanaan.
4) Perlunya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada Masyarakat, maupun petugas.
5) Belum tersedianya data-data yang akuntabel, maupun informasi yang dapat dihimpun secara akurat ssebagai bahan maupun acuan untuk mengevaluasi, maupun menentukan strategi atau pun kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang.

Isu penting yang menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang diantaranya sebagai berikut :

a. Perlunya peningkatan layanan informasi rawan bencana kepada masyarakat, dengan harapan seluruh masyarakat mengetahui informasi terkait kebencanaan;
b. Perlunya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
c. Perlunya respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit, dengan mendukung kebijakan yang diambil Pemerintah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2014. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rencana strategis Transisi tahun 2024-2026 memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional di Indonesia ialah melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Ketahanan Bencana melalui Penguatan Sstem Peringatan dini multi ancaman bencana terpadu, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam renstranya memfokuskan pada kegiatan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sasaran yang akan dicapai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Menurunnya risiko bencana didaerah rawan bencana,
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan hasil telaahan BNPB dan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui focus penyelenggaraannya masing-masing, maka terdapat irisan yang merupakan keselarasan antara fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Pangkalpinang dengan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun BNPB dan Kementerian Dalam Negeri di Tingkat pusat, yang pada akhirnya menjadi faktor pendorong pelaksanaan program/kegiatan oleh BPBD Kota Pangkalpinang.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan

kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya mengatur tentang pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terdiri atas:

a. Pelayanan informasi rawan bencana;
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan kebencanaan tersebut diatas wajib diselenggarakan oleh pemerintah bagi Masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, yang sudah ditentukan mengenai target/sasaran serta indikatornya.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantabkan tata kelola penyelenggaraan penaggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ingin dicapai yaitu:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.

4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, Mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan sumber daya manusia.
   Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta gelobal.
2. Pembangunan Infrastruktur.
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan praduksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi.
   Menyerderhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan yang kedua Undang-Undang pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi.

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi.

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBDTahun Anggaran 2025, dalam rangkamenyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut ara kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan nahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPD. Maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada RPD 2024-2026. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah Mengefektivitaskan tingkat waktu tanggap (response time rate) Penanganan Bencana. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula / Rumus Indikator	Satuan	Capaian Indikator kinerja		Target Indikator Kinerja		
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		Nilai	0,36	0,39	0,40	0,41	0,42
Mengefektivitaskan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanganan bencana	Rata-rata Tingkat waktu Tanggap (*respon time rate*) Penanganan Bencana Alam	Jumlah waktu penanganan bencana kurang dari 1 jam dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100%	%	100	100	100	100	100

TABEL 3.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	3	4	8	9	10	11	12	14
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				6.706.218.811,00	7.165.758.690,00	6.982.017.148,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.706.218.811,00	7.165.758.690,00	6.982.017.148,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.706.218.811,00	7.165.758.690,00	6.982.017.148,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	72 90 Nilai Nilai	72 90 Nilai Nilai	5.214.790.411,00	3.645.960.863,00	3.616.005.316,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	11.484.000,00	0,00	0,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	8.889.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.095.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	100 %	3.318.602.811,00	3.177.407.491,00	3.177.407.491,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.311.510.811,00	3.177.407.491,00	3.212.011.172,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.092.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	27 Orang	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	377.373.500,00	130.841.500,00	130.841.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.080.500,00	1.538.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	105.950.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	52.023.500,00	16.482.000,00	9.622.500,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.400.000,00	11.279.000,00	5.633.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100 %	100 %	576.509.100,00	0,00	0,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	482.582.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	93.927.100,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	546.641.000,00	274.780.176,00	274.780.176,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	4 Laporan	92.850.000,00	97.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan	28.291.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan	425.500.000,00	160.580.176,00	174.068.948,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	384.180.000,00	62.931.696,00	62.931.696,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	51.931.696,00	51.931.696,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	1 Unit	135.830.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	190.350.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	500 6000 600 6 Orang Orang Orang Dokumen	500 6000 600 6 Orang Orang Orang Dokumen	1.491.428.400,00	3.519.797.827,00	3.366.011.832,00	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	100 %	76.325.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)							

		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	525 Orang	525 Orang	76.325.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana	500 Orang	500 Orang	747.168.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	60 Keluarga	84.920.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	3 Kawasan	150.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							

		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	100 Orang	182.698.500,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	2 laporan	29.550.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	600 Orang	600 Orang	591.379.900,00	3.369.797.827,00	3.369.797.827,00	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0 Orang	600 Orang	252.110.000,00	3.245.027.827,00	3.112.991.832,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Orang	400 Orang	339.269.900,00	124.770.000,00	103.020.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pencapaian Tata Kelola Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana	6 Dokumen	6 Dokumen	76.555.000,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							

		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan	11.780.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.775.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
					6.706.218.811,00	**7.165.758.690,00**	**6.982.017.148,00**	

BAB IV
PENUTUP

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025 ini melalui tahap–tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan semua bidang yang ada di Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, sehingga materi telah terkoordinasikan secara optimal.

Penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini adalah tindak lanjut dari dokumen rencana kerja sebelum perubahan dan merupakan pejabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dengan adanya RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang ini pun diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Mei 2025
Kepala Pelaksana Harian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pangkalpinang,

Dedy Revandi,S.H, M.M
Pembina Tk.I/IVb
Nip.197609192002121005

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA)
TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Rasakunda Pangkalpinang Telp. (0717) 431476

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : / KEP / KESBANGPOL / V / 2025

T E N T A N G

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Kerja (RENJA);

b. bahwa RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangaunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 TentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 64020;

6. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

14. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);

15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinanag Tahun 2023);

16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran RKPD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277); Tanggal 27 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA Tugas Panitia Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua bertugas menghimpun seluruh data dan menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025 sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Mei 2025

KEPAL KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON.AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750522 199311 1 0

.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : / KEP/KESBANGPOL/ V / 2025
TANGGAL : Mei 2025

1.	Penanggungjawab	:	Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
2.	Ketua	:	Sekretaris Kesbangpol Kota Pangkalpinang
4.	Sekretaris	:	Analisis Anggaran dan Keuangan
5.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ekonomi 4. Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON.AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750522 199311 1 001

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang *1*

1.2 Landasan Hukum *2*

1.3 Maksud dan Tujuan *5*

1.4 Sistematika Penyusunan *6*

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA **8**

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD *8*

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu Capaian Renstra SKPD ..... *,9*

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD *11*

BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN **13**

3.1 Tujuan dan Sasaran *13*

3.2 Program dan Kegiatan *14*

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

BAB V PENUTUP **45**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, aparatur di Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam penyusunan Rencana Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 -2026.

Sebagaimana kita ketahui bersama, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang melalui berbagai kegiatan tahunan. Rancangan Rencana Kinerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2024 - 2026 menguraikan program, rencana kegiatan dan sasaran tahunan berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dalam rangka mencapai tujuan dan misi.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2024 -2026 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa *(clean and good governance)* serta berorientasi kepada hasil *(result oriented)* sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Rencana Kerja Perubahan I Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2024 -2026 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran.

Akhir kata, semoga dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2024 -2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi. bahwa dokumen ini belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, saran dan masukan yang konstruktif untuk pelaksanakan tugas di masa mendatang sangat diharapkan.

PANGKALPINANG, Mei 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON,AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19750522 199311 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinanng Tahun 2025 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025.

Renja Perangakat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Untuk itu dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektifitas dan efesiensi perencanaan di Kota Pangkalpinang, sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa *(clean and good governance)* serta berorientasi kepada hasil *(result oriented government)* sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini pun pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan I Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini

merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun tersebut. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya.

Sedangkan sasaran tahunan, ditetapkan setiap tahun yang disesuaikan dengan kondisi eksisting di internal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang terutama dalam rangka mengakomodir kebutuhan pihak-pihak terkait dalam hal ini yang dijadikan sebagai kelompok sasaran baik organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan manajemen operasionalnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara subtansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan dalam RKPD;
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun 2025;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan perangkat daerah pada tahun 2025;

Dalam tataran teknisnya, RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan salah satu bagian dokumen perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Pangkalpinang tahun terkait. RKPD inilah yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi dokumen anggaran dalam bentuk APBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangaunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55837), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinnag Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinanag Tahun 2023);
17 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran RKPD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277); Tanggal 27 Mei 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun tersebut, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah :

1) Memberikan kerangka operasionaliasi arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berisi sasaran dan kebijakan daerah serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat

pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;

2) Mewadahi aspirasi *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan kesempatan lainnya;
3) Menjadi acuan bagi bagian (unit-unit organisasi) dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan 2025 minimal memuat :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

- Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan Renstra dan RPJMD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan Renja SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD tahun rencana, kaitannya dengan Renstra, dan isu strategis

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Susunan dokumen Renja SKPD terkait pengaturan bab serta garis besar isi bab di dalamnya.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat analisis kinerja pelayanan SKPD yang diukur dengan sejumlah indikator, (spt: SPM, IKK, IKU) sesuai dengan target dalam Renstra SKPD.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kemampuan SKPD dlm melaksanakan program dan kegiatannya, identifikasi realisasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Memuat hal-hal kritis terkait pencapaian kinerja SKPD serta masalah dan hambatannya, rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dlm program dan kegiatan prioritas tahun yg direncanakan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan Sasaran SKPD

Memuat rumusan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra SKPD serta kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

3.2. Program dan Kegiatan SKPD

Memuat kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta rumusan program dan kegiatan yang telah memperhatikan RKPD dan Renja KL dengan menjelaskan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB IV : PENUTUP

- Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- Kaidah pelaksanaan yang memuat arahan Kepala SKPD dalam mempedomani Renja SKPD sebagai acuan untuk penyusunan RKA SKPD
- Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG

2.1.1 GAMBARAN KINERJA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Derah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100- 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Nomenlaktur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

2.1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Pelaksanaan urusan wajib Badan Kesbangpol tahun 2025 secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, walaupun masih ada hal teknis yang perlu mendapat perhatian untuk disempurnakan periode mendatang sehingga pelayanan dasar dapat tercapai. Badan Kesbangpol adalah Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2025, antara lain :

2.2.1 Bidang Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan 26 orang dan terealisasi 24,44%, dengan dana Rp. 2.647.784.246 dan terealisasi sebesar Rp 647.031.857,-

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang ditargetkan 7 jenis dan terealisasi 0,0%, dengan dana Rp. 2.227.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,-
2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan 20 set dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 1.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. .0.000,-
3. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang ditargetkan 688 jenis dan terealisasi 27,58%, dengan dana Rp. 56.712.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.640.000,-
4. Sub kegiatan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan yang ditargetkan 6 jenis dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 25.963.000,- dan terealisasi sebesar Rp0,-
5. Sub kegiatan penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang ditargetkan 72 kali dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,-

Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang ditargetkan 26 orang dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 41.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0
2. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan 5 unit dan terealisasi 0,%, dengan dana Rp. 8.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,-
3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ditargetkan 7 unit dan terealisasi 10,19%, dengan dana Rp. 201.938.868- dan terealisasi sebesar Rp. 20.575.156,-

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan, yang ditargetkan 11 unit dan terealisasi 4,83%, dengan dana Rp. 56.761.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.744.308,-
2. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan, yang ditargetkan 11 unit dan terealisasi 5,61%, dengan dana Rp. 48.931.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.744.308,-

2.2.2 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditargetkan 3 lap dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 379.065.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0,-
2. Pembentukan Paskibraka yang ditargetkan 36 orang dan terealisasi 0,89%, dengan dana Rp. 989.594.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.820.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahann Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

1. Sub kegiatan pelaksanaan Kebijakandi bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 1,85%, dengan dana Rp. 145.031.696 dan terealisasi sebesar Rp 2.689.308-
2. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang ditargetkan 1 lap dan terealisasi 83,33%, dengan dana Rp. 120.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,-

2.2.3 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situsasi politik

1. Sub kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala dearah serta pemantauan situasi politik di daerah yang ditargetkan 60 rekomendasi dan terealisasi 0,03%, dengan dana Rp. 26.763.539.600 dan terealisasi sebesar Rp 8.400.000,-

2. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala dearah serta pemantauan situasi politik di daerah yang ditargetkan 9 dok dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 88.530.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0,-
3. Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala dearah serta pemantauan situasi politik di daerah yang ditargetkan 4 lap dan terealisasi 11,69%, dengan dana Rp. 27.271.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.189.308,-

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

1. Sub kegiatan koordinasi di bidang pendataan Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah yang ditargetkan 60 ormas dan terealisasi 11,27%, dengan dana Rp. 31.171.696 dan terealisasi sebesar Rp. 3.514.308,-

2.2.4 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

1. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lemabga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan knflik di daerah yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 8,06%, dengan dana Rp. 305.386.288 dan terealisasi sebesar Rp. 24.600.000
2. Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lemabga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 85.406.112 dan terealisasi sebesar Rp. 0
3. Sub kegiatan pelaksanaan Forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten / kota yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 156.794.300 dan terealisasi sebesar Rp. 0

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI SKPD

Salah satu faktor dan aktor utama terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah performa atau postur birokrasi yang mapan dan responsif, karena dalam posisi dan perannya yang begitu strategis maka dalam konteks sistem administrasi negara,

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditopang oleh aparatur yang profesional akan melahirkan model penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan bersih serta berorientasi kepada kinerja dan hasil.

Tugas pokok dan fungsi sangat diperlukan sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam memberikan *output* kepada kelompok sasaran secara menyeluruh. Berkenaan dengan sasaran dan target yang tercantum dalam RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang juga menjadi bagian dalam representasi visi dan misi kepala daerah serta rencana strategis SKPD (RENSTRA SKPD), maka pemahaman Tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD dan aparatur pelaksananya sebagai ujung tombak didalam pencapaian target yang telah ditetapkan merupakan hal yang sangat penting.

Dalam kaitan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) telah menggarisbawahi akan pentingnya tugas, pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai titik sentral di dalam menjalankan fungsi-fungsi layanan publik yang amanah dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana kerja (Renja) SKPD yang telah dibuat.

Implementasi pelayanan publik dalam lingkup Administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak- hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan didasarkan kepada peraturan perundang - undangan yang ada oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya reformasi ialah penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, system, dan penataan manajemen sumber daya pegawai (PNS) termasuk tugas pokok dan fungsi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

Meningkatkan Indeks Demokrasi

b. Indikator Tujuan

Indeks Demokrasi

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

Terselesainya kasus perselisihan

b. Indikator Sasaran

Persentase kasus perselisihan antar umat beragama, antar suku bangsa, ras dan antar golongan yang diselesaikan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa da Politik Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	2024	2025	2026
Meningkatkan Indeks Demokrasi		Indeks Demokrasi	Nilai	74,80	75,00	75,15
	Terselesainya kasus perselisihan	Persentase kasus persilisihan anatar umat beragama, antar suku bangsa, ras dn antar golongan yang diselesaikan	%	100%	100%	100%

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
   - Indikator : Jumlah dokumen Renstra / Renja
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD
   - Indikator : Jumlah dokumen RKA - SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   - Indikator : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Administarsi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
   - Indikator : Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

- Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Indikator : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Tupoksi

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (PDH)

- Indikator : Jumlah Pakaian Dinas yang di Buat (dipesan)

Kegaiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- Indikator ; Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerngan Bangunan Kantor yang disediakan

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Indikator : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Indikator : Jumlah Bahan Logistic Kantor yang Tersedia

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Indikator : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan

5. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Indikator : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan

- Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan

2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Indikator : Jumlah Rapat Pokja Revolusi Mental

3. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Indikator : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bela Negara Bagi Kader PKK dan Bagi Para Pelajar

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Indikator : Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Tim Terpadu
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah
3. Pelakasanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orang Asing (WNA)
4. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik Di Daerah
   - Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FORKOPIMDA

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendataan Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di derah

- Indikator : Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan Ormas

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Indikator : Jumlah Dokumen Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah PARPOL

2. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Indikator : Jumlah Laporan Perkembangan Politik

3. Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Indikator : Jumlah Rekomendasi Diskusi Politik

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah

- Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FKUB

2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- Indikator : Jumlah Laporan Monitoring

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dalam bentuk uraian. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu kegiatan perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang di laksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Selanjutnya di sajikan secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah selama kurun satu tahun. Dalam tabel tersebut, masing – masing tujuan, sasaran, program dan kegiatan di lengkapi dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah tanda yang yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin di ubah berupa hasil pembangunan/layanan yang di peroleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

   Indikator tujuan dan sasaran yang di pilih idealnya adalah pada skala Indikator Dampak (*impact*) minimal Hasil (*outcome*). Indikator program yang dipilih idealnya pada skala Hasil (*outcome*), dan untuk indicator kegiatan yang di pilih idealnya adalah pada skala Keluaran (*output*).

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan tahun 2024 - 2026, sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Umum

Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Kegiatan Administrasi Umum

   a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   b. penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. penyediaan jasa kebersihan kantor

d. penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
e. penyediaan alat tulis kantor
f. penyediaan cetak dan penggandaan
g. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
h. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
i. penyediaan makanan dan minuman
j. rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
k. pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
l. pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
m. penyediaan alat perlengkapan kantor
n. pembuatan dan pengelolaan website
o. Penyediaan jasa surat menyurat
p. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pns
q. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
r. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
s. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
t. Penyediaan peralatan rumah tangga
u. Penyediaan bahan logistic kantor
v. Pengadaan mobil jabatan
w. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
x. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
y. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
z. Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas
aa. Pengadaan peralatan gedung kantor
bb. Pengadaan mebeleur
cc. Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan
dd. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
ee. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
ff. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
gg. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
hh. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perlengkapan rumah jabatan / dinas
ii. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan gedung kantor
jj. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas
kk. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

ll. Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

mm. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan

nn. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas

oo. Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor

pp. Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan

qq. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional

2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan

a. penyusunan laporan keuangan semesteran

b. penyusunan laporan keuangan akhir tahun

c. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

d. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

e. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

f. Penyediaan administrasi pelaksnaan tugas ASN

g. Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi

h. Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan

i. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah

a. penyusunan RENJA (RKT,RKA dan DPA)

b. penyusunan SPIP

c. Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah

d. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan

e. Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah

f. Koordinasi dan sinkronisasi perencanan perangkat daerah

g. Evaluasi kinerja perangkat daerah

4. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. pendidikan dan pelatihan formal

b. Pengadaan mesin / kartu absensi

c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Pengadaan pakaian kerja lapangan

e. Pengadaan pakaian korpri

f. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tetentu

g. Pemulangan pegawai yang pensiun
h. Pemulangan pegawai yangtewas dalam melaksanakan tugas
i. Pemindahan tugas ASN
j. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
k. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

5. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

6. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
c. Pelaksanaan kebijkan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

7. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

   Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial dan Budaya

   a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
   b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
   c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
   d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
   e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

8. **Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

   Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Poitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah sertaPemantauan Situasi Politik

a. Penysunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
b. Penysunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
c. Pelaksnaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapoaran di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

9. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
   Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   a. Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
   b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
   c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
   d. Pelaksnaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.434.811.493,00	7.251.157.894,00	32.509.551.684,10							10.895.462.600,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.434.811.493,00	7.251.157.894,00	32.509.551.684,10							10.895.462.600,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.434.811.493,00	7.251.157.894,00	32.509.551.684,10							10.895.462.600,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah				74,3085 Nilai Nilai	74,3085 Nilai Nilai	4.374.532.793,00	3.160.809.506,00	3.378.758.840,10							6.096.500.000,00	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah SAP	-			100 %	100 %	3.585.011.293,00	2.647.784.246,00	2.647.784.246,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		5.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26/12 Orang /bulan	26/12 Orang /bulan	3.585.011.293,00	2.647.784.246,00	2.901.230.136,10	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			5.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	191.195.000,00	155.943.000,00	155.943.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		296.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.200.600,00	2.227.300,00	1.113.900,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.560.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	0 1	0 1	2. 0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	46.475.400,00	56.712.700,00	45.328.700,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2. 0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.959.000,00	25.963.000,00	20.376.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	70.000.000,00	54.495.044,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	474.886.500,00	251.388.868,00	251.388.868,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		560.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	41.200.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	425.436.500,00	201.938.868,00	200.031.168,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.		Pemelihar	Persentase	-			85 %	85 %	123.440.	105.693.	105.693.3			-	Aksel	-		240.000.000,00	BADAN

		1	1	09		aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik						000,00	392,00	92,00				erasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.050.000,00	56.761.696,00	56.761.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	83.390.000,00	48.931.696,00	48.931.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

		1	1	0 9	09															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	0 1	0 2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				100 %	100 %	1.603.449.000,00	1.368.659.000,00	1.521.895.278,00							2.100.000.000,00	
	8	0 1	0 2	2. 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan	-			100 %	100 %	1.603.449.000,00	1.368.659.000,00	1.368.659.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.	00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																

		1	2	01	03																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2200 Orang	2200 Orang	411.869.000,00	379.065.000,00	246.549.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																
							Jumlah Paskibraka				36 Orang	36 Orang	1.191.580.000,00	989.594.000,00	1.275.346.278,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua KeL	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	Persentase Peningkatan Pembinaan Serta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik				100 %	100 %	1.927.441.600,00	1.877.899.296,00	26.856.841.296,00							1.958.962.600,00	

						PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Persentase Pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik	-			100 %	100 %	1.927.441.600,00	1.877.899.296,00	1.877.899.296,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.958.962.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						Pemantauan Situasi Politik																
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.848.962.600,00	1.835.912.600,00	26.756.039.600,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan dari Pengembalian Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.848.962.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah				50	50	44.850.0	14.715.0	73.530.00	-	PENDA	-	Aksel			60.000.000,00	BADAN

							Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				Orang	Orang	00,00	00,00	0,00		PATANTRANSFER		erasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan				1 Laporan	1 Laporan	33.629.000,00	27.271.696,00	27.271.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semu	PENDAPATANTRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daer			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									a Kel/Desa			ah				
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang di Berdayakan dan di Awasi				30 %	30 %	33.629.000,00	31.171.696,00	31.171.696,00							40.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	-			30 %	30 %	33.629.000,00	31.171.696,00	31.171.696,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
							Jumlah				18	18	33.629.0	31.171.6	31.171.69	Kota	PENDA	-	Aksel			40.000.000,00	BADAN

							Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				Orang	Orang	00,00	96,00	6,00	Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PATAN TRANSFER		erasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Narkoba				80 %	80 %	177.050.000,00	265.031.696,00	231.411.696,00							200.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahana	Jumlah Laporan Monitoring	-			4 Laporan	4 Laporan	177.050.000,00	265.031.696,00	265.031.696,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						n Ekonomi, Sosial dan Budaya													Daerah				
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				80 Orang	80 Orang	57.050.000,00	145.031.696,00	121.411.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi				100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	110.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Gangguan atau Konflik yang Tertangani				100 %	100 %	318.709.100,00	547.586.700,00	489.472.878,00							500.000.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	-			100 %	100 %	318.709.100,00	547.586.700,00	547.586.700,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah																
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	50 Orang	63.442.700,00	85.406.112,00	75.406.112,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
							Jumlah				100	100	219.644.	305.386.	307.272.4	Kota	PENDA	-	Aksel			250.000.000,00	BADAN

							Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Orang	Orang	500,00	288,00	66,00	Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PATAN TRANSFER		erasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	35.621.900,00	156.794.300,00	106.794.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH												**8.434.811.493,00**	**7.251.157.894,00**	**32.509.551.684,10**							**10.895.462.600,00**	

BAB V

PENUTUP

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana kerja dalam koridor perencanaan merupakan instrumen utama yang harus dikedepankan mengingat dokumen tersebut adalah dokumen dasar dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Semua Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah merupakan pokok fikiran dan rumusan skala prioritas yang mungkin dapat diupayakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua program dan kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Pangkalpinang, Mei 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON,AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19750522 199311 001

TABEL RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024 - 2025

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Tahun 2024		Tahun 2025		
										Tahun 2018	Target	Rp	Target	Rp	
8	**01**				**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**										
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu**		**%**		**100**	**3,660,969,689**	**100**	**3,972,118,220**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun Tepat Waktu dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dikali 100%**	**%**		**100**	**200,000**	**100**	**200,000**	
8	01	01	2.01	001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Dokumen*		*1*	*50,000*	*1*	*50,000*	
8	01	01	2.01	002	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*Dokumen*		*1*	*50,000*	*1*	*50,000*	
8	01	01	2.01	006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ, LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan		*Dokumen*		*1*	*50,000*	*1*	*50,000*	
8	01	01	2.01	007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Laporan*		*1*	*50,000*	*1*	*50,000*	

8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang Tertangani dibagi Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang di Anggarkan dikali 100%**	**%**		**100**	**3,142,022,115**	**100**	**3,299,118,220**	
8	01	01	2.02	001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		*Orang/ bulan*		*38*	*3,141,922,115*	*38*	*3,299,018,220*	
8	01	01	2.02	005	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		*Laporan*		*1*	*50,000*	*1*	*50,000*	
8	01	01	2.02	007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD*	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		*Laporan*		*1*	*50,000*	*1*	*50,000*	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dikali 100%**	**%**		**90**	**145,799,800**	**90**	**175,000,000**	
8	01	01	2.09	01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*		*Unit*		*11*	*145,799,800*	*11*	*175,000,000*	
8	01	01	2.09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*		*Unit*		*11*	*145,799,800*	*11*	*175,000,000*	
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang Memenuhi Standart Kompetensi / Kualifikasi Pada Unit Kerjanya**	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani dibagi Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang di Anggarkan dikali 100%**	**%**		**100**	**28,000,000**	**100**	**25,000,000**	
8	01	01	2.05	009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		*Orang*		*24*	-	*5*	*25,000,000*	
8	01	01	2.05	002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		*Paket*		*40*	*28,000,000*	*40*	-	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di Anggarkan dikali 100%**	**%**		**100**	**76,961,284**	**100**	**189,000,000**	
8	01	01	2.06	001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		*Paket*		*1*	*2,102,177*	*7*	*4,000,000*	

8	01	01	2.06	002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		*Paket*		*1*	*640,000*	*20*	*80,000,000*	
8	01	01	2.06	004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		*Paket*		*4*	*35,823,650*	*688*	*40,000,000*	
8	01	01	2.06	005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		*Paket*		*1*	*14,195,400*	*6*	*15,000,000*	
8	01	01	2.06	009	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Laporan*		*1*	*24,200,057*	*75*	*50,000,000*	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa**	**Jumlah Layanan terpenuhi dibagi Layanan jasa yang diButuhkan dikali 100%**	**%**		**100**	**267,986,490**	**100**	**283,800,000**	
8	01	01	2.08	002	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		*Laporan*		*12*	*58,800,000*	*38*	*58,800,000*	
8	01	01	2.08	003	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		*Laporan*		*1*	*5,328,040*	*5*	*15,000,000*	
8	01	01	2.08	004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		*Laporan*		*3*	*203,858,450*	*7*	*210,000,000*	
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persesentase Pembinaan Ideologi Wawawasan Kebangsaan**		**%**		**85**	**128,396,500**	**100**	**390,000,000**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan**	**Jumlah Peserta yang Mengikuti dibagi Jumlah Penduduk yang Mengikuti dikali 100%**	**%**		**85**	**128,396,500**	**100**	**390,000,000**	
8	01	02	2.01	003	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		*Orang*		*1*	*128,396,500*	*1*	*300,000,000*	
8	01	02	2.01	002	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		*Dokumen*		*3*	-	*3*	*50,000,000*	
8	01	02	2.01	005	*Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		*Laporan*		*1*	-	*1*	*40,000,000*	

8	01	02	2.01	006	*Pembentukan Paskibraka*	Terlaksananya Pembentukan Paskibraka di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Paskibraka		*Orang*		*36*					
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**	**Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Konflik Sosial yang Dapat di Selesaikan**		**%**		**100**	**146,595,200**	**100**	**420,000,000**		
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah**	**Jumlah Peserta yang Mengikuti dibagi Jumlah Penduduk yang Mengikuti dikali 100%**	**%**		**100**	**146,595,200**	**100**	**420,000,000**		
8	01	06	2.01	003	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		*Orang*		*1*	*60,200,000*	*1*	*80,000,000*		
8	01	03	2.01	004	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*		*Orang*		*12*	*86,395,200*	*12*	*90,000,000*		
8	01	03	2.01	005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*		*Laporan*		*1*	-	*1*	*50,000,000*		
8	01	03	2.01	002	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		*Dokumen*		*1*	-	*1*	*200,000,000*		

8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah ORMAS yang terdata**	**Jumlah Ormas yang Memenuhi Persyaratan dibagi Jumlah Ormas yang Terdata dikali 100%**	**%**		**20**	**31,398,400**	**30**	**50,000,000**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah ORMAS yang terdata**		**%**		**20**	**31,398,400**	**30**	**50,000,000**	
8	01	04	2.01	005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		*Laporan*		*0*	-	*0*	-	
8	01	04	2.01	004	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		*Orang*		*1*	*31,398,400*	*1*	*50,000,000*	
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pegembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Terlaksananya Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pegembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik**	**Jumlah Peserta yang Melakukan Pendidikan Politik dibagi Jumlah Partai Politik yang Menerima Bantuan Partai Politik dikali 100%**	**Laporan**		**30**	**1,505,602,550**	**30**	**1,589,454,150**	
8	01	03	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan BidangPendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan BidangPendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Laporan Perkembangan Politik**		*laporan*		*30*	*1,505,602,550*	*30*	*1,589,454,150*	
8	01	03	2.01	005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		*Laporan*		*4*	*21,498,400*	*4*	*50,000,000*	

8	01	03	2.01	003	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		*Orang*		*450*	*1,349,454,150*	*450*	*1,349,454,150*	
8	01	03	2.01	002	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		*Dokumen*		*1*	*-*	*1*	*40,000,000*	
8	01	03	2.01	004	*Pelaksanaan koordinasidi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		*Laporan*		*4*	*134,650,000*	*4*	*150,000,000*	
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya**	**Jumlah Parameter DIEKOSOSBUD dibagi Jumlah Parameter di Buku Laporan dikali 100%**	**Laporan**		**12**	**279,628,400**	**12**	**460,000,000**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah laporan monitoring**		**laporan**		**12**	**279,628,400**	**12**	**460,000,000**	
8	01	05	2.01	004	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		*Orang*		*4*	*-*	*4*	*120,000,000*	
8	01	05	2.01	005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*		*Laporan*		*12*	*29,628,400*	*12*	*90,000,000*	

8	01	05	2.01	003	*Pelaksanaan kebijakann di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*		*Laporan*		*12*	*250,000,000*	*12*	*250,000,000*	
					TOTAL							**5,752,590,739**		**6,881,572,370**	

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Re
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik I

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada T			
							I		II	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	-	080101	**PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)**	**85**	**3,160,809,506**	**30**	**688,735,629**	**0**	**0**
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	**74.3**		**75.5**			
2		080101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah SAP (Dengan Satuan:%)	100	2,647,784,246	26	647,031,857	0	0
3		080101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	26	2,647,784,246	26	647,031,857		
4		080101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	155,943,000	1	15,640,000	0	0
5		080101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2,227,300				
6		080101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1,040,000				
7		080101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	56,712,700	1	15640000		
8		080101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	25,963,000				
9		080101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	70,000,000				
12		080101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	251,388,868	1	20,575,156	0	0
13		080101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	41,200,000				
14		080101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	8,250,000				

15		080101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	3	201,938,868	1	20,575,156		
16		080101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	85	105,693,392	2	5,488,616	0	0
17		080101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	56,761,696	1	2,744,308		
18		080101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	48,931,696	1	2,744,308		
19	-	080102	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**1,368,659,000**	**1**	**8,820,000**		**0**
20		080102201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)	100	1,368,659,000	1	8,820,000		0
21		080102201003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan:Orang)	2,200	379,065,000				
22		080102201008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Dengan Satuan:Orang)	36	989,594,000	36	8,820,000		
23	-	080103	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Peningkatan Pembinaan Serta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik (Dengan Satuan:%)**	**100**	**1,865,342,600**	**6**	**11,589,308**		**0**
24		080103201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Dengan Satuan:%)	100	1,865,342,600	6	11,589,308		0

25		080103201002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1,835,912,600	1	8,400,000		
26		080103201004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	50	14,715,000				
27		080103201005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	14,715,000	1	3,189,308		
28	-	**080104**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas/LSM yang di Berdayakan dan diawasi (Dengan Satuan:%)**	**20**	**31,171,696**	**12**	**3,514,308**		**0**
29		080104201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas (Dengan Satuan:%)	30	31,171,696	12	3,514,308		0
30		080104201004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	18	31,171,696	18	3,514,308		
31	-	**080105**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Narkoba (Dengan Satuan:%)**	**80**	**265,031,696**	**40**	**102,689,308**		**0**
32		080105201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Monitoring (Dengan Satuan:Laporan)	4	265,031,696	1	102,689,308		0

33		080105201003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80	145,031,696	20	2689308		
34		080105201005	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	120,000,000	80	100000000		
35	-	**080106**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Gangguan atau Konflik yang Tertangani (Dengan Satuan:%)**	**100**	**547,586,700**	**6**	**24,600,000**		**0**
36		080106201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah (Dengan Satuan:%)	75	547,586,700	6	24,600,000		0
				Persentase Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di BidangKewaspadaan Dini, Kerja sama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:%)	100					
37		080106201003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	50	85,406,112				
38		080106201004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	305,386,288	100	24,600,000		
39		080106201006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	156,794,300				

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DA	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 07-02-2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA P
Donal Tampubolon, AP., M.Si. NIP.19750522199

enja
Kota Pangkalpinang Tahun 2025

Triwulan tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
III		IV						
9		10		11		12		13
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
0	0	0	0	30.000	688,735,629	35.294	21.790	SEKRETARIS (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
				75.500		102		SEKRETARIS (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
0	0	0	0	26.000	647,031,857	26.000	24.437	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
				26	647,031,857	100	24.437	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
0	0	0	0	1.000	15,640,000	1.000	10.029	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				1	15,640,000	25	27.578	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
0	0	0	0	1.000	20,575,156	1.000	8.185	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

				1	20,575,156	33	10.189	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
0	0	0	0	2.000	5,488,616	2.353	5.193	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				1	2,744,308	100	4.835	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				1	2,744,308	33	5.608	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						**68.455**	**21.790**	
PREDIKAT KINERJA								
	0		**0**	**1.000**	**8,820,000**	**1.000**	**0.644**	**BIDANG IDEOLOGI, W A W A S A N KEBANGSAAN DAN K E T A H A N A N EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA**
	0		0	1.000	8,820,000	1.000	0.644	SUB KOORDINATOR I D E O L O G I D A N WAWASAN KEBANGSAAN
				0	0	0	0.000	SUB KOORDINATOR I D E O L O G I D A N WAWASAN KEBANGSAAN
				36	8,820,000	100	0.891	SUB KOORDINATOR I D E O L O G I D A N WAWASAN KEBANGSAAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						**1.000**	**0.644**	
PREDIKAT KINERJA								
	0		**0**	**6.000**	**11,589,308**	**6.000**	**0.621**	**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN O R G A N I S A S I KEMASYARAKATAN**
	0		0	6.000	11,589,308	6.000	0.621	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI

				1	8,400,000	100	0.458	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI
				0	0	0	0.000	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI
				1	3,189,308	100	21.674	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						**6.000**	**0.621**	
PREDIKAT KINERJA								
	0		**0**	**12.000**	**3,514,308**	**60**	**11.274**	**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN O R G A N I S A S I KEMASYARAKATAN**
	0		0	12.000	3,514,308	40	11.274	SUB KOORDINATOR O R G A N I S A S I KEMASYARAKATAN
				18	3,514,308	100	11.274	SUB KOORDINATOR O R G A N I S A S I KEMASYARAKATAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						**60.000**	**11.274**	
PREDIKAT KINERJA								
	0		**0**	**40.000**	**102,689,308**	**50**	**38.746**	**BIDANG IDEOLOGI, W A W A S A N KEBANGSAAN DAN K E T A H A N A N EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA**
	0		0	1	102,689,308	25	38.746	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

				20	2,689,308	25	1.854	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
				80	100,000,000	80	83.333	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						**50.000**	**38.746**	
PREDIKAT KINERJA								
	0		**0**	**6.000**	**24,600,000**	**6**	**4.492**	**B I D A N G K E W A S P A D A A N NASIONAL DAN P E N A N G A N A N KONFLIK**
	0		0	6	24,600,000	8	4.492	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
				0		0		SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
				0	0	0	0.000	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
				100	24,600,000	100	8.055	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
				0	0	0	0.000	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					6.000	4.492	
PREDIKAT KINERJA							
AN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)					31.909	12.928	
PREDIKAT KINERJA							

;
PANGKALPINANG
3111001

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders*ter terhadap pembangunan Kota Pangkal Pinang. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Atas tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang ini kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya.

Pangkal Pinang, 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Pangkal Pinang

FAHRIZAL, S.T.,M.M
Pembina Tk I /IVb
NIP. 198502062008041001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada tahun 2025 ini ada sejumlah aturan yang membuat perubahan besar dalam RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain:

a. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;.
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025;
e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Adanya kebijakan di atas membuat seluruh daerah termasuk Pemerintah Kota Pangkal Pinang harus melakukan efisiensi dengan melakukan pengurangan, penyesuaian dan perubahan pada belanja yang tidak prioritas dan belanja yang hanya bersifat pendukung, termasuk perlunya dukungan penganggaran untuk pelaksanaan Pilkada Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkal Pinang sehingga dapat menghasilkan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);
20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);

21. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 252).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang, sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.3 Sistematika Perubahan RENJA 2025

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan:

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKPSDMD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) serta memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025 melaksanakan 3 (Tiga) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 59.557.913.215,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

TRIWULAN I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja

Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	050301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90	58.130.634.951	89,89	955.492.986							89,890	955.492.986	100	2	Sekertariat
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	77,80		0								0,000		0		Sekertariat
10		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	57.443.549.083	25	871.793.577							25	871.793.577	25	2	Kasubbag PEP dan Keuangan
11		050301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	30	57.443.549.083	29	871.793.577							29	871.793.577	96,667	1,518	Kasubbag PEP dan Keuangan
10			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	-99	20.000.000	0	0							0	0	0	0	Kasubbag PEP dan Keuangan
11			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	20.000.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag PEP dan Keuangan
18		050301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	266.186.800	25	32.414.884							25	32.414.884	25	12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
19		050301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	7.499.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
20		050301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2.320.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
21		050301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	63.570.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
22		050301206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	42.797.800	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
23		050301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000	0	32.414.884							0	32.414.884	0,000	21,610	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
24			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100	6.100.000	10	0							10	0	10	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
25			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	6.100.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

24		050301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	288.965.676	25	40.127.509							25	40.127.509	25	14	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
25		050301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	90.000.000	0	9.905.813							0	9.905.813	0,000	11,006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
26		050301208003	Penyediaan Jasa P e r a l a t a n d a n Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	30.000.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
27		050301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	168.965.676	0	30.221.696							0	30.221.696	0,000	17,886	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
28		050301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	105.833.392	25	11.157.016							25	11.157.016	25	11	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
29		050301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	57.061.696	1	2.860.000							1	2.860.000	100,000	5,012	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
30		050301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	27.500.000	4	3.918.400							4	3.918.400	100,000	14,249	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
31		050301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	21.271.696	1	4.378.616							1	4.378.616	100,000	20,584	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				**49,939**	**1,644**	
													PREDIKAT KINERJA						
32	-	050302	**P R O G R A M K E P E G A W A I A N DAERAH**	**Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)**	28	835.453.264	27	57.405.528							26,640	57.405.528	95	7	**P e r e n c a n a a n , Pengadaan, Mutasi dan Data**
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	49		49								49,000		100		**P e r e n c a n a a n , Pengadaan, Mutasi dan Data**
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%)	100		84								84,060		84		**P e r e n c a n a a n , Pengadaan, Mutasi dan Data**
				Persentase data ASN yang m e l a k s a n a k a n pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan:%)	8		0								0,000		100		**Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan K e s e j a h t e r a a n Pegawai**
				Persentase jumlah event yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100		0								0,000		0		**Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan K e s e j a h t e r a a n Pegawai**
				Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan (Dengan Satuan:%)	93		0								0,000		0		**Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan K e s e j a h t e r a a n Pegawai**
33		050302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan:%)	100	531.529.264	26	44.308.928							26	44.308.928	26	8	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
34		050302201001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	73.436.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
35		050302201002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.100.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi

36		050302201003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dengan Satuan:Dokumen)	1	16.050.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
37		050302201006	Koordinasi Pelaksanaan A d m i n i s t r a s i Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	10.000.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
38		050302201008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	1	144.298.000	0	0							0	0	0,000	0,000	
39		050302201009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	243.445.264	0	41.028.928							0	41.028.928	0,000	16,853	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
40		050302201010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	14.200.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
41		050302201011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.000.000	0	3.280.000							0	3.280.000	0,000	21,867	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
42		050302202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan:%)	100	134.340.000	20	3.280.000							20	3.280.000	20	2	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
43		050302202001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	56.140.000	0	1.640.000							0	1.640.000	0,000	2,921	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
44		050302202002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	49.000.000	0	1.640.000							0	1.640.000	0,000	3,347	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
45		050302202003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	29.200.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
46		050302203	P e n g e m b a n g a n Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%)	100	122.649.000	23	9.816.600							23	9.816.600	23	8	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
47		050302203001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	20	10.000.000	6	6.536.600							6	6.536.600	30,000	65,366	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
49		050302203004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	6	69.000.000	0	3.280.000							0	3.280.000	0,000	4,754	
50		050302203007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.449.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
51		050302203014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Dengan Satuan:Orang)	35	18.200.000	20	0							20	0	57,143	0,000	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
52		050302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun (Dengan Satuan:%)	100	46.935.000	15	0							15	0	15	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
53		050302204002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	1	11.650.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
54		050302204004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	58	22.285.000	0	0							0	0	0,000	0,000	
55		050302204008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	1	13.000.000	0	0							0	0	0,000	0,000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				**63,200**	**6,871**	
													PREDIKAT KINERJA						

56	-	050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Dengan Satuan:%)	30	591.825.000	33	3.280.000							33,120	3.280.000	100	1	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Dengan Satuan:%)	33		30								30,030		91		Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
57		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:%)	100	91.950.000	25	0							25	0	25	0	
58		050402201003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	75	91.950.000	0	0							0	0	0,000	0,000	
59		050402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:%)	100	499.875.000	20	3.280.000							20	3.280.000	20	1	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
60		050402202007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	499.875.000	0	3.280.000							0	3.280.000	0,000	0,656	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
																	95,500	0,554	
																	69,546	3,023	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan pelaksanaan pencairan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelaksanaan sub kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena ada anggaran Gaji Pokok PPPK Kota Pangkal Pinang yang dititipkan ke BKPSDMD
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan proses penilaian anggaran sub kegiatan sesuai dengan dijadwalkan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	Melaksanakan proses pencairan anggaran sub kegiatan sesuai dengan dijadwalkan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG
BULAN : MARET 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN		KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN RP	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
KEPEGAWAIAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1**	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**30**	**ORANG**	**57.443.549.083**		**871.793.577**	**1,52**	**25**	**APBD Kota PKP**	
			Belanja gaji pokok PNS			1.468.525.711	-	411.107.000				
			Belanja gaji pokok PPPK			54.045.689.660	-	12.280.467				
			Belanja tunjangan keluarga PNS			163.907.855	-	43.175.614				
			Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			7.437.334		1.719.265				
			Belanja tunjangan jabatan PNS			90.763.750	-	33.400.000				
			Belanja tunjangan jabatan PPPK			8.635.000		0				
			Belanja tunjangan fungsional PNS			155.719.500	-	22.110.000				
			Belanja tunjangan fungsional PPPK			6.132.000		2.070.000				
			Belanja tunjangan fungsional umum PNS			28.166.250	-	5.900.000				
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			-		0				
			Belanja tunjangan beras PNS			99.373.522	-	24.912.480				
			Belanja Tunjangan Beras PPPK			5.191.916		1.110.440				
			Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS			4.279.219	-	958.199				
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			22.802		0				
			Belanja pembulatan gaji PNS			20.650	-	5.262				
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK			20.146		170				
			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS			1.268.120.000	-	302.040.000				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			12.000.000						
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan			46.384.000	-	5.786.000				
			Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			29.305.596	-	4.651.920				
			Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			1.712.988	-	251.880				
			Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN			2.141.184	-	314.880				

NO	PROGRAM / KEGIATAN		KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN RP	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1	PAKET	7.499.000		-	0,00	25	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			7.499.000	-	0				
		2.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2	PAKET	2.320.000		-	0,00	25	APBD Kota PKP	
			Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran			1.020.000	-	0				
			Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			1.300.000	-	0				
		3.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2	PAKET	63.570.000		-	0,00	25	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			24.339.700	-	0				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			16.215.300	-	0				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			20.570.000						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			-						
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.445.000						
		4.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1	PAKET	42.797.800		-	0,00	25	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			42.797.800	-	0				
		5.	PENYELENGGARAAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1	LAPORAN	150.000.000		32.414.884	21,61	30	APBD Kota PKP	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			150.000.000	-	32.414.884				
3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1	LAPORAN	90.000.000		9.905.813	11,01	25	APBD Kota PKP	
			Belanja Tagihan Telepon			1.500.000	-	166.604				
			Belanja Tagihan Listrik			88.500.000	-	9.739.209				
		2.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1	LAPORAN	30.000.000		-	0,00	28	APBD Kota PKP	
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			15.710.000	-	0				
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			4.270.000						
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			6.570.000	-	0				
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			3.450.000						
		3.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1	LAPORAN	168.965.676		30.221.696	17,89	25	APBD Kota PKP	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			8.500.000	-	800.000				
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			14.235.500	-	0				
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			124.358.480	-	24.893.080				
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			21.271.696	-	4.378.616				
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah			600.000	-	150.000				

NO	PROGRAM / KEGIATAN		KEGIATAN	VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
								RP	(%)			
4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1	UNIT	57.061.696		2.860.000	5,01	25	APBD Kota PKP	
			Belanja Jasa Tenaga Supir			21.931.696	-	0				
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			1.800.000	-	0				
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			33.330.000		2.860.000				
		2.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	4	UNIT	27.500.000		3.918.400	14,25	25	APBD Kota PKP	
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			8.000.000	-	2.168.400				
			Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			19.500.000	-	1.750.000				
		3.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1	UNIT	21.271.696		4.378.616	20,58	33	APBD Kota PKP	
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan			21.271.696	-	4.378.616				
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHTAH DAERAH	1.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1	UNIT	6.100.000			0,00	4	APBD Kota PKP	
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			6.100.000	-					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												
1	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	1.	PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PENGADAAN ASN	1	DOKUMEN	73.436.000		-	0,00	28	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.386.000						
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			30.000.000						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.300.000						
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			10.000.000						
			Belanja Paket/Pengiriman			500.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30.250.000						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN		VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
								RP	(%)			
		2	**PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN,JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN**	1	DOKUMEN	**15.100.000**		**-**	**0,00**	**30**	**APBD Kota PKP**	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.100.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
		3	**KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK**	1	DOKUMEN	**16.050.000**		**-**	**0,00**	**45**	**APBD Kota PKP**	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.450.000						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.400.000						
			Honorarium Rohaniwan			1.200.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
		4	**KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN**	1	DOKUMEN	**10.000.000**		**-**	**0,00**	**54**	**APBD Kota PKP**	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
		5	**FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN**	1	LEMBAGA	**144.298.000**		**-**	**0,00**	**5**	**APBD Kota PKP**	
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			14.013.000						
			Belanja Pakaian Olahraga			110.985.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			19.300.000						
		6	**PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ASN**	1	DOKUMEN	**243.445.264**		**41.028.928**	**16,85**	**45**	**APBD Kota PKP**	
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			233.445.264		41.028.928				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
		7	**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN**	1	DOKUMEN	**14.200.000**		**-**	**0,00**	**37**	**APBD Kota PKP**	
			Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			9.200.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5.000.000						
		8	**PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN**	1	DOKUMEN	**15.000.000**		**3.280.000**	**21,87**	**40**	**APBD Kota PKP**	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000		3.280.000				

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN		VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
								RP	(%)			
2	MUTASI DAN PROMOSI ASN	1.	PENGELOLAAN MUTASI ASN	1	DOKUMEN	56.140.000		1.640.000	2,92	30	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			540.000						
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			4.500.000						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			25.000.000						
			Honorarium Penyelenggara Ujian			15.600.000						
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			-						
			Belanja Paket/Pengiriman			500.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000		1.640.000				
		2.	PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	1	DOKUMEN	49.000.000		1.640.000	3,35	35	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			-						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			22.000.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			27.000.000		1.640.000				
		3.	PENGELOLAAN PROMOSI ASN	1	DOKUMEN	29.200.000		-	0,00	19	APBD Kota PKP	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			7.200.000						
			Honorarium Rohaniwan			10.000.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.000.000						
3	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1	PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	20	ORANG	10.000.000		6.536.600	65,37	66	APBD Kota PKP	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000		6.536.600				
		2	PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	6	ORANG	69.000.000		3.280.000	4,75	30	APBD Kota PKP	
			Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1			24.000.000						
			Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2			30.000.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000		3.280.000				
		3	EVALUASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI JABATAN ASN	1	LAPORAN	25.449.000		0	0,00	5	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.400.000						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			9.100.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.949.000						
		4	FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL	35	ORANG	18.200.000		0	0,00	66	APBD Kota PKP	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.600.000						
			Honorarium Rohaniwan			1.600.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN		VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN RP	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
4	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	1.	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	1	DOKUMEN	11.650.000		-	0,00	49	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.650.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
		2.	PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	58	ORANG	22.285.000		-	0,00	5	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.985.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			19.300.000						
		3.	PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	1	LAPORAN	13.000.000		-	0,00	10	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.000.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000						
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5	ORANG	20.000.000		-	0,00	10	APBD Kota PKP	
			Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			20.000.000	-	0				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
1	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	1	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75	ORANG	91.950.000		-	0,00	5	APBD Kota PKP	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.360.000						
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			37.000.000						
			Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			18.000.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			21.590.000						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN		VOL.	SATUAN	PLAFOND DANA (RP)		REALISASI			SUMBER DANA	KET
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH REFOCUSING	KEUANGAN		FISIK (%)		
								RP	(%)			
2	**SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL**	1	**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN**	1	LAPORAN	499.875.000		3.280.000	0,66	5	APBD Kota PKP	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			113.300.000						
			Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			366.575.000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20.000.000		3.280.000				
Total sampai dengan bulan ini						**59.557.913.215**		**1.016.178.514**	**2**	**28**		

Pangkalpinang, Maret 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

FAHRIZAL, S.T, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 198502062008041001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Analisis kinerja pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok **"Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan",** dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023, maka dapat diuraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Capaian Kinerja																		SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD			
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	3.90	100	100	0.825	82.5	100	83	83	83	N/A	N/A	83	N/A	N/A	
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7.8	-	-	-	7.05	0.233	23.33	7.05	0.212	21.2	7.8	27	100	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A	
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	0.36	36	100	0.45	45	100	39	39	47	N/A	N/A	47	N/A	N/A	
4.	Persentase ASN yang yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79	-	-	-	77	1.22	100	78	78	100	79	79	100	-	-	-	-	-	-	
5.	Persentase ASN yang mengikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	N/A	N/A	29	N/A	N/A	

	pendidikan dan pelatihan formal																				
6.	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	
7.	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	
8.	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	N/A	N/A	91	N/A	N/A	
9.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	N/A	N/A	25	N/A	N/A	
10.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2.6	1.47	56.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	61.50	35.68	58.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	23	71.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	116	113	97.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

14.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.728	1.728	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	83	84	85	82.5	83	83	84	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			7.5	7.8	22	23	24	21.2	22	22	23	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	47	49	50	45	47	47	49	
4	Persentase ASN yang yang mempunyai kapasitas dan kompetensi			78	79	0	0	0	78	79	0	0	
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0	0	30	31	33	0	0	30	31	
6	Persentase jumlah event yang dilaksanakan			0	0	100	100	100	0	0	100	100	
7	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN			0	0	7	8	8	0	0	7	8	

8	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan			0	0	92	93	94	0	0	92	93	
9	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			0	0	33	33	37	0	0	33	33	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi BKPSDMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
2. Penempatan Pegawai Secara Lebih Optimal Sesuai Kompetensi Serta Analisa Beban Kerja Dan Analisa Jabatan
3. Peningkatan Disiplin Pegawai
4. Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian
5. Peningkatan Akurasi Data Pegawai
6. Peningkatan Kinerja SDM Aparatur
7. Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara *(Flexibel Working Arrangement)*

Selain isu-isu penting di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD antara lain :

Permasalahan :

1. Aparatur Sipil Negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).
2. Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap jabatan.
3. Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan pendidikan dan pelatihan formal kepada seluruh pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja.
6. Absensi belum terintegrasi dengan sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai
7. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik.
8. Arsip data pegawai dari PNS masih belum masuk semuanya ke BKPSDMD.

Penghambat :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian belum optimal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Pendorong :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

Kekuatan :

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Komitmen pimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Tersedianya sarana dan prasarana baik fisik maupun personil untuk penilaian kinerja ASN (Assessment center).
3. SDM Pengelola Kepegawaian yang berkompeten.
4. Pengembangan/dukungan sistem informasi yang terus dilakukan

2.4 Perubahan RKPD TAHUN 2025

Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

RPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU TAHUN 2025**	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU TAHUN 2025**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**90 Nilai**	**51.601.492.146**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**90 Nilai**	**51.601.492.146**
	Nilai SAKIP Perangkat DaeraH	**77.80 Nilai**			**Nilai SAKIP Perangkat DaeraH**	**77.80 Nilai**	
Kegiatan Administrasi Keuangan	**Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP**	**100%**	**50.860.766.378**	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP**	**100%**	**50.860.766.378**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	50.860.766.378	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	50.860.766.378
Kegiatan Administrasi umum	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**302.341.700**	**Kegiatan Administrasi umum**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**302.341.700**
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.382.500	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.382.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paker	39.027.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paker	39.027.700
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.320.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.320.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.072.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.072.000

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	235.539.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	235.539.500
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**281.880.676**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**281.880.676**
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	161.880.676	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	161.880.676
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah**	**100%**	**30.670.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah**	**100%**	**30.670.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.100.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	24.570.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	24.570.000

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**100%**	**105.833.392**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik**	**100%**	**105.833.392**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	57.061.696	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	57.061.696
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.271.696	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.271.696
Kegiatan Administrasi Kepegawaian	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**	**-99%**	**20.000.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian**	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**	**-99%**	**20.000.000**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**100%**	**480.149.264**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**100%**	**480.149.264**
	Rasio pegawai fungsional	**28%**			**Rasio pegawai fungsional**	**28%**	
	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	**8%**			**Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN**	**8%**	
	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	**93%**			**Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan**	**93%**	
	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	**100%**			**Persentase jumlah event yang dilaksanakan**	**100%**	
	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	**49%**			**Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.**	**49%**	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**100%**	**329.244.264**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**100%**	**329.244.264**
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	56.436.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	56.436.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	5.100.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	5.100.000

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	6.050.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	6.050.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	-	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	-
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	14.013.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	14.013.000
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	233.445.264	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	233.445.264
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.200.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.200.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000
Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN**	**100%**	**73.570.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN**	**100%**	**73.570.000**
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	48.390.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	48.390.000

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	7.980.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	7.980.000
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	17.200.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	17.200.000
Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi**	**100%**	**69.700.000**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi**	**100%**	**69.700.000**
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	7.500.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	7.500.000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	59.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	59.000.000
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	-	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	-
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	3.200.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	3.200.000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun**	**100%**	**7.635.000**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun**	**100%**	**7.635.000**
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1.650.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1.650.000

Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	58 Orang	2.985.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	58 Orang	2.985.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	3.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	3.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**30%**	**538.675.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**30%**	**538.675.000**
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	**33%**			**Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**	**33%**	
Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi**	**100%**	**54.400.000**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi**	**100%**	**54.400.000**
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	75 Orang	54.400.000	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum**	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	75 Orang	54.400.000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**100%**	**484.275.000**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**100%**	**484.275.000**
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	484.275.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	484.275.000
			52.620.316.410				**52.620.316.410**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang terdiri dari:
   - Program Kepegawaian Daerah
   - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program Pendukung, yaitu :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rencana Kegiatan

1. Kegiatan Prioritas
   1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:
      a. Perumusan bahan kebijakan Pengadaan ASN
      b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
      c. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
      d. Fasilitasi lembaga profesi ASN
      e. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN
      f. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
      g. Pengelolaan data kepegawaian
      h. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
   2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:
      a. Pengelolaan mutasi ASN
      b. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
      c. Pengelolaan promosi ASN
   3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
      a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
      b. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

c. Pengelolaan pendidikan lanjutanASN
d. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
e. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional

4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
c. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN

5) Pengembangan Kompetensi teknis, dengan sub kegiatan :
a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.

6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:
a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

2. Kegiatan Pendukung

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
b. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
b. Penyediaan peralatan rumah tangga
c. Penyediaan bahan logistik kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan aset tetap lainnya
   b. Pengadaan Mebel
   c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
   d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
   b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**7.279.414.194,00**	**59.557.913.215,00**	**52.620.316.410,00**	**45.340.902.216,00**							**6.139.399.215,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.279.414.194,00**	**59.557.913.215,00**	**52.620.316.410,00**	**45.340.902.216,00**							**6.139.399.215,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.078.292.194,00**	**58.946.088.215,00**	**52.061.641.410,00**	**45.983.349.216,00**							**5.199.399.215,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				**77.80** **90 Nilai** **Nilai**	**77.80** **90 Nilai** **Nilai**	**5.138.559.194,00**	**58.130.634.951,00**	**51.601.492.146,00**	**-1.331.295.579,00**							**3.807.263.615,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	9.673.000,00	0,00	0,00	-9.673.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		12.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.895.000,00	0,00	0,00	-1.895.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.896.000,00	0,00	0,00	-1.896.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.960.000,00	0,00	0,00	-1.960.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2 Laporan	1.946.000,00	0,00	0,00	-1.946.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3 Laporan	1.976.000,00	0,00	0,00	-1.976.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP*				100 %	100 %	3.789.270.794,00	57.443.549.083,00	50.860.766.378,00	47.071.495.584,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.003.609.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.787.364.794,00	57.443.549.083,00	50.860.766.378,00	47.073.401.584,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			3.001.109.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.906.000,00	0,00	0,00	-1.906.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	266.196.400,00	266.186.800,00	302.341.700,00	36.145.300,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		209.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.499.000,00	4.072.000,00	-3.428.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			3.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	63.578.600,00	63.570.000,00	39.027.700,00	-24.550.900,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.797.800,00	42.797.800,00	21.382.500,00	-21.415.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	235.539.500,00	85.539.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah*				100 %	100 %	123.980.000,00	6.100.000,00	30.670.000,00	-93.310.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	15.400.000,00	0,00	0,00	-15.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.370.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	730.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	28.690.000,00	0,00	24.570.000,00	-4.120.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	74.520.000,00	0,00	0,00	-74.520.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	565.909.000,00	288.965.676,00	281.880.676,00	-284.028.324,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		285.732.282,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			89.880.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			26.910.333,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	445.909.000,00	168.965.676,00	161.880.676,00	-284.028.324,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			168.941.949,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik perangkat daerah dalm kondisi baik*				100 %	100 %	348.530.000,00	105.833.392,00	105.833.392,00	-242.696.608,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		165.721.903,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.810.000,00	57.061.696,00	57.061.696,00	13.251.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			42.831.490,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	154.720.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-127.220.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			62.890.413,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	21.271.696,00	21.271.696,00	-128.728.304,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)** **Rasio pegawai fungsional** **Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi** **Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN** **Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan**				**100** **28** **49** **8** **93 %** **%** **%** **%** **%**	**100** **28** **49** **8** **93 %** **%** **%** **%** **%**	**974.733.000,00**	**835.453.264,00**	**480.149.264,00**	**457.402.600,00**						**1.432.135.600,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN* *Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN.*				100 %	100 %	513.347.000,00	531.529.264,00	329.244.264,00	-184.102.736,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		812.135.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	179.990.000,00	73.436.000,00	56.436.000,00	-123.554.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	49.994.000,00	15.100.000,00	5.100.000,00	-44.894.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.050.000,00	6.050.000,00	-13.950.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	23.300.000,00	10.000.000,00	0,00	-23.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	160.000.000,00	144.298.000,00	14.013.000,00	-145.987.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	30.001.000,00	243.445.264,00	233.445.264,00	203.444.264,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			328.410.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	30.070.000,00	14.200.000,00	9.200.000,00	-20.870.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			33.725.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	19.992.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	-14.992.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN*				100 %	100 %	218.762.000,00	134.340.000,00	73.570.000,00	-145.192.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		235.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	90.002.000,00	56.140.000,00	48.390.000,00	-41.612.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	49.000.000,00	7.980.000,00	-72.020.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	48.760.000,00	29.200.000,00	17.200.000,00	-31.560.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi* *Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi.*				100 %	100 %	173.129.000,00	122.649.000,00	69.700.000,00	-103.429.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				10 Orang	20 Orang	22.400.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	-14.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				7 Orang	6 Orang	100.000.000,00	69.000.000,00	59.000.000,00	-41.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	1 Laporan	25.749.000,00	25.449.000,00	0,00	-25.749.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				50 Orang	35 Orang	24.980.000,00	18.200.000,00	3.200.000,00	-21.780.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun* *Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun.*				100 %	100 %	69.495.000,00	46.935.000,00	7.635.000,00	-61.860.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	11.650.000,00	1.650.000,00	-23.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	58 Orang	19.995.000,00	22.285.000,00	2.985.000,00	-17.010.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	24.500.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	-21.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.201.122.000,00**	**611.825.000,00**	**558.675.000,00**	**-642.447.000,00**							**940.000.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				**77.80** **90 Nilai** **Nilai**	**77.80** **90 Nilai** **Nilai**	**5.138.559.194,00**	**58.130.634.951,00**	**51.601.492.146,00**	**-1.331.295.579,00**							**3.807.263.615,00**	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN*				-99 %	-99 %	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal** **Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**				**30** **33 %** **%**	**30** **33 %** **%**	**1.166.122.000,00**	**591.825.000,00**	**538.675.000,00**	**-266.122.000,00**							**900.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi*				100 %	100 %	110.000.000,00	91.950.000,00	54.400.000,00	-55.600.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				75 Orang	75 Orang	110.000.000,00	91.950.000,00	54.400.000,00	-55.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional*				100 %	100 %	1.056.122.000,00	499.875.000,00	484.275.000,00	-571.847.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	1.056.122.000,00	499.875.000,00	484.275.000,00	-571.847.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**7.279.414.194,00**	**59.557.913.215,00**	**52.620.316.410,00**	**45.340.902.216,00**							**6.139.399.215,00**	

BAB V
P E N U T U P

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan.

Sebagai penutup, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai OPD pengelola kepegawaian Kota Pangkalpinang.

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja (Renja) Perubahan OPD Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakkan ***stakeholders*** terhadap Kota Pangkal Pinang.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 di susun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 Kota Pangkal Pinang

Atas tersusunnya Renja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pangkal Pinang, Mei 2025

KEPALA BADAN,

DR. MUHAMMAD YASIN, S.E, M.M
PEMBINA TK 1 / IV B
NIP. 197311222002121006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA Perubahan dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja (RENJA) OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Berpedoman kepada Perubahan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawa

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

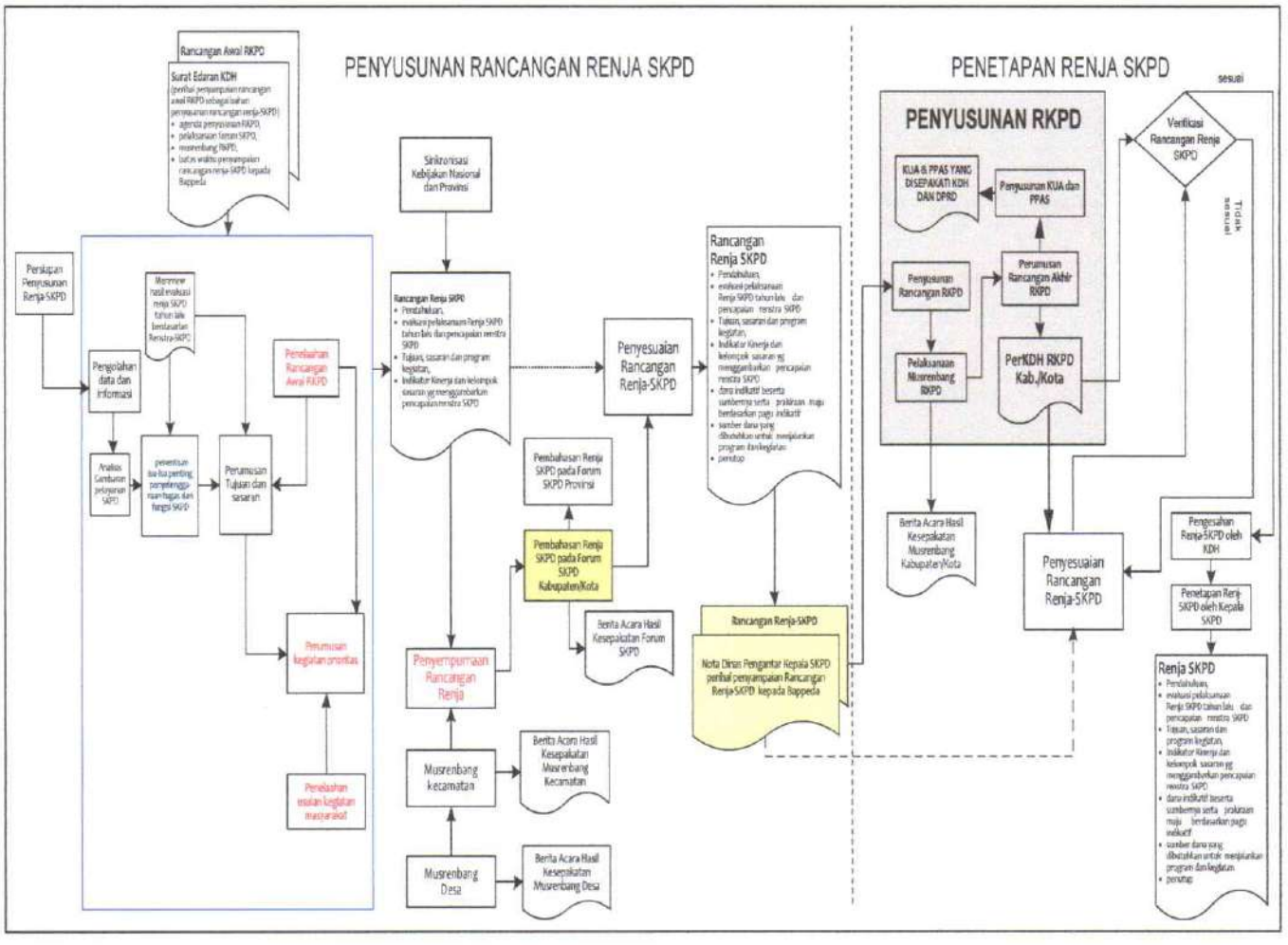

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (12.75/2022));
21. Peraturan Daerah Kota Pangkal inang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 3 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (1.3/2019))
22. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita
23. Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 No. 183)
    Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 No. 277)

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perencanaan kinerja (Renja) Perubahan tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN berisi :

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 berisi :

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.3. Isu-isu Rencana Penyelenggaraan Tupoksi OPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

berisi:

1.1. Tujuan dan Sasaran OPD
1.2. Program dan Kegiatan OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

BAB. V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TIWULAN I TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang melaksanakan 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 71 sub kegiatan dengan besaran anggaran sebesar Rp 58.458.848.684 dengan realisasi anggaran sebesar 7.476.986.202, terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan, 19 sub kegiatan
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan, 6 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan , 12 sub kegiatan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 8 kegiatan, 34 sub kegiatan

No.	Program 2025 (APBD)	Anggaran 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2025 (Rp)	%
01.00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	12.667.665.691	279.287.108	57,06
02.00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	793.603.744	121.200.624	74,31
03.00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.239.135.104	730.384.392	86,98
04.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	39.758.444.145	6.346.114.078	92,78
JUMLAH		58.458.848.684	7.476.986.202	12,79

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

TRIWULAN I
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	050201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75	39.758.444.145	75	6.346.114.078		0		0		0	75	6.346.114.078	100	16	Sekretariat
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	78										0		0		Sekretariat
5		050201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangakat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	36.552.271.225	25	6.026.650.306		0		0		0	25	6.026.650.306	25	16	Sekretaris
6		050201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	76	36.482.727.833	76	6.013.393.074							76	6.013.393.074	100	16	Sub Bagian Keuangan
7		050201202002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	69.543.392	3	13.257.232							3	13.257.232	25	19	Sub Bagian Keuangan
11		050201203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Ditata dan Diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	48.543.392	25	5.378.616		0		0		0	25	5.378.616	25	11	Sekretaris

12		050201203006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	12	48.543.392	3	5.378.616							3	5.378.616	25	11	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13		050201205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0,3	130.358.480	0	25.893.080		0		0		0	0	25.893.080	100	20	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14		050201205003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	12	130.358.480	3	25.893.080							3	25.893.080	25	20	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16		050201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.304.551.392	25	76.048.106		0		0		0	25	76.048.106	25	6	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17		050201206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	18.277.500									0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
19		050201206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	2.555.000									0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20		050201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	3	489.271.500	3	2.120.000							3	2.120.000	100	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
21		050201206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	139.975.000									0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22		050201206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	40	400.000.000	10	63.170.874							10	63.170.874	25	16	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

23		050201206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	12	254.472.392	3	10.757.232							3	10.757.232	25	4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
24		050201207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	25.000.000		0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
26		050201207010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	25.000.000									0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
27		050201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.375.328.960	25	197.791.824		0		0		0	25	197.791.824	25	14	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
28		050201208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	12	42.543.392	3	8.757.232							3	8.757.232	25	21	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
29		050201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12	685.608.000	3	70.819.192							3	70.819.192	25	10	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
30		050201208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	4	82.656.864									0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
31		050201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	2	564.520.704	2	118.215.400							2	118.215.400	100	21	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

32		050201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	322.390.696	25	14.352.146		0		0		0	25	14.352.146	25	4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
33		050201209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	1	57.261.696	1	6.888.616							1	6.888.616	100	12	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
34		050201209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	65	29.500.000	65	5.463.530							65	5.463.530	100	19	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
35		050201209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	1	151.129.000									0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
36		050201209010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	8	84.500.000	2	2.000.000							2	2.000.000	25	2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									**50,000**	**15,962**	
								PREDIKAT KINERJA											
37	-	**050202**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Dengan Satuan:%)**	**100**	**12.667.865.691**	**25**	**279.287.108**		**0**		**0**		**0**	**25**	**279.287.108**	**25**	**2**	**Bidang Perbendaharaan**
				Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (Dengan Satuan:%)	**30**										**0**		**0**		**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

38		050202201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.227.393.376	25	159.707.046		0		0		0	25	159.707.046	25	13	Kepala Bidang Anggaran
39		050202201001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan: Dokumen)	1	102.250.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
40		050202201002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan: Dokumen)	1	160.765.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
41		050202201003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan: Dokumen)	33	83.170.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
42		050202201004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	33	71.500.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
43		050202201005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan: Dokumen)	33	74.900.000	33	13.815.150							33	13.815.150	100	18	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
44		050202201006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan: Dokumen)	33	18.900.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
45		050202201007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	208.625.000	1	12.253.000							1	12.253.000	100	6	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
46		050202201008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	194.450.000									0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran

47		050202201009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	3	312.833.376	3	133.638.896							3	133.638.896	100	43	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
48		050202202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	242.946.864	25	42.612.528		0		0		0	25	42.612.528	25	18	Kepala Bidang Perbendaharaan
49		050202202001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	12	42.543.392	3	8.757.232							3	8.757.232	25	21	Kepala Bidang Perbendaharaan
50		050202202003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:Dokumen)	8	27.271.696	2	5.378.616							2	5.378.616	25	20	Kepala Bidang Perbendaharaan
51		050202202009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan: Dokumen)	12	173.131.776	3	28.476.680							3	28.476.680	25	16	Kepala Bidang Perbendaharaan
52		050202203	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	429.139.522	25	53.655.296		0		0		0	25	53.655.296	25	13	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
53		050202203003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan: Laporan)	3	119.421.742	3	8.962.216							3	8.962.216	100	8	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

54		050202203004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.589.300									0	0	0	0	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
55		050202203005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Dokumen)	2	265.478.480	2	44.693.080							2	44.693.080	100	17	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
56		050202203009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	1	34.650.000									0	0	0	0	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
57		050202204	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	10.618.185.929	10	9.085.652		0		0		0	10	9.085.652	10	0	Kepala Bidang Anggaran
58		050202204009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan: Laporan)	1	10.618.185.929	1	9.085.652							1	9.085.652	100	0	Kepala Bidang Anggaran
59		050202205	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Data dan SIPD Lingkup Keuangan Daerah yang dapat Diakses (Dengan Satuan:%)	100	150.000.000	25	14.226.586		0		0		0	25	14.226.586	25	9	Kepala Bidang Anggaran

60		050202205002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	1	150.000.000	1	14.226.586						1	14.226.586	100	9	Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah
61		050202205003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1	0												Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							**12,500**	**2,205**	
								PREDIKAT KINERJA									
62		**050203**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD (Dengan Satuan:%)**	**100**	**793.603.744**	**25**	**121.200.624**		**0**		**0**		**0**	**25**	**121.200.624**	**25**	**15**	**Bidang Aset**
63		050203201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	793.603.744	25	121.200.624		0		0		0	25	121.200.624	25	15	Kepala Bidang Aset
64		050203201006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	34	41.000.000	34								34	0	100	0	Kepala Bidang Aset
65		050203201007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	250	276.358.480	250	70.693.080							250	70.693.080	100	26	Kepala Bidang Aset
66		050203201008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	1	75.000.000	1	3.600.000							1	3.600.000	100	5	Kepala Bidang Anggaran

67		050203201010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	20	152.086.784	20	19.514.464							20	19.514.464	100	13	Kepala Bidang Aset
68		050203201011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	34	172.658.480	34	27.393.080							34	27.393.080	100	16	Kepala Bidang Aset
69		050203201013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	200	76.500.000									0	0	0	0	Kepala Bidang Aset
																	25,000	15,272	
70		**050204**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase capaian penagihan pajak daerah (Dengan Satuan:%)**	**5**	**5.239.135.104**	**1**	**730.384.392**		**0**		**0**		**0**	**1**	**730384392**	**20**	**14**	**Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah**
71		050204201	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Pajak Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	5.239.135.104	25	730.384.392		0		0		0	25	730.384.392	25	14	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
				Persentase nilai pajak daerah tertagih (Dengan Satuan:%)	100		25								25		25		Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
72		050204201002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	1	675.180.512	1	114.194.504							1	114.194.504	100	17	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah

82		050204201013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	10	2.001.063.808	2	394.144.504							2	394.144.504	20	20	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah
83		050204201014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	3	20.000.000									0	0	0	0	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah
																	20,000	**13,941**	
																	26,875	**11,845**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 07-02-2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
MUHAMMAD YASIN, S.E., M.M. NIP.19731122200212100 6

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang.

Badan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Keuangan Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada suatu instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 No. 183) menjelaskan bahwa Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
b. penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah untuk mendukung visi dan misi dan kebijakan Walikota;
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang keuangan daerah;
d. penetapan rencana kerja Badan Keuangan Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan daerah;
f. pelaksanaan perencanaan bidang keuangan daerah;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan keuangan lingkup kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Keuangan Daerah; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang dipetakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Masih ada keterlambatan penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah
		Adanya perubahan Petugas di Perangkat Daerah
	belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang	belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan pajak daerah bagi public
		belum optimalnya kajian dan analisis terkait penetapan potensi pajak daerah

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) , yang sudah diperoleh sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang maka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak hanya menjadi

tanggung jawab Badan Keuangan Daerah , namun perlu adanya sinergi dari seluruh Perangkat Daerah. Sampai saat ini terdapat permasalahan yaitu masih ada keterlambatan dari beberapa Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan dan aset sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah sehingga mengurangi kesempurnaan tersebut, walaupun LKPD disampaikan tepat waktu pada akhirnya. Keterlambatan tersebut dikarenakan pergantian petugas ditiap Perangkat Daerah dan tentunya ini bukan wewenang dari Badan Keuangan Daerah .

Dan belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkal Pinang dikarenakan masih adanya akar masalah berkenaan, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan pajak publik, adanya beberapa keluhan yang disampaikan terkait pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan beberapa pajak daerah lainnya, termasuk sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum optimal. Terkait belum optimalnya kajian dan analisis terkait penetapan potensi pajak daerah juga menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang diinginkan di masa mendatang, sedangkan tujuan RPD 2024 - 2026 Kota Pangkalpinang adalah ***"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance "*** hal ini ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut : "***Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah"***

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dalam RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut ***" Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah "*** sedangkan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang untuk sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah

Tabel III.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	***Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah***		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
		1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntasi pemerintah	100 %	100 %	100 %
		2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	17 %	18 %	19 %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Utama	Target 2025
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntasi pemerintah	100 %
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	18 %

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Pemerintah dan unsur penunjang keuangan logika pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan suatu peta strategis yang mengambarkan kaitan sebab akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal.

Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab akibat antar indikator kinerja ini sama dengan hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan program sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu. Jadi seluruh indikator kinerja kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap faktor yang berperan dalam mencapai kinerja pada enam persepektif diatas. Indikator kegiatan persepektif peningkatan proses internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi pencapaian hasil kegiatan-kegiatan pada persepektif di atas.

Peta strategi dan indikator kinerja kunci tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan keunikan permasalahan dimasing-masing tempat

4.2. Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 secara keseluruhan adalah 4 program, 15 kegiatan, dan 71 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan
c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan
d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif tercantum pada tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
BADAN KEUANGAN DAERAH																			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp. 47.600.662.755	Rp. 240.000.000	Rp. 10.618.185.929		Rp. 58.458.848.684	Rp. 48.287.136.417	Rp. 350.000.000	Rp. 1.950.169.024		Rp. 50.587.305.441	Rp. 49.366.276.755,00
5	02				KEUANGAN				Rp. 47.600.662.755	Rp. 240.000.000	Rp. 10.618.185.929		Rp. 58.458.848.684	Rp. 48.287.136.417	Rp. 350.000.000	Rp. 1.950.169.024		Rp. 50.587.305.441	Rp. 49.366.276.755,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 39.518.444.145	Rp. 240.000.000			Rp. 39.758.444.145	Rp. 40.195.828.301	Rp. 350.000.000			Rp. 40.545.828.301	Rp. 39.709.459.797,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														Rp. 1.800.000,00
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 600.000,00
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 600.000,00
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 600.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 36.552.271.225				Rp. 36.552.271.225	Rp. 37.292.606.957				Rp. 37.292.606.957	Rp. 35.430.595.797,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.482.727.833				Rp. 36.482.727.833	Rp. 37.222.063.565				Rp. 37.222.063.565	Rp. 35.408.020.797,00
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 69.543.392				Rp. 69.543.392	Rp. 70.543.392				Rp. 70.543.392	Rp. 2.250.000,00
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 2.905.000,00
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 2.905.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 14.515.000,00
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 48.543.392				Rp. 48.543.392	Rp. 49.543.392				Rp. 49.543.392	Rp. 3.700.000,00
5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 48.543.392				Rp. 48.543.392	Rp. 49.543.392				Rp. 49.543.392	Rp. 3.700.000,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 130.358.480				Rp. 130.358.480	Rp. 132.858.480				Rp. 132.858.480	Rp. 139.600.000,00
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 136.000.000,00
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.358.480				Rp. 130.358.480	Rp. 132.858.480				Rp. 132.858.480	Rp. 3.600.000,00
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.239.551.392	Rp. 65.000.000			Rp. 1.304.551.392	Rp. 1.132.945.740	Rp. 200.000.000			Rp. 1.332.945.740	Rp. 1.529.103.000,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.277.500				Rp. 18.277.500	Rp. 9.127.500				Rp. 9.127.500	Rp. 20.287.500,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Rp. 168.800.000			Rp. 168.800.000	Rp. 74.000.000,00
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.555.000				Rp. 2.555.000	Rp. 2.000.000				Rp. 2.000.000	Rp. 2.805.000,00
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 489.271.500				Rp. 489.271.500	Rp. 494.191.500				Rp. 494.191.500	Rp. 680.165.500,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 139.975.000				Rp. 139.975.000	Rp. 93.793.115				Rp. 93.793.115	Rp. 138.845.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 343.361.233				Rp. 343.361.233	Rp. 350.000.000,00
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 189.472.392	Rp. 65.000.000			Rp. 254.472.392	Rp. 190.472.392	Rp. 31.200.000			Rp. 221.672.392	Rp. 263.000.000,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000		Rp. 0			Rp. 0	Rp. 100.000.000,00
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 100.000.000,00
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000		Rp. 0			Rp. 0	

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.375.328.960				Rp. 1.375.328.960	Rp. 1.366.653.036				Rp. 1.366.653.036	Rp. 1.641.000.000,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.543.392				Rp. 42.543.392	Rp. 43.543.392				Rp. 43.543.392	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 685.608.000				Rp. 685.608.000	Rp. 651.000.000				Rp. 651.000.000	Rp. 663.000.000,00
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 82.656.864				Rp. 82.656.864	Rp. 82.656.864				Rp. 82.656.864	Rp. 86.500.000,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 564.520.704				Rp. 564.520.704	Rp. 589.452.780				Rp. 589.452.780	Rp. 891.500.000,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 172.390.696	Rp. 150.000.000			Rp. 322.390.696	Rp. 221.220.696	Rp. 150.000.000			Rp. 371.220.696	Rp. 863.661.000,00
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.261.696				Rp. 57.261.696	Rp. 57.761.696				Rp. 57.761.696	Rp. 37.000.000,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.500.000				Rp. 29.500.000	Rp. 77.830.000				Rp. 77.830.000	Rp. 527.550.000,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.129.000	Rp. 150.000.000			Rp. 151.129.000	Rp. 1.129.000	Rp. 150.000.000			Rp. 151.129.000	Rp. 199.950.000,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 84.500.000				Rp. 84.500.000	Rp. 84.500.000				Rp. 84.500.000	Rp. 99.161.000,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Rp. 2.049.479.762		Rp. 10.618.185.929		Rp. 12.667.665.691	Rp. 1.805.341.968		Rp. 1.950.169.024		Rp. 3.755.510.992	Rp. 6.795.498.584,00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				Rp. 1.227.393.376				Rp. 1.227.393.376	Rp. 1.140.029.608				Rp. 1.140.029.608	Rp. 1.023.582.084,00
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 102.250.000				Rp. 102.250.000	Rp. 81.655.000				Rp. 81.655.000	Rp. 101.718.000,00
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 160.765.000				Rp. 160.765.000	Rp. 147.764.000				Rp. 147.764.000	Rp. 72.130.000,00
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 83.170.000				Rp. 83.170.000	Rp. 128.848.772				Rp. 128.848.772	Rp. 232.557.100,00
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 71.500.000				Rp. 71.500.000	Rp. 66.250.000				Rp. 66.250.000	Rp. 87.099.500,00
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 74.900.000				Rp. 74.900.000	Rp. 74.300.000				Rp. 74.300.000	Rp. 81.470.700,00
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.900.000				Rp. 18.900.000	Rp. 10.150.000				Rp. 10.150.000	Rp. 29.270.700,00
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 208.625.000				Rp. 208.625.000	Rp. 170.337.500				Rp. 170.337.500	Rp. 205.442.500,00
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 194.450.000				Rp. 194.450.000	Rp. 156.837.500				Rp. 156.837.500	Rp. 102.812.500,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 312.833.376				Rp. 312.833.376	Rp. 303.886.836				Rp. 303.886.836	Rp. 111.081.084,00
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Rp. 242.946.864				Rp. 242.946.864	Rp. 247.446.864				Rp. 247.446.864	Rp. 245.336.000,00
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.543.392				Rp. 42.543.392	Rp. 43.543.392				Rp. 43.543.392	Rp. 71.180.000,00
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 27.271.696				Rp. 27.271.696	Rp. 27.771.696				Rp. 27.771.696	Rp. 87.192.000,00
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 173.131.776				Rp. 173.131.776	Rp. 176.131.776				Rp. 176.131.776	Rp. 86.964.000,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Rp. 429.139.522				Rp. 429.139.522	Rp. 332.865.496				Rp. 332.865.496	Rp. 402.520.500,00
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 119.421.742				Rp. 119.421.742	Rp. 93.535.894				Rp. 93.535.894	Rp. 62.056.000,00
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.589.300				Rp. 9.589.300	Rp. 9.589.300				Rp. 9.589.300	Rp. 22.396.000,00
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 265.478.480				Rp. 265.478.480	Rp. 201.949.602				Rp. 201.949.602	Rp. 256.378.500,00
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.650.000				Rp. 34.650.000	Rp. 27.790.700				Rp. 27.790.700	Rp. 61.690.000,00
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						Rp. 10.618.185.929		Rp. 10.618.185.929			Rp. 1.950.169.024		Rp. 1.950.169.024	Rp. 5.000.000.000,00
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 10.618.185.929		Rp. 10.618.185.929			Rp. 1.950.169.024		Rp. 1.950.169.024	Rp. 5.000.000.000,00
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 85.000.000				Rp. 85.000.000	Rp. 124.060.000,00
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	- PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 85.000.000				Rp. 85.000.000	Rp. 75.610.000,00
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 48.450.000,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Rp. 793.603.744				Rp. 793.603.744	Rp. 951.113.744				Rp. 951.113.744	Rp. 741.598.209,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				Rp. 793.603.744				Rp. 793.603.744	Rp. 951.113.744				Rp. 951.113.744	Rp. 741.598.209,00
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 41.000.000				Rp. 41.000.000	Rp. 41.000.000				Rp. 41.000.000	Rp. 164.062.000,00
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 276.358.480				Rp. 276.358.480	Rp. 384.358.480				Rp. 384.358.480	Rp. 209.817.009,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 155.010.000				Rp. 155.010.000	Rp. 79.000.000,00
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 152.086.784				Rp. 152.086.784	Rp. 154.086.784				Rp. 154.086.784	Rp. 112.659.200,00
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 172.658.480				Rp. 172.658.480	Rp. 175.158.480				Rp. 175.158.480	Rp. 84.660.000,00
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.500.000				Rp. 76.500.000	Rp. 41.500.000				Rp. 41.500.000	Rp. 91.400.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Rp. 5.239.135.104				Rp. 5.239.135.104	Rp. 5.334.852.404				Rp. 5.334.852.404	Rp. 2.119.720.165,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				Rp. 5.239.135.104				Rp. 5.239.135.104	Rp. 5.334.852.404				Rp. 5.334.852.404	Rp. 2.119.720.165,00
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 675.180.512				Rp. 675.180.512	Rp. 685.680.512				Rp. 685.680.512	Rp. 48.250.000,00
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 481.815.088				Rp. 481.815.088	Rp. 435.839.620				Rp. 435.839.620	Rp. 243.400.000,00
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.000.000				Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000				Rp. 72.000.000	Rp. 92.000.000,00
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 580.750.000				Rp. 580.750.000	Rp. 476.700.000				Rp. 476.700.000	Rp. 408.750.000,00
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 192.543.392				Rp. 192.543.392	Rp. 193.543.392				Rp. 193.543.392	Rp. 215.600.000,00
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 246.560.000				Rp. 246.560.000	Rp. 246.560.000				Rp. 246.560.000	Rp. 227.349.165,00
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 27.271.696				Rp. 27.271.696	Rp. 27.271.696				Rp. 27.271.696	Rp. 51.290.000,00
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.200.000				Rp. 11.200.000	Rp. 11.200.000				Rp. 11.200.000	Rp. 29.600.000,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 927.750.608				Rp. 927.750.608	Rp. 1.057.650.608				Rp. 1.057.650.608	Rp. 391.901.000,00
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 53.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.001.063.808				Rp. 2.001.063.808	Rp. 2.105.406.576				Rp. 2.105.406.576	Rp. 288.580.000,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENDAPATAN TRANSFER	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 70.000.000,00
Jumlah									**Rp. 47.600.662.755**	**Rp. 240.000.000**	**Rp. 10.618.185.929**		**Rp. 58.458.848.684**	**Rp. 48.287.136.417**	**Rp. 350.000.000**	**Rp. 1.950.169.024**		**Rp. 50.587.305.441**	**Rp. 49.366.276.755,00**

Kota Pangkal Pinang, ...
Kepala BADAN KEUANGAN DAERAH

Dr. Muhammad Yasin, S.E., M.M.
NIP. 197311222002121006

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Pangkalpinang serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari Anggaran APBD Perubahan Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, maka penerapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran Tujuan dan Sasaran instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Pangkalpinang, Mei 2025

KEPALA BADAN KEUANG DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

DR. MUHAMMAD YASIN, S.E, M.M
PEMBINA TK 1 / IV B
NIP. 197311222002121006